PEMERINTAH
KABUPATEN
NGANJUK



LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN

2025

Bupati :
Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi., A.Md., S.E., S.H., M.M., M.Ba.

Wakil Bupati :
Trihandi Cahyo Saputro., S.T.

(0358) 321749 www.nganjukkab.go.id Jl. Basuki Rahmad No. 1 Nganjuk

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas curahan rahmat dan limpahan karunia-Nya, sehingga telah dapat disusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menyajikan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih sistematis dan akurat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2025 mencakup hasil kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Nganjuk selama periode Tahun Anggaran 2025 berdasarkan 5 (lima) kelompok utama capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu pada tataran :

1. Capaian kinerja makro;
2. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan;
3. Capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah;
4. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan; dan
5. Capaian kinerja penerapan standar pelayanan minimal.

Sebagai upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif, efisien, akuntabel dan transparan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik *(good governance)* maka laporan ini disusun dengan berdasarkan pada data statistik dasar Badan Pusat Statistik dan data statistik sektoral Perangkat Daerah dalam rangka mengetahui capaian kinerja pemerintahan daerah dan sebagai bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depannya.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2025 ini disusun semoga bermanfaat bagi semua pihak.

Nganjuk, 31 Maret 2026

BUPATI NGANJUK,

Dr. Drs. H. MARHAEN DJUMADI, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.BA.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **vi**
DAFTAR GAMBAR ..... **xi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.1.1 Penjelasan Umum 1
1.1.1.1 Undang-Undang Pembentukan Daerah 1
1.1.1.2 Data Geografis Wilayah 3
1.1.1.3 Jumlah Penduduk 10
1.1.1.4 Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan 13
1.1.1.5 Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah, dan Pegawai Pemerintahan 13
1.1.1.6 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 20
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah 34
1.1.2.1 Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah 35
1.1.2.2 Visi dan Misi Kepala Daerah 52
1.1.2.3 Program Pembangunaan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah 99
1.1.2.4 Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan 100
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal 119
1.1.3.1 Dasar Penerapan Standar Pelayanan Minimal 119
1.1.3.2 Jenis Pelayanan Dasar 120
1.1.3.3 Prinsip Penerapan SPM 122
1.1.3.4 Tahapan Penerapan SPM 123
1.1.3.5 Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar 124
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH **126**
2.1 Capaian Kinerja Makro 126
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 128
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Untuk Urusan Pemerintahan 128
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan 151
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 154

2.3.1 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja 154
2.3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Perjanjian Kinerja..... 163
2.3.3 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya 173
2.3.4 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Pembangunan Jangka Menengah 191
2.3.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai 201
2.3.6 Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja..... 212
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN 582
3.1 Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan 582
3.2 Gambaran Umum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan 583
3.3 Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan 583
3.3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Daerah 583
3.3.2 Target Kinerja 584
3.3.3 Realisasi Kinerja 585
3.4 Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Daerah..... 588
3.5 Permasalahan dan Kendala 588
3.6 Saran Tindak Lanjut..... 588
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL 589
4.1 Urusan Pendidikan 592
4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar..... 592
4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal..... 593
4.1.3 Realisasi 594
4.1.4 Alokasi Anggaran 599
4.1.5 Dukungan Personil..... 602
4.1.6 Permasalahan dan Solusi..... 602
4.2 Urusan Kesehatan 603
4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar..... 603
4.2.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah..... 604
4.2.3 Realisasi 605
4.2.4 Alokasi Anggaran 622
4.2.5 Dukungan Personil..... 624
4.2.6 Permasalahan dan Solusi..... 624

4.3 Urusan Pekerjaan Umum 625
4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar 625
4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal 626
4.3.3 Realisasi 626
4.3.4 Alokasi Anggaran 630
4.3.5 Dukungan Personil 633
4.3.6 Permasalahan dan Solusi 634
4.4 Urusan Perumahan Rakyat 635
4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar 635
4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal 636
4.4.3 Realisasi 636
4.4.4 Alokasi Anggaran 639
4.4.5 Dukungan Personil 641
4.4.6 Permasalahan dan Solusi 642
4.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Trantibum) 643
4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar 643
4.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal 644
4.5.3 Realisasi 645
4.5.4 Alokasi Anggaran 647
4.5.5 Dukungan Personil 650
4.5.6 Permasalahan dan Solusi 651
4.6 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Kebakaran) 651
4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar 651
4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal 652
4.6.3 Realisasi 653
4.6.4 Alokasi Anggaran 654
4.6.5 Dukungan Personil 656
4.6.6 Permasalahan dan Solusi 657
4.7 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Kebencanaan) 658
4.7.1 Jenis Pelayanan Dasar 658
4.7.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal 660
4.7.3 Realisasi 660

4.7.4 Alokasi Anggaran 666
4.7.5 Dukungan Personil 668
4.7.6 Permasalahan dan Solusi 669
4.8 Urusan Sosial 670
4.8.1 Jenis Pelayanan Dasar 670
4.8.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal 671
4.8.3 Realisasi 672
4.8.4 Alokasi Anggaran 677
4.8.5 Dukungan Personil 679
4.8.6 Permasalahan dan Solusi 680
4.9 Program dan Kegiatan 680
4.9.1 Bidang Pendidikan 680
4.9.2 Bidang Kesehatan 686
4.9.3 Bidang Pekerjaan Umum 705
4.9.4 Bidang Perumahan Rakyat 708
4.9.5 Bidang Trantibumlinmas 711
4.9.6 Bidang Sosial 719
BAB V PENUTUP 724

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Nganjuk 4
Tabel 1.2 Curah Hujan di Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 7
Tabel 1.3 Suhu dan Kelembapan di Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 7
Tabel 1.4 Kecepatan Angin dan Tekanan Udara di Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 8
Tabel 1.5 Jumlah Penduduk Kabupaten Nganjuk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2025 (Jiwa) 10
Tabel 1.6 Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Nganjuk Per Kecamatan Tahun 2021 – 2025 (Jiwa) 11
Tabel 1.7 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Nganjuk Per Kecamatan Tahun 2021 – 2025 (%) 12
Tabel 1.8 Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan di Kabupaten Nganjuk 13
Tabel 1.9 Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Nganjuk 14
Tabel 1.10 Jumlah ASN Menurut Jenis Jabatan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 17
Tabel 1.11 Statistik ASN Pemerintah Kabupaten Nganjuk Menurut Jenis Jabatan Tahun 2021 – 2025 19
Tabel 1.12 Statistik ASN Pemerintah Kabupaten Nganjuk Menurut Pendidikan Tahun 2021 – 2025 19
Tabel 1.13 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025 21
Tabel 1.14 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 21
Tabel 1.15 Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2025 22
Tabel 1.16 Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2025 23
Tabel 1.17 Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2025 24
Tabel 1.18 Target dan Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2025 25
Tabel 1.19 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2025 26
Tabel 1.20 Permasalahan Pencapaian Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 26
Tabel 1.21 Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2025 30
Tabel 1.22 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pencapaian Realisasi Belanja Daerah Tahun 2025 30
Tabel 1.23 Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2025 32
Tabel 1.24 Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2025 32
Tabel 1.25 Analisis Pembiayaan Daerah Tahun 2025 33

Tabel 1.26 Isu Strategis Daerah Kabupaten Nganjuk 69
Tabel 1.27 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran beserta Indikator Kinerja pada RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 – 2029 93
Tabel 1.28 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 100
Tabel 1.29 Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Nganjuk Tahun 2005 – 2025 106
Tabel 1.30 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Nganjuk Tahun 2005 – 2025 107
Tabel 1.31 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2025 112
Tabel 1.32 Penduduk Usia Kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Angkatan Kerja, Bulan Agustus 2023–Agustus 2025 116
Tabel 1.33 Nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan Berdasarkan Dimensi Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 118
Tabel 1.34 Perangkat Daerah Pengampu SPM di Lingkup Pemerintah Kabupaten Nganjuk 120
Tabel 2.1 Capaian Kinerja Makro 126
Tabel 2.2 Capaian Indikator Kinerja Kunci Untuk Urusan Pemerintahan 128
Tabel 2.3 Capaian Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan 151
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Bupati Nganjuk Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026 155
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Bupati Nganjuk Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029 158
Tabel 2.6 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Bupati Nganjuk Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026 163
Tabel 2.7 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Bupati Nganjuk Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029 169
Tabel 2.8 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Tahun 2024 dengan Tahun 2025 Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026 173
Tabel 2.9 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Tahun 2024 Dengan Tahun 2025 Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029 184

Tabel 2.10 Capaian Kinerja Tahun 2025 Dibandingkan Dengan Target Akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026 193
Tabel 2.11 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025 Dibandingkan Dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2025 – 2029 197
Tabel 2.12 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025 Dibandingkan Pencapaian Kinerja Sasaran RPD Tahun 2024 – 2026 201
Tabel 2.13 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025 Dibandingkan Pencapaian Kinerja Sasaran RPJMD Tahun 2025 – 2029 208
Tabel 2.14 Analisis Program dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja RPD Tahun 2024 – 2026 213
Tabel 2.15 Analisis Keberhasilan Program/Kegiatan Dalam Pencapaian Kinerja Sasaran Berdasarkan RPJMD Tahun 2025 – 2029 354
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pemerintah Pusat yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 586
Tabel 4.1 Perangkat Daerah Pengampu SPM di Lingkup Pemerintah Kabupaten Nganjuk 589
Tabel 4.2 Kategori Indeks Pencapaian SPM 591
Tabel 4.3 Target Pencapaian SPM Bidang Pendidikan 593
Tabel 4.4 Capaian SPM Urusan Pendidikan Atas Standar Jumlah dan Kualitas Barang/Jasa 597
Tabel 4.5 Sumber Pendanaan SPM Bidang Pendidikan 599
Tabel 4.6 Rincian Anggaran Penerapan SPM Bidang Pendidikan 599
Tabel 4.7 Data ASN Menurut Jenis Jabatan 602
Tabel 4.8 Target Pencapaian SPM Bidang Kesehatan 604
Tabel 4.9 Capaian SPM Urusan Kesehatan Atas Standar Jumlah dan Kualitas Barang/Jasa 613
Tabel 4.10 Sumber Pendanaan SPM Bidang Kesehatan 622
Tabel 4.11 Rincian Anggaran Penerapan SPM Bidang Kesehatan 623
Tabel 4.12 Data ASN Menurut Jenis Jabatan 624
Tabel 4.13 Data ASN Menurut Jenjang Pendidikan Terakhir 624
Tabel 4.14 Target Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum 626
Tabel 4.15 Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Atas Standar Jumlah dan Kualitas Barang/Jasa 628
Tabel 4.16 Sumber Pendanaan SPM Bidang Pekerjaan Umum 630
Tabel 4.17 Rincian Anggaran Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum 631

Tabel 4.18 Data ASN Menurut Jenis Jabatan 634
Tabel 4.19 Data ASN Menurut Jenjang Pendidikan Terakhir 634
Tabel 4.20 Target Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat 636
Tabel 4.21 Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Atas Standar Jumlah dan Kualitas Barang/Jasa 638
Tabel 4.22 Sumber Pendanaan SPM Bidang Perumahan Rakyat 639
Tabel 4.23 Rincian Anggaran Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat 640
Tabel 4.24 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Jabatan 642
Tabel 4.25 Jumlah Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan Terakhir 642
Tabel 4.26 Target Pencapaian SPM Sub Urusan Trantibum 645
Tabel 4.27 Capaian SPM Sub Urusan Trantibum Atas Standar Jumlah dan Kualitas Barang/Jasa 645
Tabel 4.28 Sumber Pendanaan SPM Sub Urusan Trantibum 647
Tabel 4.29 Rincian Anggaran Penerapan SPM Sub Urusan Trantibum 648
Tabel 4.30 Data ASN Menurut Jenis Jabatan 650
Tabel 4.31 Data ASN Menurut Jenjang Pendidikan Terakhir 650
Tabel 4.32 Target Pencapaian SPM Sub Urusan Kebakaran 652
Tabel 4.33 Capaian SPM Sub Urusan Kebakaran Atas Standar Jumlah dan Kualitas Barang/Jasa 653
Tabel 4.34 Sumber Pendanaan SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah 654
Tabel 4.35 Rincian Anggaran Penerapan SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah 655
Tabel 4.36 Data ASN Menurut Jenis Jabatan 656
Tabel 4.37 Data ASN Menurut Jenjang Pendidikan Terakhir 657
Tabel 4.38 Target Pencapaian SPM Sub Urusan Kebencanaan 660
Tabel 4.39 Capaian SPM Sub Urusan Kebencanaan Atas Standar Jumlah dan Kualitas Barang/Jasa 661
Tabel 4.40 Sumber Pendanaan Penerapan SPM Sub Urusan Kebencanaan 666
Tabel 4.41 Rincian Anggaran Penerapan SPM Sub Urusan Kebencanaan 666
Tabel 4.42 Data ASN Menurut Jenis Jabatan 669
Tabel 4.43 Data ASN Menurut Jenjang Pendidikan Terakhir 669
Tabel 4.44 Target Pencapaian SPM Bidang Sosial 671
Tabel 4.45 Capaian SPM Bidang Sosial Atas Standar Jumlah dan Kualitas Barang/Jasa. 673
Tabel 4.46 Sumber Pendanaan Penerapan SPM Bidang Sosial 677
Tabel 4.47 Rincian Anggaran Penerapan SPM Bidang Sosial 678
Tabel 4.48 Data ASN Menurut Jenis Jabatan 679

Tabel 4.49 Data ASN Menurut Jenjang Pendidikan Terakhir 679
Tabel 4.50 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Pendidikan..... 680
Tabel 4.51 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan SPM Bidang Kesehatan..... 686
Tabel 4.52 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan SPM Bidang Pekerjaan Umum..... 705
Tabel 4.53 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan SPM Bidang Perumahan Rakyat 708
Tabel 4.54 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan SPM Bidang Trantibumlinmas (Ketentraman dan Ketertiban)..... 711
Tabel 4.55 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan SPM Bidang Trantibumlinmas (Kebencanaan)..... 714
Tabel 4.56 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan SPM Bidang Trantibumlinmas (Kebakaran)..... 716
Tabel 4.57 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan SPM Bidang Sosial..... 719

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Nganjuk 4
Gambar 1.2 Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2025-2029 99
Gambar 1.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Nganjuk Tahun 2021–2025 102
Gambar 1.4 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025..... 105
Gambar 1.5 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2025 110
Gambar 1.6 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2025 115

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.1.1 Penjelasan Umum

1.1.1.1 Undang-Undang Pembentukan Daerah

Sebagai suatu wilayah pemerintahan daerah, Kabupaten Nganjuk dibentuk dan ditetapkan sebagai daerah otonom di lingkup wilayah Provinsi Jawa Timur sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Selanjutnya berdasarkan pasal 69 dan pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewajiban Kepala Daerah yang harus dilaksanakan ialah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berdasarkan hal tersebut, maka Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2025 ini disusun.

Pengaturan lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, ruang lingkup laporan ini meliputi : (1) capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dan capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah, (2) capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan, dan (3) laporan penerapan standar pelayanan minimal.

Dalam penyusunan dan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2025, sejumlah aturan perundang-undangan digunakan sebagai landasan yakni :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Nganjuk; dan
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk.

1.1.1.2 Data Geografis Wilayah

a. Letak Geografis

Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu kabupaten yang terletak di bagian barat Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, Kabupaten Nganjuk terletak pada koordinat 111º5’ sampai dengan 112º13’ Bujur Timur dan 7º20’ sampai dengan 7º50’ Lintang Selatan. Berdasarkan aspek fungsional, Kabupaten Nganjuk memiliki luas wilayah sebesar 128.822 Ha dan tidak berbatasan dengan tepi laut. Batas-batas administrasi Kabupaten Nganjuk sebagai berikut :

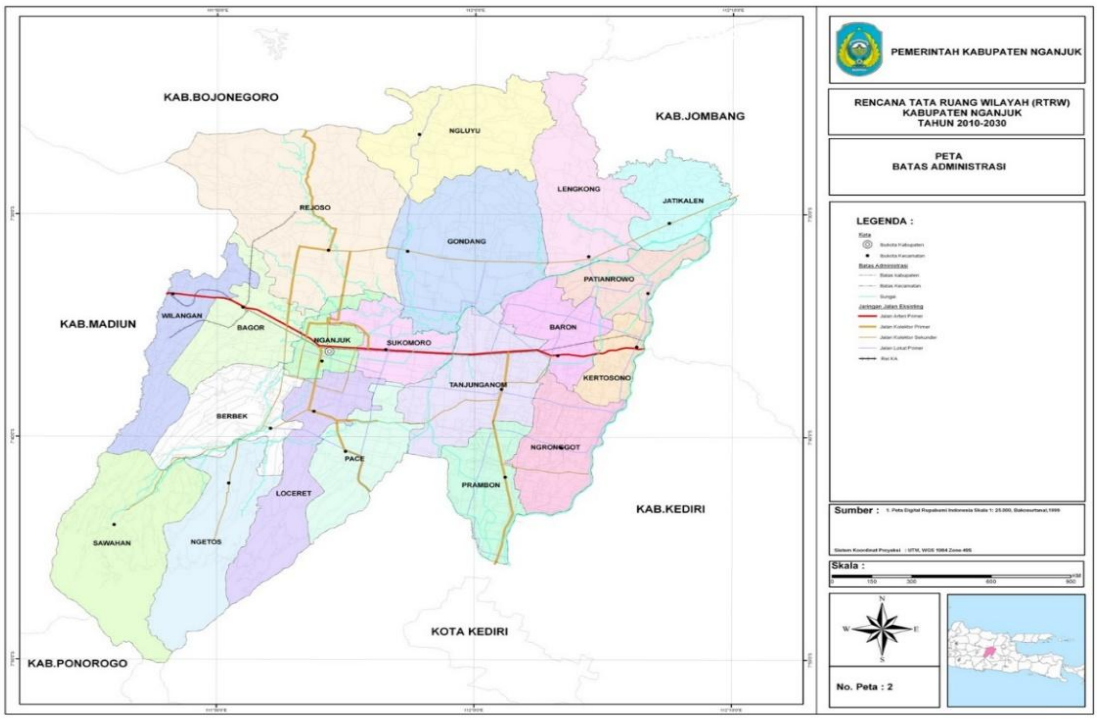
Sebelah utara	:	berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro
Sebelah selatan	:	berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Tulungagung

Sebelah timur : berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Kediri

Sebelah barat : berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Madiun

Kabupaten Nganjuk terdiri atas 20 Kecamatan, 20 Kelurahan, dan 264 Desa. Wilayah kecamatan paling luas adalah Kecamatan Rejoso dengan luas wilayah 15.682,30 Ha atau sebesar 12,65% dari total luas wilayah kabupaten. Sedangkan wilayah kecamatan terkecil adalah Kecamatan Nganjuk dan Kecamatan Kertosono dengan luas wilayah 2.348,67 Ha dan 2.479,44 Ha.

Gambar 1.1
Peta Administrasi Kabupaten Nganjuk



Secara rinci, luas wilayah Kabupaten Nganjuk per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Nganjuk

No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Luas (Ha)	Persentase Terhadap Luas Kabupaten (%)
1	Sawahan	9	11.138,19	8,56
2	Ngetos	9	7.840,74	6,22
3	Berbek	19	5.748,45	4,30
4	Loceret	22	6.865,27	5,31

No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Luas (Ha)	Persentase Terhadap Luas Kabupaten (%)
5	P a c e	18	5.104,62	4,03
6	Tanjunganom	16	7.553,79	6,01
7	Prambon	14	4.494,18	3,42
8	Ngronggot	13	5.294,03	4,13
9	Kertosono	14	2.479,44	1,93
10	Patianrowo	11	3.513,80	2,74
11	Baron	11	4.004,52	2,87
12	Gondang	17	11.418,18	8,75
13	Sukomoro	12	3.752,74	2,90
14	Nganjuk	15	2.348,67	1,90
15	Bagor	21	5.434,51	4,18
16	Wilangan	6	5.143,54	4,05
17	Rejoso	24	15.682,30	12,65
18	Ngluyu	6	8.977,29	6,66
19	Lengkong	16	7.199,36	5,89
20	Jatikalen	11	4.828,39	3,51
TOTAL		**284**	**128.822,00**	**100,00**

Sumber data : Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041

Kabupaten Nganjuk memiliki posisi strategis sebagai simpul konektivitas regional di Jawa Timur bagian barat, karena dilalui jaringan jalan tol Trans-Jawa, jalur arteri nasional, serta rel kereta api lintas barat–timur. Hal ini menjadikan Nganjuk sebagai gateway pergerakan barang dan manusia antara Madiun–Solo di sisi barat dengan Kediri–Jombang–Surabaya di sisi timur, sekaligus menghubungkan akses ke Bojonegoro di utara serta Tulungagung dan Ponorogo di selatan. Keberadaan Kabupaten Nganjuk juga semakin penting sebagai hinterland Bandara Dhoho Kediri, sehingga berfungsi sebagai pusat logistik, warehousing, dan *park and ride* bagi mobilitas penumpang maupun kargo lintas kabupaten.

Dalam bidang ekonomi, Kabupaten Nganjuk dikenal sebagai salah satu lumbung pangan dan hortikultura utama di Jawa Timur, khususnya padi dan bawang merah. Produksi dalam skala besar ini berperan penting dalam menjamin pasokan pangan bagi kabupaten sekitar seperti Jombang, Kediri, dan Madiun, sekaligus menopang rantai pasok agroindustri hingga Bojonegoro dan Tulungagung. Keunggulan tersebut menjadikan Nganjuk berkontribusi pada stabilisasi harga dan penyediaan stok pangan regional, terutama untuk komoditas strategis yang rentan terhadap fluktuasi musiman. Potensi pengembangan agroindustri, cold chain, serta pusat distribusi berbasis

hortikultura menjadikan Nganjuk sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang memberi nilai tambah lintas kabupaten.

Dari perspektif lingkungan dan tata air, Kabupaten Nganjuk memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan air dan mengurangi risiko bencana. Keberadaan bendungan, jaringan irigasi, dan daerah aliran sungai di wilayah pegunungan Wilis Liman berfungsi tidak hanya untuk mendukung produktivitas pertanian di Nganjuk, tetapi juga untuk memasok kebutuhan air bagi sebagian wilayah Kediri dan Jombang. Selain itu, fungsi tata air ini berkontribusi pada pengendalian banjir dan kekeringan yang berdampak ke wilayah sekitarnya, sekaligus menyimpan potensi pengembangan energi mikrohidro dan ekowisata berbasis waduk.

Dalam konteks industri dan jasa, posisi geografis yang strategis dan biaya lahan yang relatif lebih kompetitif menjadikan Nganjuk ideal sebagai pusat *distribution center* dan *cross-docking* yang melayani Kediri, Jombang, Madiun, hingga Bojonegoro. Sektor UMKM, industri kemasan, dan pengolahan hasil pertanian berkembang pesat dan mampu menciptakan integrasi ekonomi dengan pasar di kabupaten sekitar. Di samping itu, Nganjuk juga berperan sebagai pusat layanan menengah untuk kesehatan, pendidikan vokasi, dan jasa keuangan yang melengkapi layanan sekunder di wilayah sekitar. Di bidang pariwisata, Nganjuk berfungsi sebagai pintu gerbang menuju destinasi wisata pegunungan Wilis–Liman bersama Kediri, Madiun, dan Ponorogo, serta menjadi jalur penghubung menuju wisata pantai selatan di Tulungagung. Potensi wisata agribisnis, desa wisata, serta event budaya agraris di Nganjuk mampu menjadi magnet wisata yang memperpanjang *length of stay* wisatawan di kawasan ini. Sementara itu, pada aspek sosial-ekonomi, Nganjuk juga berperan sebagai *commuter belt regional*, di mana biaya hidup dan perumahan yang lebih terjangkau menjadikan wilayah ini sebagai lokasi domisili pekerja yang beraktivitas di Kediri, Jombang, dan Madiun.

Secara keseluruhan, Kabupaten Nganjuk dapat diposisikan sebagai hub logistik, agroindustri, dan tata air yang menyatukan arus barang, jasa, dan manusia antarwilayah Jombang, Kediri, Madiun, Tulungagung, Ponorogo, dan Bojonegoro. Peran strategis ini, apabila diperkuat dengan pengembangan konektivitas multimoda, klaster agro bernilai tambah, serta pengelolaan air lintas daerah, akan menghasilkan dampak pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan bagi subkawasan Jawa Timur bagian barat.

b. Klimatologi dan Hidrologi

Seperti halnya daerah lain yang berada di sekitar garis khatulistiwa, Kabupaten Nganjuk beriklim tropis dan memiliki 2 (dua) musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Di tahun 2025, Kabupaten Nganjuk mengalami musim penghujan pada bulan Januari hingga bulan Juni, musim kemarau pada bulan Juli hingga bulan September, dan kembali mengalami musim penghujan pada bulan Oktober hingga bulan Desember. Hal ini dapat diketahui dengan melihat jumlah curah hujan yang terjadi sepanjang tahun. Rincian terkait jumlah curah hujan dan jumlah hari hujan yang terjadi selama tahun 2025 tersaji pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Curah Hujan di Kabupaten Nganjuk Tahun 2025

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm/tahun)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Penyinaran Matahari (jam)
Januari	649,30	24	2,3
Februari	246,30	22	3,1
Maret	679,10	25	3,9
April	450,50	19	5,4
Mei	517,70	21	5,0
Juni	197,10	9	6,1
Juli	59,00	3	7,1
Agustus	84,90	7	7,8
September	8,30	4	7,0
Oktober	321,90	13	6,4
November	394,40	21	3,4
Desember	248,50	19	3,8

Sumber data : Badan Pusat Statistik

Tabel 1.3
Suhu dan Kelembapan di Kabupaten Nganjuk Tahun 2025

Bulan	Suhu/Temperatur (°C)			Kelembaban (%)		
	Minimum	Rata-Rata	Maksimum	Minimum	Rata-Rata	Maksimum
Januari	18,60	24,55	30,00	59,00	87,88	100,00
Februari	19,00	24,66	30,00	65,00	86,89	100,00
Maret	20,00	25,30	30,00	59,00	84,30	98,00
April	20,20	25,65	30,20	56,00	82,69	100,00
Mei	21,00	25,48	30,80	65,00	85,84	100,00
Juni	20,00	25,75	30,10	63,00	81,19	98,00
Juli	17,80	25,55	30,20	46,00	76,91	97,00

Bulan	Suhu/Temperatur (°C)			Kelembaban (%)		
	Minimum	Rata-Rata	Maksimum	Minimum	Rata-Rata	Maksimum
Agustus	17,00	25,98	30,80	53,00	73,13	98,00
September	18,00	26,81	32,00	50,00	70,77	94,00
Oktober	17,00	26,69	32,80	55,00	82,56	99,00
November	20,00	25,13	30,40	72,00	91,04	100,00
Desember	20,00	25,42	30,80	69,00	88,91	100,00

Sumber data : Badan Pusat Statistik

Tabel 1.4
Kecepatan Angin dan Tekanan Udara di Kabupaten Nganjuk Tahun 2025

Bulan	Kecepatan Angin (m/det)			Tekanan Udara (mb)		
	Minimum	Rata-Rata	Maksimum	Minimum	Rata-Rata	Maksimum
Januari	0,00	2,43	11,00	928,90	932,98	936,80
Februari	1,00	2,83	10,00	928,80	933,86	938,60
Maret	0,00	2,55	10,00	929,10	933,38	937,80
April	0,00	2,07	8,00	931,00	934,35	964,40
Mei	0,00	1,97	8,00	930,40	934,06	993,40
Juni	0,00	1,93	8,00	931,60	935,23	949,90
Juli	0,00	2,22	27,00	931,50	934,90	938,70
Agustus	0,00	2,81	12,00	932,10	935,26	938,00
September	0,00	2,73	20,00	931,90	935,19	937,80
Oktober	0,00	2,35	10,00	929,00	934,50	939,40
November	0,00	1,99	24,00	930,20	933,77	937,70
Desember	0,00	2,05	10,00	929,50	932,99	938,60

Sumber data : Badan Pusat Statistik

c. Topografi

Topografi wilayah menjadi salah satu pertimbangan untuk melihat kesesuaian penggunaan lahan. Berdasarkan data dari Badan Informasi Geospasial (BIG) yang dikompilasikan dengan citra spot 7 path/row, menunjukkan wilayah Kabupaten Nganjuk merupakan daratan yang memiliki kontur datar, bergelombang dan berbukit. Klasifikasi ketinggian di Kabupaten Nganjuk terdiri atas 37-50 mdpl, 50-100 mdpl, 100-150 mdpl, 150-250 mdpl, 250-350 mdpl, 350-450 mdpl, 450-600 mdpl, 600-750 mdpl, 750-950 mdpl, 950 1.150 mdpl, 1.150-1.400 mdpl, 1.400-1.650 mdpl, 1.650-2.000 mdpl dan >2.000 mdpl. Kabupaten Nganjuk didominasi oleh jenis klasifikasi ketinggian 50-100 mdpl sebesar 37% atau seluas 47.977,58 Ha. Kondisi luasan topografi tersebut tersebar ke seluruh wilayah dengan rincian sebagai berikut :

a. Kondisi wilayah yang berada di ketinggian 25 – 100 meter di atas permukaan air laut dengan luas wilayah sekitar 798,670 km^2 atau 62% dari seluruh luas wilayah. Wilayah kecamatan yang berada pada ketinggian ini sebanyak 15 kecamatan, yaitu Kecamatan Wilangan, Bagor, Nganjuk, Sukomoro, Rejoso, Gondang, Loceret, Pace, Tanjunganom, Prambon, Ngronggot, Kertosono, Patianrowo, Lengkong, dan Kecamatan Jatikalen.
b. Kondisi wilayah yang berada di ketinggian 100 – 1.000 meter di atas permukaan air laut dengan luas wilayah sekitar 437,99 km^2 atau 34,05% dari seluruh luas wilayah. Wilayah kecamatan yang berada pada ketinggian ini sebanyak 11 kecamatan, yaitu Kecamatan Ngluyu, Lengkong, Gondang, Rejoso, Wilangan, Bagor, Berbek, Ngetos, Pace, Sawahan, dan Kecamatan Loceret. Adapun wilayah Kecamatan Rejoso, Ngluyu, Gondang, Jatikalen berada di bagian utara Kabupaten Nganjuk merupakan daerah pegunungan (Pegunungan Kendeng) dengan ketinggian 60-897 mdpl, yang merupakan daerah hutan jati, lahan potensial untuk tanaman tembakau, bahan galian kapur, hutan produksi, dan hutan lindung. Sedangkan wilayah Kecamatan Ngetos, Sawahan, Berbek, Loceret, Pace, dan Wilangan berada di sebelah selatan dan barat wilayah Kabupaten Nganjuk berada di lereng Gunung Wilis potensial untuk tanaman perkebunan, hortikultura, hutan produksi dan hutan lindung.
c. Wilayah dengan ketinggian lebih dari 1.000 meter di atas permukaan air laut dengan luas wilayah 631,23 km^2 atau 4,89% dari luas wilayah terdiri atas 2 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Sawahan dan Kecamatan Ngetos. Wilayah ini berada di bagian Selatan Kabupaten Nganjuk merupakan daerah pegunungan (Gunung Wilis) dengan ketinggian 1.000 sampai dengan 2.563 mdpl, potensial untuk hutan produksi dan hutan lindung. Terdapat enam kecamatan yang memiliki dua jenis topografi yaitu berada pada ketinggian 25 – 100 meter dpl dan 100 – 1.000 meter dpl. Keenam kecamatan tersebut yaitu: Kecamatan Lengkong, Rejoso, Wilangan, Bagor, Pace, dan Loceret.

Selain dikelompokkan dari kondisi konturnya, wilayah Kabupaten Nganjuk juga terbagi menurut tingkat kelerengannya, yaitu:

a. Wilayah dengan kelerengan antara 0% – 2%, luasnya meliputi 52,95% dari luas wilayah Kabupaten Nganjuk yang tersebar di hampir seluruh wilayah. Wilayah ini cukup baik untuk kegiatan budidaya berupa pertanian maupun untuk kegiatan permukiman.

b. Wilayah dengan kelerengan 2% – 15%, luasnya meliputi 29,86% dari seluruh luas wilayah kabupaten dan tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Wilayah ini cukup sesuai untuk kegiatan pertanian dan permukiman.
c. Wilayah dengan kelerengan 15% – 40%, luasnya meliputi 10,50% dari luas wilayah kabupaten yang tersebar di Kecamatan Ngetos, Sawahan, Berbek, Loceret, Wilangan, Rejoso, Gondang, Ngluyu dan Lengkong. Wilayah ini sesuai untuk kegiatan pertanian tanaman tahunan/tanaman keras.
d. Wilayah dengan kelerengan > 40%, luasnya meliputi sekitar 6,68% dari luas wilayah kabupaten yang tersebar di Kecamatan Sawahan, Ngetos, Wilangan dan Ngluyu. Merupakan wilayah yang seharusnya dihutankan karena merupakan kawasan penyangga tanah, air dan menjaga keseimbangan ekosistem.

1.1.1.3 Jumlah Penduduk

Karakteristik penduduk menurut umur dan jenis kelamin berguna dalam membantu menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk sesuai dengan kebutuhan kelompok umur masing-masing, baik kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan lain sebagainya. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk, jumlah penduduk Kabupaten Nganjuk pada Tahun 2025 mencapai 1.157.518 jiwa, yang terdiri atas 581.505 penduduk laki-laki dan 576.013 penduduk perempuan. Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk pada Tahun 2024 yang mencapai 1.152.575 jiwa, maka dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan jumlah penduduk sebesar 4.943 jiwa.

Tabel 1.5
Jumlah Penduduk Kabupaten Nganjuk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2025 (Jiwa)

No	Kecamatan	Penduduk Laki-Laki	Penduduk Perempuan	Jumlah Penduduk
1	Sawahan	20.364	20.189	40.553
2	Ngetos	20.137	20.000	40.137
3	Berbek	31.044	30.221	61.265
4	Loceret	39.687	39.541	79.228
5	Pace	35.156	34.404	69.560
6	Prambon	38.100	37.726	75.826
7	Ngronggot	44.440	43.293	87.733
8	Kertosono	28.771	28.749	57.520
9	Patianrowo	23.534	23.009	46.543
10	Baron	28.776	28.058	56.834
11	Tanjunganom	61.322	60.874	122.196

No	Kecamatan	Penduduk Laki-Laki	Penduduk Perempuan	Jumlah Penduduk
12	Sukomoro	24.598	24.382	48.980
13	Nganjuk	35.381	35.968	71.349
14	Bagor	32.240	32.265	64.505
15	Wilangan	15.928	15.899	31.827
16	Rejoso	37.344	37.186	74.530
17	Gondang	29.257	29.033	58.290
18	Ngluyu	7.313	7.321	14.634
19	Lengkong	17.441	17.263	34.704
20	Jatikalen	10.672	10.632	21.304
TOTAL		**581.505**	**576.013**	**1.157.518**

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk

Tabel 1.6
Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Nganjuk Per Kecamatan Tahun 2021-2025 (Jiwa)

No	Kecamatan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Sawahan	39.515	39.572	39.705	40.357	40.553
2	Ngetos	38.835	38.910	39.200	39.969	40.137
3	Berbek	60.484	60.606	60.131	61.039	61.265
4	Loceret	77.084	77.114	77.914	78.707	79.228
5	Pace	67.900	67.986	68.435	69.162	69.560
6	Prambon	74.020	74.207	74.725	75.668	75.826
7	Ngronggot	85.591	85.832	86.066	87.140	87.733
8	Kertosono	56.633	56.727	56.925	57.286	57.520
9	Patianrowo	45.601	45.558	45.902	46.360	46.543
10	Baron	55.262	55.341	56.024	56.615	56.834
11	Tanjunganom	119.916	119.998	120.687	121.714	122.196
12	Sukomoro	47.527	47.567	48.204	48.833	48.980
13	Nganjuk	69.753	69.608	70.283	71.074	71.349
14	Bagor	62.898	62.918	63.497	64.188	64.505
15	Wilangan	31.081	31.146	31.331	31.736	31.827
16	Rejoso	73.336	73.399	73.668	74.302	74.530
17	Gondang	56.289	56.435	57.155	57.933	58.290
18	Ngluyu	14.372	14.400	14.480	14.583	14.634
19	Lengkong	33.833	33.895	34.139	34.620	34.704
20	Jatikalen	20.980	21.000	21.146	21.289	21.304
	TOTAL	**1.130.910**	**1.132.219**	**1.139.617**	**1.152.575**	**1.157.518**

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk

Tabel 1.7
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Nganjuk Per Kecamatan Tahun 2021-2025

No	Kecamatan	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Sawahan	1.74	0.55	0.33	0.16	0.77
2	Ngetos	2.50	0.80	0.74	0.19	1.03
3	Berbek	0.34	0.77	0.79	0.15	0.22
4	Loceret	0.54	0.73	1.03	0.10	0.51
5	Pace	0.61	0.91	0.66	0.10	0.51
6	Tanjunganom	0.57	0.59	0.69	0.12	0.39
7	Prambon	0.93	0.45	0.27	0.12	0.62
8	Ngronggot	1.90	0.84	0.35	0.63	0.72
9	Kertosono	-0.28	0.54	0.75	0.99	0.15
10	Patianrowo	-0.02	0.66	1.22	0.10	0.32
11	Baron	0.62	1.01	0.57	0.85	0.59
12	Gondang	0.27	0.79	1.32	0.13	0.65
13	Sukomoro	-0.31	0.85	0.96	0.11	0.48
14	Nganjuk	-0.59	0.31	0.91	0.10	0.34
15	Bagor	-0.50	0.59	0.59	0.12	0.29
16	Wilangan	0.96	0.99	0.37	0.86	0.58
17	Rejoso	0.49	0.60	1.26	0.13	0.36
18	Ngluyu	0.80	0.19	0.55	0.71	0.46
19	Lengkong	-0.36	0.40	0.71	0.14	0.35
20	Jatikalen	-0.65	0.14	0.69	0.67	0.15
TOTAL		**0.50**	**0.66**	**0.65**	**0.11**	**0.47**

Sumber data : Badan Pusat Statistik

Ditinjau dari laju pertumbuhan penduduk dalam lima tahun terakhir, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Nganjuk pada Tahun 2024 tercatat sebesar 0,11 persen atau turun 0,54 persen bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2015, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Nganjuk naik sebesar 0,36 persen menjadi 0,47 persen.

1.1.1.4 Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Secara administratif Kabupaten Nganjuk terbagi atas 20 Kecamatan yang meliputi 264 Desa dan 20 Kelurahan. Rincian jumlah desa dan kelurahan pada masing-masing kecamatan tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 1.8
Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan di Kabupaten Nganjuk

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Jumlah
1	Bagor	19	2	21
2	Jatikalen	11	-	11
3	Kertosono	13	1	14
4	Lengkong	16	-	16
5	Loceret	22	-	22
6	Nganjuk	2	13	15
7	Ngetos	9	-	9
8	Ngluyu	6	-	6
9	Ngronggot	13	-	13
10	Pace	18	-	18
11	Patianrowo	11	-	11
12	Prambon	14	-	14
13	Rejoso	24	-	24
14	Sawahan	9	-	9
15	Sukomoro	10	2	12
16	Tanjunganom	14	2	16
17	Wilangan	6	-	6
18	Baron	11	-	11
19	Berbek	19	-	19
20	Gondang	17	-	17
TOTAL		**264**	**20**	**284**

1.1.1.5 Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah, dan Pegawai Pemerintahan

Dalam menjalankan roda Pemerintahan Daerah Kabupaten Nganjuk, maka dibentuk Perangkat Daerah yang memiliki 3 tujuan mendasar yaitu, (1) untuk mewujudkan tujuan pemberian otonomi, (2) untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu, dan (3) untuk melaksanakan pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah memiliki beberapa tugas yaitu membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif

(Sekretariat Daerah), menyelenggarakan administrasi yang mendukung tugas dan fungsi DPRD (Sekretariat DPRD), membantu Kepala Daerah membina dan mengawasi pelaksanaan oleh perangkat daerah (Inspektorat), melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah (Dinas) dan untuk melaksanakan fungsi penunjang (Badan).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, berikut adalah Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Nganjuk :

Tabel 1.9
Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Nganjuk

No.	Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan	Klasifikasi Beban Kerja
1.	Sekretariat Daerah	Urusan Kesekretariatan Daerah	Tipe A
2.	Sekretariat DPRD	Urusan Kesekretariatan DPRD	Tipe A
3.	Inspektorat Daerah	Urusan Pengawasan	Tipe A
4.	Dinas Pendidikan	Urusan Pendidikan	Tipe A
5.	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Urusan Kebudayaan, Urusan Pariwisata	Tipe A
6.	Dinas Kesehatan	Urusan Kesehatan	Tipe A
7.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tipe A
8.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tipe A
9.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tipe A
10.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tipe A
11.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Urusan Penanaman Modal	Tipe A
12.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Urusan Perindustrian, Urusan Perdagangan	Tipe A
13.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Urusan Koperasi dan Usaha Mikro	Tipe B

No.	Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan	Klasifikasi Beban Kerja
14.	Dinas Tenaga Kerja	Urusan Tenaga Kerja, Sub Urusan Transmigrasi	Tipe A
15.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Persandian, Urusan Statistik	Tipe B
16.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tipe A
17.	Dinas Perhubungan	Urusan Perhubungan	Tipe B
18.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Urusan Pertanahan	Tipe B
19.	Dinas Lingkungan Hidup	Urusan Lingkungan Hidup	Tipe B
20.	Dinas Pertanian	Urusan Pertanian	Tipe A
21.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Urusan Pangan, Urusan Perikanan	Tipe A
22.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Urusan Kearsipan, Urusan Perpustakaan	Tipe B
23.	Satuan Polisi Pamong Praja	Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Trantibum)	Tipe B
24.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Kebakaran)	Tipe C
25.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Fungsi Penunjang (Penelitian dan Pengembangan)	Tipe A
26.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Fungsi Penunjang (Pengelolaan Keuangan)	Tipe A
27.	Badan Pendapatan Daerah	Fungsi Penunjang (Keuangan)	Tipe B
28.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Fungsi Penunjang (Kepegawaian)	Tipe A
29.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Kebencanaan)	
30.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Fungsi Penunjang (Kesbangpol)	
31.	RSUD Nganjuk	Urusan Kesehatan	
32.	RSUD Kertosono	Urusan Kesehatan	
33.	Kecamatan Nganjuk	Urusan Kewilayahan	Tipe A
	Kelurahan Payaman	Urusan Kewilayahan	
	Kelurahan Kartoharjo	Urusan Kewilayahan	
	Kelurahan Kauman	Urusan Kewilayahan	
	Kelurahan Ringinanom	Urusan Kewilayahan	
	Kelurahan Begadung	Urusan Kewilayahan	

No.	Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan	Klasifikasi Beban Kerja
	Kelurahan Cangkringan	Urusan Kewilayahan	
	Kelurahan Bogo	Urusan Kewilayahan	
	Kelurahan Ploso	Urusan Kewilayahan	
	Kelurahan Ganung Kidul	Urusan Kewilayahan	
	Kelurahan Mangundikaran	Urusan Kewilayahan	
	Kelurahan Werungotok	Urusan Kewilayahan	
	Kelurahan Kramat	Urusan Kewilayahan	
	Kelurahan Jatirejo	Urusan Kewilayahan	
34.	Kecamatan Bagor	Urusan Kewilayahan	Tipe A
	Kelurahan Kedondong	Urusan Kewilayahan	
	Kelurahan Guyangan	Urusan Kewilayahan	
35.	Kecamatan Rejoso	Urusan Kewilayahan	Tipe A
36.	Kecamatan Sukomoro	Urusan Kewilayahan	Tipe A
	Kelurahan Kapas	Urusan Kewilayahan	
	Kelurahan Sukomoro	Urusan Kewilayahan	
37.	Kecamatan Pace	Urusan Kewilayahan	Tipe A
38.	Kecamatan Tanjunganom	Urusan Kewilayahan	Tipe A
	Kelurahan Warujayeng	Urusan Kewilayahan	
	Kelurahan Tanjunganom	Urusan Kewilayahan	
39.	Kecamatan Kertosono	Urusan Kewilayahan	Tipe A
	Kelurahan Banaran	Urusan Kewilayahan	
40.	Kecamatan Prambon	Urusan Kewilayahan	Tipe A
41.	Kecamatan Berbek	Urusan Kewilayahan	Tipe A
42.	Kecamatan Loceret	Urusan Kewilayahan	Tipe A
44.	Kecamatan Ngronggot	Urusan Kewilayahan	Tipe A
45.	Kecamatan Lengkong	Urusan Kewilayahan	Tipe A
46.	Kecamatan Patianrowo	Urusan Kewilayahan	Tipe A
47.	Kecamatan Gondang	Urusan Kewilayahan	Tipe A
48.	Kecamatan Baron	Urusan Kewilayahan	Tipe A
49.	Kecamatan Wilangan	Urusan Kewilayahan	Tipe A
50.	Kecamatan Ngluyu	Urusan Kewilayahan	Tipe A
51	Kecamatan Ngetos	Urusan Kewilayahan	Tipe A
52.	Kecamatan Sawahan	Urusan Kewilayahan	Tipe A
53.	Kecamatan Jatikalen	Urusan Kewilayahan	Tipe A

Sumber daya manusia merupakan bagian terpenting dalam pelaksanaan fungsi dan tugas suatu instansi. Fungsi penting dari manajemen sumber daya manusia dalam mencapai tujuan-tujuan strategisnya adalah kecukupan jumlah personel dan kualitas yang baik. Pengelolaan aspek manajemen sumber daya manusia dalam sebuah instansi perlu memenuhi kebutuhan tersebut, maka harus didukung oleh sistem informasi kepegawaian yang baik. Informasi manajemen yang berfungsi untuk mengelola data, manajemen dan administrasi kepegawaian sebuah instansi.

Pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya perlu didukung oleh Aparatur Sipil Negara sebagai aparatur pelayanan publik. Peningkatan kualitas pembangunan,

kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik perlu didukung oleh jumlah ASN yang memiliki kompetensi dan berkualitas. Analisa terkait kebutuhan dan kualitas ASN selaku pelayan publik harus dioptimalkan sebagai bagian dari pendukung utama kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Jumlah ASN Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.10
Jumlah ASN Menurut Jenis Jabatan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025

No	Perangkat Daerah/Kecamatan	ASN			Jumlah
		Struktural	Fungsional	Pelaksana	
1	Sekretariat Daerah	19	36	57	112
2	Sekretariat DPRD	6	5	17	28
3	Inspektorat Daerah	6	35	3	44
4	Dinas Pendidikan	6	6.593	498	7.097
5	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	7	9	19	35
6	Dinas Kesehatan	8	1.008	79	1.095
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuaan dan Perlindungan Anak	6	7	7	20
8	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5	8	11	24
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6	4	15	25
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6	11	14	31
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2	7	6	15
12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6	14	44	64
13	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	5	4	11	20
14	Dinas Tenaga Kerja	6	6	5	17
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	7	24	4	35
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	22	11	120	153
17	Dinas Perhubungan	6	15	38	59
18	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	5	9	18	32
19	Dinas Lingkungan Hidup	6	7	75	88
20	Dinas Pertanian	9	168	30	207

No	Perangkat Daerah/Kecamatan	ASN			Jumlah
		Struktural	Fungsional	Pelaksana	
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	6	7	9	22
22	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	5	12	7	24
23	Satuan Polisi Pamong Praja	4	6	40	50
24	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	5	24	7	36
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6	12	10	28
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	7	7	28	42
27	Badan Pendapatan Daerah	6	3	25	34
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5	10	17	32
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	5	6	16
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6	5	6	17
31	Rumah Sakit Daerah Nganjuk	7	613	45	665
32	Rumah Sakit Daerah Kertosono	14	364	40	418
33	Kecamatan Nganjuk	54	0	54	108
34	Kecamatan Bagor	9	0	11	20
35	Kecamatan Rejoso	5	0	12	17
36	Kecamatan Sukomoro	15	0	12	27
37	Kecamatan Pace	7	0	11	18
38	Kecamatan Tanjunganom	13	0	19	32
39	Kecamatan Kertosono	11	0	16	27
40	Kecamatan Prambon	7	0	5	12
41	Kecamatan Berbek	5	0	9	14
42	Kecamatan Loceret	6	0	9	15
43	Kecamatan Ngronggot	7	0	4	11
44	Kecamatan Lengkong	3	0	6	9
45	Kecamatan Patianrowo	5	0	8	13
46	Kecamatan Gondang	6	0	6	12
47	Kecamatan Baron	6	0	11	17
48	Kecamatan Wilangan	7	0	6	13
49	Kecamatan Ngluyu	6	0	5	11
50	Kecamatan Ngetos	6	0	5	11
51	Kecamatan Sawahan	7	0	11	18
52	Kecamatan Jatikalen	5	0	3	8
TOTAL		**415**	**9.049**	**1.534**	**10.998**

Sumber data : BKPSDM Kab. Nganjuk

Tabel 1.11
Statistik ASN Pemerintah Kabupaten Nganjuk Menurut Jenis Jabatan
Tahun 2021– 2025

No.	Jenis Jabatan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Struktural	615	372	623	430	415
2.	Fungsional Umum	2.617	2.610	2.087	1.149	995
3.	Fungsional Pendidikan	3.167	3.077	3.343	3.664	3233
4.	Fungsional Kesehatan	2.189	1.974	1.281	1.435	1392
5.	Fungsional Lainnya	99	102	216	356	417
6	PPPK	-	-	-	4.399	4.546
Jumlah ASN		**8.687**	**8.135**	**7.550**	**11.433**	**10.998**

Sumber data : BKPSDM Kab. Nganjuk

Pada tabel di atas, terlihat bahwa komposisi pegawai ASN di Kabupaten Nganjuk pada tahun 2025 sebagian besar didominasi oleh PPPK dan diikuti dengan fungsional pendidikan. Bila jumlah ASN pada tahun 2025 dibandingkan dengan jumlah ASN pada tahun 2024, terjadi penurunan sebanyak 435 orang dikarenakan sudah memasuki masa purna tugas/pensiun. Namun hal ini diharapkan tidak berdampak negatif terhadap kinerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk.

Tabel 1.12
Statistik ASN Pemerintah Kabupaten Nganjuk Menurut Pendidikan
Tahun 2021 – 2025

No.	Pendidikan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	SD	66	57	43	37	57
2.	SLTP	130	101	84	85	72
3.	SLTA	1.171	893	775	1.016	1.024
4.	D-I	7	7	7	2	8
5.	D-II	91	91	55	65	37
6.	D-III	1.026	1.113	1.076	1.420	1.180
7.	D-IV	153	153	146	184	265
8.	S1	5.607	5.300	4.875	8.053	7.746
9.	S2	432	416	486	568	605
10.	S3	4	4	3	3	4
Jumlah ASN		**8.687**	**8.135**	**7.550**	**11.433**	**10.998**

Sumber data : BKPSDM Kab. Nganjuk

1.1.1.6 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

A. Realisasi Menurut Jenis Pendapatan

Perencanaan pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2025 di samping mempertimbangkan realisasi pendapatan tahun sebelumnya, kebijakan makro ekonomi daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah juga memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

1) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah, sesuai maksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2) Kebijakan fiskal nasional, sesuai maksud Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3) Insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi yang diberikan atas permohonan wajib pajak dan wajib retribusi atau diberikan secara jabatan oleh kepala daerah berdasarkan pertimbangan, antara lain:
    a. kemampuan membayar wajib pajak dan wajib retribusi;
    b. kondisi tertentu objek pajak, seperti objek pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh wajib pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak;
    c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
    d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
    e. untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional, sesuai maksud Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.
4) Adanya permasalahan/kendala yang berpengaruh terhadap masing-masing jenis penerimaan daerah.

Perencanaan Pendapatan Asli Daerah khusus pajak daerah dan retribusi daerah pada Tahun 2025 sudah mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan Tertentu serta Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

Tabel 1.13
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang	%
1	2	3	4	5= (4-3)	6= (4/3)*100
4	PENDAPATAN DAERAH	2.791.674.797.061,77	2.901.017.333.526,05	109.342.536.465,28	103,917
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	587.200.106.361,77	637.819.473.621,05	50.619.367.259,28	108,620
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.204.474.690.699,00	2.263.197.859.905,00	58.723.169.206,00	102,664

Sumber data : LRA APBD (konsolidasi) per tanggal 3 Februari 2026

Berdasarkan tabel tersebut, realisasi Pendapatan Daerah pada Tahun 2025 sebesar Rp2.901.017.333.526,05 dari target sebesar Rp2.791.674.797.061,77 atau mencapai 103,917% dengan penjelasan sebagai berikut :

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengeloaan Keuangan Daerah meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 sebesar Rp637.819.473.621,05 dari target sebesar Rp587.200.106.361,77 atau mencapai 108,620%. Adapun rincian target dan realisasi PAD Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.14
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang	%
1	2	3	4	5= (4-3)	6= (4/3)*100
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	587.200.106.361,77	637.819.473.621,05	50.619.367.259,28	108,620
4.1.01	Pajak Daerah	251.799.492.223,00	273.374.256.055,00	21.574.763.832,00	108,568

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang	%
1	2	3	4	5= (4-3)	6= (4/3)*100
4.1.02	Retribusi Daerah	308.371.031.944,48	334.624.356.126,94	26.253.324.182,46	108,514
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.227.019.075,00	5.349.788.795,34	122.769.720,34	102,349
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	21.802.563.119,29	24.471.072.643,77	2.668.509.524,48	112,239

Sumber data : LRA APBD (konsolidasi) per tanggal 3 Februari 2026

Dari tabel di atas, dapat diberikan uraian analisa sebagai berikut :

a. Pajak Daerah

Realisasi penerimaan yang bersumber dari Pajak Daerah adalah sebesar Rp273.374.256.055,00 atau 108,568% dari target yang ditetapkan sebesar Rp251.799.492.223,00. Target dan realisasi yang bersumber dari Pajak Daerah secara lengkap tersaji pada tabel berikut :

Tabel 1.15
Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2025

Kode Rek	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang	%
1	2	3	4	5= (4-3)	6= (4/3)*100
4.1.01	**PAJAK DAERAH**	**251.799.492.223,00**	**273.396.407.315,00**	**21.596.915.092,00**	**108,577**
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.000.000.000,00	1.253.334.182,00	253.334.182,00	125,333
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	1.000.000.000,00	917.032.413,00	-82.967.587,00	91,703
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	500.000.000,00	2.849.348.000,00	2.349.348.000,00	569,870
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	59.000.000.000,00	63.077.921.597,00	4.077.921.597,00	106,912
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	38.500.000.000,00	51.294.506.513,00	12.794.506.513,00	133,232
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	56.812.500.000,00	60.543.728.200,00	3.731.228.200,00	106,568
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	7.811.500.000,00	11.504.770.565,00	3.693.270.565,00	147,280
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	48.000.000.000,00	47.675.987.491,00	-324.012.509,00	99,325
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	600.000.000,00	745.367.648,00	145.367.648,00	124,228
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	240.000.000,00	294.236.916,00	54.236.916,00	122,599
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	161.000.000,00	323.365.580,00	162.365.580,00	200,848
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	71.253.048.886,00	68.329.757.450,00	-2.923.291.436,00	95,897
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	23.733.943.337,00	25.108.627.700,00	1.374.684.363,00	105,792

Sumber data : LRA APBD (konsolidasi) per tanggal 3 Februari 2026

b. Retribusi Daerah

Realisasi penerimaan yang bersumber dari Retribusi Daerah adalah sebesar Rp334.624.356.126,94 atau 108,514% dari target yang ditetapkan yang nilainya Rp308.371.031.944,48. Realisasi yang bersumber dari Retribusi Daerah sebagai berikut :

Tabel 1.16
Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2025

Kode Rek	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang	%
1	2	3	4	5= (4-3)	6= (4/3)*100
4.1.02	**Retribusi Daerah**	**308.371.031.944,48**	**334.624.356.126,94**	**26.253.324.182,46**	**108,514**
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	297.517.500.213,48	319.279.897.683,94	21.762.397.470,46	107,315
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	279.411.761.403,00	300.936.030.431,94	21.524.269.028,94	107,703
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	959.230.100,00	1.056.517.493,00	97.287.393,00	110,142
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	8.802.565.000,00	8.963.614.000,00	161.049.000,00	101,830
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	8.343.943.710,48	8.323.735.759,00	-20.207.951,48	99,758
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	9.615.531.731,00	11.112.415.375,00	1.496.883.644,00	115,567
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	7.156.401.501,00	8.690.733.645,00	1.534.332.144,00	121,440
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	442.624.230,00	445.236.730,00	2.612.500,00	100,590
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	4.000.000,00	4.003.000,00	3.000,00	100,075
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	26.278.000,00	26.420.000,00	142.000,00	100,540
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.654.950.000,00	1.429.337.700,00	-225.612.300,00	86,367
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	125.225.000,00	101.004.100,00	-24.220.900,00	80,658
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	206.053.000,00	415.680.200,00	209.627.200,00	201,735
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.238.000.000,00	4.232.043.068,00	2.994.043.068,00	341,845
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.070.000.000,00	3.698.533.068,00	2.628.533.068,00	345,657
4.1.02.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	168.000.000,00	533.510.000,00	365.510.000,00	317,565

Sumber data : LRA APBD (konsolidasi) per tanggal 3 Februari 2026

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi penerimaan yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sebesar Rp 5.349.788.795,34 atau 102,348% dari target yang ditetapkan yang nilainya Rp 5.227.019.075,00. Target dan realisasi yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.17
Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Tahun 2025

Kode Rek	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang	%
1	2	3	4	5= (4-3)	6= (4/3)*100
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.227.019.075,00	5.349.788.795,34	122.769.720,34	102,348
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	4.181.030.072,00	4.278.799.792,34	97.769.720,34	102,338
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	0	25.000.000,00	25.000.000,00	
4.1.03.02.03	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	1.045.989.003,00	1.045.989.003,00	0,00	100

Sumber data : LRA APBD (konsolidasi) per tanggal 3 Februari 2026

d. Lain-Lain PAD yang Sah

Realisasi penerimaan yang bersumber dari Lain-lain PAD yang Sah adalah sebesar Rp24.471.072.643,77 atau 112,239% dari target yang ditetapkan sebesar Rp21.802.563.119,29. Target dan realisasi yang bersumber dari Lain-lain PAD yang Sah sebagai berikut :

Tabel 1.18
Target dan Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2025

Kode Rek	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang	%
1	2	3	4	5= (4-3)	6= (4/3)*100
4.1.04	**Lain-lain PAD yang Sah**	**21.802.563.119,29**	**24.471.072.643,77**	**2.668.509.524,48**	**112,239**
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.064.913.156,00	2.368.942.494,00	1.304.029.338,00	222,454
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	121.000.000,00	126.765.020,00	5.765.020,00	104,764
4.1.04.04	Hasil Kerja Sama Daerah	0,00	0,00	0,00	0,000
4.1.04.05	Jasa Giro	2.672.585.670,00	1.485.657.097,66	-1.186.928.572,34	55,589
4.1.04.06	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,000
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	5.917.808.219,00	7.357.191.780,32	1.439.383.561,32	124,323
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	430.000.000,00	379.402.035,34	-50.597.964,66	88,233
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	116.800.874,00	116.800.874,00	
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	315.458.000,00	633.709.138,00	318.251.138,00	200,885
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	130.000,00	141.720,00	11.720,00	109,015
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	10.308.376.686,00	11.048.802.377,75	740.425.691,75	107,183
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	971.291.388,29	953.660.106,70	-17.631.281,59	98,185
4.1.04.19	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,000

Sumber data : LRA APBD (konsolidasi) per tanggal 3 Februari 2026

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp 2.263.197.859.905,00 atau 102,664% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 2.204.474.690.699,00. Rincian target dan realisasi Pendapatan Transfer sebagai berikut :

Tabel 1.19
Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2025

Kode Rek	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang	%
1	2	3	4	5= (4-3)	6= (4/3)*100
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**2.204.474.690.699,00**	**2.263.197.859.905,00**	**58.723.169.206,00**	**102,664**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.069.780.135.699,00	2.114.197.809.687,00	44.417.673.988,00	102,146
4.2.01.01	Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	0,000
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	228.389.048.000,00	225.332.605.300,00	-3.056.442.700,00	98,662
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.124.108.117.000,00	1.168.632.838.285,00	44.524.721.285,00	103,961
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	430.741.425.699,00	443.859.687.972,00	13.118.262.273,00	103,046
4.2.01.05	Dana Desa	266.062.441.000,00	255.893.574.130,00	-10.168.866.870,00	96,178
4.2.01.06	Insentif Fiskal	20.479.104.000,00	20.479.104.000,00	0,00	100,000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	134.694.555.000,00	149.000.050.218,00	14.305.495.218,00	110,621
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	121.784.921.000,00	136.597.737.200,00	14.812.816.200,00	112,163
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	12.909.634.000,00	12.402.313.018,00	-507.320.982,00	96,070

Sumber data : LRA APBD (konsolidasi) per tanggal 3 Februari 2026

3) Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai realisasi Pendapatan Asli Daerah sebagaimana berikut :

Tabel 1.20
Permasalahan Pencapaian Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Lambatnya Peningkatan Kemandirian Keuangan Daerah	1. Penetapan target PAD belum sepenuhnya melalui kajian yang obyektif	a. Pemuthakiran data potensi PAD belum optimal b. Belum adanya database acuan penetapan harga transaksi BPHTB

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		yang obyektif dan transparan
	2. Kinerja Pemungutan PAD kurang optimal	a. Kurang optimalnya Tim Pemungutan PAD b. Kurangnya kepatuhan membayar pajak c. Kurangnya pengetahuan masyarakat pentingnya membayar pajak untuk pembangunan d. Terbatasnya dukungan operasional Kecamatan, Kelurahan untuk mendukung pemungutan PAD e. Tidak adanya Insentif bagi OPD penghasil retribusi
	3. Kualitasi pelayanan belum sepenuhnya memuaskan masyarakat	a. Digitalisasi layanan pajak daerah belum optimal b. Kurangnya kemudahan dalam pelayanan pajak c. Lambatnya waktu penyelesaian layanan
	4. Kurang optimalnya pengendalian dan pengawasan PAD	a. Penegakan sanksi Wajib pajak/Wajib pungut dan aparatur pajak yang melanggar regulasi kurang optimal b. Belum efektifnya sistem pengawasan penyimpangan pajak

b. Solusi

Solusi yang sudah dilaksanakan dalam mengatasi permasalahan tersebut antara lain :

1) Intensifikasi Pajak daerah dan Retribusi Daerah

Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan upaya untuk meningkatkan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah ada, dalam artian mencari cara agar pajak dan retribusi daerah yang sudah dikenakan bisa menghasilkan pendapatan yang lebih besar. Intensifikasi Pajak Daerah juga berarti mengolah data yang sudah dimiliki serta menggali secara mendalam potensi pajak yang didapatkan dari obyek dan subyek pajak yang telah ada. Intensifikasi Pajak Daerah yang telah dilakukan pada tahun 2025 diantaranya :

- Optimalisasi Penagihan Pajak Daerah yang salah satunya berkerja sama dengan APH untuk PBB-P2 terhadap pamong blok yang menunggak dan juga melaksanakan pemasangan stiker penunggak pajak bagi Wajib Pajak/Wajib Pungut yang tidak membayar pajak daerah.

- Melaksanakan pendataan obyek pajak dan subyek pajak secara berkala.
- Melaksanakan monitoring, pengawasan kepada wajib pungut Hotel, Restoran dan Parkir yang telah terpasang alat perekam transaksi.

2) Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah upaya pemerintah daerah untuk memperluas objek atau subjek pajak yang belum dikenakan pajak. Ini berarti mencari sumber-sumber pajak baru atau memperluas cakupan pajak yang sudah ada. Tujuan utamanya adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara yang lebih luas dan inklusif. Ekstensifikasi Pajak Daerah yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 diantaranya :

- Pendataan tanah sawah menjadi pabrik seperti Pabrik Topi dan Pabrik Printing
- Pendataan potensi sumber-sumber pajak baru
- Peningkatan kapasitas aparatur dalam melaksanakan tugasnya baik pengawasan, penagihan, pendataan.

3) Regulasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah menerbitkan peraturan terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk menindaklanjuti terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai dasar pengenaan pajak dan retribusi yaitu Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan Tertentu serta Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

4) Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan

Pengendalian pengawasan pajak daerah dilakukan untuk mengurangi tingkat kebocoran penerimaan pendapatan khususnya pajak daerah dan retribusi daerah. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

- Mengoptimalkan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah secara Non Tunai,
- Monitoring dan pengawasan secara berkala pemakaian alat perekam transaksi,
- Pengawasan terhadap wajib pajak minerba dengan bekerja sama dengan kejaksaan

- Meningkatkan pengawasan terhadap Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dengan menempatkan petugas pada mulut tambang (Checker) yang bertugas mendata tiap Truk yang mengangkut batuan.

5) Digitalisasi Pengelolaan Pajak Daerah dan retribusi daerah
   Optimalisasi pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui E-Tax Nganjuk"Paling Smart" (Pajak Online dan Sistem Manajemen terpadu yang merupakan Aplikasi guna mempermudah dalam pelayanan pajak dan retribusi.
6) Pemberian Reward kepada Masyarakat dan Wajib Pungut.
   - Pemberian Reward atau hadiah barang kepada masyarakat yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada bulan Panutan PBB-P2 dengan hadiah utama 10 (sepuluh) unit kendaraan roda dua.
   - Pemberian reward hadiah berupa uang kepada wajib pungut Kecamatan dan Desa, Kelurahan yang lunas PBB-P2 Tahun 2025.
   - Pemberian reward hadiah uang kepada Wajib Pungut Hotel, Restoran yang taat dan patuh membayar pajak dengan membayar Pajak BPJT Hotel dan Restoran tepat waktu dan sesuai omzet.

B. Realisasi Menurut Jenis Belanja

Penyusunan alokasi belanja daerah merupakan hal penting dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara prinsip pemanfaatan belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi dan efektivitas sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah. Pengelolaan belanja daerah yang diarahkan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik adalah dengan mengingat bahwa daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dalam pengelolaan belanja daerah harus dapat mencerminkan upaya-upaya dalam mengembangkan dan meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka mengelola belanja daerah yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat tersebut, maka dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan *output* atas *input* yang telah dialokasikan sesuai target kinerja dari masing-masing Perangkat Daerah.

1) Target dan Realisasi Belanja Daerah

Realisasi Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.855.791.211.398,12 atau 93,66% dari total anggaran sebesar Rp3.049.263.780.749,50. Realisasi belanja tersebut berasal dari Belanja Operasional sebesar Rp2.142.313.098.894,16, Belanja Modal sebesar Rp 293.516.484.370,96, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp5.084.553.000,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp414.877.075.133,00. Rincian belanja menurut jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 1.21
Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2025

No	Uraian	Tahun 2025		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Belanja Operasi	2.283.052.873.280,13	2.142.313.098.894,16	93,84
2	Belanja Modal	327.905.361.996,00	293.516.484.370,96	89,51
3	Belanja Tidak Terduga	13.259.603.473,37	5.084.553.000,00	38,35
4	Belanja Transfer	425.045.942.000,00	414.877.075.133,00	97,61
Jumlah		**3.049.263.780.749,50**	**2.855.791.211.398,12**	**93,66**

Sumber Data : LRA TA 2025 (Unaudited) per tanggal 14 Januari 2026

Secara keseluruhan, kinerja penyerapan anggaran menunjukkan angka yang sangat baik, yakni mencapai 93,66%. Angka ini mengindikasikan bahwa sebagian besar program kerja telah terlaksana sesuai perencanaan keuangan yang ditetapkan.

Tabel 1.22
Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pencapaian Realisasi Belanja Daerah Tahun 2025

Kategori	Faktor-Faktor	Solusi Penyelesaian
Faktor Pendukung	1. **Sistem Pengadaan E-Katalog:** Mempercepat proses belanja modal dan operasional.	1. **Optimalisasi Digitalisasi:** Memperluas penggunaan aplikasi keuangan daerah terintegrasi.
	2. **Monitoring Berkala:** Adanya evaluasi penyerapan anggaran setiap kuartal.	2. **Reward & Punishment:** Memberikan apresiasi bagi OPD dengan serapan tinggi dan efisien.

Kategori	Faktor-Faktor	Solusi Penyelesaian
	3. **Komitmen Pimpinan:** Instruksi yang jelas untuk percepatan program strategis.	
Faktor Penghambat	1. **Kendala Teknis Lapangan:** Masalah lahan atau cuaca yang menghambat proyek fisik (Belanja Modal).	1. **Perencanaan Dini:** Melakukan lelang pradiwasa (sebelum tahun anggaran berjalan).
	2. **Administrasi SPJ:** Keterlambatan pelaporan pertanggungjawaban dari unit kerja.	2. **Pendampingan Hukum:** Melibatkan APIP/Kejaksaan untuk percepatan proyek strategis agar tepat waktu dan hukum.
	3. **Efisiensi Tender:** Sisa lebih perhitungan anggaran karena penawaran pihak ketiga di bawah pagu.	3. **Penyederhanaan Birokrasi:** Mempercepat proses verifikasi dokumen pembayaran secara digital.

C. Realisasi Menurut Jenis Pembiayaan

Dalam struktur APBD pembiayaan merupakan bagian penting yang bisa menutup anggaran apabila terjadi belanja daerah lebih besar dari pendapatan (defisit) dan sebaliknya apabila terjadi pendapatan lebih besar dari belanja, kelebihan pendapatan dapat dimanfaatkan dalam pembiayaan ini. Pembiayaan daerah di Tahun 2025 meliputi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan penerimaan piutang daerah. SILPA diperoleh dari realisasi belanja yang lebih rendah dibandingkan rencana yang disebabkan antara lain oleh adanya sisa lelang, efisiensi belanja kegiatan yang belum bisa dilaksanakan, dan adanya pelampauan target pendapatan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan digunakan untuk investasi jangka panjang yang direncanakan untuk penyertaan modal PT BPR Anjuk Ladang, PDAM, PDAU dan Bank UMKM Jatim.

Kebijakan umum pembiayaan pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan umum pemerintah daerah yang dilakukan agar prioritas kegiatan daerah yang menjadi tuntutan masyarakat dan bertujuan untuk tetap terjaminnya terselenggaranya pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, meningkatkan pelayanan, meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang terhadap pencapaian sasaran dari kegiatan yang diinginkan. Sebagai akibat dari banyaknya belanja daerah yang harus dianggarkan sementara pendapatan daerah sangat terbatas, sehingga

mengakibatkan terjadinya defisit yang harus ditutup dari pembiayaan.

1) Target dan Realisasi Pembiayaan

Target penerimaan pembiayaan sebesar Rp258.224.083.688,73 terealisasi sebesar Rp258.235.877.688,73 atau 100,00%. Penerimaan pembiayaan terdiri dari penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Lalu dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah. Rincian penerimaan pembiayaan dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 1.23
Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2025

No	Uraian	Tahun 2025		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	258.179.741.544,56	258.179.741.544,56	100,00
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	44.342.144,17	56.136.144,17	126,60
	Jumlah	**258.224.083.688,73**	**258.235.877.688,73**	**100,00**

Sumber Data : LRA TA 2025 (Unaudited) per 14 Januari 2026

Pengeluaran Pembiayaan, dari anggaran sebesar Rp 635.100.000,00 terealisasi sebesar Rp 635.100.000,00 atau 100,00%. Pengeluaran pembiayaan terdiri dari Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah. Rincian pengeluaran pembiayaan dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 1.24
Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2025

No	Uraian	Tahun 2025		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Penyertaan Modal Daerah	635.100.000,00	635.100.000,00	100,00
	Jumlah	**635.100.000,00**	**635.100.000,00**	**100,00**

Sumber Data : LRA TA. 2025 (Unaudited) per 14 Januari 2026

Tabel 1.25
Analisis Pembiayaan Daerah Tahun 2025

Jenis Pembiayaan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Kinerja
A. Penerimaan Pembiayaan	**258.224.083.688,73**	**258.235.877.688,73**	**100,00**	**Sangat Baik**
1. SiLPA Tahun Sebelumnya	258.179.741.544,56	258.179.741.544,56	100,00	Tepat Sasaran
2. Penerimaan Pinjaman Daerah	44.342.144,17	56.136.144,17	126,60	Melampaui Target
B. Pengeluaran Pembiayaan	**635.100.000,00**	**635.100.000,00**	**100,00**	**Sangat Baik**
1. Penyertaan Modal Daerah	635.100.000,00	635.100.000,00	100,00	Sesuai Rencana
Pembiayaan Netto (A - B)	**257.588.983.688,73**	**257.600.777.688,73**	-	-

Sumber Data : LRA TA. 2025 (Unaudited) per 14 Januari 2026

2) Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat

a. Faktor Pendukung

- Akurasi Pencatatan SiLPA : Realisasi SiLPA yang mencapai 100% menunjukkan sinkronisasi data yang sangat baik antara pembukuan tahun sebelumnya dengan perencanaan tahun berjalan.
- Optimalisasi Penagihan Piutang : Pada poin "Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah", terjadi realisasi sebesar 126,60%. Hal ini menunjukkan efektivitas pemerintah dalam menagih kembali pinjaman atau adanya pelunasan dini dari pihak ketiga.
- Komitmen Penyertaan Modal : Realisasi pengeluaran pembiayaan yang tepat 100% menunjukkan komitmen pemda dalam memperkuat struktur modal BUMD atau investasi daerah sesuai jadwal.

b. Faktor Penghambat

- Ketergantungan Tinggi pada SiLPA : Struktur penerimaan pembiayaan didominasi secara mutlak (99%+) oleh SiLPA. Hal ini menunjukkan sumber pembiayaan untuk menutup defisit sangat bergantung pada sisa anggaran tahun lalu, bukan dari sumber pembiayaan aktif lainnya.

- Risiko Anggaran Defisit : Karena kebijakan anggaran bersifat defisit untuk mendukung visi-misi, ketidakpastian dalam realisasi pendapatan daerah dapat menekan ketahanan finansial jika SiLPA di masa depan berkurang.

c. Solusi Penyelesaian
   - Dominasi SiLPA : Melakukan diversifikasi sumber pembiayaan, misalnya melalui optimalisasi kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) atau pencarian sumber pinjaman daerah yang lunak.
   - Kelebihan Target Pinjaman : Mempertahankan sistem monitoring piutang yang sudah berjalan baik dan memastikan dana surplus (26,60% kelebihan) dialokasikan kembali pada belanja prioritas.
   - Keberlanjutan Investasi : Melakukan evaluasi kinerja terhadap BUMD yang menerima penyertaan modal agar investasi sebesar Rp635.000.000,- tersebut memberikan dividen (PAD) di masa depan.

d. Kesimpulan

   Kinerja pembiayaan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2025 secara administratif sangat sehat dengan capaian 100%. Strategi penggunaan SiLPA untuk menutup defisit belanja guna mencapai visi-misi daerah telah terlaksana sesuai rencana, namun perlu diwaspadai agar di tahun mendatang ketergantungan terhadap SiLPA dapat dikurangi melalui peningkatan PAD atau sumber pembiayaan lainnya.

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

Sistem perencanaan pembangunan daerah memiliki peran krusial dalam menunjang keberhasilan perencanaan pembangunan nasional. Hal ini telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menegaskan bahwa pembangunan daerah harus selaras dengan kebijakan nasional. Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses strategis yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, akademisi, serta sektor swasta. Proses ini mencakup penyusunan kebijakan, perumusan strategi, serta pelaksanaan program yang terarah untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Sebagai bagian dari upaya sistematis dan terencana, perencanaan pembangunan daerah harus disusun dengan mempertimbangkan karakteristik, potensi, serta tantangan yang dihadapi oleh setiap daerah. Oleh karena itu, diperlukan langkah langkah strategis, taktis, dan praktis yang dapat mengoptimalkan sumber daya yang tersedia guna meningkatkan

kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan di berbagai sektor, seperti ekonomi, sosial, infrastruktur, dan lingkungan. Dengan pendekatan yang holistik dan berbasis data, perencanaan pembangunan daerah dapat menjadi instrumen yang efektif untuk menciptakan pembangunan yang inklusif, adaptif terhadap perubahan, serta mampu menjawab dinamika kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

1.1.2.1 Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Perumusan permasalahan pembangunan daerah serta analisis isu strategis memiliki peran krusial dalam menyusun kebijakan yang selaras dengan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Hasil analisis tersebut menjadi dasar dalam menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan, sekaligus sebagai landasan utama dalam perumusan program prioritas yang akan dijalankan. Berikut permasalahan dan isu strategis daerah Kabupaten Nganjuk yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, yaitu :

A. Permasalahan Pembangunan Daerah

Dalam lima tahun ke depan, tantangan pembangunan global semakin kompleks akibat perubahan yang cepat di berbagai sektor, dikenal sebagai megatren. Fenomena ini mencerminkan perubahan transformatif dalam skala besar dan jangka panjang, terutama didorong oleh kemajuan teknologi digital, kecerdasan buatan (AI), serta komputasi modern. Digitalisasi telah menjadi bagian integral dari kehidupan global, termasuk di Indonesia. Percepatan digitalisasi semakin nyata sejak pandemi COVID-19 pada 2019, yang memperkuat peran digitalisasi dalam perekonomian dan daya saing nasional. Dalam satu dekade terakhir, digitalisasi telah mendorong inovasi, efisiensi, hingga disrupsi di berbagai sektor, mengubah pola interaksi sosial dan ekonomi.

Namun, meskipun megatren digital membawa peluang, jika tidak diantisipasi dengan baik, dampaknya dapat menyebabkan disrupsi yang mengancam stabilitas ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, pembangunan jangka panjang di Indonesia harus berorientasi pada transformasi menyeluruh yang berbasis kolaborasi antara berbagai elemen bangsa guna mencapai visi Indonesia Emas 2045. Pembangunan di Kabupaten Nganjuk telah menunjukkan berbagai kemajuan yang signifikan, namun tetap menghadapi tantangan dari berbagai dimensi, baik eksternal maupun internal. Permasalahan tersebut perlu diatasi melalui kebijakan yang terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Beberapa permasalahan utama yang dihadapi Kabupaten Nganjuk antara lain :

a) Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah yang Belum Optimal

Pengembangan potensi ekonomi di Kabupaten Nganjuk masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat pertumbuhan dan daya saing daerah. Sektor pertanian tetap menjadi pilar utama perekonomian daerah, namun optimalisasi nilai tambah melalui strategi hilirisasi industri berbasis pertanian masih belum maksimal. Hilirisasi diperlukan agar hasil pertanian tidak hanya bergantung pada penjualan bahan mentah, tetapi juga mampu menghasilkan produk olahan yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Tantangan lainnya adalah perubahan iklim yang berdampak signifikan terhadap produktivitas komoditas unggulan pertanian, serta alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman yang semakin mengurangi luas lahan produktif. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini dapat mengancam ketahanan pangan dalam jangka panjang.

Indikator yang menunjukkan perlunya penguatan sektor pertanian adalah tren penurunan kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang berkurang dari 28% pada tahun 2020 menjadi 27,3% pada tahun 2023. Selain pertanian, sektor peternakan juga menghadapi hambatan, terutama terkait keterbatasan fasilitas dan infrastruktur Rumah Potong Hewan (RPH) yang higienis dan memenuhi standar. Peningkatan investasi dalam modernisasi RPH serta sistem distribusi daging yang lebih baik menjadi langkah penting untuk meningkatkan daya saing sektor peternakan di daerah ini.

Selain sektor pertanian dan peternakan, Kabupaten Nganjuk juga memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan Industri Kecil Menengah (IKM), namun pengelolaannya masih belum optimal. Pengembangan sektor sektor ini memerlukan strategi yang lebih terpadu, mulai dari promosi destinasi wisata, peningkatan kapasitas pelaku usaha kreatif, hingga penguatan ekosistem industri kecil yang berbasis pada keunggulan lokal.

Dari sisi industri dan investasi, Kabupaten Nganjuk memiliki keuntungan strategis dengan keberadaan infrastruktur utama, seperti jalan tol dan Bandara Dhoho Kediri. Namun, potensi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai daya tarik investasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih proaktif dalam menarik investor, seperti pemberian insentif, penyederhanaan regulasi investasi, serta penguatan konektivitas antara pusat produksi dan jalur distribusi.

Dengan optimalisasi di berbagai sektor ini, Kabupaten Nganjuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

b) Belum Optimalnya Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar Publik

Kondisi permukiman di Kabupaten Nganjuk masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam pemenuhan sarana dan prasarana dasar. Salah satu permasalahan utama adalah masih tingginya angka rumah tidak layak huni, yang pada tahun 2023 tercatat sebesar 85,91%. Angka ini menunjukkan perlunya intervensi yang lebih intensif untuk memastikan lingkungan permukiman yang layak dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Rendahnya akses penduduk terhadap hunian yang layak dan terjangkau disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan pendapatan, dampak bencana alam, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang standar rumah layak huni dalam pembangunan rumah secara swadaya. Oleh karena itu, diperlukan program perumahan yang lebih inklusif, baik melalui bantuan langsung, subsidi perumahan, maupun peningkatan kapasitas masyarakat dalam pembangunan rumah mandiri yang memenuhi standar kelayakan.

Selain persoalan hunian, akses terhadap air minum yang layak juga masih menjadi tantangan. Hingga tahun 2024, hanya 16,58% rumah tangga di Kabupaten Nganjuk yang mendapatkan akses air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan. Namun, akses ini masih menghadapi berbagai kendala, termasuk belum terpenuhinya aspek kontinuitas serta kualitas air minum yang sesuai dengan standar kesehatan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya peningkatan infrastruktur air bersih, optimalisasi layanan SPAM, serta penguatan regulasi dan pengawasan terhadap kualitas air minum.

Di sisi lain, permasalahan pertanahan juga menjadi kendala dalam pembangunan daerah. Masih terdapat berbagai hambatan dalam pemanfaatan tanah kosong untuk kepentingan umum yang belum terinventarisasi, proses legalisasi pengadaan tanah yang tertunda, serta administrasi tukar-menukar lahan atau kawasan hutan untuk kepentingan umum dan permukiman. Kurangnya kepastian hukum terkait pengelolaan dan peruntukan lahan dapat menghambat berbagai proyek pembangunan, termasuk infrastruktur dasar dan fasilitas publik. Oleh karena itu, diperlukan percepatan dalam tata kelola pertanahan yang lebih transparan dan terintegrasi agar dapat mendukung pembangunan yang lebih efisien dan

berkelanjutan.

Dengan adanya perbaikan di sektor permukiman, air bersih, dan tata kelola pertanahan, Kabupaten Nganjuk dapat mewujudkan lingkungan yang lebih layak huni, sehat, dan berkelanjutan. Langkah-langkah strategis yang mencakup intervensi kebijakan, peningkatan infrastruktur, serta edukasi masyarakat menjadi kunci dalam memastikan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh penduduk.

c) *Pembangunan Infrastruktur yang Belum Merata*

Konektivitas dan infrastruktur jalan di Kabupaten Nganjuk masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan kondisi jalan kabupaten yang hanya mencapai sekitar 70% dalam kategori mantap fungsional. Kondisi ini menjadi isu strategis yang harus segera diatasi, mengingat infrastruktur jalan yang tidak optimal dapat menghambat mobilitas masyarakat, memperlambat pertumbuhan ekonomi, serta mengurangi efektivitas distribusi hasil pembangunan. Salah satu faktor utama yang menyebabkan kerusakan jalan adalah ketidaksesuaian antara kapasitas jalan dengan beban kendaraan yang melintas, yang dalam jangka panjang dapat memperparah degradasi infrastruktur dan meningkatkan biaya pemeliharaan.

Selain kondisi jalan, sektor transportasi juga menghadapi tantangan besar dengan masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Mayoritas insiden kecelakaan disebabkan oleh faktor kelalaian pengendara, yang diperparah dengan kurangnya sarana dan prasarana keselamatan jalan. Dalam menghadapi proyeksi peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat dalam 20 tahun ke depan, perbaikan dan pengembangan infrastruktur transportasi perlu menjadi prioritas utama. Peningkatan kualitas jalan, penyediaan fasilitas keselamatan lalu lintas, serta penguatan regulasi dan edukasi keselamatan berkendara menjadi langkah penting dalam meningkatkan efisiensi dan keamanan transportasi di Kabupaten Nganjuk.

Selain itu, pengelolaan sumber daya air juga menjadi aspek krusial yang harus mendapatkan perhatian serius. Masalah banjir perkotaan yang masih sering terjadi menunjukkan perlunya penataan sistem drainase dan pengelolaan air yang lebih baik. Di sisi lain, akses terhadap sumber daya air yang masih terbatas serta ancaman kekeringan di beberapa wilayah semakin menambah kompleksitas permasalahan ini. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi terpadu dalam pengelolaan sumber daya air, termasuk pengembangan infrastruktur irigasi yang berkelanjutan, pemanfaatan teknologi konservasi air, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko bencana hidrometeorologi.

Dengan pendekatan yang holistik dalam pengembangan infrastruktur jalan, transportasi, dan sumber daya air, Kabupaten Nganjuk dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Optimalisasi perencanaan dan implementasi kebijakan di sektor-sektor ini akan menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif dan berdaya tahan.

d) *Terdapatnya Potensi Konflik Sosial dan Relatif Tingginya Angka Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Perkawinan Anak*

Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2023 menjadi indikasi bahwa upaya perlindungan terhadap kelompok rentan ini masih belum optimal di Kabupaten Nganjuk. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan program pemberdayaan ekonomi bagi perempuan dan pemuda, yang menyebabkan ketergantungan finansial dan meningkatkan risiko terjadinya perkawinan anak. Ketidakmandirian ekonomi sering kali membuat perempuan dan anak terjebak dalam siklus kekerasan dan eksploitasi tanpa memiliki akses yang memadai untuk keluar dari situasi tersebut.

Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan dan anak masih menjadi tantangan serius. Norma sosial dan budaya yang masih menganggap kekerasan sebagai hal yang lumrah semakin memperburuk kondisi ini. Tingkat pendidikan yang masih rendah juga berkontribusi pada kurangnya pemahaman akan pentingnya kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak dasar perempuan serta anak.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan langkah-langkah strategis yang mencakup peningkatan akses terhadap pendidikan inklusif, penguatan sosialisasi terkait hak-hak perempuan dan anak, serta pengembangan program pemberdayaan ekonomi yang berorientasi pada kemandirian finansial. Pemerintah daerah dapat mendorong pelatihan keterampilan bagi perempuan dan pemuda, menciptakan akses yang lebih luas terhadap modal usaha, serta memperkuat regulasi perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Lebih jauh, kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi perempuan dan anak. Dengan upaya yang terstruktur dan berkelanjutan, Kabupaten Nganjuk dapat mewujudkan ekosistem sosial yang lebih adil, di mana perempuan dan anak terlindungi dari segala bentuk kekerasan serta

memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang dan berkontribusi dalam pembangunan daerah.

e) Tingkat Kesejahteraan Masyarakat yang Masih Rendah

Kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan mendasar di Kabupaten Nganjuk, dengan angka kemiskinan yang masih berada di atas 10%. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka yang tetap bertahan di atas 4% menunjukkan bahwa tantangan dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih cukup besar. Kondisi ini mencerminkan bahwa berbagai kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan yang telah diimplementasikan masih belum sepenuhnya efektif.

Salah satu faktor utama yang perlu diperbaiki adalah ketersediaan data yang akurat dan terpilah mengenai sasaran program pengentasan kemiskinan. Tanpa data yang tepat, efektivitas program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan keterampilan kerja menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, penguatan sistem pendataan berbasis digital yang terintegrasi dengan berbagai instansi terkait sangat diperlukan untuk memastikan program-program pengentasan kemiskinan dapat menjangkau kelompok yang benar-benar membutuhkan.

Selain itu, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan keterampilan, pendidikan vokasi, serta akses terhadap modal usaha menjadi langkah strategis dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran. Pemberdayaan sektor informal serta pengembangan industri kreatif dan UMKM juga harus didorong sebagai salah satu solusi untuk menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

Lebih lanjut, sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan komunitas lokal sangat penting dalam menciptakan kebijakan yang berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan perencanaan yang lebih terarah dan berbasis data yang valid, Kabupaten Nganjuk dapat mengimplementasikan strategi pengentasan kemiskinan yang lebih efektif, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

f) Kualitas Sumber Daya Manusia yang Belum Optimal

Kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Nganjuk sangat dipengaruhi oleh akses serta mutu pendidikan yang masih perlu ditingkatkan. Rendahnya akses terhadap pendidikan yang berkualitas menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan keterbatasan dalam pengembangan SDM di daerah ini.

Hal ini tercermin dari Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang belum mencapai 100%, menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam pemerataan layanan pendidikan. Untuk menciptakan SDM yang unggul, diperlukan upaya strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan, baik melalui penyediaan fasilitas yang memadai, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, maupun penguatan kurikulum yang relevan dengan perkembangan zaman.

Selain aspek akademik, pembentukan karakter dan penguatan nilai budaya juga menjadi tantangan jangka panjang, terutama bagi generasi muda yang hidup di era digital dengan arus informasi yang begitu cepat. Agar mampu bersaing secara global tanpa kehilangan identitas budaya bangsa, diperlukan pendekatan yang menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan pendidikan karakter sejak dini. Upaya ini dapat diwujudkan melalui program edukasi budaya, penguatan kegiatan seni tradisional, serta peningkatan kapasitas budayawan dan seniman daerah dalam mengembangkan kreativitas berbasis kearifan lokal. Dengan demikian, generasi muda dapat memiliki ketahanan budaya yang kuat sekaligus mampu beradaptasi dengan perubahan global.

Di samping itu, literasi dan budaya baca harus terus ditingkatkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang dalam membangun SDM yang unggul di era digital. Akses terhadap bahan bacaan berkualitas serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung kegiatan literasi menjadi faktor penting dalam membentuk masyarakat yang kritis, inovatif, dan berdaya saing tinggi.

Selain sektor pendidikan, aspek kesehatan juga menjadi perhatian utama dalam meningkatkan kualitas SDM di Kabupaten Nganjuk. Permasalahan kesehatan seperti tingginya angka stunting, angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB), serta penanganan penyakit menular dan tidak menular masih menjadi tantangan yang harus segera diatasi. Peningkatan kualitas layanan kesehatan, termasuk akses terhadap fasilitas kesehatan yang memadai dan tenaga medis yang kompeten, menjadi langkah krusial dalam memperbaiki indikator kesehatan masyarakat. Dengan pendekatan yang holistik dalam bidang pendidikan dan kesehatan, Kabupaten Nganjuk dapat menciptakan SDM yang lebih berkualitas, sehat, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

g) Ketahanan Pangan, Kualitas Lingkungan Hidup, dan Penanggulangan Bencana

Kualitas lingkungan hidup menjadi salah satu fokus utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Antisipasi terhadap dampak perubahan iklim menjadi prioritas yang harus diimplementasikan di tingkat daerah,

mengingat tantangan lingkungan semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk, ekspansi ekonomi, perubahan pola hidup masyarakat, serta dinamika perubahan iklim global. Dalam perumusan RPJPN dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 2025–2045, kualitas lingkungan hidup ditetapkan sebagai indikator utama dalam mengukur keberhasilan pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2045.

Salah satu agenda utama dalam pembangunan jangka panjang adalah penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) serta peningkatan penggunaan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) sebagai strategi mitigasi perubahan iklim. Kedua aspek ini menjadi tolok ukur dalam mengevaluasi kondisi lingkungan hidup secara berkelanjutan. Selain itu, pengelolaan sampah juga menjadi perhatian utama, mengingat permasalahan tata kelola persampahan terus meningkat seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat. Upaya yang perlu dilakukan meliputi perluasan cakupan layanan pengelolaan sampah, penyediaan infrastruktur yang memadai untuk sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan, serta optimalisasi upaya pengurangan sampah sejak dari sumbernya melalui penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle).

Selain berdampak pada lingkungan fisik, perubahan iklim juga memiliki konsekuensi jangka panjang terhadap sektor pertanian, terutama dalam hal produktivitas tanaman pangan. Ketidakstabilan iklim dapat mengganggu siklus pertumbuhan tanaman, yang pada akhirnya berpotensi mengancam ketahanan pangan nasional. Tantangan dalam sektor ketahanan pangan meliputi keterjangkauan pangan— baik dari segi harga maupun distribusi—serta masih belum optimalnya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA). Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif untuk memastikan akses pangan yang berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Indeks Kualitas Air secara capaian pada tahun 2024 mengalami penurunan. Hal ini menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk meningkatkan capaian kualitas air yang menurun pada tahun 2024. Hal ini dilakukan dalam upaya menjaga kualitas lingkungan hidup. Mengingat Indeks Kualitas Air merupakan salah satu komponen pembentuk nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Selain itu, menurunnya kualitas lingkungan hidup juga memiliki korelasi erat dengan meningkatnya kejadian bencana, terutama bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan, yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim. Oleh sebab itu, peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko bencana

menjadi aspek yang sangat penting dalam meminimalisir dampak negatif dari kejadian bencana. Edukasi, kesiapsiagaan, serta penguatan sistem mitigasi bencana perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih tanggap dan resilient terhadap ancaman lingkungan yang semakin kompleks.

h) Tata Kelola Pemerintahan yang Belum Optimal

Berbagai tantangan masih dihadapi dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang optimal di Kabupaten Nganjuk. Hal ini tercermin dari capaian beberapa indikator utama yang belum mencapai hasil maksimal, seperti indeks reformasi birokrasi dan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang masih berada pada kategori B. Selain itu, indeks pelayanan publik serta Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menunjukkan perlunya perbaikan yang lebih lanjut. Seiring dengan semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat akan layanan publik yang cepat, transparan, dan efisien, pemerintah perlu menerapkan langkah-langkah strategis yang bertujuan untuk menyederhanakan prosedur bisnis layanan, sehingga efektivitas dan kualitas pelayanan dapat terus meningkat.

Salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan tata kelola pemerintahan adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur. Peningkatan kapasitas, integritas, dan profesionalisme pegawai negeri sipil menjadi aspek yang krusial dalam memastikan pelayanan publik yang prima. Pegawai yang kompeten dan berpegang teguh pada prinsip integritas tidak hanya mampu meningkatkan efisiensi birokrasi, tetapi juga dapat mengurangi risiko terjadinya praktik-praktik korupsi, seperti gratifikasi, suap, atau pemerasan dalam lingkungan pemerintahan. Oleh karena itu, penguatan kompetensi SDM perlu difokuskan pada penguasaan teknologi informasi guna mendukung percepatan transformasi digital dalam sistem pelayanan publik. Dengan demikian, aparatur sipil negara tidak hanya dapat meningkatkan produktivitas, tetapi juga lebih responsif terhadap perubahan dan tuntutan masyarakat.

Revolusi industri 4.0 membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor, termasuk pemerintahan, yang kini menuntut sistem kerja yang lebih fleksibel, inovatif, dan adaptif. Dalam menghadapi perubahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Nganjuk perlu melakukan reformasi tata kelola pemerintahan dengan mengedepankan efisiensi dalam operasional birokrasi, menyederhanakan prosedur administratif yang berbelit-belit, serta menghilangkan regulasi yang berlebihan yang

berpotensi menghambat inovasi. Selain itu, penguatan mekanisme pengendalian internal sangat penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengelolaan sumber daya dan kebijakan publik.

Di samping aspek administratif dan kelembagaan, tantangan besar lainnya yang perlu segera diatasi adalah kemandirian fiskal daerah. Ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih menjadi hambatan utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih inovatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya dengan mengoptimalkan potensi sektor ekonomi unggulan di Kabupaten Nganjuk. Sementara itu, stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Trantibumlinmas) juga menjadi faktor krusial yang perlu mendapatkan perhatian serius. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, masih terdapat potensi konflik sosial yang dapat menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu menerapkan kebijakan yang inklusif serta memperkuat sinergi dengan berbagai pihak guna menciptakan kondisi sosial yang lebih harmonis dan kondusif dalam jangka panjang.

B. Isu Strategis

Isu Strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Beberapa isu strategis Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

1. Transformasi Sosial

a) Kesehatan untuk Semua

Dalam proses perencanaan pembangunan daerah, kualitas sumber daya manusia yang unggul hanya dapat dicapai jika masyarakat memiliki akses kesehatan yang merata dan optimal. Oleh karena itu, jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Kabupaten Nganjuk harus menjadi landasan utama dalam upaya transformasi sosial yang berkelanjutan. Dengan kondisi Kesehatan yang baik, masyarakat dapat hidup lebih produktif, meningkatkan kesejahteraan, serta berkontribusi lebih besar dalam pembangunan ekonomi dan sosial.

Untuk mewujudkan akses kesehatan yang inklusif, perlu diperkuat implementasi program seperti Universal Health Coverage (UHC) serta edukasi kesehatan bagi masyarakat. Pemerataan layanan kesehatan akan membantu mengurangi kesenjangan sosial, menciptakan keadilan dalam akses terhadap

fasilitas medis, serta memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial maupun ekonomi.

Selain itu, strategi kesehatan untuk semua juga harus mencakup upaya pencegahan terhadap berbagai penyakit menular, termasuk penyakit yang dapat muncul di masa depan akibat meningkatnya mobilitas penduduk. Program pengentasan stunting serta promosi gaya hidup sehat juga menjadi elemen penting dalam mencegah berbagai permasalahan kesehatan di masa mendatang.

Dalam jangka panjang, adanya bonus demografi dapat membawa tantangan tersendiri, terutama terkait dengan pemenuhan kebutuhan pangan bergizi bagi masyarakat. Jika tidak dikelola dengan baik, pola konsumsi yang kurang sehat dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit tidak menular, yang pada akhirnya akan membebani sistem kesehatan daerah. Oleh karena itu, pendekatan yang komprehensif dalam kebijakan Kesehatan harus terus dikembangkan untuk memastikan kesehatan yang merata dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Nganjuk. Secara rinci isu-isu strategis kesehatan untuk semua antara lain :

- Kesiapan menghadapi peningkatan mobilitas penduduk yang dapat meningkatkan risiko wabah penyakit menular;
- Pemenuhan akses kesehatan untuk masyarakat miskin;
- Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan lingkungan sehat;
- Peningkatan pemenuhan angka kecukupan gizi dan penanganan stunting termasuk didalamnya upaya penurunan AKI, AKB dan indikator kesehatan lainnya.

b) Pendidikan berkualitas yang merata

Pendidikan yang berkualitas dan merata harus menjadi prioritas utama dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Nganjuk. Kesetaraan dalam akses dan mutu pendidikan tidak hanya memberikan kesempatan yang adil bagi setiap individu untuk berkembang, tetapi juga berperan penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih berdaya dan menjadi aset bagi kemajuan daerah di masa depan. Dengan akses pendidikan yang setara, setiap warga Kabupaten Nganjuk dapat mengembangkan potensinya secara maksimal, sehingga ketimpangan sosial dan ekonomi dapat dikurangi.

Pemerataan pendidikan juga menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan

inovasi. Masyarakat yang terdidik memiliki kemampuan lebih baik dalam menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kemiskinan hingga ketidaksetaraan gender. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh untuk memastikan bahwa seluruh penduduk memiliki akses terhadap pembelajaran yang relevan dan berkualitas.

Namun, salah satu tantangan utama dalam dunia pendidikan di Kabupaten Nganjuk adalah masih adanya ketidaksesuaian antara kualitas pendidikan dan kebutuhan pasar tenaga kerja. Berdasarkan data Sakernas BPS tahun 2023, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi tercatat pada lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yaitu sebesar 11,05%. Padahal, lulusan SMK seharusnya memiliki keterampilan yang siap pakai sesuai dengan tuntutan industri.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan berbagai langkah strategis, seperti pembaruan kurikulum agar lebih sesuai dengan perkembangan dunia kerja, peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, serta pemberian bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Dengan langkah langkah tersebut, diharapkan akses pendidikan berkualitas dapat terwujud bagi seluruh masyarakat Kabupaten Nganjuk, menciptakan generasi yang lebih siap menghadapi tantangan global dan berkontribusi pada pembangunan daerah. Secara rinci isu strategis terkait pendidikan berkualitas yang merata antara lain:

- Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
- Peningkatan kualitas tenaga pendidik terutama terkait penguasaan IPTEK khususnya teknologi informasi;
- Perlunya peningkatan aksesbilitas Pendidikan bagi masyarakat miskin;
- Perlunya pengembangan kurikulum dan metode belajar mengajar yang adaptif/sesuai kebutuhan dan standar global;
- Masih adanya kesenjangan antara kualifikasi pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.

c) Pengurangan kemiskinan dan perlindungan sosial

Pengurangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dan optimalisasi potensi regional harus menjadi prioritas utama dalam mewujudkan transformasi sosial yang inklusif di Kabupaten Nganjuk. Upaya ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga pada aspek sosial

yang memastikan setiap individu memiliki akses yang setara terhadap sumber daya dan peluang yang tersedia.

Salah satu strategi utama dalam pengentasan kemiskinan adalah memperkuat sistem perlindungan sosial yang komprehensif. Perlindungan sosial di Kabupaten Nganjuk harus diimplementasikan secara menyeluruh dengan memastikan pemerataan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta peluang ekonomi yang berkelanjutan. Dengan begitu, masyarakat dapat keluar dari kondisi kemiskinan dan lebih aktif dalam membangun kemandirian ekonomi mereka.

Agar program pengentasan kemiskinan berjalan efektif dan tepat sasaran, diperlukan sistem tata kelola data yang akurat dan terintegrasi. Kebijakan **Satu Data Regsosek Nganjuk** yang telah diterapkan menjadi langkah awal yang baik dalam memastikan bantuan sosial serta intervensi kebijakan benar-benar menjangkau kelompok yang membutuhkan. Data yang dikelola dengan baik akan membantu pemerintah dalam menyusun strategi intervensi yang lebih efektif, baik dalam bentuk bantuan langsung maupun program pemberdayaan.

Di samping itu, pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya lokal secara cerdas dan berkelanjutan harus menjadi bagian dari kebijakan pengurangan kemiskinan. Masyarakat perlu didorong untuk mengembangkan potensi ekonomi daerah mereka, baik melalui sektor pertanian, industri kreatif, maupun usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan demikian, program pengentasan kemiskinan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membangun masyarakat yang lebih mandiri, berdaya saing, dan mampu menciptakan keberlanjutan ekonomi dalam jangka panjang.

Melalui kombinasi strategi pengurangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, dan optimalisasi potensi daerah, pembangunan di Kabupaten Nganjuk dapat berjalan secara lebih inklusif dan berkeadilan. Pendekatan ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menanamkan dasar yang kuat bagi kesejahteraan sosial yang berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. Isu strategis terkait pengurangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat antara lain sebagai berikut:

- Belum efektifnya pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial yang didukung dengan data sasaran penerima manfaat yang akurat.
- Optimalisasi akses jaminan kesejahteraan bagi tenaga kerja.

2. Transformasi Ekonomi

Isu-isu strategis dalam pembangunan Kabupaten Nganjuk yang berkaitan dengan aspek ekonomi dan dirasakan oleh para pemangku kepentingan antara lain:

a. Pengembangan potensi dan sektor unggulan daerah

Pembangunan berbasis potensi daerah memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Nganjuk. Dengan mengidentifikasi dan mengoptimalkan sumber daya lokal secara efektif, pemerintah daerah dapat menciptakan lebih banyak peluang kerja, mengurangi kesenjangan ekonomi, serta memperkuat konektivitas antar wilayah.

Salah satu langkah penting yang perlu diperkuat adalah pengembangan zonasi ekonomi dan industri guna menciptakan ekosistem bisnis yang lebih terstruktur dan kompetitif. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang memadai menjadi faktor kunci dalam memperlancar arus barang dan jasa, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah.

Sektor unggulan seperti pertanian—dengan produk khas bawang merah—serta sektor industri dan jasa harus terus dioptimalkan melalui kebijakan yang tepat serta dukungan investasi. Salah satu solusi yang dapat dikembangkan adalah penguatan industri berbasis pertanian untuk mengatasi permasalahan dalam rantai distribusi hulu-hilir. Namun, di sisi hulu, masih terdapat tantangan seperti alih fungsi lahan pertanian serta lambatnya inovasi dan adopsi teknologi yang dapat menghambat produktivitas sektor ini. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang holistik dan berbasis keberlanjutan agar pertumbuhan ekonomi daerah dapat berjalan selaras dengan pelestarian sumber daya alam.

Minimnya regenerasi petani menjadi salah satu tantangan utama yang berpotensi menghambat pertumbuhan dan produktivitas sektor pertanian dalam jangka panjang. Kurangnya minat generasi muda untuk terjun ke sektor ini dapat menyebabkan penurunan tenaga kerja produktif serta inovasi dalam pertanian. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif untuk menarik minat generasi muda, seperti modernisasi pertanian, peningkatan akses terhadap teknologi, serta skema insentif yang mendukung keberlanjutan usaha pertanian.

Di sisi lain, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi faktor kunci dalam meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Upaya yang dapat dilakukan mencakup peningkatan kualitas produk, penguatan strategi pemasaran, serta pemanfaatan platform digital dan e-commerce untuk memperluas akses pasar. Dengan transformasi digital ini, UMKM diharapkan

mampu meningkatkan daya saing dan mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal.

Selain itu, pengembangan kewirausahaan di kalangan generasi muda menjadi solusi strategis dalam menciptakan lapangan kerja baru dan menekan angka pengangguran. Namun, akses terhadap permodalan masih menjadi kendala utama yang harus diatasi. Pemerintah dan lembaga keuangan perlu memperluas skema pembiayaan yang lebih inklusif serta memberikan pendampingan bagi pelaku usaha muda agar dapat berkembang secara berkelanjutan.

Sementara itu, rencana pembangunan dan pengembangan Kawasan Selingkar Willis diharapkan dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan sektor pariwisata dan pertanian. Optimalisasi kawasan ini dapat meningkatkan daya tarik wisata berbasis alam dan agrowisata, sekaligus memperkuat keterkaitan antara sektor pertanian dan industri kreatif. Dengan sinergi yang tepat, kawasan ini berpotensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat sekitar.

Penguatan sektor unggulan daerah menjadi isu strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Nganjuk. Namun, pengembangan potensi dan produk unggulan daerah, seperti sektor pertanian, pariwisata, serta koperasi dan usaha mikro, masih belum optimal. Diperlukan strategi yang lebih terarah untuk meningkatkan daya saing sektor-sektor ini, termasuk inovasi dalam produksi, pemasaran, serta akses terhadap teknologi dan investasi yang berkelanjutan.

Di sisi lain, transformasi ekonomi digital menjadi agenda penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah berupaya memperluas literasi dan keterampilan digital sebagai prasyarat utama untuk membangun ekosistem digital yang inklusif. Dengan meningkatkan pemahaman dan keterampilan digital, masyarakat dapat lebih produktif dalam memanfaatkan ruang digital untuk mengembangkan usaha, memperluas akses pasar, serta menciptakan nilai ekonomi baru yang berkelanjutan.

Salah satu bentuk nyata dari transformasi digital adalah penyediaan layanan digital yang berorientasi pada kesetaraan dan inklusivitas, khususnya bagi kelompok rentan, termasuk anak-anak. Untuk mencapai hal ini, kebijakan pemerintah harus berfokus pada inklusi digital, yaitu upaya yang memastikan

aksesibilitas dan pemanfaatan teknologi digital bagi seluruh masyarakat.

Inklusi digital bertumpu pada tiga pilar utama: (1) membangun motivasi untuk beradaptasi dengan dunia digital, (2) meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menggunakan teknologi secara efektif, dan (3) memberikan kesempatan yang luas bagi semua kalangan untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital. Dukungan pemerintah dalam mewujudkan inklusi digital dapat diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur digital yang merata, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemberian bantuan dan insentif bagi kelompok yang membutuhkan, serta program advokasi yang mencakup pendampingan dan kemudahan akses terhadap layanan digital.

Dengan strategi yang tepat, transformasi ekonomi digital tidak hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berdaya saing tinggi.Transformasi ekonomi digital menjadi faktor kunci dalam mempercepat pertumbuhan sektor strategis di Kabupaten Nganjuk. Namun, beberapa tantangan utama masih perlu diatasi agar manfaat ekonomi digital dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh lapisan masyarakat. Tantangan tersebut meliputi:

a) **Penguatan digitalisasi dalam sektor strategis**, seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi, yang masih menghadapi kendala dalam adopsi teknologi dan akses pasar digital.
b) **Keterbatasan infrastruktur digital**, terutama di wilayah pedesaan, yang menghambat akses internet cepat dan layanan digital yang memadai bagi pelaku usaha dan masyarakat.
c) **Pemanfaatan ekonomi digital sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi**, yang belum sepenuhnya dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat melalui inovasi dan integrasi digital dalam berbagai sektor.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang mempercepat adopsi teknologi digital, memperluas akses terhadap infrastruktur digital, serta memberikan pendampingan dan pelatihan bagi pelaku usaha agar dapat beradaptasi dengan ekonomi berbasis teknologi.

Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Inklusif

Selain fokus pada pertumbuhan ekonomi secara kuantitatif, Pemerintah Kabupaten Nganjuk juga perlu memastikan bahwa pertumbuhan yang dicapai bersifat berkualitas dan inklusif. Pendekatan ini menitikberatkan pada keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, sehingga pembangunan dapat memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat. Pendekatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas menekankan pada beberapa aspek utama:

a) **Keberlanjutan dan inklusivitas**, yang memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya memberikan keuntungan bagi kelompok tertentu tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat luas, menjaga kelestarian lingkungan, dan menciptakan distribusi manfaat ekonomi yang lebih merata.
b) **Efisiensi dan inovasi**, yang menjadi kunci dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah. Peningkatan nilai tambah dalam berbagai sektor ekonomi, termasuk pertanian, industri, dan jasa, dapat menciptakan ekosistem bisnis yang lebih tangguh dan adaptif terhadap perubahan global.
c) **Penguatan ketahanan ekonomi**, dengan mendorong diversifikasi usaha, memperluas akses pasar, serta meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan berbasis keterampilan teknologi dan kewirausahaan.

Dengan strategi ini, Kabupaten Nganjuk dapat menciptakan landasan ekonomi yang kuat, tidak hanya untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap elemen masyarakat mendapatkan manfaat dari pembangunan ekonomi yang terjadi.

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tidak hanya berfokus pada peningkatan produktivitas, tetapi juga memastikan keseimbangan dengan kelestarian lingkungan. Kabupaten Nganjuk berkomitmen untuk mengintegrasikan prinsip ekonomi dengan aspek keberlanjutan guna menciptakan pembangunan yang merata, mengurangi dampak perubahan iklim, serta mencegah degradasi lingkungan. Visi jangka panjang yang diusung adalah membangun pola pertumbuhan yang tidak hanya memberikan manfaat bagi

generasi saat ini tetapi juga menjaga kelestarian sumber daya alam bagi generasi mendatang.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Nganjuk menetapkan empat prioritas utama dalam strategi pembangunan:

1) **Meningkatkan ekonomi daerah yang inklusif dan tangguh**, melalui pemerataan pembangunan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan.
2) **Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing**, dengan menitikberatkan pada pendidikan, pelatihan, serta peningkatan keterampilan berbasis kebutuhan pasar kerja.
3) **Memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel**, melalui reformasi birokrasi yang mendorong efektivitas pelayanan publik serta efisiensi dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan.
4) **Meningkatkan kesejahteraan sosial yang harmonis dan berbasis budaya lokal**, guna menciptakan masyarakat yang lebih solid, inklusif, dan memiliki ketahanan sosial yang baik.

Selain itu, integrasi ekonomi menjadi salah satu strategi penting dalam memastikan pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh wilayah. Upaya ini dilakukan melalui beberapa langkah, antara lain :

1) **Pembangunan infrastruktur konektivitas yang berkualitas**, guna mempercepat distribusi barang dan jasa serta memperluas akses pasar bagi pelaku usaha lokal.
2) **Pemberian insentif dan kemudahan perizinan bagi investasi yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan**, guna menarik lebih banyak investor dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor strategis.
3) **Pengendalian biaya distribusi dan variabel ekonomi lainnya**, agar harga bahan baku dan produk lokal tetap kompetitif serta tidak membebani pelaku usaha kecil dan menengah.
4) **Pengembangan pusat-pusat ekonomi baru dan kawasan industri terpadu**, untuk menciptakan ekosistem bisnis yang kondusif dan meningkatkan daya saing daerah.

Dengan menerapkan strategi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, Kabupaten Nganjuk tidak hanya berupaya meningkatkan jumlah lapangan

pekerjaan tetapi juga memastikan bahwa pekerjaan yang tercipta bersifat layak, bermartabat, dan mendukung pengembangan keterampilan masyarakat. Kombinasi antara kebijakan ekonomi yang inklusif, pembangunan infrastruktur yang mendukung, serta komitmen terhadap keberlanjutan akan menciptakan ekosistem pertumbuhan yang lebih stabil, adil, dan berdaya saing tinggi di masa depan.

Peningkatan pendapatan masyarakat harus diiringi dengan pencapaian inklusi sosial dan pembangunan manusia yang lebih holistik. Kabupaten Nganjuk tidak hanya berupaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks ini, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan harus ditopang oleh integrasi ekonomi yang lebih luas serta penyediaan infrastruktur berkualitas yang mendukung konektivitas dan aksesibilitas.

Ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEK) menjadi pilar utama dalam mempercepat transformasi sosial dan ekonomi Kabupaten Nganjuk. Fokus pada pengembangan IPTEK tidak hanya bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk membentuk masyarakat yang lebih adaptif, kreatif, dan berdaya saing di era digital. Di tengah perubahan global yang cepat, penguasaan ilmu dan teknologi menjadi kunci dalam menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang baru di berbagai sektor.

Investasi dalam IPTEK membuka jalan bagi solusi inovatif terhadap berbagai tantangan sosial dan ekonomi. Melalui riset dan pengembangan, Kabupaten Nganjuk dapat meningkatkan efisiensi produksi, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan mempercepat pertumbuhan sektor-sektor strategis seperti industri, pertanian, dan jasa. Selain itu, inovasi tidak hanya berkaitan dengan peningkatan angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dengan penciptaan budaya yang mendorong kreativitas dan membuka ruang bagi ide-ide baru yang dapat memperkuat daya saing daerah.

Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah menginisiasi programprogram unggulan seperti **Kawasan Industri Nganjuk (KING)** dan **Kawasan Ekonomi Nganjuk (KEN) Digital** sebagai upaya untuk mendorong transformasi ekonomi berbasis teknologi. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada peningkatan literasi IPTEK di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif untuk memperkuat ekosistem inovasi dan teknologi di

Kabupaten Nganjuk, seperti:

1) **Pengembangan SDM yang unggul** melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan berbasis teknologi guna membangun tenaga kerja yang kompetitif di era industri 4.0.
2) **Dukungan kebijakan yang kondusif** bagi perkembangan industri kreatif dan digital, termasuk dalam hal insentif usaha, kemudahan akses permodalan, dan perlindungan hak kekayaan intelektual.
3) **Optimalisasi transformasi digital** terutama dalam aspek distribusi dan promosi produk, guna memperluas akses pasar bagi pelaku usaha lokal dan mendorong daya saing di tingkat nasional maupun global.
4) **Penguatan ekosistem inovasi** melalui kolaborasi antara pemerintah, akademisi, industri, dan komunitas, sehingga tercipta sinergi yang mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

Salah satu sektor yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan adalah ekonomi kreatif, yang mayoritas digerakkan oleh generasi muda. Dengan memanfaatkan bonus demografi, sektor ini dapat menjadi motor penggerak ekonomi masa depan. Namun, tantangan yang dihadapi masih cukup besar, seperti kurangnya dukungan kebijakan yang memadai, keterbatasan akses terhadap teknologi dan modal, serta belum terbentuknya jaringan ekosistem industri kreatif yang terfasilitasi dengan optimal.

Selain itu, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi juga menjadi faktor kunci dalam menghadapi tantangan global, seperti perubahan iklim, ketimpangan sosial, dan krisis kesehatan. Dengan memperkuat kapasitas sumber daya manusia dalam bidang IPTEK, masyarakat Kabupaten Nganjuk dapat lebih mudah beradaptasi dengan perubahan, menciptakan produk dan layanan yang lebih berkualitas, serta meningkatkan daya saing ekonomi daerah di tingkat nasional dan internasional.

Melalui strategi pembangunan berbasis IPTEK yang inovatif dan inklusif, Kabupaten Nganjuk dapat menggali potensi penuh masyarakatnya dan menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan serta berdaya saing tinggi.

Dalam upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang kompetitif dan berkelanjutan, penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, serta peningkatan produktivitas ekonomi menjadi faktor kunci. Kabupaten Nganjuk menghadapi

berbagai tantangan strategis dalam bidang ini, yang mencakup:

1) **Peningkatan pelatihan tenaga kerja berbasis IPTEK** untuk menciptakan sumber daya manusia yang lebih adaptif terhadap perubahan industri dan kemajuan teknologi.
2) **Kurangnya ruang dan dukungan bagi generasi muda** dalam mengembangkan inovasi, kreativitas, dan keterampilan IPTEK, yang menghambat lahirnya ide-ide baru dan wirausahawan berbasis teknologi.
3) **Minimnya akses dan dukungan untuk penciptaan wirausaha baru**, serta keterbatasan dalam menyediakan akses ke lapangan pekerjaan yang berkualitas.
4) **Belum optimalnya pengembangan sektor ekonomi kreatif**, yang memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja dan meningkatkan daya saing daerah.
5) **Perlunya peningkatan produktivitas dan nilai tambah** dalam sektor-sektor ekonomi produktif dan riil, guna memastikan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan kebijakan yang mendorong pengembangan ekosistem inovasi berbasis IPTEK, mencakup investasi dalam pendidikan dan pelatihan, penguatan kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan dunia usaha, serta penciptaan regulasi yang mendukung pertumbuhan sektor ekonomi berbasis teknologi.

Pembangunan ekonomi berkelanjutan telah menjadi agenda utama dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Nganjuk, dengan tujuan menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan sosial. Strategi ini menekankan dua aspek utama, yaitu:

1) Keberlanjutan ekologis

a. Menjamin bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan kelestarian lingkungan melalui pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, mitigasi dampak perubahan iklim, serta penerapan teknologi hijau.
b. Mendorong efisiensi energi, pengelolaan limbah yang lebih baik, serta konservasi sumber daya alam untuk memastikan daya dukung lingkungan dalam jangka panjang.

2) Inklusivitas sosial dan pemerataan ekonomi

a. Memastikan manfaat pembangunan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, dan menciptakan peluang ekonomi yang setara.
b. Mengembangkan kebijakan yang mendukung ekonomi berbasis komunitas serta memperkuat sektor UMKM agar dapat tumbuh secara berkelanjutan.

Dalam implementasinya, Kabupaten Nganjuk perlu mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam berbagai dokumen perencanaan strategis, seperti Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Dengan demikian, pembangunan daerah dapat lebih tangguh dalam menghadapi dinamika perubahan iklim serta risiko lingkungan yang semakin kompleks.

Selain itu, pembangunan industri di Kabupaten Nganjuk harus mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan. Peningkatan produktivitas ekonomi perlu dibarengi dengan kebijakan yang mendorong penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Namun, pemerintah daerah memiliki keterbatasan kewenangan dalam kebijakan konversi energi, sehingga diperlukan sinergi dengan pemerintah pusat dalam implementasi regulasi yang lebih tegas.

Tantangan lain yang perlu mendapat perhatian adalah pengelolaan limbah industri serta eksploitasi sumber daya alam, seperti pertambangan galian C dan deforestasi, yang berpotensi mempengaruhi ketersediaan air dan keseimbangan ekosistem jangka panjang. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah daerah dapat mengadopsi kebijakan insentif dan disinsentif pajak serta retribusi daerah, sebagai langkah strategis untuk mendorong praktik industri yang lebih ramah lingkungan.

Dengan mengadopsi prinsip ekonomi berkelanjutan, Kabupaten Nganjuk dapat menciptakan pertumbuhan yang tidak hanya membawa manfaat bagi generasi saat ini tetapi juga memastikan kesejahteraan bagi generasi mendatang. Integrasi teknologi hijau, inovasi industri, serta regulasi yang berpihak pada lingkungan akan menjadi kunci dalam membangun ekosistem ekonomi yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

Keberlanjutan ekonomi menjadi tantangan utama dalam proses pembangunan daerah, terutama dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Sejumlah isu strategis yang perlu diperhatikan dalam upaya mencapai ekonomi yang berkelanjutan meliputi:

1) **Dampak Industrialisasi terhadap Lingkungan Hidup**

   Pesatnya perkembangan industri membawa dampak signifikan terhadap ekosistem, mulai dari peningkatan emisi karbon, pencemaran air dan udara, hingga degradasi lahan. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan yang mendorong industri untuk menerapkan prinsip ramah lingkungan, seperti efisiensi energi, penggunaan teknologi hijau, serta pengelolaan limbah yang lebih bertanggung jawab.

2) **Eksploitasi Sumber Daya Alam dan Ketersediaan Air**

   Meningkatnya aktivitas ekonomi, seperti pertambangan galian C dan konversi lahan hijau untuk keperluan pembangunan, dapat mengurangi ketersediaan air serta berdampak pada keseimbangan ekosistem jangka panjang. Deforestasi dan alih fungsi lahan tanpa perencanaan yang matang juga berpotensi meningkatkan risiko bencana ekologis, seperti banjir dan kekeringan. Oleh karena itu, diperlukan langkah mitigasi yang komprehensif, termasuk perencanaan tata ruang yang lebih berkelanjutan serta penerapan standar lingkungan yang ketat dalam kegiatan pertambangan dan pembangunan.

3) **Afirmasi Kebijakan dan Regulasi Konversi Energi**

   Ketergantungan terhadap bahan bakar fosil masih menjadi kendala utama dalam mewujudkan ekonomi yang lebih hijau. Pemerintah daerah memiliki keterbatasan kewenangan dalam mengimplementasikan kebijakan konversi energi ke sumber energi terbarukan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan lebih kuat dari pemerintah pusat dalam bentuk kebijakan afirmatif, insentif bagi industri yang beralih ke energi hijau, serta regulasi yang lebih tegas dalam mengurangi ketergantungan terhadap energi konvensional. Selain itu, investasi dalam infrastruktur energi terbarukan dan riset terkait efisiensi energi juga harus menjadi prioritas untuk mendorong transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini melalui kebijakan yang tepat, Kabupaten Nganjuk dapat menciptakan model pembangunan yang tidak hanya

berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan kelangsungan sumber daya alam bagi generasi mendatang.

3. Transformasi Tata Kelola

Dalam proses pembangunan Kabupaten Nganjuk, berbagai tantangan strategis perlu mendapat perhatian serius dari semua pemangku kepentingan. Beberapa isu utama yang menjadi fokus dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan daerah meliputi:

a. Peningkatan Profesionalisme Aparatur

Peningkatan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Nganjuk merupakan faktor kunci dalam menciptakan pemerintahan yang efisien dan responsif. Profesionalisme ini tidak hanya menitikberatkan pada peningkatan kompetensi teknis, tetapi juga mengedepankan aspek moral dan etika dalam memberikan pelayanan publik. Oleh karena itu, membangun kepercayaan masyarakat terhadap integritas serta dedikasi aparatur menjadi suatu keharusan dalam rangka mewujudkan birokrasi yang berkualitas.

Selain menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif, penguatan profesionalisme ASN juga berkontribusi terhadap pembentukan budaya kerja berbasis transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Dengan adanya budaya kerja yang kuat dan berlandaskan etika, kolaborasi antaraparat dapat ditingkatkan sehingga menghasilkan pemerintahan yang bersih dan efektif.

Peningkatan profesionalisme ini juga harus bersifat berkelanjutan dengan terus memberikan peluang pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi ASN. Dalam menghadapi perkembangan teknologi yang semakin pesat, ASN dituntut untuk menguasai teknologi informasi serta memahami konsep egovernment. Dengan peningkatan kompetensi di bidang teknologi, pelayanan publik dapat dilakukan dengan lebih cepat, efektif, dan efisien. Isu strategis terkait peningkatan profesionalisme ASN meliputi peningkatan kualitas dan profesionalisme ASN yang didukung dengan penguasaan IPTEK.

b. Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan menjadi elemen fundamental dalam mewujudkan tata kelola yang baik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Transparansi membuka akses informasi bagi masyarakat sehingga mereka dapat memahami kebijakan dan keputusan yang diambil pemerintah. Dengan keterbukaan ini, masyarakat dapat

berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan serta memberikan pengawasan yang konstruktif terhadap jalannya pemerintahan.

Sementara itu, akuntabilitas memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dijalankan pemerintah memiliki tolok ukur yang jelas dan dapat dievaluasi. Dengan adanya sistem akuntabilitas yang baik, masyarakat dapat menilai efektivitas dan pencapaian dari kebijakan yang telah diterapkan. Hal ini juga berdampak pada efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik serta pengalokasian sumber daya yang lebih tepat sasaran.

Sebagai langkah konkret, Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah mengimplementasikan berbagai inisiatif seperti Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), program satu data, serta konsep pemerintahan terbuka. Inisiatif-inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat transparansi serta meningkatkan responsivitas pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Isu strategis terkait transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah meliputi peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.

c. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

Good governance merupakan fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang efektif dan berpihak pada masyarakat. Prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap hukum harus menjadi pijakan utama dalam tata kelola pemerintahan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang inklusif serta sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

Selain itu, good governance juga memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi birokrasi, mengurangi potensi korupsi, serta memperkuat legitimasi pemerintahan. Kabupaten Nganjuk telah menunjukkan kemajuan dalam tata kelola pemerintahan dengan meraih indeks SPBE yang sangat baik pada tahun 2023. Namun, peningkatan lebih lanjut tetap diperlukan agar tata kelola pemerintahan semakin optimal. Isu strategis terkait tata kelola pemerintahan meliputi penerapan good governance yang didukung oleh e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

d. Birokrasi yang Adaptif

Dalam menghadapi era Revolusi Industri 4.0, birokrasi harus mampu bertransformasi menjadi lebih fleksibel, responsif, dan efisien. Penerapan

teknologi digital dalam sistem pemerintahan, integrasi data, serta otomatisasi layanan menjadi faktor utama dalam menciptakan birokrasi yang lebih adaptif.

Untuk mencapai hal ini, strategi reformasi birokrasi yang berorientasi pada kinerja perlu diterapkan secara menyeluruh. Struktur organisasi birokrasi juga harus lebih fleksibel dan berbasis hasil agar dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks. Reformasi birokrasi melalui penyederhanaan regulasi dan harmonisasi kebijakan juga menjadi langkah penting dalam mengatasi hambatan birokrasi yang selama ini memperlambat inovasi serta pelayanan publik. Isu strategis terkait birokrasi yang adaptif meliputi penerapan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kinerja.

e. Pemerataan Layanan Publik Berkualitas

Pemerataan akses terhadap layanan publik merupakan aspek penting dalam menciptakan pembangunan yang inklusif. Pemerintah Kabupaten Nganjuk harus memastikan bahwa setiap warga, terutama di daerah terpencil serta kelompok rentan, mendapatkan layanan publik yang setara dan berkualitas.

Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan bahwa layanan publik dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Salah satu strategi utama dalam meningkatkan kualitas layanan publik adalah dengan mengadopsi teknologi informasi untuk mempercepat dan menyederhanakan prosedur layanan. Dengan pemanfaatan teknologi, proses penyediaan layanan dapat dilakukan secara transparan, bertanggung jawab, serta minim hambatan birokratis.

Di sisi lain, peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang bertugas dalam penyediaan layanan publik juga harus menjadi perhatian utama. Koordinasi antarinstansi pemerintah perlu diperkuat guna memastikan layanan publik berjalan dengan efektif dan terintegrasi. Isu strategis terkait pemerataan layanan publik meliputi peningkatan kualitas layanan publik melalui pemanfaatan teknologi dan peningkatan kapasitas SDM.

Dengan mengatasi berbagai isu strategis di atas, Kabupaten Nganjuk dapat mewujudkan sistem pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan inklusif. Hal ini akan menjadi landasan utama bagi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

f. Stabilitas Sosial Politik

Stabilitas sosial dan politik merupakan aspek fundamental dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dalam konteks Kabupaten Nganjuk, supremasi hukum menjadi pilar utama yang menopang keamanan, ketertiban, serta stabilitas ekonomi makro dan kemandirian fiskal. Oleh karena itu, perlu ada pendekatan strategis dalam memperkuat keamanan daerah, menciptakan ketertiban umum, dan memastikan kestabilan ekonomi demi mendukung pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

1) Keamanan Daerah yang Kuat dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Keamanan daerah yang tangguh menjadi prasyarat utama dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan. Keamanan yang terjamin akan meningkatkan rasa aman bagi masyarakat, sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan ekonomi tanpa rasa khawatir. Dengan demikian, masyarakat akan lebih terdorong untuk berkontribusi terhadap pembangunan lokal serta menjaga harmoni sosial di lingkungan mereka.

Di sisi lain, keamanan daerah yang kuat juga menjadi faktor utama dalam efektivitas penegakan hukum. Dengan adanya sistem keamanan yang terorganisir, aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya secara optimal dalam menegakkan supremasi hukum serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran hukum dengan tegas. Untuk mewujudkan hal ini, perlu dilakukan langkah-langkah strategis, seperti penguatan patroli keamanan, implementasi program polisi komunitas, serta pelaksanaan inisiatif pencegahan kejahatan berbasis masyarakat. Selain itu, peningkatan infrastruktur keamanan, seperti pemasangan CCTV di area publik, optimalisasi pencahayaan jalan, serta penyediaan fasilitas keamanan lainnya, akan berkontribusi dalam menciptakan rasa aman di tengah masyarakat.

Dalam upaya mencegah serta menanggulangi potensi radikalisme dan ekstremisme, perlu adanya pendekatan berbasis edukasi, dialog antar komunitas, serta pelaksanaan program deradikalisasi yang berkelanjutan. Dengan memastikan bahwa keamanan daerah tetap terjaga, Kabupaten Nganjuk dapat menarik lebih banyak investasi, mendorong pertumbuhan sektor bisnis, serta menciptakan lapangan kerja baru yang akan berdampak

positif pada stabilitas ekonomi dan sosial. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga kondusivitas lingkungan juga menjadi elemen kunci dalam mendukung keberhasilan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

2) Ketentraman dan Ketertiban Umum

Stabilitas sosial tidak dapat dicapai tanpa adanya ketertiban umum yang terjaga dengan baik. Salah satu tantangan utama yang dihadapi Kabupaten Nganjuk adalah munculnya konflik identitas yang sering terjadi di antara kelompok perguruan silat, khususnya yang melibatkan generasi muda. Konflik semacam ini berpotensi mengganggu harmoni sosial serta mengancam stabilitas daerah jika tidak segera diatasi dengan pendekatan yang tepat.

Untuk menanggulangi permasalahan ini, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, serta masyarakat dalam menciptakan strategi pencegahan konflik yang efektif. Langkah-langkah yang dapat diambil meliputi peningkatan peran tokoh masyarakat dan agama dalam menyosialisasikan nilai-nilai toleransi, penguatan dialog antar kelompok, serta penyelenggaraan program edukasi yang menanamkan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan upaya kolaboratif ini, Kabupaten Nganjuk dapat mewujudkan lingkungan yang lebih harmonis dan bebas dari potensi konflik sosial yang berlarut-larut.

3) Stabilitas Makroekonomi Daerah dan Kemandirian Fiskal

Stabilitas ekonomi daerah merupakan elemen kunci dalam mendukung pertumbuhan dan daya saing ekonomi lokal. Stabilitas ini dapat dicapai melalui keseimbangan dalam pengelolaan variabel ekonomi makro, seperti keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran pembangunan daerah, serta keseimbangan antara tingkat tabungan dan investasi. Selain itu, stabilitas ekonomi juga bergantung pada struktur pasar yang kompetitif serta sektor-sektor ekonomi produktif yang berkembang secara optimal.

Dalam rangka memantapkan stabilitas makro ekonomi daerah, diperlukan kebijakan ekonomi yang terkoordinasi dengan baik. Kebijakan perpajakan dan keuangan daerah harus dirancang secara strategis untuk merangsang masuknya investasi ke Kabupaten Nganjuk. Selain itu,

reformasi kebijakan ekonomi perlu dilakukan guna menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kompetitif bagi para pelaku usaha di tingkat lokal. Mendorong peran sektor perbankan dan koperasi dalam meningkatkan investasi daerah juga menjadi langkah penting dalam menciptakan pasar tenaga kerja yang lebih dinamis serta memperkuat sektor industri, pertanian, perdagangan, dan jasa keuangan.

Namun, tantangan utama yang masih dihadapi Kabupaten Nganjuk adalah kurang optimalnya instrumen kebijakan dan koordinasi dalam menjaga stabilitas ekonomi makro. Dari sisi fiskal, sumber-sumber pendapatan daerah belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal, sehingga masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Ke depan, diperlukan strategi yang lebih inovatif dalam mencari alternatif pembiayaan pembangunan, termasuk peningkatan keterlibatan sektor swasta dalam mendukung proyek-proyek ekonomi strategis di daerah. Dengan demikian, Kabupaten Nganjuk dapat mencapai tingkat kemandirian fiskal yang lebih tinggi serta memperkuat ketahanan ekonominya dalam menghadapi dinamika global yang terus berkembang.

Stabilitas sosial dan politik merupakan prasyarat utama bagi keberhasilan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan memperkuat keamanan daerah, menciptakan ketertiban umum, serta menjaga stabilitas makroekonomi dan kemandirian fiskal, Kabupaten Nganjuk dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, sektor swasta, serta partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang berlandaskan pada supremasi hukum dan prinsip good governance. Dengan strategi yang terarah dan implementasi kebijakan yang efektif, Kabupaten Nganjuk dapat mencapai tujuan pembangunan yang holistik dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun global.

g. Ketahanan Sosial dan Ekologi

Isu-Isu Strategis dalam Pembangunan Kabupaten Nganjuk meliputi :

1) Penguatan Nilai Keagamaan, Moralitas, dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk memiliki keberagaman agama dan budaya yang menjadi bagian integral dari ketahanan sosial masyarakat. Dalam konteks pembangunan, isu

strategis yang dihadapi mencakup upaya mempromosikan toleransi, penghormatan terhadap keberagaman agama dan budaya, serta menjaga kearifan lokal yang telah lama berkembang. Salah satu contohnya adalah ritual mandi di Air Terjun Sedudo, yang merepresentasikan nilai-nilai sosial seperti kasih sayang, kerja sama, dan keharmonisan sosial.

Selain itu, pelestarian situs warisan budaya serta pengembangan praktik keagamaan dan budaya yang selaras dengan nilai-nilai modern dan hak asasi manusia menjadi tantangan tersendiri. Untuk mengatasi isu ini, diperlukan penguatan sistem pendidikan berbasis karakter, kebijakan yang mendukung dialog lintas agama dan budaya, serta implementasi program yang menegaskan identitas nasional yang inklusif berdasarkan Pancasila.

Arus globalisasi yang pesat juga membawa tantangan baru, terutama bagi generasi muda yang rentan terhadap budaya asing yang bertentangan dengan norma sosial dan agama. Oleh karena itu, penguatan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat perlu menjadi prioritas guna membangun masyarakat yang beragama, berakhlak, dan memiliki budaya yang maju.

2) Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Penguatan Karakter

Kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan. Isu strategis yang dihadapi Kabupaten Nganjuk adalah bagaimana menciptakan individu yang berdaya saing tinggi, memiliki karakter kuat, serta mendapatkan kesempatan yang setara dalam mengakses pendidikan dan pelatihan keterampilan. Hal ini mencakup kesetaraan gender dalam pendidikan dan dunia kerja, serta pembangunan keluarga sebagai fondasi utama dalam membentuk karakter masyarakat yang produktif.

Peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya terbatas pada aspek akademik, tetapi juga harus diintegrasikan dengan pendidikan karakter yang melibatkan tenaga pendidik dan orang tua. Selain itu, pelatihan kerja berbasis keterampilan menjadi langkah krusial dalam membangun tenaga kerja yang siap menghadapi tantangan global.

Isu lainnya yang perlu mendapat perhatian adalah meningkatnya permasalahan kesehatan mental dan dekadensi moral di kalangan generasi muda. Sebagai bagian dari bonus demografi, generasi muda harus

dipersiapkan untuk menghadapi dampak negatif globalisasi dan keterbukaan informasi. Oleh karena itu, strategi pembangunan SDM di Kabupaten Nganjuk harus mengutamakan penguatan karakter bangsa melalui pendidikan moral dan etika, sekaligus membekali mereka dengan keterampilan yang relevan di era modern.

3) Ketahanan Energi, Ketersediaan Air, dan Kemandirian Pangan

Ketahanan energi merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi Kabupaten Nganjuk, mengingat ketergantungan yang tinggi pada energi fosil. Oleh karena itu, transisi menuju energi terbarukan menjadi langkah strategis yang perlu didorong guna menciptakan sistem energi yang lebih berkelanjutan dan efisien. Kebijakan yang mendukung diversifikasi sumber energi serta peningkatan infrastruktur energi hijau harus menjadi bagian dari agenda pembangunan daerah sesuai dengan arah kebijakan RPJPN 2025-2045.

Selain itu, Kabupaten Nganjuk juga menghadapi tantangan dalam pengelolaan sumber daya air, di mana beberapa wilayah mengalami kelangkaan air akibat perubahan iklim, pola cuaca yang tidak menentu, serta pengelolaan sumber daya air yang belum optimal. Infrastruktur distribusi air bersih dan sanitasi yang belum memadai turut menjadi faktor yang memperburuk kondisi ini, sehingga berdampak pada produktivitas pertanian dan ketahanan pangan di daerah tersebut.

Sebagai daerah agraris, kemandirian pangan menjadi isu strategis yang tidak bisa diabaikan. Untuk memastikan ketahanan pangan yang berkelanjutan, diperlukan langkah-langkah konkret seperti peningkatan infrastruktur irigasi, optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian, serta dukungan terhadap inovasi di sektor pertanian berbasis teknologi. Pemerintah Kabupaten Nganjuk perlu memperkuat kebijakan yang mendorong pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, guna menjamin keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, ketersediaan air bersih, serta kemandirian pangan di masa depan.

h. Implementasi Transformasi Aspek Pembangunan

Isu-Isu strategis pembangunan Kabupaten Nganjuk antara lain :

1) Pemerataan pembangunan merupakan langkah penting dalam mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi antarwilayah. Salah satu strategi utama

untuk mencapainya adalah dengan memastikan ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di berbagai daerah. Infrastruktur yang memadai akan mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Secara teori, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan membutuhkan dukungan infrastruktur yang baik sebagai tulang punggung aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi. Infrastruktur juga berperan sebagai modal sosial yang dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing ekonomi daerah.

Misalnya, peningkatan konektivitas antarwilayah melalui pembangunan jalan, jembatan, dan sarana transportasi akan mempercepat pergerakan barang dan jasa, serta memperluas akses pasar bagi pelaku usaha lokal.

Data terbaru menunjukkan bahwa indeks Gini di Kabupaten Nganjuk meningkat dari 0,30 pada tahun 2022 menjadi 0,32 pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan adanya ketimpangan dalam distribusi manfaat pembangunan, terutama dari aspek ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan harus dilakukan secara inklusif dengan mempertimbangkan prioritas dan kebutuhan masyarakat agar dampaknya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan. Selain itu, konektivitas antarwilayah harus diperkuat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial yang masih terjadi.

Sesuai dengan Perpres 80 Tahun 2019, pengembangan wilayah berbasis Kawasan Selingkar Willis dan Lintas Selatan harus dimanfaatkan sebagai momentum strategis dalam mendorong pemerataan pembangunan. Fokus utama pengembangan ini mencakup peningkatan nilai tambah sektor agroindustri dan pengembangan kawasan agropolitan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal.

2) Peningkatan Infrastruktur Layanan Dasar dan Lingkungan Hidup Berkualitas

Kualitas infrastruktur layanan dasar sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Beberapa isu utama dalam bidang ini mencakup akses terhadap air bersih, sanitasi yang memadai, perumahan yang layak, serta sarana pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas. Ketersediaan air bersih dan sistem sanitasi yang efektif masih menjadi tantangan di beberapa wilayah, terutama di daerah pedesaan. Infrastruktur

perumahan juga perlu ditingkatkan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, untuk memastikan lingkungan tempat tinggal yang sehat dan layak huni.

Selain infrastruktur dasar, Kabupaten Nganjuk juga menghadapi tantangan lingkungan hidup, seperti banjir perkotaan dan risiko tanah longsor di daerah tertentu. Intensitas hujan yang tinggi dan sistem drainase yang kurang optimal sering menyebabkan gangguan pada aktivitas masyarakat, termasuk sektor perdagangan dan layanan publik. Oleh karena itu, peningkatan manajemen air hujan serta penguatan infrastruktur pengendalian banjir menjadi kebutuhan mendesak.

Masalah lain yang juga penting adalah pencemaran udara dan air akibat limbah industri serta sampah domestik yang belum terkelola dengan baik. Kabupaten Nganjuk perlu mengadopsi strategi pembangunan hijau, seperti program *Low Carbon Green Growth*, untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan meningkatkan keberlanjutan lingkungan. Implementasi teknologi ramah lingkungan serta pelibatan masyarakat dalam program pelestarian lingkungan menjadi langkah penting dalam menciptakan kualitas hidup yang lebih baik. Isu strategis terkait infrastruktur dan lingkungan hidup meliputi:

1) Ketersediaan air bersih dan pengelolaan sumber daya air yang belum optimal.
2) Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana permukiman yang layak huni.
3) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana ekologis.
4) Pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

c. Kesinambungan Pembangunan

Keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Nganjuk menghadapi tantangan utama berupa keterbatasan kapasitas fiskal daerah dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur dan layanan publik. Seiring dengan meningkatnya mobilitas dan aktivitas ekonomi, kebutuhan terhadap pembangunan juga terus bertambah. Namun, keterbatasan anggaran daerah sering kali menjadi hambatan dalam merealisasikan berbagai program pembangunan yang telah direncanakan.

Kabupaten Nganjuk masih bergantung pada sektor pertanian sebagai kontributor utama perekonomian. Oleh karena itu, perlu ada upaya peningkatan nilai tambah komoditas unggulan pertanian agar mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih besar. Selain itu, diperlukan strategi pembiayaan alternatif untuk mendukung pembangunan, termasuk mendorong partisipasi sektor swasta dan masyarakat dalam pembiayaan proyek infrastruktur dan layanan publik.

Untuk menjamin kesinambungan pembangunan, diperlukan sinkronisasi antara prioritas pembangunan daerah dengan kebijakan nasional dan desa. Skema pembiayaan yang lebih strategis antara APBN, APBD, dan APBDes perlu dirancang agar pembangunan dapat berjalan secara lebih efektif dan terarah.

Isu strategis terkait kesinambungan pembangunan meliputi :

1) Perlunya keterlibatan aktif masyarakat dan sektor swasta dalam pembiayaan dan penyelenggaraan pembangunan.
2) Sinkronisasi prioritas pembangunan antara pusat, daerah, dan desa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran.
3) Optimalisasi skema pembiayaan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Dengan mengatasi berbagai isu strategis ini, Kabupaten Nganjuk dapat menciptakan pembangunan yang lebih merata, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Tabel 1.26
Isu Strategis Daerah Kabupaten Nganjuk

No	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1.	Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah yang Belum Optimal	1. Kurang Optimalnya Pengentasan Kemiskinan	1. Persaingan Ekonomi a. Perang Dagang dan Dampaknya terhadap Ekonomi Global b. Tarif dan Hambatan Perdagangan c. Perkembangan Teknologi dan Dampaknya terhadap Daya Saing Ekonomi d. Ketergantungan pada Tarif Impor dan Fluktuasi Harga Global e. Perdagangan Manusia dalam Ekonomi Global	1. Pemberdayaan Ekonomi a. Peningkatan Kesempatan Kerja b. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia c. Pengembangan Sektor Ekonomi Berkelanjutan dan Inklusif d. Pengurangan Ketimpangan Ekonomi	1. Pemantapan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah	1. Transformasi Ekonomi a. Pengembangan potensi dan sektor unggulan daerah
2.	Belum Optimalnya Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar Publik	2. Perlunya Peningkatan Pertumbuhan UMKM dan Akses Perbankan			2. a. Penanggulangan kemiskinan dengan perluasan kesempatan kerja b. Perluasan akses layanan dasar untuk meningkatkan kualitas hidup c. Perluasan akses pasar kerja untuk pekerjaan yang layak dan	2. Transformasi Sosial a. Kesehatan untuk Semua b. Pendidikan berkualitas yang merata c. Pengurangan kemiskinan dan perlindungan sosial

No	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
					meningkatkan kemiskinan d. perluasan akses fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan bagi masyarakat miskin e. pengembangan program-program ekonomi dan kewirausahaan serta program-program yang efektif untuk mengatasi kemiskinan.	
3.	Pembangunan Infrastruktur yang Belum Merata			2. Pembangunan Infrastruktur a. Investasi dalam Pembangunan Infrastruktur b. Meningkatkan Konektifitas c. Pemerataan Pembangunan d. Meningkatkan Inovasi Teknologi		3. Implementasi Transformasi Aspek Pembangunan a. Pemerataan pembangunan b. Peningkatan Infrastruktur Layanan Dasar dan Lingkungan Hidup Berkualitas c. Kesinambungan Pembangunan
4.	Terdapatnya Potensi Konflik Sosial dan Relatif Tingginya Angka Kekerasan Terhadap		2. Migrasi a. Anak-Anak Migran yang Rentan Terabaikan			4. Ketahanan Sosial dan Ekologi a. Penguatan Nilai Keagamaan,

No	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
	Perempuan dan Anak Serta Perkawinan Anak		b. Tingkat Migrasi Global yang Meningkat c. Politik Anti-Migrasi dan Dampaknya d. Migrasi Iklim dan Lingkungan e. Tantangan Keamanan dalam Migrasi			Moralitas, dan Kebudayaan b. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Penguatan Karakter c. Ketahanan Energi, Ketersediaan Air, dan Kemandirian Pangan
			3. Konflik Internasional a. Konflik Israel-Palestina b. Konflik di Suriah c. Konflik di Ukraina d. Krisis Politik dan Ekonomi di Venezuela e. Perang dan Ketidakstabilan di Afghanistan			
5.	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat yang Masih Rendah	3. Rendahnya Keterampilan Tenaga Kerja dan Tingginya Angka Pengangguran				
6.	Kualitas Sumber Daya Manusia yang Belum Optimal	4. Rendahnya Angka Partisipasi Sekolah dan Meningkatnya Kenakalan Remaja			3. Pengembangan sumber daya manusia berkualitas melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan dan standar hidup yang layak dan berkualitas	

No	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
7.	Ketahanan Pangan, Kualitas Lingkungan Hidup, dan Penanggulangan Bencana	5. Perlunya Upaya Peningkatan Kualitas Lingkungan	4. Perubahan Iklim dan Lingkungan a. Pemanasan Global b. Curah hujan yang tidak menentu dan lebih ekstrem pemicu utama banjir dan tanah longsor c. Keberlangsungan hidup satwa liar	3. Lingkungan Hidup a. Perubahan Iklim b. Pencemaran Lingkungan c. Pengelolaan Sumber Daya Alam d. Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca	4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana alam dengan mengutamakan prinsip pembangunan berkelanjutan	5. Ketahanan Sosial dan Ekologi a. Penguatan Nilai Keagamaan, Moralitas, dan Kebudayaan b. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Penguatan Karakter c. Ketahanan Energi, Ketersediaan Air, dan Kemandirian Pangan
		6. Potensi Peningkatan Risiko Bencana				
8.	Tata Kelola Pemerintahan yang Belum Optimal	7. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	5. Penggunaan Teknologi a. Ketergantungan Terhadap Teknologi dan Sumber Daya b. Keamanan Siber dan Perlindungan Data c. Peran Kecerdasan Buatan dalam Transformasi Ekonomi d. Inovasi Teknologi dalam Sektor Kesehatan e. Privasi dan Pengawasan Digital	4. Pertahanan Keamanan a. Penanggulangan Terorisme b. Perlindungan Terhadap Kedaulatan Negara c. Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara d. Pemberantasan Narkoba	5. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik	6. Transformasi Tata Kelola a. Peningkatan kualitas dan profesionalisme ASN yang didukung dengan penguasaan IPTEK b. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan c. Penerapan good governance yang didukung oleh egovernment untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. d. Penerapan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada

No	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
						kinerja. e. Peningkatan kualitas layanan publik melalui pemanfaatan teknologi dan peningkatan kapasitas SDM. 7. Stabilitas sosial politik a. Keamanan Daerah yang Kuat dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan b. Ketentraman dan Ketertiban Umum c. Stabilitas Makroekonomi Daerah dan Kemandirian Fiskal

Sumber data : RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029

1.1.2.2 Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi dan misi Kepala Daerah yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk terpilih, Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, S.E., S.H., M.M., M.B.A., dan Trihandy Cahyo Saputro, S.T., yang secara resmi dilantik oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Februari 2025 telah dituangkan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029. Sebagai dokumen perencanaan strategis, RPJMD berfungsi sebagai panduan utama dalam mengarahkan pembangunan daerah agar selaras dengan janji politik kepala daerah dan wakilnya. Oleh karena itu, Visi, Misi, serta Program Kerja yang dirumuskan dalam RPJMD bukan hanya sekadar arah kebijakan, tetapi juga bentuk komitmen yang harus diimplementasikan secara nyata dan berkelanjutan dalam lima tahun ke depan. Diharapkan, kebijakan ini dapat memastikan pembangunan daerah berlangsung secara terstruktur, konsisten, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nganjuk.

A. Visi Pembangunan

Sebagai upaya untuk menjamin keberlanjutan pembangunan daerah, maka dilakukan telaah terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045 dengan Visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Nganjuk adalah: ***"Nganjuk Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan"***. Visi ini tentunya tidak dapat dilepaskan dari konteks lokal Nganjuk yang sangat dinamis dan mengalami pergeseran pada beberapa sektor. Oleh karena itu, penyusunan Visi Jangka Menengah, selain didasarkan pada Visi Jangka Panjang, juga tidak terlepas dengan konteks masa kini yang merupakan cerminan dari kondisi masyarakat saat ini.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 disusun dengan mengintegrasikan kebijakan RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045 dengan Visi, Misi, dan Program Unggulan Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk.

Visi dan Misi yang ditetapkan dalam dokumen ini berperan sebagai pondasi utama dalam menentukan strategi, arah kebijakan, serta program pembangunan yang akan dijalankan dalam lima tahun ke depan. Dengan pendekatan yang terarah dan berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat, visi ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam menciptakan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berdaya saing, sehingga Kabupaten Nganjuk dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh warganya. Visi pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 adalah :

Mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang Maju, Sejahtera, dan Bermartabat

Visi tersebut mengandung 3 (tiga) pokok visi yang merupakan gambaran atas kondisi Kabupaten Nganjuk yang diharapkan dapat terwujud pada akhir periode RPJMD, yaitu ***"Maju"***, ***"Sejahtera"***, dan **Bermartabat**".



Secara substansi, penjelasan dari ketiga pokok visi antara lain sebagai berikut:

1) Konsep **"Maju"** dalam visi ini menggambarkan kondisi masyarakat yang maju dimana masyarakat yang maju adalah mereka yang berkembang secara ekonomi, sosial, dan budaya, serta mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan identitasnya. Mereka memiliki akses luas terhadap pendidikan dan teknologi, memungkinkan mereka untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas hidup. Infrastruktur yang memadai, seperti jalan, transportasi, dan layanan digital, mendukung aktivitas ekonomi dan keseharian mereka, sementara pemerintahan yang transparan serta partisipatif memastikan kebijakan yang berpihak pada kemajuan bersama. Selain itu, nilai-nilai sosial seperti gotong royong dan kepedulian terhadap lingkungan tetap dijaga, menciptakan keseimbangan antara kemajuan dan keberlanjutan. Dengan masyarakat yang produktif, kreatif, dan terbuka terhadap perubahan, kemajuan tidak hanya tercermin dalam aspek material, tetapi juga dalam pola pikir dan kesejahteraan yang berkelanjutan.

2) Pokok visi **"Sejahtera"**. Masyarakat sejahtera adalah komunitas yang hidup dalam keseimbangan antara ekonomi yang stabil, sosial yang harmonis, serta lingkungan yang lestari. Setiap individu memiliki akses yang adil terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang baik, serta lapangan pekerjaan yang layak, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan nyaman. Kehidupan sosial diwarnai dengan rasa kebersamaan dan gotong royong, menciptakan lingkungan yang aman dan saling mendukung. Pemerintah yang transparan dan partisipatif memastikan setiap warga dapat berkontribusi dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Selain itu, kesadaran akan keberlanjutan lingkungan menjadikan masyarakat lebih bijak dalam mengelola sumber daya alam, menjaga kebersihan, dan menciptakan ruang hidup yang sehat. Dengan keseimbangan ini, masyarakat tidak hanya mencapai kesejahteraan ekonomi, tetapi juga kebahagiaan dan ketenangan dalam kehidupan sehari-hari.
3) Pokok visi **"Bermartabat"**. Masyarakat yang bermartabat adalah menciptakan kehidupan yang sejahtera, adil, dan berkelanjutan, di mana setiap individu dihargai dan memiliki kesempatan untuk berkembang. Pembangunan ini tidak hanya berfokus pada kemajuan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Masyarakat yang bermartabat memiliki nilai-nilai etika, keadilan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, sehingga tercipta lingkungan yang inklusif dan harmonis. Selain itu, pembangunan ini bertujuan untuk memperkuat identitas budaya dan moral, membangun kesadaran akan tanggung jawab sosial, serta mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan demokratis. Dengan demikian, masyarakat dapat hidup dengan penuh martabat, memiliki kemandirian, serta mampu menghadapi tantangan masa depan dengan kesiapan dan optimisme.

B. Misi Pembangunan

Sebagai upaya untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 tersebut, maka dirumuskan Misi Pembangunan Kabupaten Nganjuk sebagaimana disajikan dalam gambar berikut:



Secara lebih detil, penjelasan mengenai Misi Pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 diuraikan sebagai berikut :

1) Misi **"Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan YME, serta dapat memelihara kerukunan, ketenteraman, dan ketertiban"**. Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi "Sejahtera", dan "Bermartabat". Misi pembangunan "Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan MYE, serta dapat memelihara kerukunan, ketenteraman, dan ketertiban" bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang berkembang secara seimbang, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun spiritual. Masyarakat yang dinamis berarti mereka yang aktif berpartisipasi dalam pembangunan, berinovasi, dan mampu beradaptasi dengan perubahan tanpa kehilangan jati diri. Harmoni dalam kehidupan sosial diwujudkan melalui sikap saling menghormati, bekerja sama, dan menjaga hubungan yang baik antarindividu maupun kelompok. Landasan spiritual dalam pembangunan, yang berakar pada nilai-nilai Ketuhanan MYE, memberikan arah moral bagi masyarakat agar setiap keputusan dan tindakan didasarkan pada keadilan, etika, serta kesejahteraan bersama. Selain itu, pembangunan ini juga berupaya memelihara kerukunan, ketenteraman, dan ketertiban, sehingga masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang aman dan nyaman. Hal ini dicapai melalui sistem hukum yang adil, kebijakan yang inklusif, serta keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan stabilitas sosial. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya berorientasi pada kemajuan fisik atau ekonomi, tetapi juga pada pembentukan karakter masyarakat yang berbudaya, religius, dan harmonis dalam kehidupan bersama.

2) Misi **″Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalaui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan″.** Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi "Maju", "Sejahtera", dan "Bermartabat".Birokrasi yang bersih menekankan pada pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), sehingga seluruh kebijakan dan layanan publik dapat berjalan dengan jujur dan berintegritas. Profesionalisme dalam birokrasi berarti setiap aparatur negara memiliki kompetensi yang tinggi, bekerja sesuai dengan standar yang jelas, serta mampu memberikan layanan yang cepat dan tepat kepada masyarakat. Sementara itu, akuntabilitas memastikan bahwa setiap keputusan dan penggunaan anggaran pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat terus meningkat. Dalam mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien, pemerintahan harus aspiratif, yakni mendengarkan dan memahami kebutuhan serta harapan masyarakat sebelum merumuskan kebijakan. Selain itu, pemerintahan yang partisipatif membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut serta dalam proses perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pembangunan. Transparansi juga menjadi aspek penting, di mana seluruh informasi terkait kebijakan, anggaran, dan capaian pembangunan harus mudah diakses oleh publik guna mencegah penyalahgunaan wewenang. Dengan adanya birokrasi yang bersih, profesional, dan akuntabel, serta didukung oleh penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif, dan transparan, pembangunan di Kabupaten Nganjuk dapat berjalan lebih efektif dan efisien, sehingga berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3) Misi **″Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan″**. Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok "Maju", "Sejahtera" dan "Bermartabat". Misi ini bertujuan untuk menciptakan fondasi yang kuat bagi perkembangan daerah melalui pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Infrastruktur yang memadai dan berkualitas, seperti jalan, jembatan, transportasi, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan, merupakan faktor utama dalam meningkatkan konektivitas serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Percepatan pembangunan infrastruktur memungkinkan peningkatan aksesibilitas antarwilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta menarik investasi yang dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi

masyarakat. Infrastruktur yang baik juga meningkatkan efisiensi layanan publik, memastikan masyarakat dapat mengakses fasilitas umum dengan lebih mudah dan nyaman. Namun, percepatan pembangunan ini harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem dan kehidupan masyarakat di masa depan. Oleh karena itu, dalam proses pembangunan, perlu diterapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, seperti penggunaan material ramah lingkungan, pengelolaan limbah yang baik, serta perlindungan terhadap sumber daya alam. Dengan pendekatan ini, pembangunan infrastruktur tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi yang cepat, tetapi juga memastikan bahwa kemajuan yang dicapai tetap harmonis dengan lingkungan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi saat ini maupun yang akan datang.

4) Misi **″Meningkatkan kualitas, pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas″.** Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi “Maju” , “Sejahtera”, dan “Bermartabat”. berfokus pada pengembangan manusia sebagai aset utama dalam kemajuan daerah. Dalam bidang **pendidikan**, peningkatan kualitas meliputi penyediaan fasilitas belajar yang lebih baik, peningkatan kompetensi guru, serta kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Pendidikan yang berkualitas akan melahirkan individu yang cerdas, inovatif, dan siap bersaing di dunia kerja. Sementara dalam bidang **kesehatan**, pelayanan yang bermutu mencakup ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai, tenaga medis yang profesional, serta akses layanan kesehatan yang lebih mudah dan merata. Kesehatan yang baik akan mendukung produktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Melalui sinergi antara pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, masyarakat dapat berkembang secara optimal, baik dari segi intelektual maupun fisik. Hal ini akan menciptakan **sumber daya manusia yang unggul**, produktif, serta mampu berkontribusi dalam pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
5) Misi **″Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal″**. Misi ini sesuai dengan visi “Maju” dan “Sejahtera”. Misi pembangunan ini menekankan peran aktif pemerintah dalam mendukung sektor ekonomi yang berbasis pada kekuatan masyarakat, terutama dalam bidang pertanian dan sumber daya lokal. Dalam konteks pertanian, misi ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani melalui kebijakan yang berpihak pada mereka, seperti penyediaan akses permodalan,

distribusi pupuk dan benih berkualitas, serta pembangunan infrastruktur pertanian seperti irigasi dan jalan usaha tani. Selain itu, pendampingan teknologi pertanian dan pelatihan bagi petani juga menjadi aspek penting untuk meningkatkan daya saing hasil pertanian di pasar. Di sisi lain, pengembangan potensi lokal mencakup pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berbasis pada kekayaan sumber daya daerah, seperti produk olahan hasil pertanian, kerajinan tangan, atau pariwisata berbasis kearifan lokal. Dengan dukungan kebijakan yang prorakyat, seperti kemudahan perizinan usaha, akses pasar, serta pelatihan keterampilan, ekonomi lokal dapat tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan. Melalui keberpihakan pemerintah yang nyata dalam bentuk regulasi, bantuan, dan fasilitasi, ekonomi kerakyatan dapat berkembang lebih mandiri dan berdaya saing, menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih inklusif dan berkelanjutan.

6) Misi pembangunan **"Meningkatkan pembangunan sektor pariwisata serta sektor produktif lain, melalui peningkatan produktivitas berbasis teknologi tepat guna"** bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dengan memanfaatkan potensi wisata dan sektor produktif lainnya secara lebih efisien dan inovatif. Misi ini sesuai dengan visi "Maju" , "Sejahtera", dan "Bermartabat". Dalam sektor pariwisata, pembangunan diarahkan pada pengembangan destinasi wisata unggulan, peningkatan infrastruktur pendukung, serta promosi yang lebih luas untuk menarik wisatawan. Selain itu, pemanfaatan teknologi, seperti digital marketing dan sistem reservasi online, dapat meningkatkan daya saing pariwisata daerah di tingkat nasional maupun internasional. Sementara itu, dalam sektor produktif lainnya, seperti industri kreatif, pertanian, dan perdagangan, penerapan teknologi tepat guna menjadi kunci utama dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Teknologi ini mencakup mesin-mesin produksi modern yang hemat energi, sistem irigasi cerdas untuk pertanian, serta platform digital untuk mempermudah akses pasar bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM). Dengan pendekatan ini, sektor pariwisata dan sektor produktif lainnya dapat berkembang lebih pesat, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
7) Misi pembangunan **"Meningkatkan kebanggaan terhadap kesenian, kebudayaan dan kearifan lokal"** bertujuan untuk melestarikan serta mengangkat nilai-nilai budaya daerah agar tetap hidup dan dihargai oleh masyarakat, terutama di tengah arus modernisasi. Misi ini merujuk pada visi "Sejahtera" dan "Bermartabat"

Kesenian dan kebudayaan lokal merupakan identitas yang mencerminkan karakter suatu daerah. Oleh karena itu, upaya pelestarian dapat dilakukan melalui pendidikan budaya sejak dini, penyelenggaraan festival seni, serta dukungan terhadap para seniman dan budayawan agar tetap berkarya. Selain itu, promosi budaya melalui media digital dan platform wisata juga dapat meningkatkan daya tarik daerah bagi wisatawan serta memperkenalkan warisan budaya ke tingkat nasional maupun internasional. Sementara itu, kearifan lokal yang mencakup tradisi, adat istiadat, dan nilai-nilai sosial harus terus dipertahankan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama dalam menjaga praktik-praktik budaya yang mencerminkan kearifan leluhur, seperti dalam tata cara bertani, pengelolaan lingkungan, maupun kehidupan sosial yang berbasis gotong royong. Dengan meningkatnya kebanggaan terhadap kesenian, kebudayaan, dan kearifan lokal, masyarakat tidak hanya menjaga warisan leluhur tetapi juga dapat menjadikannya sebagai potensi ekonomi, misalnya melalui pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis budaya. Hal ini akan menciptakan keseimbangan antara kemajuan zaman dengan pelestarian identitas daerah.

C. Tujuan dan Sasaran

Rumusan Visi dan Misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di selanjutnya diterjemahkan ke dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah. Setiap visi dan misi pembangunan yang telah dirumuskan harus dijabarkan secara konkret dalam bentuk tujuan yang jelas serta sasaran yang terukur, sehingga dapat menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan daerah.

Tujuan pembangunan mencerminkan kondisi yang ingin dicapai dalam periode tertentu, sedangkan sasaran pembangunan merupakan indikator keberhasilan dari setiap tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, setiap tujuan dan sasaran harus disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek strategis, termasuk potensi daerah, kebutuhan masyarakat, serta tantangan yang mungkin dihadapi dalam proses pembangunan.

Secara lebih rinci, perumusan Tujuan dan Sasaran yang berlandaskan pada setiap misi dapat dilihat dalam pemaparan berikut. Setiap misi akan diuraikan dalam bentuk kebijakan dan program prioritas yang akan dijalankan oleh pemerintah daerah untuk mencapai visi pembangunan yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan yang dilakukan memiliki arah yang jelas, berbasis pada data dan analisis yang komprehensif, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

1) Penjabaran Tujuan dan Sasaran pada Misi 1

Pada Misi 1, dijabarkan ke dalam satu tujuan dan satu sasaran. Pembangunan di Kabupaten Nganjuk didasarkan pada visi yang mengedepankan kehidupan masyarakat yang harmonis, tertib, dan sejahtera. Untuk mencapai visi tersebut, salah satu misi utama yang diusung adalah "MISI-1," yang bertujuan "**Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis dan toleran"**. Misi ini menekankan pentingnya keseimbangan antara dinamika sosial dan stabilitas kehidupan masyarakat, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang kondusif dalam kehidupan sosial, dan budaya.

Dalam konteks ini, dinamika sosial yang diharapkan mencerminkan masyarakat yang aktif, inovatif, dan partisipatif dalam pembangunan daerah, sementara harmonisasi kehidupan sosial menekankan aspek kerukunan, ketenteraman, dan ketertiban. Pemerintah Kabupaten Nganjuk berupaya menciptakan masyarakat yang tidak hanya berkembang dalam aspek ekonomi dan teknologi, tetapi juga tetap memegang teguh nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan yang menjadi fondasi utama dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagai manifestasi dari misi ini, pembangunan yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga memastikan bahwa kesejahteraan spiritual dan sosial masyarakat tetap terjaga. Pembangunan yang berlandaskan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa akan menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih bermoral, memiliki solidaritas tinggi, serta menjunjung tinggi norma dan etika sosial yang berlaku. Tujuan ini diukur dengan Indeks Kesalehan Sosial.

Untuk mengukur keberhasilan misi dan tujuan ini, terdapat satu sasaran yang ingin dicapai, yakni **"Meningkatnya kerukunan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat"**. Hal ini mencakup upaya menciptakan lingkungan sosial yang stabil, minim konflik, dan mendorong toleransi antarwarga. Dalam praktiknya, pemerintah dapat menjalankan berbagai program seperti penguatan lembaga adat, penyuluhan tentang pentingnya toleransi dan keberagaman, serta kebijakan yang mendukung inklusivitas sosial. Pada sasaran ini juga mengupayakan ketentraman dan ketertiban masyarakat untuk mendukung terwujudnya masyarakat harmonis. Sasaran ini diukur dengan Indeks Kerukunan Umat Beragama dan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas.

Secara keseluruhan, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Kabupaten Nganjuk mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan

masyarakat yang harmonis dan toleran. Pembangunan yang berbasis nilai-nilai Ketuhanan tidak hanya berorientasi pada aspek material, tetapi juga menanamkan prinsip-prinsip moral dan kebersamaan dalam kehidupan masyarakat. Dengan pendekatan ini, diharapkan Kabupaten Nganjuk dapat berkembang menjadi daerah yang maju dan berdaya saing, namun tetap mempertahankan identitas sosial dan budaya yang menjadi ciri khasnya.

2) Penjabaran Tujuan dan Sasaran pada Misi 2

Misi 2 berfokus pada peningkatan kinerja birokrasi. Misi ini bertujuan "Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik". Tujuan ini diukur dengan Indeks Reformasi Birokrasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintahan Kabupaten Nganjuk menekankan prinsip aspiratif, partisipatif, dan transparan dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat lebih terlibat dalam proses pengambilan kebijakan, serta memastikan bahwa pemerintah bekerja secara terbuka dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Tata kelola pemerintahan yang baik akan berdampak langsung pada efisiensi administrasi, transparansi dalam pengelolaan anggaran, serta peningkatan kualitas layanan publik. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan manfaat dari birokrasi yang lebih responsif, cepat, dan inovatif dalam menangani berbagai kebutuhan mereka. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka ditetapkan beberapa sasaran pembangunan.

Sasaran Pertama, **"Meningkatnya kualitas manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN)"**, yang diukur melalui Nilai Sistem Merit. Hal ini penting agar birokrasi memiliki kapasitas dan kompetensi dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan.

Sasaran Kedua, **"Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah"**, yang diukur melalui Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sasaran ini memastikan bahwa setiap perangkat daerah dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan.

Sasaran Ketiga, "**Meningkatnya pemerintahan berintegritas dan pengawasan berkualitas"**. Sasaran ini diukur dengan indeks Integritas Pemerintah Daerah dan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Integritas menjadi pilar penting dalam membangun kepercayaan publik serta pencegahan praktik korupsi di lingkungan birokrasi.

Sasaran Keempat, **"Meningkatnya tata kelola keuangan dan kapasitas fiskal daerah"**. Sasaran ini diukur dengan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dan Rasio kapasitas fiskal daerah. Hal tersebut menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara transparan, akuntabel, serta berdaya saing.

Sasaran Kelima, **"Meningkatnya kualitas layanan publik"**. Sasaran ini diukur melalui Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik. Dengan sasaran ini, pemerintah daerah menekankan pentingnya peningkatan mutu layanan yang langsung dirasakan masyarakat.

Sasaran Keenam adalah **"Meningkatnya transformasi digital pemerintah daerah"**, yang diukur melalui Indeks Pemerintah Digital. Transformasi digital menjadi fondasi penting dalam membangun birokrasi modern, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Dengan pencapaian seluruh sasaran tersebut, Misi 2 diharapkan mampu mewujudkan birokrasi Kabupaten Nganjuk yang bersih, profesional, akuntabel, serta berintegritas, sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

3) Penjabaran Tujuan dan Sasaran pada Misi 3

Misi 3 berfokus pada percepatan pembangunan infrastruktur publik. Infrastruktur yang memadai dan berkualitas menjadi salah satu faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah ini. Selain itu, misi ini juga menekankan pentingnya pembangunan yang tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Artinya, dalam setiap pembangunan infrastruktur, harus ada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan, sehingga pembangunan yang dilakukan tidak hanya bermanfaat untuk jangka pendek, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Tujuan utama dari misi ini adalah "**Meningkatkan infrastruktur publik yang handal dan berkelanjutan"**. Tujuan ini diukur dengan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur. Infrastruktur yang handal mencerminkan fasilitas publik yang berkualitas, tahan lama, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan baik. Infrastruktur yang berkelanjutan berarti bahwa pembangunan yang dilakukan tidak hanya memperhatikan aspek teknis, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Dengan demikian, pembangunan yang dilakukan dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat tanpa merusak ekosistem yang ada. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan beberapa sasaran pembangunan.

Sasaran Pertama, **"Meningkatnya infrastruktur konektivitas wilayah yang handal"**. Sasaran ini diukur melalui indikator Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota serta rasio konektivitas. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menyediakan infrastruktur transportasi yang dapat mendukung kelancaran mobilitas orang dan barang, sehingga memperkuat pertumbuhan ekonomi lokal maupun regional.

Sasaran Kedua, **"Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan"**. Sasaran ini diukur melalui indikator persentase rumah tangga dengan akses pada hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan. Dengan adanya peningkatan akses terhadap perumahan yang memadai, masyarakat diharapkan memiliki kualitas hidup yang lebih baik serta lingkungan pemukiman yang sehat.

Sasaran Ketiga, **"Meningkatnya kualitas lingkungan hidup"**. Sasaran ini tercermin melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah. Hal tersebut menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan pembangunan infrastruktur dengan kelestarian lingkungan, sehingga pertumbuhan ekonomi tanpa mengesampingkan kualitas ekosistem dan keberlanjutan sumber daya alam.

Sasaran Keempat adalah **"Meningkatkan ketangguhan dalam penanggulangan bencana"**. Sasaran ini diukur dengan Indeks Risiko Bencana. Kabupaten Nganjuk, seperti banyak daerah lain di Indonesia, berisiko menghadapi berbagai bencana alam seperti banjir, tanah longsor, atau gempa bumi. Oleh karena itu, pemerintah menargetkan pembangunan yang tidak hanya memperhatikan aspek kesejahteraan sosial, tetapi juga meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Program seperti pelatihan mitigasi bencana, peningkatan infrastruktur tahan bencana, serta penyediaan sistem peringatan dini menjadi bagian dari strategi yang diterapkan.

Secara keseluruhan, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan ini menegaskan komitmen Kabupaten Nganjuk dalam membangun infrastruktur yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Dengan adanya infrastruktur yang handal dan berkelanjutan, masyarakat akan mendapatkan manfaat yang lebih besar dalam hal aksesibilitas, efisiensi ekonomi, serta kualitas hidup yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk menciptakan kemajuan daerah yang lebih inklusif dan berdaya saing tinggi.

4) Penjabaran Tujuan dan Sasaran pada Misi 4

Pembangunan di Kabupaten Nganjuk memiliki visi yang kuat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial. Oleh karena itu, Misi 4 difokuskan pada upaya meningkatkan kualitas layanan di sektor-sektor tersebut agar mampu menghasilkan SDM yang berkualitas, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan zaman. Pendidikan yang baik akan menciptakan generasi yang cerdas dan produktif, sementara layanan kesehatan yang optimal akan memastikan masyarakat tetap sehat dan dapat berkontribusi secara maksimal dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, peningkatan daya beli masyarakat juga menjadi perhatian utama, karena kesejahteraan ekonomi sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup.

Sejalan dengan misi ini, Tujuan Pertama adalah untuk "**Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas"**. Tujuan ini diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat sejumlah sasaran yang harus diwujudkan secara terintegrasi.

Sasaran Pertama, **"Meningkatnya akses dan mutu pendidikan"**. Sasaran ini diukur dengan Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan lama Sekolah. Pendidikan yang bermutu akan melahirkan generasi cerdas, kritis, dan produktif.

Sasaran Kedua, **"Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat"**. Sasaran ini diukur dengan Usia Harapan hidup. Pelayanan kesehatan yang baik akan menjamin terwujudnya masyarakat yang sehat dan berdaya. Pada saat yang sama, didukung dengan peningkatan daya beli masyarakat juga harus mendapat perhatian agar kesejahteraan dan kualitas hidup dapat terus meningkat.

Sasaran Ketiga, **"Meningkatnya kesetaraan gender"**. Sasaran ini diukur dengan Indeks Ketimpangan Gender. pembangunan manusia tidak boleh terlepas dari aspek keadilan dan perlindungan. Oleh karena itu, peningkatan kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak menjadi sasaran strategis yang harus diwujudkan. Perempuan dan anak sebagai kelompok yang rentan perlu mendapatkan perlindungan yang memadai agar dapat tumbuh, berkembang, dan berkontribusi secara optimal dalam pembangunan.

Sasaran Keempat, **"Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga"**. sasaran ini diukur dengan Indeks Pembangunan Keluarga. Peningkatan kualitas pembangunan keluarga menjadi pilar penting dalam memperkuat ketahanan sosial masyarakat. Keluarga yang sehat, harmonis, dan sejahtera akan menjadi basis utama dalam mencetak generasi yang berkualitas. Dengan pembangunan keluarga yang

baik, diharapkan akan tercipta masyarakat yang kuat, berkarakter, dan siap menghadapi dinamika sosial-ekonomi yang terus berkembang.

Sasaran Kelima, **"Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga**". Sasaran ini diukur dengan Persentase peningkatan prestasi pemuda dan olahraga. Pembangunan sumber daya manusia juga diarahkan pada peningkatan prestasi pemuda dan olahraga. Pemuda sebagai generasi penerus bangsa perlu diberikan ruang yang luas untuk mengembangkan potensi diri melalui berbagai kegiatan positif, termasuk dalam bidang olahraga. Prestasi olahraga tidak hanya membangun kebanggaan daerah, tetapi juga memperkuat disiplin, sportivitas, dan kesehatan generasi muda.

Sasaran Keenam, **"Meningkatnya literasi masyarakat**". Sasaran ini diukur dengan indeks pembangunan literasi. Literasi tidak hanya terbatas pada kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga mencakup literasi digital, finansial, serta literasi sosial yang dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dalam beradaptasi dengan perkembangan global.

Tujuan Kedua adalah **"Meningkatnya pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan".** Untuk mengukur tujuan dimaksud menggunakan Tingkat Kemiskinan dan Gini ratio. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, terdapat beberapa sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Sasaran Pertama, "**Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif"**. Sasaran ini diukur dengan indeks kesejahteraan sosial. Perlindungan sosial yang dirancang dengan baik akan menjadi bantalan (*social safety net*) yang mampu menjaga masyarakat dari berbagai risiko, baik akibat guncangan ekonomi, bencana alam, maupun perubahan sosial lainnya. Sistem perlindungan sosial yang adaptif diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi kelompok rentan, serta menjaga daya beli masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Sasaran Kedua, "**Meningkatnya kemandirian desa"**. Sasaran ini diukur dengan indikator Indeks Desa. Sasaran ini menekankan pentingnya pembangunan berbasis masyarakat, di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang aktif dalam menentukan arah pembangunan di lingkungannya. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui peningkatan kapasitas, keterampilan, serta akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial. Pada saat yang sama, penguatan kemandirian desa menjadi prioritas agar desa mampu mengelola potensi yang dimiliki secara optimal, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Dengan demikian, desa tidak hanya menjadi pusat pertumbuhan baru,

tetapi juga berkontribusi secara signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan dan memperkecil ketimpangan antar wilayah.

Secara keseluruhan, pembangunan Kabupaten Nganjuk melalui Misi 4 diarahkan untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, sehat, dan berpendidikan dengan menjamin akses yang adil bagi semua kalangan. Dengan SDM yang berkualitas dan sistem jaminan sosial yang kuat, diharapkan masyarakat dapat hidup lebih mandiri dan berdaya saing tinggi. Beriringan dengan terwujudnya SDM yang berkualitas, pemerintah juga berupaya mengentaskan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan diharap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nganjuk dapat tercapai dan terus berkembang menjadi daerah yang maju dan inklusif.

5) Penjabaran Tujuan dan Sasaran pada Misi 5

Pembangunan Kabupaten Nganjuk diarahkan untuk memperkuat sektor ekonomi dengan menitikberatkan pada potensi lokal dan pertanian sebagai fondasi utama. Misi pembangunan ini adalah "**Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal"**. Dengan pendekatan ini, pemerintah daerah berupaya memberikan dukungan yang lebih besar terhadap sektor pertanian dan usaha berbasis sumber daya lokal guna menciptakan ekonomi yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Langkah ini mencerminkan komitmen untuk memberdayakan masyarakat, khususnya petani dan pelaku usaha kecil, agar mereka dapat lebih berkembang dan berdaya saing dalam perekonomian daerah.

Sejalan dengan misi tersebut, tujuan dari misi ini adalah **"Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif"**. Tujuan ini diukur dengan indikator pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang dimaksud bukan hanya ditunjukkan oleh peningkatan angka PDRB, tetapi juga memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, memperluas akses terhadap peluang usaha, dan memperkuat basis ekonomi kerakyatan sehingga pembangunan ekonomi dapat berjalan lebih adil dan merata. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, ditetapkan beberapa sasaran strategis.

Sasaran Pertama, **"Meningkatnya nilai tambah pertanian"**. Sasaran ini diukur dengan indikator Pertumbuhan PRDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian dilakukan melalui modernisasi

teknologi, penguatan rantai pasok, dan diversifikasi produk olahan sehingga pendapatan petani dan nelayan dapat meningkat.

Sasaran Kedua, **"Meningkatnya nilai tambah perindustrian dan perdagangan"**. Sasaran ini diukur dengan indikator Rasio PDRB Industri Pengolahan dan Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Nilai tambah perindustrian dan perdagangan dilakukan dengan mendorong industri pengolahan berbasis potensi lokal, memperluas akses distribusi, serta memanfaatkan teknologi digital agar produk daerah dapat bersaing di pasar yang lebih luas.

Sasaran Ketiga, **"Meningkatnya investasi daerah"**. Sasaran ini diukur dengan indikator nilai investasi. Peningkatan investasi daerah melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, kemudahan perizinan, penyediaan infrastruktur, dan promosi potensi unggulan daerah, sehingga arus modal yang masuk dapat membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan kapasitas produksi daerah.

Sasaran Keempat, **"Meningkatnya daya saing koperasi dan usaha mikro"**. Sasaran ini diukur dengan indikator Persentase peningkatan volume usaha mikro dan Persentase peningkatan koperasi berkualitas. Meningkatknya daya saing koperasi dan usaha mikro melalui perbaikan kelembagaan, akses permodalan, serta digitalisasi usaha agar koperasi dan UMKMK mampu menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Selain itu, dukungan terhadap koperasi merah putih yang merupakan arahan dari pemerintah pusat tetap dilaksanakan. Pemerintah daerah berupaya memperkuat peran koperasi dan usaha mikro agar lebih kompetitif dalam menghadapi persaingan pasar. Dengan adanya dukungan terhadap usaha kecil dan koperasi, diharapkan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Sasaran Kelima, **"Menurunnya pengangguran terbuka"**. Sasaran ini diukur dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka. Menurunnya pengangguran terbuka dengan memperluas kesempatan kerja melalui sektor-sektor produktif, khususnya pertanian, perikanan, perdagangan, industri, pariwisata serta UMKMK.

Sasaran Keenam, **"Meningkatnya ketahanan pangan daerah"**. Sasaran ini diukur dengan indikator Indeks Ketahanan Pangan Daerah. Meningkatnya ketahanan pangan daerah dilakukan melalui peningkatan produksi, pengendalian distribusi dan harga, serta penyediaan cadangan pangan strategis agar masyarakat tetap memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan terjangkau.

Secara keseluruhan, strategi pembangunan Kabupaten Nganjuk melalui penguatan ekonomi berbasis pertanian dan potensi lokal tidak hanya bertujuan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memastikan pertumbuhan ekonomi yang merata dan inklusif. Dengan dukungan pemerintah yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, diharapkan Nganjuk dapat berkembang menjadi daerah yang maju, mandiri, dan berdaya saing tinggi di tingkat regional maupun nasional.

6) Penjabaran Tujuan dan Sasaran pada Misi 6

Misi 6 terdiri dari satu tujuan dan satu sasaran. Pembangunan Kabupaten Nganjuk diarahkan untuk mendorong sektor pariwisata dan sektor produktif lainnya sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi daerah. Misi pembangunan ini adalah Meningkatkan pembangunan sektor pariwisata serta sektor produktif lain, melalui peningkatan produktivitas berbasis teknologi tepat guna. Dengan memanfaatkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan lokal, pemerintah daerah berupaya mengoptimalkan potensi wisata serta mendukung sektor produktif lainnya seperti industri kreatif, pertanian, dan usaha mikro. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi perkembangan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Misi 6 sangat terkait dengan Misi 5 Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal. Sektor pariwisata merupakan salah satu pendukung ekonomi kerakyatan dengan potensi lokal Kabupaten Nganjuk. Maka tujuan yang ingin dicapai pada Misi 6 berkontribusi terhadap tujuan **"Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif"**. Bersinergi dengan sasaran pada misi 5, sasaran pada misi ke 6 adalah **"Meningkatnya nilai tambah sektor pariwisata"** yang diukur dengan indikator Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum. Peningkatan nilai tambah ini dilakukan melalui pengembangan destinasi wisata yang lebih menarik, peningkatan fasilitas, serta promosi wisata yang lebih luas dan efektif. Dengan strategi ini, Kabupaten Nganjuk berupaya meningkatkan daya tarik wisatawan domestik maupun mancanegara, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada perekonomian masyarakat sekitar. Penguatan sektor pariwisata tidak hanya dilakukan melalui pembangunan infrastruktur wisata, tetapi juga dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor ini.

Secara keseluruhan, strategi pembangunan Kabupaten Nganjuk dalam sektor pariwisata dan sektor produktif lainnya bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan pemanfaatan teknologi tepat guna serta penguatan sektor pariwisata, Kabupaten Nganjuk berupaya menjadi destinasi wisata unggulan yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat

secara luas.

7) Penjabaran Tujuan dan Sasaran pada Misi 7

Di dalam misi 7 (Tujuh) ini terdiri dari satu tujuan dan satu sasaran. Misi ke 7 bersinergi dengan Misi 1 mempunyai 1 tujuan yaitu **"Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis dan toleran"**. Untuk Misi 7 hanya didukung sasaran **"Meningkatnya kemajuan kebudayaan daerah"**, sasaran ini diukur melalui Indeks Pembangunan Kebudayaan. Misi utama yang diusung dalam pembangunan ini adalah meningkatkan kebanggaan masyarakat terhadap kesenian, kebudayaan, dan kearifan lokal. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat identitas budaya masyarakat serta mendorong partisipasi aktif dalam melestarikan warisan budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan meningkatnya kebanggaan terhadap budaya lokal, diharapkan masyarakat lebih sadar akan nilai-nilai tradisional yang menjadi ciri khas daerah mereka, serta memiliki keinginan untuk menjaga dan mengembangkan kebudayaan tersebut.

Berdasarkan misi tersebut, sasaran yang ingin dicapai adalah memajukan kebudayaan daerah. Upaya ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pelestarian seni tradisional, peningkatan kualitas dan eksistensi budaya lokal di tingkat nasional maupun internasional, hingga penguatan peran budaya dalam kehidupan sosial masyarakat.

Kemajuan kebudayaan daerah juga bisa dicapai melalui berbagai program seperti festival budaya, revitalisasi seni tradisional, edukasi budaya di sekolah, serta pembinaan bagi seniman dan pelaku budaya agar mereka terus berkarya dan memperkenalkan budaya lokal kepada generasi muda.

Sasaran konkret dari tujuan ini adalah meningkatnya pelestarian budaya lokal. Pelestarian ini tidak hanya terbatas pada aspek kesenian dan adat istiadat, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap benda cagar budaya, situs bersejarah, serta tradisi lisan yang menjadi bagian penting dari identitas masyarakat. Pemerintah daerah dapat berperan dalam menyediakan regulasi, pendanaan, serta infrastruktur yang mendukung keberlanjutan budaya lokal. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital juga menjadi strategi penting dalam mendokumentasikan dan mempromosikan kebudayaan daerah agar lebih dikenal luas oleh masyarakat global.

Secara keseluruhan, strategi pembangunan ini bertujuan untuk menjadikan budaya sebagai salah satu pilar utama dalam memperkuat identitas daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya kebanggaan terhadap

budaya lokal, masyarakat akan semakin terdorong untuk melestarikan warisan leluhur mereka. Peningkatan kualitas dan daya saing budaya daerah juga akan memberikan dampak positif terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, menciptakan peluang usaha berbasis budaya, serta memperkuat posisi Kabupaten Nganjuk sebagai daerah yang kaya akan nilai budaya dan kearifan lokal.

Tabel 1.27
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran beserta Indikator Kinerja pada RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029

No	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang Maju, Sejahtera, dan Bermartabat	Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan YME, serta dapat memelihara kerukunan, ketenteraman, dan ketertiban	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis dan toleran		Indeks Kesalehan Sosial
				Meningkatnya kerukunan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama
					Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas
2		Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalaui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik		Indeks Reformasi Birokrasi
				Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Nilai Sistem Merit
				Meningkatnya	Nilai Evaluasi

No	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
				akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
					Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
				Meningkatnya pemerintahan berintegritas dan pengawasan berkualitas	Indeks Integritas Pemerintah Daerah
					Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
				Meningkatnya tata kelola keuangan dan kapasitas fiskal daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
					Rasio kapasitas fiskal daerah
				Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks Pelayanan Publik
					Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik
				Meningkatnya	Indeks Pemerintah

No	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
				transformasi digital pemerintah daerah	Digital
3		Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	Meningkatkan infrastruktur publik yang handal dan berkelanjutan		Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur
				Meningkatnya infrastruktur konektivitas wilayah yang handal	Tingkat kemantapan jalan daerah
					Rasio Konektivitas
				Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan
				Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah
				Meningkatkan ketangguhan dalam penanggulangan bencana	Indeks Risiko Bencana
4		Meningkatkan kualitas, pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan	Terwujudnya sumber daya manusia yang		Indeks Pembangunan

No	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
		untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas	berkualitas		Manusia
				Meningkatnya akses dan mutu pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah
					Harapan Lama Sekolah
				Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup
				Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Ketimpangan Gender
				Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA)
				Meningkatnya prestasi pemuda	Persentase peningkatan prestasi pemuda dan olahraga
				Meningkatnya literasi masyarakat	Indeks pembangunan literasi masyarakat
			Meningkatnya pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan		Tingkat Kemiskinan
					Gini Ratio
				Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif	Indeks Kesejahteraan Sosial

No	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
				Meningkatnya kemandirian desa	Indeks Desa
5		Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif		Pertumbuhan Ekonomi
				Meningkatnya nilai tambah pertanian	Pertumbuhan PRDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
				Meningkatnya nilai tambah perindustrian dan perdagangan	Rasio PDRB Industri Pengolahan
					Rasio PDRB
					Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
				Meningkatnya investasi daerah	Nilai Investasi
				Meningkatknya daya saing koperasi dan usaha mikro	Persentase peningkatan volume usaha mikro
					Persentase peningkatan koperasi berkualitas
				Menurunnya	Tingkat

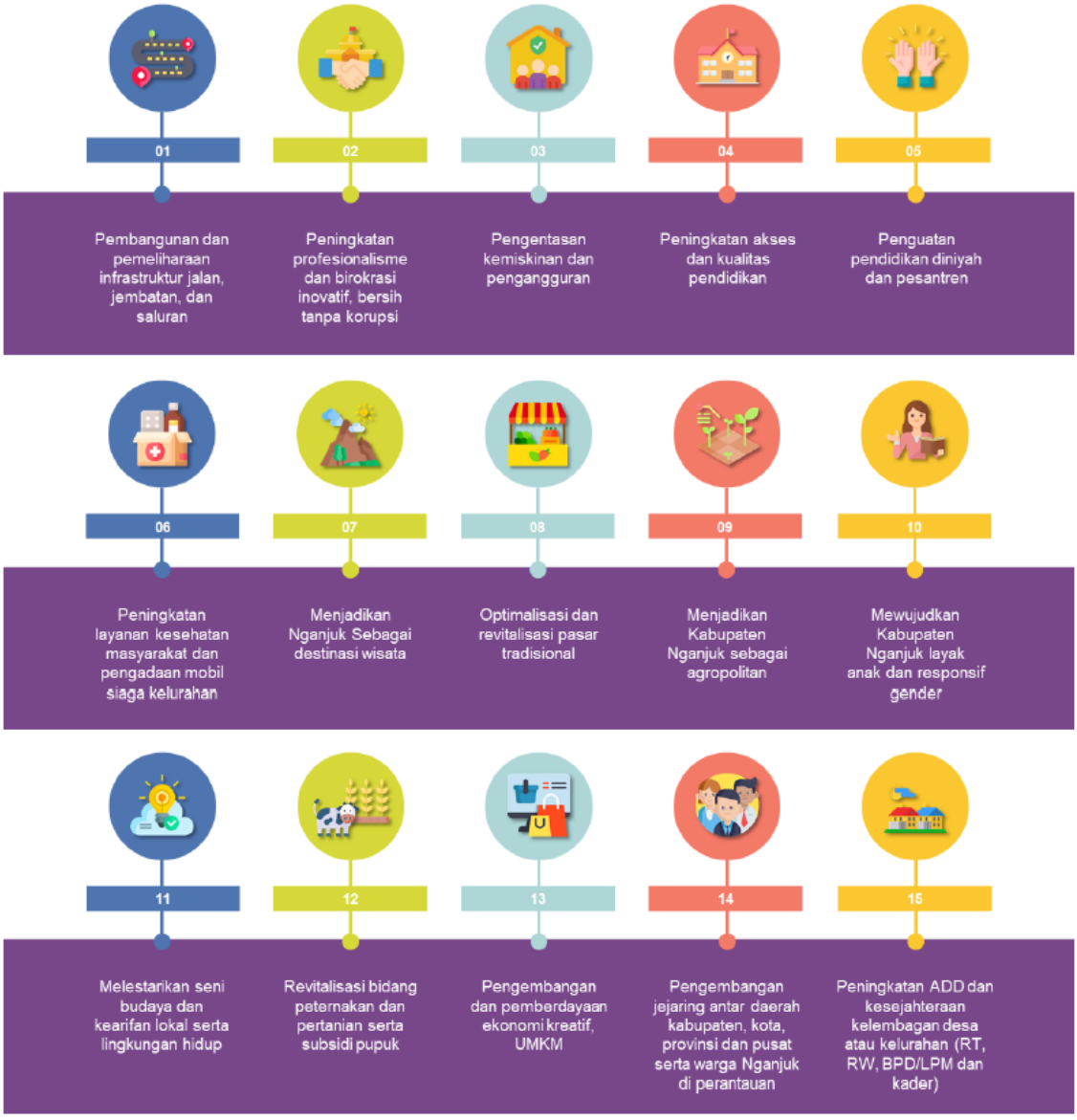
No	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
				pengangguran terbuka	Pengangguran Terbuka
				Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan
6		Meningkatkan pembangunan sektor pariwisata serta sektor produktif lain, melalui peningkatan produktivitas berbasis teknologi tepat guna		Meningkatnya nilai tambah sektor pariwisata	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum
7		Meningkatkan kebanggaan terhadap kesenian, kebudayaan dan kearifan lokal		Meningkatnya kemajuan kebudayaan daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan

1.1.2.3 Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Program prioritas pembangunan daerah merupakan program terpilih yang secara teknokratik memiliki kontribusi besar dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Nganjuk tahun 2025-2029 melalui strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Program prioritas merupakan elaborasi antara program utama pendukung Tujuan dan Sasaran RPJMD yang diselaraskan dengan 15 (lima belas) Program Prioritas Kepala Daerah. Implementasi program prioritas diharapkan dapat menjadi langkah percepatan bagi pencapaian tujuan pembangunan lebih efektif dan efisien. Adapun program prioritas adalah sebagai berikut :

Gambar 1.2

Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2025-2029



Program Pembangunan Daerah mencakup program unggulan berdasarkan prioritas dan identifikasi isu strategis daerah dan telah disepakati bersama dalam Forum Konsultansi Publik, serta merupakan Program Perangkat Daerah yang bersifat strategis yang outcome-nya mendukung langsung terhadap Sasaran RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 maupun sesuai dengan visi misi RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045. Dengan demikian, program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah.

1.1.2.4 Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan sebagai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan visi - misi Kepala Daerah dan diperoleh dari indikator tujuan/sasaran yang terseleksi.

Tujuan dan sasaran tersebut kemudian dimanifestasikan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berbagai indikator kinerja daerah yang dituangkan sangatlah penting karena menjadi acuan dalam perumusan target kinerja tahunan pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maupun Rencana Perangkat Daerah (Renja).

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 – 2029, sedangkan Definisi Operasional serta Metode Perhitungan berdasarkan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 100.3.3.2/575/K/411.013/2025 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029.

Gambaran lengkap ukuran keberhasilan pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.28
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	75.92	75.89	99.96

No	Indikator	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
2.	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks	80	74.05	92.56
3.	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	91.448	91.45	100.00
4.	Tingkat Kemiskinan	(%)	10.16	10.06	100.98
5.	Pertumbuhan Ekonomi	%	4.98	5.30	106.43
6.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	84.35	84.05	99.64
7.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	72.61	72.54	99.90
8.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0.354	0.354	100.00
9.	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	4.58	4.61	100.66
10.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3.77	3.84	98.14
11.	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik	Indeks	87.6	89.34	101.99
12.	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	60.7	60.85	100.25

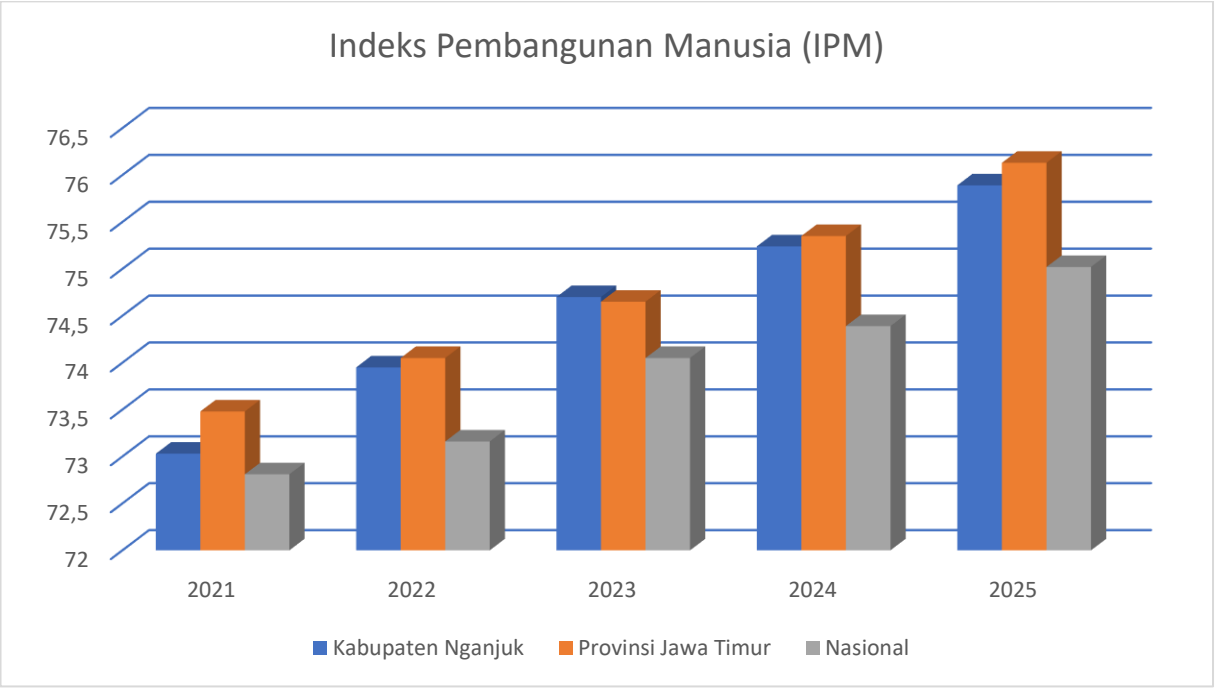
1) Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia. Indeks ini terbentuk dari rata-rata ukur capaian tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 tercapai 75.89, atau 99.96% dari target Indikator Kinerja Utama dalam Kinerja Utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 yang ditetapkan sebesar 75.92

Selama periode tahun 2021 - 2025, IPM Kabupaten Nganjuk rata-rata meningkat sebesar 0,84 persen per tahun, dari 73,03 pada tahun 2021 menjadi 75,89 pada tahun 2025.

Gambar 1.3

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Nganjuk Tahun 2021–2025



No.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Satuan	Realisasi Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Kabupaten Nganjuk	Indeks	73.03	73.95	74.70	75.24	75.89
2	Provinsi Jawa Timur	Indeks	73.48	74.05	74.65	75.35	76.13
3	Nasional	Indeks	73.16	74.05	74.39	75.02	75.90

Sumber: Badan Pusat Statistik

Pertumbuhan IPM 2025 mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan, terutama standar hidup layak yang mengalami peningkatan lebih tinggi dibanding dimensi yang lain.

Umur harapan hidup bayi yang lahir pada tahun 2025 sebesar 74,96 tahun, meningkat 0,32 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Pada dimensi pengetahuan, Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun pada tahun 2025 meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 13,18 tahun menjadi 13,19 tahun. Sementara itu, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,01 tahun, dari 8,25 tahun menjadi 8,26 tahun pada tahun 2025. Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) pada tahun 2025 sebesar 14,068 juta rupiah meningkat 692 ribu rupiah atau 5,17 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 13,376 juta rupiah.

2) Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur

Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Daerah. Pengukuran Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur memberikan informasi perspektif masyarakat secara obyektif, komprehensif dan kredibel, baik dalam aspek pembangunan fisik maupun aspek manfaat. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 sebesar 74,05, atau 92,56% dari target Indikator Kinerja Utama dalam Kinerja Utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 yang ditetapkan sebesar 80.

Pemerintah daerah dalam hal ini memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat terkait dengan kemampuan mereka untuk mengakses layanan infrastruktur yang ada sesuai perkembangan pembangunan yang pesat membuat terjadinya perubahan lingkungan, kebutuhan dan kepuasan masyarakat.

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur yang dilaksanakan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali, merupakan sarana evaluasi bagi pemerintah daerah untuk mengetahui pembangunan infrastruktur yang sudah berjalan dalam aspek pembangunan fisik maupun aspek manfaat.

3) Indeks Kesalehan Sosial

Indeks Kesalehan Sosial (IKS) merupakan suatu ukuran untu mengukur sikap perilaku seseorang yang memiliki unsur kebaikan (saleh) atau manfaat dalam kerangka hidup bermasyarakat, meliputi peduli/solidaritas sosial, relasi antar manusia (kebhinekaan), menjaga etika dan budi pekerti, menjaga kelestarian alam/lingkungan, menjaga stabilitas (relasi dengan negara dan pemerintah). Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 tercapai 91,452, atau 100,004% dari target Indikator Kinerja Utama dalam Kinerja Utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 yang ditetapkan sebesar 91.448.

Dari hasil pelaksanaan survei unsur kebaikan (saleh) atau manfaat dalam kerangka hidup bermasyarakat di Kabupaten Nganjuk menunjukkan nilai yang baik sehingga perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui :

1. Mendorong dan memberdayakan lembaga keagamaan, seperti masjid, mushola, majelis taklim, dan lain-lain, untuk menjadi pusat pembinaan kesalehan sosial.
2. Meningkatkan kelembagaan serta kerjasama dengan Ormas Keagamaan, Pemerintah Desa/Kelurahan, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran

Kebangsaan (FPK) dan organisasi sosial lainnya dalam mengedukasi masyarakat terkait toleransi, kerjasama, dan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat serta meningkatkan pemahaman dan praktek berkontribusi (memberikan dukungan) pada sesama manusia.

3. Melaksanakan sosialisasi maupun pelatihan kepada masyarakat yang berkaitan dengan konservasi dan restorasi lingkungan, tentang bagaimana cara menjaga, memelihara, melestarikan serta melindungi alam sebagai tempat tinggal manusia.
4. Melaksanakan himbauan serta sosialisasi dan memberikan pengetahuan pada warga masyarakat melalui lembaga-lembaga informal penyelenggara pendidikan untuk menyebarkan gagasan tentang kehidupan yang jujur, bersih, solidaritas sosial, kerjasama dalam masyarakat pencegahan kekerasan, ketentraman dan ketertiban umum.

4) Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan daerah adalah banyaknya penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan nasional dibagi dengan jumlah penduduk pada periode waktu yang sama dinyatakan dalam satuan persen (%). Garis kemiskinan merupakan representase dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Tingkat kemiskinan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 sebesar 10.06, atau 99.02% dari target Indikator Kinerja Utama dalam Kinerja Utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 yang ditetapkan sebesar 10.16. Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan/GK) di Kabupaten Nganjuk pada bulan Maret 2025 mencapai 107,30 ribu jiwa. Jumlah ini berkurang sebesar 1,07 ribu jiwa, bila dibandingkan dengan kondisi Maret 2024 yang sebesar 108,37 ribu jiwa. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Nganjuk juga mengalami pengurangan dari 10,17 persen pada bulan Maret 2024 menjadi sebesar 10,06 persen pada bulan Maret 2025. Garis Kemiskinan di Kabupaten Nganjuk pada bulan Maret 2025 sebesar Rp561,807,00 per kapita per bulan, bertambah sebesar Rp 22.093,00 per kapita per bulan atau meningkat sebesar 4,09 persen, bila dibandingkan kondisi bulan Maret 2024 yang sebesar Rp539.714,00.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Nganjuk Maret 2025 sebesar 1,45 mengalami peningkatan sebesar 0,41 poin dibandingkan Maret 2024 yaitu 1,04. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Nganjuk Maret 2025 sebesar 0,32 mengalami peningkatan sebesar 0,14 poin dibandingkan Maret 2024 yaitu 0,18.

Secara umum, pada periode Maret 2005–Maret 2025, tingkat kemiskinan di Kabupaten Nganjuk menunjukan tren penurunan selama 20 tahun. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2015 dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Sementara itu, kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2020 disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia.

Selama periode Maret 2024-Maret 2025, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Nganjuk berkurang sebanyak 1,07 ribu jiwa, dari 108,37 ribu jiwa pada Maret 2024 menjadi 107,30 ribu jiwa pada Maret 2025 atau mengalami penurunan sebesar 0,98 persen. Berdasarkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Nganjuk dalam rentang waktu satu tahun tersebut, mengalami penurunan sebesar 0,11 persen poin, dari 10,17 persen pada Maret 2024 menjadi 10,06 persen pada Maret 2025. Perkembangan tingkat kemiskinan Maret 2005 sampai dengan Maret 2025 disajikan pada grafik berikut :

Gambar 1.4

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025



Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2005 - 2025

Secara umum, dalam periode 2005-2025 tingkat kemiskinan di Kabupaten Nganjuk cenderung mengalami penurunan, baik jumlah penduduk miskin maupun persentase penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2005 sebesar 235,80 ribu jiwa, berkurang sebesar 128,50 ribu jiwa menjadi 107,30 ribu jiwa pada tahun 2025. Sementara itu, persentase penduduk miskin di Kabupaten Nganjuk pada tahun 2005 sebesar 23,35 persen, berkurang sebesar 13,29 persen poin atau menjadi 10,06 persen pada tahun 2025.

Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Nganjuk pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2025 seperti pada tabel berikut :

Tabel 1.29
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah per kapita sebulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)
2005	141.055,00	235,80	23,35
2006	164.648,00	255,40	25,83
2007	175.927,00	230,50	23,79
2008	176.322,00	191,90	19,77
2009	211.670,00	167,30	17,22
2010	232.275,00	151,70	14,91
2011	253.819,00	142,10	13,88
2012	273.260,00	136,10	13,22
2013	295.806,00	140,80	13,60
2014	308.506,00	136,50	13,14
2015	322.820,00	132,04	12,69
2016	341.653,00	127,90	12,25
2017	358.216,00	125,52	11,98
2018	388.186,00	127,28	12,11
2019	408.160,00	118,51	11,24
2020	428.882,00	122,73	11,62
2021	446.232,00	125,53	11,85
2022	474.429,00	113,63	10,70
2023	513.565,00	115,86	10,89
2024	539.714,00	108,37	10,17
2025	561.807,00	107,30	10,06

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2005-2025

Garis kemiskinan per rumah tangga adalah gambaran besarnya nilai rata-rata rupiah minimum yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya agar tidak dikategorikan miskin. Garis Kemiskinan Kabupaten Nganjuk pada Maret 2025 adalah sebesar Rp 561.807,00 per kapita per bulan. Dibandingkan Maret 2024, Garis Kemiskinan bertambah sebesar Rp22.093,00 per kapita per bulan.

Masalah kemiskinan, sebenarnya tidak hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin saja. Namun ukuran lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman serta keparahan dari kemiskinan yang terjadi. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran

pengeluaran diantara penduduk miskin.

Upaya kebijakan pembangunan terutama yang bertujuan memperkecil jumlah penduduk miskin, diharapkan juga bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Tabel 1.30
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
(1)	(2)	(3)
2005	4,540	1,250
2006	5,040	1,440
2007	3,920	0,980
2008	3,210	0,790
2009	2,920	0,790
2010	2,000	0,410
2011	1,830	0,410
2012	1,990	0,460
2013	1,960	0,440
2014	1,750	0,360
2015	1,730	0,420
2016	1,720	0,360
2017	1,729	0,401
2018	2,070	0,530
2019	1,220	0,230
2020	1,617	0,354
2021	1,558	0,311
2022	1,480	0,310
2023	1,480	0,310
2024	1,040	0,180
2025	1,450	0,320

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Selama periode 2005-2025, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Nganjuk memiliki kecenderungan menurun. Ini menunjukkan bahwa rata-rata jarak tingkat pengeluaran per kapita per bulan penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan di Kabupaten Nganjuk, semakin mendekati Garis Kemiskinan. Hal serupa untuk Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), yang memiliki kecenderungan menurun dalam rentang 2005-2025 di Kabupaten Nganjuk. Ini menunjukkan bahwa perbedaan rata-rata tingkat pengeluaran per kapita per bulan penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan di Kabupaten Nganjuk,

tidak terlalu besar.

Pada periode 2024-2025, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Nganjuk Maret 2025 sebesar 1,450 mengalami peningkatan sebesar 0,41 poin dibandingkan Maret 2024 yaitu 1,040. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Nganjuk Maret 2025 juga mengalami peningkatan. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Nganjuk Maret 2025 sebesar 0,320 mengalami peningkatan sebesar 0,14 poin dibandingkan Maret 2025 yaitu 0,180. Kenaikan indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan bahwa sebagian penduduk miskin mengalami kondisi yang semakin sulit dan rentan, meskipun tingkat kemiskinan secara keseluruhan menurun. Sedangkan kenaikan indeks keparahan kemiskinan menandakan bahwa distribusi pengeluaran di antara penduduk miskin semakin melebar atau tidak merata. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah perlu mempertajam upaya pengentasan kemiskinan yang ada. Berbagai program bantuan yang akan dan telah digulirkan bagi penduduk miskin dapat diupayakan tepat sasaran.

5) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya yang dihitung berdasarkan Produk Domestik Bruto atau Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK). Laju Pertumbuhan Ekonomi adalah ukuran tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu, yang menunjukkan pertumbuhan positif adanya kenaikan produksi barang dan jasa.

Perekonomian Kabupaten Nganjuk tahun 2025 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 39.070,26 miliar, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan mencapai Rp 22.759,59 miliar. Ekonomi Kabupaten Nganjuk tahun 2025 tumbuh sebesar 5,30 persen (c-to-c). Dari sisi produksi seluruh sektor mengalami pertumbuhan kecuali lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Jasa Perusahaan sebesar 9,98 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 7,83 persen. Struktur perekonomian Kabupaten Nganjuk tahun 2025 masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 26,55 persen, diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 20,24 persen, dan Industri Pengolahan sebesar 16,63 persen. Peran tiga lapangan usaha tertinggi tersebut dalam perekonomian Kabupaten Nganjuk mencapai 63,42 persen.

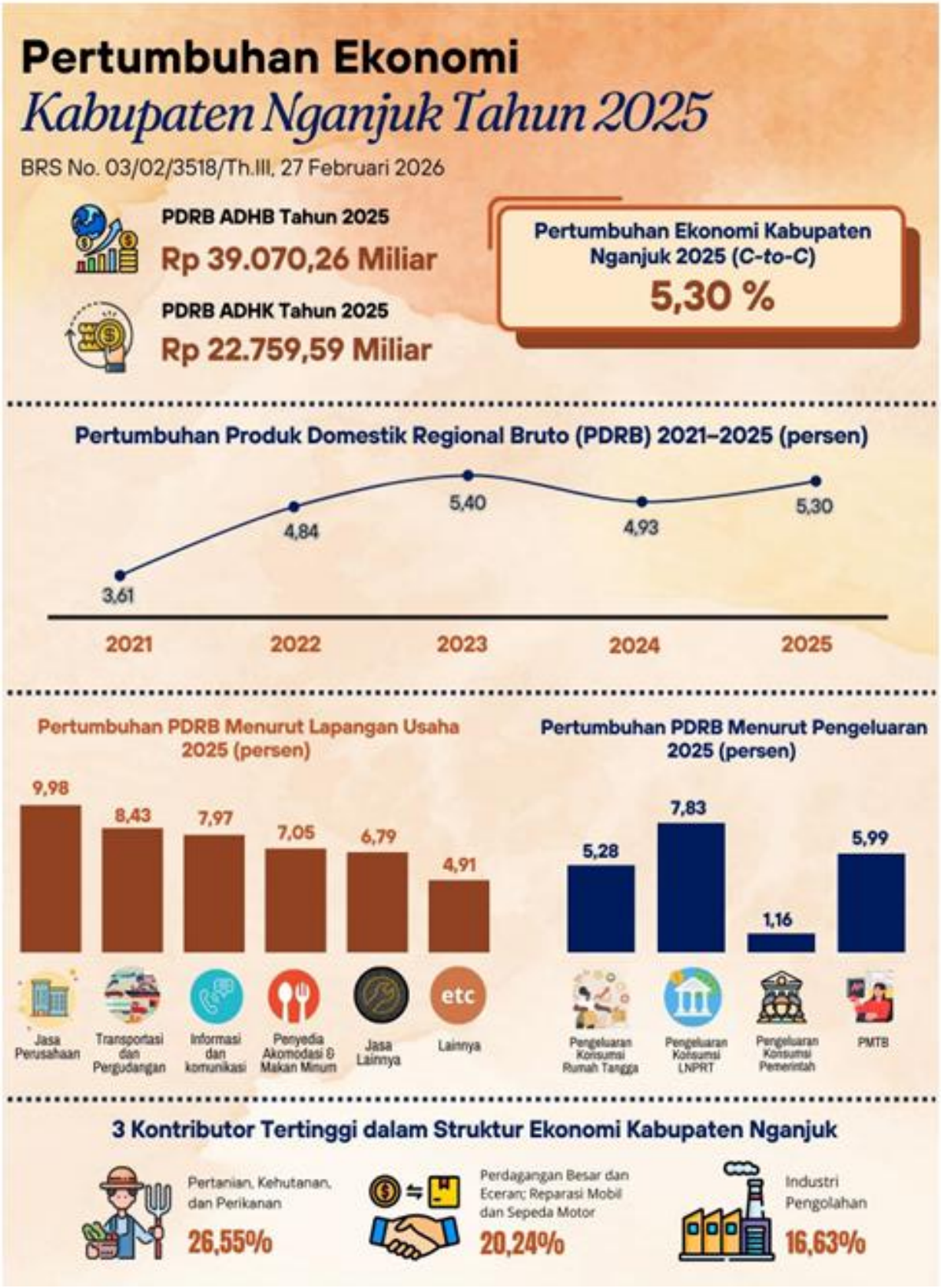
a. PDRB Menurut Lapangan Usaha

Ekonomi Kabupaten Nganjuk tahun 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 5,30 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha kecuali lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Jasa Perusahaan yang tumbuh sebesar 9,98 persen; lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan tumbuh sebesar 8,43 persen; lapangan usaha Informasi dan Komunikasi tumbuh sebesar 7,97 persen; dan lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh sebesar 7,05 persen. Sementara itu, beberapa lapangan usaha lainnya masih tumbuh di bawah 7 persen. Struktur perekonomian Kabupaten Nganjuk tahun 2025 masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 26,55 persen; diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 20,24 persen; Industri Pengolahan sebesar 16,63 persen; Konstruksi sebesar 10,37 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 4,71 persen; serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 4,38 persen. Peranan enam lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Kabupaten Nganjuk mencapai 82,88 persen.

b. PDRB Menurut Pengeluaran

Ekonomi Kabupaten Nganjuk tahun 2025 dibanding tahun 2024 tumbuh sebesar 5,30 persen (c-to-c). Pertumbuhan terjadi pada semua komponen pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 7,83 persen; diikuti Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 5,99 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 5,28 persen; dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 1,16 persen. Struktur PDRB Kabupaten Nganjuk menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2025 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Kabupaten Nganjuk masih didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang mencakup lebih dari separuh PDRB Nganjuk yaitu sebesar 73,07 persen; Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 28,98 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 6,29 persen; dan Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 1,68 persen.

Gambar 1.5
Pertumbuhan PDRB Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2025



Sumber Data : BPS Kabupaten Nganjuk

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nganjuk. Tahun 2025 sebesar 5,30, atau 106,43**%** dari target Indikator Kinerja Utama dalam Kinerja Utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 yang ditetapkan sebesar 4,98.

6) Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi mengukur tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi (RB) dalam suatu organisasi atau instansi pemerintah. Indeks ini mencakup berbagai aspek, termasuk tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan publik yang efisien, transparansi, dan akuntabilitas. Pengukuran indeks ini dilakukan untuk menilai kemajuan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi administrasi, serta sebagai evaluasi kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) merupakan indikator kinerja makro yang mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah telah berhasil mentransformasi tata kelola pemerintahannya agar lebih efektif, efisien, dan bersih. Secara mendalam, indeks ini merefleksikan kemajuan yang dicapai dalam delapan area perubahan, mulai dari perbaikan pola pikir aparatur (mindset), penyederhanaan regulasi yang menghambat investasi, hingga penguatan akuntabilitas kinerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Nilai IRB ini bukan sekadar angka atau predikat semata, melainkan menjadi tolak ukur bagi Kepala Daerah untuk menunjukkan kepada DPRD dan masyarakat bahwa birokrasi sedang bergerak menuju digitalisasi pelayanan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan penguatan RB Tematik. Fokus RB Tematik ini sangat krusial karena mengaitkan kinerja birokrasi secara langsung dengan hasil nyata di lapangan, seperti keberhasilan dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem, peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN), serta kemudahan perizinan bagi pelaku usaha di Nganjuk. Oleh karena itu, peningkatan skor IRB menandakan bahwa mesin birokrasi di Kabupaten Nganjuk telah bekerja lebih transparan dan berorientasi pada hasil (outcome), sehingga setiap anggaran yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat luas.

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 berdasarkan LHE Menpan RB nomor B/173/RB.06/2025 tanggal 24 April 2025 mencapai 84,05, yang merupakan akumulasi dari:

a. RB General: 73,43
b. RB Tematik: 10,62

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Nganjuk. Tahun 2025 sebesar **84,05**, atau **99,64%** dari target Indikator Kinerja Utama dalam Kinerja Utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 yang ditetapkan sebesar 84.35.

7) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Indeks Kualitas Air (IKA) adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) adalah nilai yang menggambarkan kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan.

Kualitas air diukur pada sungai yang melewati Kabupaten Nganjuk yaitu Sungai Widas dan Sungai Kuncir di mana pengukuran dilakukan pada 3 (tiga) titik yaitu hulu, tengah, dan hilir dan diukur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yang diharapkan dapat mewakili 2 (dua) musim, yaitu kemarau dan penghujan. Adapun 8 (delapan) parameter yang digunakan untuk pengukuran yaitu DO, BOD, COD, TSS, pH, NO3-N, Total Phosphat dan Fecal Coli. Kualitas udara diukur pada lokasi yang mewakili kawasan perumahan, transportasi, industri dan perkantoran di Kabupaten Nganjuk, untuk parameter yang diukur adalah NO2 dan SO2. Sedangkan kualitas tutupan lahan dihitung berdasarkan tutupan hutan, RTH, dan tutupan vegetasi lainnya yang ditampilkan dalam peta deliniasi yang dilengkapi dengan luasan dan titik koordinat. Semakin tinggi IKLH, maka kondisi kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Nganjuk semakin baik.

Tabel 1.31
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2025

No	Tahun	Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Udara	Indeks Tutupan Lahan	IKLH
1	2021	53.33	78.84	54.86	62.34
2	2022	61.61	79.45	54.91	65.32
3	2023	60.97	81.89	56.13	66.33

No	Tahun	Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Udara	Indeks Tutupan Lahan	IKLH
4	2024	56,25	88,18	55,74	69,07
5.	2025	77,51	71,88	65,23	72,52

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Lahan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk. Tahun 2025 sebesar 72,54, atau 99,90% dari target Indikator Kinerja Utama dalam Kinerja Utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 yang ditetapkan sebesar 72.61.

8) Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah indikator komposit untuk mengukur ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi utama, yaitu dimensi kesehatan reproduksi yang dibentuk dari proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan dan proporsi perempuan saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun, dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari proporsi penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/sederajat ke atas dan proporsi keterwakilan politik sebagai anggota legislatif berdasarkan gender, serta dimensi pasar tenaga kerja yang dibentuk dari tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki dan perempuan.

Hasil penghitungan ini mengukur sejauh mana pencapaian keberhasilan pembangunan pada empat aspek (kesehatan reproduksi, pendidikan, partisipasi ekonomi, keterwakilan dalam jabatan publik) yang terkait dengan kesetaraan dan keadilan gender. Nilai IKG sebesar 0 (nol) mencerminkan adanya kesetaraan gender yang sempurna yang menyebabkan pencapaian pembangunan ada pada tingkat optimalnya. Angka 1 mencerminkan kesenjangan gender yang sempurna yang menyebabkan kerugian total dalam pencapaian pembangunan akibat adanya ketidaksetaraan gender tersebut.

Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 sebesar 0,354 atau 100% dari target Indikator Kinerja Utama dalam Kinerja Utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 yang ditetapkan sebesar 0.354.

9) Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik merupakan indikator komposit yang menggambarkan capaian kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik, atau yang lebih dikenal dengan singkatan PEKPP, merupakan sebuah instrumen evaluasi sistematis yang digunakan oleh Kementerian PANRB untuk menilai sejauh mana unit kerja pemerintah telah menjalankan fungsinya dalam melayani masyarakat. Proses PEKPP ini bertindak sebagai mekanisme "audit kinerja" yang tidak hanya melihat dokumen di atas kertas, tetapi juga memverifikasi fakta di lapangan, mulai dari standar pelayanan yang dipublikasikan hingga bagaimana petugas bersikap saat melayani warga. Hasil akhir dari seluruh rangkaian proses evaluasi PEKPP ini kemudian dikonversi menjadi sebuah angka yang disebut dengan Indeks Pelayanan Publik (IPP). Dengan kata lain, jika PEKPP adalah proses ujiannya, maka IPP adalah nilai raport yang mencerminkan kualitas pelayanan publik di suatu instansi atau daerah.

Indeks Pelayanan Publik ini disusun berdasarkan enam aspek utama yang saling berkaitan untuk menciptakan pelayanan yang prima. Pertama, aspek kebijakan pelayanan menilai apakah instansi memiliki aturan main yang jelas dan transparan bagi publik. Kedua, aspek profesionalisme SDM mengukur kompetensi serta keramahan petugas dalam merespons kebutuhan masyarakat. Ketiga dan keempat adalah ketersediaan sarana prasarana yang memadai (termasuk akses bagi penyandang disabilitas) serta pemanfaatan sistem informasi pelayanan publik yang berbasis digital. Kelima, indeks ini juga sangat memperhatikan bagaimana instansi mengelola konsultasi dan pengaduan, sehingga masyarakat memiliki saluran untuk menyampaikan keluhan yang benar-benar ditindaklanjuti. Terakhir, aspek inovasi menjadi nilai tambah yang menunjukkan kreativitas instansi dalam memecahkan masalah pelayanan agar lebih cepat dan mudah.

Dalam konteks pemerintahan daerah seperti Kabupaten Nganjuk, angka IPP yang tinggi menunjukkan bahwa unit-unit layanan kunci seperti Dinas Kependudukan, Rumah Sakit Umum Daerah, hingga Kecamatan telah berhasil memenuhi ekspektasi masyarakat. Capaian indeks ini menjadi bukti nyata bagi kepala daerah dalam laporan pertanggungjawabannya bahwa transformasi birokrasi bukan sekadar jargon, melainkan telah berwujud pada kemudahan warga dalam mendapatkan hak-hak layanannya secara bermartabat dan transparan.

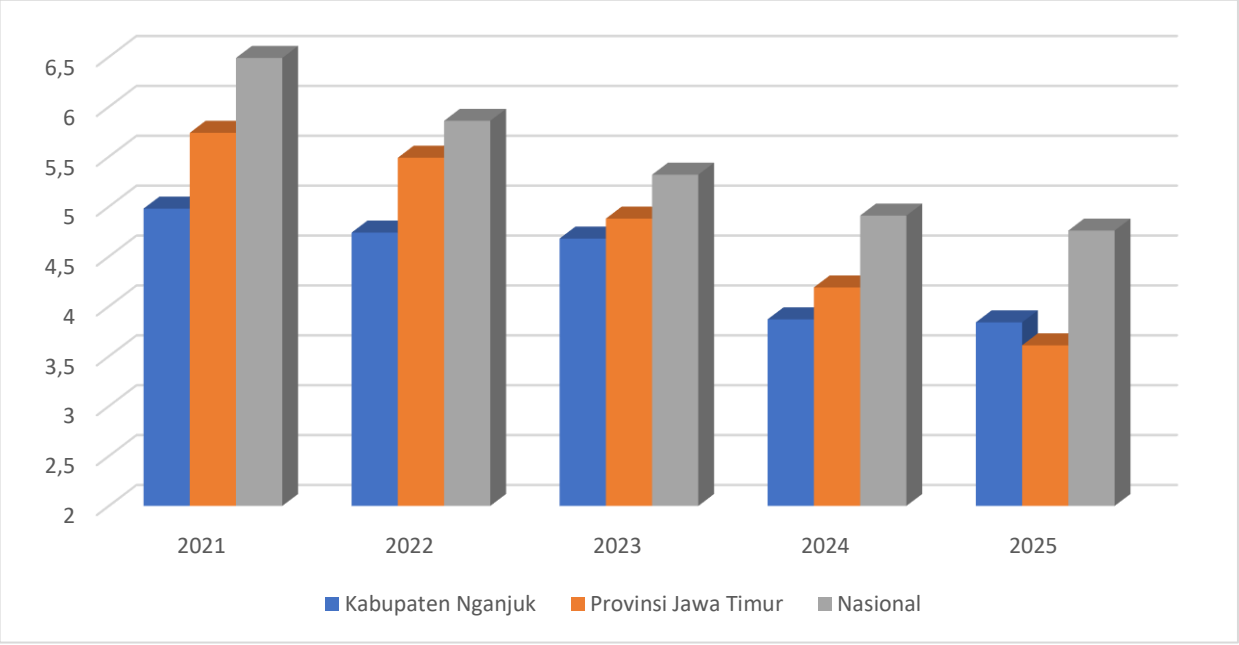
Indeks Pelayanan Publik merupakan indikator komposit yang menggambarkan capaian kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 sebesar 4,61 dengan predikat A atau tercapai sebesar 100,66% dari target Indikator Kinerja Utama dalam Kinerja Utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 yang ditetapkan sebesar 4,58.

10) Tingkat Pengangguran Terbuka

Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja berusia 15 tahun ke atas yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: 1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan; 2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha atau pekerjaan baru; 3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta; 4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 sebesar 3.84, atau 98.14% dari target Indikator Kinerja Utama dalam Kinerja Utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 yang ditetapkan sebesar 3.77.

Gambar 1.6
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2025



No.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Satuan	Realisasi Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Kabupaten Nganjuk	Persen	4.98	4.74	4.68	3.87	3.84
2	Provinsi Jawa Timur	Persen	5.74	5.49	4.88	4.19	3.61
3	Nasional	Persen	6.49	5.86	5.32	4.91	4.76

Sumber data : BPS Kab Nganjuk Agustus 2025, Provinsi dan Nasional Pebruari 2025

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK pada Agustus 2025 sebesar 73,19 persen atau mengalami kenaikan sebesar 3,40 persen poin dibandingkan TPAK Agustus 2024. Kenaikan TPAK ini juga sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk bekerja di Nganjuk. Berdasarkan jenis kelamin, masih terdapat perbedaan mencolok diantara TPAK laki-laki dan TPAK perempuan. Pada Agustus 2025, TPAK laki-laki sebesar 85,95 persen, sedangkan TPAK perempuan hanya sebesar 60,43 persen.

Tabel 1.32
Penduduk Usia Kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Angkatan Kerja, Bulan Agustus 2023–Agustus 2025

Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2023	Agustus 2024	Agustus 2025	Perubahan Ags 2024–Ags 2025	
	orang	orang	orang	orang	persen
(1)	(2)	(4)	(6)	(7)	(8)
Penduduk Usia Kerja (PUK)	891.125	898.946	906.468	7.522	0,84
Angkatan Kerja	596.111	627.397	663.438	36.041	5,74
– Bekerja	568.201	603.100	637.949	34.849	5,78
– Pengangguran	27.910	24.297	25.489	1.192	4,91
Bukan Angkatan Kerja	295.014	271.549	243.030	-28.519	-10,50
	persen	persen	persen	persen poin	
Tingkat Penganguran Terbuka (TPT)	4,68	3,87	3,84	-0,03	
– Laki-laki	4,59	3,80	3,62	-0,19	
– Perempuan	4,84	3,97	4,16	0,18	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	66,89	69,79	73,19	3,40	
– Laki-laki	84,91	84,35	85,95	1,59	
– Perempuan	48,86	55,22	60,43	5,21	

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir. Untuk melihat struktur penduduk bekerja maka perlu diperhatikan karakteristiknya. Dari penduduk bekerja di Nganjuk pada Agustus 2025 yang sebesar 637.949

orang, selanjutnya akan dilihat karakteristik penduduk bekerja. Karakteristik ini dijelaskan antara lain berdasarkan lapangan pekerjaan utama, status pekerjaan utama, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, dan jumlah jam kerja selama seminggu yang lalu.

Sektor Pertanian (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan) mengalami peningkatan jumlah pekerja terbanyak sebesar 20,84 ribu orang, diikuti Jasa (Perdagangan, Akomodasi, Administrasi Pemerintahan dll) mengalami peningkatan sebesar 20,36 ribu orang, sedangkan sektor Manufaktur mengalami penurunan sebesar 6,35 ribu orang. Penambahan terbesar ada pada sektor Pertanian sebesar 20,84 ribu orang dikarenakan adanya peningkatan produksi bawang merah pada saat panen raya.

Pengangguran merupakan salah satu indikator penting yang menggambarkan kondisi ketenagakerjaan suatu wilayah. Penduduk yang tergolong pengangguran adalah mereka yang berusia 15 tahun ke atas dan tidak bekerja, namun sedang mencari pekerjaan; mempersiapkan usaha baru; telah diterima bekerja atau siap berusaha tetapi belum mulai; serta mereka yang merasa tidak mungkin memperoleh pekerjaan (putus asa).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2025 sebesar 3,84 persen. Hal ini berarti dari tiap 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 3 atau 4 orang penganggur. TPT pada Agustus 2025 mengalami penurunan sebesar 0,03 persen poin dibandingkan Agustus 2024.

11) Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasaan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Dalam mengamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, maka disusun Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan. Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, maka perlu diselenggarakan survei tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang

diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif. Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi

Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 sebesar 89,34 atau 147,18% dari target Indikator Kinerja Utama dalam Kinerja Utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 yang ditetapkan sebesar 87,6.

12) Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan instrumen untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan, diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni dimensi ekonomi budaya, dimensi pendidikan, dimensi ketahanan sosial budaya, dimensi warisan budaya, dimensi ekspresi budaya, dimensi budaya literasi, dan dimensi gender.

Tabel 1.33
Nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan Berdasarkan Dimensi
Kabupaten Nganjuk Tahun 2025

No.	Dimensi	Nilai Indeks
1	Ekonomi Budaya	35,15
2	Pendidikan	58,44
3	Ketahanan Sosial Budaya	51,08
4	Warisan Budaya	77,96
5	Ekspresi Budaya	71,63
6	Budaya Literasi	51,82
7	Gender	71,92
	IPK	**60.85**

Sumber data : Dinas Porabudpar Kab. Nganjuk

Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 sebesar 60.85, atau 100.25% dari target Indikator Kinerja Utama dalam Kinerja Utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 yang ditetapkan sebesar 60.7

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

1.1.3.1 Dasar Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 18 bahwa penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. SPM disusun sebagai alat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan akses dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara merata. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa SPM adalah jenis pelayanan dasar yang merupakan hak konstitusional rakyat untuk memperolehnya.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan. Oleh karena itu, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran wajib memperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Penerapan SPM menjadi suatu hal yang sangat penting dan mendasar karena dengan melaksanakan SPM, maka basis untuk kesejahteraan masyarakat dapat terbangun setidaknya bila semua sasaran minimal dapat terwujud.

Dasar hukum yang digunakan sebagai acuan dalam proses penyelenggaraan Penerapan SPM Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
b) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;

f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
g) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
h) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat;
i) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
j) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Nganjuk;
k) Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/881/K/411.013/2024 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Nganjuk;
l) Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 100.3.3.2/502/K/411.013/2025 tentang Penetapan Target Jumlah Warga Negara dan Mutu Minimal Layanan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025; dan
m) Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 100.3.3.2/554/K/411.013/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 100.3.3.2/502/K/411.013/2025 tentang Penetapan Target Jumlah Warga Negara dan Mutu Minimal Layanan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.

1.1.3.2 Jenis Pelayanan Dasar

Pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah terdiri atas 6 (enam) jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh 8 (delapan) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, yaitu :

Tabel 1.34
Perangkat Daerah Pengampu SPM di Lingkup Pemerintah Kabupaten Nganjuk

No.	Perangkat Daerah	Bidang SPM	Jenis Pelayanan Dasar
1.	Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk	Urusan Pendidikan	1. Pendidikan anak usia dini 2. Pendidikan dasar 3. Pendidikan kesetaraan

No.	Perangkat Daerah	Bidang SPM	Jenis Pelayanan Dasar
2.	Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk	Urusan Kesehatan	1. Pelayanan kesehatan ibu hamil 2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin 3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir 4. Pelayanan kesehatan balita 5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif 7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut 8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi 9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus 10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis 12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk	Urusan Pekerjaan Umum	1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari 2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik
4.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk	Urusan Perumahan Rakyat	1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah Kabupaten 2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten

No.	Perangkat Daerah	Bidang SPM	Jenis Pelayanan Dasar
5.	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk	Urusan Trantibumlinmas (Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban)	1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk	Urusan Trantibumlinmas (Sub Urusan Bencana Daerah)	1. Pelayanan informasi rawan bencana 2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
7.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nganjuk	Urusan Trantibumlinmas (Sub Urusan Kebakaran)	1. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
8.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk	Urusan Sosial	1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti 2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti 3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti 4. Gelandangan dan pengemis di luar panti 5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten

1.1.3.3 Prinsip Penerapan SPM

a. Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
b. Penerapan SPM diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.
c. Ketentuan mengenai Mutu Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis yang diatur oleh menteri teknis yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang

berkaitan dengan Pelayanan Dasar setelah berkoordinasi dengan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

d. Pembiayaan Penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD, APBN, dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

1.1.3.4 Tahapan Penerapan SPM

Tahapan dalam proses penyelenggaraan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Nganjuk sesuai dalam ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut :

1) Pengumpulan Data

Perangkat Daerah Pengampu SPM melaksanakan pengumpulan data meliputi :

a. Jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar Warga Negara secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya.
b. Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang tersedia.
c. Pengumpulan data ditujukan untuk pencapaian 100% dari target dan indikator kinerja pencapaian SPM setiap tahun.
d. Hasil pengumpulan data diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Perangkat Daerah Pengampu SPM melaksanakan perhitungan kebutuhan meliputi :

a. Perangkat Daerah menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan barang dan/atau jasa dan sarana dan/atau prasarana berdasarkan jumlah Warga Negara penerima dan Mutu Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis SPM.
b. Ketersediaan diperoleh dari pihak Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, lembaga non pemerintah, masyarakat, dan/atau Pemerintah Daerah**.**
c. Hasil penghitungan digunakan untuk menyusun kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. Perangkat Daerah menghitung Warga Negara penerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu memperoleh barang dan/atau jasa yang telah tersedia.
e. Warga Negara penerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu dikarenakan : (1)

miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (2) sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri, (3) kondisi bencana, dan/atau (4) kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

3) Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Perangkat Daerah Pengampu SPM melaksanakan penyusunan rencana meliputi :

a. Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan penghitungan Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu yang dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD.
b. Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar berdasarkan penghitungan ke dalam Renstra PD dan Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi.
c. Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar merupakan salah satu tolok ukur Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

4) Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

a. Perangkat Daerah melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar.
b. Perangkat Daerah menetapkan target pencapaian program, kegiatan, dan sub kegiatan berdasarkan data jumlah penerima Pelayanan Dasar yang diperoleh setiap tahunnya.
c. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar berupa penyediaan barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerja sama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.1.3.5 Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui tahapan sebagai berikut :

a. Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan penghitungan Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu yang dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD.
b. Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar berdasarkan penghitungan ke dalam Renstra PD dan Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi.

c. Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar merupakan salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
d. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan memastikan program, kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dimuat dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
e. Perangkat Daerah memprioritaskan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar setelah tercantum dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
f. Tim Anggaran Pemerintah Daerah memastikan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
g. Anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan disusun berdasarkan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar.

BAB II
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja makro tersaji dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Makro

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025	Perubahan (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	75,24	75,89	0,86
2	Persentase Penduduk Miskin	10,17	10,06	- 1,08
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,87	3,84	- 0,78
4	Pertumbuhan Ekonomi	4,93	5,3	7,51
5	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	36.270.560.000.000	39.070.260.000.000	7,72
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,289	0,3	3,81

Sumber data : Badan Pusat Statistik

Keterangan:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak.
2. Persentase Penduduk Miskin merupakan persentase penduduk miskin pada daerah yang bersangkutan. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.
3. Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran adalah penduduk yang tidak memiliki pekerjaan dan

memenuhi kriteria: (1) aktif mencari pekerjaan, (2) sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

4. Pertumbuhan Ekonomi adalah peningkatan produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian di suatu wialayah. Peningkatan barang modal, angkatan kerja, teknologi, dan sumber daya manusia dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.
5. PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku adalah total nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan suatu wilayah pada tahun berjalan, dengan menggunakan harga saat ini. PDRB ADHB digunakan untuk melihat nominal nilai ekonomi, struktur ekonomi (peran tiap sektor) dan distribusi pendapatan di suatu wilayah pada periode tertentu yang dipengaruhi oleh inflasi dan perubahan harga barang/jasa di pasar.
6. Ketimpangan Pendapatan (*Gini Ratio)* memiliki rentang nilai antara 0 sampai dengan 1. Nilai 0 berarti tidak ada kesenjangan ekonomi atau perekonomian merata pada daerah tersebut. Sementara itu, nilai 1 menunjukkan nilai kesenjangan maksimal.

Nilai Koefisien	Distribusi Pendapatan
< 0,4	Tingkat ketimpangan rendah
0,4 – 0,5	Tingkat ketimpangan sedang
> 0,5	Tingkat ketimpangan tinggi

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Capaian kinerja memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan masing-masing indikatornya. Berikut capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Nganjuk yang telah direalisasikan pada tahun 2025, yakni :

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Untuk Urusan Pemerintahan

Tabel 2.2
Capaian Indikator Kinerja Kunci Untuk Urusan Pemerintahan

Urusan	No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang dan Penyebut	Nilai Pembilang dan Penyebut	Capaian	Sumber Data
PENDIDIKAN	1.a.1	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini	28566	94,54%	Dinas Pendidikan
			Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan	30217		
	1.a.2	Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dasar	137757	93,18%	Dinas Pendidikan
			Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan	147834		
	1.a.3	Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	641	100%	Dinas Pendidikan

Urusan	No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang dan Penyebut	Nilai Pembilang dan Penyebut	Capaian	Sumber Data
			Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah	641		
	1.a.4	Persentase toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	Jumlah toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	1052	39,37%	Dinas Pendidikan
			Jumlah seluruh toilet	2672		
	1.a.5	Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	2109	39,25%	Dinas Pendidikan
			Jumlah ruang kelas	5373		
KESEHATAN	1.b.1	Persentase kematian ibu	Jumlah kematian ibu tahun N	10	0,10%	Dinas Kesehatan
			Jumlah ibu melahirkan tahun N	10354		
	1.b.2	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Jumlah balita umur 0 sampai 59 bulan dengan panjang badan atau tinggi badan kurang dari -2 Standar deviasi pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu	3392	6,28%	Dinas Kesehatan
			Jumlah balita umur 0 sampai 59 bulan yang diukur panjang badan atau tinggi badan pada suatu wilayah dan kurun waktu yang sama	54054		
	1.b.3	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun (nominator)	9632	88,98%	Dinas Kesehatan
			Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	10825		

Urusan	No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang dan Penyebut	Nilai Pembilang dan Penyebut	Capaian	Sumber Data
	1.b.4	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun	10354	95,65%	Dinas Kesehatan
			Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	10825		
	1.b.5	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun	10097	93,37%	Dinas Kesehatan
			Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	10814		
	1.b.6	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 1 + jumlah balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2 + balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar 3	51622	95,98%	Dinas Kesehatan
			Jumlah balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama	53783		
	1.b.7	Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran	141053	100%	Dinas Kesehatan

Urusan	No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang dan Penyebut	Nilai Pembilang dan Penyebut	Capaian	Sumber Data
			Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama	141053		
	1.b.8	Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	Jumlah orang usia 15–59 tahun di kabupaten/kota yang mendapatkan layanan kesehatan produktif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	720435	99,82%	Dinas Kesehatan
			Jumlah orang usia 15–59 tahun di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun	721716		
	1.b.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun (nominator)	140353	95,00%	Dinas Kesehatan
			Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator)	147739		
	1.b.10	Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi usia ≥15 tahun di dalam wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	68788	100%	Dinas Kesehatan
			Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	68788		

Urusan	No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang dan Penyebut	Nilai Pembilang dan Penyebut	Capaian	Sumber Data
	1.b.11	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	Jumlah penderita diabetes melitus usia ≥15 tahun di dalam wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	26249	100%	Dinas Kesehatan
			Jumlah estimasi penderita diabetes melitus usia ≥15 tahun yang berada di dalam wilayah kerja kabupaten/kota berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.	26249		
	1.b.12	Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar	Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa berat di wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	2141	98,98%	Dinas Kesehatan
			Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	2163		
	1.b.13	Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai standar	Jumlah orang terduga Tuberkulosis yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun	11873	95,87%	Dinas Kesehatan
			Jumlah perkiraan orang yang terduga Tuberkulosis dalam kurun waktu satu tahun yang sama.	12385		
	1.b.14	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi Human Immunodeficiency Virus yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	19019	94,04%	Dinas Kesehatan

Urusan	No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang dan Penyebut	Nilai Pembilang dan Penyebut	Capaian	Sumber Data
			Jumlah orang dengan risiko terinfeksi Human Immunodeficiency Virus di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	20225		
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.c.1	Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota	Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota dalam kondisi baik (Ha)	11269	75,37%	Dinas PUPR
			Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota (Ha)	14951		
	1.c.2	Persentase kemantapan jalan kabupaten/kota	(Panjang jalan kondisi baik + panjang jalan kondisi sedang) panjang jalan kewenangan kabupaten/kota (Km)	1084,361	73,51%	Dinas PUPR
			Panjang jalan kewenangan Kabupaten/Kota (Km)	1475,023		
	1.c.3	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	Jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di kabupaten/kota pada tahun N	401929	97,20%	Dinas PUPR
			Jumlah total penduduk kabupaten/kota	413501		
	1.c.4	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di Pengolahan Lumpur Tinja + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik	389722	94,25%	Dinas PUPR

Urusan	No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang dan Penyebut	Nilai Pembilang dan Penyebut	Capaian	Sumber Data
			Jumlah rumah di kabupaten/kota	413501		
	1.c.5	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang telah terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir (ha)	14856,11	75,94%	Dinas PUPR
			Luas kawasan permukiman rawan banjir yang telah ditentukan dalam dokumen perencanaan daerah dengan mempertimbangkan kajian risiko bencana banjir (ha)	19563,2		
	1.c.6	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman sepanjang pantai kewenangan kabupaten/kota	Luas kawasan sepanjang pantai yang rawan abrasi dan banjir rob yang terlindungi infrastruktur pengaman pantai kewenangan kabupaten/kota (Ha)	1	100%	Dinas PUPR
			Luas kawasan sepanjang pantai yang rawan abrasi dan banjir rob kewenangan kabupaten/kota (Ha)	1		
	1.c.7	Persentase kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung kabupaten/Kota	Jumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang digunakan sesuai peruntukannya	145	100%	Dinas PUPR
			Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku	145		
	1.c.8	Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah	Jumlah pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang diterbitkan	12	100%	Dinas PUPR
			Jumlah permohonan Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk	12		

Urusan	No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang dan Penyebut	Nilai Pembilang dan Penyebut	Capaian	Sumber Data
	1.c.9	Persentase tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan terlibat dalam kegiatan konstruksi pemerintah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analis	64	100%	Dinas PUPR
			Jumlah kebutuhan tenaga kerja operator dan teknis/analis yang terlibat dalam kegiatan konstruksi pemerintah kabupaten/kota	64		
	1.c.10	Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di kabupaten/kota	Jumlah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah dinilai pelaksanaannya dalam waktu 1 tahun	31	100%	Dinas PUPR
			Jumlah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan dalam waktu 1 tahun	31		
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.d.1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang mendapatkan layanan penyediaan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah pada tahun N	80	100%	Dinas PRKPP
			Jumlah total rencana warga negara korban bencana kabupaten/kota yang akan ditangani pada tahun N	80		
	1.d.2	Persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	Luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani tahun N (Ha)	17,8	89%	Dinas PRKPP
			Target luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha pada tahun N	20		

Urusan	No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang dan Penyebut	Nilai Pembilang dan Penyebut	Capaian	Sumber Data
	1.d.3	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani pada tahun N	569	6,32%	Dinas PRKPP
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni pada Tahun N	9010		
	1.d.4	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Realisasi jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di tahun N	10	100%	Dinas PRKPP
			Target jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di tahun N	10		
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.e.1	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	Jumlah dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku pada tahun N	3	100%	BPBD
			Jumlah dokumen kebencanaan (Kajian Risiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana, dan Rencana Kontinjensi) yang wajib dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota = 3	3		
	1.e.2	Persentase penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah pengaduan Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	539	100%	Satpol PP
			Jumlah pengaduan pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaporkan	539		
	1.e.3	Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan	Jumlah peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang memuat sanksi yang ditegakkan	7	100%	Satpol PP

Urusan	No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang dan Penyebut	Nilai Pembilang dan Penyebut	Capaian	Sumber Data
			Jumlah keseluruhan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang memuat sanksi	7		
	1.e.4	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara dan aparatur yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	908	0,16%	BPBD
			Jumlah warga negara yang tinggal di kawasan rawan bencana berdasarkan target yang telah ditetapkan	557771		
	1.e.5	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	9	90%	Dinas Damkarmat
			Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana	10		
	1.e.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap	123	96,85%	Dinas Damkarmat
			Total kejadian kebakaran di kabupaten/kota	127		
SOSIAL	1.f.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	400	100%	Dinsos PPPA
			Populasi penyandang disabilitas terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	400		
	1.f.2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah anak terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	5000	100%	Dinsos PPPA

Urusan	No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang dan Penyebut	Nilai Pembilang dan Penyebut	Capaian	Sumber Data
			Populasi anak terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	5000		
	1.f.3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah lanjut usia terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	2248	100%	Dinsos PPPA
			Populasi lanjut usia terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	2248		
	1.f.4	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah gelandangan dan pengemis di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	85	100%	Dinsos PPPA
			Populasi gelandangan dan pengemis di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	85		
	1.f.5	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam, sosial dan non alam kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	151	100%	Dinsos PPPA
			Populasi korban bencana alam, sosial dan non alam yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	151		
	1.f.6	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Jumlah penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	7733	100%	Dinsos PPPA

Urusan	No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang dan Penyebut	Nilai Pembilang dan Penyebut	Capaian	Sumber Data
			Populasi masyarakat miskin, fakir miskin dan kelompok rentan yang membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar cakupan daerah kabupaten/kota	7733		
TENAGA KERJA	2.a.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja Daerah	52	100%	Dinas Tenaga Kerja
			Jumlah kegiatan keseluruhan yang direncanakan di kabupaten/kota	52		
	2.a.2	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (Peraturan Perusahaan/ Peraturan Kerja Bersama, Lembaga Kerja Sama Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan).	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	17	30,36%	Dinas Tenaga Kerja
			Jumlah perusahaan	56		
	2.a.3	Persentase pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	Jumlah pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota	20215	99,97%	Dinas Tenaga Kerja
			Jumlah target pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	20222		

Urusan	No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang dan Penyebut	Nilai Pembilang dan Penyebut	Capaian	Sumber Data
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.b.1	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	35	100%	Dinsos PPPA
			Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus (penduduk usia kurang dari 18 tahun)	35		
	2.b.2	Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	26	100%	Dinsos PPPA
			Jumlah perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang	26		
PANGAN	2.c.1	Persentase jumlah cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota	114,77	100%	Dinas KPP
			Target jumlah cadangan pangan	114,77		
PERTANAHAN	2.d.1	Persentase Ditetapkannya hak atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	Luas tanah yang telah bersertifikat dalam penguasaan Pemerintah Daerah	12352157	67,08%	BPKAD
			Luas seluruh tanah yang masuk dalam aset Pemerintah Daerah	18414628		
	2.d.2	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	Luas Rencana Pola Ruang yang telah terwujud pada Kondisi Eksisting	113494	0,01%	Dinas PUPR
			Luas Rencana Pola Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah	1277236554		
	2.d.3	Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang sudah dilegalkan	Jumlah Rencana Detail Tata Ruang yang sudah legal	4655,7	100%	Dinas PUPR

Urusan	No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang dan Penyebut	Nilai Pembilang dan Penyebut	Capaian	Sumber Data
			Jumlah Rencana Detail Tata Ruang yang diamanatkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah	4655,7		
LINGKUNGAN HIDUP	2.e.1	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan perundang-undangan	12	60%	Dinas LH
			Jumlah target tahunan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan secara langsung	20		
	2.e.2	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Jumlah sampah yang diangkut, pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah	70696,85	42,16%	Dinas LH
			Jumlah seluruh timbulan sampah di wilayah kabupaten/kota	167697,21		
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.f.1	Persentase akta kelahiran yang diterbitkan	Akta kelahiran yang diterbitkan	263748	96,97%	Dinas Pendukcapil
			Jumlah anak usia 0 – 17 tahun	271988		
	2.f.2	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah anak yang memiliki Kartu Identitas Anak	132467	52,10%	Dinas Pendukcapil
			Jumlah anak wajib Kartu Identitas Anak	254240		

Urusan	No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang dan Penyebut	Nilai Pembilang dan Penyebut	Capaian	Sumber Data
	2.f.3	Persentase data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan	Jumlah data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan	2	100%	Dinas Pendukcapil
			2 dokumen	2		
	2.f.4	Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik	Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik	894465	99,02%	Dinas Pendukcapil
			Jumlah penduduk 17 tahun ke atas	903288		
	2.f.5	Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Akta kematian yang diterbitkan	50138	100%	Dinas Pendukcapil
			Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (kematian) yang tercatat dan melaporkan	50138		
	2.f.6	Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Akta perkawinan yang diterbitkan	2891	100%	Dinas Pendukcapil
			Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (perkawinan) yang tercatat dan melaporkan	2891		
	2.f.7	Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Akta perceraian yang diterbitkan	138	100%	Dinas Pendukcapil
			Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (perceraian) yang tercatat dan melaporkan	138		
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.g.1	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan indeks desa per tahun	100	100%	Dinas PMD
			Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun N)	100		

Urusan	No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang dan Penyebut	Nilai Pembilang dan Penyebut	Capaian	Sumber Data
	2.g.2	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa maju dan mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa per tahun	7	70%	Dinas PMD
			Jumlah desa berkembang (per-awal tahun N)	10		
	2.g.3	Persentase fasilitasi kerja sama desa	Jumlah kerja sama desa yang telah ditetapkan dan berlaku	234	100%	Dinas PMD
			Jumlah kerja sama desa yang ditangani	234		
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.h.1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per Wanita Usia Subur usia 15-49 Tahun	Total Fertility Rate/TFR kabupaten/kota	1,43	71,50%	Dinas PPKB
			Target Fertility Rate/TFR Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat terhadap kabupaten/kota yang bersangkutan	2		
	2.h.2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	Total peserta Keluarga Berencana aktif modern	119400	71,56%	Dinas PPKB
			Total pasangan usia subur usia 15–49 tahun	166854		
	2.h.3	Persentase kebutuhan ber-Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase kebutuhan ber- Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need) kabupaten/kota	5,43	53,76%	Dinas PPKB
			Target persentase kebutuhan ber-Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need) kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota yang bersangkutan	10,1		
PERHUBUNGAN	2.i.1	Konektivitas Kabupaten/Kota	KTDaerah = (KTD x WTD) + (KTL x WTL)	0,2	0,2 Rasio	Dinas Perhubungan

Urusan	No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang dan Penyebut	Nilai Pembilang dan Penyebut	Capaian	Sumber Data
	2.i.2	Volume/Capacity Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	V/C ratio di jalan Kabupaten/Kota	0,49		Dinas Perhubungan
	2.i.3	Persentase Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	0	0%	Dinas Perhubungan
			Jumlah perusahaan angkutan umum yang terdata	7		
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.j.1	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	52	100%	Dinas Kominfo
			Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan atau unit pelaksana teknis daerah	52		
	2.j.2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	5	4,10%	Dinas Kominfo
			Jumlah Layanan Publik	122		
	2.j.3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	772514	98,80%	Dinas Kominfo
			Jumlah penduduk	781908		
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.k.1	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	Σ Volume usaha koperasi tahun berjalan - Σ Volume usaha koperasi tahun sebelumnya	307.062.281.507	2,80%	Dinas Koperasi UM
			Σ Volume usaha koperasi tahun sebelumnya	298.690.717.419		

Urusan	No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang dan Penyebut	Nilai Pembilang dan Penyebut	Capaian	Sumber Data
	2.k.2	Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	Σ Usaha mikro yang memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB)	10597	25,84%	Dinas Koperasi UM
			Σ Usaha mikro	41015		
PENANAMAN MODAL	2.l.1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	(Jumlah nilai investasi tahun N- Jumlah nilai investasi tahun N-1) di kabupaten/kota	1.105.654.165.245	-18,65%	DPMPTSP
			Jumlah nilai investasi tahun N-1 di kabupaten/kota	1.359.191.202.844		
	2.l.2	Realisasi total terhadap target investasi	Total realisasi investasi kabupaten/kota	1.105.654.165.245	100,33%	DPMPTSP
			Target investasi kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi kepada kabupaten/kota yang bersangkutan	1.102.000.000.000		
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.m.1	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang berwirausaha di kabupaten/kota	18	52,94%	Dinas Porabudpar
			Jumlah target pemuda usia (16-30) tahun yang mendapatkan pembinaan wirausaha di kabupaten/kota	34		
	2.m.2	Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota	8152	3,27%	Dinas Porabudpar
			Jumlah pemuda usia (16-30) tahun di kabupaten/kota	249563		
	2.m.3	Persentase atlet yang berasal dari kabupaten/kota yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	Jumlah atlet daerah di kabupaten/kota yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	7	4,70%	Dinas Porabudpar

Urusan	No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang dan Penyebut	Nilai Pembilang dan Penyebut	Capaian	Sumber Data
			Jumlah atlet daerah yang dibina ditingkat kabupaten/kota (Komite Olahraga Nasional Indonesia, Pusat Pendidikan dan Latihan Daerah, Induk Cabang Olahraga)	149		
	2.m.4	Persentase jumlah atlet berprestasi	Jumlah atlet peraih medali	5	50%	Dinas Porabudpar
			Jumlah atlet yang ikut event nasional dan internasional	10		
STATISTIK	2.n	Persentase kepatuhan daftar data yang dilaporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah	Jumlah daftar data yang di laporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah	770	83,24%	Dinas Kominfo
			Jumlah daftar data yang disepakati oleh forum satu data daerah	925		
PERSANDIAN	2.o	Persentase tingkat kematangan keamanan siber dan sandi Pemerintah Daerah	Nilai indeks Keamanan Informasi (KAMI) hasil verifikasi	677	73,75%	Dinas Kominfo
			Nilai optimal indeks Keamanan Informasi (KAMI) (918)	918		
KEBUDAYAAN	2.p.1	Persentase jumlah warisan budaya yang dilestarikan	Jumlah cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	16	100%	Dinas Porabudpar
			Jumlah cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang telah ditetapkan	16		
	2.p.2	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengunjungi pusat seni dan pusat sejarah	Jumlah kunjungan ke pusat peninggalan bersejarah tahun N - Jumlah kunjungan ke pusat peninggalan bersejarah tahun N-1	273163	17,00%	Dinas Porabudpar
			Jumlah kunjungan ke pusat peninggalan bersejarah tahun N-1	233473		

Urusan	No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang dan Penyebut	Nilai Pembilang dan Penyebut	Capaian	Sumber Data
PERPUSTAKAAN	2.q.1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) masyarakat	TKM = ((0.15 × Pra Membaca) + (0.50 × Saat Membaca) + (0.35 × Pasca Membaca)) × 100	57,94	57,94	Dinas Arpus
	2.q.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	IPLM = ((0,30 x Dimensi Kepatuhan) + (0,70 x Dimensi Kinerja)) x 100	23,4	23,4	Dinas Arpus
KEARSIPAN	2.r	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	T = (a + i + s + j)/4	87,22	87,22%	Dinas Arpus
KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.a.1	Produksi perikanan tangkap dan budidaya	Produksi perikanan tangkap dan budidaya (ton)	11715	100,00%	Dinas KPP
			Target produksi perikanan tangkap dan budidaya (ton)	11714,99		
	3.a.2	Angka konsumsi ikan (Kg/Kap/Th)	Angka KI = Angka KRT + Angka KLRT + Angka KTT	39,68	39,68	Dinas KPP
PARIWISATA	3.b.1	Persentase investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, minum	Realisasi investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, minum yang dapat diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	4711750831	0,43%	Dinas Porabudpar
			Realisasi investasi Tahun N	1.105.654.165.245		
	3.b.2	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan asing	Jumlah wisatawan asing tahun N – Jumlah wisatawan asing tahun N-1	7	250%	Dinas Porabudpar
			Jumlah wisatawan asing tahun N-1	2		
	3.b.3	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	Jumlah wisatawan tahun N – Jumlah wisatawan tahun N-1	384768	4,69%	Dinas Porabudpar
			Jumlah wisatawan tahun N-1	367522		

Urusan	No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang dan Penyebut	Nilai Pembilang dan Penyebut	Capaian	Sumber Data
PERTANIAN	3.c.1	Peningkatan produksi tanaman pangan	Produksi tanaman pangan tahun N – Produksi tanaman pangan tahun N-1	825730,43	2,77%	Dinas Pertanian
			Produksi tanaman pangan tahun N-1	803490,13		
	3.c.2	Peningkatan produksi hortikultura	Produksi hortikultura tahun N – Produksi hortikultura tahun N-1	346,26628	7,90%	Dinas Pertanian
			Produksi hortikultura tahun N-1	320,9124		
	3.c.3	Peningkatan produksi komoditas peternakan	Produksi komoditas peternakan tahun N – Produksi komoditas peternakan tahun N-1	18,93833	2,13%	Dinas Pertanian
			Produksi komoditas peternakan tahun N-1	18,54329		
	3.c.4	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS))	Luas wilayah terkendali dari penyakit hewan menular strategis tahun ini	510,13	100%	Dinas Pertanian
			Luas Wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis	510,13		
PERDAGANGAN	3.f	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya bertanda tera sah yang berlaku	9232	93,91%	Dinas Perindag
			Jumlah potensi Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kab/kota	9831		

Urusan	No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang dan Penyebut	Nilai Pembilang dan Penyebut	Capaian	Sumber Data
PERINDUSTRIAN	3.g.1	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 2. Kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota; 3. Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 4. Nilai ekspor sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota 5. Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota	Pencapaian dari setiap sasaran pembangunan industri daerah dihitung dengan cara membandingkan antara target yang ada dalam dokumen perencanaan pembangunan industri daerah tahunan	84,85	84,85%	Dinas Perindag
	3.g.2	Persentase kepatuhan pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional	38	25,17%	Dinas Perindag
			Jumlah seluruh pelaku usaha industri kecil dan menengah	151		
	3.g.3	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota	Jumlah industri kecil dan menengah tahun N – Jumlah industri kecil dan menengah tahun N-1	1598	2,24%	Dinas Perindag
			Jumlah industri kecil dan menengah tahun N-1	1563		

Urusan	No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang dan Penyebut	Nilai Pembilang dan Penyebut	Capaian	Sumber Data
	3.g.4	Persentase realisasi investasi sektor industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	Nilai investasi sektor industri	4.041.240.682.276	37,16%	Dinas Perindag
			Total investasi seluruh sektor	10.875.998.450.069		

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Urusan	No. IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang dan Penyebut	Nilai Pembilang dan Penyebut	Capaian	Sumber Data
PERENCANAAN	4.a.1	Persentase kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Program dan/atau kegiatan yang dianggarkan dalam peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan direalisasikan	15	88,24%	Bappeda
			Program kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan 17 Program prioritas presiden	17		
KEUANGAN	4.b.1	Persentase belanja pegawai daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya	Anggaran belanja pegawai daerah di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD)	1.147.065.300.971,42	37,62%	BPKAD
			Anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	3.049.263.780.749,50		
	4.b.2	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	637.819.473.621,05	21,99%	BPKAD
			Realisasi pendapatan daerah	2.901.017.333.526,05		
	4.b.3	Persentase realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar terhadap total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N	Total realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar tahun N	1.904.781.619.790,38	94,14%	BPKAD

Urusan	No. IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang dan Penyebut	Nilai Pembilang dan Penyebut	Capaian	Sumber Data
			Total realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N	2.023.450.670.892,49		
	4.b.4	Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	Alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	850.916.351.152,45	32,43%	BPKAD
			Total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa	2.624.217.838.749,50		
KELEMBAGAAN, KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	4.c	Persentase Aparatur Sipil Negara pendidikan perguruan tinggi (Aparatur Sipil Negara tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Aparatur Sipil Negara lulusan perguruan tinggi (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	1,383	54,79%	BKPSDM
			Jumlah Aparatur Sipil Negara (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	2,524		
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	4.d	Persentase perangkat daerah yang menerapkan inovasi dan telah menjadi bagian dari program kegiatan	Jumlah produk inovasi perangkat daerah yang menjadi bagian dari program dan atau kegiatan perangkat daerah	66	95,65%	Bappeda
			Jumlah produk inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah	69		
FUNGSI PENGAWASAN	4.e.1	Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai 1/2/3/4/5	3	3	Inspektorat
	4.e.2	Kapabilitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (APIP)	Nilai 1/2/3/4/5	2	2	Inspektorat
	4.e.3	Manajemen risiko Indeks	Nilai1/Nilai 2/Nilai 3/Nilai 4/Nilai 5	3	3	Inspektorat
	4.e.4	Persentase tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran N-1	Tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran Tahun N-1	787	100%	Inspektorat

Urusan	No. IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang dan Penyebut	Nilai Pembilang dan Penyebut	Capaian	Sumber Data
			Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran tahun N-1	787		
FUNGSI PENGADAAN	4.f.1	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	Skor indikator tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	40	40	Setda/Bagian ULP
	4.f.2	Pemanfaatan sistem pengadaan	Skor indikator pemanfaatan sistem pengadaan	22,98	22,98	Setda/Bagian ULP
	4.f.3	Kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ)	Skor indikator kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa	20,4	20,4	Setda/Bagian ULP
HUBUNGAN DENGAN PERWAKILAN DAERAH	4.g.1	Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	1	1 Tepat Waktu	BPKAD
	4.g.2	Persentase penetapan Rancangan Peraturan Daerah tahun N	Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan Tahun N	6	42,86%	Setda/Bagian Hukum
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang tertuang dalam program pembentukan peraturan daerah tahun N	14		
PELAYANAN PUBLIK	4.h	Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	Nilai Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	97,84	97,84	Setda/Bagian Organisasi

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Daerah atas pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan dan diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja. Bagian ini memuat informasi mengenai capaian kinerja yang diukur secara sistematis, terarah, dan terukur. Pada tahun 2025, Kabupaten Nganjuk mengalami masa transisi di mana dokumen perencanaan jangka menengah mempedomani pada 2 (dua) dokumen perencanaan yaitu Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 (sebagaimana dalam Perjanjian Kinerja Bupati Nganjuk Tahun 2025 tanggal 3 Maret 2025) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029 yang berlaku semenjak ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 – 2029 pada tanggal 20 Agustus 2025.

a. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Target kinerja dalam perjanjian kinerja adalah sasaran kuantitatif maupun kualitatif yang telah ditetapkan dan disepakati oleh kepala daerah pada awal tahun anggaran. Target ini merupakan turunan dari dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD dan RKPD yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kinerja sebagai komitmen formal untuk dicapai dalam periode satu tahun. Target kinerja biasanya dinyatakan dalam indikator yang jelas, terukur, dan memiliki batas waktu pencapaian. Dalam penyajian laporan perjanjian kinerja Bupati Nganjuk kami akan menyajikan dalam 2 (dua) tabel yaitu tabel sesuai dengan dokumen perencanaan yaitu Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 (sebagaimana dalam Perjanjian Kinerja Bupati Nganjuk Tahun 2025 tanggal 3 Maret 2025) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025 – 2029 yang berlaku semenjak ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 – 2029 pada tanggal 20 Agustus 2025.

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Bupati Nganjuk Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target
1	2	3		4	5
I.	Tujuan :	1	Pertumbuhan ekonomi daerah	%	4,98
	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah Yang Inklusif Dan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemerataan Pembangunan Yang Berwawasan Lingkungan Hidup	2	Indeks Gini	Indeks	≤ 0.30
		3	Tingkat Kemiskinan Daerah	%	10,15
		4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,85
		5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	69,17
1	Meningkatnya Produktifitas Ekonomi Lokal	1	Pertumbuhan PDRB ADHK Lapangan Usaha Industri Pengolahan	%	11,9
		2	Pertumbuhan PDRB ADHK Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran serta reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	5,5
		3	Nilai Investasi Daerah	Rp	1.365.000.000.000
2	Meningkatnya Kesejahteraan Petani Dan Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi Pangan	4	NTP	Nilai	111,6
		5	Skop Pola Pangan Harapan	Skor	92
3	Meningkatnya Daya Saing Produk Unggulan Daerah	6	Rata-rata lama tinggal wisatawan	Hari	0,29
		7	Pertumbuhan Koperasi Sehat	%	1,20
		8	Rata-rata peningkatan volume usaha mikro	%	20,00
4	Mengurangi Penduduk Miskin Melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9	Angka Kemiskinan Ekstrim	%	0,30
		10	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0,7869
5	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	11	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	69,90

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target
1	2	3		4	5
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	12	Indeks Kualitas Air	Indeks	59,56
		13	Indeks Kualitas Udara	Indeks	88,50
		14	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	56,00
7	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Akses Hunian Layak Serta Keselamatan Transportasi	15	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks	86,00
		16	Persentase Rumah Layak Huni	%	97,44
		17	Rasio Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan	Nilai	22,00
II	Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing		Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	75,30
8	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	18	Indeks Kesehatan	Indeks	0,85
9	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Prestasi Kepemudaan	19	Indeks Pendidikan	Indeks	0,65
		20	Jumlah Pemuda Berprestasi	Orang	74
10	Meningkatnya Keadilan dan Kesetaraan Gender	21	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94,80
III	Tujuan : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	84,10
11	Meningkatnya Birokrasi Yang Akuntabel dan Efektif Serta Pelayanan Publik Yang Prima	22	Nilai SAKIP	Nilai	72,00
		23	Opini BPK Terhadap LKPD	Opini	WTP
		24	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3,89
		25	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,60
12	Meningkatnya Transformasi Digital Pemerintahan Daerah	26	Indeks SPBE	Indeks	3,85
13	Meningkatnya Profesionalitas ASN	27	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	79,20

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target
1	2	3		4	5
IV.	Tujuan : Meningkatnya Kondisi Sosial Masyarakat Yang Harmonis Dan Berbudaya		Indeks Kesalehan Sosial.	Indeks	91,10
14	Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial Serta Ketentraman dan Ketertiban Umum	28	Persentase Penanganan Konflik Sosial	%	100
		29	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	%	98,5
15	Meningkatnya Pelestarian Warisan Kebudayaan Lokal	30	Persentase Warisan Seni Budaya dan Tradisi Lokal Yang Dilestarikan	%	32,43
16	Meningkatnya Ketangguhan Dalam Penanggulangan Bencana	31	Indeks Risiko Bencana	Indeks	86

Sumber data : Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 (sebagaimana dalam Perjanjian Kinerja Bupati Nganjuk Tahun 2025)

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Bupati Nganjuk Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029

Visi / Misi	Tujuan	No	Sasaran	Indikator	Target
1	2	3	4	5	6
Mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang Maju, Sejahtera, dan Bermartabat - Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan YME, serta dapat memelihara kerukunan, ketenteraman, dan ketertiban - Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalaui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan - Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis dan toleran			Indeks Kesalehan Sosial (Indeks)	91,448
		1	Meningkatnya kerukunan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama (Indeks)	79,29
				Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (Indeks)	65,73
		2	Meningkatnya kemajuan kebudayaan daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan (Indeks)	60,7
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik			Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	84,35
		3	Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Nilai Sistem Merit (Nilai)	280
		4	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Nilai)	3,327
				Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai)	72
		5	Meningkatnya pemerintahan berintegritas dan	Indeks Integritas Pemerintah Daerah (Indeks)	69

Visi / Misi	Tujuan	No	Sasaran	Indikator	Target
1	2	3	4	5	6
- Meningkatkan kualitas, pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas - Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal - Meningkatkan pembangunan sektor pariwisata serta sektor produktif lain, melalui peningkatan produktivitas berbasis teknologi tepat guna - Meningkatkan kebanggaan terhadap kesenian, kebudayaan dan kearifan lokal			pengawasan berkualitas		
				Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai)	3,200
		6	Meningkatnya tata kelola keuangan dan kapasitas fiskal daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Indeks)	70,812
				Rasio kapasitas fiskal daerah (Rasio)	1,124
		7	Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	4,58
				Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik (Indeks)	87,6
		8	Meningkatnya transformasi digital pemerintah daerah	Indeks Pemerintahan Digital (Indeks)	1,5
	Meningkatkan infrastruktur publik yang handal dan berkelanjutan			Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (Indeks)	80
		9	Meningkatnya infrastruktur konektivitas wilayah yang handal	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)	70,05
				Rasio Konektivitas (Rasio)	0,21
		10	Meningkatnya akses hunian layak,	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak,	74,50

Visi / Misi	Tujuan	No	Sasaran	Indikator	Target
1	2	3	4	5	6
			terjangkau dan berkelanjutan	Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	
		11	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks)	72,61
		12	Meningkatkan ketangguhan dalam penanggulangan bencana	Indeks Risiko Bencana (Indeks)	105,02
	Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas			Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	75,92
		13	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	8,4
				Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,19
		14	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))	74,76
		15	Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)	0,354
		16	Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA) (Indeks)	65,95
		17	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	Persentase peningkatan prestasi pemuda dan olahraga (%)	1,05
		18	Meningkatnya literasi masyarakat	Indeks pembangunan literasi masyarakat (Indeks)	60,11

Visi / Misi	Tujuan	No	Sasaran	Indikator	Target
1	2	3	4	5	6
	Meningkatnya pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan			Tingkat Kemiskinan ((%))	10,16
				Rasio Gini (Indeks)	0,288
		19	Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif	Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks)	62,67
		20	Meningkatnya kemandirian desa	Indeks Desa (Indeks)	0,781
	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif.			Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,98
		21	Meningkatnya nilai tambah pertanian	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	1,98
		22	Meningkatnya nilai tambah perindustrian dan perdagangan	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	16,27
				Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (%)	20,54
		23	Meningkatnya investasi daerah	Nilai Investasi (Rp)	1.102.000.000.000
		24	Meningkatknya daya saing koperasi dan usaha mikro	Persentase peningkatan volume usaha mikro (%)	3
				Persentase peningkatan koperasi berkualitas (%)	74

Visi / Misi	Tujuan	No	Sasaran	Indikator	Target
1	2	3	4	5	6
		25	Menurunnya pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,77
		26	Meningkatnya ketahanan pangan daerah.	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)	73,66
		27	Meningkatnya nilai tambah sektor pariwisata	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,08

Sumber data : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029

2.3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Perjanjian Kinerja

Pada bulan September 2025, Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah melakukan perubahan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam hal ini adalah menyesuaikan dengan indikator tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 yang menggambarkan dampak final/akhir (*final impact*) dari pembangunan sebagai agregasi dari hasil (*outcome*) urusan pemerintahan daerah. Secara umum, indikator kinerja daerah yang menggambarkan tingkat keberhasilan, yaitu :

Tabel 2.6
Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Bupati Nganjuk Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026

No	Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran Strategis Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Tahun 2025			Kategori	Analisis Singkat
					Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**NGANJUK TUMBUH**								
	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemerataan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Hidup		Pertumbuhan Ekonomi Daerah	%	4,98	5,30	106,43	Tercapai	Realisasi pertumbuhan ekonomi melampaui target yang ditetapkan, menunjukkan aktivitas ekonomi daerah meningkat dan sektor-sektor utama mampu mendorong pertumbuhan secara positif.
			Indeks Gini	Indeks	*≤ 0,30*	*0,30*	100,00	Tercapai	Ketimpangan pendapatan berhasil dijaga sesuai target sehingga pemerataan ekonomi relatif stabil.
			Tingkat Kemiskinan Daerah	%	10,15	10,06	100,89	Tercapai	Program pengentasan kemiskinan berjalan efektif sehingga tingkat kemiskinan mampu ditekan lebih baik dari target yang ditetapkan.
			Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,85	3,84	99,74	Tercapai	Penyerapan tenaga kerja berjalan cukup baik sehingga tingkat pengangguran dapat dipertahankan sesuai target.
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	69,17	72,54	104,87	Tercapai	Peningkatan kualitas lingkungan menunjukkan efektivitas program pengelolaan lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam.

No	Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran Strategis Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Tahun 2025			Kategori	Analisis Singkat
					Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatkan Produktifitas Ekonomi Lokal	Pertumbuhan PDRB ADHK Lapangan Usaha Industri Pengolahan	%	11,90	6,71	56,39	Tidak tercapai	Pertumbuhan sektor industri pengolahan belum mencapai target yang ditetapkan, diduga dipengaruhi oleh kondisi pasar, investasi industri, dan kapasitas produksi yang belum optimal.
			Pertumbuhan PDRB ADHK Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	5,50	6,10	110,91	Tercapai	Sektor perdagangan menunjukkan kinerja sangat baik dengan pertumbuhan di atas target, didukung oleh meningkatnya aktivitas perdagangan dan konsumsi masyarakat.
			Nilai Investasi Daerah	Rp	1.365.000.000.000	1.105.654.165.215	81,00	Tercapai dengan catatan	Realisasi investasi belum sepenuhnya mencapai target optimal sehingga perlu peningkatan promosi investasi dan kemudahan perizinan.
		Meningkatkan Kesejahteraan Petani dan Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi Pangan	Nilai Tukar Petani (NTP)	Nilai	111,60	111.51*	99,92	Tercapai	Kesejahteraan petani relatif stabil dan mampu dipertahankan sesuai target melalui dukungan sektor pertanian dan stabilitas harga komoditas.
			Skor Pola Pangan Harapan	Skor	92,00	95,40	103,70	Tercapai	Konsumsi pangan masyarakat semakin beragam dan bergizi sehingga kualitas pola konsumsi meningkat.
		Meningkatkan Daya Saing Produk Unggulan Daerah	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan	Hari	0,29	0,23	79,31	Tidak tercapai	Lama tinggal wisatawan masih rendah sehingga perlu pengembangan destinasi dan paket wisata yang lebih menarik.
			Pertumbuhan Koperasi Sehat	%	1,20	1.15*	95,83	Tercapai	Pembinaan koperasi berjalan cukup baik sehingga jumlah koperasi sehat meningkat sesuai target.

No	Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran Strategis Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Tahun 2025			Kategori	Analisis Singkat
					Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Rata-rata Peningkatan Volume Usaha Mikro	%	20,00	3,14	15,70	Tidak tercapai	Pertumbuhan usaha mikro belum optimal, kemungkinan dipengaruhi keterbatasan akses pasar, modal, dan daya saing produk.
		Mengurangi Penduduk Miskin Melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Angka Kemiskinan Ekstrim	%	0,30	0,45 %*	50,00	Tidak tercapai	Target penurunan kemiskinan ekstrem belum tercapai sehingga perlu penguatan program intervensi sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
			Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0,7869	0.78191*	99,37	Tercapai	Pembangunan desa menunjukkan perkembangan positif dengan status desa yang semakin maju.
		Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	69,90	73,19	104,71	Tercapai	Partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi meningkat sehingga tenaga kerja aktif semakin besar.
		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Indeks	59,56	77,51	130,14	Tercapai	Kualitas air mengalami peningkatan signifikan berkat pengelolaan sumber daya air dan pengendalian pencemaran.
			Indeks Kualitas Udara	Indeks	88,50	71,88	81,22	Tercapai dengan catatan	Kualitas udara masih dalam kategori tercapai namun perlu upaya pengendalian pencemaran udara agar lebih optimal.
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	56,00	65,23	116,48	Tercapai	Upaya konservasi dan rehabilitasi lahan berjalan baik sehingga meningkatkan kualitas tutupan lahan.
		Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Infrastruktur	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks	86	76,49	88,94	Tercapai dengan catatan	Pembangunan infrastruktur berjalan cukup baik namun masih perlu peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur.

No	Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran Strategis Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Tahun 2025			Kategori	Analisis Singkat
					Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pekerjaan Umum dan Akses Hunian Layak, serta Keselamatan Transportasi	Persentase Rumah Layak Huni	%	97,44	97,16	99,71	Tercapai	Program peningkatan kualitas perumahan berhasil mempertahankan capaian rumah layak huni sesuai target.
			Rasio Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan	Nilai	22,00	32,27	53,32	Tidak tercapai	Tingkat kecelakaan lalu lintas masih tinggi sehingga perlu peningkatan keselamatan transportasi dan kesadaran berlalu lintas.
2	**NGANJUK SEHAT DAN CERDAS**								
	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing		Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	75,30	75,89	100,78	Tercapai	Pembangunan manusia menunjukkan kemajuan dengan peningkatan pada aspek kesehatan, pendidikan, dan daya beli masyarakat.
		Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Indeks	0,85	0.8*	94,12	Tercapai	Derajat kesehatan masyarakat mengalami peningkatan melalui peningkatan layanan kesehatan dan program promotif preventif.
		Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Prestasi Kepemudaan	Indeks Pendidikan	Indeks	0,65	0.64*	98,46	Tercapai	Kualitas pendidikan relatif stabil dan mampu dipertahankan sesuai target yang ditetapkan.
			Jumlah Pemuda Berprestasi	Orang	74 orang	141,00	190,54	Tercapai	Pembinaan kepemudaan berjalan sangat baik sehingga jumlah pemuda berprestasi meningkat signifikan.
		Meningkatkan Keadilan dan Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94,80	91,32*	96,32	Tercapai	Kesetaraan gender terus meningkat melalui kebijakan pembangunan yang responsif gender.

No	Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran Strategis Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Tahun 2025			Kategori	Analisis Singkat
					Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	**NGANJUK AKUNTABEL**								
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	84,10	84.05*	99,94	Tercapai	Implementasi reformasi birokrasi berjalan baik dan mampu mempertahankan capaian sesuai target.
		Meningkatkan Birokrasi yang Akuntabel dan Efektif, Serta Pelayanan Publik yang Prima	Nilai SAKIP	Nilai	72,00	70,19	97,49	Tercapai	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat melalui penguatan perencanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja.
			Opini BPK Terhadap LKPD	Opini	WTP	WTP	100,00	Tercapai	Pengelolaan keuangan daerah telah memenuhi standar akuntansi sehingga memperoleh opini WTP.
			Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3,89	3.987**	102,49	Tercapai	Sistem pengendalian intern pemerintah semakin baik dan efektif dalam mendukung tata kelola pemerintahan.
			Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,60	4,61	100,22	Tercapai	Kualitas pelayanan publik meningkat dan mampu memenuhi standar pelayanan kepada masyarakat.
		Meningkatkan Transformasi Digital Pemerintahan Daerah	Indeks SPBE	Indeks	3,85	3,84	99,74	Tercapai	Implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik berjalan baik dan mendukung transformasi digital.
		Meningkatkan Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	79,20	80.34*	101,44	Tercapai	Profesionalitas ASN meningkat melalui pengembangan kompetensi dan penguatan manajemen ASN.
4	**NGANJUK HARMONIS**								
	Meningkatnya Kondisi Sosial Masyarakat yang		Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	91,10	91,45	100,38	Tercapai	Kondisi sosial masyarakat relatif harmonis dengan nilai kesalehan sosial yang tinggi.

No	Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran Strategis Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Tahun 2025			Kategori	Analisis Singkat
					Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Harmonis dan Berbudaya								
		Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial, Serta Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Konflik Sosial	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	Seluruh konflik sosial yang terjadi dapat ditangani dengan baik oleh pemerintah daerah.
			Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	%	98,5	75,00	76,14	Tidak tercapai	Penanganan gangguan ketertiban umum belum optimal sehingga perlu peningkatan pengawasan dan koordinasi lintas sektor.
		Meningkatkan Pelestarian Warisan Kebudayaan Lokal	Persentase Warisan Seni Budaya dan Tradisi Lokal yang Dilestarikan	%	32.43	1,57	115,49	Tercapai	Upaya pelestarian budaya lokal berjalan baik dengan peningkatan jumlah warisan budaya yang dilestarikan.
		Meningkatkan Ketangguhan Dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Risiko Bencana	Indeks	86,00	95,58	88,86	Tercapai dengan catatan	Upaya pengurangan risiko bencana cukup baik namun masih perlu peningkatan kapasitas mitigasi dan kesiapsiagaan.

Catatan : Realisasi kinerja per tanggal 25 Maret 2026

Tabel 2.7
Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Bupati Nganjuk Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025 – 2029

No	Sasaran	Indikator	Tahun 2025			Katagori	Analisis
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Indeks Kesalehan Sosial (Indeks)	91,448	91,452	100,004	Tercapai	Realisasi melampaui target, menunjukkan harmoni sosial yang sangat baik.
1	Meningkatnya kerukunan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama (Indeks)	79,29	82,34	103,847	Tercapai	Sinergi kerukunan antarumat beragama meningkat signifikan di atas target.
		Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (Indeks)	65,73	66	100,411	Tercapai	Penyelenggaraan ketertiban umum berjalan efektif sesuai target.
2	Meningkatnya kemajuan kebudayaan daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan (Indeks)	60,7	60,85	100,247	Tercapai	Upaya pelestarian dan kemajuan budaya daerah memenuhi target.
		Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	84,35	84,05	99,644	Tercapai	Reformasi birokrasi berjalan konsisten di jalur yang tepat.
3	Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Nilai Sistem Merit (Nilai)	280	260	92,857	Tercapai	Kualitas manajemen ASN berbasis kualifikasi dan kompetensi tercapai baik.
4	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Nilai)	3,327	3,1017	93,228	Tercapai	Akuntabilitas pemerintahan daerah menunjukkan performa yang memuaskan.
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai)	72	70,19	97,486	Tercapai	Manajemen kinerja instansi pemerintah sudah akuntabel dan efisien.
5	Meningkatnya pemerintahan berintegritas dan pengawasan berkualitas	Indeks Integritas Pemerintah Daerah (Indeks)	69	72,76	105,449	Tercapai	Integritas pemerintahan meningkat tajam melebihi ekspektasi target.

No	Sasaran	Indikator	Tahun 2025			Katagori	Analisis
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai)	3,200	3,987	124,594	Tercapai	Sistem pengendalian intern berfungsi sangat optimal melebihi target.
6	Meningkatnya tata kelola keuangan dan kapasitas fiskal daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Indeks)	70,812	61,327	86,605	Tercapai dengan Catatan	Perlu optimalisasi lebih lanjut dalam efektivitas pengelolaan anggaran daerah.
		Rasio kapasitas fiskal daerah (Rasio)	1,124	0,095	8,452	Tidak Tercapai	Realisasi sangat jauh di bawah target; butuh evaluasi sumber pendapatan.
7	Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	4,58	4,61	100,655	Tercapai	Standar pelayanan publik berhasil dipertahankan sesuai target.
		Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik (Indeks)	87,6	89,34	101,986	Tercapai	Kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah melebihi target.
8	Meningkatnya transformasi digital pemerintah daerah	Indeks Pemerintahan Digital (Indeks)	1,5	1,5	100,000	Tercapai	Implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik tepat sasaran.
		Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (Indeks)	80	74,05	92,563	Tercapai	Layanan penunjang infrastruktur digital telah memenuhi standar target.
9	Meningkatnya infrastruktur konektivitas wilayah yang handal	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)	70,05	73,51	104,939	Tercapai	Perbaikan dan pemeliharaan jalan melampaui target fisik tahunan.
		Rasio Konektivitas (Rasio)	0,21	0,2	95,238	Tercapai	Aksesibilitas antarwilayah sudah terhubung dengan baik.
10	Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	74,5	74,5	100,000	Tercapai	Target pemenuhan hunian bagi masyarakat tercapai sepenuhnya.
11	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks)	72,61	72,54	99,904	Tercapai	Upaya perlindungan lingkungan hidup berjalan stabil sesuai rencana.
12		Indeks Risiko Bencana (Indeks)	105,02	95,58	109,877	Tercapai	Penurunan risiko bencana berhasil ditekan lebih baik dari target awal.

No	Sasaran	Indikator	Tahun 2025			Katagori	Analisis
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Meningkatkan ketangguhan dalam penanggulangan bencana	Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	75,92	75,89	99,960	Tercapai	Peningkatan kualitas hidup masyarakat stabil dan sesuai jalur.
13	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	8,4	8,26	98,333	Tercapai	Partisipasi pendidikan masyarakat menunjukkan tren positif.
		Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,19	13,19	100,000	Tercapai	Ekspektasi durasi pendidikan masyarakat terpenuhi sesuai target.
14	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))	74,76	74,96	100,268	Tercapai	Peningkatan kualitas kesehatan memperpanjang usia harapan hidup.
15	Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)	0,354	0,35	101,143	Tercapai	Kesenjangan gender berhasil diperkecil melampaui target tahunan.
16	Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA) (Indeks)	65,95	65,94	99,985	Tercapai	Ketahanan keluarga masyarakat terjaga pada level yang sangat baik.
17	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	Persentase peningkatan prestasi pemuda dan olahraga (%)	1,05	1,41	134,286	Tercapai	Capaian prestasi melampaui target secara signifikan (overachieved).
18	Meningkatnya literasi masyarakat	Indeks pembangunan literasi masyarakat (Indeks)	60,11	23,4	38,929	Tidak Tercapai	Capaian baik; butuh intervensi masif pada program literasi dan penguatan program terkait dengan literasi masyarakat
		Tingkat Kemiskinan ((%))	10,16	10,06	100,98	Tercapai	Penurunan angka kemiskinan melampaui target yang ditetapkan.
		Rasio Gini (Indeks)	0,288	0,300	96,000	Tercapai	Pemerataan pendapatan masyarakat terjaga dalam batas target.
19	Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif	Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks)	62,67	59,29	94,607	Tercapai	Program perlindungan sosial berjalan efektif membantu masyarakat.

No	Sasaran	Indikator	Tahun 2025			Katagori	Analisis
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8
20	Meningkatnya kemandirian desa	Indeks Desa (Indeks)	0,781	0,7928	101,511	Tercapai	Status kemandirian desa meningkat melampaui target yang dipasang.
		Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,98	5,30	106,426	Tercapai	Laju ekonomi daerah tumbuh lebih cepat dari proyeksi awal.
21	Meningkatnya nilai tambah pertanian	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	1,98	2,81	141,919	Tercapai	Akselerasi sektor pertanian meningkat luar biasa di atas target.
22	Meningkatnya nilai tambah perindustrian dan perdagangan	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	16,27	16,05	98,65	Tercapai	Kontribusi sektor industri terhadap ekonomi terus menguat.
		Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (%)	20,54	20,69	100,73	Tercapai	Sektor perdagangan tetap stabil dan memenuhi target tahunan.
23	Meningkatnya investasi daerah	Nilai Investasi (Rp)	1.102.000.000.000	1.105.654.165.215	100,332	Tercapai	Penyerapan investasi daerah terealisasi sesuai dengan target.
24	Meningkatknya daya saing koperasi dan usaha mikro	Persentase peningkatan volume usaha mikro (%)	3	3,14	104,667	Tercapai	Kapasitas usaha mikro berkembang lebih pesat dari yang ditargetkan.
		Persentase peningkatan koperasi berkualitas (%)	74	74,5	100,676	Tercapai	Penguatan mutu kelembagaan koperasi berjalan sesuai rencana.
25	Menurunnya pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,77	3,84	98,18	Tercapai	Angka pengangguran berhasil dikendalikan sesuai target pasar kerja.
26	Meningkatnya ketahanan pangan daerah.	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)	73,66	73,65	99,986	Tercapai	Ketersediaan dan keterjangkauan pangan daerah sangat stabil.
27	Meningkatnya nilai tambah sektor pariwisata	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,08	2,05	98,56	Tercapai	Sektor penunjang pariwisata pulih dan mencapai target kinerja.

Catatan : Realisasi kinerja per tanggal 16 Maret 2026

2.3.3 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya bertujuan untuk mengetahui perkembangan kinerja perangkat daerah dari waktu ke waktu, mengidentifikasi tren peningkatan atau penurunan capaian indikator, serta menjadi dasar evaluasi efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. Hasil perbandingan ini juga menjadi bahan perbaikan kebijakan serta penguatan perencanaan kinerja pada periode selanjutnya guna memastikan pencapaian target pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dalam menghitung tren kenaikan / penurunan realisasi 2025 dibanding 2024 berdasarkan rumus:

$$\text{Tren} = \frac{Realisasi\ 2025 - Realisasi\ 2024}{Realisasi\ 2024} \times 100\%$$

Penyajian tren dan analisa terhadap pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.8
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Tahun 2024 dengan Tahun 2025
Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja		TAHUN 2025			TAHUN 2024			Kenaikan /Penurunan	Analisa Tren
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Tujuan :	1	Pertumbuhan ekonomi daerah	4,98	5,30	106,43	4,92	4,93	100,20	6,22	Terjadi tren peningkatan realisasi dibanding tahun sebelumnya, menunjukkan aktivitas ekonomi daerah mengalami perbaikan dan mampu melampaui kinerja tahun sebelumnya.
	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah	2	*Indeks Gini*	≤ 0,30	0,30	100,00	≤ 0.30	0,289	103,67	-3,67	Terjadi penurunan capaian kinerja dibanding tahun

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja		TAHUN 2025			TAHUN 2024			Kenaikan /Penurunan	Analisa Tren
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Yang Inklusif Dan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemerataan Pembangunan Yang Berwawasan Lingkungan Hidup										sebelumnya, menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan relatif meningkat sehingga perlu penguatan program pemerataan ekonomi.
		3	Tingkat Kemiskinan Daerah	10,15	10,06	100,89	10,5	10,17	103,14	-2,26	Tren capaian mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yang menunjukkan penanganan kemiskinan belum optimal dan masih memerlukan intervensi program yang lebih efektif.
		4	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,85	3,84	99,74	4,6	3,87	115,87	-16,13	Terjadi penurunan capaian kinerja dibanding tahun sebelumnya yang menunjukkan kondisi pasar kerja belum sepenuhnya pulih.
		5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,17	72,54	104,87	67,38	69,07	102,51	2,36	Terjadi peningkatan realisasi dibanding tahun sebelumnya yang menunjukkan adanya perbaikan pada kualitas lingkungan hidup daerah.

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja		TAHUN 2025			TAHUN 2024			Kenaikan /Penurunan	Analisa Tren
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Produktifitas Ekonomi Lokal	1	Pertumbuhan PDRB ADHK Lapangan Usaha Industri Pengolahan	11,90	6,71	56,39	11,8	6,67	56,53	-0,14	Tren capaian relatif stabil namun sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya, menunjukkan pertumbuhan sektor industri belum mengalami akselerasi signifikan.
		2	Pertumbuhan PDRB ADHK Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran serta reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,50	6,10	110,91	5,4	4,9	90,74	20,17	Terjadi peningkatan capaian yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya, menunjukkan sektor perdagangan mulai pulih dan berkembang.
		3	Nilai Investasi Daerah (Rp)	1365000000 000,00	1105654165 215,00	81,00	1.050.000. 000.000	1.359.191. 202.844	129,45	-48,45	Tren capaian mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yang mengindikasikan penurunan realisasi investasi di daerah.
2	Meningkatnya Kesejahteraan Petani Dan Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi Pangan	4	NTP	111,60	111.51*	99,92	102,5	111,51	108,79	-8,87	Terjadi penurunan capaian dibanding tahun sebelumnya yang menunjukkan daya beli atau kesejahteraan petani relatif menurun.
		5	Skor Pola Pangan Harapan	92,00	95,40	103,70	88	93,39	106,13	-2,43	Tren capaian mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, namun

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja		TAHUN 2025			TAHUN 2024			Kenaikan /Penurunan	Analisa Tren
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											masih menunjukkan kondisi konsumsi pangan masyarakat relatif baik.
3	Meningkatnya Daya Saing Produk Unggulan Daerah	6	Rata-rata lama tinggal wisatawan	0,29	0,23	79,31	0,25	0,224	89,60	-10,29	Terjadi penurunan dibanding tahun sebelumnya yang menunjukkan daya tarik wisata atau lama kunjungan wisatawan masih perlu ditingkatkan.
		7	Pertumbuhan Koperasi Sehat	1,20	1.15*	95,83	0,95	1,15	121,05	-25,22	Tren capaian mengalami penurunan yang menunjukkan pertumbuhan koperasi sehat belum berkembang secara optimal.
		8	Rata-rata peningkatan volume usaha mikro	20,00	3,14	15,70	15	12,99	86,60	-70,90	Terjadi penurunan signifikan dibanding tahun sebelumnya yang menunjukkan perkembangan usaha mikro mengalami perlambatan.
4	Mengurangi Penduduk Miskin Melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9	Angka Kemiskinan Ekstrim	0,30	0,45 %*	50,00	0,5	0,47	106,00	-56,00	Terjadi penurunan capaian dibanding tahun sebelumnya yang menunjukkan upaya penurunan kemiskinan ekstrem masih menghadapi tantangan.

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja		TAHUN 2025			TAHUN 2024			Kenaikan /Penurunan	Analisa Tren
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		10	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,79	0.78191*	99,37	0,7421	0,7795	105,04	-5,67	Tren capaian menurun dibanding tahun sebelumnya sehingga masih diperlukan penguatan pembangunan desa.
5	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	11	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	69,90	73,19	104,71	67,5	69,79	103,39	1,31	Terjadi sedikit peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang menunjukkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi mulai meningkat.
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	12	Indeks Kualitas Air	59,56	77,51	130,14	59,51	56,25	94,52	35,62	Terjadi peningkatan capaian yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya sehingga menunjukkan adanya perbaikan kualitas air.
		13	Indeks Kualitas Udara	88,50	71,88	81,22	80,85	88,18	109,07	-27,85	Terjadi penurunan capaian dibanding tahun sebelumnya yang menunjukkan kualitas udara mengalami penurunan.
		14	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	56,00	65,23	116,48	55,99	55,74	99,55	16,93	Terjadi peningkatan capaian dibanding tahun sebelumnya yang menunjukkan kondisi

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja		TAHUN 2025			TAHUN 2024			Kenaikan /Penurunan	Analisa Tren
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											tutupan lahan mengalami perbaikan.
7	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Akses Hunian Layak Serta Keselamatan Transportasi	15	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	86	76,49	88,94	85	84,23	99,09	-10,15	Terjadi penurunan capaian dibanding tahun sebelumnya yang menunjukkan kualitas atau ketersediaan infrastruktur masih perlu ditingkatkan.
		16	Persentase Rumah Layak Huni	97,44	97,16	99,71	96,94	96,97	100,03	-0,32	Tren capaian relatif stabil dengan sedikit penurunan dibanding tahun sebelumnya.
		17	Rasio Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan	22,00	32,27	53,32	22,5	22,09	98,18	-44,86	Terjadi penurunan rasio kecelakaan dibanding tahun sebelumnya yang menunjukkan kondisi keselamatan lalu lintas semakin membaik.
II	Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing		Indeks Pembangunan Manusia	75,30	75,89	100,78	73,49	75,24	102,38	-1,60	Terjadi sedikit penurunan capaian dibanding tahun sebelumnya sehingga perlu penguatan pada sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi.
8	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	18	Indeks Kesehatan	0,85	0.8*	94,12	0,8	0,84	105,00	-10,88	Tren capaian mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya sehingga perlu peningkatan kualitas layanan kesehatan.

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja		TAHUN 2025			TAHUN 2024			Kenaikan /Penurunan	Analisa Tren
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Prestasi Kepemudaan	19	Indeks Pendidikan	0,65	0.64*	98,46	0,64	0,64	100,00	-1,54	Capaian relatif stabil namun sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya.
		20	Jumlah Pemuda Berprestasi	74 orang	141,00	190,54	70	72	102,86	-87	Terjadi penurunan signifikan dibanding tahun sebelumnya yang menunjukkan pembinaan prestasi pemuda perlu ditingkatkan.
10	Meningkatnya Keadilan dan Kesetaraan Gender	21	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,80	91,32*	96,32	93,97	94,75	100,83	-4,51	Terjadi penurunan capaian dibanding tahun sebelumnya yang menunjukkan kesetaraan gender masih perlu diperkuat.
III	Tujuan : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik		Indeks Reformasi Birokrasi	84,10	84.05*	99,94	63,79	84,05	131,76	-31,82	Terjadi penurunan capaian dibanding tahun sebelumnya sehingga diperlukan penguatan implementasi reformasi birokrasi.
11	Meningkatnya Birokrasi Yang Akuntabel dan Efektif Serta Pelayanan Publik Yang Prima	22	Nilai SAKIP	72,00	70,19	97,49	69,25	70,07	101,18	-3,70	Capaian mengalami sedikit penurunan dibanding tahun sebelumnya namun masih berada pada kategori yang relatif baik.

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja		TAHUN 2025			TAHUN 2024			Kenaikan /Penurunan	Analisa Tren
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		23	Opini BPK Terhadap LKPD	WTP	WTP	100,00	WTP	WTP	100,00	0,00	Capaian tetap dengan opini WTP sehingga menunjukkan pengelolaan keuangan daerah tetap akuntabel.
		24	Nilai Maturitas SPIP	3,89	3.987**	102,49	3,15	3,86	122,60	-20,11	Terjadi penurunan capaian dibanding tahun sebelumnya yang menunjukkan penguatan pengendalian internal masih diperlukan.
		25	Indeks Pelayanan Publik	4,60	4,61	100,22	3,5	4,57	130,57	-30,35	Tren capaian mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya sehingga kualitas pelayanan publik perlu terus ditingkatkan.
12	Meningkatnya Transformasi Digital Pemerintahan Daerah	26	Indeks SPBE	3,85	3,84	99,74	2,5	3,84	153,60	-53,86	Terjadi penurunan capaian dibanding tahun sebelumnya yang menunjukkan implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik masih perlu diperkuat.
13	Meningkatnya Profesionalitas ASN	27	Indeks Profesionalitas ASN	79,20	80.34*	101,44	55	80,34	146,07	-44,63	Terjadi **penurunan capaian kinerja** dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat profesionalitas ASN relatif menurun

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja		TAHUN 2025			TAHUN 2024			Kenaikan /Penurunan	Analisa Tren
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											dibandingkan tahun sebelumnya sehingga perlu penguatan pada aspek kompetensi, kinerja, dan disiplin ASN melalui pengembangan SDM serta manajemen talenta.
IV.	Tujuan : Meningkatnya Kondisi Sosial Masyarakat Yang Harmonis Dan Berbudaya		Indeks Kesalehan Sosial.	91,10	91,45	100,38	89,803	91,03	101,37	-0,98	Terjadi penurunan capaian yang sangat kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kesalehan sosial masyarakat relatif stabil namun masih memerlukan penguatan program pembinaan sosial dan keagamaan agar capaian dapat meningkat kembali.
	Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial Serta Ketentraman dan Ketertiban Umum	28	Persentase Penanganan Konflik Sosial	100,00	100,00	100,00	82	100	121,95	-21,95	Terjadi **penurunan** dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah dalam menangani konflik sosial belum begitu efektif dan responsif sehingga stabilitas sosial masyarakat

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja		TAHUN 2025			TAHUN 2024			Kenaikan /Penurunan	Analisa Tren
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											belum terjaga dengan baik.
14	Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial Serta Ketentraman dan Ketertiban Umum	29	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	98,5	75,00	76,14	85	98,15	115,47	-39,33	Terjadi **peningkatan capaian yang sangat signifikan** dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum semakin optimal melalui peningkatan pengawasan dan penegakan peraturan daerah.
	Meningkatnya Pelestarian Warisan Kebudayaan Lokal	30	Persentase Warisan Seni Budaya dan Tradisi Lokal Yang Dilestarikan	32.43	1,57	115,49	29,73	30,07	101,14	14,34	Terjadi **peningkatan capaian kinerja** dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pelestarian seni budaya dan tradisi lokal sukses sehingga diperlukan peningkatan program pelestarian budaya serta partisipasi masyarakat.
15	Meningkatnya Ketangguhan Dalam Penanggulangan Bencana	31	Indeks Risiko Bencana	86,00	95,58	88,86	109,04	86,23	126,45	-37,59	Terjadi **penurunan capaian kinerja** dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketangguhan

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja		TAHUN 2025			TAHUN 2024			Kenaikan /Penurunan	Analisa Tren
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											daerah dalam menghadapi risiko bencana masih perlu ditingkatkan melalui penguatan mitigasi bencana, kesiapsiagaan masyarakat, serta peningkatan kapasitas penanggulangan bencana.

Keterangan: * Realisasi menggunakan realisasi Tahun 2024

** Menggunakan penilaian mandiri Tahun 2025

Tabel 2.9
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Tahun 2024 Dengan Tahun 2025
Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2024			Kenaikan /Penurunan	Analisa Tren
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Indeks Kesalehan Sosial (Indeks)	91,448	91,452	100,004	89,803	91,006	101,34	-1,34	Terjadi sedikit penurunan capaian dibandingkan tahun sebelumnya, namun nilai indeks masih relatif stabil sehingga menunjukkan kondisi kesalehan sosial masyarakat tetap terjaga meskipun memerlukan penguatan program pembinaan sosial dan keagamaan.
1	Meningkatnya kerukunan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama (Indeks)	79,29	82,34	103,847	0	79,24	0	103,85	Indikator ini tidak diukur pada tahun sebelumnya sehingga belum dapat dilakukan analisis tren secara komparatif, namun capaian tahun berjalan menunjukkan kinerja yang baik dalam menjaga kerukunan umat beragama.
		Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (Indeks)	65,73	66	100,411	0	62,41	0	100,41	Tidak terdapat data pembanding tahun sebelumnya sehingga analisa tren belum dapat dilakukan, namun capaian kinerja tahun berjalan menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
2	Meningkatnya kemajuan kebudayaan daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan (Indeks)	60,7	60,85	100,247	0	60,55	0	100,25	Karena indikator belum diukur pada tahun sebelumnya, analisa tren belum dapat dilakukan. Namun capaian kinerja tahun berjalan menunjukkan adanya upaya peningkatan pembangunan kebudayaan daerah.

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2024			Kenaikan /Penurunan	Analisa Tren
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	84,35	84,05	99,644	63,79	84,05	131,76	-32,12	Terjadi penurunan capaian dibandingkan tahun sebelumnya yang menunjukkan bahwa implementasi reformasi birokrasi masih menghadapi tantangan sehingga perlu penguatan pada aspek tata kelola, akuntabilitas dan pelayanan publik.
3	Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Nilai Sistem Merit (Nilai)	280	260	92,857	270	260	96,30	-3,44	Terjadi penurunan capaian dibandingkan tahun sebelumnya yang menunjukkan implementasi manajemen ASN berbasis merit system perlu lebih diperkuat, khususnya pada aspek manajemen talenta dan pengembangan kompetensi ASN.
4	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Nilai)	3,327	3,1017	93,228	0	3,224	0	93,23	Tidak terdapat data pembanding pada tahun sebelumnya sehingga tren belum dapat dianalisis, namun capaian kinerja menunjukkan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan cukup baik.
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai)	72	70,19	97,486	69,25	70,07	101,18	-3,70	Terjadi sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yang menunjukkan perlunya penguatan implementasi manajemen kinerja dan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja.
5	Meningkatnya pemerintahan berintegritas dan pengawasan berkualitas	Indeks Integritas Pemerintah Daerah (Indeks)	69	72,76	105,449	0	68,56	0	105,45	Tidak terdapat data pembanding tahun sebelumnya sehingga analisis tren belum dapat dilakukan, namun capaian tahun berjalan menunjukkan

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2024			Kenaikan /Penurunan	Analisa Tren
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										peningkatan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai)	3,200	3,987	124,594	3,15	3,862	122,60	1,99	Terjadi peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang menunjukkan semakin baiknya sistem pengendalian intern pemerintah dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja.
6	Meningkatnya tata kelola keuangan dan kapasitas fiskal daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Indeks)	70,812	61,327	86,605	0	70,729	0	86,61	Tidak terdapat data pembanding tahun sebelumnya sehingga tren belum dapat dianalisis, namun capaian menunjukkan pengelolaan keuangan daerah masih perlu diperkuat.
		Rasio kapasitas fiskal daerah (Rasio)	1,124	0,095	8,452	0	1,095	0	8,45	Indikator belum diukur pada tahun sebelumnya sehingga analisis tren belum dapat dilakukan.
7	Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	4,58	4,61	100,655	3,60	4,57	126,94	-26,29	Terjadi penurunan capaian dibandingkan tahun sebelumnya, yang menunjukkan kualitas pelayanan publik masih perlu ditingkatkan melalui inovasi pelayanan dan perbaikan standar pelayanan.
		Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik (Indeks)	87,6	89,34	101,986	85,30	87,29	102,33	-0,35	Terjadi sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya namun secara umum tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik masih relatif baik.
8	Meningkatnya transformasi digital pemerintah daerah	Indeks Pemerintahan Digital (Indeks)	1,5	1,5	100,000	2,50	3,84	153,60	-53,60	Terjadi penurunan capaian yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan bahwa implementasi transformasi

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2024			Kenaikan /Penurunan	Analisa Tren
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										digital pemerintahan masih perlu diperkuat.
		Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (Indeks)	80	74,05	92,563	0	79	0	92,56	Tidak terdapat data pembanding tahun sebelumnya sehingga tren belum dapat dianalisis.
9	Meningkatnya infrastruktur konektivitas wilayah yang handal	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)	70,05	73,51	104,939	72,39	68,214	94,23	10,71	Terjadi peningkatan capaian dibandingkan tahun sebelumnya yang menunjukkan perbaikan kualitas infrastruktur jalan daerah.
		Rasio Konektivitas (Rasio)	0,21	0,2	95,238	0	0,2	0	95,24	Tidak terdapat data pembanding tahun sebelumnya sehingga tren belum dapat dianalisis.
10	Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	74,5	74,5	100,000	96,94	96,97	100,03	-0,03	Capaian relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya yang menunjukkan akses masyarakat terhadap hunian layak tetap terjaga.
11	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks)	72,61	72,54	99,904	67,38	69,07	102,51	-2,60	Terjadi sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang menunjukkan kualitas lingkungan hidup perlu terus dijaga melalui kebijakan pengelolaan lingkungan yang lebih efektif.
12	Meningkatkan ketangguhan dalam penanggulangan bencana	Indeks Risiko Bencana (Indeks)	105,02	95,58	109,877	109,04	86,23	126,45	-16,57	Terjadi penurunan capaian dibandingkan tahun sebelumnya sehingga diperlukan penguatan kapasitas mitigasi dan kesiapsiagaan bencana.
		Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	75,92	75,89	99,960	73,49	75,24	102,38	-2,42	Terjadi sedikit penurunan capaian dibandingkan tahun sebelumnya, namun secara umum kondisi pembangunan manusia masih

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2024			Kenaikan /Penurunan	Analisa Tren
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										berada pada tren yang relatif stabil.
13	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	8,4	8,26	98,333	8,36	8,25	98,68	-0,35	Terjadi penurunan sangat kecil dibandingkan tahun sebelumnya yang menunjukkan capaian pendidikan relatif stagnan.
		Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,19	13,19	100,000	13,27	13,18	99,32	0,68	Terjadi sedikit peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang menunjukkan harapan masyarakat terhadap akses pendidikan semakin baik.
14	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))	74,76	74,96	100,268	72,34	74,64	103,18	-2,91	Terjadi sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya namun secara umum kondisi kesehatan masyarakat masih stabil.
15	Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)	0,354	0,35	101,143	0	0,351	#DIV/0!	#DIV/0!	Indikator belum diukur pada tahun sebelumnya sehingga tren belum dapat dianalisis.
16	Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA) (Indeks)	65,95	65,94	99,985	0	65,94	#DIV/0!	#DIV/0!	Indikator belum diukur pada tahun sebelumnya sehingga tren belum dapat dianalisis.
17	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	Persentase peningkatan prestasi pemuda dan olahraga (%)	1,05	1,41	134,286	56,65	50,6	89,32	44,97	Indikator belum diukur pada tahun sebelumnya sehingga tren belum dapat dianalisis.
18	Meningkatnya literasi masyarakat	Indeks pembangunan literasi masyarakat (Indeks)	60,11	23,4	38,93	62,45	42,08	67,38	-28,45	Indikator belum diukur pada tahun sebelumnya sehingga tren belum dapat dianalisis.
		Tingkat Kemiskinan ((%))	10,16	10,06	100,98	10,5	10,17	103,24	-2,26	Terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang menunjukkan kondisi kemiskinan daerah semakin membaik.

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2024			Kenaikan /Penurunan	Analisa Tren
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Rasio Gini (Indeks)	0,288	0,300	96,000	≤ 0.30	0,289	103,80	-7,80	Terjadi penurunan capaian dibandingkan tahun sebelumnya yang menunjukkan ketimpangan pendapatan masyarakat sedikit meningkat.
19	Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif	Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks)	62,67	59,29	94,607	0	62,61	0	94,61	Indikator belum diukur pada tahun sebelumnya sehingga tren belum dapat dianalisis.
20	Meningkatnya kemandirian desa	Indeks Desa (Indeks)	0,781	0,7928	101,511	0,7795	0,78191	100,31	1,20	Terjadi peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang menunjukkan kemandirian desa semakin baik.
		Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,98	5,30	106,426	4,92	4,93	100,20	6,22	Terjadi peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang menunjukkan aktivitas ekonomi daerah mengalami perbaikan.
21	Meningkatnya nilai tambah pertanian	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	1,98	2,81	141,919	-	1,57	-	-	Tidak terdapat data pembanding tahun sebelumnya sehingga tren belum dapat dianalisis.
22	Meningkatnya nilai tambah perindustrian dan perdagangan	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	16,27	16,05	98,65	11,8	15,92	134,92	-36,27	Terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang menunjukkan kontribusi sektor industri mengalami perlambatan.
		Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (%)	20,54	20,69	100,73	5,4	4,9	90,74	9,99	Terjadi peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang menunjukkan aktivitas perdagangan semakin berkembang.
23	Meningkatnya investasi daerah	Nilai Investasi (Rp)	1.102.000.000.000	1.105.654.165.215	100,332	1.050.000.000.000	1.359.191.202.844	129,45	-29,12	Terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang menunjukkan realisasi investasi daerah masih perlu ditingkatkan.

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2024			Kenaikan /Penurunan	Analisa Tren
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Meningkatknya daya saing koperasi dan usaha mikro	Persentase peningkatan volume usaha mikro (%)	3	3,14	104,667	15	12,99	86,60	18,07	Terjadi peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang menunjukkan perkembangan usaha mikro semakin baik.
		Persentase peningkatan koperasi berkualitas (%)	74	74,5	100,676	0	73	0	100,68	Indikator belum diukur pada tahun sebelumnya sehingga tren belum dapat dianalisis.
25	Menurunnya pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,77	3,84	98,18	4,6	3,87	84,13	14,05	Terjadi peningkatan capaian dibandingkan tahun sebelumnya yang menunjukkan kondisi ketenagakerjaan daerah membaik.
26	Meningkatnya ketahanan pangan daerah.	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)	73,66	73,65	99,986	83,42	71,42	85,61	14,37	Terjadi peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang menunjukkan ketahanan pangan daerah semakin baik.
27	Meningkatnya nilai tambah sektor pariwisata	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,08	2,05	98,56	2,07	2,05	99,03	-0,47	Terjadi sedikit peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang menunjukkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif mulai berkembang.

2.3.4 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Pembangunan Jangka Menengah

Pengukuran capaian kinerja dalam konteks pembangunan jangka menengah adalah proses sistematis untuk menilai sejauh mana hasil kerja nyata (realisasi) memenuhi sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan lima tahunan, seperti RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) atau Renstra (Rencana Strategis). Perbandingan ini bukan hanya soal angka, melainkan tentang efektivitas pembangunan. Tanpa membandingkan realisasi dengan target jangka menengah, pemerintah daerah tidak dapat mengetahui apakah perubahan yang terjadi adalah hasil dari kebijakan yang direncanakan. Dalam masing-masing ketercapaian kinerja, terdapat dua status yang diberikan yaitu *on track* dan perlu percepatan dengan penjelasan sebagaimana berikut :

1) Status *On Track*

Status *On Track* menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja pada tahun berjalan telah sesuai, mendekati, atau melampaui jalur pencapaian target RPJMD/RPD yang direncanakan. Dengan kata lain, kinerja perangkat daerah berada pada jalur yang benar (in the right trajectory) untuk mencapai target akhir periode perencanaan. Karakteristik kondisi *On Track* sebagaimana berikut :

- Capaian indikator sama dengan atau lebih tinggi dari target tahunan.
- Persentase capaian terhadap target mencapai atau melebihi 100%, atau masih dalam rentang yang dianggap aman menuju target RPJMD.
- Program dan kegiatan yang dilaksanakan memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian indikator.
- Tidak terdapat hambatan signifikan yang berpotensi mengganggu pencapaian target jangka menengah.

Makna dalam evaluasi kinerja Status ini menunjukkan bahwa:

- Implementasi kebijakan dan program pembangunan telah berjalan efektif.
- Strategi yang diterapkan relatif tepat dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan.
- Pemerintah daerah perlu menjaga konsistensi pelaksanaan program, mempertahankan kinerja, dan melakukan peningkatan kualitas agar target RPJMD tetap tercapai sampai akhir periode.

2) Status Perlu Percepatan

Status Perlu Percepatan menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja masih berada di bawah *trajectory* atau jalur yang seharusnya untuk mencapai target RPJMD/RPD pada

akhir periode perencanaan. Dengan kata lain, jika tidak dilakukan upaya percepatan atau intervensi kebijakan, maka indikator tersebut berpotensi tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Karakteristik kondisi Perlu Percepatan sebagaimana berikut :

- Capaian indikator belum mencapai target tahunan.
- Persentase capaian terhadap target masih di bawah 100% atau berada di bawah jalur pencapaian RPJMD.
- Terdapat kendala internal maupun eksternal dalam pelaksanaan program.
- Program/kegiatan yang ada belum memberikan dampak optimal terhadap indikator kinerja.

Makna dalam evaluasi kinerja. Status ini menunjukkan bahwa:

- Diperlukan penguatan strategi dan intervensi kebijakan.
- Perlu dilakukan optimalisasi program, peningkatan koordinasi, serta pengalokasian sumber daya yang lebih efektif.
- Pemerintah daerah harus melakukan evaluasi terhadap faktor penyebab rendahnya capaian dan menyiapkan langkah percepatan pada tahun berikutnya.

3) Fungsi Penetapan Status dalam LKjIP

Penetapan status *On Track* dan Perlu Percepatan dalam LKjIP memiliki beberapa tujuan, yaitu:

- Menilai posisi capaian indikator terhadap target RPJMD.
- Mengidentifikasi indikator yang memerlukan perhatian khusus.
- Menjadi dasar perumusan langkah perbaikan kinerja.
- Mendukung proses evaluasi SAKIP dan perbaikan tata kelola kinerja pemerintah daerah.

Tabel 2.10
Capaian Kinerja Tahun 2025 Dibandingkan Dengan Target Akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja		Tahun 2025			Target Akhir RPD 2024-2026	Perbandingan Realisasi 2025 Terhadap Target Akhir RPD	Status (On Track/Perlu Percepatan)
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)			
1	2	3		4	5	6	7	8	9
I.	Tujuan :	1	Pertumbuhan ekonomi daerah	4,98	5,30	106,43	5,02	105,58	On Track
	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah Yang Inklusif Dan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemerataan Pembangunan Yang Berwawasan Lingkungan Hidup	2	*Indeks Gini*	≤ 0,30	0,30	100,00	≤ 0,30	100,00	On Track
		3	Tingkat Kemiskinan Daerah	10,15	10,06	100,89	10,15	101,01	On Track
		4	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,85	3,84	99,74	4,50%	100,01	On Track
		5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,17	72,54	104,87	67,44	107,56	On Track
1	Meningkatnya Produktifitas Ekonomi Lokal	6	Pertumbuhan PDRB ADHK Lapangan Usaha Industri Pengolahan	11,90	6,71	56,39	12	55,92	Perlu Percepatan
		7	Pertumbuhan PDRB ADHK Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran serta reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,50	6,10	110,91	5,6	108,93	On Track
		8	Nilai Investasi Daerah	1.365.000.000.000	1.105.654.165.215	81,00	1.774.500.000.000	62,31	Perlu Percepatan
2	Meningkatnya Kesejahteraan Petani Dan Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi Pangan	9	NTP	111,60	111.51*	99,92	103,5	107,74	On Track
		10	Skop Pola Pangan Harapan	92,00	95,40	103,70	90	106,00	On Track

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja		Tahun 2025			Target Akhir RPD 2024-2026	Perbandingan Realisasi 2025 Terhadap Target Akhir RPD	Status (On Track/Perlu Percepatan)
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)			
1	2	3		4	5	6	7	8	9
3	Meningkatnya Daya Saing Produk Unggulan Daerah	11	Rata-rata lama tinggal wisatawan	0,29	0,23	79,31	0,33	69,70	Perlu Percepatan
		12	Pertumbuhan Koperasi Sehat	1,20	1.15*	95,83	1,25	92,00	Perlu Percepatan
		13	Rata-rata peningkatan volume usaha mikro	20,00	3,14	15,70	25	12,56	Perlu Percepatan
4	Mengurangi Penduduk Miskin Melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	14	Angka Kemiskinan Ekstrim	0,30	0,45 %*	50,00	0,1	22,22	Perlu Percepatan
		15	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,7869	0.78191*	99,37	0,7969	97,69	On Track
5	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	69,90	73,19	104,71	68,5	106,85	On Track
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	17	Indeks Kualitas Air	59,56	77,51	130,14	59,58	130,09	On Track
		18	Indeks Kualitas Udara	88,50	71,88	81,22	80,87	88,88	Perlu Percepatan
		19	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	56,00	65,23	116,48	56,10	116,27	On Track
7	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Akses Hunian Layak Serta Keselamatan Transportasi	20	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	86	76,49	88,94	87	87,92	Perlu Percepatan
		21	Persentase Rumah Layak Huni	97,44	97,16	99,71	97,94	99,20	On Track
		22	Rasio Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan	22,00	32,27	53,32	21,5	150,09	On Track
II	Tujuan : Meningkatnya Kualitas	23	Indeks Pembangunan Manusia	75,30	75,89	100,78	74,25	102,21	On Track

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja		Tahun 2025			Target Akhir RPD 2024-2026	Perbandingan Realisasi 2025 Terhadap Target Akhir RPD	Status (On Track/Perlu Percepatan)
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)			
1	2	3		4	5	6	7	8	9
	Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing								
8	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	24	Indeks Kesehatan	0,85	0.8*	94,12	0,8	100,00	On Track
9	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Prestasi Kepemudaan	25	Indeks Pendidikan	0,65	0.64*	98,46	0,66	96,97	On Track
		26	Jumlah Pemuda Berprestasi	74 orang	141,00	190,54	74	190,54	On Track
10	Meningkatnya Keadilan dan Kesetaraan Gender	27	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,80	91,32*	96,32	94,11	97,04	On Track
III	Tujuan : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik	28	Indeks Reformasi Birokrasi	84,10	84.05*	99,94	71,01	118,36	On Track
11	Meningkatnya Birokrasi Yang Akuntabel dan Efektif Serta Pelayanan Publik Yang Prima	29	Nilai SAKIP	72,00	70,19	97,49	74,9	93,71	On Track
		30	Opini BPK Terhadap LKPD	WTP	WTP	100,00	WTP	100,00	On Track
		31	Nilai Maturitas SPIP	3,89	3.987**	102,49%	3,25	122,68	On Track
		32	Indeks Pelayanan Publik	4,60	4,61	100,22	3,70	124,59	On Track
12	Meningkatnya Transformasi	33	Indeks SPBE	3,85	3,84	99,74	3,00	128,00	On Track

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja		Tahun 2025			Target Akhir RPD 2024-2026	Perbandingan Realisasi 2025 Terhadap Target Akhir RPD	Status (On Track/Perlu Percepatan)
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)			
1	2	3		4	5	6	7	8	9
	Digital Pemerintahan Daerah								
13	Meningkatnya Profesionalitas ASN	34	Indeks Profesionalitas ASN	79,20	80.34*	101,44	71	113,15	On Track
IV.	Tujuan : Meningkatnya Kondisi Sosial Masyarakat Yang Harmonis Dan Berbudaya	35	Indeks Kesalehan Sosial.	91,10	91,45	100,38	89,871	101,76	On Track
14	Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial Serta Ketentraman dan Ketertiban Umum	37	Persentase Penanganan Konflik Sosial	100,00	100,00	100,00	84	119,05	On Track
		38	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	98,5	75,00	76,14213198	100	75,00	Perlu Percepatan
15	Meningkatnya Pelestarian Warisan Kebudayaan Lokal	39	Persentase Warisan Seni Budaya dan Tradisi Lokal Yang Dilestarikan	32.43	1,57	115,4865003	35,14	4,48	Perlu Percepatan
16	Meningkatnya Ketangguhan Dalam Penanggulangan Bencana	40	Indeks Risiko Bencana	86,00	95,58	88,86	99,5	96,06	On Track

Catatan : Realisasi kinerja per tanggal 25 Maret 2026

Tabel 2.11
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025
Dibandingkan Dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2025-2029

No	Sasaran	Indikator	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	Progres Terhadap Target RPJMD	Status (On Track/Perlu Percepatan)
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Indeks Kesalehan Sosial (Indeks)	91,448	91,452	100,004	94,86	96,40	On Track
1	Meningkatnya kerukunan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama (Indeks)	79,29	82,34	103,847	79,55	103,51	On Track
		Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (Indeks)	65,73	66	100,411	*79,98*	82,52	Perlu Percepatan
2	Meningkatnya kemajuan kebudayaan daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan (Indeks)	60,7	60,85	100,247	61,70	98,62	On Track
		Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	84,35	84,05	99,644	85,85	97,90	On Track
3	Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Nilai Sistem Merit (Nilai)	280	260	92,857	325,00	80,00	Perlu Percepatan
4	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Nilai)	3,327	3,1017	93,228	3,70	83,83	Perlu Percepatan
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai)	72	70,19	97,486	80,01	87,73	Perlu Percepatan
5	Meningkatnya pemerintahan berintegritas dan pengawasan berkualitas	Indeks Integritas Pemerintah Daerah (Indeks)	69	72,76	105,449	78,00	93,28	On Track
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern	3,200	3,987	124,594	3,27	121,93	On Track

No	Sasaran	Indikator	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	Progres Terhadap Target RPJMD	Status (On Track/Perlu Percepatan)
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pemerintah (SPIP) (Nilai)						
6	Meningkatnya tata kelola keuangan dan kapasitas fiskal daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Indeks)	70,812	61,327	86,605	71,39	85,91	Perlu Percepatan
		Rasio kapasitas fiskal daerah (Rasio)	1,124	0,095	8,452	1,19	7,99	Perlu Percepatan
7	Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	4,58	4,61	100,655	4,66	98,93	On Track
		Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik (Indeks)	87,6	89,34	101,986	89,50	99,82	On Track
8	Meningkatnya transformasi digital pemerintah daerah	Indeks Pemerintahan Digital (Indeks)	1,5	1,5	100,000	2,25	66,67	Perlu Percepatan
		Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (Indeks)	80	74,05	92,563	85,00	87,12	Perlu Percepatan
9	Meningkatnya infrastruktur konektivitas wilayah yang handal	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)	70,05	73,51	104,939	80,22	91,64	On Track
		Rasio Konektivitas (Rasio)	0,21	0,2	95,238	0,22	90,91	On Track
10	Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	74,5	74,5	100,000	74,55	99,93	On Track
11	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks)	72,61	72,54	99,904	73,00	99,37	On Track
12	Meningkatkan ketangguhan dalam penanggulangan bencana	Indeks Risiko Bencana (Indeks)	105,02	95,58	109,877	99,06	96,49	On Track

No	Sasaran	Indikator	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	Progres Terhadap Target RPJMD	Status (On Track/Perlu Percepatan)
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	75,92	75,89	99,960	78,81	96,29	On Track
13	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	8,4	8,26	98,333	9,17	90,08	On Track
		Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,19	13,19	100,000	13,47	97,92	On Track
14	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))	74,76	74,96	100,268	76,04	98,58	On Track
15	Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)	0,354	0,35	101,143	0,33	107,69	On Track
16	Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA) (Indeks)	65,95	65,94	99,985	66,00	99,91	On Track
17	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	Persentase peningkatan prestasi pemuda dan olahraga (%)	1,05	1,41	134,286	1,26	111,90	On Track
18	Meningkatnya literasi masyarakat	Indeks pembangunan literasi masyarakat (Indeks)	60,11	23,4	38,929	60,40	38,74	Perlu Percepatan
		Tingkat Kemiskinan ((%))	10,16	10,06	100,98	8,83	113,93	On Track
		Rasio Gini (Indeks)	0,288	0,300	96,000	0,28	106,01	On Track
19	Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif	Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks)	62,67	59,29	94,607	62,97	94,16	On Track
20	Meningkatnya kemandirian desa	Indeks Desa (Indeks)	0,781	0,7928	101,511	0,78	101,38	On Track
		Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,98	5,30	106,426	6,09	87,03	Perlu Percepatan
21	Meningkatnya nilai tambah pertanian	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	1,98	2,81	141,919	2,36	119,07	On Track

No	Sasaran	Indikator	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	Progres Terhadap Target RPJMD	Status (On Track/Perlu Percepatan)
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Meningkatnya nilai tambah perindustrian dan perdagangan	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	16,27	16,05	98,65	17,71	90,63	On Track
		Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (%)	20,54	20,69	100,73	20,64	100,24	On Track
23	Meningkatnya investasi daerah	Nilai Investasi (Rp)	1.102.000.000.000	1.105.654.165.215	100,332	1.314.550.581.000	84,11	Perlu Percepatan
24	Meningkatknya daya saing koperasi dan usaha mikro	Persentase peningkatan volume usaha mikro (%)	3	3,14	104,667	8,00	39,25	Perlu Percepatan
		Persentase peningkatan koperasi berkualitas (%)	74	74,5	100,676	79,60	93,59	On Track
25	Menurunnya pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,77	3,84	98,18	2,90	132,41	On Track
26	Meningkatnya ketahanan pangan daerah.	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)	73,66	73,65	99,986	78,57	93,74	On Track
27	Meningkatnya nilai tambah sektor pariwisata	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,08	2,05	98,56	2,28	89,91	On Track

Catatan : Capaian kinerja per tanggal 16 Maret 2026

2.3.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai

Efisiensi adalah tingkat kemampuan organisasi dalam mencapai target kinerja dengan penggunaan sumber daya yang seminimal mungkin namun tetap menghasilkan output atau outcome yang optimal. Efisiensi biasanya dianalisis melalui perbandingan antara capaian kinerja (realisasi indikator kinerja) dengan realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai kinerja tersebut. Artinya bahwa jika capaian kinerja tinggi tetapi penggunaan anggaran relatif kecil, maka organisasi dianggap efisien. Namun apabila anggaran besar tetapi capaian rendah, maka kinerja dianggap tidak efisien. Adapun rumus penggunaan sumber daya dapat dijelaskaan sebagaimana berikut :

Rumus Efisiensi

$$Efisiensi = PersentaseCapaianKinerja - PersentaseRealisasiAnggaran$$

Tabel 2.12
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025 Dibandingkan Pencapaian Kinerja Sasaran RPD Tahun 2024-2026

No	Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran Strategis Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Tahun 2025			Penyerapan Anggaran 2025 (%)	Efisiensi (%)
					Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**NGANJUK TUMBUH**								
	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemerataan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Hidup		Pertumbuhan Ekonomi Daerah	%	4,98	5,30	106,43		
			Indeks Gini	Indeks	≤ 0,30	0,30	100,00		
			Tingkat Kemiskinan Daerah	%	10,15	10,06	100,89		

No	Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran Strategis Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Tahun 2025			Penyerapan Anggaran 2025 (%)	Efisiensi (%)
					Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,85	3,84	99,74		
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	69,17	72,54	104,87		
		Meningkatkan Produktifitas Ekonomi Lokal	Pertumbuhan PDRB ADHK Lapangan Usaha Industri Pengolahan	%	11,90	6,71	56,39	87,68	-31,29
			Pertumbuhan PDRB ADHK Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	5,50	6,10	110,91	87,68	23,23
			Nilai Investasi Daerah	Rp	1.365.000.000.000	1.105.654.165.215	81,00	91,65	-10,65
		Meningkatkan Kesejahteraan Petani dan Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi Pangan	Nilai Tukar Petani (NTP)	Nilai	111,60	111.51*	99,92	60,17	39,75
			Skor Pola Pangan Harapan	Skor	92,00	95,40	103,70	89,00	14,70

No	Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran Strategis Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Tahun 2025			Penyerapan Anggaran 2025 (%)	Efisiensi (%)
					Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatkan Daya Saing Produk Unggulan Daerah	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan	Hari	0,29	0,23	79,31	63,45	15,86
			Pertumbuhan Koperasi Sehat	%	1,20	1.15*	95,83	96,90	-1,07
			Rata-rata Peningkatan Volume Usaha Mikro	%	20,00	3,14	15,70	89,50	-73,80
		Mengurangi Penduduk Miskin Melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Angka Kemiskinan Ekstrim	%	0,30	0,45 %*	50,00	67,25	-17,25
			Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0,79	0.78191*	99,37	67,20	32,17
		Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	69,90	73,19	104,71	91,94	12,77
		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Indeks	59,56	77,51	130,14	93,00	37,14
			Indeks Kualitas Udara	Indeks	88,50	71,88	81,22	93,00	-11,78

No	Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran Strategis Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Tahun 2025			Penyerapan Anggaran 2025 (%)	Efisiensi (%)
					Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	56,00	65,23	116,48	93,00	23,48
		Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Akses Hunian Layak, serta Keselamatan Transportasi	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks	86	76,49	88,94	87,85	1,09
			Persentase Rumah Layak Huni	%	97,44	97,16	99,71	87,28	12,43
			Rasio Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan	Nilai	22,00	32,27	53,32	93,04	-39,72
2	**NGANJUK SEHAT DAN CERDAS**								
	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing		Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	75,30	75,89	100,78		
		Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Indeks	0,85	0.8*	94,12	80,28	13,84

No	Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran Strategis Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Tahun 2025			Penyerapan Anggaran 2025 (%)	Efisiensi (%)
					Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Prestasi Kepemudaan	Indeks Pendidikan	Indeks	0,65	0.64*	98,46	97,18	1,28
			Jumlah Pemuda Berprestasi	Orang	74 orang	141,00	190,54	59,09	131,45
		Meningkatkan Keadilan dan Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94,80	91,32*	96,32	95,64	0,68
3	**NGANJUK AKUNTABEL**								
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	84,10	84.05*	99,94	74,08	25,86
		Meningkatkan Birokrasi yang Akuntabel dan Efektif, Serta Pelayanan Publik yang Prima	Nilai SAKIP	Nilai	72,00	70,19	97,49	74,08	23,41
			Opini BPK Terhadap LKPD	Opini	WTP	WTP	100,00	96,76	3,24
			Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3,89	3.987**	102,49	42,19	60,30

No	Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran Strategis Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Tahun 2025			Penyerapan Anggaran 2025 (%)	Efisiensi (%)
					Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,60	4,61	100,22	74,08	26,14
		Meningkatkan Transformasi Digital Pemerintahan Daerah	Indeks SPBE	Indeks	3,85	3,84	99,74	91,54	8,20
		Meningkatkan Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	79,20	80.34*	101,44	85,20	16,24
4	**NGANJUK HARMONIS**								
	Meningkatnya Kondisi Sosial Masyarakat yang Harmonis dan Berbudaya		Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	91,10	91,45	100,38		
		Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial, Serta Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Konflik Sosial	%	100,00	100,00	100,00	94,43	5,57
			Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	%	98,5	75,00	76,14	86,00	-9,86

No	Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran Strategis Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Tahun 2025			Penyerapan Anggaran 2025 (%)	Efisiensi (%)
					Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatkan Pelestarian Warisan Kebudayaan Lokal	Persentase Warisan Seni Budaya dan Tradisi Lokal yang Dilestarikan	%	32.43	37.47	115.54	59.09	56.45
		Meningkatkan Ketangguhan Dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Risiko Bencana	Indeks	86,00	95,58	88,86	87,32	1,54

Tabel 2.13
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025 Dibandingkan Pencapaian Kinerja Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Tujuan	No	Sasaran	Indikator	Tahun 2025			Penyerapan Anggaran 2025	Efisiensi
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis dan toleran			Indeks Kesalehan Sosial (Indeks)	91.448	91.452	100.00		
	1	Meningkatnya kerukunan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama (Indeks)	79.29	82.34	103.85	94.43	9.42
			Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (Indeks)	65.73	66.00	100.41	86.00	14.41
	2	Meningkatnya kemajuan kebudayaan daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan (Indeks)	60.70	60.85	100.25	95.79	4.46
Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik			Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	84.35	84.05	99.64		
	3	Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Nilai Sistem Merit (Nilai)	280	260.00	92.86	85.20	7.66
	4	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Nilai)	3.33	3.10	93.23	94.62	-1.39
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai)	72	70.19	97.49	83.95	13.54
	5	Meningkatnya pemerintahan berintegritas dan pengawasan berkualitas	Indeks Integritas Pemerintah Daerah (Indeks)	69	72.76	105.45	97.66	7.79

Tujuan	No	Sasaran	Indikator	Tahun 2025			Penyerapan Anggaran 2025	Efisiensi
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai)	3.20	3.99	124.59	83.06	41.53
	6	Meningkatnya tata kelola keuangan dan kapasitas fiskal daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Indeks)	70.81	61.33	86.61	96.76	-10.15
			Rasio kapasitas fiskal daerah (Rasio)	1.124	0.095	8.45	96.76	-88.31
	7	Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	4.58	4.61	100.66	95.08	5.58
			Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik (Indeks)	87.60	89.34	101.99	95.08	6.91
	8	Meningkatnya transformasi digital pemerintah daerah	Indeks Pemerintahan Digital (Indeks)	1.50	1.50	100.00	91.70	8.30
Meningkatkan infrastruktur publik yang handal dan berkelanjutan			Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (Indeks)	80	74.05	92.56		
	9	Meningkatnya infrastruktur konektivitas wilayah yang handal	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)	70.05	73.51	104.94	87.95	16.99
			Rasio Konektivitas (Rasio)	0.21	0.20	95.24	87.95	7.29
	10	Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	74.50	74.50	100.00	94.17	5.83
	11	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks)	72.61	72.54	99.90	93.00	6.90
	12	Meningkatkan ketangguhan dalam penanggulangan bencana	Indeks Risiko Bencana (Indeks)	105.02	95.58	109.88	87,32	22.56

Tujuan	No	Sasaran	Indikator	Tahun 2025			Penyerapan Anggaran 2025	Efisiensi
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas			Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	75.92	75.89	99.96		
	13	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	8.40	8.26	98.33	97.18	1.15
			Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13.19	13.19	100.00	97.18	2.82
	14	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))	74.76	74.96	100.27	79.53	20.74
	15	Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)	0.35	0.35	101.14	80.82	20.32
	16	Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA) (Indeks)	65.95	65.94	99.98	97.30	2.68
	17	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	Persentase peningkatan prestasi pemuda dan olahraga (%)	1.05	1.41	134.29	59.09	75.20
	18	Meningkatnya literasi masyarakat	Indeks pembangunan literasi masyarakat (Indeks)	60.11	23.40	38.93	94.05	-55.12
Meningkatnya pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan			Tingkat Kemiskinan ((%))	10.16	10.06	100.98		
			Rasio Gini (Indeks)	0.29	0.30	96.00		
	19	Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif	Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks)	62.67	59.29	94.61	85.61	9.00
	20	Meningkatnya kemandirian desa	Indeks Desa (Indeks)	0.7810	0.7928	101.51	93.48	8.03

Tujuan	No	Sasaran	Indikator	Tahun 2025			Penyerapan Anggaran 2025	Efisiensi
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif.			Pertumbuhan Ekonomi (%)	4.98	5.30	106.43		106.43
	21	Meningkatnya nilai tambah pertanian	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	1.98	2.81	141.92	91.43	50.49
	22	Meningkatnya nilai tambah perindustrian dan perdagangan	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	16.27	16.05	98.65	93.58	5.07
			Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (%)	20.54	20.69	100.73	93.58	7.15
	23	Meningkatnya investasi daerah	Nilai Investasi (Rp)	1,102,000,000,000	1,105,654,165,215	100.33	91.65	8.68
	24	Meningkatknya daya saing koperasi dan usaha mikro	Persentase peningkatan volume usaha mikro (%)	3	3.14	104.67	89.50	15.17
			Persentase peningkatan koperasi berkualitas (%)	74	74.50	100.68	88.80	11.88
	25	Menurunnya pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3.77	3.84	98.18	91.94	6.24
	26	Meningkatnya ketahanan pangan daerah.	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)	73.66	73.65	99.99	89.00	10.99
	27	Meningkatnya nilai tambah sektor pariwisata	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2.08	2.05	98.56	59.09	39.47

2.3.6 Analisis Program dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Analisis program dan kegiatan adalah "jembatan logis" yang menghubungkan antara uang yang dibelanjakan (anggaran) dengan hasil yang dirasakan masyarakat (kinerja). Berikut adalah tujuan utama dari dilakukannya analisis tersebut:

1) Membuktikan Keselarasan (Alignment)

   Tujuan utamanya adalah memastikan adanya benang merah antara perencanaan dan pelaksanaan. Analisis ini menjawab apakah program yang dijalankan memang benar-benar dirancang untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU). Tanpa analisis ini, instansi berisiko "sibuk bekerja" tapi tidak mencapai target strategis.

2) Menilai Efektivitas dan Efisiensi

   Analisis ini bertujuan untuk melihat dua hal penting yakni :

   - Efektivitas: Apakah kegiatan tersebut berhasil memberikan dampak (output/outcome) yang diinginkan?
   - Efisiensi: Apakah capaian kinerja tersebut sebanding dengan biaya yang dikeluarkan? (Mencegah pemborosan anggaran pada kegiatan yang tidak berdampak).

3) Media Pertanggungjawaban (Akuntabilitas)

   Sebagai laporan kepada publik dan atasan, analisis ini berfungsi untuk menunjukkan transparansi. Instansi harus bisa menjelaskan secara naratif mengapa sebuah program dipilih dan bagaimana program tersebut membantu mencapai target yang telah dijanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK).

4) Bahan Evaluasi dan Perbaikan (Lesson Learned)

   Analisis ini sangat krusial untuk masa depan organisasi. Tujuannya adalah untuk:

   - Mengidentifikasi faktor pendukung (mengapa target tercapai/melampaui).
   - Mengidentifikasi hambatan (mengapa target tidak tercapai).
   - Memberikan rekomendasi apakah suatu program layak dilanjutkan, diperbaiki, atau justru dihentikan di tahun anggaran berikutnya.

5) Dasar Pengambilan Keputusan berbasis Data

   Bagi pimpinan, analisis ini memberikan gambaran objektif mengenai unit kerja mana yang performanya maksimal dan mana yang butuh intervensi. Ini membantu dalam pengalokasian sumber daya (SDM dan anggaran) yang lebih tepat sasaran di periode mendatang.

Tabel 2.14
Analisis Program dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja RPD Tahun 2024-2026

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatkan produktifitas ekonomi lokal	Pertumbuhan PDRB ADHK Lapangan Usaha Industri Pengolahan	%	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Dinas Perindag	Prosentase pelaku usaha yang memeperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP toko swalayan	90	48	53.33	data yang diambil adalah data pada TW 3 sehingga pencapaian belum maksimal	dilakukan optimalisasi kegiatan pada triwulan berikutnya
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Dinas Perindag	Omzet Perdagangan	1.089 Milyar	737,32 Milyar	67,71%	data yang diambil adalah data pada TW 3 sehingga pencapaian belum maksimal	dilakukan optimalisasi kegiatan pada triwulan berikutnya
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Dinas Perindag	Presentase Kinerja Realisasi Pupuk	96	64.38	67.06	data yang diambil adalah data pada TW 3 sehingga pencapaian belum maksimal	dilakukan optimalisasi kegiatan pada triwulan berikutnya
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Dinas Perindag	Presentase fasilitasi pelaku usaha ekspor	60	0	0	Belum optimalnya Pemberdayaan eksportir, importer dan perizinan terhadap perdagangan dan peningkatan produk	optimalisasi pemanfaatan peran kerjasama perdagangan internasional, pengendalian impor, serta peningkatan

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										kinerja ekspor non-migas;
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Dinas Perindag	Persentase Alat Ukur takar Timbang dan Perlengkapanny a (UTTP) yang bertanda Tera sah yang berlaku	85.55	53.64	62.70	data yang diambil adalah data pada TW 3 sehingga pencapaian belum maksimal	dilakukan optimalisasi kegiatan pada triwulan berikutnya
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Dinas Perindag	Persentase Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	58.44	55%	94%	data yang diambil adalah data pada TW 3 sehingga pencapaian belum maksimal	dilakukan optimalisasi kegiatan pada triwulan berikutnya
	Pertumbuhan PDRB ADHK Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Dinas Perindag	Presentase Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri yang Disusun	57	28.56	50.11	data yang diambil adalah data pada TW 3 sehingga pencapaian belum maksimal	dilakukan optimalisasi kegiatan pada triwulan berikutnya
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Dinas Perindag	Persentase pemantauan dan pengawasan izin usaha industri	79	58.97	74.65	data yang diambil adalah data pada TW 3 sehingga pencapaian belum maksimal	dilakukan optimalisasi kegiatan pada triwulan berikutnya
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Dinas Perindag	Persentase pengelolaan data dalam SIINas	25	18.84	75.36	data yang diambil adalah data pada TW 3 sehingga pencapaian belum maksimal	dilakukan optimalisasi kegiatan pada triwulan berikutnya
	Nilai Investasi	Rp	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM	Dpmptsp	Persentase Peta Potensi dan Peluang	100%	100%	100%	1. Belum adanya regulasi tentang kemudahan	1. Melaksanakan Promosi Penanaman

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			PENANAMAN MODAL		Usaha Kabupaten / Kota yang dibuat				berinvestasi / Perda Percepatan Perizinan Berusaha 2. Masih adanya perusahaan yang belum menyampaikan LKPM. 3. Masih adanya perusahaan yang tidak/belum merealisasikan kegiatannya di lapangan setelah mereka memiliki Nomor Induk Berusahan (NIB) 4. Masih kurangnya pengetahuan pihak perusahaan dalam pengisian Laporan LKPM 5. Kapasitas SDM masih perlu ditingkatkan sesuai perkembangan teknologi	Modal dengan berbasis Data Invesment Project Ready to Offer 2. Menyusun Peraturan Daerah Percepatan Perizinan Berusaha di Daerah 3. Melakukan Bimbingan Teknis kepada Pelaku usaha untuk merealisasikan rencana kegiatan usahanya yang telah didaftarkan di OSS 4. Melakukan Pembinaan, pemantauan dan Pengawasan Penanaman modal agar pelaku usaha tertib untuk melakukan pelaporan Kegiatan penanaman Modalnya 5. Peningkatan kompetensi

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										seluruh Pegawai di Lingkungan DPMPTSP 6. Peningkatan ketersediaan sarana prasarana dan pendukung Gedung mal Pelayanan Publik 7. Ketersediaan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat terkait layanan perizinan dan non perizinan pada beberapa media baik online maupun offline (website, media sosial, brosur, baliho, sosialisasi dll)
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Dpmptsp	Persentase Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota yang dibuat	100	100	100	Persentase peta potensi dan peluang usaha kabupaten/kota yang dibuat pada Program Promosi Penanaman Modal ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% sehingga capaian kinerja 100% dan termasuk kategori	Ke depan perlu melakukan pemutakhiran secara berkala terhadap peta potensi dan peluang usaha daerah serta memperkuat promosi investasi melalui berbagai media promosi, forum investasi,

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									tercapai. Capaian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berhasil menyusun peta potensi dan peluang usaha sebagai dasar dalam mempromosikan investasi daerah kepada calon investor.	dan kerja sama dengan pemerintah provinsi maupun lembaga investasi untuk menarik minat investor.
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Dpmptsp	Persentase kegiatan pengendalian penanaman modal yang dilaksanakan	100	100	100	Persentase kegiatan pengendalian penanaman modal yang dilaksanakan pada Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal menunjukkan realisasi 100% dari target 100% sehingga capaian kinerja 100% dan termasuk kategori tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal telah berjalan sesuai dengan perencanaan.	Ke depan perlu meningkatkan kualitas pengawasan terhadap realisasi investasi serta memperkuat koordinasi dengan instansi terkait guna memastikan kegiatan penanaman modal berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Dpmptsp	Persentase Kegiatan Usaha yang mendapat pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal	95	95	100	Persentase kegiatan usaha yang mendapat pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal pada Program Pelayanan Penanaman Modal ditargetkan 95% dan terealisasi 95% dengan capaian 100% sehingga termasuk kategori tercapai. Capaian ini menunjukkan bahwa pelayanan perizinan dan non perizinan bagi pelaku usaha telah berjalan optimal melalui mekanisme pelayanan terpadu satu pintu.	Ke depan perlu terus meningkatkan kualitas pelayanan perizinan melalui optimalisasi sistem pelayanan berbasis elektronik, peningkatan kompetensi aparatur pelayanan, serta penyederhanaan prosedur perizinan untuk memberikan kemudahan berusaha bagi masyarakat dan investor.
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Dpmptsp	Persentase data dan informasi perizinan yang dimanfaatkan	100	100	100	Persentase data dan informasi perizinan yang dimanfaatkan pada Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal ditargetkan 100% dan terealisasi 100% sehingga capaian 100% dan	Ke depan perlu meningkatkan integrasi sistem informasi perizinan dengan sistem pelayanan nasional serta melakukan pemutakhiran data secara berkala agar data perizinan dapat

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									termasuk kategori tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan data dan sistem informasi perizinan telah dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pelayanan penanaman modal.	dimanfaatkan secara lebih optimal dalam pengambilan kebijakan investasi daerah.
Meningkatkan Kesejahteraan Petani dan Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi Pangan	NTP	Nilai	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Pertanian	Persentase sarana pertanian yang digunakan	100	73.99	73.99	data yang diambil adalah data pada TW 3 sehingga pencapaian belum maksimal	dilakukan optimalisasi kegiatan pada triwulan berikutnya
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Pertanian	Persentase alsintan dalam kondisi baik (%)	100	0	0	data yang diambil adalah data pada TW 3 sehingga pencapaian belum maksimal	dilakukan optimalisasi kegiatan pada triwulan berikutnya
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Dinas Pertanian	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	10%	-42.80%	-428	data yang diambil adalah data pada TW 3 sehingga pencapaian belum maksimal	dilakukan optimalisasi kegiatan pada triwulan berikutnya
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULA	Dinas Pertanian	Persentase Pengendalian dan Penanganan bencana Pertanian	100	68.46	68.46	data yang diambil adalah data pada TW 3 sehingga	dilakukan optimalisasi kegiatan pada

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			NGAN BENCANA PERTANIAN						pencapaian belum maksimal	triwulan berikutnya
			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Dinas Pertanian	Persentase perizinan usaha pertanian yang direkomendasikan	100%	100%	100	Adanya koordinasi yang baik dengan kelompok sasaran kegiatan	meningkatkan koordinasi sehingga dapat menjangkau
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Dinas Pertanian	Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya	1.54%	1.21%	78,57%	data yang diambil adalah data pada TW 3 sehingga pencapaian belum maksimal	Petani cenderung kurang antusias untuk berkelompok dalam berusaha tani
	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Dinas KPP	-	-	-	-	Program ini tidak dilaksanakan pada tahun 2025 krn belum dianggarkan	-
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Dinas KPP	Persentase Diversifikasi Pangan Lokal	100	96,98	96,98	Peningkatan capaian kinerja banyak dipengaruhi oleh pelaksanaan program kegiatan yang bersifat himbauan, melalui promosi, pembinaan, percontohan dan fasilitasi kepada Masyarakat untuk meningkatkan pola	Meningkatkan kedaulatan pangan dilakukan melalui penguatan produksi pertanian lokal, perlindungan lahan pertanian, peningkatan kapasitas petani, serta

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									konsumsi yang sehat dan ideal sesuai kebutuhan dalam tubuh	pengembangan distribusi dan cadangan pangan daerah yang berkelanjutan.
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Dinas KPP	Persentase sampel pangan aman yang dikonsumsi	100	72,13	72,13	Peningkatan capaian kinerja banyak dipengaruhi oleh pelaksanaan program kegiatan yang bersifat himbauan, melalui promosi, pembinaan, percontohan dan fasilitasi kepada Masyarakat untuk meningkatkan pola konsumsi yang sehat dan ideal sesuai kebutuhan dalam tubuh	Meningkatkan kedaulatan pangan dilakukan melalui penguatan produksi pertanian lokal, perlindungan lahan pertanian, peningkatan kapasitas petani, serta pengembangan distribusi dan cadangan pangan daerah yang berkelanjutan.
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Dinas KPP	Persentase Produksi Perikanan Non Budidaya	96,38	99,88	103,6	Ketersediaan teknologi penangkapan dan budidaya perikanan yang modern serta peningkatan permintaan ikan dan produk perikanan; kwalitas dan kelayakan sarana dan prasarana untuk peningkatan	Meningkatkan produksi budidaya perikanan lokal dilakukan melalui penguatan sarana prasarana budidaya, peningkatan kapasitas pembudidaya

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									perikanan kurang memadai.	ikan, penyediaan benih dan pakan berkualitas, serta pengembangan teknologi budidaya yang efisien dan berkelanjutan.
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Dinas KPP	Persentase Produksi Perikanan Budidaya	93,52	100,01	106,9	Ketersediaan teknologi penangkapan dan budidaya perikanan yang modern serta peningkatan permintaan ikan dan produk perikanan; kwalitas dan kelayakan sarana dan prasarana untuk peningkatan perikanan kurang memadai.	Meningkatkan produksi budidaya perikanan lokal dilakukan melalui penguatan sarana prasarana budidaya, peningkatan kapasitas pembudidaya ikan, penyediaan benih dan pakan berkualitas, serta pengembangan teknologi budidaya yang efisien dan berkelanjutan.
			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas KPP	Persentase Pelanggaran yang ditangani	100	100	100,0	Ketersediaan teknologi penangkapan dan budidaya perikanan yang modern serta peningkatan permintaan ikan dan	Meningkatkan produksi budidaya perikanan lokal dilakukan melalui penguatan sarana

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									produk perikanan; kwalitas dan kelayakan sarana dan prasarana untuk peningkatan perikanan kurang memadai.	prasarana budidaya, peningkatan kapasitas pembudidaya ikan, penyediaan benih dan pakan berkualitas, serta pengembangan teknologi budidaya yang efisien dan berkelanjutan.
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Dinas KPP	Jumlah Konsumsi Ikan	33	39,69	120,27	Ketersediaan teknologi penangkapan dan budidaya perikanan yang modern serta peningkatan permintaan ikan dan produk perikanan; kwalitas dan kelayakan sarana dan prasarana untuk peningkatan perikanan kurang memadai.	Meningkatkan produksi budidaya perikanan lokal dilakukan melalui penguatan sarana prasarana budidaya, peningkatan kapasitas pembudidaya ikan, penyediaan benih dan pakan berkualitas, serta pengembangan teknologi budidaya yang efisien dan berkelanjutan.

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatkan daya saing produk unggulan daerah	Rata-rata lama tinggal wisatawan	hari	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Dinas Porabudpar	Presentase peningkatan jumlah wisatawan	5%	4,88%	93.8	Adanya potensi wisata desa yang layak untuk dikembangkan Adanya komitmen dan dukungan dari kepala daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Nganjuk	menigkatkan koordinasi lintas sektor dan meng optimalkan peran kelompok desa wisata
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Dinas Porabudpar	Presentase peningkatan jumlah wisatawan	5%	4,88%	93.8	Adanya potensi wisata desa yang layak untuk dikembangkan Adanya komitmen dan dukungan dari kepala daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Nganjuk	menigkatkan koordinasi lintas sektor dan meng optimalkan peran kelompok desa wisata
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK	Dinas Porabudpar	Presentase peningkatan produk ekonomi kreatif (%)	28.50%	28.68%	101.26	keterlibatan aktif organisasi pemuda dalam pembangunan dan sinergi antara pembinaan internal, fasilitasi pemerintah, dan lingkungan	meningkatkan komitmen dan peran pemuda dalam pembangunan ekosistem ekraf

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			KEKAYAAN INTELEKTUAL						ekosistem pendukung	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Dinas Porabudpar	Jumlah SDM Pariwisata dan ekraf yang terfasilitasi	50	50	100	Berkembanganya teknologi untuk menunjang kreatifitas produksi dan kreasi para pelaku ekraf Adanya Forum sebagai wadah komunikasi dan saling mendukung antar usaha ekonomi kreatif	meningkatkan komitmen dan peran pemuda dalam pembangunan ekosistem ekraf
	Pertumbuhan koperasi sehat	%	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Dinas Koperasi Umkm	Persentase koperasi yang diawasi dan diperiksa (%)	26.95	40.2	149.16%	meningkatnya kepatuhan koperasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, tertibnya pelaksanaan rapat anggota tahunan (RAT), serta meningkatnya kualitas tata kelola dan transparansi pengelolaan keuangan koperasi sehingga mampu memperkuat kepercayaan anggota dan keberlanjutan usaha koperasi di daerah.	meningkatkan intensitas pembinaan, pengawasan, dan pendampingan kepada koperasi, termasuk melalui digitalisasi pelaporan koperasi, peningkatan kapasitas pengurus dan pengawas, serta penertiban koperasi yang tidak aktif agar tercipta koperasi yang sehat,

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										transparan, dan berdaya saing.
	Rata rata peningkatan Volume usaha mikro	%	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Dinas Koperasi Umkm	Persentase koperasi dengan kategori sehat dan cukup sehat (%)	10.9	27.25	250%	Keberhasilan Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi ditunjukkan dengan meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja kelembagaan KSP/USP melalui pelaksanaan penilaian kesehatan secara berkala, sehingga kondisi keuangan, tingkat likuiditas, permodalan, dan manajemen koperasi dapat terukur dengan baik serta menjadi dasar pembinaan koperasi yang lebih akuntabel dan berkelanjutan.	Ke depan perlu dilakukan peningkatan pembinaan dan pendampingan kepada KSP/USP koperasi yang memiliki tingkat kesehatan rendah, penguatan kapasitas pengurus dalam pengelolaan keuangan dan manajemen risiko, serta optimalisasi sistem pelaporan dan monitoring agar koperasi dapat meningkatkan kinerjanya dan menjaga keberlanjutan usaha.
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Dinas Koperasi Umkm	Persentase Koperasi yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan (%)	21.6	44.17	204.49	Keberhasilan Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian ditunjukkan melalui meningkatnya	Ke depan perlu dilakukan peningkatan frekuensi dan kualitas pendidikan serta

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									pemahaman dan kapasitas sumber daya manusia koperasi, baik pengurus, pengawas maupun anggota, dalam pengelolaan kelembagaan dan usaha koperasi sehingga mampu mendukung tata kelola koperasi yang lebih profesional, transparan, dan berkelanjutan.	pelatihan perkoperasian yang lebih tematik dan berbasis kebutuhan, termasuk penguatan kompetensi manajerial, kewirausahaan, serta pemanfaatan teknologi digital agar koperasi semakin adaptif, mandiri, dan mampu bersaing dalam pengembangan usaha.
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Dinas Koperasi Umkm	Persentase koperasi yang difasilitasi (%)	16.5	57.11	346.12	Keberhasilan Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi ditunjukkan melalui meningkatnya kapasitas usaha koperasi, akses terhadap pembinaan dan pendampingan, serta terwujudnya perlindungan terhadap koperasi agar mampu	Ke depan perlu dilakukan penguatan program pemberdayaan melalui fasilitasi akses permodalan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan usaha koperasi, serta penguatan regulasi dan pengawasan

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									menjalankan kegiatan usaha secara sehat, berkelanjutan, dan memberikan manfaat ekonomi bagi anggotanya maupun masyarakat.	untuk memastikan koperasi dapat berkembang secara sehat, mandiri, dan memiliki daya saing yang lebih baik.
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Dinas Koperasi Umkm	Persentase usaha mikro yang mendapatkan akses pasar moderen (%)	8	8.11	101.37	Keberhasilan Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) ditunjukkan melalui meningkatnya kapasitas pelaku UMKM dalam pengelolaan usaha, perluasan akses pemasaran dan permodalan, serta bertambahnya jumlah UMKM yang mampu berkembang dan berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian daerah.	Ke depan perlu dilakukan penguatan pembinaan dan pendampingan usaha, fasilitasi akses permodalan dan pemasaran, serta peningkatan pemanfaatan teknologi digital bagi pelaku UMKM agar mampu meningkatkan daya saing, memperluas pasar, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Dinas Koperasi Umkm	Persentase Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitasi pengembangan (%)	23.5	23.59	100.38	Keberhasilan Program Pengembangan UMKM ditunjukkan melalui meningkatnya kualitas produk, kapasitas usaha, serta perluasan jaringan pemasaran pelaku UMKM sehingga mampu meningkatkan daya saing dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.	Ke depan perlu dilakukan penguatan inovasi produk, peningkatan kualitas sumber daya manusia pelaku UMKM, fasilitasi akses pembiayaan dan pemasaran, serta pemanfaatan teknologi digital agar UMKM dapat berkembang secara berkelanjutan dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
Mengurangi penduduk miskin melalui pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Angka Kemiskinan Ekstrim	%	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial Pppa	Persentase PSKS yang mendapat pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	85	100	117.65	Program Pemberdayaan Sosial dengan indikator “Persentase PSKS yang mendapat pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial” pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 85% dengan realisasi 100% dan capaian sebesar	Kinerja Program aman secara administratif, namun rapuh secara regulatif. Kita berhasil membina SDM (PSKS), tapi kita gagal menertibkan tata kelola sumbangan masyarakat. Prioritas tahun depan adalah

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									118% masuk kategori capaian kinerja “sangat tinggi” yang artinya mencapai kinerja dari target yang ditentukan. meski pada program tersebut terdapat 1 kegiatan yang tidak dapat mencapai target. Pencapaian Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan. 1. Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan keluaran Jumlah Rekomendasi Izin Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota masuk dalam kategori capaian kinerja “Sangat Rendah” dengan capaian 0% yang artinya gagal mencapai kinerja dari target yang ditentukan. Hal ini	mengubah fungsi pengawasan menjadi lebih insentif dan mempermudah layanan perizinan.

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									dikarenakan output dari pelaksanaan sosialisasi PUB dan UGB tidak adanya permintaan rekomendasi yang diterbitkan oleh Dinas Sosial PPPA. 2.Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dengan keluaran Jumlah Orang yang Mendapatkan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota masuk dalam kategori capaian kinerja "Sangat Tinggi" dengan capaian 104% yang artinya berhasil mencapai kinerja dari target yang ditentukan.	
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial Pppa	Persentase Rehabilitasi Sosial bagi PPKS/ PMKS	85	100	117.65	Persentase Rehabilitasi Sosial bagi PPKS/ PMKS" pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar	untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas kinerja

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									85% dengan realisasi 100% dan capaian sebesar 100% masuk kategori capaian kinerja “Sangat Tinggi” yang artinya berhasil mencapai kinerja dari target yang ditentukan. Pencapaian Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan	di masa mendatang, disarankan langkah-langkah strategis sebagai berikut: 1. Peningkatan Kualitas Outcome (Dampak): Melakukan evaluasi pasca-rehabilitasi (Tracer Study) terhadap PPKS yang telah mendapatkan layanan untuk mengukur tingkat kemandirian sosial-ekonomi dan mencegah terjadinya rujukan berulang (relapse). 2. Optimalisasi Integrasi Lintas Sektor: Memperkuat koordinasi dengan sektor ketenagakerjaan dan

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										pemberdayaan ekonomi guna memastikan PPKS yang telah direhabilitasi mendapatkan akses lapangan kerja atau modal usaha sebagai bagian dari proses reintegrasi sosial yang tuntas. 3. Penguatan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial: Mengintegrasikan data realisasi dari dua kegiatan pendukung ke dalam sistem satu data yang ter-update secara real-time untuk meminimalisir risiko duplikasi sasaran dan meningkatkan akurasi perencanaan anggaran tahun depan. 4. Penyesuaian

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Target Kinerja: Mereviu kembali penetapan target indikator pada rencana kerja (Renja) tahun berikutnya dengan mempertimbangkan kapasitas riil dan tren peningkatan jumlah PPKS di lapangan agar target tetap realistis namun progresif.
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial Pppa	Persentase PPKS/ PMKS Penerima Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	85	96.4	113.41	Persentase PPKS/ PMKS Penerima Program Perlindungan dan Jaminan Sosial" pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 85% dengan realisasi 96,40% dan capaian sebesar 113% masuk kategori capaian kinerja "Sangat Tinggi" yang artinya berhasil mencapai kinerja dari target yang ditentukan. Pencapaian Program	1. Pemutakhiran Data Dinamis dan Akurasi Targeting Mengingat keberhasilan program sangat bergantung pada satu kegiatan tunggal (Verval Data), disarankan untuk meningkatkan intensitas verifikasi dan validasi (Verval) secara berkala (triwulanan). Fokus utama

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									tersebut didukung oleh 1 kegiatan 1. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan Keluaran Jumlah Data Fakir Miskin yang Telah di Verval masuk dalam kategori capaian kinerja " Sangat Tinggi" dengan capaian 113% yang artinya berhasil mencapai kinerja dari target yang ditentukan	harus diarahkan pada meminimalkan Inclusion Error (salah sasaran) dan Exclusion Error (layak namun tidak terdata) guna memastikan perlindungan sosial yang lebih inklusif dan tepat sasaran. 2. Penyesuaian Target Kinerja (Stretching Target) Capaian realisasi sebesar 96,40% yang melampaui target awal (85%) menunjukkan adanya kapasitas manajerial yang mumpuni. Untuk tahun anggaran berikutnya, target kinerja perlu ditingkatkan mendekati 100% (mendekati cakupan semesta/ universal

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										coverage) untuk mendorong akselerasi perlindungan sosial bagi seluruh PPKS di daerah. 3. Diversifikasi Kegiatan Pendukung Ketergantungan program pada satu kegiatan (Pengelolaan Data) memiliki risiko operasional yang tinggi. Disarankan untuk menambah kegiatan pendukung yang berfokus pada Monitoring dan Evaluasi Dampak, guna memastikan bahwa PPKS yang telah terdata benar-benar menerima manfaat jaminan sosial secara tepat waktu, tepat jumlah, dan

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										tepat kualitas. 4. Integrasi Sistem Data Terpadu Mendorong integrasi hasil Verval data kabupaten/kota dengan SIKS-NG secara real-time untuk mempercepat sinkronisasi data pusat dan daerah, sehingga akses PPKS terhadap bantuan sosial (PBI-JKN, PKH, BPNT, dll) dapat terfasilitasi dengan lebih responsif.
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Dinas Sosial Pppa	Persentase PPKS/ PMKS Korban Bencana yang Ditangani	85	93.94	110.52	Program Penanganan Bencana dengan indikator "Persentase PPKS/ PMKS Korban Bencana yang Ditangani" pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 85% dengan realisasi 93,94% dan capaian sebesar	Rekomendasi dan Saran Tindak Lanjut : Standardisasi Pelayanan Minimal (SPM) Korban Bencana: Meskipun capaian kuantitatif sangat tinggi, fokus selanjutnya

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									111% masuk kategori capaian kinerja “Sangat Tinggi” yang artinya berhasil mencapai kinerja dari target yang ditentukan. Pencapaian Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan. 1. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota dengan keluaran Jumlah Orang yang Mendapatkan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial masuk dalam kategori capaian kinerja “Sangat Tinggi” dengan capaian 105% yang artinya berhasil mencapai kinerja dari target yang ditentukan. 2. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap	adalah memastikan bahwa penanganan korban bencana (realisasi 93,94%) selaras dengan Standard Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar yang tepat waktu dan layak bagi seluruh korban tanpa terkecuali. Optimalisasi dan Eskalasi Target Kesiapsiagaan: Capaian 145% pada kegiatan Pemberdayaan Masyarakat menunjukkan adanya potensi sumber daya dan antusiasme komunitas yang tinggi. Disarankan untuk menaikkan target jumlah "Kampung Siaga Bencana" pada

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota dengan keluaran Jumlah Kampung yang Mendapatkan Pemberdayaan Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota masuk dalam kategori capaian kinerja “Sangat Tinggi” dengan capaian 145% yang artinya berhasil mencapai kinerja dari target yang ditentukan.	tahun mendatang serta meningkatkan statusnya dari sekadar pembentukan menjadi Kampung Siaga Bencana Mandiri melalui dukungan anggaran stimulan. Integrasi Data Korban Bencana: Mengingat tingginya capaian pada perlindungan sosial (105%), diperlukan penguatan sistem pendataan korban bencana yang terintegrasi (Satu Data Bencana) untuk mempercepat proses verifikasi dan penyaluran bantuan logistik saat masa tanggap darurat. Peralihan Fokus

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										ke Mitigasi Preventif: Keberhasilan melampaui target pada kedua kegiatan pendukung menjadi momentum untuk mengalihkan sebagian sumber daya pada penguatan logistik di lumbung sosial (social stock) daerah rawan guna memperpendek rantai birokrasi penyaluran bantuan.
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Dinas Sosial Pppa	Persentase Pengelolaan TMP	85	100	117.65	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan indikator "Persentase Pengelolaan TMP" pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 85% dengan realisasi 100% dan capaian sebesar 118% masuk kategori capaian	Berikut adalah tanggapan dan saran tindak lanjut sebagai Analis Kebijakan dalam format resmi LKJIP: Analisis Capaian Kinerja Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Tahun

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									kinerja “Sangat Tinggi” yang artinya berhasil mencapai kinerja dari target yang ditentukan. Program tersebut dihitung berdasarkan TMP yang terpelihara dalam periode triwulan. Pencapaian Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan. 1. Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota dengan keluaran Jumlah Kegiatan Pemeliharaan TMP masuk dalam kategori capaian kinerja “Sangat Tinggi” dengan capaian 118% yang artinya berhasil mencapai kinerja dari target yang ditentukan	2025 1. Analisis Capaian Kinerja Realisasi indikator “Persentase Pengelolaan TMP” mencapai 100% dari target 85% (capaian kinerja 118%) menunjukkan konsistensi pemeliharaan fisik yang sangat baik sepanjang periode triwulanan. Melampauinya target tersebut pada kegiatan tunggal (Pemeliharaan TMP) mengindikasikan adanya intensitas pemeliharaan yang melebihi jadwal rutin, yang dipicu oleh optimalisasi operasional di lapangan untuk menjaga marwah dan kelayakan sarana prasarana

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										cagar budaya/makam pahlawan. 2. Rekomendasi dan Saran Tindak Lanjut Penyelarasan Target Baseline: Mengingat pemeliharaan TMP merupakan tugas rutin (mandatory) dan aset yang dikelola bersifat tetap, disarankan untuk menetapkan target kinerja pada angka 100% di tahun mendatang. Capaian 118% mengindikasikan target 85% terlalu konservatif (under-target) untuk objek vital daerah. Peningkatan Standar Kualitas (Standard

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Operating Procedure): Menggeser fokus dari sekadar "jumlah kegiatan pemeliharaan" (kuantitas) menjadi Indeks Kualitas Sarana Prasarana TMP. Hal ini bertujuan agar anggaran tidak hanya terserap untuk rutinitas pembersihan, tetapi juga untuk konservasi jangka panjang dan estetika makam sebagai simbol kehormatan negara. Digitalisasi Data dan Inventarisasi: Melakukan digitalisasi data makam pahlawan (e-TMP) guna mempermudah akses informasi bagi ahli waris dan masyarakat,

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										sekaligus sebagai alat kendali monitoring pemeliharaan secara real-time di setiap triwulan. Optimalisasi Fungsi Edukasi: Mengembangkan program tindak lanjut berupa pemanfaatan TMP sebagai sarana edukasi nilai kepahlawanan bagi generasi muda, sehingga pengelolaan TMP tidak hanya berhenti pada aspek fisik, tetapi juga memberikan dampak pada penguatan nilai sejarah dan patriotisme.
	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	PROGRAM PENATAAN DESA	Dinas PMD	Persentase Desa dengan penataan sesuai standart ketentuan	24 %	11,4 %	47,5 %	Data diambil sampai dengan Tribulan III tahun 2025 sehingga realisasi masih rendah	dilakukan optimalisasi kegiatan pada triwulan berikutnya

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Dinas PMD	Persentase Desa dengan pelaksanaan kerjasama secara aktif	87 %	24 %	9,19 %	Data diambil sampai dengan Tribulan III tahun 2025 sehingga realisasi masih rendah	dilakukan optimalisasi kegiatan pada triwulan berikutnya
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Dinas PMD	Persentase Desa Yang telah menyelenggarakan Administrasi Tata Kelola Pemerintahan Desa sesuai standart	100 %	38 %	38 %	Data diambil sampai dengan Tribulan III tahun 2025 sehingga realisasi masih rendah	dilakukan optimalisasi kegiatan pada triwulan berikutnya
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Dinas PMD	Persentase Desa Yang Kapasitas Kelembagaannya diberdayakan	45 %	0 %	0 %	Data diambil sampai dengan Tribulan III tahun 2025 sehingga realisasi masih rendah	dilakukan optimalisasi kegiatan pada triwulan berikutnya
Meningkatkan penyerapan tenaga kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Dinas Naker	Persentase pencari kerja terdaftar yang mendapatkan pelatihan	15.00	6.67	44.47	Data diambil sampai dengan Tribulan III tahun 2025 sehingga realisasi masih rendah	dilakukan optimalisasi kegiatan pada triwulan berikutnya
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Dinas Naker	Persentase Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	96.41	96.16	99.74	Pelatihan ketrampilan dan skill calon pekerja serta publikasi informasi lowongan kerja	dilakukan optimalisasi kegiatan pada triwulan berikutnya

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Dinas Naker	Persentase angka sengketa perusahaan pertahun	2.30	0.80	165.22	Sosialisasi, komunikasi dan kerja sama yang baik dari stakeholder	dilakukan optimalisasi kegiatan pada triwulan berikutnya
				Dinas Naker	Persentase PP/PKB yang memuat syarat kerja	27.46	28.3	103.06	Sosialisasi, komunikasi dan kerja sama yang baik dari stakeholder	dilakukan optimalisasi kegiatan pada triwulan berikutnya
				Dinas Naker	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	55.00	60.34	109.71	Sosialisasi, komunikasi dan kerja sama yang baik dari stakeholder	dilakukan optimalisasi kegiatan pada triwulan berikutnya
			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Dinas Naker	Persentase tingkat keberhasilan transmigran yang diberangkatkan	9.00	9.09	101.00	Sosialisasi, komunikasi dan kerja sama yang baik dari stakeholder	dilakukan optimalisasi kegiatan pada triwulan berikutnya
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	Indeks	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA	Dinas LH	IK Program : Persentase Limbah B3 yang Terkelola	79.50	72.78	91.55	Sosialisasi, komunikasi dan kerja sama yang baik dari stakeholder serta upaya penegakan hukum yang tegas	dilakukan optimalisasi kegiatan pada triwulan berikutnya

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			DAN BERACUN (LIMBAH B3)							
	Indeks Kualitas Udara	Indeks	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Dinas LH	IK Program : Persentase SDM Bidang Lingkungan Hidup Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7.73	9.06	117.21	Kesadaran pentingnya peningkatan SDM dari aparatur dan pimpinan	Meningkatkan kinerja pemeliharaan lingkungan melalui integrasi sistem pengawasan berbasis digital (real-time monitoring) yang didukung oleh penguatan penegakan hukum lingkungan serta pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi sirkular secara konsisten.
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Dinas LH	Persentase partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	8.02	10.4	129.68	Sosialisasi, komunikasi dan kerja sama yang baik dari stakeholder	Meningkatkan kinerja pemeliharaan lingkungan melalui integrasi sistem pengawasan berbasis digital (real-time monitoring) yang didukung oleh penguatan penegakan

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										hukum lingkungan serta pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi sirkular secara konsisten.
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Dinas LH	Presentase timbunan sampah teroleh difasilitas pengelolaan sampah	24.81	25.00	100.77	Sosialisasi, komunikasi dan kerja sama yang baik dari stakeholder	Meningkatkan kinerja pemeliharaan lingkungan melalui integrasi sistem pengawasan berbasis digital (real-time monitoring) yang didukung oleh penguatan penegakan hukum lingkungan serta pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi sirkular secara konsisten.
			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas LH	Presentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang di tindak lanjuti	80.00	100.00	125.00	Sosialisasi, komunikasi dan kerja sama yang baik dari stakeholder	Meningkatkan kinerja pemeliharaan lingkungan melalui integrasi sistem pengawasan berbasis digital

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										(real-time monitoring) yang didukung oleh penguatan penegakan hukum lingkungan serta pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi sirkular secara konsisten.
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas LH	Penurunan Emisi GRK kumulatif (Ton CO2 Eq)	78.26	71.88	91.85	Sosialisasi dan komunikasi yang intensif dari para pihak	Meningkatkan kinerja pemeliharaan lingkungan melalui integrasi sistem pengawasan berbasis digital (real-time monitoring) yang didukung oleh penguatan penegakan hukum lingkungan serta pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi sirkular secara konsisten.
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAG	Dinas LH	Persentase pemenuhan target RTH	0.576	0.6417	111.41	Sosialisaasi optimalisasi pemanfaatan	Meningkatkan kinerja pemeliharaan

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			AMAN HAYATI (KEHATI)						terbuka hijau yang masif dan kesadaran masyarakat meningkat	lingkungan melalui integrasi sistem pengawasan berbasis digital (real-time monitoring) yang didukung oleh penguatan penegakan hukum lingkungan serta pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi sirkular secara konsisten.
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Dinas LH	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap pelaksanaan rekomendasi dalam dokumen persetujuan	63	60	95.24	Sosialisasi dan komunikasi yang intensif dari para pihak	Meningkatkan kinerja pemeliharaan lingkungan melalui integrasi sistem pengawasan berbasis digital (real-time monitoring) yang didukung oleh penguatan penegakan hukum lingkungan serta pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										sirkular secara konsisten.
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas LH	Persentase fasilitasi terhadap pengaduan LH	100.00	100.00	100.00	Peningkatan pembangunan kesadaran dan sistem respons yang baik	Meningkatkan kinerja pemeliharaan lingkungan melalui integrasi sistem pengawasan berbasis digital (real-time monitoring) yang didukung oleh penguatan penegakan hukum lingkungan serta pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi sirkular secara konsisten.
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan akses hunian layak, serta keselamatan transportasi	Indeks Infrastruktur Pekerjaan umum	Indeks	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Dinas PUPR	Persentase Panjang Pengelolaan SDA	82,08 %	75,37 %	91,83 %	pelaksanaan kegiatan Operasi dan pemeliharaan secara rutin dan terjadwal sehingga memaksimalkan kinerja bidang pengairan, pemeliharaan yang di laksanakan sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan, penanganan yang	Meningkatkan indeks keandalan sarana prasarana irigasi melalui percepatan rehabilitasi fisik dan digitalisasi sistem pemantauan debit air guna menjamin ketersediaan air baku serta

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									cepat dan pemeliharaan rutin pada daerah irigasi oleh tim URC-Jogo Tirto	menurunkan tingkat kehilangan air (water loss) di bawah 15% secara konsisten pada setiap daerah irigasi kewenangan kabupaten
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Dinas PUPR	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui Spam Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga Di Seluruh Kabupaten / Kota	97,34 %	97,53 %	100,20 %	pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan terhadap masyarakat terkait kegiatan SPAM berjalan dengan baik sehingga memudahkan koordinasi pelaksana kegiatan dengan masyarakat. Selain itu faktor pendung kinerja lainnya yaitu tersusunnya dokumen DED SPAM	Mengakselerasi cakupan layanan air minum melalui perluasan jaringan distribusi dan implementasi Smart Water Management System guna menekan tingkat kehilangan air (Non-Revenue Water) di bawah 20% serta menjamin pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kualitas air minum sesuai regulasi kesehatan bagi

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										seluruh rumah tangga sasaran
			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Dinas PUPR	Persentase Pemenuhan Infastruktur Pengelolaan Sampah	3 unit	4 unit	133,33%	Pemeliharaan dan perencanaan pembangunan infrastruktur persampahan yang baik	Mengoptimalkan efektivitas TPA Regional melalui penerapan sistem Sanitary Landfill yang terstandarisasi dan penguatan skema kerja sama antarwilayah (KSB) guna mencapai target pengurangan sampah di sumber sebesar 30% serta memastikan penanganan sampah terangkut mencapai 100% pada seluruh wilayah cakupan regional
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Dinas PUPR	Persentase Peningkatan Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Ald	0,45 %	5,49 %	1.220 %	pembangunan Tanki septik individual perdesaan di kegiatan Air Limbah (Sanitasi) berjalan dengan sesuai jadwal kegiatan yang telah	Meningkatkan cakupan layanan sanitasi layak melalui percepatan pembangunan SPAL-Terpusat dan Skala

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									di tentukan. Selain itu koordinasi yang baik dengan lembaga lain seperti kelompok masyarakat	Komunal guna mencapai target Zero BABS serta memastikan 100% instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) beroperasi sesuai standar baku mutu lingkungan
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Dinas PUPR	Persentase Drainase Kewenangan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	73 %	61,31 %	83,99 %	Pengawasan kondisi bangunan drainase secara reguler dan pemeliharaan secara rutin,	Mengoptimalisasi fungsi drainase primer dan sekunder melalui normalisasi rutin dan integrasi sistem drainase perkotaan guna menurunkan luas genangan air sebesar 20% serta memastikan kelancaran aliran air pada titik-titik rawan banjir saat intensitas hujan tinggi.
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Dinas PUPR	Persentase Gedung Bangunan Daerah Yang Handal	88,12 %	83,87 %	95,18 %	Monev dan pengawasan kondisi gedung yang secara reguler dan pemeliharaan secara rutin,	Meningkatkan kepatuhan penyelenggaraan bangunan gedung melalui percepatan layanan

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) guna menjamin aspek keandalan dan keselamatan struktur bangunan 100% sesuai standar teknis nasional
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas PUPR	Persentase Panjang Jalan yang Meningkat Kualitas Konstruksinya	73,17 %	73,51 %	100,46 %	Peningkatan kinerja jalan meliputi beberapa faktor yaitu pemeliharaan rutin jalan , pemeliharaan berkala jalan yang tepat sehingga bisa mencegah kerusakan kecil menjadi kerusakan besar dan memperpanjang umur jalan	Meningkatkan Indeks Kondisi Jalan (IKJ) melalui program pemeliharaan berkala dan peningkatan kapasitas jalan guna mencapai target kemantapan jalan sebesar 90% serta memperlancar konektivitas antar-wilayah pusat pertumbuhan ekonomi daerah
			PROGRAM PENGEMBANG	Dinas PUPR	Persentase Peningkatan Jumlah	68,06 %	85,33 %	125,37%	Kesadaran urgensi peningkatan kualitas aparatur	Memperkuat daya saing industri

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			AN JASA KONSTRUKSI		SDM Konstruksi yang bersertifikat					konstruksi lokal melalui peningkatan sertifikasi kompetensi tenaga kerja konstruksi (SKK) dan penguatan fungsi pengawasan tertib usaha guna memastikan 100% proyek fisik daerah dikerjakan oleh penyedia jasa yang terakreditasi.
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Dinas PUPR	Persentase KKPR Yang Diterbitkan	100 %	100 %	100 %	Konsistensi kebijakan. Keselarasan antara RTRW dengan RPJMD serta kebijakan sektor kehutanan, pertanian, perumahan	Menjamin kepastian hukum investasi melalui percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) digital yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) guna meminimalisir pelanggaran pemanfaatan ruang hingga di bawah 5%.

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Persentase Rumah layak huni	%	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Dinas Perkim	Persentase Backlog Rumah	7,5 %	7,29 %	97,2	Pendataan dan rehabilitasi rumah korban bencana yang berkualitas	Mempercepat penyediaan hunian layak bagi MBR melalui skema pembiayaan inovatif dan penyederhanaan izin pembangunan perumahan.
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perkim	Presentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10Ha yang ditingatkan	14,11 Persen	13,99 Persen	99,15	Penyusunan.review regulasi, penataan dan peningkatan kualitas kawasan pemukiman yang terlaksana dengan baik	Melaksanakan sinkronisasi perencanaan infrastruktur dasar pada kawasan permukiman baru guna mencegah timbulnya titik kumuh baru.
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Dinas Perkim	Persentase unit rumah tidak layak huni yang diperbaiki diluar kawasan kumuh dibawah 10 Ha	9,7 Persen	9,63 Persen	99,28	Pendataan, Koordinasi dan bantuan pembangunan rumah layak huni yang terlaksana dengan baik	Mengoptimalkan kolaborasi lintas sektor dalam penataan kualitas rumah dan lingkungan melalui program bedah rumah dan konsolidasi lahan.
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA,	Dinas Perkim	Persentase Perumahan Yang Terfasilitasi PSU	5 Persen	4,92 Persen	98,40	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan PSU	Menjamin keberlanjutan fungsi PSU

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)						perumahan yang kuat	melalui penyerahan aset dari pengembang ke Pemda secara tepat waktu guna memastikan pemeliharaan rutin.
			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Dinas Perkim	Persentase Permasalahan Pertanahan Yang Difasilitasi	100 Persen	100 Persen	100	Koordinasi dan komunikasi yang baik antar pihak	Memperkuat integrasi data pertanahan dengan tata ruang digital untuk meminimalisir sengketa lahan dan melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan.
	Rasio Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan	Nilai	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Dinas Perhubungan	Persentase kendaraan bermotor yang laik jalan	99.21	97.54	98.32	Capaian indikator ini menunjukkan hasil yang sangat baik dan mendekati target yang ditetapkan. Keberhasilan tersebut didukung oleh kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dimana dalam pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor	Meningkatkan keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas melalui modernisasi ATCS (Area Traffic Control System) dan optimalisasi angkutan umum massal.

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									(KIR) berjalan secara konsisten serta meningkatnya kesadaran pemilik kendaraan terhadap aspek keselamatan. Namun demikian, capaian yang belum sepenuhnya mencapai 100% dipengaruhi oleh keterbatasan kepatuhan sebagian pemilik kendaraan dan kendala teknis operasional, sehingga masih diperlukan penguatan pengawasan dan sosialisasi	
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Indeks	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan	Prosentase Fasyankes terakreditasi	70.00	100.00	142.86	Seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi sasaran telah memperoleh akreditasi sehingga capaian melampaui target yang ditetapkan.	Mempertahankan status akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan melalui pembinaan berkelanjutan, peningkatan mutu layanan, serta persiapan reakreditasi secara berkala.

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Dinas Kesehatan	Prosentase penduduk terdaftar jaminan kesehatan nasional	80.00	98.03	122.54	Kepesertaan JKN meningkat signifikan melalui optimalisasi pendaftaran dan dukungan pembiayaan jaminan kesehatan bagi masyarakat.	Meningkatkan validasi dan pemutakhiran data kepesertaan JKN serta memperluas cakupan kepesertaan masyarakat yang belum terdaftar melalui koordinasi dengan BPJS Kesehatan dan pemerintah desa.
				Dinas Kesehatan	Prosentase SPM yang memenuhi target	40.00	97.35	243.38	Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan berjalan sangat baik sehingga sebagian besar indikator pelayanan dasar kesehatan dapat terpenuhi.	Mempertahankan kinerja pemenuhan Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan serta meningkatkan kualitas layanan kesehatan dasar melalui penguatan sarana, prasarana, dan kapasitas tenaga kesehatan.
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA	Dinas Kesehatan	Prosentase tenakes yang memenuhi standar	100.00	100.00	100.00	Ketersediaan dan kompetensi tenaga kesehatan telah sesuai dengan	Melakukan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			MANUSIA KESEHATAN						standar yang ditetapkan melalui pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM kesehatan.	secara berkelanjutan melalui pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan kapasitas SDM kesehatan sesuai standar pelayanan kesehatan.
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Dinas Kesehatan	Prosentase sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman yang dinyatakan laik konsums	100.00	100.00	100.00	Pengawasan terhadap sediaan farmasi, alat kesehatan, serta makanan dan minuman berjalan optimal sehingga seluruh sampel yang diperiksa dinyatakan laik konsumsi.	Memperkuat sistem pengawasan dan pembinaan terhadap distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, serta makanan dan minuman guna menjaga keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat.
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	Indeks Keluarga Sehat	0.80	0.20	25.00	Capaian Indeks Keluarga Sehat masih jauh dari target yang ditetapkan, yang kemungkinan dipengaruhi oleh belum optimalnya pelaksanaan	Meningkatkan pelaksanaan program keluarga sehat melalui pendekatan keluarga, penguatan peran puskesmas dan

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									program keluarga sehat, keterbatasan cakupan pendataan keluarga, serta masih rendahnya penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat.	kader kesehatan, serta peningkatan edukasi masyarakat terkait perilaku hidup bersih dan sehat.
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Dinas PPKB	Persentase Rumah Data Kependudukan yang Terbentuk di Kampung Keluarga Berkualitas yang diregistrasi	92,00%	100%	108,69%	Realisasi sebesar 100% terhadap target 92,00% menghasilkan capaian kinerja 108,69%. Hasil ini menunjukkan bahwa upaya koordinasi, advokasi, dan fasilitasi pembentukan Rumah Dataku telah berjalan dengan sangat efektif dan mampu melampaui target yang ditetapkan. Rumah Dataku berfungsi sebagai pusat data dan intervensi permasalahan penduduk di tingkat desa, sehingga capaian 100% ini merupakan indikator penting dalam penguatan	target pembentukan telah terpenuhi, fokus utama ke depan harus bergeser dari sekadar kuantitas (pembentukan) menjadi kualitas (pemanfaatan): 1. Optimalisasi Fungsi Data: Melakukan evaluasi berkala agar data yang ada di Rumah Dataku tidak hanya menjadi "arsip mati", melainkan data real-time yang digunakan oleh perangkat desa dalam menentukan prioritas intervensi

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									basis data di tingkat mikro.	penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, dan Keluarga Berencana. 2. Digitalisasi Data: Mendorong migrasi pencatatan manual ke dalam sistem informasi digital yang terintegrasi, sehingga data kependudukan dapat diakses secara cepat dan akurat oleh pemangku kebijakan. 3. Penguatan Kapasitas Pengelola: Menyelenggarakan pelatihan bagi pengelola Rumah Dataku agar memiliki kompetensi dalam mengolah dan menyajikan data menjadi

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										informasi strategis bagi pengambilan keputusan di Kampung Keluarga Berkualitas.
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Dinas PPKB	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mCPR)	80,06%	71,89%	89,80%	Meskipun capaian kinerja mencapai 89,80%, secara substansi realisasi 71,89% masih berada di bawah target 80,06%. Hal ini mengindikasikan adanya celah (gap) sebesar 8,17% dalam penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang atau modern di masyarakat. Faktor penghambat kemungkinan besar terkait dengan aksesibilitas fasilitas kesehatan, adanya drop-out pengguna KB, atau faktor mitos/budaya yang masih membatasi penggunaan metode modern.	Analisis Tindak Lanjut Strategis 1. Evaluasi Drop-Out dan Keberlanjutan: Melakukan pendataan ulang terhadap akseptor yang berhenti menggunakan metode kontrasepsi untuk mengidentifikasi penyebab utama (efek samping, ketidakpuasan, atau ketidaktersediaan stok) dan memberikan konseling ulang. 2. Ekspansi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP):

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Mengintensifkan sosialisasi dan pelayanan untuk metode MKJP (seperti IUD dan Implan) yang memiliki tingkat efektivitas lebih tinggi dan tingkat drop-out lebih rendah dibanding metode jangka pendek (seperti pil atau suntik). 3. Optimalisasi Peran PLKB dan Kader: Menggerakkan kembali peran Penyuluh Lapangan KB (PLKB) dan kader untuk melakukan pendekatan persuasif secara personal dari pintu ke pintu (door-to-door), terutama di wilayah dengan prevalensi rendah. 4. Digitalisasi

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Data Akseptor: Menggunakan sistem real-time monitoring untuk melacak status kunjungan ulang akseptor sehingga petugas dapat memberikan pengingat sebelum jadwal kunjungan berikutnya terlewat.
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Dinas PPKB	Persentase Keluarga ber-KB yang mengikuti Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKA dan PIK-R)	89,02%	53,01%	59,55%	Capaian 59,55% menunjukkan gap yang lebar. Masalah utamanya kemungkinan terletak pada relevansi materi Poktan yang kurang menarik bagi keluarga milenial atau aksesibilitas waktu pertemuan yang bentrok dengan jam kerja.	Melakukan revitalisasi kegiatan melalui metode "Poktan Digital" atau Hybrid, agar interaksi tetap berjalan tanpa harus pertemuan fisik secara rutin, serta memperkaya konten pertemuan dengan isu yang lebih praktis (seperti pengasuhan anak di era digital/ekonomi keluarga).

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Menurunnya presentase pernikahan dibawah usia 21 tahun bagi wanita 25 tahun bagi pria	10,10%	6,99%	144,49%	Capaian 144,49% menunjukkan intervensi edukasi di tingkat akar rumput sangat efektif.	mempertahankan tren ini dengan melembagakan sosialisasi pendewasaan usia pernikahan sebagai kurikulum wajib bagi PIK-R (Pusat Informasi Konseling Remaja) dan sekolah-sekolah di wilayah dengan risiko tinggi pernikahan dini.
Meningkatkan kualitas pendidikan dan prestasi kepemudaan	Indeks Pendidikan	Indeks	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan	Proporsi Peserta Didik dengan Kemampuan Karakter Berkembang pada SMP	2,16 Nilai	56,2 Nilai	2601,85	Capaian yang melampaui target secara drastis (2601%) menunjukkan bahwa program penguatan pendidikan karakter (seperti profil pelajar Pancasila) telah diimplementasikan dengan sangat masif di tingkat SMP.	1. Verifikasi Data: Pastikan lonjakan ini didukung oleh instrumen asesmen yang valid agar tidak terjadi over-reporting. 2. Keberlanjutan: Fokus pada kualitas karakter, bukan lagi kuantitas. Implementasikan kurikulum berbasis proyek (Project Based

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Learning) yang mengintegrasikan karakter ke dalam mata pelajaran harian.
					Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar (Anak Usia 7-15 Tahun)	88%	93,18%	105,89	Terdapat Kenaikan prosentase pada Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan Dasar, menunjukkan adanya peningkatan peserta didik di lembaga formal baik Jenjang SD dan SMP yang bersekolah secara tepat waktu sesuai dengan usia yang ditetapkan. Hal ini merupakan hasil nyata dari pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegitaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk yang bersumber dari Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (DAU Spesific Grant) dalam mewujudkan	Ke depan perlu mempertahankan capaian melalui penguatan program wajib belajar, peningkatan akses pendidikan di wilayah terpencil, serta peningkatan peran orang tua dan masyarakat dalam mendukung keberlanjutan pendidikan anak.

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Standar Pelayanan Minimal yang optimal di Kabupaten Nganjuk pada Tahun 2023, terutama pada pencapaian indikator tingkat partisipasi sekolah di Kabupaten Nganjuk.	
					Proporsi Peserta Didik dengan Kemampuan Literasi Cakap pada SMP	53,00%	87,92%	165,89	Pencapaian tersebut menjelaskan bahwa sebagian besar peserta didik telah mencapai kompetensi minimum literasi.	Ke depan perlu mempertahankan capaian tersebut melalui penguatan budaya literasi di sekolah, peningkatan kompetensi guru dalam pembelajaran literasi, serta pemanfaatan sumber belajar digital dan perpustakaan sekolah.
					Prosentase Satuan Pendidikan PAUD Minimal Akreditasi ≥ B	34,50%	73,61%	213,36	Persentase satuan pendidikan PAUD dengan akreditasi minimal B menunjukkan realisasi 73,61% dari target 34,50%	Ke depan perlu meningkatkan pembinaan kepada lembaga PAUD agar dapat mempertahankan

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									dengan capaian 213,36% sehingga termasuk kategori tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas kelembagaan PAUD semakin meningkat melalui proses akreditasi yang dilakukan oleh lembaga terkait.	dan meningkatkan mutu layanan pendidikan anak usia dini serta mendorong lembaga yang belum terakreditasi untuk mengikuti proses akreditasi.
					Proporsi Peserta Didik dengan Kemampuan Numerasi Cakap pada SMP	36,75%	84,81%	230,78	Pencapaian tersebut menjelaskan bahwa sebagian besar peserta didik telah mencapai kompetensi minimum numerasi.	Ke depan perlu terus meningkatkan kualitas pembelajaran matematika dan numerasi melalui pelatihan guru, pengembangan metode pembelajaran inovatif, serta pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi.
					Angka Partisipasi Murni Kesetaraan (Anak 7-18 Tahun)	94,50%	93,21%	98,63	Angka Partisipasi Murni Kesetaraan (anak usia 7–18 tahun) menunjukkan realisasi 93,21% dari target 94,50%	Ke depan perlu meningkatkan sosialisasi program pendidikan kesetaraan

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									dengan capaian 98,63%, sehingga termasuk kategori tercapai dengan catatan. Hal ini menunjukkan bahwa layanan pendidikan kesetaraan telah berjalan cukup baik, meskipun masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memanfaatkan layanan pendidikan nonformal secara optimal.	kepada masyarakat, memperkuat pembinaan terhadap lembaga pendidikan nonformal, serta meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan kesetaraan.
					Nilai Karakter Peserta Didik dengan Kemampuan Karakter Berkembang pada SD	2,15 Nilai	59,96 Nilai	2788,84	Nilai karakter peserta didik pada jenjang SD menunjukkan realisasi 59,96 nilai dari target 2,15 nilai dengan capaian 2788,84%, sehingga termasuk kategori tercapai. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam penguatan pendidikan karakter pada peserta didik di sekolah dasar.	Ke depan perlu mempertahankan dan meningkatkan implementasi pendidikan karakter melalui integrasi nilai-nilai karakter dalam proses pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, serta pembiasaan budaya positif di lingkungan sekolah.

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Proporsi Peserta Didik dengan Kemampuan Numerasi Cakap pada SD	34,75%	81,17%	233,58	Proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi cakap pada SD menunjukkan realisasi 81,17% dari target 34,75% dengan capaian 233,58% sehingga termasuk kategori tercapai. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan numerasi siswa pada jenjang pendidikan dasar	Ke depan perlu mempertahankan capaian tersebut melalui penguatan pembelajaran numerasi, peningkatan kompetensi guru, serta pemanfaatan metode pembelajaran yang inovatif dan kontekstual.
					Angka Partisipasi Murni PAUD (Anak Usia 5-6 Tahun)	88%	94,54%	107,43	Angka Partisipasi Murni PAUD (anak usia 5–6 tahun) menunjukkan realisasi 94,54% dari target 88% dengan capaian 107,43%, sehingga termasuk kategori tercapai. Hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan anak usia dini.	Ke depan perlu terus meningkatkan akses dan kualitas layanan PAUD melalui peningkatan sarana prasarana, peningkatan kompetensi pendidik PAUD, serta penguatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini.

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Proporsi Peserta Didik dengan Kemampuan Literasi Cakap pada SD	59,90%	82,59%	137,88	Pencapaian tersebut menjelaskan bahwa sebagian besar peserta didik telah mencapai kompetensi minimum literasi.	Ke depan perlu mempertahankan dan meningkatkan budaya literasi di sekolah melalui penguatan program literasi sekolah, pemanfaatan perpustakaan, serta peningkatan kompetensi guru dalam pembelajaran literasi.
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Dinas Pendidikan	Rasio Pendidik dan Tenaga Kependidikan terhadap Peserta Didik pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini	1 : 10 Guru/Siswa	1 : 14 Guru/Siswa	106.00	Rasio pendidik dan tenaga kependidikan terhadap peserta didik pada jenjang PAUD menunjukkan capaian 106% dari target rasio 1:10 dengan realisasi 1:14, sehingga termasuk kategori tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan tenaga pendidik pada jenjang PAUD relatif memadai dalam mendukung proses pembelajaran.	Ke depan perlu mempertahankan rasio tersebut melalui peningkatan kompetensi guru PAUD, pemerataan distribusi tenaga pendidik, serta peningkatan kualitas pembelajaran anak usia dini.

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Rasio Ideal Pendidik dan Tenaga Kependidikan terhadap Peserta Didik pada Jenjang Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 : 14 Guru/Siswa	1 : 19 Guru/Siswa	107.00	Rasio ideal pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan nonformal/kesetaraan menunjukkan capaian 107% dari target rasio 1:14 dengan realisasi 1:19, sehingga termasuk kategori tercapai. Kondisi ini menunjukkan bahwa layanan pendidikan nonformal masih dapat dilaksanakan dengan dukungan tenaga pendidik yang tersedia.	Perlu dilakukan peningkatan pembinaan terhadap lembaga pendidikan nonformal serta peningkatan kapasitas pendidik melalui pelatihan agar kualitas layanan pendidikan kesetaraan semakin baik.
					Rasio Pengawas / Penilik	1 : 27 Pengawas/ Lembaga	1 : 25 Pengawas/ Lembaga	98.00	Rasio pengawas/penilik pendidikan menunjukkan capaian 98% dari target rasio 1:27 dengan realisasi 1:25, sehingga termasuk kategori tercapai dengan catatan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah pengawas relatif mencukupi dalam melakukan	Ke depan perlu meningkatkan kapasitas pengawas melalui pelatihan supervisi akademik dan manajerial serta memastikan pemerataan penugasan pengawas agar proses pembinaan satuan

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									pembinaan dan pengawasan terhadap satuan pendidikan.	pendidikan berjalan optimal.
					Rasio Pendidik dan Tenaga Kependidikan terhadap Peserta Didik pada Jenjang Sekolah Dasar	1 : 14 Guru/Siswa	1 : 14 Guru/Siswa	100.00	Rasio pendidik dan tenaga kependidikan terhadap peserta didik pada jenjang Sekolah Dasar menunjukkan capaian 100% dengan target dan realisasi rasio 1:14, sehingga termasuk kategori tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi tenaga pendidik pada jenjang pendidikan dasar telah sesuai dengan kebutuhan layanan pendidikan.	Ke depan perlu mempertahankan rasio tersebut dengan menjaga keseimbangan antara jumlah guru dan peserta didik serta melakukan penataan distribusi guru secara merata antar sekolah.
					Rasio Ideal Pendidik dan Tenaga Kependidikan terhadap Peserta Didik pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama	1 : 14 Guru/Siswa	1 : 17 Guru/Siswa	104.00	Rasio ideal pendidik dan tenaga kependidikan terhadap peserta didik pada jenjang SMP menunjukkan capaian 104% dari target rasio 1:14 dengan realisasi 1:17, sehingga termasuk kategori	Ke depan perlu terus meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan dan pengembangan profesional serta menjaga pemerataan

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan tenaga pendidik pada jenjang pendidikan menengah pertama cukup mendukung proses pembelajaran.	distribusi guru antar sekolah.
			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan	Prosentase Izin Operasional Satuan Pendidikan yang Masih Aktif	80%	100%	125.00	Persentase izin operasional satuan pendidikan yang masih aktif pada Program Pengendalian Perizinan Pendidikan menunjukkan realisasi 100% dari target 80% dengan capaian 125%, sehingga termasuk kategori tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar satuan pendidikan telah memiliki izin operasional yang aktif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Ke depan perlu melakukan pemutakhiran data perizinan satuan pendidikan secara berkala, meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan administrasi perizinan, serta memberikan pendampingan kepada satuan pendidikan dalam proses pengurusan izin operasional.

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Dinas Arsipus	Prosentase kunjungan Perpustakaan	10	10,07	100,7	Capaian ini masuk dalam kategori "Sangat Tinggi", yang mencerminkan efektivitas program promosi literasi dan daya tarik layanan perpustakaan yang mampu memenuhi target kunjungan secara presisi.	Akselerasi Transformasi Digital: Mengembangkan layanan perpustakaan berbasis digital (e-library) dan aksesibilitas katalog daring untuk meningkatkan jumlah kunjungan secara virtual, yang relatif lebih mudah ditingkatkan dibandingkan kunjungan fisik. Optimalisasi Perpustakaan Keliling: Memperluas jangkauan layanan jemput bola ke wilayah-wilayah yang memiliki keterbatasan akses (seperti sekolah pelosok atau fasilitas umum) guna mendongkrak

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										persentase kunjungan dari segmen non-reguler. Kalibrasi Target Tahun Mendatang: Mengingat kapasitas organisasi telah teruji mencapai target 10%, disarankan untuk melakukan stretching target menjadi 12-15% pada tahun 2026 dengan didukung inovasi program seperti "Wisata Literasi" atau "Pojok Baca Digital" Penguatan Kolaborasi Literasi: Menjalin kemitraan dengan komunitas literasi dan satuan pendidikan untuk menyelenggaraka

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										n kegiatan tematik di perpustakaan guna meningkatkan traffic kunjungan secara konsisten setiap bulannya.
			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Dinas Arsipus	-	-	-	-	tidak dianggarkan dalam DPA 2025	-
	Jumlah pemuda berprestasi	Orang	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Dinas Porabudpar	Presentase Organisasi Kepemudaan yang aktif	89.50%	84%	93.85	1. Tingginya tingkat partisipasi / keikutsertaan pemuda dalam mengikuti Seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten ; 2. Kualitas SDM yang mumpuni; 3. Peran Serta Masyarakat dalam mendukung Program Kepeloporan; 4. Dukungan Pemerintah baik di tingkat Desa, Kecamatan, dan Kabupaten.	meningkatkan koordinasi lintas organisasi kepemudaan dan memberikan kemudahan akses informasi dan fasilitas pendampingan kepemudaan

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Dinas Porabudpar	Presentase anggota pramuka yang terlatih	105	105	100.00	Ketepatan waktu Administrasi dari Lembaga atau Organisasi Penerima Hibah; Terlaksananya Koordinasi dan Komunikasi yang baik antara Pengampu Hibah dan Penerima Hibah.	melakukan evaluasi terhadap penerima hibah
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Dinas Porabudpar	Jumlah Cabang Olahraga yang berprestasi	22	13	59.09	Terlaksananya Koordinasi yang baik dengan Cabang Olahraga; Tingginya tingkat Partisipasi peserta dalam mengikuti kejuaraan olahraga multi event dan single event tingkat Kab/Kota.	meningkatkan koordinasi lintas perkumpulan olahraga dan memudahkan akses informasi, pelayanan dan fasilitas terhadap atlit terkait dengan event kejuaraan
Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Dinas Sosial Pppa	Persentase Program Responsif Gender pada Lembaga Pemerintah	100	100	100.00	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan indikator “Persentase Program Responsif Gender pada Lembaga Pemerintah” pada tahun 2025	Menginternalisasi Anggaran Responsif Gender (ARG) pada seluruh OPD melalui pendampingan penyusunan Gender Budget Statement (GBS) yang berkualitas.

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi 100% dan capaian sebesar 100% masuk kategori capaian kinerja “Sangat Tinggi” yang artinya berhasil mencapai kinerja dari target yang ditentukan. Pencapaian Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan. 1. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota dengan keluaran Jumlah PD yang Mendapatkan Pembinaan Pelembagaan PUG masuk dalam kategori capaian kinerja “Sangat Tinggi” dengan capaian 100% yang artinya berhasil mencapai kinerja dari target yang	

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									ditentukan. 2. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan keluaran Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota masuk dalam kategori capaian kinerja “Sangat Tinggi” dengan capaian 100% yang artinya berhasil mencapai kinerja dari target yang ditentukan. 3. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan	

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan keluaran Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang Mendapatkan Penguatan dan Pengembangan masuk dalam kategori capaian kinerja "Sangat Tinggi" dengan capaian 98% yang artinya berhasil mencapai kinerja dari target yang ditentukan.	
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Dinas Sosial Pppa	Persentase Layanan Penanganan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Diskriminasi terhadap Perempuan	100	100	100.00	Program Perlindungan Perempuan dengan indikator "Persentase Layanan Penanganan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Diskriminasi terhadap Perempuan" pada	Memperkuat fungsi UPTD PPA melalui sistem penanganan kasus terintegrasi dan layanan psikososial yang mudah diakses bagi penyintas kekerasan.

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi 100% dan capaian sebesar 100% masuk kategori capaian kinerja “Sangat Tinggi” yang artinya berhasil mencapai kinerja dari target yang ditentukan. Pencapaian Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan. 1. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota dengan keluaran Jumlah Layanan Rujukan yang Ditangani masuk dalam kategori capaian kinerja “Sangat Tinggi” dengan capaian 120% yang artinya gagal mencapai	

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									kinerja dari target yang ditentukan. 2. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota dengan keluaran Jumlah Layanan Rujukan yang Ditangani masuk dalam kategori capaian kinerja "Sangat Rendah" dengan capaian 14% yang artinya gagal mencapai kinerja dari target yang ditentukan. Hal ini disebabkan keadaan isidental terkait jumlah kasus yang ditangani berdasarkan data yang terlaporkan	
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Dinas Sosial Pppa	Persentase Lembaga/ Keluarga yang Mendapat Layanan Responsif Gender	100	100	100.00	Program Peningkatan Kualitas Keluarga dengan indikator "Persentase Lembaga/ Keluarga	Mengoptimalkan peran pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) dalam edukasi

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									yang Mendapat Layanan Responsif Gender" pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi 100% dan capaian sebesar 100% masuk kategori capaian kinerja "Sangat Tinggi" yang artinya berhasil mencapai kinerja dari target yang ditentukan. Pencapaian Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan. 1. Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan keluaran Jumlah Lembaga yang Mendapatkan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	pola asuh dan ketahanan ekonomi untuk menurunkan angka perceraian dan KDRT.

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									masuk dalam kategori capaian kinerja “Sangat Tinggi” dengan capaian 100% yang artinya gagal mencapai kinerja dari target yang ditentukan. 2. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan keluaran Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Mendapatkan Penguatan dan Pengembangan masuk dalam kategori capaian kinerja “Sangat Tinggi” dengan capaian 200% yang artinya gagal	

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									mencapai kinerja dari target yang ditentukan. 3. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan keluaran Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan KG dan Hak Anak masuk dalam kategori capaian kinerja "Sangat Tinggi" dengan capaian 129% yang artinya gagal mencapai kinerja dari target yang ditentukan.	
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Dinas Sosial Pppa	Persentase Perangkat Daerah yang Mempunyai Data Gender dan Anak	100	100	100.00	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi 100% dan capaian sebesar 100% masuk kategori capaian kinerja	Mengintegrasikan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) ke dalam portal satu data daerah guna menjamin ketersediaan data pilah yang akurat

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									"Sangat Tinggi" yang artinya berhasil mencapai kinerja dari target yang ditentukan. Pencapaian Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan 1. Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan keluaran Jumlah Perangkat Daerah yang Menghimpun Data Gender serta Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak masuk dalam kategori capaian kinerja "Sangat Tinggi" dengan capaian 100% yang artinya berhasil mencapai kinerja dari target yang ditentukan.	untuk perencanaan.
			PROGRAM PEMENUHAN	Dinas Sosial Pppa	Persentase Kecamatan yang Mendapatkan	100	55	55.00	Program Pengarusutamaan Hak Anak (PHA)	Memaksimalkan capaian Kabupaten/Kota

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			HAK ANAK (PHA)		Predikat Kecamatan Layak Anak				dengan indikator "Persentase Kecamatan yang Mendapatkan Predikat Kecamatan Layak Anak" pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi 55% dan capaian sebesar 55% masuk kategori capaian kinerja "Sangat Rendah" yang artinya gagal mencapai kinerja dari target yang ditentukan. Hal tersebut disebabkan belum semua kecamatan memiliki sk gugus tugas layak anak, sehingga prosentase dari 20 kecamatan hanya 11 kecamatan yang memimiliki	Layak Anak (KLA) melalui penguatan peran Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor dalam pemenuhan hak sipil.
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Dinas Sosial Pppa	Persentase Layanan terhadap Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	100	100	100.00	Program Perlindungan Khusus Anak dengan indikator "Persentase Layanan terhadap Anak yang Memerlukan Perlindungan	Meningkatkan upaya preventif dan kuratif bagi anak dalam situasi darurat atau korban kekerasan melalui penguatan

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Khusus" pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi 100% dan capaian sebesar 100% masuk kategori capaian kinerja "Sangat Tinggi" yang artinya berhasil mencapai kinerja dari target yang ditentukan. Pencapaian Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan. 1. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan keluaran Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak yang Ditangani masuk dalam kategori capaian kinerja "Sangat Tinggi" dengan capaian 200% yang artinya gagal mencapai kinerja dari target	jejaring perlindungan berbasis masyarakat.

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									yang ditentukan. 2. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan keluaran Jumlah Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Pelayanan Perlindungan Khusus Anak masuk dalam kategori capaian kinerja “Sangat Tinggi” dengan capaian 97% yang artinya gagal mencapai kinerja dari target yang ditentukan. 3. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah	

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Kabupaten/Kota dengan keluaran Jumlah Laporan Hasil Kegiatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota masuk dalam kategori capaian kinerja "Tercapai" dengan capaian 99% yang artinya berhasil mencapai kinerja dari target yang ditentukan.	
Meningkatkan birokrasi yang akuntabel dan efektif, serta pelayanan publik yang prima	Nilai SAKIP	Nilai	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah	Persentase Rumusan Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Kesra yang terimplementasi	100%	100%	100%	Persentase rumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang terimplementasi pada Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat ditargetkan 100% dan terealisasi 100% dengan capaian 100%, sehingga termasuk kategori tercapai. Capaian ini	Ke depan perlu mempertahankan capaian tersebut melalui penguatan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi kebijakan antar perangkat daerah, serta meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan agar

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									menunjukkan bahwa seluruh rumusan kebijakan yang disusun di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat telah diimplementasikan dengan baik. Keberhasilan tersebut didukung oleh koordinasi dan sinergi yang kuat antara Sekretariat Daerah dengan perangkat daerah terkait dalam proses penyusunan, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan daerah.	pelaksanaannya tetap selaras dengan tujuan pembangunan daerah.
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Sekretariat Daerah	Persentase rumusan kebijakan di bidang perekonomian dan pembangunan yang terimplementasi	100%	100%	100%	Persentase rumusan kebijakan di bidang perekonomian dan pembangunan yang terimplementasi pada Program Perekonomian dan Pembangunan ditargetkan 100% dan terealisasi 100% dengan capaian 100%, sehingga termasuk kategori tercapai.	Ke depan perlu meningkatkan kualitas perumusan kebijakan berbasis data dan evaluasi kinerja, memperkuat koordinasi lintas sektor dalam implementasi kebijakan pembangunan, serta memastikan

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Hal ini menunjukkan bahwa rumusan kebijakan yang disusun dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah telah dilaksanakan secara optimal oleh perangkat daerah terkait. Keberhasilan ini juga didukung oleh koordinasi dan sinergi yang baik antara Sekretariat Daerah dengan perangkat daerah dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah.	setiap kebijakan yang dirumuskan dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Bappeda	persentase outcome program pembangunan daerah dengan predikat capaian kinerja minimal tinggi	78.5	95.42	121.5541401	Persentase outcome program pembangunan daerah dengan predikat capaian kinerja minimal tinggi pada Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah ditargetkan 78,5% dan	Ke depan perlu mempertahankan capaian tersebut melalui penguatan sistem pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, peningkatan kualitas perencanaan berbasis data dan

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									terealisasi 95,42% dengan capaian 121,55%, sehingga termasuk kategori tercapai. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar program pembangunan daerah telah memberikan hasil kinerja yang baik dan berada pada kategori capaian tinggi. Hal ini mencerminkan bahwa proses perencanaan, pengendalian, serta evaluasi pembangunan daerah telah berjalan secara efektif dan mampu mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan program pembangunan daerah.	kinerja, serta optimalisasi koordinasi dengan perangkat daerah agar setiap program pembangunan dapat memberikan outcome yang lebih optimal bagi masyarakat.
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN	Bappeda	persentase sasaran kinerja urusan pemerintahan pada renstra perangkat daerah dengan predikat capaian	82	95.45	116.402439	Persentase sasaran kinerja urusan pemerintahan pada Renstra Perangkat Daerah dengan predikat capaian	Ke depan perlu meningkatkan kualitas sinkronisasi perencanaan pembangunan

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			PEMBANGUNAN DAERAH		kinerja minimal tinggi				kinerja minimal tinggi pada Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah ditargetkan 82% dan terealisasi 95,45% dengan capaian 116,40%, sehingga termasuk kategori tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar sasaran kinerja perangkat daerah yang tercantum dalam dokumen Renstra telah menunjukkan capaian kinerja yang baik. Keberhasilan ini didukung oleh koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan yang efektif antara Bappeda dengan seluruh perangkat daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan program	antar perangkat daerah, memperkuat integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, serta meningkatkan pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									pembangunan daerah.	
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Bappeda	persentase dokumen penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100	90	90	Persentase dokumen penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 90% dengan tingkat capaian 90%, sehingga termasuk kategori tercapai dengan catatan. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar dokumen hasil penelitian dan pengembangan daerah telah dimanfaatkan atau ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan maupun program pembangunan daerah. Namun demikian, masih terdapat sebagian hasil penelitian yang belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal dalam proses perumusan	Ke depan perlu meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan daerah melalui penguatan koordinasi antara Bappeda dengan perangkat daerah terkait, peningkatan diseminasi hasil penelitian kepada pemangku kepentingan, serta mendorong integrasi hasil kajian penelitian sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah.

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									kebijakan maupun pelaksanaan program pembangunan.	
					persentase hasil inovasi dan teknologi daerah yang ditindaklanjuti	57	95.65	167.8070175	Persentase hasil inovasi dan teknologi daerah yang ditindaklanjuti ditargetkan sebesar 57% dan terealisasi 95,65% dengan tingkat capaian 167,81%, sehingga termasuk kategori tercapai. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar hasil inovasi dan pengembangan teknologi daerah telah berhasil ditindaklanjuti dalam bentuk implementasi kebijakan, program, maupun kegiatan oleh perangkat daerah. Hal ini mencerminkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pemanfaatan inovasi sebagai salah satu upaya peningkatan kinerja	Ke depan perlu mempertahankan dan meningkatkan pemanfaatan hasil inovasi dan teknologi daerah melalui penguatan koordinasi antar perangkat daerah, peningkatan dukungan terhadap pengembangan inovasi daerah, serta mendorong replikasi inovasi yang berhasil agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.	
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Dinas Arsipus	Prosentase Kepatuhan Publik Terhadap Kebijakan Kearsipan	92,30	100	108,34	Capaian yang melampaui target (108,34%) menunjukkan tingginya kesadaran stakeholder terhadap tata kelola arsip.	Tindak lanjut ke depan adalah melakukan Transformasi Arsip Statis ke Digital menggunakan sistem manajemen arsip elektronik untuk memastikan aksesibilitas data yang lebih cepat dan aman dari kerusakan fisik.
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Dinas Arsipus	Prosentase Berkas yang Dilindungi dan Diselamatkan	1	1	100	Realisasi yang tepat sasaran (100%) menunjukkan keberhasilan dalam pengamanan dokumen vital.	indak lanjut ke depan adalah menerapkan Manajemen Pemeliharaan Preventif (seperti pengontrolan suhu dan kelembapan ruangan) serta enkripsi digital untuk arsip vital guna menjamin ketahanan dokumen dari ancaman

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										bencana maupun degradasi fisik.
			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Dinas Arsipus	-	0	0	0	tidak dianggarkan dalam DPA 2025	-
	Opini BPK terhadap LKPD	Opini	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Bpkad	Persentase kepatuhan OPD dalam penyusunan dokumen keuangan daerah sesuai standart	80%	88,94%	101%	1. Efektivitas Pendampingan: Kepatuhan sebesar 88,94% menunjukkan bahwa upaya pembinaan dan koordinasi BPKAD kepada OPD telah berjalan sangat efektif. Angka ini mencerminkan bahwa mayoritas OPD sudah memahami dan mampu menerapkan regulasi keuangan yang dinamis. 2. Sisa 11,06%: Penting untuk mengidentifikasi 11,06% OPD yang belum mencapai standar. Apakah ini disebabkan oleh kendala teknis (kurangnya SDM pengelola keuangan	Untuk menjaga tren positif dan menuntaskan sisa persentase ketidakpatuhan, berikut adalah strategi yang disarankan: 1. Deep Dive Analysis (Evaluasi 11,06%) Identifikasi OPD mana saja yang belum patuh. Lakukan pendampingan intensif (klinik keuangan) khusus bagi OPD tersebut. Jangan berikan sanksi dulu, melainkan cari tahu bottleneck (hambatan) spesifik yang mereka hadapi.

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									di OPD tersebut), kendala sistem (hambatan pada aplikasi), atau masalah koordinasi? 3. Kualitas vs Kepatuhan: Kepatuhan administratif adalah langkah awal (prasyarat). Keberhasilan di level ini harus menjadi pijakan untuk meningkatkan kualitas substansi laporan, bukan hanya kesesuaian dokumen secara formalitas.	2. Standardisasi Dokumen Keuangan Buat template atau "Checklist Mandiri" (Self-Assessment Tool) bagi OPD sebelum dokumen diajukan ke BPKAD. Dengan adanya panduan standar yang seragam, OPD dapat melakukan quality control internal sebelum dokumen diserahkan. 3. Reward and Recognition Berikan apresiasi atau penghargaan kepada OPD yang memiliki tingkat kepatuhan 100% tepat waktu. Hal ini akan menciptakan peer pressure yang positif bagi OPD lain untuk

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										meningkatkan performanya di tahun anggaran berikutnya. 4. Penguatan Key Person di OPD Pastikan pengelola keuangan (Bendahara/PPK) di masing-masing OPD mendapatkan pelatihan berkelanjutan, bukan sekadar sosialisasi satu arah. Fokuskan pada pemahaman regulasi terbaru agar tidak ada lagi kesalahan dasar dalam penyusunan dokumen.
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Bpkad	Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan BMD sesuai standar	75	75	100	1. Stabilitas Kepatuhan: Mencapai 100% dari target menunjukkan bahwa seluruh OPD yang diproyeksikan dalam program telah memenuhi	target 75% telah terpenuhi dengan baik, maka kedepan perlu melakukan upgrade strategi menuju optimalisasi aset:

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									standar teknis pengelolaan BMD. Ini adalah fondasi yang sangat kuat untuk mengamankan aset daerah agar tidak terjadi double recording atau kehilangan aset. 2. Kapasitas Sistem: Keberhasilan ini mengindikasikan bahwa sistem informasi aset (seperti SIPD-Penatausahaan BMD) telah diadopsi dengan baik oleh pengurus barang di masing-masing OPD. 3. Potensi Maintenance: Karena angka sudah mencapai 100% dari target, tantangan utamanya bukan lagi "memenuhi standar," melainkan "menjaga agar standar tersebut tetap terjaga sepanjang waktu"	1. Audit Kualitas Data (Data Cleansing) Sesuai standar saja tidak cukup. Lakukan rekonsiliasi aset secara berkala (triwulanan) untuk memastikan kondisi fisik barang di lapangan match dengan data di sistem. Seringkali, data secara sistem "sesuai standar," namun kondisi fisik barang sudah rusak berat atau tidak ditemukan. 2. Digitalisasi Berbasis QR/RFID Untuk meningkatkan efisiensi, dorong penggunaan sistem tagging aset (QR Code atau RFID). Ini akan

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									(bukan hanya saat audit).	mempermudah pengurus barang melakukan opname fisik secara cepat dan akurat melalui smartphone. 3. Pemanfaatan Aset (Optimization) BMD yang "sesuai standar" harus bisa dimanfaatkan. Identifikasi aset-aset yang statusnya idle (menganggur) atau belum dimanfaatkan secara optimal. BPKAD bisa memfasilitasi skema pemanfaatan BMD (seperti sewa atau KSP) untuk meningkatkan pendapatan daerah. 4. Penyiapan Succession Planning

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Pengurus Barang Jangan biarkan kualitas pengelolaan BMD bergantung pada individu tertentu di OPD. Buatlah modul pelatihan atau SOP yang terdigitalisasi, sehingga jika terjadi mutasi pengurus barang, transisi tanggung jawab pengelolaan aset tetap terjaga dan tidak menurunkan kualitas data.
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Bapenda	Persentase Kepatuhan Wajib Pajak/Retribusi/ Wajib Pungut	90.5	90.4	99.89	Indikator capaian Program pada Renstra 2024-2026 sampai dengan Tribulan III jumlah wajib pajak yang membayar tepat waktu tercapai sebesar 90.4 dengan rincian target 992.700 realisasi sebesar 623.707, capaian intermasuk kategori tercapai hal ini di karenakan	Implementasi Tax Clearance Digital: Memperkuat integrasi data perpustakaan dengan layanan publik lainnya (misal: syarat pengurusan perizinan) untuk memaksa peningkatan kepatuhan secara sistemik.

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									banyaknya wajib pajak yang taat / tepat waktu dalam membayar	Penguatan Audit Compliance: Melakukan uji petik atau pemeriksaan lapangan secara acak kepada Wajib Pungut yang memiliki riwayat pelaporan tidak konsisten guna meminimalisir gap realisasi. Modernisasi Kanal Pembayaran: Memperluas kerjasama dengan berbagai platform digital (e-commerce/perbankan) untuk memberikan kemudahan akses pembayaran guna menghilangkan hambatan jarak dan waktu bagi Wajib Pajak. Pemberian

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Insentif dan Disinsentif: Menyusun kebijakan reward bagi WP patuh dan penerapan sanksi administratif yang lebih tegas bagi keterlambatan pelaporan untuk mendorong pencapaian target 100% pada periode mendatang.
	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Inspektorat	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan unsur SPIP	70 %	106.66%	152.37	Komitmen pimpinan dalam mengimplementasikan elemen SPIP secara konsisten di seluruh lini organisasi.	Melakukan evaluasi mandiri (Self-Assessment) secara berkala untuk mencapai target yang ditetapkan
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Inspektorat	Persentase Perangkat Daerah yang melakukan FCP (Fraud Control Planning)	15 %	15%	100	Keberhasilan ini dipengaruhi secara langsung oleh intensitas layanan pendampingan dan asistensi kepada seluruh Perangkat Daerah.	Melaksanakan peran Inspektorat selaku consulting partner secara maksimal

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah	Persentase Rumusan Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Kesra yang terimplementasi	100.00	100.00	100.00	Komitmen dari para pimpinan dan seluruh jajaran serta upaya koordinasi yang kuat dengan para pemangku kepentingan	Melakukan Evaluasi Dampak Kebijakan (Policy Impact Assessment) terhadap rumusan kebijakan yang telah terimplementasi untuk mengukur sejauh mana kebijakan tersebut mampu meningkatkan indeks kesejahteraan rakyat.
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Sekretariat Daerah	Persentase rumusan kebijakan di bidang perekonomian dan pembangunan yang terimplementasi	100.00	100.00	100.00	Komitmen dari para pimpinan dan seluruh jajaran serta upaya koordinasi yang kuat dengan para pemangku kepentingan	Memperkuat fungsi monitoring terintegrasi terhadap kebijakan ekonomi makro daerah guna memastikan sinkronisasi antara regulasi daerah dengan percepatan realisasi investasi dan pengendalian inflasi.

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Sekretariat Dewan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	84	85.25	101.49	tercapainya Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD terdapat Indikator 3 Indikator yaitu Presentasi Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan target Kinerja 100%, dengan realisasi kinerja dengan Nilai 100%, dikarenakan dari 50 Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk seluruhnya terfasilitasi dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi DPRD, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan dengan Target Kinerja Nilai 83 dengan Realisasi Kinerja 86,51 , serta Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dengan target Nilai 83 dengan Realisasi	Ke depan perlu mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan melalui peningkatan profesionalitas aparatur, optimalisasi sistem pelayanan administrasi persidangan, serta peningkatan transparansi informasi terkait kegiatan DPRD kepada masyarakat.

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Kinerja 86,92. karena didukung kegiatan dilaksanakan selama ini, adapun kegiatan sebagai berikut : 1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 2. Pembahasan Kebijakan Anggaran 3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 4. Peningkatan Kapasitas DPRD 5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 7. Pembahasan Kerja Sama Daerah 8. Fasilitasi Tugas DPRD	
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	84	86.34	102.79	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan ditargetkan sebesar 84 dan terealisasi	Ke depan perlu meningkatkan kualitas layanan melalui penguatan sistem administrasi penganggaran dan pengawasan,

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									86,34 dengan capaian 102,79%, sehingga termasuk kategori tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan dalam mendukung fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD telah berjalan dengan baik dan mampu memenuhi harapan para pemangku kepentingan.	peningkatan kompetensi aparatur, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses kerja di lingkungan Sekretariat DPRD.
					Persentase Fasilitasi Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100	100	100.00	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD ditargetkan 100% dan terealisasi 100% sehingga capaian 100% dan termasuk kategori tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD telah mampu memfasilitasi secara optimal pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD baik dalam fungsi legislasi, penganggaran,	Ke depan perlu mempertahankan capaian tersebut dengan terus meningkatkan koordinasi antara Sekretariat DPRD dengan pimpinan dan anggota DPRD serta meningkatkan kualitas dukungan administratif dan teknis dalam pelaksanaan tugas-tugas kedewanan.

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									maupun pengawasan.	
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Dinas Dukcapil	Cakupan kepemilikan KTP	99.6	99.02	99.41	Faktor Keberhasilan 1) Sosialisasi admindukcapil dan pelayanan jemput bola kepada masyarakat secara terus menerus dilaksanakan ke Kecamatan/Desa, sekolahsekolah, pelayanan khusus Difabel dan Lansia yang termasuk kelompok rentan serta anak kondisi 5 (Lima) Kelompok RANHAM serta ODGJ; 2) Jemput bola Pelayanan KIA disekolah dasar untuk capaian kinerja KIA dengan dukungan Logistik yang memadai.	Terhadap beberapa permasalahan yang ada dan/atau sebagai bentuk perbaikan dalam rangka pencapaian target indikator Kinerja Dinas pada pereode berikutnya, terdapat langkah perbaikan: 1. Sosialisai dan Penerapan Identitas Kependudukan Digital kepada Masyarakat (IKD); 2. Pelayanan Jemput bola untuk pendekatan dan percepatan pelayanan adminduk kepada masyarakat; 3. Melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										kegiatan dan anggaran; 4. Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi anggaran secara internal sehingga revisi anggaran dapat diminimalisir; 5. Memastikan perubahan kebijakan tidak berdampak pada program/kegiatan /alokasi anggaran Prioritas 6. Meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan.
					Cakupan Kepemilikan KIA	60	52,10	86.83	Faktor Keberhasilan 1) Sosialisasi admindukcapil dan pelayanan jemput bola kepada masyarakat secara terus menerus dilaksanakan ke Kecamatan/Desa, sekolahsekolah, pelayanan khusus	Terhadap beberapa permasalahan yang ada dan/atau sebagai bentuk perbaikan dalam rangka pencapaian target indikator Kinerja Dinas pada pereode

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Difabel dan Lansia yang termasuk kelompok rentan serta anak kondisi 5 (Lima) Kelompok RANHAM serta ODGJ; 2) Jemput bola Pelayanan KIA disekolah dasar untuk capaian kinerja KIA dengan dukungan Logistik yang memadai.	berikutnya, terdapat langkah perbaikan: 1. Sosialisai dan Penerapan Identitas Kependudukan Digital kepada Masyarakat (IKD); 2. Pelayanan Jemput bola untuk pendekatan dan percepatan pelayanan adminduk kepada masyarakat; 3. Melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran; 4. Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi anggaran secara internal sehingga revisi anggaran dapat diminimalisir;

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										5. Memastikan perubahan kebijakan tidak berdampak pada program/kegiatan /alokasi anggaran Prioritas 6. Meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan.
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Dinas Dukcapil	Cakupan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	94%	97,24	103,4%	Faktor Keberhasilan 1) Sosialisasi admindukcapil dan pelayanan jemput bola kepada masyarakat secara terus menerus dilaksanakan ke Kecamatan/Desa, sekolahsekolah, pelayanan khusus Difabel dan Lansia yang termasuk kelompok rentan serta anak kondisi 5 (Lima) Kelompok RANHAM serta ODGJ; 2) Jemput bola Pelayanan KIA disekolah dasar untuk capaian kinerja KIA dengan	Terhadap beberapa permasalahan yang ada dan/atau sebagai bentuk perbaikan dalam rangka pencapaian target indikator Kinerja Dinas pada pereode berikutnya, terdapat langkah perbaikan: 1. Sosialisai dan Penerapan Identitas Kependudukan Digital kepada Masyarakat (IKD); 2. Pelayanan Jemput bola untuk

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									dukungan Logistik yang memadai.	pendekatan dan percepatan pelayanan adminduk kepada masyarakat; 3. Melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran; 4. Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi anggaran secara internal sehingga revisi anggaran dapat diminimalisir; 5. Memastikan perubahan kebijakan tidak berdampak pada program/kegiatan /alokasi anggaran Prioritas 6. Meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan.

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Dinas Dukcapil	Jumlah Instansi yang memanfaatkan data kependudukan	11 Instansi	9 Instansi	81%	Faktor pendukung Pelayanan dengan Inovasi-inovasi yang dimiliki Dispendukcapil seperti SIANIK (Antrian Online), Sistem Informasi Registrasi Pengajuan, Sistem Monev Pelayanan. Pemanfaatan Sosialisasi melalui media sosial, dan penyewaan baliho reklame untuk promosi pemanfaatan IKD dan Prosedur Instalasi IKD untuk meningkatkan pemahaman masyarakat untuk memanfaatkan terknologi informasi dalam penerbitan dokumen kependudukannya dengan tata caranya serta untuk mengenalkan IKD (Identitas Kependudukan Digital) Pendekatan Pelayanan kepada	Terhadap beberapa permasalahan yang ada dan/atau sebagai bentuk perbaikan dalam rangka pencapaian target indikator Kinerja Dinas pada pereode berikutnya, terdapat langkah perbaikan: 1. Sosialisai dan Penerapan Identitas Kependudukan Digital kepada Masyarakat (IKD); 2. Pelayanan Jemput bola untuk pendekatan dan percepatan pelayanan adminduk kepada masyarakat; 3. Melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran;

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									masyarakat di 20 Kecamatan dan 284 desa/kelurahan dengan Pelayanan Aplikasi Sedudo (Sistem Elektronik Terpadu Daerah Online) yang merupakan rencana kerja dispendukcapil Kabupaten Nganjuk; Layanan Informasi Administrasi Kependudukan (chatbot) Mengambil Antrian Melalui Chat Whatapps : 0812 2160 0100; Layanan Pengaduan dan Konsultasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk Pengaduan dan Konsultasi akan dilayani pada Senin-jum'at Pukul 08.00-14.30 WIB melalui WhatApps : 0822 3154 0889 (kirimkan pesan dengan format :	4. Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi anggaran secara internal sehingga revisi anggaran dapat diminimalisir; 5. Memastikan perubahan kebijakan tidak berdampak pada program/kegiatan /alokasi anggaran Prioritas 6. Meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan.

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Nama, NIK, dan pesan pengaduan.) Melaksanakan Pelayanan Di Mall Pelayanan Publik Nyawiji Kabupaten Nganjuk	
			PROGRAM PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Dinas Dukcapil	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	75 dok	58 dok	77%	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan lainnya yang tersusun pada Program Penyusunan Profil Kependudukan ditargetkan sebanyak 75 dokumen dan terealisasi 58 dokumen dengan capaian 77%, sehingga termasuk kategori tidak tercapai. Namun demikian, penyusunan Buku Profil Kependudukan tetap dapat dilaksanakan dengan dukungan data konsolidasi bersih yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Dukcapil	Ke depan perlu meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam memperoleh data konsolidasi kependudukan secara tepat waktu, serta memperkuat pemanfaatan sistem informasi administrasi kependudukan dalam penyusunan profil kependudukan agar seluruh target dokumen dapat disusun secara optimal dan tepat waktu.

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									setiap semester. Selain itu, penerapan SIAK terpusat dengan basis data yang tersentralisasi turut mendukung peningkatan kualitas data kependudukan sehingga meminimalisir kemungkinan data ganda dan anomali data.	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Dinas PMD	Jumlah Desa Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Tata Kelola Pemerintahan Desa	260	0	0	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan administrasi tata kelola pemerintahan desa pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa ditargetkan sebanyak 260 desa dan belum terealisasi pada periode pelaporan sehingga capaian 0%. Hal ini disebabkan karena kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi	Ke depan perlu memastikan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan serta meningkatkan monitoring pelaksanaan kegiatan agar target pembinaan kepada seluruh desa dapat tercapai secara optimal.

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Pemerintahan Desa dijadwalkan untuk dilaksanakan pada Triwulan IV sehingga belum tercatat realisasinya pada periode evaluasi.	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Se Kabupaten Nganjuk	Persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib	100%	90%	90%	Angka 90% merupakan dataa akumulasi dari 20 kecamatan menunjukkan bahwa sebagian besar pelayanan berjalan sesuai alur, namun ada hambatan yang menyebabkan 10% kegiatan tidak memenuhi standar "tertib" (bisa jadi terkait keterlambatan waktu pelayanan, kurang lengkapnya dokumen, atau kendala koordinasi lapangan)	Capaian 90% menunjukkan bahwa secara umum layanan sudah berjalan, namun masih ada ruang perbaikan sebesar 10% untuk mencapai pelayanan prima. Fokus utama bukan sekadar mengejar angka, melainkan memastikan bahwa setiap warga yang datang ke kantor kecamatan mendapatkan layanan yang tepat waktu, akurat, dan ramah.
			PROGRAM PEMBERDAYAAN	Dinas PMD	-	-	-	-	program ini tidak dianggarkan dalam DPA 2025 dan	-

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						diganti dengan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Satpol PP	Persentase kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani	726	572	78.79	tidak tercapainya program ini dikarenakan data realisasi yang diambil sampai dengan TW III	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretariat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	85,8	83,6	94%	Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ditargetkan sebesar 85,8 dan terealisasi 83,6 dengan tingkat capaian 94%, sehingga termasuk kategori tercapai dengan catatan. Capaian ini menunjukkan bahwa implementasi sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan	Ke depan perlu meningkatkan kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) melalui penguatan perencanaan kinerja berbasis hasil (outcome), peningkatan kualitas pengukuran dan pelaporan kinerja, serta optimalisasi pemanfaatan hasil evaluasi

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Sekretariat Daerah telah berjalan dengan cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, seperti kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, serta pemanfaatan hasil evaluasi kinerja dalam pengambilan keputusan.	kinerja sebagai dasar perbaikan program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah.
Meningkatkan transformasi digital pemerintahan daerah	Indeks SPBE	Indeks	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Diskominfo	Nilai Aspek TIK	2.5	1.67	66,8%	- Ketersediaan dan kesiapan infrastruktur TIK, jaringan intra, dan pusat data pemerintah daerah. - Penerapan standar teknis dan arsitektur SPBE yang konsisten. - Koordinasi lintas perangkat daerah dalam pengelolaan dan pemanfaatan sistem digital.	- Melakukan pemeliharaan dan pengembangan sistem digital secara berkelanjutan. - Memperkuat tata kelola SPBE agar capaian Tahun 2025 menjadi baseline yang kuat bagi target Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika 2025–2029. - Meningkatkan kapasitas SDM TIK untuk

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										menjaga kualitas layanan digital.
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Diskominfo	Skor Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Nganjuk	80	87.09	109%	- Komitmen perangkat daerah dalam pengelolaan dan penyebarluasan informasi publik. - Peningkatan partisipasi perangkat daerah dalam pengelolaan media komunikasi dan layanan informasi. - Dukungan sarana komunikasi publik yang relatif memadai.	- Menyiapkan data, dokumen, dan bukti pendukung secara lebih sistematis untuk mendukung penilaian eksternal. - Meningkatkan koordinasi dan pembinaan kepada perangkat daerah terkait standar keterbukaan informasi publik. - Menjadikan capaian Tahun 2025 sebagai baseline peningkatan kinerja keterbukaan informasi publik pada periode Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika 2025-2029.
			PROGRAM PENYELENGGARAAN	Diskominfo	Nilai Tingkat kematangan layanan data terbuka	3	4	133 %	- Meningkatnya koordinasi antar perangkat daerah	- Memperkuat perencanaan output statistik

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			STATISTIK SEKTORAL						dalam penerapan prinsip Satu Data Indonesia. - Dukungan kebijakan dan kelembagaan dalam pengelolaan data statistik sektoral. - Peningkatan pemahaman perangkat daerah terhadap pentingnya kualitas data.	sektoral agar selaras dengan kebutuhan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika 2025-2029. - Mengoptimalkan forum satu data daerah sebagai sarana koordinasi dan sinkronisasi data. - Menjadikan capaian Tahun 2025 sebagai dasar peningkatan kualitas statistik sektoral pada periode Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika 2025–2029.
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Diskominfo	Persentase Sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip system manajemen keamanan informasi (SMKI) yang ada pada pemerintah daerah	88%	96,40%	110%	- Komitmen pemerintah daerah dalam penerapan standar keamanan informasi dan audit keamanan SPBE. - Dukungan kebijakan dan koordinasi dalam pelaksanaan	- Melanjutkan penerapan dan evaluasi sistem manajemen keamanan informasi secara bertahap. - Meningkatkan koordinasi dan pembinaan

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									persandian dan pengamanan informasi.	kepada perangkat daerah terkait keamanan informasi. - Menjadikan capaian Tahun 2025 sebagai fondasi penguatan keamanan informasi pada periode Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika 2025–2029.
Meningkatkan profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Bkpsdm	Persentase ASN yang memenuhi kualifikasi Pendidikan	90%	89,52%	99,47%	1. Faktor Kebijakan Daerah : Pemerintah Daerah telah menetapkan regulasi dalam implementasi Sistem Merit diantaranya Peraturan Bupati tentang Manajemen Talenta ASN, Surat Keputusan Bupati tentang Tim Komite Manajemen Talenta, Peraturan Bupati tentang Satnadar Kompetensi Jabatan, Peraturan Bupati tentang Kode Etik ASN, Peraturan Bupati	1. Menyusun dan memperbarui regulasi internal terkait penerapan Sistem Merit dan Manajemen Talenta agar selaras dengan ketentuan BKN serta kebutuhan organisasi 2. Menyusun rencana pengembangan kompetensi yang berbasis gap kompetensi dan kebutuhan organisasi, melalui

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) 2. Faktor Kelembagaan : Koordinasi dan sinergi yang efektif antara BKPSDM dengan instansi pengawas eksternal seperti, BKN, serta perangkat daerah lainnya, sehingga setiap kebijakan dan proses kepegawaian tetap sesuai dengan prinsip merit dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Faktor Inovasi : Digitalisasi Manejemen Talenta (Aplikasi SiMATA), Nine Box Talenta : Sistem yang secara otomatis menempatkan pegawai ke dalam 9 kotak talenta berdasarkan integrasi nilai kinerja (E-Kinerja) dan nilai kompetensi	pendidikan, pelatihan, coaching, mentoring, dan penugasan khusus. 3. Melaksanakan pemetaan talenta ASN berbasis kinerja, kompetensi, dan potensi sebagai dasar penempatan, pengembangan, dan suksesi jabatan 4. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi kepegawaian untuk mendukung pendataan, pemantauan, dan evaluasi penerapan Sistem Merit dan Manajemen Talenta.

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Assessment), Real-time Dashboard: Pimpinan dapat melihat ketersediaan suksesor (calon pengganti) untuk jabatan kritis secara instan melalui sistem tanpa menunggu laporan manual, Pengembangan kompetensi ASN berbasis Corporate University (Corpu), Computer Assisted Test (CAT) Assesmnet : Menggunakan sistem ujian berbasis komputer untuk mengukur kompetensi manajerial dan sosial kultural.	
					Persentase Pemenuhan Formasi jabatan structural	80%	80,42%	100,52%	1. Faktor Kebijakan Daerah : Pemerintah Daerah telah menetapkan regulasi dalam implementasi Sistem Merit diantaranya Peraturan Bupati tentang Manajemen Talenta ASN, Surat Keputusan Bupati	1. Menyusun dan memperbarui regulasi internal terkait penerapan Sistem Merit dan Manajemen Talenta agar selaras dengan ketentuan BKN serta kebutuhan organisasi

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									tentang Tim Komite Manajemen Talenta, Peraturan Bupati tentang Satnadar Kompetensi Jabatan, Peraturan Bupati tentang Kode Etik ASN, Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) 2. Faktor Kelembagaan : Koordinasi dan sinergi yang efektif antara BKPSDM dengan instansi pengawas eksternal seperti, BKN, serta perangkat daerah lainnya, sehingga setiap kebijakan dan proses kepegawaian tetap sesuai dengan prinsip merit dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Faktor Inovasi : Digitalisasi Manejemen Talenta (Aplikasi SiMATA), Nine Box Talenta : Sistem yang secara	2. Menyusun rencana pengembangan kompetensi yang berbasis gap kompetensi dan kebutuhan organisasi, melalui pendidikan, pelatihan, coaching, mentoring, dan penugasan khusus. 3. Melaksanakan pemetaan talenta ASN berbasis kinerja, kompetensi, dan potensi sebagai dasar penempatan, pengembangan, dan suksesi jabatan 4. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi kepegawaian untuk mendukung pendataan, pemantauan, dan evaluasi

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									otomatis menempatkan pegawai ke dalam 9 kotak talenta berdasarkan integrasi nilai kinerja (E-Kinerja) dan nilai kompetensi Assessment), Real-time Dashboard: Pimpinan dapat melihat ketersediaan suksesor (calon pengganti) untuk jabatan kritis secara instan melalui sistem tanpa menunggu laporan manual, Pengembangan kompetensi ASN berbasis Corporate University (Corpu), Computer Assisted Test (CAT) Assesmnet : Menggunakan sistem ujian berbasis komputer untuk mengukur kompetensi manajerial dan sosial kultural.	penerapan Sistem Merit dan Manajemen Talenta.
					Persentase OPD yang data	100%	99,18%	99,19%	1. Faktor Kebijakan Daerah : Pemerintah	1. Menyusun dan memperbarui

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					pegawainya terupdate				Daerah telah menetapkan regulasi dalam implementasi Sistem Merit diantaranya Peraturan Bupati tentang Manajemen Talenta ASN, Surat Keputusan Bupati tentang Tim Komite Manajemen Talenta, Peraturan Bupati tentang Satnadar Kompetensi Jabatan, Peraturan Bupati tentang Kode Etik ASN, Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) 2. Faktor Kelembagaan : Koordinasi dan sinergi yang efektif antara BKPSDM dengan instansi pengawas eksternal seperti, BKN, serta perangkat daerah lainnya, sehingga setiap kebijakan dan proses kepegawaian tetap sesuai dengan prinsip merit dan ketentuan peraturan	regulasi internal terkait penerapan Sistem Merit dan Manajemen Talenta agar selaras dengan ketentuan BKN serta kebutuhan organisasi 2. Menyusun rencana pengembangan kompetensi yang berbasis gap kompetensi dan kebutuhan organisasi, melalui pendidikan, pelatihan, coaching, mentoring, dan penugasan khusus. 3. Melaksanakan pemetaan talenta ASN berbasis kinerja, kompetensi, dan potensi sebagai dasar penempatan, pengembangan, dan suksesi jabatan 4.

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									perundang-undangan. 3. Faktor Inovasi : Digitalisasi Manejemen Talenta (Aplikasi SiMATA), Nine Box Talenta : Sistem yang secara otomatis menempatkan pegawai ke dalam 9 kotak talenta berdasarkan integrasi nilai kinerja (E-Kinerja) dan nilai kompetensi Assessment), Real-time Dashboard: Pimpinan dapat melihat ketersediaan suksesor (calon pengganti) untuk jabatan kritis secara instan melalui sistem tanpa menunggu laporan manual, Pengembangan kompetensi ASN berbasis Corporate University (Corpu), Computer Assisted Test (CAT) Assesmnet :	Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi kepegawaian untuk mendukung pendataan, pemantauan, dan evaluasi penerapan Sistem Merit dan Manajemen Talenta.

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Menggunakan sistem ujian berbasis komputer untuk mengukur kompetensi manajerial dan sosial kultural.	
					Persentase Jabatan Fungsional ASN	80%	82,28%	102,85%	1. Faktor Kebijakan Daerah : Pemerintah Daerah telah menetapkan regulasi dalam implementasi Sistem Merit diantaranya Peraturan Bupati tentang Manajemen Talenta ASN, Surat Keputusan Bupati tentang Tim Komite Manajemen Talenta, Peraturan Bupati tentang Satnadar Kompetensi Jabatan, Peraturan Bupati tentang Kode Etik ASN, Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) 2. Faktor Kelembagaan : Koordinasi dan sinergi yang efektif antara BKPSDM dengan instansi	1. Menyusun dan memperbarui regulasi internal terkait penerapan Sistem Merit dan Manajemen Talenta agar selaras dengan ketentuan BKN serta kebutuhan organisasi 2. Menyusun rencana pengembangan kompetensi yang berbasis gap kompetensi dan kebutuhan organisasi, melalui pendidikan, pelatihan, coaching, mentoring, dan penugasan khusus. 3. Melaksanakan pemetaan talenta ASN berbasis

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									pengawas eksternal seperti, BKN, serta perangkat daerah lainnya, sehingga setiap kebijakan dan proses kepegawaian tetap sesuai dengan prinsip merit dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Faktor Inovasi : Digitalisasi Manejemen Talenta (Aplikasi SiMATA), Nine Box Talenta : Sistem yang secara otomatis menempatkan pegawai ke dalam 9 kotak talenta berdasarkan integrasi nilai kinerja (E-Kinerja) dan nilai kompetensi Assessment), Real-time Dashboard: Pimpinan dapat melihat ketersediaan suksesor (calon pengganti) untuk jabatan kritis secara instan melalui sistem tanpa	kinerja, kompetensi, dan potensi sebagai dasar penempatan, pengembangan, dan suksesi jabatan 4. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi kepegawaian untuk mendukung pendataan, pemantauan, dan evaluasi penerapan Sistem Merit dan Manajemen Talenta.

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									menunggu laporan manual, Pengembangan kompetensi ASN berbasis Corporate University (Corpu), Computer Assisted Test (CAT) Assesmnet : Menggunakan sistem ujian berbasis komputer untuk mengukur kompetensi manajerial dan sosial kultural.	
					Persentase ASN dengan predikat kinerja pegawai minimal baik	99%	99,1%	100%	1. Faktor Kebijakan Daerah : Pemerintah Daerah telah menetapkan regulasi dalam implementasi Sistem Merit diantaranya Peraturan Bupati tentang Manajemen Talenta ASN, Surat Keputusan Bupati tentang Tim Komite Manajemen Talenta, Peraturan Bupati tentang Satnadar Kompetensi Jabatan, Peraturan Bupati tentang Kode Etik ASN, Peraturan Bupati	1. Menyusun dan memperbarui regulasi internal terkait penerapan Sistem Merit dan Manajemen Talenta agar selaras dengan ketentuan BKN serta kebutuhan organisasi 2. Menyusun rencana pengembangan kompetensi yang berbasis gap kompetensi dan kebutuhan organisasi, melalui

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) 2. Faktor Kelembagaan : Koordinasi dan sinergi yang efektif antara BKPSDM dengan instansi pengawas eksternal seperti, BKN, serta perangkat daerah lainnya, sehingga setiap kebijakan dan proses kepegawaian tetap sesuai dengan prinsip merit dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Faktor Inovasi : Digitalisasi Manejemen Talenta (Aplikasi SiMATA), Nine Box Talenta : Sistem yang secara otomatis menempatkan pegawai ke dalam 9 kotak talenta berdasarkan integrasi nilai kinerja (E-Kinerja) dan nilai kompetensi	pendidikan, pelatihan, coaching, mentoring, dan penugasan khusus. 3. Melaksanakan pemetaan talenta ASN berbasis kinerja, kompetensi, dan potensi sebagai dasar penempatan, pengembangan, dan suksesi jabatan 4. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi kepegawaian untuk mendukung pendataan, pemantauan, dan evaluasi penerapan Sistem Merit dan Manajemen Talenta.

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Assessment), Real-time Dashboard: Pimpinan dapat melihat ketersediaan suksesor (calon pengganti) untuk jabatan kritis secara instan melalui sistem tanpa menunggu laporan manual, Pengembangan kompetensi ASN berbasis Corporate University (Corpu), Computer Assisted Test (CAT) Assesmnet : Menggunakan sistem ujian berbasis komputer untuk mengukur kompetensi manajerial dan sosial kultural.	
					Persentase nilai uji kompetensi minimal cukup baik	75%	90,28%	120,38%	1. Faktor Kebijakan Daerah : Pemerintah Daerah telah menetapkan regulasi dalam implementasi Sistem Merit diantaranya Peraturan Bupati tentang Manajemen Talenta ASN, Surat Keputusan Bupati	1. Menyusun dan memperbarui regulasi internal terkait penerapan Sistem Merit dan Manajemen Talenta agar selaras dengan ketentuan BKN serta kebutuhan organisasi

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									tentang Tim Komite Manajemen Talenta, Peraturan Bupati tentang Satnadar Kompetensi Jabatan, Peraturan Bupati tentang Kode Etik ASN, Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) 2. Faktor Kelembagaan : Koordinasi dan sinergi yang efektif antara BKPSDM dengan instansi pengawas eksternal seperti, BKN, serta perangkat daerah lainnya, sehingga setiap kebijakan dan proses kepegawaian tetap sesuai dengan prinsip merit dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Faktor Inovasi : Digitalisasi Manejemen Talenta (Aplikasi SiMATA), Nine Box Talenta : Sistem yang secara	2. Menyusun rencana pengembangan kompetensi yang berbasis gap kompetensi dan kebutuhan organisasi, melalui pendidikan, pelatihan, coaching, mentoring, dan penugasan khusus. 3. Melaksanakan pemetaan talenta ASN berbasis kinerja, kompetensi, dan potensi sebagai dasar penempatan, pengembangan, dan suksesi jabatan 4. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi kepegawaian untuk mendukung pendataan, pemantauan, dan evaluasi

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									otomatis menempatkan pegawai ke dalam 9 kotak talenta berdasarkan integrasi nilai kinerja (E-Kinerja) dan nilai kompetensi Assessment), Real-time Dashboard: Pimpinan dapat melihat ketersediaan suksesor (calon pengganti) untuk jabatan kritis secara instan melalui sistem tanpa menunggu laporan manual, Pengembangan kompetensi ASN berbasis Corporate University (Corpu), Computer Assisted Test (CAT) Assesmnet : Menggunakan sistem ujian berbasis komputer untuk mengukur kompetensi manajerial dan sosial kultural.	penerapan Sistem Merit dan Manajemen Talenta.
			PROGRAM PENGEMBANG	Bkpsdm	Persentase ASN yang mengikuti	75%	77,39%	103,18%	1. Faktor Kebijakan Daerah : Pemerintah	1. Menyusun dan memperbarui

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			AN SUMBER DAYA MANUSIA		pengembangan kompetensi ASN				Daerah telah menetapkan regulasi dalam implementasi Sistem Merit diantaranya Peraturan Bupati tentang Manajemen Talenta ASN, Surat Keputusan Bupati tentang Tim Komite Manajemen Talenta, Peraturan Bupati tentang Satnadar Kompetensi Jabatan, Peraturan Bupati tentang Kode Etik ASN, Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) 2. Faktor Kelembagaan : Koordinasi dan sinergi yang efektif antara BKPSDM dengan instansi pengawas eksternal seperti, BKN, serta perangkat daerah lainnya, sehingga setiap kebijakan dan proses kepegawaian tetap sesuai dengan prinsip merit dan ketentuan peraturan	regulasi internal terkait penerapan Sistem Merit dan Manajemen Talenta agar selaras dengan ketentuan BKN serta kebutuhan organisasi 2. Menyusun rencana pengembangan kompetensi yang berbasis gap kompetensi dan kebutuhan organisasi, melalui pendidikan, pelatihan, coaching, mentoring, dan penugasan khusus. 3. Melaksanakan pemetaan talenta ASN berbasis kinerja, kompetensi, dan potensi sebagai dasar penempatan, pengembangan, dan suksesi jabatan 4.

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									perundang-undangan. 3. Faktor Inovasi : Digitalisasi Manejemen Talenta (Aplikasi SiMATA), Nine Box Talenta : Sistem yang secara otomatis menempatkan pegawai ke dalam 9 kotak talenta berdasarkan integrasi nilai kinerja (E-Kinerja) dan nilai kompetensi Assessment), Real-time Dashboard: Pimpinan dapat melihat ketersediaan suksesor (calon pengganti) untuk jabatan kritis secara instan melalui sistem tanpa menunggu laporan manual, Pengembangan kompetensi ASN berbasis Corporate University (Corpu), Computer Assisted Test (CAT) Assesmnet :	Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi kepegawaian untuk mendukung pendataan, pemantauan, dan evaluasi penerapan Sistem Merit dan Manajemen Talenta.

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Menggunakan sistem ujian berbasis komputer untuk mengukur kompetensi manajerial dan sosial kultural.	
Meningkatkan penanganan konflik sosial, serta ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase penanganan konflik sosial	%	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Bakesbangpolinmas	Persentase masyarakat yang berperan aktif dalam penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaaan	85%	91,37%	107,49%	Keberhasilan tersebut didukung oleh terselenggaranya kegiatan pembinaan, monitoring, evaluasi, serta pembinaan kepaskibrakaan yang berjalan sesuai target. Tingginya partisipasi masyarakat serta keterlibatan generasi muda menjadi faktor utama keberhasilan program ini.	-Penguatan pendekatan preventif dalam pencegahan konflik sosial - Peningkatan kualitas dan jangkauan pendidikan politik serta penguatan ideologi Pancasila -Penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur -Penguatan sinergi dan kolaborasi lintas sektor -Peningkatan kualitas perencanaan, monitoring dan evaluasi kinerja

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Bakesbangpolinmas	Persentase partai politik yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemerintahan	80%	100%	125%	Keberhasilan program ini dipengaruhi oleh meningkatnya partisipasi partai politik, pelaksanaan pendidikan politik secara berkelanjutan, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap proses demokrasi.	-Penguatan pendekatan preventif dalam pencegahan konflik sosial - Peningkatan kualitas dan jangkauan pendidikan politik serta penguatan ideologi Pancasila -Penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur -Penguatan sinergi dan kolaborasi lintas sektor -Peningkatan kualitas perencanaan, monitoring dan evaluasi kinerja
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Bakesbangpolinmas	Presentase ormas yang aktif dalam pembangunan	80%	100%	117,64%	Keberhasilan ini dipengaruhi oleh meningkatnya peran ormas dalam pembangunan daerah serta optimalnya fasilitasi dan pembinaan	-Penguatan pendekatan preventif dalam pencegahan konflik sosial - Peningkatan kualitas dan jangkauan pendidikan

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									organisasi kemasyarakatan.	politik serta penguatan ideologi Pancasila -Penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur -Penguatan sinergi dan kolaborasi lintas sektor -Peningkatan kualitas perencanaan, monitoring dan evaluasi kinerja
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Bakesbangpolinmas	Persentase peningkatan dan pemahaman masyarakat terhadap ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	80%	92,40%	115,5%	Keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya koordinasi antar pemangku kepentingan, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, serta organisasi sosial kemasyarakatan dalam menjaga stabilitas sosial dan kerukunan umat beragama.	-Penguatan pendekatan preventif dalam pencegahan konflik sosial - Peningkatan kualitas dan jangkauan pendidikan politik serta penguatan ideologi Pancasila -Penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										-Penguatan sinergi dan kolaborasi lintas sektor -Peningkatan kualitas perencanaan, monitoring dan evaluasi kinerja
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Bakesbangpolinmas	Persentase peningkatan kewaspadaan nasional	80%	100%	117,64%	Keberhasilan ini didukung oleh penguatan koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), peningkatan sistem deteksi dini, serta respon cepat terhadap potensi konflik sosial.	-Penguatan pendekatan preventif dalam pencegahan konflik sosial - Peningkatan kualitas dan jangkauan pendidikan politik serta penguatan ideologi Pancasila -Penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur -Penguatan sinergi dan kolaborasi lintas sektor -Peningkatan kualitas perencanaan, monitoring dan evaluasi kinerja

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat	%	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Satplo Pp	Persentase kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani	726	572	78.79	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Indikator Persentase kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani pada Renstra Revieu 2024-2026 Satuan Polisi Pamong Praja dengan Program tersebut diatas terdapat 2 sasaran Kinerja 1. Meningkatnya penanganan gangguan Trantibum dengan Indikator Persentase Penanganan Gangguan Trantibum yang tertangani dalam tahun 2025 ditargetkan 500 gangguan trantibum sampai dengan berjalannya renstra 2024-2026 sampai dengan September 2025, telah realisasi 375 capaian Kinerja	Penguatan Respons Cepat (Quick Response): Membentuk tim reaksi cepat yang didukung oleh sistem pengaduan berbasis digital (aplikasi/Hotline) guna memperpendek waktu respon terhadap gangguan trantibum. Pemetaan Kerawanan Wilayah: Melakukan pemetaan zona rawan gangguan secara spasial untuk optimalisasi penempatan personil dan patroli rutin pada titik-titik dengan frekuensi pelanggaran tertinggi. Peningkatan

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									75 %. 2. Meningkatnya penegakan perda dan perkada yang tertangani dengan indicator Persentase pelanggaran perda dan perkada yang tertangani pada tahun 2025 ditargetkan 226 kegiatan penegakan Perda sampai dengan berjalannya renstra 2024-2026 bulan September 2025, realisasi 197 capaian Kinerja 87 .	Kerja Sama Lintas Sektor: Memperkuat kolaborasi dengan TNI, POLRI, dan unsur wilayah (Kecamatan/Kelurahan) dalam operasi terpadu guna menangani kasus-kasus kompleks yang memerlukan koordinasi antarlembaga. Modernisasi Sarana Prasarana: Mengevaluasi kecukupan armada dan alat pendukung operasional lapangan guna memastikan personil memiliki mobilitas dan proteksi yang memadai dalam menangani gangguan. Optimalisasi

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Fungsi Deteksi Dini: Meningkatkan peran Satlinmas dalam fungsi intelejen dasar dan deteksi dini gangguan di tingkat lingkungan untuk mencegah eskalasi kasus sebelum menjadi gangguan skala besar.
Meningkatkan pelestarian warisan kebudayaan local	Persentase warisan seni budaya dan tradisi lokal yang dilestarikan	%	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Dinas Porabudpar	Presentase SDM pemaju kebudayaan yang terbina	36,75%	37.47%	101.96	- Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menjadi landasan yuridis yang kuat untuk perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan - Keterlibatan masyarakat di sekitar cagar budaya dalam upaya pelestarian mandiri sangat krusial serta Komunitas yang proaktif dalam aksi nyata perawatan dan pelestarian warisan budaya - Adanta tim ahli	Melakukan kolaborasi dengan sanggar / akademisi untuk menyelengarakan Gelar Seni Budaya

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									cagar budaya di tingkat daerah dalam membantu pengawasan dan pelestarian yang sistematis.	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Dinas Porabudpar	0	0	0	0	tidak dilakukan penganggaran pada tahun 2025	0
			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Dinas Porabudpar	0	0	0	0	tidak dilakukan penganggaran pada tahun 2025	0
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Dinas Porabudpar	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	33.50%	34.10%	101.79	Dukungan Komunitas Pelestari Cagar Budaya dan Sejarah Adanya perhatian dari pemerintah untuk melakukan perlindungan cagar budaya	membentuk Tim Ahli Cagar Budaya,meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam melakukan perawatan cagar budaya
			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Dinas Porabudpar	Presentase peningkatan pengunjung museum	2%	1.96%	98	Dukungan masyarakat terhadap pelestarian koleksi museum	Melibatkan publik dalam kegiatan yang berkaitan dengan koleksi, seperti program adopsi koleksi, lokakarya restorasi sederhana, atau pameran partisipatif yang memungkinkan

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										pengunjung berinteraksi langsung dengan koleksi.
Meningkatkan ketangguhan dalam penanggulangan bencana	Indeks Resiko Bencana	Indeks	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Bpbd	Persentase Penanggulangan Bencana (mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat serta penanganan pasca bencana)	83.00	0.00	0.00	hasil capaian diukur pada triwulan 4	-
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Dinas Damkar	Persentase Pembekalan Penangganan Kebakaran dan Non Kebakaran berbasis masyarakat	70	61,11	87.3	Realisasi indikator “Persentase Pembekalan Penanganan Kebakaran dan Non-Kebakaran berbasis masyarakat” sebesar 61,11% dari target 70% (capaian 87,3%) menunjukkan kinerja yang berada dalam kategori "Cukup". Meskipun persentase capaian di atas 80%, terdapat gap sebesar 8,89% antara target dengan realisasi absolut, yang mengindikasikan belum optimalnya jangkauan program	Mengingat fungsi utama Damkar adalah preventif (pencegahan) melalui edukasi masyarakat, maka langkah ke depan harus difokuskan pada perluasan cakupan dan kualitas materi pembekalan : 1. Penguatan Community-Based Disaster Risk Management: Membentuk "Relawan Kebakaran" (Redkar) di

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									pembekalan atau sosialisasi kepada masyarakat luas.	setiap desa/kelurahan sebagai garda terdepan yang memiliki keterampilan dasar pemadaman sebelum petugas tiba di lokasi. 2. Modernisasi Media Edukasi: Beralih dari metode sosialisasi tatap muka konvensional ke metode digital (simulasi virtual atau video edukasi singkat yang disebarkan via kanal media sosial) untuk menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas. 3. Pemetaan Kerawanan Spasial: Memprioritaskan lokasi pembekalan di

Sasaran			Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
Uraian	Indikator	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										wilayah dengan kepadatan hunian tinggi atau kawasan industri yang memiliki risiko kebakaran paling ekstrem guna memaksimalkan dampak dari anggaran yang terbatas. 4. Integrasi Kurikulum Dini: Bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk memasukkan materi pengenalan bahaya api sejak usia dini (tingkat TK/SD) sebagai bagian dari upaya preventif jangka panjang.

Tabel 2.15
Analisis Keberhasilan Program/Kegiatan Dalam Pencapaian Kinerja Sasaran Berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis dan toleran			Indeks Kesalehan Sosial (Indeks)			91.448	91.452	100.004		
	Meningkatnya kerukunan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat		Indeks Kerukunan Umat Beragama (Indeks)			79.29	82.34	103.85 %	Keberhasilan ini didukung oleh : • Peran aktif Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB); • Konsistensi dialog lintas agama; • Iklim demokrasi lokal yang kondusif dan partisipatif.	"Melakukan upaya strategis yang terencana dan terukur dengan mengedepankan pengutan pencegahan konflik, peningkatan kualitas pelayanan serta pengutan tata kelola kelembagaan dengan beberapa langkah yaitu 1. Penguatan pendekatan preventif dalam pencegahan konflik sosial; 2. Peningkatan kualitas dan jangkauan pendidikan politik serta penguatan ideologi Pancasila; 3. Penguatan kapasitas

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										kelembagaan dan sumber daya aparatur; 4. Penguatan sinergi dan kolaborasi lintas sektor; 5. Peningkatan kualitas perencanaan, monitoring dan evaluasi kinerja.
			Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (Indeks)							
		Meningkatnya fasilitasi ketahanan ekonomi, sosial, budaya, kerukunan umat beragama, P4GN dan aliran kepercayaan	Cakupan kegiatan fasilitasi ketahanan ekonomi, sosial, budaya, kerukunan umat beragama, P4GN dan aliran kepercayaan (%)	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Bakesbangpolinmas	100	100	100%	Keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya koordinasi antar pemangku kepentingan, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, serta organisasi sosial kemasyarakatan dalam menjaga stabilitas sosial dan kerukunan umat beragama.	Melakukan upaya strategis yang terencana dan terukur dengan mengedepankan pengutan pencegahan konflik, peningkatan kualitas pelayanan serta pengutan tata kelola kelembagaan dengan beberapa langkah yaitu 1. Penguatan pendekatan preventif dalam pencegahan konflik sosial; 2. Peningkatan kualitas dan
		Meningkatnya fasilitasi kewaspadaan dini dan penanganan potensi konflik didaerah	Cakupan laporan kewaspadaan dini didaerah yang ditindaklanjuti (%)	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN	Bakesbangpolinmas	100	100	100%	Keberhasilan ini didukung oleh penguatan koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), peningkatan sistem deteksi dini, serta respon	

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					cepat terhadap potensi konflik sosial.	jangkauan pendidikan politik serta penguatan ideologi Pancasila; 3. Penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur; 4. Penguatan sinergi dan kolaborasi lintas sektor; 5. Peningkatan kualitas perencanaan, monitoring dan evaluasi kinerja.
		Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan (%)	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Bakesbangpolinmas	85%	91,37%	107,49%	Keberhasilan ini didukung oleh terselenggaranya kegiatan pembinaan, monitoring, evaluasi, serta pembinaan kepaskibrakaan yang berjalan sesuai target. Tingginya partisipasi masyarakat serta keterlibatan generasi muda menjadi faktor utama keberhasilan program ini.	
	Meningkatnya kemajuan kebudayaan daerah		Indeks Pembangunan Kebudayaan (Indeks)		Disporabudpar					
		Meningkatnya daya tarik museum	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan ke museum (%)	2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Disporabudpar	2%	1.96%	98	Dukungan masyarakat terhadap pelestarian koleksi museum	Melibatkan publik dalam kegiatan yang berkaitan dengan koleksi, seperti program adopsi koleksi, lokakarya restorasi sederha na, atau pameran partisipatif

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										yang memungkinkan pengunjung berinteraksi langsung dengan koleksi.
		Meningkatnya pelestarian sejarah dan warisan budaya	Persentase benda, situs dan kawasancagar budaya yang dilestarikan (%)	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Disporabudpar	19	19	100	Dukungan Komunitas Pelestari Cagar Budaya dan Sejarah Adanya perhatian dari pemerintah untuk melakukan perlindungan cagar budaya	membentuk Tim Ahli Cagar Budaya,meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam melakukan perawatan cagar budaya
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan dan kesenian tradisional	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kebudayaan (%)	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Disporabudpar	36.75%	37.47%	101.9591837	Jumlah Seni dan Budaya yang dikelola sangat banyak yang didukung oleh jumlah seniman yang banyak pula	Melakukan kolaborasi dengan sanggar / akademisi untuk menyelengarakan Gelar Seni Budaya
			Persentase warisan seni budaya dan tradisi lokal yang dilestarikan (%)	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Disporabudpar	16	16	100	Jumlah Seni dan Budaya yang dikelola sangat banyak yang didukung oleh jumlah seniman yang banyak pula	Melakukan kolaborasi dengan sanggar / akademisi untuk menyelengarakan Gelar Seni Budaya
Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik			Indeks Reformasi Birokrasi(Indeks)			84.35	84.05	99.644	Penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi RB General dan Tematik yang terkoordinasi dengan baik	
	Meningkatnya kualitas		Nilai Sistem Merit (Nilai)		BKPDSM	280	260	82,85%	"1. Faktor Kebijakan Daerah : Pemerintah Daerah telah	1. Menyusun dan memperbarui regulasi internal

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	manajemen ASN								menetapkan regulasi dalam implementasi Sistem Merit diantaranya Peraturan Bupati tentang Manajemen Talenta ASN, Surat Keputusan Bupati tentang Tim Komite Manajemen Talenta, Peraturan Bupati tentang Satnadar Kompetensi Jabatan, Peraturan Bupati tentang Kode Etik ASN, Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) 2. Faktor Kelembagaan : Koordinasi dan sinergi yang efektif antara BKPSDM dengan instansi pengawas eksternal seperti, BKN, serta perangkat daerah lainnya, sehingga setiap kebijakan dan proses kepegawaian tetap sesuai dengan prinsip merit dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Faktor Inovasi : Digitalisasi Manejemen Talenta (Aplikasi SiMATA), Nine Box Talenta : Sistem yang	terkait penerapan Sistem Merit dan Manajemen Talenta agar selaras dengan ketentuan BKN serta kebutuhan organisasi 2. Menyusun rencana pengembangan kompetensi yang berbasis gap kompetensi dan kebutuhan organisasi, melalui pendidikan, pelatihan, coaching, mentoring, dan penugasan khusus. 3. Melaksanakan pemetaan talenta ASN berbasis kinerja, kompetensi, dan potensi sebagai dasar penempatan, pengembangan, dan suksesi jabatan 4. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi kepegawaian untuk mendukung pendataan, pemantauan, dan evaluasi penerapan

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									secara otomatis menempatkan pegawai ke dalam 9 kotak talenta berdasarkan integrasi nilai kinerja (E-Kinerja) dan nilai kompetensi Assessment), Real-time Dashboard: Pimpinan dapat melihat ketersediaan suksesor (calon pengganti) untuk jabatan kritis secara instan melalui sistem tanpa menunggu laporan manual, Pengembangan kompetensi ASN berbasis Corporate University (Corpu), Computer Assisted Test (CAT) Assesmnet : Menggunakan sistem ujian berbasis komputer untuk mengukur kompetensi manajerial dan sosial kultural. " "1. Menyusun dan memperbarui regulasi internal terkait penerapan Sistem Merit dan Manajemen Talenta agar selaras dengan ketentuan BKN serta kebutuhan organisasi 2. Menyusun rencana pengembangan kompetensi yang	Sistem Merit dan Manajemen Talenta.

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									berbasis gap kompetensi dan kebutuhan organisasi, melalui pendidikan, pelatihan, coaching, mentoring, dan penugasan khusus. 3. Melaksanakan pemetaan talenta ASN berbasis kinerja, kompetensi, dan potensi sebagai dasar penempatan, pengembangan, dan suksesi jabatan 4. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi kepegawaian untuk mendukung pendataan, pemantauan, dan evaluasi penerapan Sistem Merit dan Manajemen Talenta. "	
		Meningkatanya Kompetensi ASN	Persentase ASN Yang Mendapatkan hasil Uji Kompetensi Optimal Dan Cukup Optimal (%)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BKPDSM	75%	90,28%	120,37%	1. Faktor Kebijakan Daerah : Pemerintah Daerah telah menetapkan regulasi dalam implementasi Sistem Merit diantaranya Peraturan Bupati tentang Manajemen Talenta ASN, Surat Keputusan Bupati tentang Tim Komite Manajemen Talenta, Peraturan	1. Menyusun dan memperbarui regulasi internal terkait penerapan Sistem Merit dan Manajemen Talenta agar selaras dengan ketentuan BKN serta kebutuhan organisasi 2. Menyusun rencana pengembangan

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Bupati tentang Satnadar Kompetensi Jabatan, Peraturan Bupati tentang Kode Etik ASN, Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) 2. Faktor Kelembagaan : Koordinasi dan sinergi yang efektif antara BKPSDM dengan instansi pengawas eksternal seperti, BKN, serta perangkat daerah lainnya, sehingga setiap kebijakan dan proses kepegawaian tetap sesuai dengan prinsip merit dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Faktor Inovasi : Digitalisasi Manejemen Talenta (Aplikasi SiMATA), Nine Box Talenta : Sistem yang secara otomatis menempatkan pegawai ke dalam 9 kotak talenta berdasarkan integrasi nilai kinerja (E-Kinerja) dan nilai kompetensi Assessment), Real-time Dashboard: Pimpinan dapat melihat ketersediaan suksesor	kompetensi yang berbasis gap kompetensi dan kebutuhan organisasi, melalui pendidikan, pelatihan, coaching, mentoring, dan penugasan khusus. 3. Melaksanakan pemetaan talenta ASN berbasis kinerja, kompetensi, dan potensi sebagai dasar penempatan, pengembangan, dan suksesi jabatan 4. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi kepegawaian untuk mendukung pendataan, pemantauan, dan evaluasi penerapan Sistem Merit dan Manajemen Talenta.

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									(calon pengganti) untuk jabatan kritis secara instan melalui sistem tanpa menunggu laporan manual, Pengembangan kompetensi ASN berbasis Corporate University (Corpu), Computer Assisted Test (CAT) Assesmnet : Menggunakan sistem ujian berbasis komputer untuk mengukur kompetensi manajerial dan sosial kultural.	
			Rasio Jabatan Fungsional yang bersertifikat kompetensi tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan (%)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BKPDSM	280	260	92,85%	1. Faktor Kebijakan Daerah : Pemerintah Daerah telah menetapkan regulasi dalam implementasi Sistem Merit diantaranya Peraturan Bupati tentang Manajemen Talenta ASN, Surat Keputusan Bupati tentang Tim Komite Manajemen Talenta, Peraturan Bupati tentang Satnadar Kompetensi Jabatan, Peraturan Bupati tentang Kode Etik ASN, Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) 2. Faktor Kelembagaan :	1. Menyusun dan memperbarui regulasi internal terkait penerapan Sistem Merit dan Manajemen Talenta agar selaras dengan ketentuan BKN serta kebutuhan organisasi 2. Menyusun rencana pengembangan kompetensi yang berbasis gap kompetensi dan kebutuhan organisasi, melalui pendidikan, pelatihan, coaching, mentoring, dan

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Koordinasi dan sinergi yang efektif antara BKPSDM dengan instansi pengawas eksternal seperti, BKN, serta perangkat daerah lainnya, sehingga setiap kebijakan dan proses kepegawaian tetap sesuai dengan prinsip merit dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Faktor Inovasi : Digitalisasi Manejemen Talenta (Aplikasi SiMATA), Nine Box Talenta : Sistem yang secara otomatis menempatkan pegawai ke dalam 9 kotak talenta berdasarkan integrasi nilai kinerja (E-Kinerja) dan nilai kompetensi Assessment), Real-time Dashboard: Pimpinan dapat melihat ketersediaan suksesor (calon pengganti) untuk jabatan kritis secara instan melalui sistem tanpa menunggu laporan manual, Pengembangan kompetensi ASN berbasis Corporate University (Corpu),	penugasan khusus. 3. Melaksanakan pemetaan talenta ASN berbasis kinerja, kompetensi, dan potensi sebagai dasar penempatan, pengembangan, dan suksesi jabatan 4. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi kepegawaian untuk mendukung pendataan, pemantauan, dan evaluasi penerapan Sistem Merit dan Manajemen Talenta.

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Computer Assisted Test (CAT) Assesmnet : Menggunakan sistem ujian berbasis komputer untuk mengukur kompetensi manajerial dan sosial kultural.	
		Meningkatanya Kompetensi ASN	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi Teknis, manajerial dan fungsional (%)	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BKPDSM	75%	77.39%	103.10%	1. Faktor Kebijakan Daerah : Pemerintah Daerah telah menetapkan regulasi dalam implementasi Sistem Merit diantaranya Peraturan Bupati tentang Manajemen Talenta ASN, Surat Keputusan Bupati tentang Tim Komite Manajemen Talenta, Peraturan Bupati tentang Satnadar Kompetensi Jabatan, Peraturan Bupati tentang Kode Etik ASN, Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) 2. Faktor Kelembagaan : Koordinasi dan sinergi yang efektif antara BKPSDM dengan instansi pengawas eksternal seperti, BKN, serta perangkat daerah lainnya, sehingga setiap kebijakan dan proses	1. Menyusun dan memperbarui regulasi internal terkait penerapan Sistem Merit dan Manajemen Talenta agar selaras dengan ketentuan BKN serta kebutuhan organisasi 2. Menyusun rencana pengembangan kompetensi yang berbasis gap kompetensi dan kebutuhan organisasi, melalui pendidikan, pelatihan, coaching, mentoring, dan penugasan khusus. 3. Melaksanakan pemetaan talenta ASN berbasis kinerja, kompetensi, dan potensi sebagai dasar penempatan,

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									kepegawaian tetap sesuai dengan prinsip merit dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Faktor Inovasi : Digitalisasi Manejemen Talenta (Aplikasi SiMATA), Nine Box Talenta : Sistem yang secara otomatis menempatkan pegawai ke dalam 9 kotak talenta berdasarkan integrasi nilai kinerja (E-Kinerja) dan nilai kompetensi Assessment), Real-time Dashboard: Pimpinan dapat melihat ketersediaan suksesor (calon pengganti) untuk jabatan kritis secara instan melalui sistem tanpa menunggu laporan manual, Pengembangan kompetensi ASN berbasis Corporate University (Corpu), Computer Assisted Test (CAT) Assesmnet : Menggunakan sistem ujian berbasis komputer untuk mengukur kompetensi manajerial dan sosial kultural.	pengembangan, dan suksesi jabatan 4. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi kepegawaian untuk mendukung pendataan, pemantauan, dan evaluasi penerapan Sistem Merit dan Manajemen Talenta.

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatnya disiplin ASN	Persentase ASN yang tidak di jatuhi hukuman disiplin (%)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BKPDSM	99%	99%	100%	1. Faktor Kebijakan Daerah : Pemerintah Daerah telah menetapkan regulasi dalam implementasi Sistem Merit diantaranya Peraturan Bupati tentang Manajemen Talenta ASN, Surat Keputusan Bupati tentang Tim Komite Manajemen Talenta, Peraturan Bupati tentang Satnadar Kompetensi Jabatan, Peraturan Bupati tentang Kode Etik ASN, Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) 2. Faktor Kelembagaan : Koordinasi dan sinergi yang efektif antara BKPSDM dengan instansi pengawas eksternal seperti, BKN, serta perangkat daerah lainnya, sehingga setiap kebijakan dan proses kepegawaian tetap sesuai dengan prinsip merit dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Faktor Inovasi : Digitalisasi Manejemen	1. Menyusun dan memperbarui regulasi internal terkait penerapan Sistem Merit dan Manajemen Talenta agar selaras dengan ketentuan BKN serta kebutuhan organisasi 2. Menyusun rencana pengembangan kompetensi yang berbasis gap kompetensi dan kebutuhan organisasi, melalui pendidikan, pelatihan, coaching, mentoring, dan penugasan khusus. 3. Melaksanakan pemetaan talenta ASN berbasis kinerja, kompetensi, dan potensi sebagai dasar penempatan, pengembangan, dan suksesi jabatan 4. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi kepegawaian untuk mendukung

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Talenta (Aplikasi SiMATA), Nine Box Talenta : Sistem yang secara otomatis menempatkan pegawai ke dalam 9 kotak talenta berdasarkan integrasi nilai kinerja (E-Kinerja) dan nilai kompetensi Assessment), Real-time Dashboard: Pimpinan dapat melihat ketersediaan suksesor (calon pengganti) untuk jabatan kritis secara instan melalui sistem tanpa menunggu laporan manual, Pengembangan kompetensi ASN berbasis Corporate University (Corpu), Computer Assisted Test (CAT) Assesmnet : Menggunakan sistem ujian berbasis komputer untuk mengukur kompetensi manajerial dan sosial kultural.	pendataan, pemantauan, dan evaluasi penerapan Sistem Merit dan Manajemen Talenta.
		Meningkatnya Kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP berkinerja minimal Baik (%)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BKPDSM	75%	90%	120.37%	1. Faktor Kebijakan Daerah : Pemerintah Daerah telah menetapkan regulasi dalam implementasi Sistem Merit diantaranya Peraturan Bupati tentang	1. Menyusun dan memperbarui regulasi internal terkait penerapan Sistem Merit dan Manajemen Talenta agar selaras dengan ketentuan BKN

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Manajemen Talenta ASN, Surat Keputusan Bupati tentang Tim Komite Manajemen Talenta, Peraturan Bupati tentang Satnadar Kompetensi Jabatan, Peraturan Bupati tentang Kode Etik ASN, Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) 2. Faktor Kelembagaan : Koordinasi dan sinergi yang efektif antara BKPSDM dengan instansi pengawas eksternal seperti, BKN, serta perangkat daerah lainnya, sehingga setiap kebijakan dan proses kepegawaian tetap sesuai dengan prinsip merit dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Faktor Inovasi : Digitalisasi Manejemen Talenta (Aplikasi SiMATA), Nine Box Talenta : Sistem yang secara otomatis menempatkan pegawai ke dalam 9 kotak talenta berdasarkan integrasi nilai kinerja (E-Kinerja)	serta kebutuhan organisasi 2. Menyusun rencana pengembangan kompetensi yang berbasis gap kompetensi dan kebutuhan organisasi, melalui pendidikan, pelatihan, coaching, mentoring, dan penugasan khusus. 3. Melaksanakan pemetaan talenta ASN berbasis kinerja, kompetensi, dan potensi sebagai dasar penempatan, pengembangan, dan suksesi jabatan 4. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi kepegawaian untuk mendukung pendataan, pemantauan, dan evaluasi penerapan Sistem Merit dan Manajemen Talenta.

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									dan nilai kompetensi Assessment), Real-time Dashboard: Pimpinan dapat melihat ketersediaan suksesor (calon pengganti) untuk jabatan kritis secara instan melalui sistem tanpa menunggu laporan manual, Pengembangan kompetensi ASN berbasis Corporate University (Corpu), Computer Assisted Test (CAT) Assesmnet : Menggunakan sistem ujian berbasis komputer untuk mengukur kompetensi manajerial dan sosial kultural.	
		Meningkatnya Kualifikasi Pendidikan ASN	Rasio pegawai pendidikan tinggi (diluar tenaga guru dan kesehatan) (%)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BKPDSM	55%	66.39%	120.71	1. Faktor Kebijakan Daerah : Pemerintah Daerah telah menetapkan regulasi dalam implementasi Sistem Merit diantaranya Peraturan Bupati tentang Manajemen Talenta ASN, Surat Keputusan Bupati tentang Tim Komite Manajemen Talenta, Peraturan Bupati tentang Satnadar Kompetensi Jabatan, Peraturan Bupati tentang	1. Menyusun dan memperbarui regulasi internal terkait penerapan Sistem Merit dan Manajemen Talenta agar selaras dengan ketentuan BKN serta kebutuhan organisasi 2. Menyusun rencana pengembangan kompetensi yang berbasis gap kompetensi dan

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Kode Etik ASN, Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) 2. Faktor Kelembagaan : Koordinasi dan sinergi yang efektif antara BKPSDM dengan instansi pengawas eksternal seperti, BKN, serta perangkat daerah lainnya, sehingga setiap kebijakan dan proses kepegawaian tetap sesuai dengan prinsip merit dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Faktor Inovasi : Digitalisasi Manejemen Talenta (Aplikasi SiMATA), Nine Box Talenta : Sistem yang secara otomatis menempatkan pegawai ke dalam 9 kotak talenta berdasarkan integrasi nilai kinerja (E-Kinerja) dan nilai kompetensi Assessment), Real-time Dashboard: Pimpinan dapat melihat ketersediaan suksesor (calon pengganti) untuk jabatan kritis secara instan melalui sistem	kebutuhan organisasi, melalui pendidikan, pelatihan, coaching, mentoring, dan penugasan khusus. 3. Melaksanakan pemetaan talenta ASN berbasis kinerja, kompetensi, dan potensi sebagai dasar penempatan, pengembangan, dan suksesi jabatan 4. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi kepegawaian untuk mendukung pendataan, pemantauan, dan evaluasi penerapan Sistem Merit dan Manajemen Talenta.

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									tanpa menunggu laporan manual, Pengembangan kompetensi ASN berbasis Corporate University (Corpu), Computer Assisted Test (CAT) Assesmnet : Menggunakan sistem ujian berbasis komputer untuk mengukur kompetensi manajerial dan sosial kultural.	
		Meningkatnya pengelolaan data ASN yang terintegrasi dengan SIASN	persentase pengelolaan data ASN yang terintegrasi dengan SIASN (%)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BKPDSM	75%	99.18%	132.24%	1. Faktor Kebijakan Daerah : Pemerintah Daerah telah menetapkan regulasi dalam implementasi Sistem Merit diantaranya Peraturan Bupati tentang Manajemen Talenta ASN, Surat Keputusan Bupati tentang Tim Komite Manajemen Talenta, Peraturan Bupati tentang Satnadar Kompetensi Jabatan, Peraturan Bupati tentang Kode Etik ASN, Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) 2. Faktor Kelembagaan : Koordinasi dan sinergi yang efektif antara BKPSDM dengan	1. Menyusun dan memperbarui regulasi internal terkait penerapan Sistem Merit dan Manajemen Talenta agar selaras dengan ketentuan BKN serta kebutuhan organisasi 2. Menyusun rencana pengembangan kompetensi yang berbasis gap kompetensi dan kebutuhan organisasi, melalui pendidikan, pelatihan, coaching, mentoring, dan penugasan khusus. 3. Melaksanakan pemetaan talenta

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									instansi pengawas eksternal seperti, BKN, serta perangkat daerah lainnya, sehingga setiap kebijakan dan proses kepegawaian tetap sesuai dengan prinsip merit dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Faktor Inovasi : Digitalisasi Manejemen Talenta (Aplikasi SiMATA), Nine Box Talenta : Sistem yang secara otomatis menempatkan pegawai ke dalam 9 kotak talenta berdasarkan integrasi nilai kinerja (E-Kinerja) dan nilai kompetensi Assessment), Real-time Dashboard: Pimpinan dapat melihat ketersediaan suksesor (calon pengganti) untuk jabatan kritis secara instan melalui sistem tanpa menunggu laporan manual, Pengembangan kompetensi ASN berbasis Corporate University (Corpu), Computer Assisted Test (CAT) Assesmnet : Menggunakan sistem	ASN berbasis kinerja, kompetensi, dan potensi sebagai dasar penempatan, pengembangan, dan suksesi jabatan 4. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi kepegawaian untuk mendukung pendataan, pemantauan, dan evaluasi penerapan Sistem Merit dan Manajemen Talenta.

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									ujian berbasis komputer untuk mengukur kompetensi manajerial dan sosial kultural.	
		Meningkatnya pengembangan karier jabatan struktural	Persentase keterisian jabatan struktural (%)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BKPDSM	78%	80.42%	100.52%	1. Faktor Kebijakan Daerah : Pemerintah Daerah telah menetapkan regulasi dalam implementasi Sistem Merit diantaranya Peraturan Bupati tentang Manajemen Talenta ASN, Surat Keputusan Bupati tentang Tim Komite Manajemen Talenta, Peraturan Bupati tentang Satnadar Kompetensi Jabatan, Peraturan Bupati tentang Kode Etik ASN, Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) 2. Faktor Kelembagaan : Koordinasi dan sinergi yang efektif antara BKPSDM dengan instansi pengawas eksternal seperti, BKN, serta perangkat daerah lainnya, sehingga setiap kebijakan dan proses kepegawaian tetap sesuai dengan prinsip merit dan ketentuan	1. Menyusun dan memperbarui regulasi internal terkait penerapan Sistem Merit dan Manajemen Talenta agar selaras dengan ketentuan BKN serta kebutuhan organisasi 2. Menyusun rencana pengembangan kompetensi yang berbasis gap kompetensi dan kebutuhan organisasi, melalui pendidikan, pelatihan, coaching, mentoring, dan penugasan khusus. 3. Melaksanakan pemetaan talenta ASN berbasis kinerja, kompetensi, dan potensi sebagai dasar penempatan, pengembangan, dan suksesi jabatan 4. Mengoptimalkan

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									peraturan perundang-undangan. 3. Faktor Inovasi : Digitalisasi Manejemen Talenta (Aplikasi SiMATA), Nine Box Talenta : Sistem yang secara otomatis menempatkan pegawai ke dalam 9 kotak talenta berdasarkan integrasi nilai kinerja (E-Kinerja) dan nilai kompetensi Assessment), Real-time Dashboard: Pimpinan dapat melihat ketersediaan suksesor (calon pengganti) untuk jabatan kritis secara instan melalui sistem tanpa menunggu laporan manual, Pengembangan kompetensi ASN berbasis Corporate University (Corpu), Computer Assisted Test (CAT) Assesmnet : Menggunakan sistem ujian berbasis komputer untuk mengukur kompetensi manajerial dan sosial kultural.	pemanfaatan sistem informasi kepegawaian untuk mendukung pendataan, pemantauan, dan evaluasi penerapan Sistem Merit dan Manajemen Talenta.
	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraa		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi		Setda	72	70.19	97.486	Adanya komitmen pimpinan dan jajaran pemerintah daerah dan perangkat daerah serta	

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	n pemerintahan daerah		Pemerintah (Nilai)						penerapan aplikasi dalam pengimplementasian AKIP	
			Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Nilai)		Setda	3.327	3.1017	93.228	Koordinasi dan monev yang baik terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Setda	83,55	83,35	99,76%	Implementasi akuntabilitas kinerja yang berkualitas dari setiap komponen kinerja dimulai dari perencanaan, pengukuran pelaporan dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal gap 0,20 poin biasanya bukan disebabkan oleh kegagalan serapan anggaran, melainkan pada aspek kualitas dokumen pendukung atau ketepatan waktu pelaporan pada salah satu sub-indikator SAKIP. Kemungkinan besar terdapat kekurangan pada sinkronisasi antara perencanaan strategis dengan pelaporan capaian yang bersifat	Melaksanakan Pre-Assessment internal oleh Tim Reformasi Birokrasi Setda setiap triwulan untuk mendeteksi dini kekurangan dokumen sebelum dinilai oleh Tim Evaluator.

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									substansial (bukan sekadar administratif).	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Bagor	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Bagor	80	71.4	89.25	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target Nilai 80 dan terealisasi sebesar Nilai 71,40. Sehingga kinerja tahun 2025 dapat mencapai 89.25%. Terdapat beberapa realisasi mulai dari dokumen, laporan dan kegiatan yang dituangkan dalam Laporan Evaluasi Tahun 2025. Formulasi perhitungan dari capaian tersebut ialah dari nilai SAKIP Kecamatan yang diperoleh dari tim penilai SAKIP yakni sebesar 71,40 (BB). Berdasarkan catatan tim penilai SAKIP, salah satu upaya yang dapat diperbaiki antara lain; Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) harus memenuhi kriteria SMART, dimana salah satunya adalah "measurable" atau jelas dan dapat diukur. Target indikator kinerja tahun 2024 pada Renstra	1. Revisi Indikator Kinerja (Prioritas Utama) Melakukan reviu dan revisi terhadap dokumen Renstra dan Renja Kecamatan Bagor. Ubah seluruh indikator yang bersifat kualitatif menjadi kuantitatif dengan prinsip SMART 2. Rekalibrasi Target Kinerja Mengingat realisasi saat ini berada di angka 71,40, Kecamatan Bagor perlu melakukan pemetaan kemampuan riil untuk mencapai target 80. Jika target 80 tetap dipertahankan, maka harus didukung dengan rincian action plan yang menyentuh seluruh komponen SAKIP

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									adalah "Baik", tidak berupa angka sehingga sulit diukur	(Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, Evaluasi, dan Capaian). 3. Bimtek Penyusunan IKU (Indikator Kinerja Utama) Menyelenggarakan asistensi teknis bagi Tim SAKIP Kecamatan untuk menyusun Cascading Kinerja (pohon kinerja) yang logis. Pastikan setiap sub-kegiatan memiliki output yang mendukung secara langsung tercapainya target nilai SAKIP. 4. Penguatan Dokumentasi dan Eviden Meningkatkan kualitas dokumen laporan evaluasi tahunan dengan menyediakan bukti (eviden) yang relevan, valid, dan terukur untuk setiap

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										klaim capaian kinerja guna meyakinkan Tim Penilai SAKIP pada periode berikutnya.
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Kertosono	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Kertosono	75	70.6	94.13	Capaian Nilai SAKIP Kecamatan sebesar 70,60 dari target 75 atau sebesar 94,13% menunjukkan kinerja yang cukup baik, namun belum memenuhi target yang ditetapkan. Secara umum kegiatan penunjang telah terlaksana dengan baik, terutama pada aspek perencanaan dan administrasi keuangan.	1. Pergeseran dari Output ke Outcome (Substansi) Melakukan reviu atas indikator kinerja agar tidak hanya terpaku pada selesainya kegiatan administratif (contoh: "Tersusunnya laporan"). Indikator harus mulai bergeser pada kualitas dampak layanan di wilayah kecamatan, sehingga memiliki bobot nilai yang lebih tinggi dalam evaluasi SAKIP. 2. Penguatan Analisis Efisiensi Anggaran Menyertakan analisis efisiensi dalam Laporan Kinerja tim SAKIP Kecamatan harus mampu

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										mendokumentasikan bagaimana penggunaan anggaran penunjang dapat menghemat sumber daya tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik di Kecamatan Kertosono. 3. Sinkronisasi Berjenjang (Cascading) Memastikan bahwa sasaran strategis Camat diturunkan secara konsisten hingga ke level Kasi dan Staf. Seringkali nilai SAKIP terhambat karena kinerja individu tidak mendukung secara langsung pada target organisasi (terputusnya rantai kinerja). 4. Peningkatan Kualitas Evaluasi Internal Melakukan evaluasi mandiri secara

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										berkala (per semester) terhadap efektivitas program. Jangan menunggu evaluasi dari tim kabupaten untuk menemukan kekurangan; gunakan hasil evaluasi mandiri sebagai dasar perbaikan berkelanjutan (continuous improvement).
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Tanjunganom	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Tanjunganom	78	74,55	95,58%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target Nilai 78 dan terealisasi sebesar Nilai 74,55. Sehingga kinerja tahun 2025 dapat mencapai 95,55%. Terdapat beberapa realisasi mulai dari dokumen, laporan dan kegiatan yang dituangkan dalam Laporan Evaluasi Tahun 2025. Formulasi perhitungan dari capaian tersebut ialah dari nilai SAKIP Kecamatan yang diperoleh dari tim penilai SAKIP yakni sebesar 74,55 (BB).	1. Transformasi Target Kualitatif ke Kuantitatif (Mendesak) Segera lakukan revisi target pada dokumen perencanaan (Renja/Renstra) dengan mengonversi standar "Baik" menjadi angka absolut atau persentase. 2. Implementasi Kriteria SMART dalam penetapan indikator kinerja

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Berdasarkan catatan tim penilai SAKIP, salah satu upaya yang dapat diperbaiki antara lain; Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) harus memenuhi kriteria SMART, dimana salah satunya adalah "measurable" atau jelas dan dapat diukur. Target indikator kinerja tahun 2024 pada Renstra adalah "baik", tidak berupa angka sehingga sulit diukur.	3. Pendampingan Penyusunan Pohon Kinerja (Cascading) Mengingat nilai sudah mencapai 74,55, fokus harus diarahkan pada sinkronisasi. Pastikan tidak ada "indikator sampah" atau indikator yang tidak berkontribusi pada sasaran strategis. Setiap kegiatan penunjang harus memiliki kaitan logis dengan peningkatan pelayanan publik atau efisiensi birokrasi di Kecamatan Tanjunganom. 4. Penguatan Evidence (Bukti Dukung) Mengingat realisasi sudah dalam bentuk dokumen dan laporan yang lengkap, langkah selanjutnya adalah menata bukti tersebut secara

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										digital dan sistematis.
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Sukomoro	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Sukomoro	88.74	91.33	102.92	Capaian ini merefleksikan keberhasilan instansi dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang terukur dan akuntabel. Konsistensi dalam pencapaian target ini menunjukkan bahwa seluruh siklus perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, serta evaluasi internal telah berjalan dengan efektif dan selaras dengan sasaran strategis di tingkat perangkat daerah.	Mempertahankan kualitas tata kelola pemerintahan melalui penguatan sinkronisasi antara indikator kinerja utama dengan program kegiatan di tingkat kecamatan. Selain itu, akan dilakukan pendampingan dan pembinaan berkelanjutan bagi aparatur pelaksana di unit kerja kecamatan untuk meningkatkan kompetensi dalam penyusunan laporan kinerja yang berbasis outcome (dampak), sehingga akuntabilitas kinerja tidak hanya dipandang sebagai pemenuhan kewajiban administratif, namun sebagai instrumen peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Nganjuk	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Nganjuk	65	62	95,38 %	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target Nilai 65 dan terealisasi sebesar Nilai 62. Sehingga kinerja tahun 2025 dapat mencapai 95,38%. Terdapat beberapa realisasi mulai dari dokumen, laporan dan kegiatan yang dituangkan dalam Laporan Evaluasi Tahun 2025. Formulasi perhitungan dari capaian tersebut ialah dari nilai SAKIP Kecamatan yang diperoleh dari tim penilai SAKIP yakni sebesar 68,80 (B). Berdasarkan catatan tim penilai SAKIP, salah satu upaya yang dapat diperbaiki antara lain; Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) harus memenuhi kriteria SMART, dimana salah satunya adalah "measurable" atau jelas dan dapat diukur. Target indikator kinerja tahun 2025 pada Renstra adalah "Baik", tidak	1. Transformasi Target Kualitatif ke Kuantitatif (Mendesak) Segera lakukan revisi target pada dokumen perencanaan (Renja/Renstra) dengan mengonversi standar "Baik" menjadi angka absolut atau persentase. 2. Implementasi Kriteria SMART dalam penetapan indikator kinerja 3. Pendampingan Penyusunan Pohon Kinerja (Cascading) Mengingat nilai sudah mencapai 62, fokus harus diarahkan pada sinkronisasi. Pastikan tidak ada "indikator sampah" atau indikator yang tidak berkontribusi pada sasaran strategis. Setiap kegiatan penunjang

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									berupa angka sehingga sulit diukur.	harus memiliki kaitan logis dengan peningkatan pelayanan publik atau efisiensi birokrasi di Kecamatan Nganjuk. 4. Penguatan Evidence (Bukti Dukung) Mengingat realisasi sudah dalam bentuk dokumen dan laporan yang lengkap, langkah selanjutnya adalah menata bukti tersebut secara digital dan sistematis.
		Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagor	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Bagor	95.00	100.00	105.26	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa ini dengan target 80 % dan realisasi sebesar 100%. Pada tahun 2025, yang merupakan tahun awal implementasi Renstra 2025-2029, target kinerja ditetapkan sebesar 80%. Adapun realisasi yang berhasil dicapai sebesar 100% maka persentase capaian	keberhasilan mencapai 100% di tahun pertama adalah prestasi besar, namun tantangan sesungguhnya adalah konsistensi. Fokus selanjutnya bukan lagi 'mengajak' desa untuk tertib, melainkan 'menstandarisasi'

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									kinerja mencapai 125%, yang masuk dalam kategori "Sangat Berhasil". Indikator program ini ialah Persentase Desa Tertib Administrasi dari 21 desa yang sudah melaksanakan tata tertib administrasi adalah 21 desa	kualitas ketertiban tersebut melalui integrasi sistem digital agar lebih akurat dan mudah diawasi
		Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Kertosono	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Kertosono	100.00	100.00	100.00	Pencapaian 100% menunjukkan bahwa mekanisme tindak lanjut hasil koordinasi di Kecamatan Kertosono telah berjalan dengan sangat disiplin. Sinergi antara pemerintah kecamatan dan lembaga pemberdayaan (LPMD/Kelurahan) menjadi pondasi utama yang memastikan setiap butir kesepakatan koordinasi tidak berhenti menjadi wacana, melainkan terealisasi dalam kegiatan pemberdayaan.	capaian sudah berada di angka maksimal, fokus Kecamatan Kertosono harus bergeser dari kuantitas koordinasi ke kualitas dampak pemberdayaan: 1. Transformasi Data ke Outcome: Tidak cukup hanya menindaklanjuti hasil koordinasi, tetapi perlu melakukan Audit Dampak untuk mengukur apakah hasil koordinasi tersebut secara nyata meningkatkan kemandirian ekonomi atau kapasitas sumber

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										daya manusia di desa/kelurahan. 2. Standardisasi Operasional (SOP) Inovasi: Menyusun pedoman teknis bagi lembaga kemasyarakatan agar mereka memiliki acuan dalam menciptakan inovasi pemberdayaan yang kreatif, sehingga program tidak bersifat monoton atau hanya bersifat rutinitas administratif. 3. Digitalisasi Pelaporan: Mengembangkan platform pelaporan kegiatan pemberdayaan secara real-time yang dapat diakses oleh tingkat kecamatan dan desa guna meminimalisir gap informasi dan mempercepat respon terhadap

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										kendala di lapangan.
		Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Nganjuk	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Nganjuk	100%	97,23%	97,23%	Tingkat keberhasilan diperoleh dari pertukaran informasi yang baik tentang program yang sedang berlangsung dan rencana kegiatan dan faktor penghambat ialah persaingan antar program yang dilakukan oleh berbagai pihak dapat menghambat sinergi dan kerja sama. Upaya untuk meningkatkan capaian program ini ialah menyelenggarakan pelatihan dan workshop bagi perangkat desa/kelurahan serta masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, baik dalam bidang teknis maupun manajerial.	Tindak lanjut strategis ke depan adalah mengintegrasikan seluruh program pemberdayaan melalui forum sinkronisasi multi-pihak secara berkala guna meminimalisir tumpang tindih kegiatan, sekaligus mengoptimalkan peningkatan kapasitas perangkat desa melalui pelatihan berbasis manajemen kolaboratif untuk mencapai target partisipasi lembaga kemasyarakatan desa hingga 100%.
		Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Sukomoro	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Kec. Sukomoro	80%	83%	104%	Realisasi indikator mencapai 83,00% dari target yang ditetapkan sebesar 80,00%, sehingga diperoleh capaian sebesar 104,00%. Kinerja ini menunjukkan efektivitas	Mempertahankan ritme koordinasi yang responsif melalui penguatan fungsi pengawasan dan fasilitasi lapangan. Rencana ke depan

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				KELURAHAN					koordinasi lintas sektor yang sangat baik dalam merespons hasil-hasil musyawarah maupun evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat. Tingkat tindak lanjut yang melampaui target ini mencerminkan komitmen aparat Kecamatan Sukomoro dalam memastikan bahwa setiap program pemberdayaan—baik di tingkat desa maupun kelurahan—tidak hanya berhenti pada tataran koordinasi, tetapi benar-benar diimplementasikan untuk memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.	difokuskan pada peningkatan kualitas tindak lanjut dengan cara mempercepat durasi respon atas permasalahan yang muncul di tingkat desa/kelurahan, serta mendorong inovasi dalam kegiatan pemberdayaan agar lebih selaras dengan potensi lokal dan kebutuhan riil masyarakat di wilayah Kecamatan Sukomoro.
		Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Tanjunganom	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Tanjunganom	96	96	100	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan untuk kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta	Tindak lanjut strategis ke depan adalah mengintegrasikan seluruh program pemberdayaan melalui forum sinkronisasi multi-pihak secara berkala guna meminimalisir

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									di Wilayah Kerja Kecamatan dengan target 96% dan terealisasi sebesar 96%, sehingga diperoleh tingkat capaiannya sebesar 100% dengan formulasi perhitungan dari persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif dalam proses pembangunan di kecamatan Tanjunganom. Tingkat keberhasilan diperoleh dari pertukaran informasi yang baik tentang program yang sedang berlangsung dan rencana kegiatan dan faktor penghambat ialah persaingan antar program yang dilakukan oleh berbagai pihak dapat menghambat sinergi dan kerja sama.	tumpang tindih kegiatan, sekaligus mengoptimalkan peningkatan kapasitas perangkat desa melalui pelatihan berbasis manajemen kolaboratif untuk mencapai target partisipasi lembaga kemasyarakatan desa hingga 100%.
		Meningkatnya Kebijakan Sektor Prioritas Pembangunan Nasional dan Pengadaan Barang dan Jasa yang	Persentase Kebijakan Sektor Prioritas Pembangunan Nasional yang ditindaklanjuti (%)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Setda	30%	30%	100%	Sinergi dan koordinasi yang intens antara sekretariat daerah dan perangkat daerah serta komitmen semua jajaran	Pemerintah Daerah perlu meningkatkan target cakupan tindak lanjut kebijakan sektor prioritas nasional pada periode berikutnya secara progresif dengan

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Berkualitas dan Inklusif								memperkuat sistem pemantauan berbasis digital untuk memastikan setiap kebijakan tidak hanya sekadar ditindaklanjuti secara administratif, namun benar-benar terealisasi dalam bentuk dampak ekonomi dan pembangunan yang nyata bagi masyarakat.
		Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah dan perangkat daerah	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD (%)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Bappeda	100.00	100.00	100.00	Komitmen dalam pembagunan perencanaan kinerja yang berkualitas serta sinergi dan koordinasi yang baik dari semua stake holder	Mengingat angka keselarasan sudah mencapai titik maksimal (100%), fokus Bappeda ke depan tidak lagi pada "kepatuhan administratif dokumen", melainkan pada kualitas substansi perencanaan dan efektivitas pengendalian: 1. Digitalisasi Evaluasi Perencanaan: Mengintegrasikan dokumen perencanaan ke

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										dalam sistem informasi (e-Planning) yang lebih prediktif, sehingga penyimpangan realisasi terhadap target bisa dideteksi secara real-time sebelum berakhirnya tahun anggaran. 2. Audit Kinerja Berbasis Data: Melakukan evaluasi pasca-perencanaan untuk memastikan apakah keselarasan dokumen tersebut memang menghasilkan dampak ekonomi-sosial (outcome) yang terukur di masyarakat, bukan sekadar keselarasan redaksional. 3. Optimalisasi Cascading Kinerja: Memperkuat proses penjenjangan kinerja (cascading) dari level strategis hingga level

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										individu staf di seluruh perangkat daerah agar setiap kegiatan yang direncanakan memiliki kontribusi langsung pada sasaran makro daerah.
			Persentase keselarasan Renja PD dengan Renstra PD (%)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Bappeda	100.00	100.00	100.00	Sinergi dan koordinasi yang intens antara Bappeda dan perangkat daerah serta komitmen semua jajaran	tantangan strategis Bappeda ke depan adalah melakukan transisi dari perencanaan berbasis kepatuhan dokumen menuju perencanaan berbasis bukti (evidence-based policy making) untuk memastikan bahwa keselarasan 100% yang telah dicapai saat ini mampu diterjemahkan menjadi percepatan pembangunan yang nyata dan berkelanjutan.
		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Persentase Rumusan Kebijakan di Bidang Otonomi Daerah, Kewilayahan, dan	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTE	Setda	100.00	100.00	100.00	Sinergi dan koordinasi yang intens antara sekretariat daerah dan perangkat daerah serta komitmen semua jajaran	fokus utama harus bergeser dari sekadar pencapaian administratif menuju peningkatan

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Kerjasama yang tepat waktu, tepat subtansi, dan sesuai ketentuan (%)	RAAN RAKYAT						kualitas dampak kebijakan dengan melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas program kesra bagi masyarakat, serta melakukan digitalisasi monitoring kebijakan agar sinkronisasi antar-perangkat daerah dapat dipantau secara lebih transparan dan real-time.
		Meningkatnya kinerja perangkat daerah dan kesesuaian program prioritas daerah	Persentase capaian kinerja sasaran strategis Renstra PD dengan predikat minimal tinggi (%)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Bappeda	100.00	98.00	98.00	Pencapaian sempurna pada sinkronisasi dokumen menunjukkan integritas perencanaan yang sangat baik. Namun, gap 2% pada capaian kinerja strategis menunjukkan perlunya transisi dari "keselarasan dokumen" ke arah "keselarasan dampak".	1. Implementasikan metode untuk mengidentifikasi mengapa 2% target kinerja belum mencapai predikat maksimal. 2. Fokuskan pengawasan pada cascading kinerja hingga ke level operasional di tiap OPD.
			Persentase kesesuaian program prioritas perangkat daerah terhadap prioritas	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI	Bappeda	100.00	100.00	100.00	Koordinasi di tingkat perangkat daerah telah berjalan optimal secara administratif. Keberhasilan ini adalah modal dasar untuk	kedepan Fokus pada koordinasi untuk mengubah hasil menjadi proyek inovasi berbasis komunitas

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			daerah dan isu daerah (%)	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					meningkatkan kualitas kemandirian masyarakat, bukan sekadar rutin	yang memiliki indikator berdampak yang lebih terukur.
		Meningkatnya Kualitas Layanan di Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase rumusan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti (%)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Setda	100.00%	100.00%	100.00%	Sinergi dan fasilitasi yang intens antara sekretariat daerah dan perangkat daerah serta komitmen semua jajaran	Melakukan evaluasi dampak (impact assessment) pasca-implementasi untuk memastikan regulasi tersebut memiliki daya ungkit nyata dalam peningkatan indeks kesejahteraan rakyat, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif.
		Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian	Persentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu (%)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Setda	100.00%	100.00%	100.00%	Kuatnya kesadaran pegawai serta implementasi tata kelola administrasi yang baik	kedepan dapat memanfaatkan atau mengembangkan Dashboard Kepegawaian berbasis Auto-Reminder dan integrasi data real-time untuk memangkas waktu proses administrasi dan meminimalisir potensi kesalahan input data manual.
		Meningkatnya kualitas pengelolaan	Persentase sarana dan prasarana yang dikelola	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG	Setda	100.00%	100.00%	100.00%	Kuatnya komitmen serta implementasi tata kelola	kedepan dapat menerapkan sistem manajemen aset

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		barang milik daerah yang dikelola Perangkat daerah	dalam kondisi baik (%)	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					sarana prasarana yang baik	berbasis Preventive Maintenance (pemeliharaan pencegahan) dengan metode Life Cycle Costing untuk mengoptimalkan usia pakai aset dan menekan biaya perbaikan mendadak
		Meningkatnya kualitas penyusunan produk hukum	Persentase Rancangan Produk Hukum yang diharmonisasi dan difasilitasi (%)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Setda	100%	100%	100%	Sinergi dan koordinasi yang intens antara sekretariat daerah dan perangkat daerah serta komitmen semua jajaran	Membangun platform Legal Documentation and Information Network (JDIH) yang lebih interaktif dan terbuka untuk publik, guna meningkatkan transparansi serta menjamin kualitas sinkronisasi hukum agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi di masa depan.
		Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dalam pengembangan potensi unggulan dan penyelesaian permasalahan pembangunan (%)	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Bappeda	90.00	100.00	111.11	1. Keberhasilan Signifikan: Melampaui target hingga 111,11% menunjukkan adanya adopsi hasil kelitbangan yang sangat tinggi dalam proses pengambilan kebijakan	1. Transformasi dari Kuantitas ke Kualitas (Impact-Based) Jangan hanya mengejar persentase. Mulailah menyusun

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									di lingkungan Bappeda. Ini adalah indikasi kuat bahwa "budaya riset" (evidence-based policy) sudah mulai mengakar. 2. Korelasi dengan Kepemimpinan: Anda menyebutkan adanya "Komitmen jajaran pimpinan daerah." Ini adalah faktor kunci (enabler). Keberhasilan ini kemungkinan besar bukan sekadar angka administratif, melainkan hasil dari arahan top-down yang mewajibkan setiap kebijakan didukung oleh kajian/data. 3. Potensi Risiko: Angka 100% pemanfaatan seringkali menantang untuk dipertahankan secara berkelanjutan karena kualitas hasil kelitbangan itu sendiri bisa bervariasi. Tantangan berikutnya bukan lagi pada "persentase jumlah," melainkan pada "kualitas dampak" dari	Indeks Kualitas Pemanfaatan Kelitbangan, yaitu mengukur sejauh mana kebijakan yang didasarkan pada riset tersebut berhasil memecahkan masalah atau meningkatkan PAD/kesejahteraan masyarakat. 2. Institutionalizing the Process Digital Repository: Pastikan semua hasil kelitbangan terdokumentasi dalam sistem informasi terpusat yang mudah diakses oleh seluruh OPD agar tidak terjadi tumpang tindih kajian. 3. Standarisasi Metodologi: Agar pimpinan terus berkomitmen, kualitas riset harus dapat dipertanggungjawabkan (peer-

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									hasil kelitbangan tersebut.	reviewed atau melibatkan tenaga ahli/akademisi) sehingga hasil akhirnya valid untuk dijadikan landasan hukum. 4. Kolaborasi Pentahelix Perluas sumber riset dengan melibatkan akademisi, komunitas, dan pihak swasta (Pentahelix). Bappeda tidak harus mengerjakan semua riset sendiri, namun berperan sebagai kurator dan fasilitator. 5. Feedback Loop System Buat mekanisme evaluasi pasca-kebijakan. Jika sebuah kebijakan berbasis kelitbangan dijalankan, perlu ada monitoring apakah hasil riset tersebut akurat dalam memprediksi

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										dampak di lapangan.
		Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan (%)	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Bappeda	45.60	96.00	210.52	1.Akselerasi Inovasi: Lonjakan capaian lebih dari 200% mengindikasikan adanya quantum leap atau perubahan kebijakan strategis yang drastis di tahun berjalan. Kemungkinan besar, telah terjadi proses "adopsi masal" terhadap inovasi yang selama ini mungkin tersimpan (tidak terpakai) menjadi terintegrasi dalam sistem kerja. 2. Efektivitas Sistem: Angka 96% menunjukkan bahwa hampir seluruh produk inovasi yang dihasilkan telah masuk ke fase implementasi. Ini adalah sinyal bahwa hambatan birokrasi dalam penerapan inovasi (sering disebut innovation resistance) telah berhasil diminimalisir melalui komitmen stakeholder. 3. Kesenjangan	Untuk mempertahankan tren positif ini dan memastikan inovasi tidak hanya "dipakai" tapi juga "berdampak", berikut saran tindak lanjutnya: 1. Transformasi Menjadi Innovation Sustainability Jangan berhenti pada angka pemanfaatan. Mulailah melakukan Audit Inovasi. Tujuannya adalah untuk mengukur Return on Innovation (ROI). Apakah inovasi tersebut benar-benar mempercepat proses, menghemat anggaran, atau justru memunculkan biaya pemeliharaan baru? 2. Mekanisme Scale-Up dan

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Kesiapan: Perlu diwaspadai apakah kecepatan adopsi ini dibarengi dengan kesiapan SDM (peningkatan kompetensi) untuk mengoperasikan inovasi tersebut, atau hanya sekadar "memakai" secara administratif.	Replikasi Karena pemanfaatan sudah mencapai 96%, langkah berikutnya adalah standarisasi. Inovasi yang sudah berhasil harus diformalkan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah atau SOP yang baku agar tetap berjalan meskipun terjadi pergantian pimpinan. Lakukan replikasi: Inovasi yang terbukti efektif di satu unit kerja harus dipaksa (diarahkan) untuk diterapkan di unit lain dengan karakteristik yang sama. 3. Incentive and Reward System Agar komitmen stakeholder tetap terjaga, perlu ada penghargaan formal bagi OPD atau individu yang

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										menjadi pionir/pengguna inovasi terbaik. Tanpa apresiasi, motivasi untuk menciptakan atau menggunakan inovasi baru akan meredup. 4. Pemetaan Tantangan Inovasi Gunakan data ini untuk memetakan inovasi mana yang paling memberikan dampak efisiensi tertinggi. Fokuskan pendanaan dan pengembangan ke depan pada inovasi yang memiliki leverage tinggi (skalabilitas luas).
		Terwujudnya Fasilitasi kebijakan di bidang Kinerja OPD, Pelayanan Publik, Penataan Organisasi dan Tata Laksana	Persentase Kebijakan di Bidang Kinerja OPD, Pelayanan Publik, Penataan Organisasi dan Tata Laksana yang difasilitasi (%)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Setda	100.00	100.00	100.00%	Sinergi dan fasilitasi yang intens antara sekretariat daerah dan perangkat daerah serta komitmen semua jajaran	Mengingat fungsi fasilitasi sudah berada pada level optimal (100%), fokus utama ke depan adalah Transformasi dari Fasilitasi ke Akselerasi. Penguatan Metodologi Tata

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Laksana: Mengganti model fasilitasi yang bersifat reaktif menjadi proaktif dengan mengadopsi prinsip Lean Government untuk menyederhanakan proses bisnis (prosedur) yang berbelit-belit. Digitalisasi Pelayanan Publik: Mendorong integrasi data pelayanan publik ke dalam satu platform sistem informasi manajemen yang terpadu guna meningkatkan efisiensi dan transparansi. Evaluasi Kinerja Berbasis Outcome: Tidak hanya memfasilitasi kebijakan, tetapi mulai menerapkan mekanisme outcome-based monitoring untuk memastikan

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										kebijakan yang terfasilitasi benar-benar berdampak pada peningkatan indeks kepuasan masyarakat dan efektivitas organisasi.
	Meningkatnya pemerintahan berintegritas dan pengawasan berkualitas		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai)		Inspektorat	3.200	3.987	124.594		
			Indeks Integritas Pemerintah Daerah (Indeks)		Inspektorat	69	72.76	105.449		
		Meningkatnya efektivitas pencegahan korupsi	Nilai masing-masing area intervensi MCP KPK (Nilai)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Inspektorat	100%	100%	100%	Sinergi yang kuat antara Inspektorat dan OPD dalam penyelesaian rekomendasi auditor eksternal.	Melakukan akselerasi pada temuan lama yang masih menggantung
		Meningkatnya efektivitas pencegahan resiko fraud pada perangkat daerah	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan Fraud Control Planning (FCP) sesuai standar (%)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Inspektorat	15%	74%	493%	Sinergi yang kuat antara Inspektorat dan OPD dalam penyelesaian rekomendasi auditor eksternal.	Melakukan akselerasi pada temuan lama yang masih menggantung
		Meningkatnya kepatuhan perangkat daerah terhadap	PersentaseTindaklanjut rekomendasi BPK Tahun	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN	Inspektorat	95	95.43	99.55	Tingginya tingkat kepatuhan PD dalam menindaklanjuti	Mempertahankan mekanisme pemantauan temuan

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		tindak lanjut hasil pemeriksaan	Anggaran N-1 (%)	PENGAWASAN					rekomendasi hasil pengawasan internal.	audit internal setiap triwulan.
		Meningkatnya kepatuhan perangkat daerah terhadap tindak lanjut hasil pengawasan	Persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan APIP > 80% (%)	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Inspektorat	70	57	122.81	Realisasi secara angka melampaui target, namun status formal masih dalam proses evaluasi BPKP dengan pedoman baru.	Melakukan koordinasi intensif dengan BPKP Perwakilan Jatim untuk percepatan finalisasi hasil evaluasi.
		Meningkatnya kualitas manajemen resiko perangkat daerah	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan manajemen resiko sesuai standart (%)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Inspektorat	60	100	60.00	Sinergi yang kuat antara Inspektorat dan OPD dalam penyelesaian rekomendasi auditor eksternal.	Melakukan akselerasi pada temuan lama yang masih menggantung
		Meningkatnya kualitas pengawasan berbasis resiko	Jumlah dokumen perencanaan pengawasan berbasis resiko sesuai standar (Dokumen)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Inspektorat	1	1	100.00	Perangkat Daerah telah menyusun register risiko dan rencana tindak pengendalian (RTP) dengan cukup memadai.	Mendorong integrasi manajemen risiko ke dalam sistem perencanaan pembangunan daerah secara digital.
		Meningkatnya pembangunan zona integritas	Persentase Perangkat Daerah yang layak diusulkan mendapat predikat WBK/WBBM (%)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Inspektorat	95.22	9.3	1023.87	Tingginya tingkat kepatuhan PD dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan internal.	Mempertahankan mekanisme pemantauan temuan audit internal setiap triwulan.

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat berkadar pengawasan	Persentase laporan pengaduan masyarakat yang terselesaikan (%)	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Inspektorat	100	88.47	113.03	Perangkat Daerah telah menyusun register risiko dan rencana tindak pengendalian (RTP) dengan cukup memadai.	Mendorong integrasi manajemen risiko ke dalam sistem perencanaan pembangunan daerah secara digital.
		Meningkatnya peran APIP sebagai assurance dan consulting sesuai dengan PKPT berbasis resiko	Persentase Penyelenggaraan Assurance dan Consulting sesuai dengan PKPT (%)	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Inspektorat	100	100	100.00	Perangkat Daerah telah menyusun register risiko dan rencana tindak pengendalian (RTP) dengan cukup memadai.	Mendorong integrasi manajemen risiko ke dalam sistem perencanaan pembangunan daerah secara digital.
	Meningkatnya tata kelola keuangan dan kapasitas fiskal daerah		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Indeks)		Bapenda	70.812	61.327	86.61		
			Rasio kapasitas fiskal daerah (Rasio)		Bapenda	1.124	0.095	8.45		
		Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak/Wajib Pungut/Wajib Retribusi	Persentase Kepatuhan Wajib Pajak/Retribusi/Wajib Pungut (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Bapenda	90.5	90.4	99.89	Pengukuran kinerja Bapenda Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa tujuan, sasaran dari Bapenda Kabupaten Nganjuk telah selaras dengan tujuan, sasaran RPD Kabupaten Nganjuk tahun 2024 – 2026 dan RPJMD 2025-2029. Secara Umum Badan pendapatan	optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, perluasan basis pajak, penguatan sistem digitalisasi pelayanan pajak, serta pengembangan potensi ekonomi daerah sebagai

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									daerah kabupaten Nganjuk telah melaksanakan tugas dan fungsinya di Bidang Pendapatan.	sumber pendapatan baru
		Meningkatnya Penerapan Sistem Pajak Daerah Berbasis Digital	Indeks Elektronifikasi Pemerintah daerah (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Bapenda	93.75	95.7	102.08	Pengukuran kinerja Bapenda Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa tujuan, sasaran dari Bapenda Kabupaten Nganjuk telah selaras dengan tujuan, sasaran RPD Kabupaten Nganjuk tahun 2024 – 2026 dan RPJMD 2025-2029. Secara Umum Badan pendapatan daerah kabupaten Nganjuk telah melaksanakan tugas dan fungsinya di Bidang Pendapatan.	optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, perluasan basis pajak, penguatan sistem digitalisasi pelayanan pajak, serta pengembangan potensi ekonomi daerah sebagai sumber pendapatan baru
		Meningkatnya Realisasi Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah	Persentase Realisasi lain- lain PAD yang sah (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Bapenda	100	112.03	112.03	Pengukuran kinerja Bapenda Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa tujuan, sasaran dari Bapenda Kabupaten Nganjuk telah selaras dengan tujuan, sasaran RPD Kabupaten Nganjuk tahun 2024 – 2026 dan RPJMD 2025-2029. Secara Umum Badan pendapatan	optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, perluasan basis pajak, penguatan sistem digitalisasi pelayanan pajak, serta pengembangan potensi ekonomi daerah sebagai

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									daerah kabupaten Nganjuk telah melaksanakan tugas dan fungsinya di Bidang Pendapatan.	sumber pendapatan baru
		Meningkatnya Upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah	persentase peningkatan subyek/obyek pajak/ retribusi daerah yang dimuktahirkan (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Bapenda	1.09	1.13	103.67	Pengukuran kinerja Bapenda Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa tujuan, sasaran dari Bapenda Kabupaten Nganjuk telah selaras dengan tujuan, sasaran RPD Kabupaten Nganjuk tahun 2024 – 2026 dan RPJMD 2025-2029. Secara Umum Badan pendapatan daerah kabupaten Nganjuk telah melaksanakan tugas dan fungsinya di Bidang Pendapatan.	optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, perluasan basis pajak, penguatan sistem digitalisasi pelayanan pajak, serta pengembangan potensi ekonomi daerah sebagai sumber pendapatan baru
		Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Persentase Penyajian laporan keuangan Perangkat Daerah yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (%)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BPKAD	100.00	100.00	100.00	Fasilitasi. koordinasi dan pembinaan kepada perangkat daerah dalam penyajian laporan keuangan	Mengingat kepatuhan sudah berada di titik maksimal (100%), berikut adalah strategi untuk melangkah lebih jauh: 1. Transformasi Menjadi Financial Dashboarding Jangan hanya

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										berhenti pada laporan yang "sesuai aturan". Manfaatkan data akuntansi yang sudah rapi tersebut untuk menyusun Dashboard Keuangan Real-Time. Pimpinan daerah perlu melihat posisi realisasi anggaran, arus kas, dan potensi defisit/surplus secara harian atau mingguan, bukan hanya saat laporan akhir tahun. 2. Peningkatan Kompetensi SDM (Professional Development) Lakukan up-skilling bagi pengelola keuangan di setiap Perangkat Daerah. Tantangan ke depan bukan lagi sekadar input data, melainkan analisis data. Berikan pelatihan mengenai Data Analytics

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										untuk akuntan pemerintah agar mereka bisa memberikan rekomendasi kebijakan berdasarkan tren keuangan. 3. Audit Internal Berbasis Risiko Alih-alih melakukan pembinaan yang bersifat general, gunakan pendekatan Risk-Based Monitoring. Identifikasi OPD mana yang secara historis memiliki risiko kesalahan input lebih tinggi, lalu berikan pendampingan lebih intensif kepada mereka, sementara untuk OPD yang sudah mandiri, cukup dilakukan supervisi berkala. 4. Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Pastikan sistem informasi akuntansi (SIMDA/SIPD) terintegrasi secara seamless dengan sistem manajemen aset daerah. Seringkali, masalah akuntansi bukan pada pencatatan transaksi, melainkan pada ketidaksesuaian data aset yang mempengaruhi nilai dalam neraca.
		Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (%)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BPKAD	40.00	32.00	80.00	Faktor penghambat : masih tingginya belanja pegawai yang disebabkan pengangkatan PPPK baru serta adanya penurunan besaran dana TKD dari pemerintah pusat sehingga mengurangi belanja untuk infrastruktur pelayanan publik	Melakukan upaya integratif dengan seluruh stakeholder dalam rangka efisiensi belanja pegawai tanpa menimbulkan gejolak dalam internal pegawai/aparatur pemerintah daerah. Mengidentifikasi dan mengoptimalisasi potensi peningkatan pendapatan dari PAD
			Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan	5.02.02 PROGRAM PENGELOLA	BPKAD	30.00	37.00	123.00	Komitmen jajaran pimpinan daerah dalam	melaksanakan Spending Review (tinjauan belanja)

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	AN KEUANGAN DAERAH					melakukan efisiensi belanja pegawai	secara berkala. Fokus pada efisiensi belanja operasional dan pemeliharaan gedung/peralatan agar belanja pegawai yang tinggi tidak mengorbankan belanja barang/jasa publik.
		Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BPKAD	5.00	4.02	80.46	Faktor penghambat : masih tingginya belanja pegawai yang disebabkan pengangkatan PPPK baru serta adanya penurunan besaran dana TKD dari pemerintah pusat sehingga mengurangi belanja untuk ipeningkatan asset tetap	menerapkan Strategi Pemanfaatan Aset (Asset Optimization). Jangan hanya terpaku pada belanja baru. Identifikasi aset daerah yang tidak produktif dan dorong kerja sama pemanfaatan (sewa/KSP) dengan pihak ketiga agar aset menjadi sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah).
			Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan aset daerah yg sesuai ketentuan (%)	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG	BPKAD	100.00	100.00	100.00	Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan kepada perangkat daerah dalam pengelolaan asset daerah	Transisi dari Compliance (kepatuhan) ke Performance (kinerja). Pastikan

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				MILIK DAERAH						setiap aset yang dikelola secara "sesuai ketentuan" juga memberikan manfaat (utilitas) yang tinggi bagi masyarakat, bukan sekadar tertib di atas kertas.
		Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (%)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BPKAD	80.00	106.72	133.40	Capaian 133,40% menunjukkan komitmen luar biasa pimpinan daerah untuk memprioritaskan layanan dasar masyarakat. Ini adalah bukti bahwa anggaran benar-benar pro-rakyat.	Pertahankan namun perketat pengawasan. Pastikan besarnya realisasi belanja linier dengan perbaikan output layanan (misal: penurunan angka putus sekolah atau peningkatan akses kesehatan).
			Persentase Penurunan SILPA (%)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BPKAD	5.00	16.76	200.00	Fasilitasi, koordinasi kepada perangkat daerah dalam optimalisasi penyerapan anggaran yang telah ditetapkan	Pertahankan ritme penyerapan ini melalui Monitoring Evaluasi (Monev) Triwulanan. Fokus pada "penyerapan berkualitas," di mana penyerapan anggaran tidak hanya dilakukan di akhir tahun (menghindari penumpukan belanja di Desember).

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Meningkatnya kualitas layanan publik		Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)		Setda	4.58	4.61	100.655	Perbaikan kualitas layanan publik oleh penyelenggara layanan yang didasarkan pada kepatuhan regulasi pelayanan publik	
			Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik (Indeks)		Setda	87.6	89.34	101.986	Perbaikan kualitas layanan publik oleh penyelenggara layanan yang meliputi aspek SDM, sarana prasarana, waktu, SOP layanan	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Setda	83,55	83,35	99,76%	Implemetasi akuntabilitas kinerja yang berkualitas pada aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Karena sistem sudah berjalan sangat baik, fokus harus bergeser dari "Kepatuhan" menjadi "Pemanfaatan Data Kinerja": 1. Transformasi Cascading Kinerja (Keterkaitan) Pastikan bahwa indikator kinerja di level staf benar-benar berkontribusi langsung pada sasaran strategis pimpinan. Gunakan metode Pohon Kinerja (Performance Tree) untuk memastikan tidak ada kegiatan

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										yang sia-sia (tidak mendukung target utama). 2. Evaluasi Berbasis Dampak (Outcome-Based Evaluation) Jangan hanya melaporkan realisasi output (jumlah kegiatan). Mulailah melakukan evaluasi mendalam mengenai dampak (outcome) dari kegiatan tersebut bagi masyarakat. Pertanyakan: "Apakah dengan tercapainya target kinerja ini, masalah utama masyarakat benar-benar terpecahkan?" 3. Peer Review Antar-Perangkat Daerah Karena Setda adalah "motor penggerak" (koordinator), lakukan pendampingan

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										(mentoring) kepada OPD lain yang nilainya masih di bawah Setda. Ini akan meningkatkan nilai rata-rata akuntabilitas kinerja di tingkat Pemerintah Kabupaten secara keseluruhan. 4. Penguatan Evaluasi Internal (Self-Assessment) Gunakan hasil evaluasi tahun ini untuk melakukan perbaikan mandiri. Fokus pada rekomendasi hasil audit kinerja tahun sebelumnya; apakah semua rekomendasi sudah ditindaklanjuti secara nyata?
		Meningkatnya cakupan penerbitan dokumen pencatatan sipil	Cakupan penerbitan akta kematian (%)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Dispendukcapil	100	100	100	Faktor pendukung yaitu dengan menerapkan strategi "JEBOL GAWANG" (Jemput Bola Gawekne Administrasi Kependudukan Warga Nganjuk) yang dilaksanakan secara	Terhadap beberapa permasalahan yang ada dan/atau sebagai bentuk perbaikan dalam rangka pencapaian target indikator Kinerja Dinas pada pereode berikutnya,

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									rutin untuk menjangkau masyarakat di desa-desa.	terdapat langkah perbaikan:
			Cakupan penerbitan akta perkawinan (%)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Dispendukcapil	100	100	100	1) Sosialisasi admindukcapil di tempat ibadah Pure Hindu di Bajulan dan desa serta kecamatan/kelurahan dan pelayanan jemput bola pencatatan sipil kepada masyarakat secara terus menerus dilaksanakan ke Kecamatan/Desa, tempat ibadah, pelayanan khusus Difabel dan Lansia yang termasuk kelompok rentan serta anak kondisi 5 (Lima) Kelompok RANHAM serta ODGJ; 2) Komitmen pemimpin yang kuat Pembinaan dan Peningkatan kapasitas petugas melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan.	1. Sosialisai dan Penerapan Identitas Kependudukan Digital kepada Masyarakat (IKD); 2. Pelayanan Jemput bola untuk pendekatan dan percepatan pelayanan adminduk kepada masyarakat; 3. Melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran; 4. Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi anggaran secara internal sehingga revisi anggaran dapat diminimalisir; 5. Memastikan perubahan kebijakan tidak berdampak pada program/kegiatan/alokasi anggaran Prioritas
			Cakupan penerbitan akta perceraian (%)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Dispendukcapil	81.5	100	100	1) Sosialisasi admindukcapil di tempat ibadah Pure Hindu di Bajulan dan desa serta kecamatan/kelurahan dan pelayanan jemput bola pencatatan sipil kepada masyarakat secara terus menerus	

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									dilaksanakan ke Kecamatan/Desa, tempat ibadah, pelayanan khusus Difabel dan Lansia yang termasuk kelompok rentan serta anak kondisi 5 (Lima) Kelompok RANHAM serta ODGJ; 2) Komitmen pemimpin yang kuat Pembinaan dan Peningkatan kapasitas petugas melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan.	6. Meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan.
			Cakupan penerbitan akta kelahiran 0-18 tahun (%)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Dispendukcapil	95	96.97	102.07	Faktor pendukung ketercapaian kinerja Pelayanan Online Sedudo Dukcapil dan Pelayanan Online melalui perjanjian Kerjasama Rumah Sakit, Puskesmas, dan Klinik Kesehatan untuk pemanfaatan layanan pengajuan dokumen akta kelahiran.	
		Meningkatnya cakupan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk	Cakupan kepemilikan IKD (%)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Dispendukcapil	14	13.68	97.71	Faktor pendukung yaitu adanya inovasi ADM (Anjungan Dukcapil Mandiri) yang merupakan mesin layanan mandiri seperti ATM untuk mencetak dokumen kependudukan	

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									(KK, Akta, KIA, dll.) secara mandiri, cepat, mudah, dan gratis setelah permohonan diajukan online atau langsung, menggunakan PIN, sidik jari, atau QR Code dari aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).	
			Cakupan Penerbitan KIA (%)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Dispendukcapil	33	52.1	157.87	Faktor pendukung yaitu adanya inovasi : 1. Layanan berbasis digital melalui Whatapps ini menghadirkan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan, khususnya pencetakan KTP-el pemula, penggantian KTP-el hilang, serta pengajuan Kartu Identitas Anak (KIA), Dinas Dukcapil Kabupaten Nganjuk bekerja sama dengan pihak ekspedisi J&T Express. Masyarakat hanya perlu membayar biaya pengiriman sebesar Rp10.000 yang dibayarkan langsung kepada petugas J&T saat dokumen	

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									diterima; 2. ADM (Anjungan Dukcapil Mandiri): merupakan Mesin mesin layanan mandiri seperti ATM untuk mencetak dokumen kependudukan (KK, Akta, KIA, dll.) secara mandiri, cepat, mudah, dan gratis setelah permohonan diajukan online atau langsung, menggunakan PIN, sidik jari, atau QR Code dari aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).	
			Cakupan penerbitan KK (%)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Dispendukcapil	100	100	100	Faktor pendukung yaitu adanya adanya ADM (Anjungan Dukcapil Mandiri) yang merupakan mesin layanan mandiri seperti ATM untuk mencetak dokumen kependudukan (KK, Akta, KIA, dll.) secara mandiri, cepat, mudah, dan gratis setelah permohonan diajukan online atau langsung, menggunakan PIN, sidik jari, atau QR Code dari aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).	

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Cakupan penerbitan KTP-El (%)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Dispendukcapil	99.49	99.02	99.52	Faktor pendukung yaitu adanya inovasi GAPURA DIGITAL: Layanan berbasis digital melalui Whatapps ini menghadirkan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan, khususnya pencetakan KTP-el pemula, penggantian KTP-el hilang, serta pengajuan Kartu Identitas Anak (KIA), Dinas Dukcapil Kabupaten Nganjuk bekerja sama dengan pihak ekspedisi J&T Express. Masyarakat hanya perlu membayar biaya pengiriman sebesar Rp10.000 yang dibayarkan langsung kepada petugas J&T saat dokumen diterima.	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Layanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang terfasilitasi (%)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Setda	100.00	100.00	100.00	ealisasi indikator mencapai 100,00% dari target yang ditetapkan sebesar 100,00%. Keberhasilan pencapaian target ini didukung oleh optimalisasi inovasi digital melalui	Mempertahankan tingkat kepuasan pemangku kepentingan melalui peningkatan fitur pada aplikasi manajemen protokol agar lebih

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									penerapan sistem aplikasi dalam pengelolaan manajemen agenda, keprotokolan, dan komunikasi pimpinan. Digitalisasi proses bisnis tersebut terbukti mampu meningkatkan efektivitas koordinasi dan kecepatan respon dalam penyediaan layanan protokol, sehingga seluruh agenda pimpinan dapat terlaksana dengan tertib dan tepat waktu sesuai standar pelayanan yang berlaku.	integratif, serta memperkuat protokol keamanan data dalam setiap komunikasi dan pertukaran informasi pimpinan.
		Meningkatnya kualitas pelayanan admininistrasi umum	Persentase dokumen administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (%)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Setda	100.00	100.00	100.00	Realisasi indikator mencapai 100,00% dari target 100,00%. Tingkat keberhasilan ini mencerminkan tingginya komitmen dan profesionalisme aparatur dalam pengelolaan administrasi perkantoran. Seluruh dokumen masuk dan keluar telah dikelola dengan standar tata naskah dinas yang baku, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-	Melakukan penguatan pengawasan internal melalui sistem monitoring tindak lanjut dokumen berbasis real-time guna menjaga konsistensi kinerja di masa mendatang, serta secara berkala melakukan pemutakhiran kompetensi pegawai terkait regulasi terbaru di

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									undangan, yang berimplikasi pada terciptanya tertib administrasi di lingkungan Sekretariat Daerah.	bidang tata kelola administrasi pemerintahan
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesekretariatan DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Sekretariat DPRD (Nilai)	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Set. DPRD	84	86.86	103.40	Keberhasilan pencapaian kinerja didukung oleh beberapa faktor utama, yaitu: 1. Keselarasan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan, sehingga program dan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja. 2. Koordinasi dan sinergi internal yang efektif antarbagian di lingkungan Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. 3. Dukungan sarana dan prasarana serta anggaran yang memadai, sehingga kegiatan pelayanan dan fasilitasi dapat berjalan secara optimal. 4. Penerapan sistem akuntabilitas kinerja yang semakin baik, ditunjukkan dengan	1. Penguatan Layanan & Sarpras: Pertahankan standar kualitas layanan dan pemeliharaan aset yang telah melampaui target dengan mengimplementasikan sistem e-maintenance agar konsistensi kepuasan masyarakat tetap terjaga. 2. Optimasi Fungsi Pengawasan & Penganggaran: Keberhasilan melampaui target pada pengawasan dan penetapan Perda APBD menunjukkan efektivitas koordinasi yang tinggi; langkah selanjutnya adalah memastikan
			Persentase Sarana dan Prasarana yang layak (%)	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Set. DPRD	85	87	102.35		
		Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (%)	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Set. DPRD	82	97	118.29		
		Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (%)	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANA	Set. DPRD	60	53.33	88.88		

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Peraturan Perundang-undangan		AN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					keterukuran indikator kinerja dan capaian yang dapat dipertanggungjawabkan.	kualitas hasil pengawasan tersebut selaras dengan temuan audit eksternal. 3. Akselerasi Legislasi: Mengingat indikator Penetapan Ranperda menjadi satu-satunya catatan kritis di bawah target (88,88%), maka diperlukan pembentukan Tim Percepatan Pembahasan Ranperda yang berfungsi melakukan pendampingan teknis dan harmonisasi regulasi agar proses legislasi lebih lincah (agile) dan tidak terhambat oleh kendala birokrasi.
			Persentase Penetapan Perda APBD Tahun N (%)	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Set. DPRD	82	97	118.29	5. Penerapan sistem akuntabilitas kinerja yang semakin baik, ditunjukkan dengan keterukuran indikator kinerja dan capaian yang dapat dipertanggungjawabkan.	
		Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan	Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Melaksanakan Perjanjian Kerjasama (%)	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTR	Dispendukcapil	45.83	37.05	80.84	Faktor pedukung yaitu 1. Terselenggaranya sosialisasi pemanfaatan data melalui zoom meeting peningkatan pelayanan	Terhadap beberapa permasalahan yang ada dan/atau sebagai bentuk perbaikan dalam rangka pencapaian

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ASI KEPENDUDUKAN					admindukcapil dan faktor penghambat proses perjanjian kerjasama pemanfaaatan data kependudukan; 2. Pendekatan Pelayanan kepada masyarakat di 20 Kecamatan dan 284 desa/kelurahan dengan Pelayanan Aplikasi Sedudo (Sistem Elektronik Terpadu Daerah Online) yang merupakan rencana kerja dispendukcapil Kabupaten Nganjuk; 3. Layanan Informasi Administrasi Kependudukan (chatbot) Mengambil Antrian Melalui Chat Whatapps : 0812 2160 0100; 4. Layanan Pengaduan dan Konsultasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk Pengaduan dan Konsultasi akan dilayani pada Senin-jum'at Pukul 08.00-14.30 WIB melalui WhatApps : 0822 3154 0889 (kirimkan pesan dengan format : Nama, NIK, dan pesan pengaduan.);	target indikator Kinerja Dinas pada pereode berikutnya, terdapat langkah perbaikan: 1. Sosialisai dan Penerapan Identitas Kependudukan Digital kepada Masyarakat (IKD); 2. Pelayanan Jemput bola untuk pendekatan dan percepatan pelayanan adminduk kepada masyarakat; 3. Melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran; 4. Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi anggaran secara internal sehingga revisi anggaran dapat diminimalisir; 5. Memastikan perubahan kebijakan tidak berdampak pada
		Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan (%)	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Dispendukcapil	10	9	90		

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									5. Melaksanakan Pelayanan Di Mall Pelayanan Publik Nyawiji Kabupaten Nganjuk.	program/kegiatan/alokasi anggaran Prioritas 6. Meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan.
	Meningkatnya transformasi digital pemerintah daerah		Indeks Pemerintah Digital (Indeks)		Diskominfo	1.5	1.5	100.000		

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatnya keamanan aplikasi dan infrastruktur daerah	Persentase aplikasi pemerintah daerah yang memenuhi standart keamanan informasi (%)	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Diskominfo	100	100	100%	- Komitmen pemerintah daerah dalam penerapan standar keamanan informasi dan audit keamanan SPBE. - Dukungan kebijakan dan koordinasi dalam pelaksanaan persandian dan pengamanan informasi.	- Melanjutkan penerapan dan evaluasi sistem manajemen keamanan informasi secara bertahap. - Meningkatkan koordinasi dan pembinaan kepada perangkat daerah terkait keamanan informasi. - Menjadikan capaian Tahun 2025 sebagai fondasi penguatan keamanan informasi pada periode Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika 2025–2029.
		Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Skor keterbukaan informasi publik Kabupaten Nganjuk (Skor)	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Diskominfo	90	89.11	99%	- Komitmen perangkat daerah dalam pengelolaan dan penyebarluasan informasi publik. - Peningkatan partisipasi perangkat daerah dalam pengelolaan media komunikasi dan layanan informasi. - Dukungan sarana komunikasi publik yang relatif memadai.	- Menyiapkan data, dokumen, dan bukti pendukung secara lebih sistematis untuk mendukung penilaian eksternal. - Meningkatkan koordinasi dan pembinaan kepada perangkat daerah terkait standar keterbukaan informasi publik.

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										- Menjadikan capaian Tahun 2025 sebagai baseline peningkatan kinerja keterbukaan informasi publik pada periode Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika 2025-2029.
		Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase Data Statistik Sektoral Sesuai Prinsip Satu Data Indonesia (%)	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Diskominfo	45	53.6	119%	- Meningkatnya koordinasi antar perangkat daerah dalam penerapan prinsip Satu Data Indonesia. - Dukungan kebijakan dan kelembagaan dalam pengelolaan data statistik sektoral. - Peningkatan pemahaman perangkat daerah terhadap pentingnya kualitas data.	- Memperkuat perencanaan output statistik sektoral agar selaras dengan kebutuhan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika 2025-2029. - Mengoptimalkan forum satu data daerah sebagai sarana koordinasi dan sinkronisasi data. - Menjadikan capaian Tahun 2025 sebagai dasar peningkatan kualitas statistik sektoral pada periode Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika 2025–2029.

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatnya proporsi sistem layanan digital yang berfungsi dengan baik	Persentase sistem layanan digital yang berfungsi dengan baik (%)	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Diskominfo	100	100	100%	- Ketersediaan dan kesiapan infrastruktur TIK, jaringan intra, dan pusat data pemerintah daerah. - Penerapan standar teknis dan arsitektur SPBE yang konsisten. - Koordinasi lintas perangkat daerah dalam pengelolaan dan pemanfaatan sistem digital.	- Melakukan pemeliharaan dan pengembangan sistem digital secara berkelanjutan. - Memperkuat tata kelola SPBE agar capaian Tahun 2025 menjadi baseline yang kuat bagi target Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika 2025–2029. - Meningkatkan kapasitas SDM TIK untuk menjaga kualitas layanan digital.
Meningkatkan infrastruktur publik yang handal dan berkelanjutan			Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (Indeks)		Dinas PUPR	80	74.05	92.563		
	Meningkatnya infrastruktur konektivitas wilayah yang handal		Rasio Konektivitas (Rasio)		Dinas PUPR	70.05	73.51	104.94		
			Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)		Dinas PUPR	0.21	0.20	95.24		
		Meningkatnya kelaikan	Persentase kendaraan	2.15.02 PROGRAM PENYELENG	Dishub	99.21	97.54	98.32	Keberhasilan tersebut didukung oleh kegiatan Pengujian Berkala	Untuk mendorong angka kelaikan hingga mencapai

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		kendaraan bermotor	bermotor yang laik jalan (%)	GARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					Kendaraan Bermotor dimana dalam pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor (KIR) berjalan secara konsisten serta meningkatnya kesadaran pemilik kendaraan terhadap aspek keselamatan	atau melampaui target, berikut adalah langkah strategis yang disarankan: 1. Implementasi Pre-Check System Jangan menunggu kendaraan gagal di lokasi uji. Dorong bengkel-bengkel swasta di Nganjuk untuk menjadi mitra pra-uji. Dengan memberikan edukasi kepada pemilik kendaraan mengenai check-list mandiri sebelum mereka datang ke Dishub, tingkat kelulusan pada uji berkala akan meningkat signifikan. 2. Digitalisasi Hasil Uji (BLU-e) dan Notifikasi Pastikan sistem Bukti Lulus Uji Elektronik (BLU-e) sudah terintegrasi penuh. Gunakan sistem notifikasi

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										otomatis (misalnya via WhatsApp) kepada pemilik kendaraan yang masa berlaku KIR-nya akan habis. Seringkali, ketidaklaikan terjadi karena pemilik lupa jadwal pengujian. 3. Mobile/Drive-Thru Inspection Pertimbangkan untuk jemput bola (uji keliling) ke titik-titik kumpul kendaraan angkutan barang/umum. Ini akan mempermudah aksesibilitas dan memastikan kendaraan-kendaraan yang selama ini menghindari lokasi uji dapat terpantau. 4. Penegakan Hukum yang Presisi Lakukan penindakan (operasi gabungan) yang fokus pada

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										kendaraan yang tidak memiliki bukti uji atau masa berlakunya sudah lewat. Hal ini akan memberikan efek jera (deterrent effect) bagi pemilik yang masih abai terhadap aspek keselamatan.
		Meningkatnya kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan RTRW (%)	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Dinas PUPR	100.00	100.00	100.00	Realisasi indikator mencapai 100,00% dari target yang ditetapkan sebesar 100,00%. Pencapaian ini merefleksikan keberhasilan Dinas PUPR dalam memastikan bahwa seluruh pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten telah selaras dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini didukung penuh oleh telah ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai landasan hukum yang operasional. Legalitas tersebut menjadi instrumen krusial dalam	Mempertahankan konsistensi pengendalian pemanfaatan ruang melalui penguatan fungsi pengawasan dan pengendalian lapangan secara berkala. Selain itu, akan dilakukan pemutakhiran data spasial berbasis sistem informasi geografis agar setiap perubahan dinamika pembangunan wilayah tetap terpantau dan terverifikasi kesesuaiannya dengan RTRW secara real-time.

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									pengendalian pemanfaatan ruang, sehingga setiap kegiatan pembangunan dapat terkoordinasi, teratur, dan minim konflik penggunaan lahan.	
		Meningkatnya ketaatan berlalu lintas	Persentase pengemudi angkutan orang dan barang yang taat peraturan berlalu lintas (%)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Dishub	80	82.3	102.88	1. Efektivitas Penegakan dan Sosialisasi: Capaian di atas 100% mengindikasikan bahwa kombinasi antara edukasi/sosialisasi dan penegakan aturan di lapangan (operasi tertib lalu lintas) oleh Dinas Perhubungan bekerja dengan sangat baik. 2. Budaya Keselamatan: Peningkatan ini menunjukkan bahwa pengemudi angkutan (orang dan barang) mulai memandang ketaatan aturan sebagai bagian dari kebutuhan operasional, bukan sekadar beban administratif atau ketakutan akan sanksi. 3. Kualitas Data: Perlu dipastikan bahwa persentase ini didasarkan pada data	Meskipun sudah melampaui target, sektor lalu lintas dan angkutan jalan sangat dinamis. Berikut adalah strategi untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas ketaatan: 1. Transformasi Menjadi Predictive Monitoring Jangan hanya melakukan penindakan saat pelanggaran terjadi. Gunakan data pelanggaran di titik-titik rawan untuk memetakan lokasi dan waktu yang paling sering terjadi pelanggaran. Lakukan "patroli pencegahan" (preventif) di lokasi tersebut sebelum

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									lapangan yang akurat (misalnya melalui jumlah pelanggaran yang tercatat dalam operasi rutin atau data tilang).	pelanggaran massal terjadi. 2. Penghargaan bagi Pengemudi Teladan (Reward System) Sebagai apresiasi, buatlah program "Pengemudi Teladan" bagi sopir angkutan barang dan orang yang memiliki rekam jejak nihil pelanggaran selama satu tahun. Penghargaan ini bisa berupa kemudahan dalam pengurusan uji KIR atau sertifikat apresiasi yang dapat meningkatkan reputasi mereka di mata perusahaan angkutan. 3. Kolaborasi dengan Perusahaan Angkutan Lakukan pembinaan langsung ke perusahaan otobus (PO) atau

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										perusahaan angkutan barang. Tekankan bahwa kepatuhan pengemudi adalah tanggung jawab pemilik perusahaan. Dorong pemilik usaha untuk menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) secara mandiri. 4. Edukasi Berkelanjutan melalui Digital Channel Manfaatkan media sosial atau grup komunitas sopir untuk menyebarkan informasi singkat mengenai update aturan lalu lintas terbaru (termasuk keselamatan berkendara). Informasi yang disampaikan secara rutin dan santai seringkali lebih efektif daripada sosialisasi formal di ruang tertutup.

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatnya Kualitas Konstruksi Jalan	Persentase panjang jalan yang meningkat kualitas konstruksinya (fleksibel dan rigid pavement) (%)	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas PUPR	70.05	73.51	104.94	Pemeliharaan rutin jalan, pemeliharaan berkala jalan yang tepat sehingga bisa mencegah kerusakan kecil menjadi kerusakan besar dan memperpanjang umur jalan. Disamping itu penerapan spesfikasi teknis yang benar selama kegiatan pembangunan jalan. Tim URC-PJ juga menjadi salah satu peningkatan keberhasilan kinerja	Mempertahankan intensitas pemeliharaan preventif dan mengoptimalkan sistem survei kondisi jalan berbasis digital guna menentukan prioritas penanganan secara presisi.
		Meningkatnya Kualitas Penataan Bangunan Gedung Negara	Persentase bangunan gedung negara yang berkualitas (%)	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Dinas PUPR	83.34	83.87	100.64	Pemeliharaan gedung dan bangunan secara rutin	Melanjutkan program pemeliharaan rutin dengan fokus pada aspek keselamatan gedung serta efisiensi energi untuk menjamin kualitas layanan gedung yang berkelanjutan.
		Meningkatnya layanan infrastruktur jaringan irigasi	Persentase panjang irigasi dalam kondisi baik (%)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Dinas PUPR	75.36	75.37	100.01	pelaksanaan kegiatan Operasi dan pemeliharaan secara rutin dan terjadwal	Memperkuat sinergi dengan kelompok tani pengguna air dalam pengawasan operasional irigasi serta memastikan alokasi dana pemeliharaan tersedia secara tepat waktu.

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatnya Layanan Sanitasi Layak	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Dinas PUPR	91.48	91.46	99.98	1. Pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan terhadap masyarakat terkait Air Limbah (Sanitasi) 2. Pembangunan Tanki septik individual perdesaan di kegiatan Air Limbah (Sanitasi)	Mengakselerasi pembangunan infrastruktur sanitasi di wilayah yang belum terlayani serta meningkatkan intensitas pembinaan masyarakat untuk menekan angka praktik buang air besar sembarangan
		Meningkatnya Pelayanan Air Minum Layak dan Aman	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota (%)	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Dinas PUPR	97.34	97.53	100.2	Pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan terhadap masyarakat terkait kegiatan SPAM	Memperluas cakupan jaringan distribusi SPAM ke wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses air minum aman melalui perencanaan teknis yang terukur.
		Meningkatnya Pelayanan Drainase	Persentase panjang drainase dalam kondisi baik (%)	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Dinas PUPR	60.02	61.31	102.15	Pemeliharaan dan peningkatan sistem drainase yang dilaksakan rutin dan pembersihan infrastruktur dan sungai dari sampah dan sedimen secara berkala	Melakukan rehabilitasi drainase pada titik-titik yang memiliki tingkat sedimentasi tinggi serta mengedukasi masyarakat mengenai

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										pentingnya menjaga kebersihan saluran drainase dari sampah
		Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Persampahan	Persentase jumlah infrastruktur persampahan yang terbangun (%)	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Dinas PUPR	71.43	71.43	100.00	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur Persampahan	Meningkatkan efektivitas operasional infrastruktur persampahan yang telah terbangun serta mengeksplorasi metode pengelolaan sampah berbasis sirkular ekonomi.
		Meningkatnya Pengelolaan Perlintasan Kereta Api	Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani (%)	2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Dishub	100	100	100.00	Realisasi indikator mencapai 100,00% dari target yang ditetapkan sebesar 100,00%. Capaian ini menunjukkan keberhasilan Dinas Perhubungan dalam memastikan seluruh perlintasan kereta api di wilayah Kabupaten Nganjuk telah terpetakan dan tertangani dengan baik, baik dari sisi kelengkapan rambu, marka, maupun sarana pengamanan lainnya. Keberhasilan ini merupakan bentuk komitmen perangkat	Mempertahankan tingkat keselamatan pada seluruh titik perlintasan melalui kegiatan pemeliharaan sarana pengamanan secara berkala. Selain itu, akan dilakukan penguatan koordinasi lintas sektoral dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan pihak terkait lainnya untuk melakukan audit keselamatan secara rutin, serta meningkatkan

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									daerah dalam menjamin aspek keselamatan berlalu lintas di perlintasan sebidang, guna meminimalisir potensi risiko kecelakaan antara kendaraan jalan raya dan kereta api.	edukasi kepada masyarakat pengguna jalan mengenai prosedur keselamatan saat melintasi perlintasan kereta api.
		Meningkatnya pengelolaan sumber daya air	Persentase sistem pengelolaan sumber daya air dalam kondisi baik (sungai,dam, dll) (%)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Dinas PUPR	76.93	75.94	98.71	integrasi sistem dari kombinasi tanggul, drainase dan bendungan untuk melindungi infrastruktur pengendalian banjir yang bukan hanya dari satu jenis infrastruktur	Melakukan evaluasi teknis terhadap titik-titik infrastruktur yang memerlukan rehabilitasi mendesak, serta mengoptimalkan operasional dan pemeliharaan (OP) secara periodik untuk memastikan seluruh komponen sistem pengelolaan sumber daya air tetap berfungsi optimal.
		Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan dokumen KKPR yang di keluarkan (%)	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Dinas PUPR	100.00	100.00	100.00	Ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) RTRW yang menjadi dasar pada legalitas landasan operasional penataan ruang	Mempertahankan tingkat kepatuhan pemanfaatan ruang melalui pengawasan administratif dan teknis secara berkelanjutan, serta melakukan sinkronisasi data

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										perizinan berbasis KKPR dengan sistem informasi tata ruang yang terintegrasi
		Meningkatnya SDM konstruksi yang bersertifikat	Persentase peningkatan jumlah SDM konstruksi yang bersertifikat (%)	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Dinas PUPR	64.25	85.33	106.67	Upaya peningkatan kompetensi pegawai yang konsisten dan integratif dengan perangkat daerah yang menangani peningkatan kompetensi pegawai	Melanjutkan program pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi tenaga konstruksi, serta memperluas cakupan sertifikasi bagi tenaga ahli muda guna memenuhi kebutuhan standarisasi jasa konstruksi yang semakin kompetitif dan berkualitas.
		Menurunnya volume kendaraan pada jam sibuk	Persentase penerapan manajemen rekayasa lalu lintas (%)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Dishub	90	100	111.11	Indikator ini menunjukkan keberhasilan yang sangat baik dengan capaian jauh di atas target. Keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh penerapan rekayasa lalu lintas pada titik-titik rawan kemacetan, pengaturan arus lalu lintas secara situasional, serta dukungan koordinasi lintas sektor. Hal ini berdampak	Mempertahankan efektivitas rekayasa melalui evaluasi berkala terhadap dampak kebijakan di lapangan, serta melakukan pengembangan model manajemen lalu lintas yang lebih responsif dengan memanfaatkan data arus kendaraan secara real-time

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									positif terhadap kelancaran dan keselamatan lalu lintas	(ITS - Intelligent Transport System).
			Load factor angkutan umum (%)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Dishub	90	94.2	104.67	Capaian yang melebihi target menunjukkan keberhasilan dalam optimalisasi pemanfaatan angkutan umum. Hal ini didukung oleh penyesuaian rute dan jadwal operasional, serta meningkatnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum pada koridor tertentu. Capaian ini mencerminkan efisiensi operasional layanan angkutan umum yang semakin baik	Melakukan pemeliharaan kualitas layanan agar tren keterisian penumpang tetap terjaga, serta melakukan kajian kebutuhan pengembangan rute baru guna menjangkau kawasan pemukiman atau pusat kegiatan masyarakat yang belum terlayani secara optimal.
		Optimalisasi kapasitas jalan melalui pengelolaan perparkiran	Persentase ketaatan parkir (%)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Dishub	90	94.92	105.47	Capaian indikator ini melampaui target yang ditetapkan. Keberhasilan tersebut didorong oleh peningkatan pengawasan parkir, penataan lokasi parkir, serta penegakan aturan yang lebih konsisten. Kondisi ini menunjukkan meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan parkir yang berlaku	Mempertahankan kedisiplinan pengguna jalan melalui patroli pengawasan rutin serta melakukan pemetaan ulang titik parkir potensial di area padat lalu lintas guna memastikan tata ruang jalan tetap berfungsi maksimal sebagai sarana transportasi.

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Terpenuhinya perlengkapan jalan yang berfungsi optimal	Persentase pemenuhan perlengkapan jalan yang berfungsi optimal (%)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Dishub	0.87	0.81	93.10	Faktor penyebab antara lain keterbatasan anggaran pemeliharaan, kerusakan akibat faktor cuaca dan usia teknis perlengkapan jalan, serta waktu perbaikan yang relatif panjang. Ke depan, diperlukan prioritas pemeliharaan dan penggantian perlengkapan jalan secara bertahap agar fungsi keselamatan dan kelancaran lalu lintas dapat lebih optimal	Menginisiasi skala prioritas pemeliharaan dan penggantian perlengkapan jalan secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan (safety critical). Langkah ini akan didukung dengan penyusunan basis data kondisi inventaris perlengkapan jalan yang akurat untuk memudahkan perencanaan perbaikan di periode mendatang.
	Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan		Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)		PRKPP	74.5	74.5	100.000		
		Meningkatnya Pemanfaatan Tanah untuk perumahan dan kawasan permukiman bagi pemegang hak atas tanah	Persentase Bidang Tanah Yang Difasilitasi Penatagunaan Tanahnya (%)	2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	PRKPP	100	100	100.00	pelaksanaan program penatagunaan tanah dengan indikator kinerja Persentase Bidang Tanah yang difasilitasi petagunaan tanahnya, ditargetkan pada tahun 2025, sebesar 100%, telah terealisasi sebesar 100%, maka diperoleh	Mempertahankan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah guna meminimalisir potensi sengketa lahan serta mendukung kepastian hukum

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									persentase capaian sebesar 100%. Pencapaian program tersebut didukung oleh kegiatan antara lain : 1. Kegiatan penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah kabupaten/kota dengan keluaran jumlah dokumen penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah kabupaten/kota sebanyak 1 dokumen, diantaranya : a. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah sebanyak 1 laporan; b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota sebanyak 1 dokumen	bagi pemegang hak atas tanah.
		Meningkatnya pembangunan dan perbaikan rumah baru secara swadaya	Persentase Pengajuan PBG/SLF Rumah Swadaya yang diterbitkan (%)	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	PRKPP	100	100	100.00	Program Pengembangan Perumahan di dukung dengan 4 indikator kinerja diantaranya adalah : 1. Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni terealisasi sebesar 100%, jenis	Melanjutkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai urgensi kepemilikan PBG/SLF sebagai bentuk perlindungan hukum atas bangunan hunian.

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									pelayanan yang harus ditangani : 1) Rehabilitasi rumah bagi korban bencana sebanyak 80 unit. Dengan rumus perhitungan yang didapat yaitu : x/y*100 Keterangan: : Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun N. *Y*: Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun N. Realisasi Capaian kinerja selama tahun 2025 adalah sebagai berikut : - Jumlah rumah korban bencana yang ditangani pada tahun Tahun 2025 80 unit - Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada Tahun 2025 80 unit - Persentase realisasi Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana tahun 2025 100% - Persentase capaian	

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									kinerja Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana tahun 2025 100%	
		Meningkatnya pembangunan perumahan oleh developer	Persentase Rumah terbangun oleh developer (%)	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	PRKPP	100	100	100.00	Realisasi sebesar 100,00% dari target 100,00%. Pencapaian ini menunjukkan iklim investasi yang kondusif di sektor properti, di mana koordinasi antara pemerintah daerah dengan pihak pengembang berjalan efektif dalam pemenuhan kebutuhan perumahan masyarakat.	Memperkuat pengawasan agar pembangunan perumahan oleh pengembang tetap mematuhi regulasi tata ruang dan standar kelayakan hunian.
		Meningkatnya penyediaan PSU perumahan	Persentase perumahan yang terfasilitasi PSU (%)	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	PRKPP	23.78	24.07	101.22	Dalam pelaksanaan program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) dengan indikator kinerja persentase perumahan yang terfasilitasi PSU yang ditargetkan pada tahun 2025, sebanyak 23,78%, dengan realisasi sebesar 24,07%, maka diperoleh persentase capaian sebesar 101,24%. (dari 162 perumaha baru terfasiitasi PSU sebanyak 39 perumahan)	Meningkatkan intensitas verifikasi dan serah terima PSU dari pengembang guna menjamin keberlanjutan pemeliharaan infrastruktur perumahan bagi masyarakat.

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Pencapaian program tersebut didukung oleh kegiatan antara lain : 1. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan sebanyak 11 lokasi; 2. Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan sebanyak 1 dokumen; 3. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian sebanyak 11 Lokasi 4. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebanyak 1 laporan; 5. Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang sebanyak 5 laporan.	
		Terlaksananya peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	PRKPP	4.9	4.36	88.98	program tersebut ini masuk kategoti belum terapai dikarenakan ada beberapa capaian dalam kegiatan yang belum terpenuhi 100% antara lain :	Melakukan evaluasi terhadap kendala teknis di lapangan dan memperkuat koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk percepatan

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									1. Kegiatan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha, dengan keluaran jumlah dokumen hasil penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha berupa 1 dokumen, diantaranya : a. Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP sebanyak 1 dokumen sudah tersusun. 2. Kegiatan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha dengan keluaran jumlah lokasi kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditingkatkan berupa 30 lokasi, diantaranya : a. Perbaikan rumah tidak layak huni sebanyak 30 unit rumah, terealisasi sebanyak 29 unit rumah; b. Pembangunan rumah	penyerapan kegiatan pemugaran kawasan pada tahun anggaran berikutnya.

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									baru layak huni untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha sebanyak 4 unit rumah dari 5 unit rumah yang diusulkan; c. Pelaksanaan pemugaran kawasan permukiman kumuh sebanyak 20 Ha, dengan realisasi Tahun 2025 sebanyak 17,80 Ha	
		Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	PRKPP	100.00	100.00	100.00	Program Pengembangan Perumahan di dukung dengan 4 indikator kinerja diantaranya adalah : 1. Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni terealisasi sebesar 100%, jenis pelayanan yang harus ditangani : 1) Rehabilitasi rumah bagi korban bencana sebanyak 80 unit. Dengan rumus perhitungan yang didapat yaitu : x/y*100 Keterangan: : Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun N. *Y*: Jumlah total rencana	Menjaga kesiapsiagaan mekanisme penanganan cepat (rehabilitasi rumah) bagi korban bencana agar pemulihan hunian dapat dilakukan sesegera mungkin.

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun N. Realisasi Capaian kinerja selama tahun 2025 adalah sebagai berikut : - Jumlah rumah korban bencana yang ditangani pada tahun Tahun 2025 80 unit - Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada Tahun 2025 80 unit - Persentase realisasi Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana tahun 2025 100% - Persentase capaian kinerja Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana tahun 2025 100%	
			Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitasi	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	PRKPP	100.00	100.00	100.00	Realisasi indikator mencapai 100,00% dari target yang ditetapkan sebesar 100,00%. Pencapaian ini menunjukkan efektivitas kebijakan Pemerintah Daerah dalam	Mempertahankan mekanisme fasilitasi yang terintegrasi antara kebijakan penataan ruang dengan penyediaan hunian pengganti. Dinas

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			penyediaan rumah layak huni (%)						menjalankan program relokasi yang bersifat humanis dan bertanggung jawab. Seluruh warga negara yang terdampak kebijakan pembangunan atau penataan wilayah telah mendapatkan fasilitasi hunian yang layak sesuai dengan standar kesehatan dan keselamatan, sehingga meminimalisir dampak sosial ekonomi akibat proses relokasi tersebut.	PRKPP akan terus memperkuat koordinasi dengan lintas sektor untuk memastikan bahwa proses relokasi di masa mendatang tetap mengedepankan hak atas hunian yang layak serta keberlanjutan akses ekonomi bagi warga terdampak. Selain itu, pemutakhiran data warga sasaran akan terus dilakukan secara berkala guna menjamin akurasi distribusi fasilitasi rumah layak huni.
		Terlaksananya intervensi penyediaan rumah layak huni diluar Kawasan kumuh Oleh Pemerintah	Persentase Unit rumah tidak layak huni yang diperbaiki diluar kawasan kumuh dibawah 10 Ha (%)	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	PRKPP	3.24	3.49	107.72	pelaksanaan program perumahan dan kawasan permukiman kumuh dengan indikator kinerja persentase unit rumah tidak layak huni yang diperbaiki diluar kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditargetkan pada tahun 2025, sebesar 3,24% telah terealisasi sebesar 3,49% maka diperoleh persentase capaian	Melakukan pemutakhiran data rumah tidak layak huni secara berkala agar bantuan pemerintah tepat sasaran dan memberikan dampak peningkatan kualitas hidup masyarakat secara merata.

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									sebesar 107,48%. Dengan rumus perhitungan yang didapat yaitu : (X/Y x 100) Keterangan: X : Jumlah rumah yang dibangun/diperbaiki di luar kawasan kumuh <10 Ha melalui belanja bansos pada tahun N Y : Jumlah Rumah Tidak Layak Huni diluar Kawasan kumuh ¬ Data rumah yang dibangun/diperbaiki di luar kawasan kumuh APBD Tahun 2025	
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks)		Dinas LH	72.61	72.54	99.904		
		Meningkatnya efektifitas perencanaan lingkungan hidup	Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti (%)	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas LH	80	100	125.00	Realisasi sebesar 100,00% dari target 80,00% (capaian 125,00%). Hal ini menunjukkan efektivitas tinggi dalam proses integrasi kajian lingkungan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan. Seluruh rekomendasi teknis telah diakomodasi sebagai instrumen pengendalian dampak lingkungan	Mempertahankan mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap implementasi rekomendasi kajian agar kesinambungan fungsi lingkungan tetap terjaga pada setiap tahap pelaksanaan proyek

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									sebelum kegiatan strategis dilaksanakan.	
		Meningkatnya fasilitasi terhadap pengaduan lingkungan hidup	Persentase fasilitasi terhadap pengaduan LH (%)	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas LH	100	100	100.00	Realisasi sebesar 100,00% dari target 100,00%. Capaian ini merefleksikan kesigapan perangkat daerah dalam merespon setiap keluhan masyarakat terkait masalah lingkungan, yang ditangani secara transparan dan sesuai dengan prosedur teknis yang berlaku.	Mengoptimalkan sistem pengaduan berbasis digital untuk mempercepat durasi respon dan memastikan penyelesaian konflik lingkungan dilakukan dengan pendekatan win-win solution.
		Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase SDM Bidang Lingkungan Hidup Yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Dinas LH	7.73	9.06	117.21	Realisasi sebesar 9,06% dari target 7,73% (capaian 117,21%). Peningkatan ini menunjukkan komitmen DLH dalam mencetak SDM yang kompeten di bidang teknis lingkungan melalui program pendidikan dan pelatihan yang terukur.	Melanjutkan program peningkatan kapasitas dengan fokus pada spesialisasi teknis (seperti audit lingkungan dan laboratorium) guna menjawab tantangan isu lingkungan yang semakin kompleks.
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Persentase partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup (%)	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK	Dinas LH	8.02	10.4	129.68	Realisasi sebesar 10,41% dari target 8,02% (capaian 129,68%). Tingkat partisipasi yang melampaui target ini merupakan buah dari	Memperluas jejaring komunitas peduli lingkungan melalui kolaborasi aktif dan pemberdayaan ekonomi sirkular

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				MASYARAKAT					keberhasilan program penghargaan dan pembinaan masyarakat, yang mendorong tumbuhnya kesadaran kolektif dalam menjaga kualitas lingkungan di level akar rumput.	berbasis masyarakat.
		Meningkatnya pemenuhan RTH	Persentase RTH memenuhi standar teknis (%)	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Dinas LH	65.27	65.23	99.94	Realisasi sebesar 65,23% dari target 65,27% (capaian 99,94%). Capaian ini menunjukkan pemeliharaan RTH yang konsisten meskipun terdapat deviasi sangat tipis dari target. Seluruh RTH yang ada telah dikelola sesuai standar teknis untuk mendukung keanekaragaman hayati dan kualitas udara.	Melakukan pemetaan dan identifikasi lahan potensial untuk pengembangan RTH baru serta memaksimalkan fungsi RTH yang ada agar memberikan manfaat ekologis yang lebih optimal.
		Meningkatnya pengelolaan limbah B3	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN	Dinas LH	79.5	72.79	91.56	Realisasi sebesar 72,79% dari target 79,50% (capaian 91,56%). Indikator ini belum mencapai target penuh. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas rantai pengelolaan limbah B3, keterbatasan sarana pengangkutan khusus, serta edukasi pelaku usaha dalam pengelolaan limbah	Meningkatkan pengawasan dan pembinaan kepada penghasil limbah B3, serta menjajaki kerja sama dengan pihak ketiga yang berizin untuk memfasilitasi pengangkutan dan pemusnahan limbah B3 agar persentase keterkelolaan

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				(LIMBAH B3)					mandiri yang masih memerlukan penguatan.	meningkat pada periode mendatang.
		Meningkatnya pengelolaan limbah industri	Persentase limbah industri yang terkelola (%)	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Dinas LH	63	42	66.67	tidak tercapainya program dikarenakan kurang intensnya dilakukan pengawasan terhadap usaha / industri yang berpotensi terhadap pencemaran lingkungan baik udara air maupun lahan	Melakukan pengawasan terhadap usaha / industri yang berpotensi terhadap pencemaran lingkungan baik udara air maupun lahan secara inten dan berkelanjutan
		Meningkatnya pengolahan sampah di fasilitas pengolahan sampah	persentase Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Dinas LH	24.81	25	100.77	Realisasi sebesar 25,00% dari target 24,81% (capaian 100,77%). Capaian ini menunjukkan efektivitas sistem pengelolaan sampah yang berfokus pada pengolahan di fasilitas yang tersedia (seperti TPST atau bank sampah), yang berhasil melampaui target yang ditetapkan. Upaya ini mendukung pengurangan beban sampah yang masuk ke	Mempertahankan operasional fasilitas pengolahan sampah melalui penguatan kapasitas sarana dan prasarana (sarpras), serta mendorong pemilahan sampah dari sumber (rumah tangga) agar proses pengolahan di fasilitas lebih efisien.

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) secara signifikan.	
		Meningkatnya Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah ((%))	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Dinas LH	24.81	25	100.77	Realisasi sebesar 25,00% dari target 24,81% (capaian 100,77%). Angka ini mencerminkan peningkatan jangkauan layanan pengumpulan sampah yang menjangkau lebih banyak pemukiman masyarakat. Hal ini berkontribusi langsung pada terciptanya lingkungan perumahan yang bersih dan bebas dari praktik pembuangan sampah ilegal.	Memperluas cakupan layanan pengumpulan sampah ke wilayah yang masih terlayani secara parsial, melalui optimalisasi armada pengumpulan serta pemberdayaan peran masyarakat dalam sistem pengelolaan sampah berbasis komunitas.
		Penurunan emisi GRK	Penurunan Emisi GRK kumulatif (Ton CO2 Eq) (TON CO2 EQ)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas LH	78.26	71.88	91.85	Realisasi sebesar 71,88 Ton CO_2 Eq dari target 78,26 Ton CO_2 Eq (capaian 91,85%). Capaian ini belum mencapai target dikarenakan beberapa faktor teknis, di antaranya adalah fluktuasi data aktivitas sumber emisi di sektor tertentu serta keterbatasan pemantauan emisi secara real-time. Meski demikian, upaya	Melakukan evaluasi metodologi perhitungan emisi GRK yang lebih akurat, memperkuat integrasi program mitigasi emisi dengan kegiatan pemeliharaan RTH, serta menggencarkan kampanye efisiensi energi dan pengurangan penggunaan bahan

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									mitigasi perubahan iklim melalui pengurangan sampah dan penanaman vegetasi penyerap emisi terus dilakukan secara berkelanjutan.	bakar fosil di sektor operasional dinas.
	Meningkatkan ketangguhan dalam penanggulangan bencana		Indeks Risiko Bencana (Indeks)		BPBD	105.02	95.58	109.877		
		MENINGKATNYA PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA	PERSENTASE MASYARAKAT YANG MENDAPAT LAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BPBD	83.00	83.00	100.00	Pemberian layanan informasi rawan bencana kabupaten/kota secara masif dengan metode tatap muka dan melalui media berupa sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten	
		MENINGKATNYA PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BPBD	83.00	83.00	100.00	Respons yang cepat terhadap kejadian bencana yang didukung kesiapan sarana dan prasarana serta logistik umtuk penyelamatan dan evakuasi	
		MENINGKATNYA PELAYANAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA	PERSENTASE REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI YANG DILAKUKAN (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BPBD	83.00	83.00	100.00	Penyusunan dokumen penanganan pasca bencana, serta pelaksanaan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang berjalan sesuai rencana	

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		MENINGKATNYA PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BPBD	83.00	83.00	100.00	terlaksananya pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, tersusunnya dokumen pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	
Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas			Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)			75.92	75.89	99.96		
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))		Dinkes	74.76	74.96	100.27		
		Meningkatnya air minum aman, Meningkatnya kualitas SKUDR Permukiman, Meningkatnya pemberdayaan kesehatan berbasis masyarakat	Persentase Sarana Air Minum yang memenuhi syarat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinkes	5.00	30.00	600.00	Capaian melampaui target secara signifikan. Hal ini menunjukkan efektivitas pengawasan kualitas air minum.	Lakukan kaji ulang (review) penetapan target pada tahun berikutnya agar lebih menantang dan sesuai kondisi riil di lapangan.
			Jumlah Permukiman yang memenuhi syarat (Satuan Permukiman (SP))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA	Dinkes	50.00	0.00	0.00	Target tidak terealisasi. Kemungkinan adanya kendala dalam koordinasi lintas sektor atau validasi data lapangan.	Melakukan koordinasi dengan Dinas Perkim/PU terkait sinkronisasi data permukiman sehat dan mempercepat verifikasi lapangan.

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				KESEHATAN MASYARAKAT						
			Desa ber-STBM Lima Pilar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinkes	18.00	23.94	133.00	Kinerja sangat baik. Terjadi akselerasi perubahan perilaku masyarakat dalam sanitasi total.	Mempertahankan status desa STBM melalui pembinaan berkala agar tidak terjadi penurunan kualitas sanitasi.
		Meningkatnya angka populasi bebas penyakit menular	Insidensi TBC per 100.000 penduduk (Angka)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinkes	90.00	91.00	101.11	Angka insidensi masih tinggi (melebihi target). Ini menunjukkan beban penyakit TB di wilayah tersebut masih besar.	Memperkuat upaya preventif dan edukasi protokol kesehatan pernapasan di lingkungan padat penduduk.
			Annual parasite insdence malaria per 1000 penduduk (Per 1000 Penduduk)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Dinkes	1.00	0.00	100.00	Target tercapai (0 kasus). Wilayah mampu mempertahankan status bebas malaria/eliminasi.	Meningkatkan kewaspadaan dini terhadap kasus impor dari luar wilayah.

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
			Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) ((%))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinkes	90.00	57.00	63.33	Kinerja Rendah. Banyak kasus TB di masyarakat yang belum ditemukan/terlaporkan ke sistem.	Meningkatkan Active Case Finding (jemput bola) dan memperkuat jejaring DPPM (Praktek Mandiri Dokter/Klinik).
			Insidensi HIV per 1000 penduduk (Per 1000 Penduduk)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinkes	0.24	0.27	112.50	Angka insidensi masih tinggi (melebihi target). Ini menunjukkan beban penyakit TB di wilayah tersebut masih besar.	Memperkuat upaya preventif dan edukasi protokol kesehatan pernapasan di lingkungan padat penduduk.
			Persentase kematian akibat dengue	1.02.02 PROGRAM PEMENUHA	Dinkes	2.00	0.70	165.00	Kinerja Sangat Baik dalam menekan fatalitas	Memperkuat tata laksana penanganan dini DBD di

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				N UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					(CFR rendah sebesar 0.70 dari target 2.00).	Puskesmas agar pasien tidak terlambat dirujuk.
			Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinkes	90.00	91.00	101.11	Kinerja Sangat Baik. Pasien yang ditemukan mayoritas menyelesaikan pengobatan hingga sembuh.	Mempertahankan kualitas pengawasan menelan obat (PMO) agar tidak terjadi putus obat (Drop Out).
		Meningkatnya angka populasi bebas penyakit tidak menular	Presentase DM dalam pengendalian (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinkes	90.00	85.00	94.44	Kinerja mencapai kategori Baik. Meskipun realisasi (85.00) sedikit di bawah target absolut, namun secara sistemik menunjukkan manajemen penderita Diabetes Melitus yang stabil melalui pemantauan kadar gula darah rutin.	Mengoptimalkan program Prolanis (Program Pengelolaan Penyakit Kronis) di Puskesmas dan meningkatkan edukasi pengaturan pola makan (dietary plan) bagi pasien DM.

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Presentase Puskesmas melaksanakan upaya berhenti merokok (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinkes	100.00	100.00	100.00	Kinerja Sangat Baik/Tuntas. Seluruh Puskesmas telah mengintegrasikan layanan konseling berhenti merokok dalam struktur pelayanannya.	Meningkatkan kualitas konselor UBM di Puskesmas dan memperluas jangkauan promosi layanan UBM kepada kelompok remaja dan usia produktif.
			Presentase hipertensi dalam pengendalian (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinkes	85.00	76.00	89.41	Kinerja masuk kategori Tinggi, namun terdapat selisih (gap) 9% dari target. Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya kepatuhan pasien dalam mengonsumsi obat secara rutin dan kontrol tekanan darah bulanan.	Penguatan peran kader Posbindu PTM untuk melakukan sweeping atau kunjungan rumah (home care) bagi penderita hipertensi yang tidak rutin kontrol ke fasilitas kesehatan.
		Meningkatnya deteksi dini faktor resiko penyakit, Menurunnya risiko penyakit degeneratif	Prevalensi Obesitas >18 Tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATA	Dinkes	23.40	32.70	71.56	Kinerja Menurun (Unfavorable). Dalam indikator prevalensi, angka realisasi yang lebih besar dari target (32.70 > 23.40) menunjukkan kondisi yang memburuk. Hal ini mengindikasikan gaya hidup sedenter dan pola	Langkah Darurat: Masifkan kampanye GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat), aktivasi instruktur senam di desa/kelurahan, serta edukasi

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				N MASYARAKAT					makan tidak sehat di masyarakat meningkat.	pembatasan konsumsi GGL (Gula, Garam, Lemak).
			Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis pada semua kelompok umur (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinkes	25.00	0.00	0.00	Kinerja Tidak Tercapai. Target tidak terealisasi sama sekali. Hal ini mengindikasikan adanya kendala besar pada operasional program, ketersediaan logistik pemeriksaan, atau tidak berjalannya sistem pencatatan kegiatan di lapangan.	Segera melakukan evaluasi komprehensif terkait ketersediaan anggaran operasional dan logistik (BMHP). Jika kegiatan telah dilaksanakan namun data nol, perlu dilakukan perbaikan pada sistem pelaporan berjenjang dari fasyankes ke Dinas Kesehatan.
		Meningkatnya fasyankes yang sudah terdaftar di SIKN dengan status memiliki RME	Prosentase fasyankes sudah terdaftar di SIKN dengan status memiliki RME (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinkes	28.99	50.79	175.20	Kinerja Sangat Tinggi. Akselerasi transformasi kesehatan digital melampaui target secara signifikan. Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat dari fasyankes dalam mengimplementasikan Rekam Medis Elektronik (RME) sesuai regulasi terbaru.	Mempertahankan tren positif dengan meningkatkan kualitas integrasi data ke platform SatuSehat serta memastikan keamanan siber (cyber security) pada data medik pasien di seluruh fasyankes yang telah terdaftar.
		Meningkatnya kekebalan kelompok,	Jumlah kasus keracunan pangan (Kasus)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHA	Dinkes	2.00	2.00	100.00	Kinerja Tercapai. Keberhasilan menekan angka kejadian hingga	Memperkuat surveilans kualitas pangan secara

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Menurunnya kasus keracunan pangan		N UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					nol kasus menunjukkan efektivitas pengawasan keamanan pangan dan edukasi higienitas sanitasi makanan di masyarakat berjalan dengan baik.	berkala, terutama pada kantin sekolah dan sentra pangan jajanan, serta meningkatkan kesiapsiagaan tim gerak cepat (TGC) jika sewaktu-waktu terjadi KLB.
			Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinkes	80.00	0.00	0.00	Kinerja Kritis. Realisasi 0% menunjukkan adanya hambatan serius dalam pencapaian target esensial. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kendala migrasi data ke aplikasi ASIK atau terhambatnya distribusi logistik vaksin di tingkat Puskesmas.	Melakukan audit data imunisasi (manual vs aplikasi) untuk memastikan tidak ada data yang tertinggal. Selain itu, perlu dilakukan penguatan penggerakan masyarakat melalui Posyandu dan memastikan ketersediaan vaksin tetap stabil sepanjang tahun.
			Cakupan imunisasi lengkap 14 antigen mencapai target (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Dinkes	74.00	0.00	0.00	Kinerja Kritis. Tidak adanya realisasi pada indikator ini sangat berisiko terhadap munculnya Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I).	Melakukan akselerasi pemberian imunisasi tambahan (catch-up) bagi balita yang belum lengkap status imunisasinya dan meningkatkan kapasitas petugas puskesmas dalam

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				MASYARAKAT						pelaporan digital 14 antigen.
		Meningkatnya Kepuasan layanan dan mutu layanan Primer Puskesmas Bagor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Puskesmas (Nilai)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinkes	77.00	90.00	116.88	Capaian indikator ini menunjukkan kinerja yang sangat baik karena realisasi nilai IKM melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan Puskesmas kepada masyarakat semakin meningkat, baik dari aspek kecepatan pelayanan, kemudahan prosedur, sikap petugas, maupun ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.	Upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah mempertahankan kualitas pelayanan dengan melakukan evaluasi pelayanan secara berkala, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan, serta memperkuat mekanisme pengaduan masyarakat sebagai sarana perbaikan layanan.
			Indeks Nasional Mutu (INM) (Nilai)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinkes	60.00	95.00	158.33	Realisasi indikator ini jauh melampaui target yang telah ditetapkan sehingga menunjukkan keberhasilan dalam penerapan standar mutu pelayanan kesehatan. Hal ini mencerminkan peningkatan kepatuhan terhadap standar mutu pelayanan, peningkatan keselamatan pasien, serta perbaikan tata kelola pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan.	Ke depan perlu dilakukan penguatan sistem manajemen mutu pelayanan kesehatan, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam penerapan standar mutu, serta monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap indikator mutu pelayanan kesehatan.

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatnya Kepuasan layanan dan mutu layanan Primer Puskesmas Baron	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Puskesmas (Nilai)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinkes	77.00	89.00	115.58	Capaian indikator menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Puskesmas berada pada kategori sangat baik karena realisasi nilai melampaui target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat telah berjalan secara efektif.	Tindak lanjut yang perlu dilakukan antara lain meningkatkan inovasi pelayanan kesehatan di Puskesmas, meningkatkan kualitas komunikasi petugas dengan masyarakat, serta melakukan survei kepuasan masyarakat secara rutin sebagai bahan evaluasi peningkatan layanan.
			Indeks Nasional Mutu (INM) (Nilai)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinkes	60.00	92.00	153.33	Realisasi indikator ini menunjukkan capaian yang sangat tinggi dibandingkan target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan telah mampu menerapkan standar mutu pelayanan kesehatan secara optimal, baik dalam aspek keselamatan pasien maupun efektivitas pelayanan kesehatan.	Upaya tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah mempertahankan capaian mutu pelayanan melalui penguatan budaya mutu di fasilitas kesehatan, peningkatan pengawasan internal, serta penguatan implementasi standar pelayanan kesehatan.

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatnya Kepuasan layanan dan mutu layanan Primer Puskesmas Berbek	Indeks Nasional Mutu (INM) (Nilai)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinkes	60.00	88.00	146.67	Capaian indikator ini menunjukkan hasil yang sangat baik karena realisasi melebihi target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan bahwa upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan melalui penerapan standar pelayanan kesehatan dan pengendalian mutu telah berjalan secara efektif.	Ke depan perlu dilakukan peningkatan kualitas pengelolaan mutu layanan kesehatan melalui pembinaan dan pendampingan kepada fasilitas pelayanan kesehatan, peningkatan kapasitas SDM kesehatan, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi mutu pelayanan kesehatan.
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Puskesmas (Nilai)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinkes	77.00	91.00	118.18	Capaian indikator ini menunjukkan kinerja yang sangat baik karena realisasi nilai IKM melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas semakin meningkat, baik dari aspek kecepatan layanan, keramahan petugas, kemudahan prosedur, maupun ketersediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan.	Ke depan perlu dilakukan upaya mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pelayanan melalui peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, penguatan standar pelayanan minimal, serta optimalisasi sistem pengaduan masyarakat sebagai bahan evaluasi berkelanjutan.

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Peningkatan kepuasan masyarakat juga mencerminkan adanya perbaikan dalam tata kelola pelayanan publik di fasilitas kesehatan tingkat pertama.	
		Meningkatnya Kepuasan layanan dan mutu layanan Primer Puskesmas Gondang	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Puskesmas (Nilai)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinkes	77.00	84.00	109.09	Realisasi indikator menunjukkan capaian yang melampaui target yang ditetapkan sehingga dapat dikategorikan sangat berhasil. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan mutu layanan kesehatan di Puskesmas telah berjalan dengan baik, didukung oleh perbaikan sistem pelayanan, peningkatan kedisiplinan petugas, serta pemanfaatan sarana prasarana pelayanan kesehatan secara optimal.	Upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan antara lain dengan menjaga konsistensi kualitas pelayanan, meningkatkan kualitas komunikasi petugas dengan masyarakat, serta melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala sebagai bahan evaluasi peningkatan kualitas layanan kesehatan.
			Indeks Nasional Mutu (INM) (Nilai)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinkes	60.00	98.00	163.33	Capaian indikator ini menunjukkan hasil yang sangat tinggi karena realisasi jauh melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa standar mutu pelayanan kesehatan di fasilitas	Tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah mempertahankan capaian mutu pelayanan dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									kesehatan yang dikelola telah mengalami peningkatan signifikan, baik dalam aspek keselamatan pasien, efektivitas pelayanan, maupun kepatuhan terhadap standar mutu pelayanan kesehatan yang ditetapkan secara nasional.	berkelanjutan, memperkuat penerapan standar mutu pelayanan kesehatan, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kesehatan melalui pelatihan dan pembinaan mutu layanan.
		Meningkatnya Kepuasan layanan dan mutu layanan Primer Puskesmas Jatikalen	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Puskesmas (Nilai)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinkes	77.00	91.00	118.18	Capaian ini menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Puskesmas berada pada kategori sangat baik karena realisasi nilai jauh di atas target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan keberhasilan perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan, kecepatan layanan, serta keterbukaan informasi pelayanan kesehatan.	Ke depan perlu dilakukan penguatan inovasi pelayanan kesehatan di Puskesmas, peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan kesehatan, serta peningkatan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan guna menjaga dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.
			Indeks Nasional Mutu (INM) (Nilai)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG	Dinkes	60.00	96.00	160.00	Capaian indikator ini sangat baik karena realisasi jauh melampaui	Ke depan perlu dilakukan penguatan sistem

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan standar mutu pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan berjalan dengan optimal, baik dalam aspek keselamatan pasien, kepatuhan terhadap standar pelayanan, maupun efektivitas layanan kesehatan.	manajemen mutu melalui monitoring dan evaluasi berkala, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam penerapan standar mutu, serta pembinaan berkelanjutan pada fasilitas pelayanan kesehatan.
		Meningkatnya Kepuasan layanan dan mutu layanan Primer Puskesmas Kertosono	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Puskesmas (Nilai)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinkes	77.00	88.00	114.29	Realisasi indikator ini melampaui target yang ditetapkan sehingga menunjukkan bahwa kualitas pelayanan Puskesmas kepada masyarakat telah berjalan dengan baik. Tingginya tingkat kepuasan masyarakat mencerminkan adanya peningkatan kualitas pelayanan, kemudahan prosedur pelayanan, serta sikap profesional petugas kesehatan.	Tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah mempertahankan kualitas pelayanan melalui peningkatan kompetensi petugas, peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan kesehatan, serta pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara berkala sebagai bahan evaluasi layanan.
			Indeks Nasional Mutu (INM) (Nilai)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG	Dinkes	60.00	98.00	163.33	Capaian indikator ini menunjukkan kinerja yang sangat tinggi	Upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					karena realisasi jauh di atas target yang telah ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan telah menerapkan standar mutu pelayanan kesehatan secara konsisten dan efektif.	menjaga konsistensi penerapan standar mutu pelayanan kesehatan, meningkatkan sistem pengawasan internal, serta memperkuat budaya mutu di lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan.
		Meningkatnya Kepuasan layanan dan mutu layanan Primer Puskesmas Lengkong	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Puskesmas (Nilai)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinkes	77.00	81.00	105.19	Capaian indikator menunjukkan kinerja yang baik karena realisasi telah melampaui target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan Puskesmas kepada masyarakat telah memenuhi harapan masyarakat meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan kualitas layanan.	Ke depan perlu dilakukan peningkatan kualitas pelayanan melalui inovasi pelayanan kesehatan, peningkatan responsivitas petugas terhadap kebutuhan masyarakat, serta penguatan sistem pengaduan dan evaluasi pelayanan.
			Indeks Nasional Mutu (INM) (Nilai)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinkes	60.00	96.00	160.00	Capaian indikator ini sangat baik karena realisasi melampaui target secara signifikan. Hal ini mencerminkan keberhasilan dalam pengelolaan mutu pelayanan kesehatan dan kepatuhan terhadap	Tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah mempertahankan capaian mutu pelayanan dengan meningkatkan pembinaan kepada fasilitas pelayanan

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									standar mutu pelayanan kesehatan nasional.	kesehatan, memperkuat sistem pengendalian mutu, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dalam penerapan standar mutu pelayanan.
		Meningkatnya Kepuasan layanan dan mutu layanan Primer Puskesmas Loceret	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Puskesmas (Nilai)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinkes	77.00	90.00	116.88	Capaian indikator ini sangat baik karena realisasi jauh melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan standar mutu pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan berjalan dengan optimal, baik dalam aspek keselamatan pasien, kepatuhan terhadap standar pelayanan, maupun efektivitas layanan kesehatan.	Ke depan perlu dilakukan penguatan sistem manajemen mutu melalui monitoring dan evaluasi berkala, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam penerapan standar mutu, serta pembinaan berkelanjutan pada fasilitas pelayanan kesehatan.
			Indeks Nasional Mutu (INM) (Nilai)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinkes	60.00	96.00	160.00	Realisasi indikator ini melampaui target yang ditetapkan sehingga menunjukkan bahwa kualitas pelayanan Puskesmas kepada masyarakat telah berjalan dengan baik. Tingginya tingkat kepuasan masyarakat	Tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah mempertahankan kualitas pelayanan melalui peningkatan kompetensi petugas, peningkatan

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									mencerminkan adanya peningkatan kualitas pelayanan, kemudahan prosedur pelayanan, serta sikap profesional petugas kesehatan.	kualitas sarana prasarana pelayanan kesehatan, serta pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara berkala sebagai bahan evaluasi layanan.
		Meningkatnya Kepuasan layanan dan mutu layanan Primer Puskesmas Nganjuk	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Puskesmas (Nilai)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinkes	77.00	92.00	119.48	Capaian indikator ini menunjukkan kinerja yang sangat tinggi karena realisasi jauh di atas target yang telah ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan telah menerapkan standar mutu pelayanan kesehatan secara konsisten dan efektif.	Upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah menjaga konsistensi penerapan standar mutu pelayanan kesehatan, meningkatkan sistem pengawasan internal, serta memperkuat budaya mutu di lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan.
			Indeks Nasional Mutu (INM) (Nilai)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinkes	60.00	93.00	155.00	Capaian indikator menunjukkan kinerja yang baik karena realisasi telah melampaui target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan Puskesmas kepada masyarakat telah memenuhi harapan masyarakat meskipun masih terdapat ruang	Ke depan perlu dilakukan peningkatan kualitas pelayanan melalui inovasi pelayanan kesehatan, peningkatan responsivitas petugas terhadap kebutuhan masyarakat, serta

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									untuk peningkatan kualitas layanan.	penguatan sistem pengaduan dan evaluasi pelayanan.
		Meningkatnya Kepuasan layanan dan mutu layanan Primer Puskesmas Ngetos	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Puskesmas (Nilai)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinkes	77.00	95.00	123.38	Capaian indikator ini sangat baik karena realisasi melampaui target secara signifikan. Hal ini mencerminkan keberhasilan dalam pengelolaan mutu pelayanan kesehatan dan kepatuhan terhadap standar mutu pelayanan kesehatan nasional.	Tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah mempertahankan capaian mutu pelayanan dengan meningkatkan pembinaan kepada fasilitas pelayanan kesehatan, memperkuat sistem pengendalian mutu, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dalam penerapan standar mutu pelayanan.
			Indeks Nasional Mutu (INM) (Nilai)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinkes	60.00	90.00	150.00	Capaian indikator sangat baik karena realisasi melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan penerapan standar mutu pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan telah berjalan secara optimal.	Perlu dilakukan penguatan sistem manajemen mutu melalui monitoring dan evaluasi berkala serta peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam penerapan standar mutu pelayanan.
		Meningkatnya Kepuasan layanan dan mutu layanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Dinkes	77.00	95.00	123.38	Realisasi indikator melampaui target yang ditetapkan sehingga menunjukkan kualitas	Perlu mempertahankan kualitas pelayanan melalui

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Primer Puskesmas Ngluyu	Puskesmas (Nilai)	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					pelayanan Puskesmas kepada masyarakat telah berjalan dengan baik dan tingkat kepuasan masyarakat meningkat.	peningkatan kompetensi petugas, perbaikan sarana prasarana pelayanan kesehatan, serta pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara berkala.
			Indeks Nasional Mutu (INM) (Nilai)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinkes	60.00	100.00	166.67	Capaian indikator sangat tinggi karena realisasi jauh di atas target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan fasilitas pelayanan kesehatan telah menerapkan standar mutu pelayanan secara konsisten.	Perlu menjaga konsistensi penerapan standar mutu pelayanan kesehatan melalui penguatan pengawasan internal dan penerapan budaya mutu di fasilitas pelayanan kesehatan.
		Meningkatnya Kepuasan layanan dan mutu layanan Primer Puskesmas Ngronggot	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Puskesmas (Nilai)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinkes	77.00	87.00	112.99	Capaian indikator menunjukkan kinerja yang baik karena realisasi telah melampaui target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan pelayanan Puskesmas telah memenuhi harapan masyarakat.	Perlu dilakukan peningkatan kualitas pelayanan melalui inovasi pelayanan kesehatan, peningkatan responsivitas petugas, serta penguatan sistem pengaduan dan evaluasi pelayanan.

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Indeks Nasional Mutu (INM) (Nilai)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinkes	60.00	99.00	165.00	Capaian indikator sangat baik karena realisasi melampaui target secara signifikan sehingga menunjukkan keberhasilan pengelolaan mutu pelayanan kesehatan.	Perlu mempertahankan capaian mutu pelayanan melalui peningkatan pembinaan kepada fasilitas pelayanan kesehatan serta penguatan sistem pengendalian mutu layanan.
		Meningkatnya Kepuasan layanan dan mutu layanan Primer Puskesmas Pace	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Puskesmas (Nilai)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinkes	77.00	90.00	116.88	Capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Puskesmas sangat baik karena realisasi melampaui target yang telah ditetapkan sehingga menunjukkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat semakin meningkat.	Perlu mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan melalui peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, perbaikan sarana prasarana, serta pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara berkala.
			Indeks Nasional Mutu (INM) (Nilai)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinkes	60.00	100.00	166.67	Capaian indikator Indeks Nasional Mutu (INM) sangat tinggi karena realisasi jauh di atas target yang ditetapkan sehingga menunjukkan penerapan standar mutu pelayanan kesehatan telah berjalan secara optimal.	Perlu menjaga konsistensi penerapan standar mutu melalui monitoring dan evaluasi berkala serta penguatan manajemen mutu pelayanan kesehatan.

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatnya Kepuasan layanan dan mutu layanan Primer Puskesmas Patianrowo	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Puskesmas (Nilai)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinkes	77.00	98.00	127.27	Capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Puskesmas sangat baik karena realisasi melampaui target yang ditetapkan sehingga menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Puskesmas semakin meningkat.	Perlu dilakukan inovasi pelayanan kesehatan serta peningkatan kualitas interaksi dan responsivitas petugas terhadap kebutuhan masyarakat.
			Indeks Nasional Mutu (INM) (Nilai)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinkes	60.00	99.00	165.00	Capaian indikator Indeks Nasional Mutu (INM) sangat baik karena realisasi jauh melampaui target yang ditetapkan sehingga menunjukkan fasilitas pelayanan kesehatan telah menerapkan standar mutu pelayanan secara konsisten.	Perlu dilakukan penguatan pembinaan dan pengawasan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan guna mempertahankan kualitas mutu layanan.
		Meningkatnya Kepuasan layanan dan mutu layanan Primer Puskesmas Prambon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Puskesmas (Nilai)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinkes	77.00	86.00	111.69	Capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Puskesmas menunjukkan kinerja yang baik karena realisasi telah melampaui target yang ditetapkan sehingga pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat berjalan efektif.	Perlu dilakukan peningkatan kualitas pelayanan melalui evaluasi berkala terhadap standar pelayanan dan optimalisasi sistem pengaduan masyarakat.

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Indeks Nasional Mutu (INM) (Nilai)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinkes	60.00	98.00	163.33	Capaian indikator Indeks Nasional Mutu (INM) sangat baik karena realisasi melampaui target secara signifikan sehingga menunjukkan keberhasilan dalam pengelolaan mutu pelayanan kesehatan.	Perlu dilakukan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan serta penguatan sistem pengendalian mutu pelayanan kesehatan secara berkelanjutan.
		Meningkatnya Kepuasan layanan dan mutu layanan Primer Puskesmas Rejoso	Indeks Nasional Mutu (INM) (Nilai)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinkes	60.00	83.00	138.33	Capaian indikator sangat baik karena realisasi sebesar 83 melampaui target 60 dengan capaian 138,33%, yang menunjukkan penerapan standar mutu pelayanan kesehatan berjalan dengan baik.	Perlu dilakukan penguatan sistem manajemen mutu pelayanan kesehatan melalui monitoring dan evaluasi berkala serta peningkatan kapasitas tenaga kesehatan.
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Puskesmas (Nilai)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinkes	77.00	96.00	124.68	Capaian indikator sangat baik karena realisasi sebesar 96 melampaui target 77 dengan capaian 124,68%, yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Puskesmas meningkat.	Perlu mempertahankan kualitas pelayanan melalui peningkatan kompetensi petugas dan perbaikan sarana prasarana pelayanan kesehatan.
		Meningkatnya Kepuasan layanan dan mutu layanan Primer	Indeks Nasional Mutu (INM) (Nilai)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Dinkes	60.00	99.00	165.00	Capaian indikator sangat tinggi karena realisasi sebesar 99 jauh melampaui target 60 dengan capaian 165,00%, yang	Perlu menjaga konsistensi penerapan standar mutu melalui pembinaan dan pengawasan

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Puskesmas Sawahan		DAERAH KABUPATEN/KOTA					menunjukkan penerapan standar mutu pelayanan kesehatan telah berjalan secara optimal.	terhadap fasilitas pelayanan kesehatan.
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Puskesmas (Nilai)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinkes	77.00	90.00	116.88	Capaian indikator sangat baik karena realisasi sebesar 90 melampaui target 77 dengan capaian 116,88%, yang menunjukkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat telah berjalan dengan baik.	Perlu meningkatkan inovasi pelayanan kesehatan serta melakukan evaluasi berkala terhadap standar pelayanan.
		Meningkatnya Kepuasan layanan dan mutu layanan Primer Puskesmas Sukomoro	Indeks Nasional Mutu (INM) (Nilai)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinkes	60.00	100.00	166.67	Capaian indikator sangat tinggi karena realisasi sebesar 100 jauh melampaui target 60 dengan capaian 166,67%, yang menunjukkan keberhasilan dalam penerapan standar mutu pelayanan kesehatan.	Perlu mempertahankan capaian mutu pelayanan melalui penguatan sistem pengendalian mutu dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan.
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Puskesmas (Nilai)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinkes	77.00	87.00	112.99	Capaian indikator sangat baik karena realisasi sebesar 87 melampaui target 77 dengan capaian 112,99%, yang menunjukkan pelayanan Puskesmas telah memenuhi harapan masyarakat.	Perlu meningkatkan kualitas pelayanan melalui penguatan responsivitas petugas serta optimalisasi sistem pengaduan masyarakat.
		Meningkatnya Kepuasan layanan dan mutu layanan	Indeks Nasional Mutu (INM) (Nilai)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Dinkes	60.00	99.00	165.00	Capaian indikator sangat tinggi karena realisasi sebesar 99 melampaui target 60 dengan capaian	Perlu menjaga keberlanjutan mutu pelayanan melalui monitoring dan

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Primer Puskesmas Tanjunganom		PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					165,00%, yang menunjukkan standar mutu pelayanan kesehatan telah diterapkan secara konsisten.	evaluasi serta pembinaan berkelanjutan pada fasilitas pelayanan kesehatan.
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Puskesmas (Nilai)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinkes	77.00	95.00	123.38	Capaian indikator sangat baik karena realisasi sebesar 95 melampaui target 77 dengan capaian 123,38%, yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan meningkat.	Perlu mempertahankan kualitas pelayanan dengan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dan perbaikan fasilitas pelayanan kesehatan.
		Meningkatnya Kepuasan layanan dan mutu layanan Primer Puskesmas Wilangan	Indeks Nasional Mutu (INM) (Nilai)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinkes	60.00	98.00	163.33	Capaian indikator sangat tinggi karena realisasi sebesar 98 jauh melampaui target 60 dengan capaian 163,33%, yang menunjukkan pengelolaan mutu pelayanan kesehatan telah berjalan efektif.	Perlu memperkuat sistem manajemen mutu pelayanan kesehatan serta meningkatkan pengawasan terhadap penerapan standar pelayanan.
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Puskesmas (Nilai)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinkes	77.00	88.00	114.29	Capaian indikator sangat baik karena realisasi sebesar 88 melampaui target 77 dengan capaian 114,29%, yang menunjukkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berjalan dengan baik.	Perlu meningkatkan kualitas pelayanan melalui evaluasi berkala terhadap kepuasan masyarakat dan pengembangan inovasi pelayanan kesehatan.

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM kesehatan	Rasio nakes dan named sesuai populasi (Rasio)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinkes	5.3 per 1.000	0.00	0.00	Indikator belum tercapai karena realisasi masih 0,00 dari target 5,3 per 1.000 penduduk, yang menunjukkan pemenuhan rasio tenaga kesehatan belum terealisasi atau belum terdata pada tahun berjalan.	Perlu dilakukan perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan secara lebih optimal melalui pemetaan kebutuhan SDM kesehatan, pengusulan formasi tenaga kesehatan, serta peningkatan distribusi tenaga kesehatan sesuai kebutuhan wilayah.
		Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan (Dinas Kesehatan)	Persentase Labkesmas Tk 2 dengan SPA sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinkes	70.00	76.00	108.57	Capaian indikator sangat baik karena realisasi 76% melampaui target 70% dengan capaian 108,57%, yang menunjukkan sarana, prasarana, dan alat laboratorium kesehatan masyarakat telah memenuhi standar.	Perlu mempertahankan kualitas sarana prasarana laboratorium melalui pemeliharaan peralatan, peningkatan kapasitas tenaga laboratorium, serta penguatan sistem pengendalian mutu laboratorium.
			Persentase Puskesmas dengan SPA Sesuai Standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Dinkes	40.00	0.00	0.00	Indikator belum tercapai karena realisasi masih 0% dari target 40%, yang menunjukkan pemenuhan standar sarana, prasarana, dan alat Puskesmas belum dapat direalisasikan atau	Perlu dilakukan percepatan pemenuhan standar sarana prasarana Puskesmas melalui penganggaran yang memadai, pengadaan fasilitas

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					belum terlaporkan pada periode penilaian.	kesehatan, serta peningkatan monitoring terhadap pemenuhan standar pelayanan.
			Persentase RS Pemda dengan SPA Sesuai Standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinkes	45.00	76.06	169.02	Capaian indikator sangat baik karena realisasi 76,06% melampaui target 45% dengan capaian 169,02%, yang menunjukkan sarana prasarana dan alat rumah sakit daerah telah memenuhi standar pelayanan kesehatan.	Perlu mempertahankan kualitas sarana prasarana rumah sakit melalui pemeliharaan fasilitas kesehatan, peningkatan kualitas peralatan medis, serta penguatan manajemen mutu rumah sakit.
		Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan (Puskesmas Bagor)	Persentase Puskesmas dengan SPA Sesuai Standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinkes	60.00	51.00	85.00	Capaian indikator belum mencapai target karena realisasi 51% dari target 60% sehingga pemenuhan standar sarana prasarana Puskesmas masih perlu ditingkatkan.	Perlu dilakukan peningkatan pemenuhan sarana prasarana Puskesmas melalui penguatan perencanaan pengadaan fasilitas kesehatan dan peningkatan alokasi anggaran.
		Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan	Persentase Puskesmas dengan SPA	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Dinkes	60.00	63.00	105.00	Sebagian besar indikator menunjukkan capaian sangat baik karena realisasi berkisar 60%–	Perlu mempertahankan dan meningkatkan pemenuhan standar

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		primer dan lanjutan (Puskesmas Baron)	Sesuai Standar (%)	KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					84% dan melampaui target 60%, yang menunjukkan pemenuhan sarana prasarana dan alat Puskesmas telah berjalan dengan baik.	sarana prasarana Puskesmas melalui pemeliharaan fasilitas, pengadaan alat kesehatan sesuai standar, serta monitoring dan evaluasi berkala terhadap pemenuhan standar pelayanan kesehatan.
		Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan (Puskesmas Berbek)	Persentase Puskesmas dengan SPA Sesuai Standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinkes	60.00	73.00	121.67	Capaian indikator sangat baik karena realisasi 73% melampaui target 60% dengan capaian 121,67%, yang menunjukkan pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan di Puskesmas telah berjalan dengan baik.	Perlu mempertahankan kualitas sarana prasarana Puskesmas melalui pemeliharaan fasilitas kesehatan serta monitoring dan evaluasi berkala terhadap standar pelayanan kesehatan.
		Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan (Puskesmas Gondang)	Persentase Puskesmas dengan SPA Sesuai Standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Dinkes	60.00	63.00	105.00	Capaian indikator baik karena realisasi 63% melampaui target 60% dengan capaian 105%, yang menunjukkan pemenuhan standar sarana prasarana Puskesmas telah sesuai dengan perencanaan program.	Perlu meningkatkan kualitas sarana prasarana pelayanan kesehatan melalui penguatan perencanaan pengadaan fasilitas dan peralatan kesehatan.

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				MASYARAKAT						
		Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan (Puskesmas Jatikalen)	Persentase Puskesmas dengan SPA Sesuai Standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinkes	60.00	60.00	100.00	Capaian indikator tercapai karena realisasi 60% sesuai dengan target 60% sehingga pemenuhan standar sarana prasarana Puskesmas telah sesuai dengan target yang ditetapkan.	Perlu dilakukan peningkatan kualitas sarana prasarana secara bertahap agar capaian indikator dapat terus meningkat pada tahun berikutnya.
		Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan (Puskesmas Kertosono)	Persentase Puskesmas dengan SPA Sesuai Standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinkes	60.00	74.00	123.33	Capaian indikator sangat baik karena realisasi 74% melampaui target 60% dengan capaian 123,33%, yang menunjukkan peningkatan pemenuhan standar sarana prasarana Puskesmas.	Perlu mempertahankan capaian melalui pemeliharaan fasilitas kesehatan, peningkatan kualitas alat kesehatan, serta penguatan monitoring terhadap pemenuhan standar pelayanan kesehatan.
		Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan	Persentase Puskesmas dengan SPA Sesuai Standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANG	Dinkes	60.00	62.00	103.33	Capaian indikator baik karena realisasi 62% melampaui target 60% dengan capaian 103,33%, yang menunjukkan pemenuhan sarana,	Perlu mempertahankan kualitas sarana prasarana Puskesmas melalui pemeliharaan fasilitas kesehatan

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(Puskesmas Lengkong)		AN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					prasarana, dan alat kesehatan di Puskesmas telah berjalan sesuai standar.	dan monitoring berkala terhadap standar pelayanan.
		Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan (Puskesmas Loceret)	Persentase Puskesmas dengan SPA Sesuai Standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinkes	60.00	77.00	128.33	Capaian indikator sangat baik karena realisasi 77% melampaui target 60% dengan capaian 128,33%, yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemenuhan standar sarana prasarana Puskesmas.	Perlu menjaga konsistensi pemenuhan standar melalui penguatan pembinaan fasilitas kesehatan dan peningkatan kualitas peralatan kesehatan.
		Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan (Puskesmas Nganjuk)	Persentase Puskesmas dengan SPA Sesuai Standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinkes	60.00	62.00	103.33	Capaian indikator baik karena realisasi 62% melampaui target 60% dengan capaian 103,33%, sehingga standar sarana prasarana Puskesmas telah terpenuhi sesuai perencanaan program.	Perlu meningkatkan kualitas sarana prasarana secara bertahap agar standar pelayanan kesehatan dapat terus ditingkatkan.
		Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan	Persentase Puskesmas dengan SPA	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Dinkes	60.00	67.00	111.67	Capaian indikator sangat baik karena realisasi 67% melampaui target 60% dengan capaian	Perlu mempertahankan capaian melalui peningkatan

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		primer dan lanjutan (Puskesmas Ngetos)	Sesuai Standar (%)	KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					111,67%, yang menunjukkan pemenuhan standar fasilitas pelayanan kesehatan di Puskesmas berjalan efektif.	pengawasan dan evaluasi terhadap pemenuhan standar sarana prasarana pelayanan kesehatan.
		Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan (Puskesmas ngluyu)	Persentase Puskesmas dengan SPA Sesuai Standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinkes	60.00	64.00	106.67	Capaian indikator baik karena realisasi 64% melampaui target 60% dengan capaian 106,67%, yang menunjukkan sarana prasarana Puskesmas telah memenuhi standar pelayanan kesehatan.	Perlu dilakukan pemeliharaan fasilitas kesehatan secara berkala serta peningkatan kualitas alat kesehatan guna menjaga standar pelayanan.
		Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan (Puskesmas ngronggot)	Persentase Puskesmas dengan SPA Sesuai Standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinkes	60.00	75.00	125.00	Capaian indikator sangat baik karena realisasi 75% melampaui target 60% dengan capaian 125%, yang menunjukkan pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan di Puskesmas telah berjalan dengan baik.	Perlu mempertahankan capaian melalui pemeliharaan fasilitas kesehatan serta peningkatan kualitas peralatan kesehatan di Puskesmas.

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan (Puskesmas Pace)	Persentase Puskesmas dengan SPA Sesuai Standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinkes	60.00	81.00	135.00	Capaian indikator sangat baik karena realisasi 81% melampaui target 60% dengan capaian 135%, yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemenuhan standar sarana prasarana Puskesmas.	Perlu menjaga konsistensi pemenuhan standar melalui penguatan monitoring serta pembinaan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan.
		Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan (Puskesmas Patianrowo)	Persentase Puskesmas dengan SPA Sesuai Standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinkes	60.00	64.00	106.67	Capaian indikator baik karena realisasi 64% melampaui target 60% dengan capaian 106,67%, yang menunjukkan standar sarana prasarana Puskesmas telah terpenuhi sesuai dengan perencanaan program.	Perlu dilakukan peningkatan kualitas sarana prasarana secara bertahap melalui perencanaan pengadaan alat kesehatan yang lebih optimal.
		Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan (Puskesmas prambon)	Persentase Puskesmas dengan SPA Sesuai Standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATA	Dinkes	60.00	73.00	121.67	Capaian indikator sangat baik karena realisasi 73% melampaui target 60% dengan capaian 121,67%, yang menunjukkan fasilitas pelayanan kesehatan di Puskesmas telah memenuhi standar pelayanan.	Perlu mempertahankan kualitas sarana prasarana melalui pemeliharaan fasilitas serta evaluasi berkala terhadap standar pelayanan kesehatan.

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				N MASYARAKAT						
		Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan (Puskesmas Rejoso)	Persentase Puskesmas dengan SPA Sesuai Standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinkes	60.00	70.00	116.67	Capaian indikator sangat baik karena realisasi 70% melampaui target 60% dengan capaian 116,67%, yang menunjukkan pemenuhan standar sarana prasarana Puskesmas berjalan efektif.	Perlu meningkatkan kualitas sarana prasarana pelayanan kesehatan melalui penguatan perencanaan dan pengawasan terhadap pemenuhan standar pelayanan kesehatan.
		Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan (Puskesmas Sawahan)	Persentase Puskesmas dengan SPA Sesuai Standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinkes	60.00	75.00	125.00	Capaian indikator sangat baik karena realisasi 75% melampaui target 60% dengan capaian 125%, yang menunjukkan pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan di Puskesmas telah berjalan dengan baik.	Perlu mempertahankan kualitas sarana prasarana melalui pemeliharaan fasilitas kesehatan serta monitoring berkala terhadap standar pelayanan kesehatan.
		Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan	Persentase Puskesmas dengan SPA Sesuai Standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANG	Dinkes	60.00	65.00	108.33	Capaian indikator baik karena realisasi 65% melampaui target 60% dengan capaian 108,33%, yang menunjukkan pemenuhan standar	Perlu meningkatkan kualitas sarana prasarana pelayanan kesehatan melalui perencanaan pengadaan fasilitas dan alat kesehatan

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(Puskesmas Sukomoro)		AN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					sarana prasarana Puskesmas telah berjalan sesuai perencanaan.	secara berkelanjutan.
		Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan (Puskesmas Tanjunganom)	Persentase Puskesmas dengan SPA Sesuai Standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinkes	60.00	65.00	108.33	Capaian indikator baik karena realisasi 65% melampaui target 60% dengan capaian 108,33%, yang menunjukkan fasilitas pelayanan kesehatan di Puskesmas telah memenuhi standar yang ditetapkan.	Perlu mempertahankan capaian dengan melakukan pemeliharaan fasilitas kesehatan serta peningkatan kualitas peralatan kesehatan.
		Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan (Puskesmas Wilangan)	Persentase Puskesmas dengan SPA Sesuai Standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinkes	60.00	84.00	140.00	Capaian indikator sangat baik karena realisasi 84% melampaui target 60% dengan capaian 140%, yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemenuhan standar sarana prasarana Puskesmas.	Perlu menjaga konsistensi pemenuhan standar melalui penguatan monitoring, evaluasi, serta pembinaan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan.
		Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan	Persentase RS Pemda dengan SPA Sesuai Standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Dinkes	45.00	76.06	169.02		-

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		primer dan lanjutan (RSUD Kertosono)		KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
		Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan (RSUD Nganjuk)	Persentase RS Pemda dengan SPA Sesuai Standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinkes	45.00	76.06	169.02		-
		Meningkatnya mutu layanan primer dan labkesmas tk-2, Meningkatnya kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	Persentase Puskesmas yang mencapai target INM (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinkes	10.00	0.00	0.00	tdk dilakasnaakan pada Tahun anggaran 2025	-

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			IKM Layanan Kesehatan RSUD, Puskesmas, dan Labkesmas Tk-2) (Nilai)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinkes	60.00	0.00	0.00	tdk dilakasnaakan pada Tahun anggaran 2025	-
			Persentase Labkesmas Tk 2 yang mencapai target INM (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinkes	100.00	100.00	100.00	Capaian indikator Persentase Labkesmas Tingkat 2 yang mencapai target INM telah tercapai sesuai target, dengan realisasi 100% dari target 100%, yang menunjukkan bahwa laboratorium kesehatan masyarakat telah memenuhi indikator mutu pelayanan sesuai standar yang ditetapkan.	Perlu mempertahankan capaian tersebut melalui penguatan sistem manajemen mutu laboratorium, pemeliharaan sarana prasarana dan peralatan laboratorium, serta peningkatan kompetensi tenaga laboratorium kesehatan secara berkelanjutan.
		Meningkatnya mutu layanan rujukan dan kemandirian keuangan BLUD RSUD Kertosono	Indeks Nasional Mutu (INM) Ketepatan Waktu Visite Dokter (%)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Dinkes		0.00	#DIV/0!	tdk dilakasnaakan pada Tahun anggaran 2025	-

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				KABUPATEN/KOTA						
			CRR (%)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinkes	90.00	104.93	116.59		-
			Indeks Nasional Mutu (INM) Kepatuhan Penggunaan APD (%)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinkes		0.00	#DIV/0!	tdk dilakasnaakan pada Tahun anggaran 2025	-
			Indeks Nasional Mutu (INM) Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium (%)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinkes		0.00	#DIV/0!	tdk dilakasnaakan pada Tahun anggaran 2025	-
			Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Pelayanan RSUD Kertosono (Indeks)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Dinkes	82.00	88.56	108.00		-

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				KABUPATEN/KOTA						
			TOI (Hari)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinkes	2.00	3.04	152.00		-
			Indeks Nasional Mutu (INM) Kepatuhan penggunaan formularium nasional (%)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinkes		0.00	#DIV/0!	tdk dilakasnaakan pada Tahun anggaran 2025	-
			Indeks Nasional Mutu (INM) Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergensi (%)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinkes		0.00	#DIV/0!	tdk dilakasnaakan pada Tahun anggaran 2025	-
			Indeks Nasional Mutu (INM) Kecepatan Waktu Tanggap Komplain (%)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Dinkes		0.00	#DIV/0!	tdk dilakasnaakan pada Tahun anggaran 2025	-

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				KABUPATEN/KOTA						
			Indeks Nasional Mutu (INM) Kepatuhan Terhadap Alur klinis (Clinical Pathway) (%)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinkes		0.00	#DIV/0!	tdk dilakasnaakan pada Tahun anggaran 2025	-
			Indeks Nasional Mutu (INM) Waktu Tunggu Rawat Jalan (%)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinkes		0.00	#DIV/0!	tdk dilakasnaakan pada Tahun anggaran 2025	-
			Indeks Nasional Mutu (INM) Kepatuhan Identifikasi Pasien (%)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinkes		0.00	#DIV/0!	tdk dilakasnaakan pada Tahun anggaran 2025	-
			Indeks Nasional Mutu (INM) Penundaan Operasi Elektif (%)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Dinkes		0.00	#DIV/0!	tdk dilakasnaakan pada Tahun anggaran 2025	-

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				KABUPATEN/KOTA						
			Indeks Nasional Mutu (INM) Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh (%)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinkes		0.00	#DIV/0!	tdk dilakasnaakan pada Tahun anggaran 2025	-
			Indeks Nasional Mutu (INM) Kepuasan Pasien (%)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinkes		0.00	#DIV/0!	tdk dilakasnaakan pada Tahun anggaran 2025	-
			BOR (%)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinkes	80.00	58.53	73.16		-
			Indeks Nasional Mutu (INM) Kepatuhan Kebersihan Tangan (%)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Dinkes		0.00	#DIV/0!	tdk dilakasnaakan pada Tahun anggaran 2025	-

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				KABUPATEN/KOTA						
			NDR (Per 1000 Penduduk)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinkes	24.00	36.10	49.58		-
		Meningkatnya mutu layanan rujukan dan kemandirian keuangan BLUD RSUD Nganjuk	Indeks Nasional Mutu (INM) Kepatuhan Penggunaan APD (%)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinkes		0.00	#DIV/0!	tdk dilakasnaakan pada Tahun anggaran 2025	-
			Indeks kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan RSUD Nganjuk (Indeks)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinkes		0.00	#DIV/0!	tdk dilakasnaakan pada Tahun anggaran 2025	-
			Indeks Nasional Mutu (INM) Waktu Tunggu Rawat Jalan (%)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Dinkes		0.00	#DIV/0!	tdk dilakasnaakan pada Tahun anggaran 2025	-

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				KABUPATEN/KOTA						
			BOR (%)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinkes	70.00	68.59	97.99	tdk dilakasnaakan pada Tahun anggaran 2025	-
			Indeks Nasional Mutu (INM) Ketepatan Waktu Visite Dokter (%)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinkes		0.00	#DIV/0!	tdk dilakasnaakan pada Tahun anggaran 2025	-
			Indeks Nasional Mutu (INM) Kepatuhan penggunaan formularium nasional (%)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinkes		0.00	#DIV/0!	tdk dilakasnaakan pada Tahun anggaran 2025	-
			Indeks Nasional Mutu (INM) Kecepatan Waktu Tanggap Komplain (%)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Dinkes		0.00	#DIV/0!	tdk dilakasnaakan pada Tahun anggaran 2025	-

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				KABUPATEN/KOTA						
			Indeks Nasional Mutu (INM) Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium (%)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinkes		0.00	#DIV/0!	tdk dilakasnaakan pada Tahun anggaran 2025	-
			Indeks Nasional Mutu (INM) Kepatuhan Terhadap Alur klinis (Clinical Pathway) (%)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinkes		0.00	#DIV/0!	tdk dilakasnaakan pada Tahun anggaran 2025	-
			Indeks Nasional Mutu (INM) Penundaan Operasi Elektif (%)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinkes		0.00	#DIV/0!	tdk dilakasnaakan pada Tahun anggaran 2025	-
			CRR (%)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Dinkes		0.00	#DIV/0!	tdk dilakasnaakan pada Tahun anggaran 2025	-

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				KABUPATEN/KOTA						
			NDR (Per 1000 Penduduk)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinkes		0.00	#DIV/0!	tdk dilakasnaakan pada Tahun anggaran 2025	-
			Indeks Nasional Mutu (INM) Kepatuhan Identifikasi Pasien (%)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinkes		0.00	#DIV/0!	tdk dilakasnaakan pada Tahun anggaran 2025	-
			Indeks Nasional Mutu (INM) Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh (%)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinkes		0.00	#DIV/0!	tdk dilakasnaakan pada Tahun anggaran 2025	-
			TOI (Hari)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Dinkes		0.00	#DIV/0!	tdk dilakasnaakan pada Tahun anggaran 2025	-

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				KABUPATEN/KOTA						
			Indeks Nasional Mutu (INM) Kepatuhan Kebersihan Tangan (%)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinkes		0.00	#DIV/0!	tdk dilakasnaakan pada Tahun anggaran 2025	-
			Indeks Nasional Mutu (INM) Kepuasan Pasien (%)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinkes		0.00	#DIV/0!	tdk dilakasnaakan pada Tahun anggaran 2025	-
			Indeks Nasional Mutu (INM) Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergensi (%)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinkes		0.00	#DIV/0!	tdk dilakasnaakan pada Tahun anggaran 2025	-
		Meningkatnya Pelayanan Gizi masyarakat	Presentase Bumil KEK (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANG	Dinkes	15.00	12.59	116.07	Capaian indikator Persentase Bumil KEK sangat baik karena realisasi 12,59% lebih rendah dari target 15% sehingga menunjukkan penurunan jumlah ibu	Perlu mempertahankan capaian melalui peningkatan edukasi gizi ibu hamil, pemberian makanan tambahan

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				AN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					hamil dengan kekurangan energi kronis.	bagi bumil KEK, serta penguatan pemantauan status gizi ibu hamil melalui pelayanan kesehatan.
			Prevalensi wasting pada balita (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinkes	8.00	4.62	142.25	Capaian indikator Prevalensi wasting pada balita sangat baik karena realisasi 4,62% lebih rendah dari target 8%, yang menunjukkan perbaikan status gizi balita di wilayah pelayanan kesehatan.	Perlu meningkatkan upaya pencegahan melalui pemantauan pertumbuhan balita secara rutin, pemberian intervensi gizi spesifik, serta penguatan peran posyandu dan kader kesehatan.
			Insiden Stunting pada Balita (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinkes	23.00	6.28	172.70	Capaian indikator Insiden stunting pada balita sangat baik karena realisasi 6,28% jauh lebih rendah dari target 23%, yang menunjukkan keberhasilan program percepatan penurunan stunting.	Perlu mempertahankan dan memperkuat intervensi gizi spesifik dan sensitif melalui peningkatan edukasi gizi, pemantauan tumbuh kembang anak, serta koordinasi lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting.
			Persentase anak usia 6- 23 Bulan	1.02.02 PROGRAM	Dinkes	60.90	91.84	150.80	Capaian indikator Persentase anak usia 6–	Perlu mempertahankan

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			mendapatkan MPASI (%)	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					23 bulan mendapatkan MPASI sangat baik karena realisasi 91,84% melampaui target 60,90%, yang menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pemberian makanan pendamping ASI yang sesuai.	capaian melalui peningkatan edukasi kepada keluarga mengenai pemberian MPASI yang bergizi seimbang serta penguatan peran tenaga kesehatan dan kader posyandu.
			Persentase Bayi 6 Bulan mendapatkan ASI eksklusif (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinkes	68.60	46.83	68.27	Capaian indikator Persentase bayi 6 bulan mendapatkan ASI eksklusif belum tercapai karena realisasi 46,83% masih di bawah target 68,60%, yang menunjukkan cakupan pemberian ASI eksklusif masih perlu ditingkatkan.	Perlu dilakukan peningkatan promosi dan edukasi ASI eksklusif, penguatan dukungan keluarga dan tempat kerja ramah menyusui, serta optimalisasi peran tenaga kesehatan dalam pendampingan ibu menyusui.
		Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu	Persentase anemia pada ibu hamil (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Dinkes	27.70	7.18	174.08	Capaian indikator persentase anemia pada ibu hamil sangat baik karena realisasi 7,18% lebih rendah dari target 27,70%, yang menunjukkan penurunan kasus anemia pada ibu hamil.	Perlu mempertahankan capaian melalui peningkatan pemberian tablet tambah darah, edukasi gizi ibu hamil, serta pemantauan status kesehatan ibu secara rutin melalui

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				MASYARAKAT						pelayanan antenatal.
			Cakupan kunjungan nifas (KF) lengkap sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinkes	26.80	60.23	224.74	Capaian indikator cakupan kunjungan nifas lengkap sesuai standar sangat baik karena realisasi 60,23% melampaui target 26,80%, yang menunjukkan meningkatnya pemanfaatan pelayanan kesehatan pada masa nifas.	Perlu mempertahankan dan meningkatkan cakupan pelayanan nifas melalui penguatan peran tenaga kesehatan, peningkatan kunjungan rumah, serta edukasi kepada ibu pasca persalinan.
			Persentase ibu hamil yang mendapatkan skrining pre-eclampsia (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinkes	20.00	3.67	18.35	Capaian indikator persentase ibu hamil yang mendapatkan skrining pre-eclampsia belum tercapai karena realisasi 3,67% masih jauh di bawah target 20%, yang menunjukkan skrining risiko kehamilan belum optimal.	Perlu meningkatkan pelaksanaan skrining pre-eclampsia melalui peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, penyediaan alat skrining, serta penguatan layanan antenatal care di fasilitas kesehatan.
			Presentase kabupaten kota dengan CFR direct obstetric (eklampsi dan perdarahan post partum <1%) (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Dinkes	20.00	0.80	4.00	Capaian indikator kabupaten/kota dengan CFR direct obstetric <1% belum tercapai karena realisasi 0,80% dengan capaian 4%, yang menunjukkan upaya penurunan	Perlu memperkuat sistem rujukan maternal, peningkatan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan dalam penanganan

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					kematian ibu akibat komplikasi obstetri masih perlu ditingkatkan.	kegawatdaruratan obstetri, serta peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.
		Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Pada anak	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinkes	16.85	7.63	45.28	Capaian indikator Angka Kematian Bayi (AKB) sangat baik karena realisasi 7,63 per 1.000 kelahiran hidup lebih rendah dari target 16,85, yang menunjukkan keberhasilan upaya peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan bayi.	Perlu mempertahankan capaian melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi, pemantauan kesehatan neonatal, serta penguatan program kesehatan ibu dan anak di fasilitas pelayanan kesehatan.
			Angka Kematian Neonatal (per 1000 kelahiran hidup) (Per 1.000 Kelahiran)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinkes	9.30	5.99	64.41	Capaian indikator Angka Kematian Neonatal menunjukkan kinerja yang sangat baik karena realisasi 5,99 per 1.000 kelahiran hidup lebih rendah dari target 9,30, yang menunjukkan keberhasilan dalam peningkatan pelayanan kesehatan neonatal dan penanganan bayi baru lahir.	Ke depan perlu mempertahankan capaian melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir, penguatan pelayanan neonatal esensial, serta peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dalam penanganan kegawatdaruratan neonatal.

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatnya perlindungan kesehatan	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinkes	96.00	98.03	102.11	Capaian indikator cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah melampaui target yang ditetapkan dengan realisasi 98,03% dari target 96%, yang menunjukkan semakin luasnya akses masyarakat terhadap perlindungan pembiayaan pelayanan kesehatan.	Perlu dilakukan upaya mempertahankan dan meningkatkan cakupan kepesertaan melalui pemutakhiran data peserta, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, serta penguatan koordinasi dengan penyelenggara JKN.
		Meningkatnya tingkatan kabupaten sehat	Tingkatan Kabupaten Sehat (Predikat)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinkes	Padapa	Padapa	100.00	Capaian indikator Tingkatan Kabupaten Sehat telah sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu Predikat Padapa, yang menunjukkan bahwa penyelenggaraan program Kabupaten Sehat telah berjalan sesuai dengan standar dan indikator yang ditetapkan.	Perlu dilakukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pengembangan inovasi program lingkungan sehat guna meningkatkan predikat Kabupaten Sehat pada periode berikutnya.
		Meningkatnya upaya gaya hidup sehat pada masyarakat	Persentase Pustu dan Puskesmas yang menyelenggarakan program aktifitas fisik (%)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Dinkes	50.00	100.00	200.00	Capaian indikator persentase Pustu dan Puskesmas yang menyelenggarakan program aktivitas fisik sangat baik karena realisasi 100% melampaui target 50%,	Tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah mempertahankan pelaksanaan program aktivitas fisik secara berkelanjutan,

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									yang menunjukkan keberhasilan dalam mendorong penerapan gaya hidup sehat melalui kegiatan aktivitas fisik di fasilitas pelayanan kesehatan.	meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mengintegrasikan program tersebut dengan kegiatan promotif dan preventif lainnya di bidang kesehatan.
		Meningkatnya upaya kesehatan jiwa	Prevalensi depresi pada usia lebih dari sama dengan 15 Tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinkes	1.40	0.00	0.00	Capaian indikator prevalensi depresi pada usia ≥15 tahun menunjukkan hasil yang sangat baik karena realisasi 0% lebih rendah dari target 1,40%, yang mengindikasikan bahwa kasus depresi yang terdeteksi relatif rendah pada masyarakat.	Ke depan perlu tetap memperkuat program kesehatan jiwa melalui peningkatan deteksi dini gangguan kesehatan mental, edukasi kesehatan jiwa kepada masyarakat, serta penguatan layanan kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan.
		Terpenuhinya perbekalan kesehatan sesuai standar di fasyankes	Persentase faskes primer dengan Obat, Vaksin dan BMHP sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinkes	85.00	100.00	117.65	Capaian indikator persentase fasilitas kesehatan primer dengan ketersediaan obat, vaksin dan BMHP sesuai standar sangat baik karena realisasi 100% melampaui target 85%, yang menunjukkan bahwa ketersediaan logistik kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan primer telah	Ke depan perlu mempertahankan capaian tersebut melalui penguatan sistem manajemen logistik kesehatan, peningkatan ketepatan perencanaan kebutuhan obat dan vaksin, serta monitoring dan evaluasi

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									terpenuhi secara optimal sehingga mendukung kelancaran pelayanan kesehatan kepada masyarakat.	ketersediaan obat dan BMHP secara berkala di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan.
		Tersedianya sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar (%)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Dinkes	100.00	100.00	100.00	Capaian indikator persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar telah tercapai sesuai target dengan realisasi 100% dari target 100%, yang menunjukkan bahwa pelayanan kefarmasian di fasilitas kesehatan telah dilaksanakan sesuai standar pelayanan yang berlaku.	Tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah mempertahankan kualitas pelayanan kefarmasian melalui peningkatan kompetensi tenaga kefarmasian, penguatan pengawasan dan pembinaan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan, serta peningkatan penerapan standar pelayanan kefarmasian secara konsisten.
	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan		Harapan Lama Sekolah (Tahun)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Disdik	8,48	8,26	98,33	Faktor Pendukung : a. Kebijakan Daerah 1. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang mewajibkan penuntasan pendidikan 12 tahun. 2. Alokasi dana	Ke depan perlu dilakukan penguatan program pencegahan putus sekolah melalui peningkatan akses pendidikan bagi anak usia sekolah, optimalisasi program pendidikan kesetaraan, serta

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									operasional sekolah yang tepat sasaran. b. Kelembagaan 1. Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk telah menyediakan sarana prasarana dasar yang memadai di sebagian besar sekolah. 2. Koordinasi yang efektif antara Dinas Pendidikan dengan satuan pendidikan dalam pemutakhiran data (Dapodik). c. Terobosan/Inovasi 1. Implementasi Kurikulum Merdeka (Nasional) yang memberikan fleksibilitas belajar serta penggunaan platform digital. 2. Penggunaan sistem informasi berbasis data (Dashboard Rapor Pendidikan) untuk mendeteksi dini indikator yang mengalami penurunan. 3. Optimalisasi pelibatan masyarakat dan sektor swasta dalam mendukung program sekolah.	peningkatan kolaborasi dengan masyarakat dan sektor swasta untuk mendukung keberlanjutan pendidikan hingga jenjang menengah.

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Disdik	13,37	13,19	100,00	Faktor Pendukung : a. Kebijakan Daerah 1. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang mewajibkan penuntasan pendidikan 12 tahun. 2. Alokasi dana operasional sekolah yang tepat sasaran. b. Kelembagaan 1. Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk telah menyediakan sarana prasarana dasar yang memadai di sebagian besar sekolah. 2. Koordinasi yang efektif antara Dinas Pendidikan dengan satuan pendidikan dalam pemutakhiran data (Dapodik). c. Terobosan/Inovasi 1. Implementasi Kurikulum Merdeka (Nasional) yang memberikan fleksibilitas belajar serta penggunaan platform digital. 2. Penggunaan sistem	Upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah mempertahankan capaian melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan, penguatan program wajib belajar, serta peningkatan akses pendidikan menengah dan pendidikan nonformal bagi masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan.

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									informasi berbasis data (Dashboard Rapor Pendidikan) untuk mendeteksi dini indikator yang mengalami penurunan. 3. Optimalisasi pelibatan masyarakat dan sektor swasta dalam mendukung program sekolah.	
		Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Proporsi Kemampuan Literasi SD/Sederajat (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Disdik	84,87	82,59	97,31	Faktor Pendukung : a. Kebijakan Daerah Alokasi anggaran APBD untuk pelatihan kompetensi guru secara mandiri (di luar program pusat) yang berfokus pada metode pengajaran literasi dan numerasi tingkat dasar dan menengah. b. Kelembagaan 1. Penyediaan sarana dan prasaran untuk mendukung pelaksanaan ANBK. 2. Penguatan komunitas belajar KKG (Kelompok Kerja Guru)/MPGP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) sebagai wadah berbagi praktik baik dalam menyelesaikan	Ke depan perlu dilakukan penguatan kompetensi guru dalam pembelajaran literasi dan numerasi, optimalisasi komunitas belajar guru, peningkatan pemanfaatan platform pembelajaran digital, serta penguatan budaya literasi di sekolah melalui program membaca dan pengembangan perpustakaan sekolah.

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									tantangan literasi dan numerasi di kelas. 3. Peran Kepala Sekolah sebagai pemimpin instruksional yang rutin melakukan supervisi akademik dan evaluasi Rapor Pendidikan secara kolektif untuk menentukan strategi perbaikan mutu. c. Terobosan/Inovasi 1. Penguatan konsep pembelajaran mendalam (deep learning). 2. Penggunaan masif platform pembelajaran untuk mengakses perangkat ajar literasi dan numerasi yang interaktif. 3. Optimalisasi pelibatan masyarakat dan sektor swasta dalam mendukung program sekolah.	
			Proporsi Kemampuan Literasi SMP/ Sederajat (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Disdik	87,94	87,92	99,98	Faktor Pendukung : a. Kebijakan Daerah Alokasi anggaran APBD untuk pelatihan kompetensi guru secara mandiri (di luar program pusat) yang berfokus pada metode pengajaran literasi dan numerasi	Tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah mempertahankan capaian melalui penguatan pembelajaran literasi dan numerasi,

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									tingkat dasar dan menengah. b. Kelembagaan 1. Penyediaan sarana dan prasaran untuk mendukung pelaksanaan ANBK. 2. Penguatan komunitas belajar KKG (Kelompok Kerja Guru)/MPGP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) sebagai wadah berbagi praktik baik dalam menyelesaikan tantangan literasi dan numerasi di kelas. 3. Peran Kepala Sekolah sebagai pemimpin instruksional yang rutin melakukan supervisi akademik dan evaluasi Rapor Pendidikan secara kolektif untuk menentukan strategi perbaikan mutu. c. Terobosan/Inovasi 1. Penguatan konsep pembelajaran mendalam (deep learning). 2. Penggunaan masif platform pembelajaran untuk mengakses perangkat ajar literasi	peningkatan kualitas proses pembelajaran di kelas, serta pemanfaatan hasil evaluasi Rapor Pendidikan sebagai dasar perbaikan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									dan numerasi yang interaktif. 3. Optimalisasi pelibatan masyarakat dan sektor swasta dalam mendukung program sekolah.	
			Proporsi Kemampuan Literasi Kesetaraan/Pendidikan Nonformal (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Disdik	61,14	52,28	85,51	Faktor Penghambat : a. Faktor Internal 1. Kurangnya tutor/guru pamong terlatih dalam konsep pembelajaran mendalam. 2. Kurangnya prasarana ruang kelas yang memadai. b. Faktor Eksternal Sebagian besar warga belajar berstatus bekerja, sehingga waktu belajar terbatas.	1. Mengoptimalkan pembelajaran dalam konsep blended learning dengan proporsi pembelajaran tatap muka atau daring yang interaktif. 2. Melaksanakan evaluasi dan refleksi disetiap akhir pembelajaran. 3. Meningkatkan frekuensi tutor/guru pamong kunjung yang lebih sering. 4. Memantik warga belajar untuk berfikir kritis dan analitik melalui forum diskusi.
			Proporsi Kemampuan Numerasi SD/ Sederajat (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Disdik	76,88	81,17	105,58	Faktor Pendukung : a. Kebijakan Daerah Alokasi anggaran APBD untuk pelatihan kompetensi guru secara mandiri (di luar program pusat) yang berfokus pada metode pengajaran	Perlu mempertahankan capaian melalui peningkatan kompetensi guru dalam pembelajaran numerasi, optimalisasi

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									literasi dan numerasi tingkat dasar dan menengah. b. Kelembagaan 1. Penyediaan sarana dan prasaran untuk mendukung pelaksanaan ANBK. 2. Penguatan komunitas belajar KKG (Kelompok Kerja Guru)/MPGP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) sebagai wadah berbagi praktik baik dalam menyelesaikan tantangan literasi dan numerasi di kelas. 3. Peran Kepala Sekolah sebagai pemimpin instruksional yang rutin melakukan supervisi akademik dan evaluasi Rapor Pendidikan secara kolektif untuk menentukan strategi perbaikan mutu. c. Terobosan/Inovasi 1. Penguatan konsep pembelajaran mendalam (deep learning). 2. Penggunaan masif platform pembelajaran untuk mengakses	komunitas belajar guru, serta penguatan pembelajaran berbasis pemecahan masalah dalam proses belajar mengajar.

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									perangkat ajar literasi dan numerasi yang interaktif. 3. Pembuatan video pembelajaran dan aplikasi e-learning berbasis lokal Satuan Pendidikan Nonformal. 4. Optimalisasi pelibatan masyarakat dan sektor swasta dalam mendukung program sekolah.	
			Proporsi Kemampuan Numerasi SMP/ Sederajat (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Disdik	84,79	84,81	100,02	Faktor Pendukung : a. Kebijakan Daerah Alokasi anggaran APBD untuk pelatihan kompetensi guru secara mandiri (di luar program pusat) yang berfokus pada metode pengajaran literasi dan numerasi tingkat dasar dan menengah. b. Kelembagaan 1. Penyediaan sarana dan prasaran untuk mendukung pelaksanaan ANBK. 2. Penguatan komunitas belajar KKG (Kelompok Kerja Guru)/MPGP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) sebagai wadah berbagi praktik	Tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah mempertahankan kualitas pembelajaran numerasi melalui peningkatan supervisi akademik, pemanfaatan Rapor Pendidikan sebagai dasar evaluasi, serta penguatan pembelajaran berbasis teknologi.

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									baik dalam menyelesaikan tantangan literasi dan numerasi di kelas. 3. Peran Kepala Sekolah sebagai pemimpin instruksional yang rutin melakukan supervisi akademik dan evaluasi Rapor Pendidikan secara kolektif untuk menentukan strategi perbaikan mutu. c. Terobosan/Inovasi 1. Penguatan konsep pembelajaran mendalam (deep learning). 2. Penggunaan masif platform pembelajaran untuk mengakses perangkat ajar literasi dan numerasi yang interaktif. 3. Pembuatan video pembelajaran dan aplikasi e-learning berbasis lokal Satuan Pendidikan Nonformal. 4. Optimalisasi pelibatan masyarakat dan sektor swasta dalam mendukung program sekolah.	
			Proporsi Kemampuan	1.01.02 PROGRAM	Disdik	56,01	48,35	86,33	Faktor Pendukung : a. Kebijakan Daerah	Perlu dilakukan penguatan program

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Numerasi Kesetaraan/Pendidikan Nonformal (%)	PENGELOLAAN PENDIDIKAN					Alokasi anggaran APBD untuk pelatihan kompetensi guru secara mandiri (di luar program pusat) yang berfokus pada metode pengajaran literasi dan numerasi tingkat dasar dan menengah. b. Kelembagaan 1. Penyediaan sarana dan prasaran untuk mendukung pelaksanaan ANBK. 2. Penguatan komunitas belajar KKG (Kelompok Kerja Guru)/MPGP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) sebagai wadah berbagi praktik baik dalam menyelesaikan tantangan literasi dan numerasi di kelas. 3. Peran Kepala Sekolah sebagai pemimpin instruksional yang rutin melakukan supervisi akademik dan evaluasi Rapor Pendidikan secara kolektif untuk menentukan strategi perbaikan mutu. c. Terobosan/Inovasi	pembelajaran pada satuan pendidikan nonformal, peningkatan kapasitas tutor, serta pengembangan media pembelajaran yang lebih adaptif dan menarik bagi peserta didik pendidikan kesetaraan.

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									1. Penguatan konsep pembelajaran mendalam (deep learning). 2. Penggunaan masif platform pembelajaran untuk mengakses perangkat ajar literasi dan numerasi yang interaktif. 3. Pembuatan video pembelajaran dan aplikasi e-learning berbasis lokal Satuan Pendidikan Nonformal. 4. Optimalisasi pelibatan masyarakat dan sektor swasta dalam mendukung program sekolah.	
			Angka Partisipasi Sekolah PAUD (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Disdik	96,14	94,54	98,34	Faktor Pendukung : a. Kebijakan Daerah 1. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang mewajibkan penuntasan pendidikan 12 tahun. 2. Alokasi dana operasional sekolah yang tepat sasaran. b. Kelembagaan 1. Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk	Ke depan perlu meningkatkan partisipasi pendidikan anak usia dini melalui sosialisasi pentingnya PAUD kepada masyarakat, peningkatan kualitas layanan PAUD, serta perluasan akses layanan pendidikan usia dini.

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									telah menyediakan sarana prasarana dasar yang memadai di sebagian besar sekolah. 2. Koordinasi yang efektif antara Dinas Pendidikan dengan satuan pendidikan dalam pemutakhiran data (Dapodik). c. Terobosan/Inovasi 1. Implementasi Kurikulum Merdeka (Nasional) yang memberikan fleksibilitas belajar serta penggunaan platform digital. 2. Penggunaan sistem informasi berbasis data (Dashboard Rapor Pendidikan) untuk mendeteksi dini indikator yang mengalami penurunan. 3. Optimalisasi pelibatan masyarakat dan sektor swasta dalam mendukung program sekolah.	
			Angka Partisipasi Sekolah SD/Sederajat (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Disdik	99,62	93,22	93,58	Faktor Pendukung : a. Kebijakan Daerah 1. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang	Perlu dilakukan upaya penguatan program pencegahan putus sekolah, peningkatan akses

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Penyelenggaraan Pendidikan yang mewajibkan penuntasan pendidikan 12 tahun. 2. Alokasi dana operasional sekolah yang tepat sasaran. b. Kelembagaan 1. Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk telah menyediakan sarana prasarana dasar yang memadai di sebagian besar sekolah. 2. Koordinasi yang efektif antara Dinas Pendidikan dengan satuan pendidikan dalam pemutakhiran data (Dapodik). c. Terobosan/Inovasi 1. Implementasi Kurikulum Merdeka (Nasional) yang memberikan fleksibilitas belajar serta penggunaan platform digital. 2. Penggunaan sistem informasi berbasis data (Dashboard Rapor Pendidikan) untuk mendeteksi dini indikator yang mengalami penurunan.	pendidikan di wilayah tertentu, serta peningkatan koordinasi dengan pemerintah desa dan masyarakat dalam memastikan seluruh anak usia sekolah dapat mengakses pendidikan dasar.

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									3. Optimalisasi pelibatan masyarakat dan sektor swasta dalam mendukung program sekolah.	
			Angka Partisipasi Sekolah SMP/Sederajat (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Disdik	99,4	93,11	93,67	Faktor Pendukung : a. Kebijakan Daerah 1. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang mewajibkan penuntasan pendidikan 12 tahun. 2. Alokasi dana operasional sekolah yang tepat sasaran. b. Kelembagaan 1. Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk telah menyediakan sarana prasarana dasar yang memadai di sebagian besar sekolah. 2. Koordinasi yang efektif antara Dinas Pendidikan dengan satuan pendidikan dalam pemutakhiran data (Dapodik). c. Terobosan/Inovasi 1. Implementasi Kurikulum Merdeka	Perlu dilakukan penguatan program wajib belajar 12 tahun, pemberian bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu, serta peningkatan akses pendidikan bagi anak usia sekolah yang belum melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP.

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									(Nasional) yang memberikan fleksibilitas belajar serta penggunaan platform digital. 2. Penggunaan sistem informasi berbasis data (Dashboard Rapor Pendidikan) untuk mendeteksi dini indikator yang mengalami penurunan. 3. Optimalisasi pelibatan masyarakat dan sektor swasta dalam mendukung program sekolah.	
			Angka Partisipasi Sekolah Kesetaraan/Pendidikan Nonformal (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Disdik	18,26	15,54	85,10	Faktor Pendukung : a. Kebijakan Daerah 1. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang mewajibkan penuntasan pendidikan 12 tahun. 2. Alokasi dana operasional sekolah yang tepat sasaran. b. Kelembagaan 1. Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk telah menyediakan sarana prasarana dasar yang memadai di	Ke depan perlu meningkatkan sosialisasi dan akses pendidikan kesetaraan bagi masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan formal, serta memperkuat peran satuan pendidikan nonformal dalam memberikan layanan pendidikan alternatif.

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									sebagian besar sekolah. 2. Koordinasi yang efektif antara Dinas Pendidikan dengan satuan pendidikan dalam pemutakhiran data (Dapodik). c. Terobosan/Inovasi 1. Implementasi Kurikulum Merdeka (Nasional) yang memberikan fleksibilitas belajar serta penggunaan platform digital. 2. Penggunaan sistem informasi berbasis data (Dashboard Rapor Pendidikan) untuk mendeteksi dini indikator yang mengalami penurunan. 3. Optimalisasi pelibatan masyarakat dan sektor swasta dalam mendukung program sekolah.	
			Angka Kelulusan SD/Sederajat (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Disdik	100	100	100,00	Faktor Pendukung : a. Kebijakan Daerah 1. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang mewajibkan penuntasan	Tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah mempertahankan capaian melalui peningkatan kualitas pembelajaran, penguatan program

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									pendidikan 12 tahun. 2. Adanya program beasiswa Nganjuk Cerdas bagi siswa yang berprestasi. b. Kelembagaan 1. Peningkatan kualitas guru. 2. Melaksanakan Program Sekolah Ramah Anak untuk menjamin keamanan fisik dan psikis siswa 3. Penguatan peran Dewan Pendidikan Kabupaten Nganjuk. c. Terobosan/Inovasi 1. Implementasi Kurikulum Merdeka (Nasional) yang memberikan fleksibilitas belajar serta penggunaan platform digital. 2. Optimalisasi pelibatan masyarakat dan sektor swasta dalam mendukung program sekolah.	sekolah ramah anak, serta peningkatan kompetensi guru secara berkelanjutan.
			Angka Kelulusan SMP/Sederajat (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Disdik	100	100	100,00	Faktor Pendukung : a. Kebijakan Daerah 1. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang	Ke depan perlu mempertahankan capaian melalui peningkatan kualitas proses pembelajaran,

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Penyelenggaraan Pendidikan yang mewajibkan penuntasan pendidikan 12 tahun. 2. Adanya program beasiswa Nganjuk Cerdas bagi siswa yang berprestasi. b. Kelembagaan 1. Peningkatan kualitas guru. 2. Melaksanakan Program Sekolah Ramah Anak untuk menjamin keamanan fisik dan psikis siswa 3. Penguatan peran Dewan Pendidikan Kabupaten Nganjuk. c. Terobosan/Inovasi 1. Implementasi Kurikulum Merdeka (Nasional) yang memberikan fleksibilitas belajar serta penggunaan platform digital. 2. Optimalisasi pelibatan masyarakat dan sektor swasta dalam mendukung program sekolah.	penguatan pembinaan peserta didik, serta peningkatan peran sekolah dalam mendukung keberhasilan belajar siswa.
			Angka Putus Sekolah SD/Sederajat (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLA	Disdik	0,16	0,24	99,76	Faktor Pendukung : a. Kebijakan Daerah 1. Adanya Peraturan	Perlu dilakukan penguatan program pencegahan putus

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				AN PENDIDIKAN					Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang mewajibkan penuntasan pendidikan 12 tahun. 2. Adanya program beasiswa Nganjuk Cerdas bagi siswa yang berprestasi. b. Kelembagaan 1. Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk telah menyediakan sarana prasarana dasar yang memadai di sebagian besar sekolah. 2. Penyediaan bantuan perlengkapan dasar bagi peserta didik 3. Peningkatan kualitas guru. c. Terobosan/Inovasi 1. Gerakan kembali ke sekolah. 2. Optimalisasi pelibatan masyarakat dan sektor swasta dalam mendukung program sekolah.	sekolah melalui pendataan anak berisiko putus sekolah, pemberian bantuan pendidikan, serta pelaksanaan program Gerakan Kembali ke Sekolah.
			Angka Putus Sekolah	1.01.02 PROGRAM PENGELOLA	Disdik	1,37	1,74	98,26	Faktor Pendukung : a. Kebijakan Daerah 1. Adanya Peraturan	Perlu dilakukan peningkatan intervensi terhadap

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			SMP/Sederajat (%)	AN PENDIDIKAN					Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang mewajibkan penuntasan pendidikan 12 tahun. 2. Adanya program beasiswa Nganjuk Cerdas bagi siswa yang berprestasi. b. Kelembagaan 1. Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk telah menyediakan sarana prasarana dasar yang memadai di sebagian besar sekolah. 2. Penyediaan bantuan perlengkapan dasar bagi peserta didik 3. Peningkatan kualitas guru. c. Terobosan/Inovasi 1. Gerakan kembali ke sekolah. 2. Optimalisasi pelibatan masyarakat dan sektor swasta dalam mendukung program sekolah.	siswa berisiko putus sekolah melalui pendampingan oleh sekolah, pemberian bantuan pendidikan, serta penguatan kerja sama dengan orang tua dan masyarakat dalam memastikan keberlanjutan pendidikan anak.
			Indeks Ketimpangan		Dinsos PPPA	0.354	0.35	101.143		

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Meningkatnya kesetaraan gender		Gender (IKG) (Indeks)							
		Meningkatnya Kualitas dan Efektifitas Penyelenggaraan PUG	Persentase ARG (%)	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Dinsos PPPA	28.5	28.31	99.33	• Persentase ARG pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 28,5% dengan realisasi 28,31 dan capaian sebesar 99% masuk kategori capaian kinerja “Tercapai” yang artinya berhasil mencapai kinerja dari target yang ditentukan keberhasilan ini didukung 1 Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota dengan keluaran Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG “Tercapai” dengan capaian 100%; Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG “Tercapai” dengan capaian 100% dan Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	Ke depan perlu dilakukan penguatan implementasi PUG melalui peningkatan kapasitas perangkat daerah dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif gender, peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah, serta monitoring dan evaluasi penerapan ARG secara berkala.

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									“Tercapai” dengan capaian 100%	
		Meningkatnya Pemanfaatan Data Gender dan Anak	Persentase Pemanfaatan Data Gender dan Anak oleh PD (%)	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Dinsos PPPA	100	100	100.00	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak pada tahun 2025 dengan indicator “Persentase Pemanfaatan Data Gender dan Anak oleh PD” ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi 100% dan capaian sebesar 100% masuk kategori capaian kinerja “Tercapai” yang artinya berhasil mencapai kinerja dari target yang ditentukan. Pencapaian Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan 1. Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan keluaran Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia “Tercapai” dengan capaian 100%.	Tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah mempertahankan pemanfaatan data gender dan anak melalui penguatan sistem pengelolaan data, peningkatan kualitas dan akurasi data, serta optimalisasi integrasi data gender dan anak dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Dinsos PPPA	65.6	70.03	106.75	Program Pengarusutamaan Hak Anak (PHA) dengan indikator “Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)” pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 65,6 Nilai dengan realisasi 70,03 Nilai dan capaian sebesar 107% masuk kategori capaian kinerja “Tercapai” yang artinya berhasil mencapai kinerja dari target yang ditentukan. Pencapaian Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan. 1. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dengan keluaran Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan	Ke depan perlu dilakukan penguatan sinergi lintas sektor dalam pemenuhan hak anak, peningkatan advokasi kebijakan kepada berbagai lembaga, serta penguatan implementasi program Kabupaten Layak Anak guna meningkatkan kualitas perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Dunia Usaha “Tercapai” dengan capaian 200% dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota “Tercapai” dengan capaian 133%.	
		Meningkatnya Peran Lembaga dalam Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Lembaga yang Aktif dalam Peningkatan Kualitas Keluarga (%)	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Dinsos PPPA	100	100	100.00	Program Peningkatan Kualitas Keluarga dengan indikator “Persentase Lembaga yang Aktif dalam Peningkatan Kualitas Keluarga” pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi 100% dan capaian sebesar 100% masuk kategori capaian kinerja “Tercapai” yang artinya berhasil mencapai kinerja dari target yang ditentukan. Pencapaian Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan yang capaiannya rata diatas 100% yang masuk kategori tercapai	Perlu mempertahankan capaian tersebut melalui penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kapasitas kelembagaan dalam memberikan layanan kepada keluarga, serta pengembangan program edukasi dan pemberdayaan keluarga secara berkelanjutan.
		Meningkatnya Peran Organisasi	Persentase Peran serta Perempuan dalam Bidang	2.08.02 PROGRAM PENGARUS	Dinsos PPPA	0.59	0.59	100.00	• Persentase Peran serta Perempuan dalam Bidang Politik, Hukum,	Tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Kemasyarakatan	Politik, Hukum, Ekonomi dan Sosial melalui Pelatihan dan Sosialisasi (%)	UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					Ekonomi dan Sosial melalui Pelatihan dan Sosialisasi ditargetkan sebesar 0,59% dengan realisasi 0,59% dan capaian sebesar 100% masuk kategori capaian kinerja "Tercapai" yang artinya berhasil mencapai kinerja dari target yang ditentukan dengan 2. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan keluaran Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota "Tercapai" dengan capaian 100%.	meningkatkan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan melalui program pemberdayaan perempuan, peningkatan kapasitas organisasi perempuan, serta penguatan akses perempuan terhadap peluang ekonomi, sosial, dan politik.
		Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Dinsos PPPA	85.4	86.5	101.29	Program Perlindungan Khusus Anak dengan indikator "Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)" pada tahun 2025 ditargetkan	Ke depan perlu dilakukan penguatan koordinasi lintas sektor dalam penanganan kasus

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									sebesar 85,4 Nilai dengan realisasi 86,50 Nilai dan capaian sebesar 101% masuk kategori capaian kinerja "Tercapai" yang artinya berhasil mencapai kinerja dari target yang ditentukan. Pencapaian Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan. 1. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan keluaran Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KT "Tercapai" dengan capaian 101%.dan Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota "Tercapai" dengan capaian 150%. 2. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak	anak yang memerlukan perlindungan khusus, peningkatan kapasitas SDM penyedia layanan perlindungan anak, serta penguatan sistem layanan pengaduan dan pendampingan bagi anak korban kekerasan agar penanganan kasus dapat dilakukan secara lebih cepat dan komprehensif.

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan keluaran Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan "Tercapai" dengan capaian 116% dan Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan "Tidak Tercapai" dengan capaian 70%, hal ini disebabkan keadaan isidental. 3. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan keluaran Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMP "Tercapai" dengan capaian 99%.	
		Menurunnya Kekerasan terhadap Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN	Dinsos PPPA	70	4.53	6.47	Program Perlindungan Perempuan dengan indikator "Persentase Perempuan Korban	Ke depan perlu dilakukan penguatan sistem pelaporan dan

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			TPPO yang Mendapatakan Layanan Komprehensif (%)	PEREMPUAN					Kekerasan dan TPPO yang Mendapatakan Layanan Komprehensif" pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 70% dengan realisasi 4,53% dan capaian sebesar 6% masuk kategori capaian kinerja "Tidak Tercapai". Hal ini disebabkan karena keadaan isidental terkait laporan kasus yang terlaporkan dengan perbandingan jumlah penduduk kabupaten nganjuk	penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan melalui peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, penguatan layanan perlindungan perempuan, peningkatan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan lembaga terkait, serta penguatan peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam memberikan layanan yang komprehensif kepada korban.
	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga		Persentase peningkatan prestasi pemuda dan olahraga (%)		Disporabudpar	1.05	1.42	135.24%		
		Meningkatnya pembinaan pemuda dan organisasi kepemudaan	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif (%)	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING	Disporabudpar	89.50%	84%	93.85	1. Tingginya tingkat partisipasi / keikutsertaan pemuda dalam mengikuti Seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten ; 2. Kualitas SDM yang mumpuni;	meningkatkan koordinasi lintas organisasi kepemudaan dan memberikan fasilitas terhadap minat dan bakat pemuda dalam

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				KEPEMUDAAN					3. Peran Serta Masyarakat dalam mendukung Program Kepeloporan; 4. Dukungan Pemerintah baik di tingkat Desa, Kecamatan, dan Kabupaten.	mengembangkan kapasitas nya
	Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga		Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA) (Indeks)							
		Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran serta Masyarakat dalam Pembinaan KB	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Dinas PPKB	80.06	71.89	89.79515363	Mengendalikan angka kelahiran dengan cara pelaksanaan kegiatan Pelayanan KB dan Sosialisasi 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) kepada masyarakat	Sosialisasi mengenai Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) melalui tatap muka dan berbagai media cetak, media massa dan media luar ruang
		Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Persentase Keluarga akseptor yang Memiliki Usaha Ekonomi produktif (%)	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Dinas PPKB	84	89,72	106.8095238	- Mengoptimalkan Kegiatan Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	- Melaksanakan Sosialisasi, Advokasi dan Edukasi kepada masyarakat tentang Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										(BANGGA KENCANA)
		Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Lansia	Indeks Lansia Berdaya (Indeks)	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Dinas PPKB	59.37	0 (Belum release)	0 (Belum release)	Nilai capaian tahun 2025 belum release	-
		Meningkatnya Pengetahuan Orang Tua dalam Pengasuhan Tumbuh Kembang Anak	Persentase keluarga yang mengikuti Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) (%)	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Dinas PPKB	54	79.47	147.1666667	- Mengoptimalkan Kegiatan Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	- Melaksanakan Sosialisasi, Advokasi dan Edukasi kepada masyarakat tentang Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA)
		Menurunnya kelahiran Pasangan Usia Subur pada Wanita Usia Subur 15-19 Tahun	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Dinas PPKB	40	0 (Belum release)	0 (Belum release)	Nilai capaian tahun 2025 belum release	-
		Terwujudnya Edukasi Keluarga yang	Persentase Keluarga yang mengikuti Kelompok	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN	Dinas PPKB	85.31	87.01	101.9927324	- Mengoptimalkan Kegiatan Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga,	- Melaksanakan Sosialisasi, Advokasi dan Edukasi kepada

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		memiliki Remaja	Kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) (%)	PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	masyarakat tentang Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA)
	Meningkatnya literasi masyarakat		Indeks pembangunan literasi masyarakat (Indeks)		Dinas Arpus	60.11	23.4	38.929		
		Meningkatnya koleksi bahan pustaka	Persentase peningkatan bahan pustaka (%)	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Dinas Arpus	10	10.07	100.7	Melaksanakan sosialisasi terkait kuisioner penilaian TKM dan Sosialisasi Terkait E-Pusda	Melaksanakan sosialisasi terkait kuisioner penilaian TKM dan Sosialisasi Terkait E-Pusda
		Meningkatnya pelestarian koleksi naskah kuno	Persentase peningkatan naskah kuno yang dilestarikan (%)	2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Dinas Arpus	92.31	100	108.3306251	Melaksanakan sosialisasi terkait kuisioner penilaian TKM dan Sosialisasi Terkait E-Pusda	Melaksanakan sosialisasi terkait kuisioner penilaian TKM dan Sosialisasi Terkait E-Pusda
		Meningkatnya pengelolaan perpustakaan sesuai standart	Persentase perpustakaan yang ber SNP (%)	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Dinas Arpus	10	10.7	107	Melaksanakan sosialisasi terkait kuisioner penilaian TKM dan Sosialisasi Terkait E-Pusda	Melaksanakan sosialisasi terkait kuisioner penilaian TKM dan Sosialisasi Terkait E-Pusda

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatnya pengelolaan arsip	Tingkat ketersediaan arsip (Perangkat Daerah)	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Dinas Arpus	92.31	100	108.3306251	Capaian kinerja Meningkatnya Tata Kelola Arsip pada Tahun 2025 tercapai, hal ini disebabkan adanya beberapa factor yaitu adanya kenaikan nilai audit kearsipan	Capaian kinerja Meningkatnya Tata Kelola Arsip pada Tahun 2025 tercapai, hal ini disebabkan adanya beberapa factor yaitu adanya kenaikan nilai audit kearsipan
		Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip	Persentase cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip (%)	2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Dinas Arpus	1	1	100	Capaian kinerja Meningkatnya Tata Kelola Arsip pada Tahun 2025 tercapai, hal ini disebabkan adanya beberapa factor yaitu adanya kenaikan nilai audit kearsipan	Capaian kinerja Meningkatnya Tata Kelola Arsip pada Tahun 2025 tercapai, hal ini disebabkan adanya beberapa factor yaitu adanya kenaikan nilai audit kearsipan
Meningkatnya pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan			Tingkat Kemiskinan((%))		Dinsos PPPA	10.16	10.06	100.994		
			Rasio Gini(Indeks)		Dinsos PPPA	0.288	0.300	96.000		
	Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif		Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks)		Dinsos PPPA	62.67	59.29	94.607		
		Meningkatnya Pengelolaan TMP	Persentase TMP yang terkelola dengan baik (%)	1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Dinsos PPPA	100	100	100	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan indikator “Persentase TMP yang terkelola dengan baik” pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 85% dengan realisasi	Ke depan perlu mempertahankan kualitas pengelolaan melalui pemeliharaan sarana prasarana secara berkala serta peningkatan

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									100% dan capaian sebesar 118% masuk kategori capaian kinerja "Sangat Tinggi" yang artinya berhasil mencapai kinerja dari target yang ditentukan. Program tersebut dihitung berdasarkan TMP yang terpelihara dalam periode triwulan. Pencapaian Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan. 1. Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota dengan keluaran Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan "Tercapai" dengan capaian 100%.	pengelolaan kawasan taman makam pahlawan sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan.
		Meningkatnya Peran TKSK dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase TKSK yang Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (%)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinsos PPPA	100	100	100	Program Pemberdayaan Sosial dengan indikator "Persentase TKSK yang Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial" pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi 100% dan capaian sebesar 100% masuk	Tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah mempertahankan capaian program melalui peningkatan pembinaan kepada kelompok masyarakat serta penguatan peran

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									kategori capaian kinerja "Tercapai" yang artinya berhasil mencapai kinerja dari target yang ditentukan. Pencapaian Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan. 1. Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan keluaran Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang "Tidak Tercapai" dengan capaian 0%. Hal ini dikarenakan output dari pelaksanaan sosialisasi PUB dan UGB tidak adanya permintaan rekomendasi yang diterbitkan oleh Dinas Sosial PPPA. 2. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dengan keluaran Jumlah Orang	lembaga sosial dalam mendukung pemberdayaan masyarakat.

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota "Tercapai" dengan capaian 80%; Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota "Tercapai" dengan capaian 100%; dan Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota "Tercapai" dengan capaian 100%	
		Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinsos PPPA	70	96.4	137.71	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan indikator "Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya" pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 85% dengan realisasi 96,40% dan capaian sebesar 113% masuk kategori capaian kinerja "Sangat	Ke depan perlu dilakukan penguatan sistem perlindungan sosial melalui pemutakhiran data penerima manfaat, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta peningkatan kualitas layanan

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Tinggi" yang artinya berhasil mencapai kinerja dari target yang ditentukan. Pencapaian Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan 1. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan Keluaran Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata "Tercapai" dengan capaian 100%; Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan "Tercapai" dengan capaian 100%; dan Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota "Tidak Tercapai" dengan capaian 34%.	jaminan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.
		Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan	1.06.06 PROGRAM PENANGAN	Dinsos PPPA	70	93.94	134.2	Program Penanganan Bencana dengan indikator "Persentase Korban Bencana yang	Perlu mempertahankan capaian melalui peningkatan

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Layanan Pemulihan Sosial (%)	AN BENCANA					Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial" pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 85% dengan realisasi 93,94% dan capaian sebesar 111% masuk kategori capaian kinerja "Sangat Tinggi" yang artinya berhasil mencapai kinerja dari target yang ditentukan. Pencapaian Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan. 1. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota dengan keluaran Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota "Tidak Tercapai dengan catatan" dengan capaian 89%. 2. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota dengan keluaran Jumlah Orang	kesiapsiagaan bencana, penguatan kapasitas SDM penanggulangan bencana sosial, serta peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan bencana.

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota "Tercapai" dengan capaian 333%.	
		Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS sesuai dengan SPM yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinsos PPPA	65	100	153.85	Program Rehabilitasi Sosial dengan 5 indikator yaitu: • Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 65% dengan realisasi 100% dan capaian sebesar 154% masuk kategori capaian kinerja "Tercapai", yang artinya berhasil mencapai kinerja dari target yang ditentukan.	Ke depan perlu mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi sosial melalui penguatan pembinaan terhadap penerima manfaat, peningkatan kapasitas tenaga kesejahteraan sosial, serta pengembangan program rehabilitasi sosial yang lebih berkelanjutan.
			Persentase PPKS di luar SPM kecuali HIV/ AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinsos PPPA	65	100	153.85	• Persentase PPKS di luar SPM kecuali HIV/ AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 65% dengan realisasi 100% dan capaian sebesar 154% masuk kategori capaian kinerja "Tercapai", yang artinya berhasil mencapai	Ke depan perlu mempertahankan capaian tersebut melalui penguatan pendataan PPKS secara berkala, peningkatan koordinasi dengan lembaga sosial dan perangkat daerah terkait, serta pengembangan

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									kinerja dari target yang ditentukan. • Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 65% dengan realisasi 100% dan capaian sebesar 154% masuk kategori capaian kinerja "Tercapai", yang artinya berhasil mencapai kinerja dari target yang ditentukan. • Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 65% dengan realisasi 100% dan capaian sebesar 154% masuk kategori capaian kinerja "Tercapai", yang artinya berhasil mencapai kinerja dari target yang ditentukan. • Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 65%	program rehabilitasi sosial yang berkelanjutan guna memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar bagi kelompok masyarakat rentan.

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									dengan realisasi 100% dan capaian sebesar 154% masuk kategori capaian kinerja "Tercapai", yang artinya berhasil mencapai kinerja dari target yang ditentukan. Pencapaian Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan, yaitu: 1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dengan keluaran Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota "Tercapai" dengan capaian 158%; dan Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan	

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Kabupaten/Kota “Tidak Tercapai” dengan capaian 76%. Hal ini dikarenakan penerima bantuan sosial penyandang disabilitas meninggal dan pindah domisili. 2. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial dengan keluaran Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota “Tercapai” dengan capaian 110%; Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota “Tercapai” dengan capaian 94%; dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi	

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Sosial Kabupaten/Kota "Tidak Tercapai" dengan capaian 4%, Hal ini disebabkan adanya verifikasi lapangan.	
	Meningkatnya kemandirian desa		Indeks Desa (Indeks)		Dinas PMD	0.781	0.7928	101.511		
		Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan Administrasi Pemerintahan Desa yang baik (%)	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Dinas PMD	100 %	100 %	100 %	Capaian indikator sebesar 100% dari target 100% menunjukkan bahwa seluruh desa telah mampu melaksanakan administrasi pemerintahan desa dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberhasilan ini didukung oleh kegiatan pembinaan dan pendampingan aparatur desa, peningkatan kapasitas perangkat desa, serta optimalisasi pemanfaatan sistem administrasi pemerintahan desa yang tertib dan terstandar. Sinergi antara Pemerintah Kabupaten, kecamatan, dan pemerintah desa juga berperan dalam memastikan penyelenggaraan	Ke depan perlu dilakukan penguatan kualitas administrasi desa, tidak hanya pada aspek pemenuhan dokumen tetapi juga peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan administrasi pemerintahan desa, optimalisasi pemanfaatan aplikasi sistem informasi desa, serta monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap tertib administrasi pemerintahan desa.

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									administrasi desa berjalan efektif dan akuntabel.	
		Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Desa	Persentase BUMDes yang aktif dan menghasilkan laba (%)	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Dinas PMD	100 %	100 %	100 %	Pelaksanaan program administrasi pemerintahan desa juga memberikan dukungan terhadap penguatan kelembagaan desa termasuk pengelolaan BUMDes. Upaya pembinaan dan fasilitasi yang dilakukan pemerintah daerah telah mendorong peningkatan aktivitas ekonomi desa melalui BUMDes. Hal ini tercermin dari semakin meningkatnya jumlah BUMDes yang aktif menjalankan usaha dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan desa serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.	Pemerintah daerah akan terus mendorong penguatan kelembagaan dan profesionalitas pengelolaan BUMDes melalui pendampingan manajemen usaha, peningkatan kapasitas pengurus BUMDes, fasilitasi akses permodalan, serta pengembangan jejaring kemitraan usaha. Selain itu akan dilakukan pemetaan potensi ekonomi desa untuk mendorong diversifikasi unit usaha BUMDes yang lebih produktif dan berkelanjutan.
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Desa yang Kapasitas kelembagaannya diberdayakan (%)	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYAR	Dinas PMD	45 %	45 %	100 %	Capaian indikator sebesar 100% dari target 45% menunjukkan bahwa pemberdayaan kelembagaan masyarakat desa telah	Ke depan diperlukan upaya penguatan peran kelembagaan masyarakat desa secara lebih

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				AKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					berjalan dengan sangat baik. Hal ini didukung oleh pelaksanaan program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa seperti LPMD, PKK, Karang Taruna, serta lembaga adat yang difasilitasi melalui kegiatan pembinaan, pelatihan, dan pendampingan. Pemberdayaan kelembagaan ini mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa serta memperkuat peran lembaga kemasyarakatan dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa.	berkelanjutan, antara lain melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan peran lembaga dalam perencanaan pembangunan desa, serta peningkatan sinergi antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
		Meningkatnya Penataan Desa yang Legal, Efektif dan Berkelanjutan	Persentase Desa yang mendapatkan Fasilitasi penataan Desa (%)	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	Dinas PMD	25 %	25,76 %	103 %	Realisasi indikator sebesar 25,76% dari target 25% (capaian 103%) menunjukkan bahwa program penataan desa telah dilaksanakan secara optimal. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh komitmen pemerintah daerah dalam memberikan fasilitasi terhadap penataan desa	Tindak lanjut yang akan dilakukan adalah melanjutkan fasilitasi penataan desa secara berkelanjutan, termasuk penguatan basis data desa, evaluasi penataan wilayah desa, serta pendampingan terhadap desa yang memerlukan

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									melalui pembinaan administrasi wilayah desa, penyempurnaan data desa, serta pendampingan dalam proses penataan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola desa yang lebih efektif, efisien dan berkelanjutan.	penyesuaian administrasi wilayah. Selain itu akan dilakukan koordinasi lintas perangkat daerah dan kecamatan untuk memastikan proses penataan desa berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
		Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Desa	Persentase desa dengan tata kelola keuangan yang baik (%)	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Dinas PMD	100 %	100 %	100 %	Capaian indikator sebesar 100% dari target 100% menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan secara tertib, transparan dan akuntabel. Hal ini didukung oleh penerapan sistem pengelolaan keuangan desa yang terstandar, pembinaan kepada aparatur desa terkait pengelolaan keuangan desa, serta pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan aparat pengawas internal pemerintah. Dengan demikian pengelolaan dana desa dan alokasi	Ke depan akan dilakukan penguatan sistem pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel, antara lain melalui peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa, optimalisasi pemanfaatan aplikasi keuangan desa, serta peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									dana desa dapat dilaksanakan secara efektif untuk mendukung pembangunan desa.	keuangan desa secara berkala.
		Terjalinnya Kerjasama Desa yang Produktif dan Legal	Persentase Desa yg melaksanakan kerja sama yang produktif dan legal (%)	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Dinas PMD	87 %	87 %	100 %	Capaian indikator sebesar 100% dari target 87% menunjukkan bahwa desa telah mampu menjalin kerja sama yang produktif dan legal dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan potensi dan pembangunan desa. Keberhasilan ini didukung oleh fasilitasi pemerintah daerah dalam pembinaan dan pendampingan penyusunan kerja sama desa, baik antar desa maupun dengan pihak ketiga. Kerja sama tersebut memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas ekonomi desa dan penguatan jaringan pembangunan desa.	Tindak lanjut yang akan dilakukan adalah mendorong peningkatan kualitas dan keberlanjutan kerja sama desa, termasuk penguatan regulasi kerja sama desa, peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam penyusunan perjanjian kerja sama, serta fasilitasi kemitraan desa dengan dunia usaha dan pihak lainnya untuk mengoptimalkan potensi ekonomi desa.
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif.			Pertumbuhan Ekonomi(%)		Bappeda	4.98	5.30	106.426		
	Meningkatnya nilai tambah pertanian		Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)		Disperta	1.98	2.81	141.919		

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Petani	Persentase kelembagaan petani yang meningkat kelasnya (%)	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Disperta					
		Meningkatnya kualitas Prasarana pertanian	Persentase prasarana pertanian dalam kondisi baik (%)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Disperta	100%	85%	85.48%	Adanya koordinasi yang baik dengan kelompok sasaran kegiatan	meningkatkan manajemen pengelolaan dan operator yang terampil
		Meningkatnya pemanfaatan benih unggul	Persentase Petani yang menggunakan bibit unggul (%)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Disperta	62%	62.70%	101.13%	Adanya koordinasi yang baik dengan kelompok sasaran kegiatan	meningkatkan koordinasi dengan semua unsur
		Meningkatnya pemenuhan sarana pertanian	Persentase alsintan dalam kondisi baik (%)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Disperta	90%	98%	108.89%	Adanya koordinasi yang baik dengan kelompok sasaran kegiatan	meningkatkan koordinasi dengan semua unsur
			Persentase ketersediaaan pupuk terhadap kebutuhan pupuk (%)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN	Disperta	100%	85.48%	85%	1. Keterbatasan kuota pupuk bersubsidi 2. Kesalahan dalam input data pada E-RDKK 3. Adanya perubahan	meningkatkan koordinasi terkait dengan kebijakan pupuk bersubsidi

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				SARANA PERTANIAN					kebijakan terkait penyaluran pupuk bersubsidi	
		Meningkatnya populasi ternak	Persentase Peningkatan populasi ternak Ruminansia (%)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Disperta	1%	0.81%	81.82%	1. Masih banyak peternak yang mengelola ternak secara sambilan atau tradisional, bukan sebagai usaha bisnis intensif, sehingga pertumbuhan populasi lambat 2. Ketergantungan pada rumput liar tanpa nutrisi yang cukup, serta kurangnya akses pakan komersial atau teknologi pengolahan pakan (fermentasi) 3. Peternak skala kecil sering kesulitan modal untuk mengembangkan kandang yang memadai	1. Penggunaan teknologi kawin suntik (IB) yang masif, seperti program Upsus Siwab, mempercepat peningkatan populasi dengan menghasilkan keturunan yang lebih baik 2.Pengendalian penyakit, terutama penyakit mulut dan kuku (PMK), sangat penting untuk menjaga kelangsungan hidup ternak 3.Peningkatan permintaan daging, memicu peternak untuk menambah populasi 4.Adanya aturan untuk mencegah pemotongan betina yang masih produktif, yang secara langsung melindungi populasi indukan

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Persentase Peningkatan Populasi Unggas (%)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Disperta	2.02%	1.89%	93.56%	Adanya koordinasi yang baik dengan kelompok sasaran kegiatan	meningkatkan koordinasi dengan semua unsur
		Menurunnya Kejadian Kasus Penyakit Hewan	Prosentase Penurunan Jumlah Kasus Penyakit Hewan (%)	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Disperta	10%	12.79%	127.70%	1. Koordinasi yang baik antar kelompok sasaran 2.Ada pendekatan proaktif terhadap masyarakat dan komunitas 3.Kooordinasi antar OPD terkait dalam penanganan kasus dugaan zoonosis. 4.Masyarakat kooperatif bersama-sama menangani penyakit hewan menular dan zoonosis.	meningkatkan koordinasi dengan semua unsur
		Terbitnya rekomendasi usaha peternakan	Prosentase Terbitnya rekomendasi usaha peternakan (%)	3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Disperta	100%	100%	100%	Adanya koordinasi yang baik dengan kelompok sasaran kegiatan	meningkatkan koordinasi dengan semua unsur
		Tertanganinya area yang terserang Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	Persentase serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang tertangani (%)	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Disperta	100%	100%	100%	Adanya koordinasi yang baik dengan kelompok sasaran kegiatan	meningkatkan koordinasi dengan semua unsur

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Terwujudnya fasilitasi ijin usaha pertanian	Prosentase izin usaha pertanian yang terfasiitasi penerbitan NIB (%)	3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Disperta	100%	100%	100%	Adanya koordinasi yang baik dengan kelompok sasaran kegiatan	meningkatkan koordinasi dengan semua unsur
	Meningkatnya nilai tambah perindustrian dan perdagangan		Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (%)		Disperindag	20,54	20,69	100,73		
			Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)		Disperindag	16,27	16,05	98,65		
		Meningkatkannya jaminan perlindungan konsumen melalui kepatuhan pemilik UTTP melakukan tera/tera ulang	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Disperindag	85.55	107.91	126.14	Capaian Program standardisasi dan perlindungan konsumen dengan Indikator Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku yang diterbitkan menargetkan sebesar 85,55% dan terealisasi sebesar 107,91% dengan Tingkat capaian sebesar 126,14%. Penilaian Capaian Kinerja Indikator Ini termasuk dalam kategori tercapai hal ini disebabkan karena adanya dukungan Kegiatan Pengawasan	Ke depan perlu mempertahankan capaian melalui peningkatan intensitas pengawasan UTTP di pasar dan tempat usaha, peningkatan sosialisasi pentingnya tera sah kepada pelaku usaha, serta penguatan layanan tera dan tera ulang guna menjamin perlindungan konsumen dan kepastian transaksi perdagangan.

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									UTTP dan Penyuluhan Metrologi Legal	
		Meningkatnya kemudahan perizinan IKM	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (%)	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Disperindag	79	79.48	100.61	Capaian Program pengendalian izin usaha industri Indikator Persentase Pemantauan dan Pengawasan Izin Usaha Industri di SIINas menargetkan sebesar 79% dan terealisasi sebesar 79,48% dengan Tingkat capaian sebesar 100,61%. Kreteria Penilaian Capaian Kinerja Indikator Ini termasuk dalam kategori tercapai hal ini disebabkan karena adanya Penguatan Koordinasi lintas sector, Peningkatan Sosialisasi dan Pendampingan Kepada Pelaku usaha	Tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah mempertahankan kualitas pengawasan terhadap izin usaha industri melalui peningkatan koordinasi dengan instansi terkait, optimalisasi sistem pelaporan usaha industri, serta peningkatan pembinaan kepada pelaku usaha agar mematuhi ketentuan perizinan yang berlaku.
		Meningkatnya kepatuhan pelaporan usaha industri	Persentase usaha industri yang patuh melaporkan dalam SIINAS (%)	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Disperindag	25	25.08	100.32	Capaian program pengelolaan sistem informasi industri nasional dengan Indikator Persentase Pengelolaan Data dalam SIINas menargetkan sebesar 25% dan terealisasi sebesar 25,08% dengan Tingkat capaian sebesar 100,32%. Penilaian Capaian Kinerja	Ke depan perlu meningkatkan kepatuhan pelaku usaha industri dalam pelaporan data melalui SIINas dengan memperkuat sosialisasi sistem pelaporan industri, meningkatkan pendampingan kepada pelaku

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Indikator Ini termasuk dalam kategori tercapai hal ini disebabkan karena telah dilaksanakan Pendataan langsung ke pelaku industry dan Pemanfaatan system informasi dan basis data Industri	usaha, serta memanfaatkan data industri sebagai dasar penyusunan kebijakan pengembangan sektor industri di daerah.
		Meningkatnya kepatuhan perizinan pelaku usaha perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelajaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) (%)	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Disperindag	90	48	53.33	Capaian Program perizinan dan pendaftaran perusahaan dengan Indikator Prosentase pelaku usaha yang memeperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP toko swalayan menargetkan sebesar 90% dan terealisasi sebesar 48% dengan Tingkat capaian sebesar 53,33%. Penilaian Capaian Kinerja Indikator Ini termasuk dalam kategori tidak tercapai hal ini disebabkan karena karena Pelaksanaan Kegiatan diukur dari Pengajuan Dokumen permohonan ijin Dari Pelaku Usaha	Ke depan perlu meningkatkan sosialisasi kepada pelaku usaha terkait pentingnya kepatuhan perizinan usaha perdagangan, melakukan pendampingan proses perizinan melalui sistem OSS, serta memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah terkait agar pelaku usaha lebih terdorong untuk mengurus perizinan secara resmi.

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Persentase pelaku usaha perdagangan yang taat perizinan (%)	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Disperindag	90	48	53.33	Capaian Program perizinan dan pendaftaran perusahaan dengan Indikator Prosentase pelaku usaha yang memeperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP toko swalayan menargetkan sebesar 90% dan terealisasi sebesar 48% dengan Tingkat capaian sebesar 53,33%. Penilaian Capaian Kinerja Indikator Ini termasuk dalam kategori tidak tercapai hal ini disebabkan karena karena Pelaksanaan Kegiatan diukur dari Pengajuan Dokumen permohonan ijin Dari Pelaku Usaha	Perlu dilakukan peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha perdagangan, optimalisasi sosialisasi regulasi perizinan usaha, serta peningkatan integrasi layanan perizinan melalui sistem digital untuk mempermudah proses perizinan bagi pelaku usaha.
		Meningkatnya kualitas produk industri	Persentase produk IKM yang bersertifikasi (%)	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Disperindag	57	71.42	125.30	Capaian Program perencanaan dan pembangunan industri dengan Indikator Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri yang Disusun menargetkan sebesar 57% dan terealisasi sebesar 71,42% dengan	Ke depan perlu mempertahankan dan meningkatkan capaian tersebut melalui penguatan fasilitasi sertifikasi produk IKM, peningkatan pembinaan mutu produk, se

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Tingkat capaian sebesar 125,30%. Kreteria Penilaian Capaian Kinerja Indikator Ini termasuk dalam kategori tercapai dengan didukung Capaian kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dengan Indikator Jumlah dokumen Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten /Kota yang diterbitkan menargetkan sebesar 7 dokumen dan terealisasi sebesar 5 dokumen dengan Tingkat capaian sebesar 71,43%. Kreteria Penilaian Capaian Kinerja Indikator Ini termasuk dalam kategori tercapai dengan catatan Meskipun capaian baru mencapai 71,43%, substansi utama perencanaan dan evaluasi pembangunan industri tetap terlaksana dan mendukung arah kebijakan pembangunan sektor industri daerah. Ke depan,	

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									diperlukan penguatan perencanaan waktu, koordinasi lintas sektor, serta pengamanan ketersediaan data agar seluruh target dokumen dapat diselesaikan secara optimal.	
		Meningkatnya nilai ekspor	Persentase peningkatan nilai ekspor (%)	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Disperindag	60	45	75.00	Capaian Program Pengembangan Ekspor dengan indikator Presentase fasilitasi pelaku usaha ekspor menargetkan 60% dan terealisasi sebesar 45% dengan Tingkat capaian sebesar 75%. Penilaian Capaian Kinerja Indikator Ini termasuk dalam kategori Tidak tercapai karena Pelaksanaan Kegiatan Mengikuti jadwal dari Provinsi dan mengikuti kegiatan di Kabupaten sehingga Kegiatan Pengembangan Ekspor terlaksana di tribulan 4	Ke depan perlu meningkatkan pembinaan kepada pelaku usaha berorientasi ekspor, memperluas akses promosi produk unggulan daerah melalui pameran dan misi dagang, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kementerian terkait untuk memperluas peluang pasar ekspor.
		Meningkatnya penggunaan sarpras yang berkualitas	Persentase IKM yang memiliki sarana prasarana produksi dalam kondisi baik (%)	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Disperindag	57	71.42	125.30	Capaian Program perencanaan dan pembangunan industri dengan Indikator Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri yang Disusun	Perlu mempertahankan capaian tersebut melalui peningkatan fasilitasi sarana dan prasarana produksi bagi IKM,

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									menargetkan sebesar 57% dan terealisasi sebesar 71,42% dengan Tingkat capaian sebesar 125,30%. Kreteria Penilaian Capaian Kinerja Indikator Ini termasuk dalam kategori tercapai . Capaian kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dengan Indikator Jumlah dokumen Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten /Kota yang diterbitkan menargetkan sebesar 7 dokumen dan terealisasi sebesar 5 dokumen dengan Tingkat capaian sebesar 71,43%. Kreteria Penilaian Capaian Kinerja Indikator Ini termasuk dalam kategori tercapai dengan catatan Meskipun capaian baru mencapai 71,43%, substansi utama perencanaan dan evaluasi pembangunan industri tetap terlaksana dan mendukung arah	peningkatan pembinaan teknis produksi, serta penguatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha industri kecil dan menengah.

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									kebijakan pembangunan sektor industri daerah. Ke depan, diperlukan penguatan perencanaan waktu, koordinasi lintas sektor, serta pengamanan ketersediaan data agar seluruh target dokumen dapat diselesaikan secara optimal.	
		Meningkatnya perluasan pemasaran perdagangan	Persentase pelaku usaha perdagangan yang terakses pasar (%)	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Disperindag	58.44	55.52	95.00	Capaian program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri dengan Indikator kinerja Persentase Fasilitasi Promosi dan Pemasaran Produk menargetkan sebesar 58,44% dan terealisasi sebesar 55,52% dengan Tingkat capaian sebesar 95% Capaian Kinerja Indikator Ini termasuk dalam kategori tercapai hal ini disebabkan karena adanya Kesadaran dari Pelaku Usaha untuk mempromosikan produknya	Ke depan perlu meningkatkan fasilitasi promosi produk daerah, penguatan pemasaran digital bagi pelaku usaha, serta peningkatan kerja sama dengan marketplace dan jaringan distribusi perdagangan untuk memperluas akses pasar bagi pelaku usaha.
		Meningkatnya pertumbuhan usaha industri	Persentase pertambahan jumlah industri kecil dan	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN	Disperindag	57	71.42	125.30	Capaian Program perencanaan dan pembangunan industri dengan Indikator	Ke depan perlu memperkuat pembinaan kewirausahaan

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			menengah di kabupaten (%)	PEMBANGUNAN INDUSTRI					Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri yang Disusun menargetkan sebesar 57% dan terealisasi sebesar 71,42% dengan Tingkat capaian sebesar 125,30%. Kreteria Penilaian Capaian Kinerja Indikator Ini termasuk dalam kategori tercapai . Capaian kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dengan Indikator Jumlah dokumen Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten /Kota yang diterbitkan menargetkan sebesar 7 dokumen dan terealisasi sebesar 5 dokumen dengan Tingkat capaian sebesar 71,43%. Kreteria Penilaian Capaian Kinerja Indikator Ini termasuk dalam kategori tercapai dengan catatan Meskipun capaian baru mencapai 71,43%, substansi utama	industri, peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku industri kecil dan menengah, serta penguatan pengembangan kawasan industri berbasis potensi lokal untuk mendorong pertumbuhan industri yang berkelanjutan.
		Meningkatnya produk IKM yang diajukan sertifikasi	Persentase produk IKM yang layak difasilitasi sertifikasi (%)	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Disperindag	57	71.42	125.30		Ke depan perlu meningkatkan fasilitasi sertifikasi produk seperti halal, PIRT, dan standar mutu lainnya serta memperkuat pembinaan kualitas produk agar produk IKM memiliki daya saing yang lebih tinggi di pasar.

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									perencanaan dan evaluasi pembangunan industri tetap terlaksana dan mendukung arah kebijakan pembangunan sektor industri daerah. Ke depan, diperlukan penguatan perencanaan waktu, koordinasi lintas sektor, serta pengamanan ketersediaan data agar seluruh target dokumen dapat diselesaikan secara optimal.	
		Meningkatnya Sarana Distribusi Perdagangan yang Layak	Presentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Layak (%)	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Disperindag	1.089 Milyar	997,11 Milyar	91,56%	Capaian Program peningkatan sarana distribusi perdagangan dengan Indikator omzet perdagangan menargetkan sebesar 1.089 milyar dan terealisasi sebesar 997,11 milyar dengan Tingkat capaian sebesar 91,56%. Penilaian Capaian Kinerja Indikator Ini termasuk dalam kategori tercapai hal ini disebabkan Meningkatnya aktivitas perdagangan di pasar rakyat dan sarana distribusi lainnya, meskipun belum sepenuhnya pulih sesuai	Ke depan perlu meningkatkan pemeliharaan dan peningkatan kualitas sarana distribusi perdagangan seperti pasar rakyat dan fasilitas distribusi lainnya, serta melakukan penataan sarana perdagangan agar lebih tertib, nyaman, dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									proyeksi awal, Upaya pembinaan dan penataan sarana distribusi perdagangan, yang mendukung kelancaran arus barang dan stabilitas pasokan, Adanya fluktuasi daya beli masyarakat, yang berpengaruh terhadap volume transaksi dan nilai omzet perdagangan. Meskipun belum mencapai target sebesar Rp1.089 milyar, realisasi sebesar Rp997,11 milyar menunjukkan bahwa program peningkatan sarana distribusi perdagangan telah memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan aktivitas perdagangan daerah. Ke depan, diperlukan penguatan promosi perdagangan, peningkatan kualitas sarana distribusi, serta strategi peningkatan daya beli untuk mendorong capaian yang lebih optimal.	

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Terbentuknya perwilayahan industri	Persentase perwilayahan industri yang terbentuk (%)	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Disperindag	57	71.42	125.30	Capaian Program perencanaan dan pembangunan industri dengan Indikator Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri yang Disusun menargetkan sebesar 57% dan terealisasi sebesar 71,42% dengan Tingkat capaian sebesar 125,30%. Kreteria Penilaian Capaian Kinerja Indikator Ini termasuk dalam kategori tercapai .	Ke depan perlu memperkuat pengembangan kawasan atau sentra industri berbasis potensi lokal, meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam pengembangan kawasan industri, serta memperkuat perencanaan pembangunan industri daerah secara berkelanjutan.
		Terkendalinya harga bahan pokok	Persentase kinerja realisasi pupuk (%)	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Disperindag	96	85.18	88.73	Capaian Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting dengan Indikator Persentase Pengawasan Harga Pokok menargetkan sebesar 96% dan terealisasi sebesar 85,18% dengan Tingkat capaian sebesar 88,72%. Penilaian Capaian Kinerja Indikator Ini termasuk dalam kategori tercapai pembinaan dilaksanakan Kepada Pedagang di 35 Pasar Se Kabupaten Nganjuk	Ke depan perlu meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dan distributor pupuk dalam menjaga kelancaran distribusi pupuk, melakukan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi, serta memastikan penyaluran pupuk tepat sasaran kepada petani.

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Koefisien laju harga bapokting (Angka)	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Disperindag	96	85.18	88.73	Koefisien laju harga barang kebutuhan pokok dan barang penting (Bapokting) pada Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting ditargetkan sebesar 96% dan terealisasi 85,18% dengan tingkat capaian 88,73% sehingga termasuk kategori tercapai dengan catatan. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya pengawasan dan stabilisasi harga kebutuhan pokok di Kabupaten Nganjuk telah berjalan cukup baik. Hal tersebut didukung oleh kegiatan pembinaan dan pengawasan kepada pedagang yang dilaksanakan di 35 pasar di Kabupaten Nganjuk sehingga mampu menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok di masyarakat, meskipun masih terdapat fluktuasi harga pada komoditas tertentu.	Ke depan perlu meningkatkan intensitas pemantauan dan pengawasan harga barang kebutuhan pokok di pasar-pasar tradisional maupun modern, memperkuat koordinasi dengan instansi terkait serta distributor barang kebutuhan pokok, serta melakukan operasi pasar atau intervensi pasar apabila terjadi lonjakan harga yang signifikan guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Meningkatnya investasi daerah		Nilai Investasi (Rp)			1,102,000,000,000	1,105,654,165,215	100.332		
		Meningkatnya daya tarik investasi	Persentase peningkatan proyek investasi (%)	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DPMPTSP	100%	100%	100%	1. Belum adanya regulasi tentang kemudahan berinvestasi / Perda Percepatan Perizinan Berusaha 2. Masih adanya perusahaan yang belum menyampaikan LKPM. 3. Masih adanya perusahaan yang tidak/belum merealisasikan kegiatannya di lapangan setelah mereka memiliki Nomor Induk Berusahan (NIB) 4. Masih kurangnya pengetahuan pihak perusahaan dalam pengisian Laporan LKPM 5. Kapasitas SDM masih perlu ditingkatkan sesuai perkembangan teknologi	1. Melaksanakan Promosi Penanaman Modal dengan berbasis Data Invesment Project Ready to Offer 2. Menyusun Peraturan Daerah Percepatan Perizinan Berusaha di Daerah 3. Melakukan Bimbingan Teknis kepada Pelaku usaha untuk merealisasikan rencana kegiatan usahanya yang telah didaftarkan di OSS 4. Melakukan Pembinaan, pemantauan dan Pengawasan Penanaman modal agar pelaku usaha tertib untuk melakukan pelaporan Kegiatan penanaman Modalnya 5. Peningkatan kompetensi seluruh Pegawai di
		Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (%)	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	DPMPTSP	100	100	100		
		Meningkatnya ketepatan penerbitan perizinan dan non perizinan	Persentase penerbitan perizinan tepat waktu (%)	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	DPMPTSP	100	100	100		
		Meningkatnya kualitas LKPM	Persentase pelaku usaha/investor yang melaporkan LKPM (%)	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	DPMPTSP	95	95	100		
		Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	Presentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (%)	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI	DPMPTSP	100	100	100		

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				PENANAMAN MODAL						Lingkungan DPMPTSP 6. Peningkatan ketersediaan sarana prasarana dan pendukung Gedung mal Pelayanan Publik 7. Ketersediaan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat terkait layanan perizinan dan non perizinan pada beberapa media baik online maupun offline (website, media sosial, brosur, baliho, sosialisasi dll)
	Meningkatknya daya saing koperasi dan usaha mikro		Persentase peningkatan volume usaha mikro (%)		dinas koperasi UM	3	3.14	104.66		
			Persentase peningkatan koperasi berkualitas (%)		dinas koperasi UM	74.1	74.5	100.5		
		Meningkatnya kapasitas usaha mikro yang berkembang	Persentase usaha mikro yang mendapatkan akses pasar moderen (%)	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA	dinas koperasi UM	8	8.11	101.37	Keberhasilan Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) ditunjukkan melalui meningkatnya kapasitas pelaku	Ke depan perlu dilakukan penguatan pembinaan dan pendampingan usaha, fasilitasi akses permodalan

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					UMKM dalam pengelolaan usaha, perluasan akses pemasaran dan permodalan, serta bertambahnya jumlah UMKM yang mampu berkembang dan berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian daerah.	dan pemasaran, serta peningkatan pemanfaatan teknologi digital bagi pelaku UMKM agar mampu meningkatkan daya saing, memperluas pasar, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
		Meningkatnya Kelembagaan dan Usaha Koperasi	Persentase koperasi yang difasilitasi (%)	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	dinas koperasi UM	16.5	57.11	346.12	Keberhasilan Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi ditunjukkan melalui meningkatnya kapasitas usaha koperasi, akses terhadap pembinaan dan pendampingan, serta terwujudnya perlindungan terhadap koperasi agar mampu menjalankan kegiatan usaha secara sehat, berkelanjutan, dan memberikan manfaat ekonomi bagi anggotanya maupun masyarakat.	Ke depan perlu dilakukan penguatan program pemberdayaan melalui fasilitasi akses permodalan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan usaha koperasi, serta penguatan regulasi dan pengawasan untuk memastikan koperasi dapat berkembang secara sehat, mandiri, dan memiliki daya saing yang lebih baik.
		Meningkatnya Koperasi yang taat akan	Persentase koperasi yang	2.17.03 PROGRAM PENGAWAS	dinas koperasi UM	26.95	40.2	149.16%	meningkatnya kepatuhan koperasi terhadap ketentuan	meningkatkan intensitas pembinaan,

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		peraturan perundang - undangan perkoperasian	diawasi dan diperiksa (%)	AN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					peraturan perundang-undangan, tertibnya pelaksanaan rapat anggota tahunan (RAT), serta meningkatnya kualitas tata kelola dan transparansi pengelolaan keuangan koperasi sehingga mampu memperkuat kepercayaan anggota dan keberlanjutan usaha koperasi di daerah.	pengawasan, dan pendampingan kepada koperasi, termasuk melalui digitalisasi pelaporan koperasi, peningkatan kapasitas pengurus dan pengawas, serta penertiban koperasi yang tidak aktif agar tercipta koperasi yang sehat, transparan, dan berdaya saing.
		Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan (%)	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	dinas koperasi UM	21.6	44.17	204.49	Keberhasilan Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian ditunjukkan melalui meningkatnya pemahaman dan kapasitas sumber daya manusia koperasi, baik pengurus, pengawas maupun anggota, dalam pengelolaan kelembagaan dan usaha koperasi sehingga mampu mendukung tata kelola koperasi yang lebih profesional, transparan, dan berkelanjutan.	Ke depan perlu dilakukan peningkatan frekuensi dan kualitas pendidikan serta pelatihan perkoperasian yang lebih tematik dan berbasis kebutuhan, termasuk penguatan kompetensi manajerial, kewirausahaan, serta pemanfaatan teknologi digital agar koperasi semakin adaptif, mandiri, dan mampu bersaing dalam

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										pengembangan usaha.
		Meningkatnya kualitas tata kelola koperasi	Persentase koperasi dengan kategori sehat dan cukup sehat (%)	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	dinas koperasi UM	10.9	27.25	250%	Keberhasilan Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi ditunjukkan dengan meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja kelembagaan KSP/USP melalui pelaksanaan penilaian kesehatan secara berkala, sehingga kondisi keuangan, tingkat likuiditas, permodalan, dan manajemen koperasi dapat terukur dengan baik serta menjadi dasar pembinaan koperasi yang lebih akuntabel dan berkelanjutan.	Ke depan perlu dilakukan peningkatan pembinaan dan pendampingan kepada KSP/USP koperasi yang memiliki tingkat kesehatan rendah, penguatan kapasitas pengurus dalam pengelolaan keuangan dan manajemen risiko, serta optimalisasi sistem pelaporan dan monitoring agar koperasi dapat meningkatkan kinerjanya dan menjaga keberlanjutan usaha.
		Meningkatnya pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pengembangan	Persentase Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitasi pengembangan (%)	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	dinas koperasi UM	23.5	23.59	100.38	Keberhasilan Program Pengembangan UMKM ditunjukkan melalui meningkatnya kualitas produk, kapasitas usaha, serta perluasan jaringan pemasaran pelaku UMKM sehingga mampu meningkatkan daya saing dan memberikan kontribusi	Ke depan perlu dilakukan penguatan inovasi produk, peningkatan kualitas sumber daya manusia pelaku UMKM, fasilitasi akses pembiayaan dan pemasaran, serta

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.	pemanfaatan teknologi digital agar UMKM dapat berkembang secara berkelanjutan dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
	Menurunnya pengangguran terbuka		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		Disnaker	3.77	3.84	98.18		
		Meningkatnya jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten (%)	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Disnaker	75	77.45	103.27	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten pada Program Penempatan Tenaga Kerja ditargetkan sebesar 75% dan terealisasi 77,45% dengan tingkat capaian 103,27% sehingga termasuk kategori tercapai. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam memfasilitasi penempatan tenaga kerja baik di dalam maupun luar negeri telah berjalan dengan baik. Hal ini didukung oleh meningkatnya kesempatan kerja serta	Ke depan perlu terus meningkatkan kualitas dan akses layanan penempatan tenaga kerja melalui penguatan sistem informasi pasar kerja, peningkatan kerja sama dengan perusahaan atau dunia usaha, serta peningkatan kompetensi calon tenaga kerja melalui pelatihan kerja agar lebih siap bersaing di pasar kerja.

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									optimalisasi layanan informasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja kepada masyarakat pencari kerja.	
		Meningkatnya keberhasilan transmigran yang diberangkatkan	Persentase tingkat keberhasilan transmigran yang diberangkatkan (%)	3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Disnaker	9	9.09	101.00	Persentase tingkat keberhasilan transmigran yang diberangkatkan pada Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi ditargetkan sebesar 9% dan terealisasi 9,09% dengan tingkat capaian 101% sehingga termasuk kategori tercapai. Keberhasilan program ini didukung oleh kegiatan sosialisasi kepada calon transmigran serta pengecekan lokasi calon penempatan transmigrasi sehingga dapat memastikan kesiapan dan potensi keberhasilan program transmigrasi.	Ke depan perlu mempertahankan capaian melalui peningkatan sosialisasi program transmigrasi kepada masyarakat, peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah tujuan transmigrasi, serta pembinaan kepada calon transmigran agar memiliki kesiapan keterampilan dan mental dalam mengembangkan usaha di lokasi transmigrasi.
		Meningkatnya kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Presentase kegiatan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Disnaker	0	0	0.00	Persentase kegiatan yang mengacu pada Rencana Tenaga Kerja pada Program Perencanaan Tenaga Kerja menunjukkan capaian 0% dari target 0% karena kegiatan	Ke depan perlu mengintegrasikan program perencanaan tenaga kerja ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									tersebut belum dianggarkan dan belum dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan tenaga kerja daerah belum sepenuhnya diimplementasikan dalam bentuk kegiatan operasional pada tahun berjalan.	daerah, serta menyusun rencana tenaga kerja daerah secara lebih komprehensif agar dapat menjadi dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan ketenagakerjaan di tahun berikutnya.
		Meningkatnya penanganan perselisihan HI	Persentase perselisihan hubungan industrial yang selesai dengan perjanjian bersama (PB) (%)	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Disnaker	90.1	100	110.99	Persentase perselisihan hubungan industrial yang selesai dengan Perjanjian Bersama (PB) menunjukkan realisasi 100% dari target 90,1% dengan capaian 110,99% sehingga termasuk kategori tercapai. Keberhasilan ini didukung oleh kegiatan sosialisasi, mediasi, serta komunikasi yang efektif antara pihak pekerja dan perusahaan sehingga tercapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.	Ke depan perlu mempertahankan capaian melalui peningkatan kapasitas mediator hubungan industrial, peningkatan sosialisasi regulasi ketenagakerjaan kepada perusahaan dan pekerja, serta penguatan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara dialogis dan kondusif.
		Meningkatnya tata kelola dan perlindungan ketenagakerjaan	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ((%))	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Disnaker	27.46	28.3	103.06	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan menunjukkan realisasi 28,3% dari target	Ke depan perlu meningkatkan sosialisasi manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									27,46% dengan capaian 103,06% sehingga termasuk kategori tercapai. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat dan perusahaan terhadap pentingnya perlindungan tenaga kerja melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan.	kepada pekerja dan perusahaan, memperkuat koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan, serta mendorong perluasan kepesertaan terutama bagi pekerja sektor informal.
			Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Disnaker	55	60.34	109.71	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak menunjukkan realisasi 60,34% dari target 55% dengan capaian 109,71% sehingga termasuk kategori tercapai. Capaian ini didukung oleh kegiatan sosialisasi dan koordinasi kepada perusahaan terkait pemenuhan norma kerja, seperti penyusunan Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama, pembentukan LKS Bipartit, penerapan struktur dan skala upah, serta kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.	Ke depan perlu meningkatkan pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan kepada perusahaan agar semakin banyak perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak serta memastikan pemenuhan norma dan syarat kerja bagi tenaga kerja.

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatnya tenaga kerja yang memiliki sertifikasi kompentesi	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (%)	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Disnaker	52.80	46.47	88.01	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi menunjukkan realisasi 46,47% dari target 52,80% dengan capaian 88,01% sehingga termasuk kategori tercapai dengan catatan. Kondisi ini disebabkan karena sebagian besar perusahaan, khususnya pada sektor industri padat karya, tidak mensyaratkan sertifikat kompetensi bagi tenaga kerja operator produksi dan lebih menitikberatkan pada kemampuan mencapai target produksi.	Ke depan perlu meningkatkan fasilitasi pelatihan dan sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja, memperkuat kerja sama dengan lembaga pelatihan kerja dan lembaga sertifikasi profesi, serta meningkatkan pemahaman dunia usaha tentang pentingnya sertifikasi kompetensi untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja.
	Meningkatnya ketahanan pangan daerah.		Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)		Dinas KPP	73.66	73.65	99.986		
		Meningkatkan Cadangan Pangan	Persentase cadangan pangan (%)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Dinas KPP	100	96,98	96,98	Peningkatan capaian kinerja banyak dipengaruhi oleh pelaksanaan program kegiatan yang bersifat himbauan, melalui promosi, pembinaan, percontohan dan fasilitasi kepada Masyarakat untuk meningkatkan pola konsumsi yang sehat	Meningkatkan kedaulatan pangan dilakukan melalui penguatan produksi pertanian lokal, perlindungan lahan pertanian, peningkatan kapasitas petani, serta pengembangan distribusi dan cadangan pangan

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									dan ideal sesuai kebutuhan dalam tubuh	daerah yang berkelanjutan.
		Meningkatnya pangan segar yang aman	Persentase uji sampel yang aman (%)	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Dinas KPP	100	72,13	72,13	Peningkatan capaian kinerja banyak dipengaruhi oleh pelaksanaan program kegiatan yang bersifat himbauan, melalui promosi, pembinaan, percontohan dan fasilitasi kepada Masyarakat untuk meningkatkan pola konsumsi yang sehat dan ideal sesuai kebutuhan dalam tubuh	Meningkatkan kedaulatan pangan dilakukan melalui penguatan produksi pertanian lokal, perlindungan lahan pertanian, peningkatan kapasitas petani, serta pengembangan distribusi dan cadangan pangan daerah yang berkelanjutan.
		Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Persentase peningkatan produksi olahan hasil perikanan (%)	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Dinas KPP	33	39,69	120,27	Peningkatan capaian kinerja banyak dipengaruhi oleh pelaksanaan program kegiatan yang bersifat himbauan, melalui promosi, pembinaan, percontohan dan fasilitasi kepada Masyarakat untuk meningkatkan pola konsumsi yang sehat dan ideal sesuai kebutuhan dalam tubuh	Meningkatkan kedaulatan pangan dilakukan melalui penguatan produksi pertanian lokal, perlindungan lahan pertanian, peningkatan kapasitas petani, serta pengembangan distribusi dan cadangan pangan daerah yang berkelanjutan.
		Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN	Dinas KPP	93,52	100,01	106,9	Peningkatan capaian kinerja banyak dipengaruhi oleh pelaksanaan program	Meningkatkan kedaulatan pangan dilakukan melalui penguatan produksi

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			perikanan budidaya (%)	PERIKANAN BUDIDAYA					kegiatan yang bersifat himbauan, melalui promosi, pembinaan, percontohan dan fasilitasi kepada Masyarakat untuk meningkatkan pola konsumsi yang sehat dan ideal sesuai kebutuhan dalam tubuh	pertanian lokal, perlindungan lahan pertanian, peningkatan kapasitas petani, serta pengembangan distribusi dan cadangan pangan daerah yang berkelanjutan.
		Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%)	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Dinas KPP	96,38	99,88	103,6	Peningkatan capaian kinerja banyak dipengaruhi oleh pelaksanaan program kegiatan yang bersifat himbauan, melalui promosi, pembinaan, percontohan dan fasilitasi kepada Masyarakat untuk meningkatkan pola konsumsi yang sehat dan ideal sesuai kebutuhan dalam tubuh	Meningkatkan kedaulatan pangan dilakukan melalui penguatan produksi pertanian lokal, perlindungan lahan pertanian, peningkatan kapasitas petani, serta pengembangan distribusi dan cadangan pangan daerah yang berkelanjutan.
		Menurunnya desa rawan pangan	Persentase desa rawan pangan (%)	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Dinas KPP	100	96,98	96,98	Peningkatan capaian kinerja banyak dipengaruhi oleh pelaksanaan program kegiatan yang bersifat himbauan, melalui promosi, pembinaan, percontohan dan fasilitasi kepada Masyarakat untuk	Meningkatkan kedaulatan pangan dilakukan melalui penguatan produksi pertanian lokal, perlindungan lahan pertanian, peningkatan kapasitas petani, serta

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									meningkatkan pola konsumsi yang sehat dan ideal sesuai kebutuhan dalam tubuh	pengembangan distribusi dan cadangan pangan daerah yang berkelanjutan.
		Mewujudkan konsumsi pangan sesuai Angka Kecukupan Gizi	Persentase angka konsumsi sesuai AKG (%)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Dinas KPP	1	1	100,0	Peningkatan capaian kinerja banyak dipengaruhi oleh pelaksanaan program kegiatan yang bersifat himbauan, melalui promosi, pembinaan, percontohan dan fasilitasi kepada Masyarakat untuk meningkatkan pola konsumsi yang sehat dan ideal sesuai kebutuhan dalam tubuh	Meningkatkan kedaulatan pangan dilakukan melalui penguatan produksi pertanian lokal, perlindungan lahan pertanian, peningkatan kapasitas petani, serta pengembangan distribusi dan cadangan pangan daerah yang berkelanjutan.
		Tersedianya sarpras cadangan pangan yang berkualitas	Persentase infrastruktur cadangan pangan dalam kondisi baik (%)	2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Dinas KPP	-	-	-	tahun anggaran 2025 belum dilaksanakan program ini	-
	Meningkatkan nilai tambah sektor pariwisata		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)		Disporabudpar	2.08	2.07	99.519		

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase destinasi wisata yang terkelola (%)	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Disporabudpar	5%	4.84%	93.8	Adanya potensi wisata desa yang layak untuk dikembangkan Adanya komitmen dan dukungan dari kepala daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Nganjuk	menigkatkan koordinasi lintas sektor dan meng optimalkan peran kelompok desa wisata
		Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase peningkatan pemasaran pariwisata (%)	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Disporabudpar	4.87%	4.69%	96.3	Adanya perhatian dan kebijakan dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan di objek wisata melalui pemeliharaan dan perbaikan sarpras di obyek wisata Sedudo, Rorokuning, dan Kolam Renang Sritanjung	menigkatkan koordinasi lintas sektor dan meng optimalkan peran kelompok desa wisata
		Meningkatnya pengembangan sumber daya ekonomi kreatif	Presentase peningkatan produk ekonomi kreatif (%)	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Disporabudpar	4.87%	4.69%	96.30%	Pertama, Penguatan ekosistem yang menggabungkan inovasi produk, dukungan kebijakan, dan pemasaran digital. Kedua, mengadakan pelatihan secara konsisten untuk meningkat kan kreativitas, inovasi, dan keterampilan kewirausahaan pelaku UMKM. Ketiga, Literasi	meningkatkan komitmen dan peran pemuda dalam pembangunan ekosistem ekraf

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	OPD Penanggungjawab	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisa Keberhasilan /Tidak Berhasil	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Digital dengan meningkatkan kemampuan pelaku ekraf dalam memanfaatkan teknologi untuk operasional dan pemasaran	
			Presentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif (%)	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Disporabudpar	28.5	28.86	101.26	Berkembanganya teknologi untuk menunjang kreatifitas produksi dan kreasi para pelaku ekraf Adanya Forum sebagai wadah komunikasi dan saling mendukung antar usaha ekonomi kreatif	meningkatkan komitmen dan peran pemuda dalam pembangunan ekosistem ekraf

BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, yang dimaksud Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Penyelenggaraan tugas pembantuan dilakukan melalui penugasan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemberi tugas pembantuan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota, dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa. Dalam pelaksanaannya, instansi vertikal di daerah yang diberikan tugas pembantuan menerima dana melalui anggaran kementerian/lembaga bersangkutan.

3.1 Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

a. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025.
b. Surat Pengesahan DIPA-018.08.4.059185/2025 tanggal 02 Desember 2024, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.
c. Surat Pengesahan DIPA-018.13.4.691351/2025 tanggal 18 Juni 2025, Ditjen Lahan dan Irigasi Pertanian.
d. Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Nomor 500.6/4211/110.2/2025 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran/Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Tugas Pembantuan Provinsi di Kabupaten Kota Kegiatan Lahan dan Irigasi Pertanian APBN Tahun Anggaran 2025.
e. Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Nomor 500.6/6169/110.2/2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 500.6/4211/110.2/2025 tentang Penunjukkan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran/Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Tugas Pembantuan Provinsi di Kabupaten Kota Kegiatan Lahan dan Irigasi Pertanian APBN Tahun Anggaran 2025.

3.2 Gambaran Umum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

a. Kementerian/Lembaga pemerintah yang memberikan penugasan

   Tugas pembantuan pada tahun 2025 diberikan oleh Kementerian Pertanian (Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian) melalui Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur.

b. Bidang urusan yang ditugaspembantuankan

   Bidang urusan yang diberikan tugas pembantuan ialah urusan pemerintahan bidang pertanian yang diampu oleh Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk selalu pelaksana kegiatan.

c. Jumlah kegiatan dan anggaran tugas pembantuan

   Dalam pelaksanaannya, terdapat 3 (tiga) program yang terdiri atas 5 (lima) kegiatan dengan total anggaran keseluruhan sebesar Rp 14.673.184.000,- (Empat belas milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) sebagaimana tersaji pada tabel 3.1.

3.3 Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Capaian kinerja tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pertanian pada tahun 2025 terdiri atas 3 (tiga) program sebagai berikut:

1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan capaian kinerja Tahun 2025 sebesar 1 paket atau 100% dari target yang ditetapkan.
2) Program Dukungan Manajemen dengan capaian kinerja Tahun 2025 sebesar 1 paket atau 100% dari target yang ditetapkan.
3) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan capaian kinerja Tahun 2025 sebesar 98,87% dengan rincian :
   a. Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian dengan capaian 1 paket atau 100% dari target yang ditetapkan.
   b. Kegiatan Perlindungan dan Penyediaan Lahan dengan capaian 1.995 ha atau 97,75% dari target yang ditetapkan sebesar 2.000 ha.

3.3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Daerah

Tugas pembantuan pada tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk melalui Dinas Pertanian selaku pengampu urusan pemerintahan bidang pertanian ini diperoleh dari Kementerian Pertanian. Hal ini bertujuan untuk memberikan akses layanan, sarana dan prasana yang mendukung pelaksanaan pertanian di wilayah Kabupaten Nganjuk.

3.3.2 Target Kinerja

Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian melalui APBN berfokus pada peningkatan infrastruktur, pengembangan irigasi perpompaan. Program ini utamanya menggunakan sistem padat karya yang melibatkan partisipasi masyarakat/petani (Gapoktan/Poktan) untuk meningkatkan produktivitas tanaman dan mendukung swasembada pangan yang lokasinya berada di poktan yaitu :

1. Poktan Karya Tani Ds. Werongotok Kec. Nganjuk
2. Poktan Marsudi Tani Kel. Ringin Anom Kec. Nganjuk
3. Poktan Sumber Makmur I Ds. Lengkong Kec. Lengkong
4. Poktan Marsudi Tani Ds. Prayungan Kec. Lengkong
5. Poktan Termas Jaya I Ds. Babbadan Kec. Patianrowo
6. Poktan Sri Sejati II Ds. Mancon Kec. Wilangan
7. Poktan Juroh Makmur Ds. Jatigreges Kec. Pace
8. Poktan Patik Makmur Ds. Sono Patik Kec. Berbek
9. Poktan Sentiko Joyo Ds. Kedungsoko Kec. Sukomoro
10. Poktan Trayang Jaya Ds. Trayang Kec. Ngronggot
11. Poktan Pisang Agung Ds. Pisang Kec. Patianrowo
12. Poktan Sendang Sari Ds. Losari Kec. Gondang
13. Poktan Lestari Ds. Balonggebang Kec. Gondang
14. Poktan Sumber Makmur Ds. Mlorah Kec. Rejoso
15. Gapoktan Makmur I Ds. Wengkal Kec. Rejoso
16. Poktan Subur Makmur Ds. Paron Kec. Bagor
17. Gapoktan Sidomakmur Ds. Buduran Kec. Bagor
18. Poktan Bangkit Ds. Nglaban Kec. Loceret
19. Poktan Ngudikismo Ds. Drenges Kec. Kertosono
20. Poktan Margo Mukti Ds. Tanjung Kec. Kertosono.

Kegiatan selanjutnya yaitu fasilitasi pupuk dan pestisida ini mencakup pengawalan penyaluran pupuk bersubsidi agar tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu di Kabupaten Nganjuk.

Kegiatan Optimalisasi lahan dan pengolahan lahan non rawa merupakan Inisiatif Kementerian Pertanian untuk meningkatkan indeks pertanaman (IP) dan produksi padi melalui perbaikan irigasi dan manajemen air. Fokus utamanya mencakup pembangunan sumur bor, serta instalasi pompa air pada lahan sawah kering/tadah hujan serta bantuan olah tanah untuk meningkatkan indeks pertanaman (IP 1 ke IP 2 atau IP 3). Target kegiatan 2000 ha di 52 Gapoktan/Poktan di 5 kecamatan (Pace, Gondang, Bagor, Loceret, Lengkong).

Selanjutnya rincian target kinerja program/kegiatan dan anggaran tugas pembantuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian dan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk dapat dilihat pada tabel 3.1.

3.3.3 Realisasi Kinerja

Realisasi kinerja program/kegiatan dan anggaran tugas pembantuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian dan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk dapat dilihat pada tabel 3.1.

1. Realisasi kegiatan Pengelolaan Air Irigasi yaitu 20 unit di 20 Gapoktan/Poktan.
2. Kegiatan Optimalisasi lahan dan pengolahan lahan non rawa terealisasi 49 Gapoktan/poktan dengan luas lahan 1.955 ha. Terdapat 3 (tiga) kelompok tani tidak dapat terealisasi karena sudah mendapat bantuan Pembangunan irigasi perpompaan dari kegiatan APBN.

Selanjutnya rincian realisasi kinerja program/kegiatan dan anggaran tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pemerintah Pusat yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksanaan TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Target Capaian Kegiatan	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	**Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian**	**Nomor : DIPA-018.08.4.059185/2025 tanggal 02 Desember 2024**		**Kab. Nganjuk**		**3.394.280.000**	**3.389.210.000**	**99,85**	**2 paket**	**2 paket**	**100**	
			Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	**Kab. Nganjuk**	**Dinas Pertanian Kab. Nganjuk**	**3.368.380.000**	**3.363.310.000**	**97,90**	**1 paket**	**1 paket**	**100**	
			Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian			3.149.000.000	3.148.600.000	99,98	1 paket	1 paket	100	
			- Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup			3.134.000.000	3.134.000.000	100	20 unit	20 unit	100	Pembangunan Irigasi Perpompaan 20 Unit
			- Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup			15.000.000	14.600.000	97,33	1 paket	1 paket	100	
			Kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida			219.380.000	214.710.000	97,87	1 paket	1 paket	100	
			- Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida			219.380.000	214.710.000	97,87	1 paket	1 paket	100	
			Program Dukungan Manajemen	**Kab. Nganjuk**	**Dinas Pertanian Kab. Nganjuk**	**25.900.000**	**25.900.000**	**100**	**1 paket**	**1 paket**	**100**	
			Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian			25.900.000	25.900.000	100	1 paket	1 paket	100	
			- Layanan Manajemen Kinerja Internal			25.900.000	25.900.000	100	1 paket	1 paket	100	
2	**Direktorat Jendral Lahan dan Irigasi Pertanian**	**Nomor : DIPA-018.13.4.691351/2025 tanggal 18 Juni 2025**		**Kab. Nganjuk**		**11.278.904.000**	**11.083.684.200**	**98,26**	**2 paket**	**2 paket**	**98,87**	
			Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	**Kab. Nganjuk**	**Dinas Pertanian Kab. Nganjuk**	**11.278.904.000**	**11.083.648.200**	**98,26**	**2 paket**	**2 paket**	**98,87**	
			Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian			68.500.000	62.592.500	91,37	1 paket	1 paket	100	

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksanaan TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Target Capaian Kegiatan	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			- Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup			68.500.000	62.592.500	91,37	1 paket	1 paket	100	
			Kegiatan Pelindungan dan Penyediaan Lahan			11.210.404.000	11.021.091.700	98,31	2.000 ha	1.955 ha	97,75	Kegiatan Optimalisasi lahan Non Rawa dengan Target 2.000 ha
			- Prasarana Pengembangan Kawasan			11.210.404.000	11.021.091.700	98,31	2.000 ha	1.955 ha	97,75	

3.4 Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota

Tugas pembantuan dari daerah provinsi yang ditugaskan kepada daerah kabupaten/kota.

(Nihil)

3.5 Permasalahan dan Kendala

- Belum semua Kelompok Tani mendapat bantuan.
- Pemanfaatan bantuan alat pra dan pasca panen di Tingkat Kecamatan kurang maksimal.
- Saat penyusunan usulan Alokasi Kegiatan (CP/CL), alokasi kegiatan kurang spesifik.
- Kurangnya sosialisasi menyebabkan penetapan CPCL yang kurang tepat.
- Kegiatan perlindungan dan penyediaan lahan prasarana pengembangan kawasan dalam perencanaannya kurang mempertimbangkan kondisi alam sehingga dalam pelaksanaannya membutuhkan waktu yang lama.

3.6 Saran Tindak Lanjut

- Diadakan seleksi/pemerataan kegiatan pada kelompok tani oleh tim identifikasi CPCL.
- Pembinaan, monitoring, evaluasi dan bimbingan pasca panen lebih ditingkatkan/ditambah volumenya.
- Penyusunan CPCL tetap mengacu pada pedoman umum tahun sebelumnya dan selanjutnya tetap menunggu revisi/perubahan juklak/juknis yang baru.

BAB IV
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 18 bahwa penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. SPM disusun sebagai alat Pemerintah dan Pemerintahan Daerah untuk menjamin ketersediaan akses dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara merata. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa SPM adalah jenis pelayanan dasar yang merupakan hak konstitusional rakyat untuk memperolehnya.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan. Oleh karena itu, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran wajib memperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Penerapan SPM menjadi suatu hal yang sangat penting dan mendasar karena dengan melaksanakan SPM, maka basis untuk kesejahteraan masyarakat dapat terbangun setidaknya bila semua sasaran minimal dapat terwujud.

Pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah terdiri dari 6 (enam) jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh 8 (delapan) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, yaitu :

Tabel 4.1
Perangkat Daerah Pengampu SPM di Lingkup Pemerintah Kabupaten Nganjuk

No.	Perangkat Daerah	Bidang SPM	Jenis Pelayanan Dasar
1.	Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk	Urusan Pendidikan	1. Pendidikan anak usia dini 2. Pendidikan dasar 3. Pendidikan kesetaraan

No.	Perangkat Daerah	Bidang SPM	Jenis Pelayanan Dasar
2.	Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk	Urusan Kesehatan	1. Pelayanan kesehatan ibu hamil 2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin 3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir 4. Pelayanan kesehatan balita 5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif 7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut 8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi 9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus 10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis 12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk	Urusan Pekerjaan Umum	1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari 2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik
4.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk	Urusan Perumahan Rakyat	1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah Kabupaten 2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten
5.	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk	Urusan Trantibumlinmas (Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban)	1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum kabupaten

No.	Perangkat Daerah	Bidang SPM	Jenis Pelayanan Dasar
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk	Urusan Trantibumlinmas (Sub Urusan Bencana Daerah)	1. Pelayanan informasi rawan bencana 2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
7.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nganjuk	Urusan Trantibumlinmas (Sub Urusan Kebakaran)	1. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
8.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk	Urusan Sosial	1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti 2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti 3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti 4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti 5. Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten

Masing-masing urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar tersebut di atas, dinilai berdasarkan kategori indeks pencapaian SPM terhadap capaian mutu minimal dan penerima layanan dasar sebagai berikut :

Tabel 4.2
Kategori Indeks Pencapaian SPM

No	Nilai	Kategori	Deskripsi
1	100	Tuntas Paripurna	Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 100
2	90-99	Tuntas Utama	Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 90 sampai dengan 99
3	80-89	Tuntas Madya	Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 80 sampai dengan 89
4	70-79	Tuntas Pratama	Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 70 sampai dengan 79
5	60-69	Tuntas Muda	Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 60 sampai dengan 69

No	Nilai	Kategori	Deskripsi
6	< 60	Belum Tuntas	Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya lebih kecil dari 60

Adapun capaian kinerja penerapan SPM Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 dapat diuraikan sebagaimana berikut :

4.1 URUSAN PENDIDIKAN

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, menyebutkan bahwa jenjang pendidikan yang diwajibkan untuk difasilitasi pelayanan dasarnya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota meliputi 3 (tiga) jenis, yakni :

a. Pendidikan Anak Usia Dini

   Penerima pelayanan dasar SPM pada jenjang pendidikan anak usia dini merupakan peserta didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

b. Pendidikan Dasar

   Penerima pelayanan dasar SPM pada jenjang pendidikan dasar (SD/MI-SMP/MTS) merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.

c. Pendidikan Kesetaraan

   Penerima pelayanan dasar SPM pada jenjang pendidikan kesetaraan merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesataraan.

Dengan adanya optimalisasi bidang pendidikan melalui implementasi standar pelayanan minimal, maka diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Nganjuk. Hal ini cukup bersinergi dengan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk dan salah satu arah capaian pembangunan pada unsur Peningkatkan Sumber Daya Manusia yang Unggul.

Pemerintah Kabupaten Nganjuk secara berkala terus melaksanakan upaya pemenuhan standar pelayanan minimal dengan merencanakan, menganggarkan, melaksanakan serta mengevaluasi implementasi program, kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan SPM bidang pendidikan. Ketiga jenjang pendidikan tersebut memiliki pengukuran capaian yang sama yaitu didasarkan pada pengukuran angka partisipasi murni pada jenjang Pendidikan Anak

Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Kesetaraan. Pencapaian angka partisipasi murni pada jenjang pendidikan tertentu diasumsikan sebagai tolok ukur yang diyakini mampu menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah memberikan fasilitas layanan pendidikan bagi penduduknya. Namun perlu dipahami bahwa pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pendidikan diprioritaskan pada pemenuhan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pemenuhan tersebut belum mampu dilaksanakan secara menyeluruh karena adanya beberapa hambatan yang diantaranya dukungan anggaran dan validitas data peserta didik yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya di satuan pendidikan.

4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, menjelaskan bahwa dalam rangka pemenuhan capaian SPM Bidang Pendidikan dalam rangka mengukur tingkat partisipasi penduduk usia untuk bersekolah pada jenjang PAUD, Dasar dan Kesetaraan serta mengukur Rata-Rata Kemampuan Literasi dan Numerasi siswa Berdasarkan Hasil Asesmen Nasional diperlukan penetapan target pada awal perencanaan Tahun 2025. Adapun penetapan target SPM sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3
Target Pencapaian SPM Bidang Pendidikan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tahun 2025	
			Target Kinerja	Alokasi Anggaran
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	100%	Rp. 3.430.897.000
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	Rp. 20.853.978.192
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	Rp 17.633.718.300

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tahun 2025	
			Target Kinerja	Alokasi Anggaran
		Rata-rata kemampuan literasi dan Numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	

Dalam penetapan target pencapaian sebagaimana yang disebutkan di atas, perlu didukung oleh beberapa instrumen dan indikator pengukuran yang spesifik dan terukur. Oleh sebab itu, diperlukan aturan teknis dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset , dan Teknologi yang mengiringi regulasi tersebut. Dalam rangka mewujudkan pencapaian target SPM bidang pendidikan yang optimal, Pendidikan, Kebudayaan, Riset , dan Teknologi telah menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset , dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Mininal Pendidikan yang menjelaskan bahwa terdapat beberapa standarisasi yang perlu diterapkan oleh satuan pendidikan dalam memenuhi kriteria standar pelayanan minimal. Standarisasi tersebut terdiri dari standar satuan pendidikan dan standar biaya pribadi bagi peserta didik. Ketika seluruh pencapaian 8 standar nasional pendidikan, perlengkapan dasar serta pembiayaan pendidikan telah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk, maka optimalisasi terhadap capaian angka partisipasi murni pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Nganjuk dapat diwujudkan.

4.1.3 Realisasi

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan menjadi salah satu bagian terpenting dalam mewujudkan *good governance* dan *good government* di Kabupaten Nganjuk. Menciptakan sebuah tatanan pemerintahan yang transparan, akuntabel, adil dan merata dapat terwujud secara komprehensif dengan berupaya mencapai keberhasilan atas kinerja dari setiap urusan penyelenggara pemerintahan termasuk urusan bidang pendidikan. Oleh sebab itu, standar pelayanan minimal bidang pendidikan hadir sebagai tolok ukur perwujudan sinergitas atas layanan pemerintah kepada masyarakat di bidang pendidikan. Secara keseluruhan, capaian SPM Pendidikan di Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1) Pendidikan Dasar Usia Dini

Pada tahun 2025, angka partisipasi murni pada jenjang pendidikan anak usia dini dapat tercapai dengan baik. Hal ini didasarkan pada perhitungan prosentase antara jumlah anak usia 5-6 tahun yang menempuh jenjang pendidikan anak usia dini (TK dan RA)

dibandingkan dengan jumlah seluruh anak usia 5-6 tahun di Kabupaten Nganjuk. Adapun rumus dan rincian perhitungan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

$$\text{APM PAUD} = \frac{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun pada jenjang PAUD}}{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun di Kabupaten}} \text{ x } 100\%$$

$$= \frac{28.566}{29.977} \text{ x } 100\%$$

$$= 95{,}29\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa tingkat partisipasi anak usia 5-6 tahun pada satuan Pendidikan TK dan RA terealisasi sebesar 95,29% dengan capaian 95,29%. Pencapaian tersebut menjelaskan bahwa 95,29% penduduk usia 5-6 tahun telah bersekolah secara tepat waktu pada pendidikan anak usia dini. Sedangkan 4,71% penduduk di usia 5-6 tahun masuk pada kriteria belum bersekolah PAUD serta bersekolah pada jenjang Pendidikan dasar.

2) Pendidikan Dasar

Pada Tahun 2025, angka partisipasi sekolah pada Pendidikan dasar tercapai sangat tinggi. Hal tersebut didasarkan pada perhitungan prosentase antara anak pada usia 7-15 tahun pada jenjang SD/MI/SMP/MTs/Sederajat dibandingkan dengan anak usia 7-15 tahun di Kabupaten Nganjuk. Adapun rumus dan rincian perhitungan sebagaimana pencapaian tersebut diatas adalah sebagai berikut :

a. Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar yaitu:

$$\text{APM Pend. Dasar} = \frac{\text{Jumlah anak usia 7-15 tahun pada jenjang Pendidikan Dasar}}{\text{Jumlah anak usia 7-15 tahun di Kabupaten}} \text{ x } 100\%$$

$$= \frac{137.757}{147.770} \text{ x } 100\%$$

$$= 93{,}22\%$$

Berdasarkan pada perhitungan tersebut, dapat disampaikan bahwa tingkat partisipasi anak rentang usia 7-15 tahun pada jenjang pendidikan dasar adalah sebesar 93,22% dengan capaian 93,22%. Pencapaian tersebut menjelaskan bahwa penduduk usia 7-15 tahun telah bersekolah formal secara tepat waktu sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Pemerintah. Sedangkan 6,78% penduduk usia 7-15 bersekolah pada pondok pesantren dan masuk pada kriteria tidak bersekolah.

b. Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan Hasil Asesmen Nasional yaitu :

Berdasarkan hasil asesmen nasional pada tahun 2025 rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa terealisasi sebesar 84,12%. Dibandingkan realisasi pada tahun sebelumnya telah meningkat sebesar 3,50% dari hasil asesmen pada tahun 2024. Hal ini menjelaskan bahwa peserta didik telah memahami teks dan informasi, kemampuan membaca, kemampuan Analisa menggunakan alat perhitungan bilangan yang dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari.

3) Pendidikan Kesetaraan

Pendidikan kesetaraan menjadi salah satu jenjang pendidikan non formal yang dimanfaatkan beberapa anak usia sekolah pada rentang usia 7-18 tahun sebagai alternatif jalur pendidikan non formal ketika terdapat peserta didik yang belum mampu untuk menyelesaikan dan menuntaskan pendidikan formal. Jalur pendidikan kesetaraan menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam mewujudkan capaian angka partisipasi murni di Kabupaten Nganjuk. Untuk mengetahui realisasi standar pelayanan minimal pendidikan kesetaraan di Kabupaten Nganjuk, dapat diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut :

a. Jumlah warga negara usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan yaitu:

$$\text{APM Pend. Kesetaraan} = \frac{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di Pendidikan Kesetaraan}}{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah}} \times 100\%$$

$$= \frac{641}{524} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Berdasarkan pada perhitungan tersebut, dapat disampaikan bahwa tingkat partisipasi penduduk rentang usia 7-18 tahun pada jenjang pendidikan kesetaraan adalah sebesar 100% dengan capaian 100%. Pencapaian tersebut menjelaskan bahwa sebagaian besar penduduk usia 7-18 tahun telah bersekolah formal secara tepat waktu sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Pemerintah.

b. Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan Hasil Asesmen Nasional yaitu :

Berdasarkan hasil asesmen nasional pada tahun 2025 rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa terealisasi sebesar 56,07%. Dibandingkan realisasi pada tahun sebelumnya telah meningkat sebesar 0,48% dari hasil asesmen pada tahun 2024. Hal ini menjelaskan bahwa warga belajar telah memahami teks dan informasi, kemampuan membaca, kemampuan Analisa menggunakan alat perhitungan bilangan yang dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari.

Pencapaian terhadap pengukuran standar pelayanan minimal bidang pendidikan secara umum telah menunjukkan capaian keberhasilan yang sangat tinggi bagi Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Namun hal tersebut masih menyisakan beberapa hal yang memerlukan pemecahan permasalahan, antara lain berkaitan dengan realisasi atas standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

Berikut hasil capaian standar pelayanan minimal atas standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa pada masing-masing jenjang pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 :

Tabel 4.4
Capaian SPM Urusan Pendidikan Atas Standar Jumlah dan Kualitas Barang/Jasa

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	**TUNTAS UTAMA**			**96.78%**
1 .	***Pendidikan Dasar Usia Dini***				***96.23%***
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	29.977	28.566	1.411	95.29 %
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)				**20%**
	B. Jumlah Mutu (Barang / Jasa / SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	**100%**
	1. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	73.3	73.3	0	100.00%
	2. Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	72.49	73.03	-0.5400	100.00%
2 .	***Pendidikan Dasar***				***94.09%***
		Jumlah Total	**Jumlah Total**	**Yang Belum**	**74.58%**

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)	**Yang Harus Dilayani**	**Yang Terlayani**	**Terlayani**	
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	147.770	137.757	10013	93.22%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)				**19.52%**
	B. Jumlah Mutu (Barang / Jasa / SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	**97.58%**
	SD				96.34%
	1. Kemampuan literasi	84.87	82.59	2.2800	97.31 %
	2. Kemampuan numerasi	76.88	81.17	-4.2900	100.00%
	3. Indeks iklim keamanan	77.87	77.48	0.3900	99.50 %
	4. Indeks iklim kebinekaan	87.27	74.09	13.1800	84.90 %
	5. Indeks iklim inklusivitas	60.13	61.2	-1.0700	100.00%
	SMP				98.81%
	1. Kemampuan literasi	87.94	87.92	0.0200	99.98 %
	2. Kemampuan numerasi	84.79	84.81	-0.0200	100.00%
	3. Indeks iklim keamanan	71.94	71.35	0.5900	99.18 %
	4. Indeks iklim kebinekaan	75.23	71.39	3.8400	94.90 %
	5. Indeks iklim inklusivitas	56.71	58.59	-1.8800	100.00%
3 .	***Pendidikan Kesetaraan***				***100.00 %***
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00%**
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	524	641	-117	100%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)				**20.00 %**
	B. Jumlah Mutu (Barang / Jasa / SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	100.00 %
	1. Angka partisipasi sekolah (7-18 tahun) kesetaraan	100	100	105	100.00 %

Sumber data : e-SPM Kementerian Dalam Negeri

Berdasarkan pada tabel pencapaian di masing-masing jenjang pendidikan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada seluruh jenjang pendidikan yaitu pendidikan dasar usia dini, pendidikan dasar dan Pendidikan Kesetaraan komponen pada standar pelayanan minimal bidang pendidikan telah secara keseluruhan terpenuhi dan terfasilitasi secara memadai dan optimal. Hal ini menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Nganjuk berhasil dalam mengimplementasikan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.

4.1.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja yang ditetapkan dalam APBD untuk penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan oleh Pemerintah Daerah. Adapun besaran anggaran yang dialokasikan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Sumber Pendanaan

Tabel 4.5
Sumber Pendanaan SPM Bidang Pendidikan

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KAB. NGANJUK	3,043,575,799,749
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	1,044,591,740,664
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	54,727,441,592
	APBD	54,727,441,592
	A. APBD MURNI	52.608.606.592
	B. APBD DAU	-
	C. APBD DAK FISIK	2.118.835.000
	D. APBD DAK NON FISIK	-
	E. DANA BAGI HASIL	-
	F. KERJASAMA	-
	G. OTONOMI KHUSUS	
	NON APBD	-
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	-
	APBN	-
	B. APBN-DEKONSENTRASI	-
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	-
	DANA LAINNYA	-

Sumber data : Laporan Realisasi Anggaran TA 2025 (Unaudited)

Berikut rincian alokasi anggaran dan realisasi pada setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan yang ditujukan untuk menunjang pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Tahun 2025 seperti yang tersaji pada tabel di bawah ini:

b. Rincian Anggaran

Tabel 4.6
Rincian Anggaran Penerapan SPM Bidang Pendidikan

No	Kode Rekening	Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)	Sumber Pendanaan
1	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**		**37.093.723.292**	**33.057.008.321**	**89,12**	
	1.01.02.2.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**		**20.853.978.192**	**18.269.110.805**	**87,60**	

No	Kode Rekening	Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)	Sumber Pendanaan
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	608 Satuan Pendidikan	1.430.898.099	807.078.388	56,40	APBD Murni
	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	50.000.000	31.424.500	62,85	APBD Murni
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	60000 Paket	1.027.715.000	1.027.701.000	100,00	APBD Murni
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	5 Ruang	1.369.600.000	1.074.218.606	78,43	APBD Murni
	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	608 Orang	1.750.000.000	1.527.943.894	87,31	APBD Murni
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	109 Ruang	13.909.074.093	13.770.744.417	99,01	APBD Murni
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	13 Paket	1.316.691.000	30.000.000	2,28	APBD Murni APBD DAK Fisik
	1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**		**12.808.848.100**	**11.746.456.782**	**91,71**	
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	35 Ruang	5.485.310.400	5.132.417.174	93,57	APBD Murni
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	90 Satuan Pendidikan	1.185.025.000	1.052.919.055	88,85	APBD Murni
	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	5000 Orang	700.000.000	578.400.009	82,63	APBD Murni
	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	2 Konten Digital	150.000.000	146.603.250	97,74	APBD Murni
	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	100.000.000	94.743.567	94,74	APBD Murni
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	90 Satuan Pendidikan	950.000.000	787.753.106	82,92	APBD Murni
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	3 Ruang	924.480.000	895.626.327	96,88	APBD Murni
	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	150 Orang	750.000.000	590.199.560	78,69	APBD Murni
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	31830 Paket	873.000.000	862.982.800	98,85	APBD Murni
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	1 Paket	1.691.032.700	1.604.811.934	94,90	APBD Murni

No	Kode Rekening	Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)	Sumber Pendanaan
	1.01.02.2.03	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**		**3.430.897.000**	**3.041.440.734**	**88,65**	
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	1127 Satuan Pendidikan	100.000.000	97.195.800	97,20	APBD Murni
	1.01.02.2.03.0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	3 Konten Digital	200.000.000	173.559.319	86,78	APBD Murni
	1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	400 Orang	285.896.000	269.526.433	94,27	APBD Murni
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	3 Ruang	125.000.000	125.000.000	100,00	APBD Murni
	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	600 Orang	597.285.000	496.607.233	83,14	APBD Murni
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	3816 Paket	196.000.000	179.778.868	91,72	APBD Murni
	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	2 Unit	100.000.000	96.772.000	96,77	APBD Murni
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	200 Paket	1.397.216.000	1.273.501.081	91,15	APBD Murni APBD DAK Fisik
	1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3 Ruang	429.500.000	329.500.000	76,72	APBD Murni
2	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**		**17.633.718.300**	**13.970.118.768**	**79,22**	
	1.01.04.2.01	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**		**17.633.718.300**	**13.970.118.768**	**79,22**	
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	633 Dokumen	15.524.191.700	12.960.453.621	83,49	APBD Murni
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4 Laporan	2.109.526.600	1.009.665.147	47,86	APBD Murni

Sumber data : Laporan Realisasi Anggaran TA 2025 (Unaudited)

4.1.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan. Berikut ini jumlah pegawai pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk :

Tabel 4.7
Data ASN Menurut Jenis Jabatan

No	Perangkat Daerah	Jabatan Struktural	Jabatan Fungsional Tertentu	Jabatan Fungsional Umum	Total
1	Dinas Pendidikan	6 Orang	6.593 Orang	498 Orang	7.079 Orang

Sumber data : BKPSDM Kab. Nganjuk (data merupakan jumlah pegawai pada dinas pendidikan beserta pendidik dan tenaga kependidikan)

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan standar pelayanan minimal pendidikan di Kabupaten Nganjuk tahun 2025, masih mengalami beberapa kendala dan permasalahan. Adapun permasalahan dan kendala yang dihadapi Adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan belum memadai;
2. Kuantitas dan Kualitas pendidik belum merata;
3. Digitalisasi Bidang Pendidikan belum optimal;
4. Perencanaan berbasis data belum dilaksanakan secara optimal;
5. Pengelolaan dan Pembiyaan pendidikan belum optimal.

Berdasarkan pada permasalahan tersebut, maka dapat diberikan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan pemenuhan standar pelayanan minimal sebagai berikut :

1. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, khususnya ruang kelas dan toilet, sedangkan sarana yang lain dilakukan optimalisasi sesuai dengan jumlah siswa
2. Melaksanakan Bimbingan Teknis bagi guru terkait literasi dan numerasi kepada seluruh satuan pendidikan;
3. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas pendidik melalui pengangkatan CPNS/PPPK;
4. Melaksanakan upgrade aplikasi pendidikan;
5. Meningkatkan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pembiayaan pendidikan.

4.2 URUSAN KESEHATAN

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Seseorang tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya jika berada dalam kondisi tidak sehat sehingga kesehatan merupakan modal setiap individu untuk meneruskan kehidupannya secara layak. Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Sebagai suatu kebutuhan dasar, setiap individu bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga pada dasarnya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan adalah tanggung jawab setiap warga negara.

Meskipun upaya untuk memenuhi kebutuhan bidang kesehatan melekat pada setiap warga negara, namun mengingat karakteristik barang/jasa kesehatan tidak dapat diusahakan/diproduksi sendiri secara langsung oleh masing-masing warga negara, melainkan harus ada pihak lain yang secara khusus memproduksi dan menyediakan, maka penyediaan barang/jasa bidang kesehatan mutlak memerlukan keterlibatan pemerintah untuk:

1) Menjamin ketersediaan barang/jasa kesehatan yang dapat diperoleh warga negara yang memerlukan sesuai dengan kebutuhan; dan
2) Menyediakan barang/jasa kesehatan bagi warga negara yang tidak mampu memenuhi kebutuhan di bidang kesehatan.

Sebagaimana yang telah diamanatkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa kesehatan menjadi salah satu urusan wajib yang diberikan standarisasi pelayanan minimal dalam rangka penyelenggaraan kesehatan. Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan menjadi hal yang mutlak untuk diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah sehingga diharapkan mampu meningkatkan kualitas kesehatan pada seluruh penduduk di Kabupaten Nganjuk. Hal tersebut cukup bersinergi dengan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk dan salah satu arah capaian pembangunan pada unsur Peningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat. Pelaksanaan tersebut bukan hal yang mudah, namun memerlukan perumusan secara lebih terstruktur dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pada setiap hasil program dan kegiatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk.

Pelayanan dasar bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal

Kesehatan. Terdapat 12 jenis pelayanan dasar bidang kesehatan yang diampu oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, antara lain:

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
4. Pelayanan kesehatan balita;
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus;
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus)*.

4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu. Adapun penetapan target SPM Bidang Kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut :

Tabel 4.8
Target Pencapaian SPM Bidang Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tahun 2025	
			Target Kinerja	Alokasi Anggaran
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Prosentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	Rp. 850,000,000
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Prosentase ibu bersalin mendapat pelayanan persalinan	100%	Rp. 503,540,000
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Prosentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	Rp. 100,000,000
4.	Pelayanan kesehatan balita	Cakupan pelayanan Kesehatan balita sesuai standar	100%	Rp. 100,000,000
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Prosentase anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Rp. 120,000,000
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Prosentase orang usia 15-59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar	100%	Rp. 31,698,000
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Prosentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapat skrining kesehatan sesuai standar	100%	Rp. 763,480,000

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tahun 2025	
			Target Kinerja	Alokasi Anggaran
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Prosentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Rp. 150,000,000
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Prosentase penderita DM yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Rp. 21,510,000
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Prosentase ODGJ berat yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	Rp. 145,000,000
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Prosentase orang terduga TBC mendapat pelayanan TBC sesuai standar	100%	Rp. 120,000,000
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus)*	Prosentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	Rp. 550,000,000

4.2.3 Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut kami tampilkan pengukuran pencapaian kinerja standar pelayanan minimal bidang kesehatan :

a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan menyebutkan bahwa setiap ibu hamil harus mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai dengan standar yang ditetapkan kepada semua ibu hamil di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Untuk mengetahui capaian standar pelayanan minimal pada ibu hamil di Kabupaten Nganjuk, dapat diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil} = \frac{\text{Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di Kabupaten}}{\text{Jumlah sasaran ibu hamil di Kabupaten}} \times 100\%$$

$$= \frac{9.632}{10.825} \times 100\%$$

$$= 88.98\%$$

Sumber data : e-SPM Kementerian Dalam Negeri

Pada tahun 2025, jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah sebanyak 9.632 orang, sedangkan jumlah sasaran ibu hamil di Kabupaten Nganjuk sebanyak 10.825 orang. Dengan demikian, cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil di Kabupaten Nganjuk adalah sebesar 88.98%.

b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Pemerintah Daerah wajib memberikan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar kepada semua ibu bersalin yang ada di wilayah Kabupaten dalam kurun waktu satu tahun. Untuk mengetahui capaian standar pelayanan minimal pada ibu hamil di Kabupaten Nganjuk, dapat diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan} = \frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten}}{\text{Jumlah sasaran ibu bersalin di Kabupaten}} \times 100\%$$

$$= \frac{10.228}{10.825} \times 100\%$$

$$= 94.48\%$$

Sumber data : e-SPM Kementerian Dalam Negeri

Pada tahun 2025, jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sebanyak 10.228 orang sedangkan jumlah sasaran ibu bersalin di Kabupaten Nganjuk sebanyak 10.825 orang. Dengan demikian, cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin di Kabupaten Nganjuk adalah sebesar 94.48%.

c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Pemerintah Daerah berkewajiban dalam memberikan fasilitas pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar kepada bayi usia 0-28 hari di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Untuk mengetahui hasil capaian standar pelayanan minimal pada bayi baru lahir di Kabupaten Nganjuk, dapat diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir} = \frac{\text{Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar}}{\text{Jumlah sasaran bayi baru lahir di Kabupaten}} \times 100\%$$

$$= \frac{10.097}{10.814} \times 100\%$$

$$= 93.37\ \%$$

Sumber data : e-SPM Kementerian Dalam Negeri

Pada tahun 2025, jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar adalah sebanyak 10.097 bayi sedangkan jumlah sasaran bayi baru lahir di Kabupaten Nganjuk sebanyak 10.814 bayi. Dengan demikian, cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir di Kabupaten Nganjuk adalah sebesar 93.37%.

d. Pelayanan Kesehatan Balita

Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan balita usia 0-59 bulan dinilai dari cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Untuk mengetahui hasil capaian standar pelayanan minimal pada balita di Kabupaten Nganjuk, dapat diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah sasaran balita di Kabupaten}} \times 100\%$$

$$= \frac{51.622}{53,783} \times 100\%$$

$$= 95.98\%$$

Sumber data : e-SPM Kementerian Dalam Negeri

Pada tahun 2025, jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah sebanyak 51.622 balita sedangkan jumlah sasaran balita di Kabupaten Nganjuk sebanyak 53.783 balita. Dengan demikian, cakupan pelayanan kesehatan anak balita di Kabupaten Nganjuk mencapai 95.98%.

e. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan anak setingkat

pendidikan dasar sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun ajaran. Untuk mengetahui hasil capaian standar pelayanan minimal pada anak usia pendidikan dasar di Kabupaten Nganjuk, dapat diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah sasaran anak usia pendidikan dasar di Kabupaten}} \times 100\%$$

$$= \frac{141.073}{141.053} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Sumber data : e-SPM Kementerian Dalam Negeri

Pada tahun 2025, jumlah anak usia pendididkan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah sebanyak 141.073 anak sedangkan jumlah sasaran anak usia pendidikan dasar di Kabupaten Nganjuk sebanyak 141.053 anak. Dengan demikian, cakupan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar di Kabupaten Nganjuk mencapai 100%.

f. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining kesehatan sesuai standar kepada penduduk yang berusia 15-59 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar dilaksanakan melalui edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana dan skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular. Untuk mengetahui hasil capaian standar pelayanan minimal pada penduduk usia produktif di Kabupaten Nganjuk, dapat diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah sasaran orang usia 15-59 tahun di Kabupaten}} \times 100\%$$

$$= \frac{721.723}{721.716} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Sumber data : e-SPM Kementerian Dalam Negeri

Untuk capaian tahun 2025, jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar adalah sebanyak 721.723 jiwa, sedangkan jumlah sasaran orang usia 15-59 tahun di Kabupaten Nganjuk sebanyak 721.716 jiwa. Dengan demikian, capaian kinerja pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penduduk usia produktif mencapai 100%.

g. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun atau lebih dinilai dari cakupan warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Untuk mengetahui hasil capaian standar pelayanan minimal pada penduduk usia lanjut di Kabupaten Nganjuk, dapat diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase warga usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah warga berusia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah sasaran warga berusia 60 tahun atau lebih yang ada di Kabupaten}} \times 100\%$$

$$= \frac{140.353}{147.739} \times 100\%$$

$$= 95.00\%$$

Sumber data : e-SPM Kementerian Dalam Negeri

Pada tahun 2025, jumlah penduduk lansia yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar adalah sebanyak 140.353 jiwa sedangkan jumlah sasaran warga lansia di Kabupaten Nganjuk sebanyak 147.739 jiwa. Dengan demikian, capaian pelayanan kesehatan pada usia lanjut di Kabupaten Nganjuk mencapai 95.00%.

h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita hipertensi, dinilai dari persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Untuk mengetahui hasil capaian standar pelayanan minimal pada penderita hipertensi di Kabupaten Nganjuk, dapat diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah penderita hipertensi usia} \geq 15 \text{ tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah estimasi penderita hipertensi usia} \geq 15 \text{ tahun di Kabupaten}} \times 100\%$$

$$= \frac{69.384}{68.788} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Sumber data : e-SPM Kementerian Dalam Negeri

Pada tahun 2025, jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar tercatat sebanyak 69.384 jiwa, sedangkan jumlah estimasi penderita hipertensi di Kabupaten Nganjuk sebanyak 68.788 jiwa. Dengan demikian, capaian pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penderita hipertensi mencapai 100%.

i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus

Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita diabetes mellitus dinilai dari persentase penderita DM usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Untuk mengetahui hasil capaian standar pelayanan minimal pada penderita diabetes mellitus di Kabupaten Nganjuk, dapat diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah penderita diabetes mellitus usia} \geq 15 \text{ tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah estimasi penderita diabetes mellitus usia} \geq 15 \text{ tahun di Kabupaten}} \times 100\%$$

$$= \frac{26.538}{26.249} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Sumber data : e-SPM Kementerian Dalam Negeri

Pada tahun 2025, jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah sebanyak 26.538 jiwa, sedangkan jumlah estimasi penderita DM di Kabupaten Nganjuk sebanyak 26.249 jiwa. Dengan demikian, capaian kinerja pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penderita diabetes mellitus mencapai 100%.

j. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Capaian kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi ODGJ Berat, dinilai dari jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar. Untuk mengetahui hasil capaian standar pelayanan minimal kepada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat di Kabupaten Nganjuk, dapat diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar}}{\text{Jumlah ODGJ berat di Kabupaten}} \times 100\%$$

$$= \frac{2.315}{2.163} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Sumber data : e-SPM Kementerian Dalam Negeri

Pada tahun 2025, jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar adalah sebanyak 2.315 orang, sedangkan jumlah penderita ODGJ di Kabupaten sebanyak 2.163 orang. Dengan demikian, capaian kinerja pelayanan kesehatan jiwa yang diberikan kepada ODGJ berat mencapai 100%.

k. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Kasus tuberkulosis paru terkonfirmasi bakteriologis adalah pasien tuberkulosis yang terbukti positif pada hasil pemeriksaan contoh uji biologinya (sputum dan jaringan) melalui pemeriksaan mikroskopis langsung, Tes Cepat Molekuler (TCM) tuberkulosis, atau biakan. Seluruh orang terduga penderita TBC dilakukan pemeriksaan/test lebih lanjut untuk memastikan gejala yang diderita adalah benar-benar TBC. Untuk mengetahui hasil capaian standar pelayanan minimal kepada orang terduga penderita tuberkulosis di Kabupaten Nganjuk, maka dapat diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut:

Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	=	Jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar / Jumlah orang terduga TBC di Kabupaten	x 100%
	=	$\frac{12.116}{12.385}$ x 100%	
	=	97.83 %	

Sumber data : e-SPM Kementerian Dalam Negeri

Pada tahun 2025, jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah sebanyak 12.116 orang, sedangkan jumlah orang terduga TBC di Kabupaten sebanyak 12.385 orang. Dengan demikian, capaian kinerja pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis mencapai 97.83 %.

l. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)

Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus HIV adalah pelayanan kesehatan sesuai standar kepada setiap orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus = HIV*) yang meliputi: (1) edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan, dan (2) skrining dilakukan dengan pemeriksaan tes cepat HIV minimal 1 kali dalam setahun. Orang yang memiliki risiko terinfeksi virus HIV adalah ibu hamil, pasien TBC, pasien Infeksi Menular Seksual (IMS), penjaja seks, lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL), transgender/waria, pengguna napza suntik (penasun), dan warga Binaan Pemasyarakatan. Untuk mengetahui hasil capaian standar pelayanan minimal kepada orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) di Kabupaten Nganjuk, maka dapat diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut:

Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	=	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar / Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV di Kabupaten	x 100%
	=	$\frac{22.451}{20.225}$ x 100%	
	=	100%	

Sumber data : e-SPM Kementerian Dalam Negeri

Dari 20.225 orang yang beresiko terinfeksi HIV, sebanyak 22.451 orang telah mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

Berikut hasil capaian standar pelayanan minimal atas standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa pada masing-masing jenis pelayanan kesehatan sesuai dengan Peraturat Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan sebagai berikut :

Tabel 4.9
Capaian SPM Urusan Kesehatan Atas Standar Jumlah dan Kualitas Barang/Jasa

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	**TUNTAS UTAMA**			**97.35 %**
1.	***Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil***				***89.63 %***
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)	**Jumlah Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**71.18 %**
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	10.825	9.632	1.193	88.98 %
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)				**18.44 %**
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI	**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi**	**87.20 %**
	1. Vaksin Tetanus Difteri (Td)	1.083	963	120	88.92 %
	2. Tablet tambah darah	1.948.500	1.733.760	214.740	88.98 %
	3. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	10.825	9.632	1.193	88.98 %
	4. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	10.825	9.632	1.193	88.98 %
	5. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	10.825	9.632	1.193	88.98 %
	6. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	1.624	1,445	179	88.98%
	7. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	10.825	9.632	1.193	88.98 %
	8. Kartu ibu/rekam medis ibu	10.825	9.632	1.193	88.98 %
	9. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	10.825	9.632	1.193	88.98 %
	10. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	10.825	9.632	1.193	88.98 %
	11. Gel USG, untuk Puskesmas yang memiliki alat USG	722	642	80	88.92%
	12. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi;	276	276	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	13. Tenaga kesehatan : Perawat	1.295	1.295	0	100.00%
	14. Tenaga kesehatan : Bidan	765	765	0	100.00%
	15. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	414	414	0	100.00%
	16. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	83	83	0	100.00%
	17. Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6)	10.825	9.632	1.193	88.98 %
2.	***Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin***				***95.10%***
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)	**Jumlah Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**75.59%**
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	10.825	10.228	597	94.48%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)				**19.51%**
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI	**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi**	**97.55%**
	1. Formulir Partograf	10.825	10.228	597	94.48%
	2. Kartu ibu/rekam medis ibu	10.825	10.228	597	94.48%
	3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	10.825	10.228	597	94.48%
	4. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	10.825	10.228	597	94.48%
	5. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	276	276	0	100.00%
	6. Tenaga kesehatan : Bidan	765	765	0	100.00%
	7. Tenaga kesehatan : Perawat	1.295	1.295	0	100.00%
	8. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	414	414	0	100.00%
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	83	83	0	100.00%
3.	***Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir***				***94.00%***
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)	**Jumlah Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**74.70%**
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	10.814	10.097	717	93.37%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)				**19.30%**
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI	**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi**	**96.51%**
	1. Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	11.241	10.210	1031	90.83%
	2. Vitamin K1 injeksi	1.081	1.010	71	93.43%
	3. Salep/tetes mata antibiotik	10.814	10.097	717	93.37%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	4. Formulir bayi baru lahir	10.814	10.097	717	93.37%
	5. Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	32.442	30.291	2.151	93.37%
	6. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	10.814	10.097	717	93.37%
	7. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	10.814	10.097	717	93.37%
	8. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis Anak	272	272	0	100.00%
	9. Tenaga kesehatan : Bidan	765	765	0	100.00%
	10. Tenaga kesehatan : Perawat	1.295	1.295	0	100.00%
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	414	414	0	100.00%
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	65	65	0	100.00%
	13. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	83	83	0	100.00%
	14. Kader Kesehatan	284	284	0	100.00%
4.	***Pelayanan Kesehatan Balita***				***96.26%***
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)	**Jumlah Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**76.79%**
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN BALITA	53.783	51.622	2.161	95.98%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)				**19.48%**
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI	**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi**	**97.39%**
	1. Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	53.783	51.622	2.161	95.98%
	2. Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	53.783	51.622	2.161	95.98%
	3. Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	53.783	51.622	2.161	95.98%
	4. Vitamin A Biru	9.757	9.757	0	100.00%
	5. Vitamin A Merah	45.539	45.539	0	100.00%
	6. Vaksin imunisasi dasar: BCG	11.241	10.358	883	92.14%
	7. Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	11.241	10.274	967	91.40%
	8. Vaksin imunisasi dasar: IPV	11.241	10.431	810	92.79%
	9. Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	11.241	10.674	567	94.96%
	10. Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	11.241	10.450	791	92.96%
	11. Vaksin imunisasi lanjutan: DPT -HB - Hib	12.526	12.344	182	98.55%
	12. Vaksin imunisasi lanjutan: Campak - Rubella	12.526	12.335	191	98.48%
	13. Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	53.783	51.622	2.161	95.98%
	14. Peralatan Anafilaktik	284	284	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	15. Formula Terapi Gizi Buruk	356	356	0	100.00%
	16. Tenaga medis : Dokter	259	259	0	100.00%
	17. Tenaga kesehatan : Bidan	765	765	0	100.00%
	18. Tenaga kesehatan : Perawat	1.295	1.295	0	100.00%
	19. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	83	83	0	100.00%
	20. Guru PAUD	284	284	0	100.00%
	21. Kader Kesehatan	6.470	6.625	0	100.00%
5.	***Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar***				***100.00%***
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)	**Jumlah Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00%**
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	141.053	141.073	-20	100.00%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)				**20.00%**
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI	**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi**	**99.99%**
	1. Form pencatatan/buku rapor kesehatanku	141.053	141.073	-20	100.00%
	2. Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan	20	20	0	100.00%
	3. Kuesioner skrining kesehatan	141.053	141.073	-20	100.00%
	4. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	20	20	0	100.00%
	5. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	20	20	0	100.00%
	6. Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah	2.470.676	2.470.676	0	100.00%
	7. Alat Pemeriksaan Hb	20	20	0	100.00%
	8. Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7	7.931	7.931	0	100.00%
	9. Media promosi kesehatan	141.053	141.073	-20	100.00%
	10. Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	14.839	14.803	36	99.76%
	11. Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	348	348	0	100.00%
	12. Tenaga kesehatan : Bidan	765	765	0	100.00%
	13. Tenaga kesehatan : Perawat	1.295	1.295	0	100.00%
	14. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	83	83	0	100.00%
	15. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	414	414	0	100.00%
	16. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	65	65	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	17. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	1.032	1.032	0	100.00%
	18. Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	1.032	1.032	0	100.00%
6.	***Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif***				***99.81%***
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)	**Jumlah Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF	721.716	721.723	-7	100.00%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)				**19.81%**
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI	**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi**	**99.03%**
	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	1.040	1.040	0	100.00%
	2. Alat dalam melakukan skrining: Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Alat ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	1.040	1.040	0	100.00%
	3. Alat : Tensimeter	1.040	1.040	0	100.00%
	4. Alat : Glukometer	1.040	1.040	0	100.00%
	5. Alat: Alat Pemeriksa Hb	20	20	0	100.00%
	6. Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	721.716	721.723	-7	100.00%
	7. Alat : KIT IVA Tes	20	20	0	100.00%
	8. Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	7.628	6.238	1.390	81.78%
	9. Kit Opthalmologi Komunitas	20	20	0	100.00%
	10. Kuesioner PUMA	15.862	19.620	-3.758	100.00%
	11. Alat Pelayanan KB	305	305	0	100.00%
	a. Set pemasangan dan pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	175	175	0	100.00%
	b. Set pemasangan dan pencabutan Implan	125	125	0	100.00%
	c. Vasektomi set	5	5	0	100.00%
	12. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	721.716	721.723	-7	100.00%
	13. Vaksin Tetanus Difteri (td)	19.611	19.578	33	99.83%
	14. Tenaga medis : Dokter	259	259	0	100.00%
	15. Tenaga kesehatan : Bidan	765	765	0	100.00%
	16. Tenaga kesehatan : Perawat	1.295	1.295	0	100.00%
	17. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	83	83	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	18. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	65	65	0	100.00%
	19. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	1.420	1.420	0	100.00%
7.	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut**				**95.77%**
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)	**Jumlah Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**76.00%**
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	147.739	140.353	7.386	95.00%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)				**19.77%**
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI	**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi**	**98.85%**
	1. Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	854	854	0	100.00%
	2. Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	854	854	0	100.00%
	3. Alat pemeriksaan kolesterol	854	854	0	100.00%
	4. Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	147.739	140.353	7.386	95.00%
	5. Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	147.739	140.353	7.386	95.00%
	6. Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	147.739	140.353	7.386	95.00%
	7. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	854	854	0	100.00%
	8. Tenaga medis : Dokter	259	259	0	100.00%
	9. Tenaga kesehatan : Bidan	765	765	0	100.00%
	10. Tenaga kesehatan : Perawat	1.295	1.295	0	100.00%
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	83	83	0	100.00%
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	65	65	0	100.00%
	13. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	284	284	0	100.00%
8.	***Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi***				***100.00%***
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)	**Jumlah Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00%**
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP	68.788	69.384	-596	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	: PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI				
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)				**20.00%**
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI	**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi**	**100.00%**
	1. Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	124	124	0	100.00%
	2. Obat Hipertensi	68.788	69.384	-596	100.00%
	3. Tensimeter	62	62	0	100.00%
	4. Formulir pencatatan dan pelaporan ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku)	68.788	69.384	-596	100.00%
	5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	62	62	0	100.00%
	6. Tenaga medis : Dokter	259	259	0	100.00%
	7. Tenaga kesehatan : Bidan	765	765	0	100.00%
	8. Tenaga kesehatan : Perawat	1.295	1.295	0	100.00%
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	83	83	0	100.00%
	10. Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	65	65	0	100.00%
	11. Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian	414	414	0	100.00%
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	65	65	0	100.00%
9.	***Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus***				***100.00%***
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)	**Jumlah Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00%**
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS	26.249	26.538	-289	100.00%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)				**20.00%**
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI	**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi**	**100.00%**
	1. Obat Diabetes Melitus	26.249	26.538	-289	100.00%
	2. Fotometer atau Glukometer	164	164	0	100.00%
	3. BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	26.249	26.538	-289	100.00%
	4. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus	26.249	26.538	-289	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	(Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)				
	5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	186	186	0	100.00%
	6. Tenaga medis : Dokter	259	259	0	100.00%
	7. Tenaga kesehatan : Bidan	765	765	0	100.00%
	8. Tenaga kesehatan : Perawat	1.295	1.295	0	100.00%
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	414	414	0	100.00%
	10. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	65	65	0	100.00%
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	83	83	0	100.00%
	12. Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	129	129	0	100.00%
10.	***Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat***				***100.00%***
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)	**Jumlah Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00%**
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT	2.163	2.315	-152	100.00%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)				**20.00%**
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI	**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi**	**100.00%**
	1. Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia)	20	20	0	100.00%
	2. Penyediaan Psikofarmaka	5	5	0	100.00%
	3. Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi	2.163	2.315	-152	100.00%
	4. Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan	2.163	2.315	-152	100.00%
	5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	20	20	0	100.00%
	6. Tenaga kesehatan : Dokter	259	259	0	100.00%
	7. Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa	17	17	0	100.00%
	8. Tenaga profesional lainnya	150	150	0	100.00%
	9. Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	20	20	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
11.	***Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis***				***97.69%***
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)	**Jumlah Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**78.26%**
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	12.385	12.116	269	97.83%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)				**19.43%**
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI	**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi**	**97.14%**
	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	71	71	0	100.00%
	2. Reagen Zn TB	2.548	1.621	927	63.62%
	3. Masker bedah dan Masker N95	71	71	0	100.00%
	4. Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	24.770	24.232	538	97.83%
	5. Katrid tes cepat molekuler	12.385	12.116	269	97.83%
	6. Formulir pencatatan dan pelaporan	12.385	12.116	269	97.83%
	7. Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	71	71	0	100.00%
	8. Tuberkulin	240	240	0	100.00%
	9. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	277	277	0	100.00%
	10. Tenaga kesehatan : Perawat	1.295	1.295	0	100.00%
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	414	414	0	100.00%
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	65	65	0	100.00%
	13. Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	129	129	0	100.00%
	14. Tenaga kesehatan : Radiografer	29	29	0	100.00%
	15. Kader Kesehatan	43	43	0	100.00%
12.	***Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)***				***100.00%***
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)	**Jumlah Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00%**
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI VIRUS YANG MELEMAHKAN DAYA	20.225	22.451	-2.226	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	TAHAN TUBUH MANUSIA (HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS)				
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)				**20.00%**
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI	**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi**	**100.00%**
	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	62	62	0	100.00%
	2. Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	20.225	22.451	-2.226	100.00%
	3. Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	20.225	22.451	-2.226	100.00%
	4. Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	20.225	22.451	-2.226	100.00%
	5. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	276	276	0	100.00%
	6. Tenaga kesehatan : Bidan	765	765	0	100.00%
	7. Tenaga kesehatan : Perawat	1.295	1.295	0	100.00%
	8. Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	129	129	0	100.00%
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	65	65	0	100.00%
	10. Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	10	10	0	100.00%

Sumber data : e-SPM Kementerian Dalam Negeri

4.2.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja yang ditetapkan dalam APBD untuk penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan oleh Pemerintahan Daerah. Adapun besaran anggaran yang dialokasikan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Sumber Pendanaan

Tabel 4.10
Sumber Pendanaan SPM Bidang Kesehatan

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KAB. NGANJUK	3,043,575,799,749
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	284,404,798,982
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	3,455,228,000
	APBD	3,455,228,000
	A. APBD MURNI	0

NO	PENDANAAN	PAGU
	B. APBD DAU	3,407,320,000
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	47,908,000
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0

Sumber data : Laporan Realisasi Anggaran TA 2025 (Unaudited)

Berikut rincian alokasi anggaran dan realisasi pada setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan yang ditujukan untuk menunjang pemenuhan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2025 seperti yang tersaji pada tabel di bawah ini :

b. Rincian Penganggaran

Tabel 4.11
Rincian Anggaran Penerapan SPM Bidang Kesehatan

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**3,455,228,000**	**2,894,395,952**	**83.77 %**
	1	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota K2023237**			**3,455,228,000**	**2,894,395,952**	**83.77 %**
	1.02.02.2.02.0001	**1**	**Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil**	**Orang**	850,000,000	733,661,140	**86.31 %**
	1.02.02.2.02.0002	**2**	**Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin**	**Orang**	503,540,000	419,710,150	**83.35 %**
	1.02.02.2.02.0003	**3**	**Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir**	**Orang**	100,000,000	77,512,680	**77.51 %**
	1.02.02.2.02.0004	**4**	**Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita**	**Orang**	100,000,000	79,438,750	**79.44 %**
	1.02.02.2.02.0005	**5**	**Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar**	**Orang**	120,000,000	94,892,250	**79.08 %**
	1.02.02.2.02.0006	**6**	**Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif**	**Orang**	31,698,000	17,306,800	**54.60 %**
	1.02.02.2.02.0007	**7**	**Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut**	**Orang**	763,480,000	553,456,632	**72.49 %**
	1.02.02.2.02.0008	**8**	**Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi**	**Orang**	150,000,000	124,315,000	**82.88 %**
	1.02.02.2.02.0009	**9**	**Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus**	**Orang**	21,510,000	15,381,000	**71.51 %**
	1.02.02.2.02.0010	**10**	**Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat**	**Orang**	145,000,000	143,835,250	**99.20 %**
	1.02.02.2.02.0011	**11**	**Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis**	**Orang**	120,000,000	84,886,300	**70.74 %**

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	1.02.02.2.02.0012	**12**	**Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV**	**Orang**	550,000,000	550,000,000	**100.00 %**

Sumber data : Laporan Realisasi Anggaran TA 2025 (Unaudited)

4.2.5 Dukungan Personil

Untuk mendukung pelaksanan SPM Bidang Kesehatan, Pemerintah Kabupaten Nganjuk memiliki pegawai yang terdiri dari tenaga kesehatan dan tenaga administratif penunjang yang tersebar di Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Daerah Kertosono, Rumah Sakit Daerah Nganjuk, Puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya. Pegawai sebagaimana dimaksud di atas berstatus sebagai ASN maupun non ASN. Rincian tenaga kesehatan dan tenaga administratif penunjang tersaji pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.12
Data ASN Menurut Jenis Jabatan

No	Perangkat Daerah	Jabatan Struktural	Jabatan Fungsional Tertentu	Jabatan Fungsional Umum
1	Dinas Kesehatan	8	1986	214
2	RSD Nganjuk	7	610	59
3	RSD Kertosono	14	363	42
Total Pegawai		**29**	**2959**	**315**

Sumber data : Dinas Kesehatan Kab. Nganjuk

Tabel 4.13
Data ASN Menurut Jenjang Pendidikan Terakhir

No	Perangkat Daerah	Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan Terakhir					
		SD	SMP	SMA	DIII	S1	S2
1	Dinas Kesehatan	1	4	32	911	166	7
2	RSD Nganjuk	1	5	35	400	200	35
3	RSD Kertosono	1	6	30	240	132	10
Total Pegawai		**3**	**15**	**97**	**1551**	**498**	**52**

Sumber data : Dinas Kesehatan Kab. Nganjuk

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang kesehatan di Kabupaten Nganjuk masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi, antara lain :

1. Dukungan anggaran melalui APBD berkaitan dengan pemenuhan SPM terbatas;
2. Validitas data PMKS/PPKS belum akuntabel;
3. Sarana dan prasarana untuk pelayanan Rehabilitasi Sosial di luar panti masih kurang;
4. Jumlah SDM dalam Penanganan Kasus PMKS/PPKS maupun SPM masih kurang;

5. Pemberian bantuan kepada PMKS/ PPKS masih seputar bantuan untuk kebutuhan dasar ataupun rehabilitasi, hal ini belum bisa menyentuh substansi dari pengentasan permasalahan/kemiskinan hingga tuntas.

Berdasarkan pada permasalahan tersebut, maka dapat diberikan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan pemenuhan standar pelayanan minimal sebagai berikut :

1. Membangun data yang berkualitas dan Melaksanakan Integrasi Aplikasi Data Pokok Kependudukan;
2. Membangun kerjasama lintas sektoral untuk optimalisasi penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial;
3. Peningkatan Sarana & Prasarana layanan Rehabilitasi Sosial;
4. Perlu dilakukan monitoring dan pendataan yang lebih rinci terhadap efektivitas program/kegiatan yang dilakukan untuk penanganan PMKS/ PPKS untuk dicari kendala dan masalahnya sebagai bahan evaluasi untuk kebijakan yang akan datang;
5. Pemberian bantuan diharapkan dapat berupa sebuah bantuan kontinuitas untuk PMKS/ PPKS yang tidak mempunyai potensi. Sedangkan yang mempunyai potensi bisa berupa pemberian keterampilan, bimbingan dan modal untuk usaha, ataupun pembukaan lapangan kerja yang bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja.

4.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Terdapat 2 (dua) jenis pelayanan dasar pada bidang urusan pekerjaan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Bidang Perumahan Rakyat, yakni :

a. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari

Nilai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Air Minum ditetapkan berdasarkan persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum. Air minum merupakan air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Adapun

kebutuhan pokok air minum sehari-hari adalah air yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah.

b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Pelayanan pengolahan air limbah domestik adalah rangkaian layanan pengolahan air limbah domestik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, mulai dari sumbernya sampai aman untuk dilepaskan ke lingkungan. Air limbah domestik yang diolah adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.

4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu. Adapun penetapan target SPM Bidang Pekerjaan Umum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut :

Tabel 4.14
Target Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tahun 2025	
			Target Kinerja	Alokasi Anggaran
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari - hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari - hari	100 %	Rp. - (Anggaran berada di PDAM)
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 %	Rp. 6.748.725.000

4.3.3 Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut kami tampilkan capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2025 :

a. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari

Pengukuran SPM Bidang Air Minum adalah persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten yang dirumuskan sebagai berikut :

Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan non perpipaan terlindungi	=	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan non perpipaan terlindungi}}{\text{Jumlah rumah tangga di Kabupaten}}$ x 100%
	=	$\frac{1.250}{1.250}$ x 100%
	=	100%

Pada tahun 2025, jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan non perpipaan sebanyak 1.250 KK sedangkan jumlah rumah tangga di Kabupaten sebanyak 1.250 KK. Dengan demikian, capaian penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari telah mencapai 100%.

b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Pengukuran SPM Bidang Air Limbah Domestik adalah persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang dirumuskan sebagai berikut :

Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	=	$\frac{\text{Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD}}{\text{Jumlah rumah di Kabupaten}}$ x 100%
	=	$\frac{1.687}{1.687}$ x 100%
	=	100%

Hingga tahun 2025, jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan air limbah domestik adalah sebanyak 1.687 unit. Sedangkan jumlah seluruh rumah di Kabupaten Nganjuk sebanyak 1.687 unit. Dengan demikian, penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik telah mencapai 100%.

Berikut hasil capaian standar pelayanan minimal atas standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa pada masing-masing jenis pelayanan urusan pekerjaan umum sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Bidang Perumahan Rakyat sebagai berikut :

Tabel 4.15
Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Atas Standar Jumlah dan Kualitas Barang/Jasa

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	**TUNTAS PARIPURNA**			**100.00 %**
1.	***Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari***				***100.00 %***
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)	**Jumlah Yang Harus Dilayanii**	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	1.250	1.250	0	100.00 %
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)				**20.00%**
	B. Jumlah Mutu (Barang / Jasa / SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	**100.00%**
	JARINGAN PERPIPAAN				
	Kuantitas SPAM				
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	312	312	0	100.00 %
	Kualitas SPAM				
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)	312	312	0	100.00 %
	BUKAN JARINGAN PERPIPAAN				
	Kuantitas SPAM				
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	0	0	0	100.00 %
	Kualitas SPAM				
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst.	0	0	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
2.	***Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik***				***100.00 %***
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)	**Jumlah Yang Harus Dilayanii**	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	1.687	1.687	0	100.00 %
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)				**20.00 %**
	B. Jumlah Mutu (Barang / Jasa / SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	**100.00%**
	KUANTITAS SPALD				**100.00 %**
	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	75	75	0	100.00 %
	KUALITAS SPALD				**100.00 %**
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)				
	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Kabupaten/Kota	536	536	0	100.00 %
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) ***Mutu Tidak Boleh Ditutup Semua**				
	1. Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan > 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/Kota	0	0	0	100.00 %
	2. Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic	536	536	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar				

Sumber data : e-SPM Kementerian Dalam Negeri

4.3.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja yang ditetapkan dalam APBD untuk penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum oleh Pemerintah Daerah. Adapun besaran anggaran yang dialokasikan dan realisasinya pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.16
Sumber Pendanaan SPM Bidang Pekerjaan Umum

No	Pendanaan	Pagu
1	APBD KAB. NGANJUK	3.043.575.799.749
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	230.688.301.378
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	6.748.725.000
	APBD	6,748,725,000
	A. APBD MURNI	0
	B. APBD DAU	0
	C. APBD DAK FISIK	6,598,725,000
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	150,000,000
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	A. APBN-DEKONSENTRASI	0
	B. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0

Berikut rincian alokasi anggaran dan realisasi pada setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan yang ditujukan untuk menunjang pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2025 seperti yang tersaji pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.17
Rincian Anggaran Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	0	0	0
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0
	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	0	0	0
	Supervisi pembangunan/peningkatan/perluasan/perbaikan SPAM	0	0	0
	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	0	0	0
	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	0	0	0
	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	0	0	0
	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	0	0	0
	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	0	0	0
	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	0	0	0
	Pembinaan dan pengawasan terhadap tarif Air Minum	0	0	0
	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha untuk kebutuhan sendiri	0	0	0
	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat	0	0	0
	Fasilitasi penyiapan kerja sama SPAM	0	0	0
	Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama SPAM	0	0	0
	Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM	0	0	0
	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perkotaan	0	0	0
	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perdesaan	0	0	0
	Pembangunan baru SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	0	0	0
	Peningkatan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	0	0	0
	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	0	0	0
	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	0	0	0
	Perbaikan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	0	0	0
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	0	0	0
	Peningkatan KapasitasKelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	0	0	0
	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	0	0	0
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	0	0	0
	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	0	0	0
	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	0	0	0
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	0	0	0

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	0	0	0
	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0
	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	0	0	0
	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	0	0	0
	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	0	0	0
2	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**6,748,725,000**	**6,748,725,000**	**100**
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota	**6,748,725,000**	**6,748,725,000**	**100**
	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota	0	0	0
	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	0	0	0
	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala Kota	0	0	0
	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	0	0	0
	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	0	0	0
	Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat	0	0	0
	Pembinaan teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	0	0	0
	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	0	0	0
	Pengembangan SDM dan kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	0	0	0
	Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	0	0	0
	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	0	0	0
	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala permukiman	0	0	0
	Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	0	0	0
	Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	0	0	0
	Pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana IPLT	0	0	0
	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	0	0	0
	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	0	0	0
	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)Terpusat Skala Kawasan Tertentu	0	0	0
	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	0	0	0
	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	0	0	0
	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	0	0	0
	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	0	0	0

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	0	0	0
	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	0	0	0
	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	0	0	0
	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0
	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	0	0	0
	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	0	0	0
	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	0	0	0
	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	0	0	0
	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	0	0	0
	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	0	0	0
	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	150,000,000	150,000,000	100
	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	0	0	0
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	0	0	0
	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	0	0	0
	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	0	0	0
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	0	0	0
	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	6,598,725,000	6,598,725,000	100
	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan SistemPengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	0	0	0
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	0	0	0

Sumber data : e-SPM Kementerian Dalam Negeri

4.3.5 Dukungan Personil

Sumber daya manusia adalah aset bagi suatu organisasi dan sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan untuk terwujudnya tujuan organisasi. Untuk mendukung pelaksanan SPM Bidang Pekerjaan Umum, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk memiliki jumlah pegawai sebanyak 6 orang yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM. Data pegawai menurut jabatan tersaji sebagai berikut :

Tabel 4.18
Data ASN Menurut Jenis Jabatan

No	Perangkat Daerah	Jabatan Struktural	Jabatan Fungsional Tertentu	Jabatan Fungsional Umum
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	22	11	120
TOTAL PEGAWAI		153		

Tabel 4.19
Data ASN Menurut Jenjang Pendidikan Terakhir

No	Perangkat Daerah	Jumlah Non ASN	Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan Terakhir					
			SD	SMP	SMA	DIII	S1	S2
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	6	10	92	3	24	18
TOTAL PEGAWAI		153						

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum di Kabupaten Nganjuk masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi, antara lain :

a. Permasalahan
   1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk pada Tahun 2025 tidak melaksanakan kegiatan pembangunan SPAM. Oleh karena itu, data yang diinput dalam aplikasi e-SPM bersumber dari PDAM.
   2. Dalam kegiatan pembangunan SPAM, PDAM tidak menganggarkan biaya. Namun, pelanggan yang melakukan pemasangan Sambungan Rumah (SR) tetap dikenakan tarif atau retribusi pemasangan.

b. Solusi
   1. Penegasan Sumber Data, Karena Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk pada tahun 2025 tidak melaksanakan pembangunan SPAM, maka perlu dibuat berita acara atau surat resmi yang menegaskan bahwa data e-SPM sepenuhnya bersumber dari PDAM.

2. Koordinasi dan Sinkronisasi Data Melakukan koordinasi rutin antara Dinas PUPR dan PDAM untuk memastikan data pemasangan Sambungan Rumah (SR) yang dikenakan tarif/retribusi tercatat dengan akurat dan sesuai indikator SPM.
3. Transparansi Pembiayaan PDAM perlu menjelaskan secara tertulis bahwa tidak ada penganggaran pembangunan SPAM, namun biaya yang timbul berasal dari tarif atau retribusi pemasangan SR yang dibebankan kepada pelanggan
4. Dokumentasi dan Pelaporan

   Seluruh data jumlah SR terpasang, jumlah rumah tangga terlayani, serta mekanisme pembiayaan perlu didokumentasikan sebagai dasar pertanggungjawaban dalam pelaporan SPM.
5. Perencanaan Tahun Berikutnya

   Apabila memungkinkan, Dinas PUPR dapat mengkaji kebutuhan penganggaran pembangunan SPAM pada tahun berikutnya untuk meningkatkan cakupan layanan air minum.

4.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Terdapat 2 (dua) jenis pelayanan dasar pada Urusan Perumahan Rakyat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Bidang Perumahan Rakyat, yakni :

a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

   Indikator yang digunakan adalah jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni dengan target capaian sebesar 100% pada tiap tahunnya. Jenis pelayanan dasar ini dilaksanakan dengan ketentuan :

   1) Pada saat masa pasca bencana;
   2) Surat penetapan bencana dari Bupati; dan/atau

3) Dampak bencana di daerah administrasi Kabupaten.

b. Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikatornya adalah jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni dengan target capaian sebesar 100% pada tiap tahunnya. Jenis pelayanan dasar ini dilaksanakan dalam rangka mendukung:

1) Pengurangan kawasan kumuh 5-10 Ha; dan/atau
2) Penataan perumahan dan kawasan permukiman yang berada di lahan bukian fungsi permukiman dan tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya.

4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu. Adapun penetapan target SPM Bidang Perumahan Rakyat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut :

Tabel 4.20
Target Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat

No	Indikator	Tahun 2025	
		Target Kinerja	Alokasi Anggaran
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	Rp. 132.278.000
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak hun bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	100%	Rp. 325.500.000

4.4.3 Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang telah ditetapkan sebelumnya. Realisasi SPM Bidang Perumahan Rakyat dapat diuraikan sebagaimana berikut :

a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana

Perhitungan capaian SPM dalam penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dihitung dengan membandingkan antara jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2025 dibagi jumlah total rencana unit

rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun 2025. Adapun rumus dan rincian perhitungan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	=	$\frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2025}}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun 2025}}$	x 100%
	=	$\frac{80}{80}$ x 100%	
	=	100%	

Pada tahun 2025, jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani sebanyak 80 rumah, sedangkan jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun 2025 sebanyak 80 rumah. Dengan demikian, penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana telah mencapai 100%.

b. Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten

Perhitungan capaian SPM dalam fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah dihitung dengan membandingkan antara rumah tangga penerima fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan ditambah rumah tangga penerima subsidi uang sewa ditambah rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni dibagi jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan. Adapun rumus dan rincian perhitungan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten	=	$\frac{\text{Rumah tangga penerima fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni}}{\text{Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan}}$	x 100%
	=	$\frac{0}{0}$	x 100%
	=	100%	

Pada tahun 2025, rumah tangga penerima fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan, rumah tangga penerima subsidi uang sewa, dan rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni sebanyak 0 rumah, sedangkan jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan pada tahun 2025 sebanyak 0 rumah. Dengan demikian, fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten telah mencapai 100%.

Berikut hasil capaian standar pelayanan minimal atas standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa pada masing-masing jenis pelayanan urusan perumahan rakyat sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Bidang Perumahan Rakyat sebagai berikut :

Tabel 4.21
Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Atas Standar Jumlah dan Kualitas Barang/Jasa

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	**TUNTAS PARIPURNA**			**100.00%**
1.	***Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota***				***100.00%***
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)	**Jumlah Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	80	80	0	100%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)				**20.00%**
	B. Jumlah Mutu (Barang / Jasa / SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	**100.00%**
	1. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	80	80	0	100.00%
	2. Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	0	0	0	100.00%
	3. Pemukiman kembali bagi korban bencana	0	0	0	100.00%
	4. Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	0	0	0	100.00%
	JUMLAH	**80**	**80**	**0**	**100.00%**

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
2.	***Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***				***100.00%***
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)	**Jumlah Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	0	0	0	100%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)				**20.00%**
	B. Jumlah Mutu (Barang / Jasa / SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	**100.00%**
	Tidak Ada Relokasi Program Pemerintah	0	0	0	100.00%
	JUMLAH	**0**	**0**	**0**	**100.00%**

Sumber data : e-SPM Kementerian Dalam Negeri

4.4.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja yang ditetapkan dalam APBD untuk penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat oleh Pemerintahan Daerah. Adapun besaran anggaran yang dialokasikan dan realisasinya pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Sumber Pendanaan

Tabel 4.22
Sumber Pendanaan SPM Bidang Perumahan Rakyat

No	Pendanaan	Pagu
1	APBD KAB. NGANJUK	3.043.575.799.749
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	18.788.203.100
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	1.466.978.000
	APBD	457.778.000
	A. APBD MURNI	0
	B. APBD DAU	457.778.000
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	310.000.000
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	310.000.000
	APBN	0

No	Pendanaan	Pagu
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	699.200.000

b. Rincian Anggaran

Berikut rincian alokasi anggaran dan realisasinya yang ditujukan untuk pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2025 seperti yang tersaji pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.23
Rincian Anggaran Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)
	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat	**1,466,978,000**	**1,460,672,218**	**99.45**
1	**Program:** Pengembangan Perumahan	**457,778,000**	**451,472,218**	**98.62**
1.1	**Kegiatan:** Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**132,278,000**	**130,023,567**	**98.30**
1.1.1	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	0	0	0
1.1.2	Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	0	0	0
1.1.3	Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	0	0	0
1.1.4	Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	32,278,000	30,234,567	93.67
1.1.5	Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	0	0	0
1.1.6	Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	0	0	0
1.1.7	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	0	0	0
1.1.8	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	0	0	0
1.1.9	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	100,000,000	99,789,000	99.79
1.1.10	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	0	0	0
1.2	**Kegiatan:** Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**325,500,000**	**321,448,651**	**98.76**
1.2.1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	0	0	0
1.2.2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah	0	0	0

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)
	korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota			
1.2.3	Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	0	0	0
1.2.4	Pembangunan rumah bagi korban bencana	0	0	0
1.2.5	Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	0	0	0
1.2.6	Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program Kabupaten/Kota	325,500,000	321,448,651	98.76
1.2.7	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	0	0	0
1.2.8	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	0	0	0
1.2.9	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	0	0	0
1.2.10	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	0	0	0
1.2.11	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	0	0	0
1.2.12	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	0	0	0
2	**PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA**			
2.1	Kegiatan : Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah ; Sub Kegiatan : Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	699,200,000	699,200,000	100
3	**NON APBD**			
	Corporate Social Responbility (CSR)	310,000,000	310,000,000	100

Sumber data : Laporan Realisasi Anggaran TA 2025 (Unaudited)

4.4.5 Dukungan Personil

Sumber daya manusia adalah aset bagi suatu organisasi dan sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan untuk terwujudnya tujuan organisasi. Untuk mendukung pelaksanan SPM Bidang Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk memiliki jumlah pegawai sebanyak 39 pegawai. Data pegawai menurut jenis jabatan dan jenjang pendidikan terakhir tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 4.24
Jumlah Pegawai Menurut Jenis Jabatan

No	Perangkat Daerah	Jabatan Struktural	Jabatan Fungsional Tertentu	Jabatan Fungsional Umum
1	Dinas PRKPP	5	16	18
TOTAL PEGAWAI		39		

Tabel 4.25
Jumlah Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan Terakhir

No	Perangkat Daerah	Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan Terakhir						
		SD	SMP	SMA	DIII	S1	S2	S3
1	Dinas PRKPP	2	-	9	3	22	2	1
TOTAL PEGAWAI		39						

4.4.6 Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota.
  1. Kurang optimalnya jasa konsultansi identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana Kabupaten/Kota karena terlalu luasnya wilayah yang diidentifikasi beserta jenis bencana
  2. Identitas warga penerima bantuan rehabilitasi rumah bagi korban bencana kurang lengkap.
  3. Sumber dana dari BTT sehingga prosedur memerlukan waktu untuk pencairan dana bantuan.
- Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota.

  Tidak terdapat permasalahan signifikan

b. Solusi

- Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota.
  1. Membatasi wilayah untuk beberapa kecamatan dengan berbagai jenis bencananya.
  2. Berkoordinasi dengan pihak desa/kelurahan terkait dokumen identitas warga penerima bantuan.

3. Melakukan koordinasi yang intensif dengan instansi terkait percepatan proses administrasi agar dapat segera tersalurkan.

- Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota.

  Tidak terdapat permasalahan signifikan

4.5 URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SUB URUSAN TRANTIBUM)

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Sebagaimana amanah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, ketenteraman dan ketertiban umum yang selanjutnya disebut trantibum merupakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tentram, tertib, dan teratur sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan pada sub urusan trantibum adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara yang terkena dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Terdapat 4 (empat) mutu pelayanan dasar pada sub bidang trantibum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk, yakni:

a. Standar operasional prosedur Satpol PP;
b. Standar sarana prasarana Satpol PP;
c. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat; dan
d. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

Mutu Pelayanan Dasar pada Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum tersebut memiliki pengukuran capaian yang didasarkan pada :

a. Standar operasional prosedur Satpol PP dan standar sarana prasarana Satpol PP, merupakan standar teknis terkait standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat, merupakan standar teknis terkait standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada meliputi :

1) Pelayanan kerugian materil

Kerugian materil adalah kerusakan atas barang atau aset pribadi yang diakibatkan dari penegakan pelanggaran Perda dan Perkada. Kerugian materil terdiri atas:

- Rusak ringan, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir tidak lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Perda dan Perkada yang sedang dilakukan; dan
- Rusak sedang dan/atau berat, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir sama dan/atau lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Perda dan Perkada yang sedang dilakukan.

2) Pelayanan pengobatan

Pelayanan pengobatan adalah tindakan pertolongan pertama bagi warga negara yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke Rumah Sakit/Pusat Kesehatan Masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat. Warga negara yang mengalami kerugian materil dan/atau cidera fisik akibat penegakan Perda dan Perkada adalah yang berada pada jarak antara 0 (nol) sampai dengan 50 (lima puluh) meter dari lokasi penegakan Perda dan Perkada.

4.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Dalam rangka pemenuhan capaian SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, diperlukan penetapan target pada awal perencanaan tahun 2025. Penetapan target tersebut difungsikan sebagai langkah awal perencanaan serta pengukuran atas kemampuan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam mewujudkan capaian SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Adapun penetapan target awal Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

Tabel 4.26
Target Pencapaian SPM Sub Urusan Trantibum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tahun 2025	
			Target Kinerja	Alokasi Anggaran
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	Rp. 3,276,068,350

Ketika seluruh Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum telah dipenuhi oleh Pemerintah Daerah, maka optimalisasi terhadap capaian angka layanan dasar Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Nganjuk dapat diwujudkan.

4.5.3 Realisasi

Pencapaian Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum menjadi salah satu bagian terpenting dalam mewujudkan *good governance* dan *good goverment* di Kabupaten Nganjuk. Menciptakan sebuah tatanan pemerintahan yang transparan, akuntabel, adil dan merata dapat terwujud secara komprehensif dengan berupaya mencapai keberhasilan atas kinerja dari setiap urusan penyelenggara pemerintahan termasuk bidang ketentraman dan ketertiban umum. Oleh sebab itu, Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum hadir sebagai tolak ukur perwujudan sinergitas atas layanan pemerintah kepada masyarakat. Berikut kami tampilkan realisasi pencapaian kinerja Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2025 :

Tabel 4.27
Capaian SPM Sub Urusan Trantibum Atas Standar Jumlah dan Kualitas Barang/Jasa

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM		INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
(1)	(2)		(3)			(4)
KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM						
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM			**TUNTAS PARIPURNA**			**100.00%**
1.	**Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)**					***100.00%***
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00%**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		364	364	0	100.00%

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM		INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
(1)	(2)		(3)			(4)
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20.00%**
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	**100.00%**
	1. Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP **(jumlah dan kualitas barang dan jasa : gedung kantor, kendaraan operasional dan perlengkapan operasional pada tahun berjalan)**	unit	273	273	0	100.00%
	2. Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023 **(SOP penegakan Perda/Perkada, deteksi dini/cegah dini, pembinaan/penyuluhan, pengamanan, pengawalan, patroli, penertiban, dan penanganan unjuk rasa kerusuhan massa)**	Dokumen	1	1	0	100.00%
	3. Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** **(Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)**	orang	250	250	0	100.00%
	4. Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan		1	1	0	100.00%

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM		INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
(1)	(2)		(3)			(4)
	hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material	Dokumen				
	5. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil **(kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)**	orang	25	0	25	100.00%
	6. Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan **(pertolongan pertama yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat)**	orang	25	0	25	100.00%

Sumber data : e-SPM Kementerian Dalam Negeri

4.5.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja yang ditetapkan dalam APBD untuk penerapan dan pencapaian SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum oleh Pemerintahan Daerah. Adapun besaran anggaran yang dialokasikan dan realisasinya pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Sumber Pendanaan

Tabel 4.28
Sumber Pendanaan SPM Sub Urusan Trantibum

No	Pendanaan		Pagu Anggaran
1	APBD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025		3,043,575,799,749
2	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah		11,553,916.060
3	Alokasi Anggaran Penerapan SPM pada Satker Perangkat Daerah		3,276,068,350
	APBD		
	a.	APBD Murni	2,400,271,350
	b.	APBD DAU	0
	c.	APBD DAK Fisik	0
	d.	APBD DAK Non Fisik	0
	e.	Dana Bagi Hasil	875,797,000
	f.	Kerja Sama	0
	g.	Otonomi Khusus	0
	NON APBD		**0**
	a.	Corporate Social Responsibility (CSR)	0

No	Pendanaan	Pagu Anggaran
	APBN	**0**
	a. APBN Dekonsentrasi	0
	b. APBN Tugas Pembantuan	0
	DANA LAINNYA	**0**

b. Rincian Anggaran

Tabel 4.29
Rincian Anggaran Penerapan SPM Sub Urusan Trantibum

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Serapan
1	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)**	**3,276,068,350**	**3,155,946,414**	**96.33%**
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**2,301,153,700**	**2,197,790,992**	**95.51%**
	1 Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	5,591,250	5,514,250	98.62 %
	2 Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	66,271,300	66,085,000	99.72 %
	3 Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	0	0	0%
	4 Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	1,334,490,350	1,303,812,215	97.70 %
	5 Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	0	0	0%
	6 Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	3,500,000	3,199,000	91.40 %
	7 Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	0	0	0%
	8 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	0	0	0%
	9 Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	0	0	0%
	10 Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	14,460,000	0	0%
	11 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	0	0	0%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran	Realisasi	Serapan
		12	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	0	0	0%
		13	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	0	0	0%
		14	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	665,900,300	621,490,830	93.33 %
		15	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	88,611,500	83,391,500	94.11 %
		16	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	0	0	0%
		17	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	2,500,000	0	0%
		18	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	119,829,000	114,298,197	95.38 %
	2	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**		**974,914,650**	**958,155,422**	**98.28%**
		1	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	332,041,850	318,569,200	95.94 %
		2	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	0	0	0%
		3	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	0	0	0%
		4	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5,060,000	5,040,000	99.60 %
		5	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan PeraturanKepala Daerah	0	0	0%
		6	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	0	0	0%
		7	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	10,000,000	10,000,000	100.00 %
		8	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0	0	0%
		9	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	0	0	0%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran	Realisasi	Serapan
		10	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0	0	0%
		11	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	588,555,000	585,296,222	99.45 %
		12	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	39,257,800	39,250,000	99.98 %
	3	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**		**0**	**0**	**0%**
		1	Pembentukan Sekretariat PPNS	0	0	0%
		2	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	0	0	0%
		3	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	0	0	0%
		4	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	0	0	0%
		5	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	0	0	0%

Sumber data : Laporan Realisasi Anggaran TA 2025 (Unaudited)

4.5.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Berikut ini tersaji data personil di Satuan Polisi Pamong Praja :

Tabel 4.30
Data ASN Menurut Jenis Jabatan

No	Perangkat Daerah	Jabatan Struktural	Jabatan Fungsional Tertentu	Jabatan Fungsional Umum
1	Satpol PP Kab. Nganjuk	4	5	66
TOTAL PEGAWAI : 75				

Tabel 4.31
Data ASN Menurut Jenjang Pendidikan Terakhir

No	Perangkat Daerah	Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan Terakhir					
		SD	SMP	SMA	D III	S1	S2
1	Satpol PP Kab. Nganjuk	-	-	56	1	14	4
TOTAL PEGAWAI : 75							

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum di Kabupaten Nganjuk, masih mengalami beberapa kendala dan permasalahan. Adapun permasalahan dan kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Dukungan anggaran melalui APBD berkaitan dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat masih sangat minim;
2. Validitas data penerima layanan korban akibat dari penegakan hukum atas pelanggaran Perda dan Perkada belum akuntabel;
3. Standar operasional prosedur belum sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Sarana prasarana Satpol PP belum memadai;
5. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat belum terpenuhi;
6. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada belum optimal.

Berdasarkan pada permasalahan tersebut, maka dapat diberikan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan pemenuhan standar pelayanan minimal adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan anggaran Pelayanan Minimal Urusan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat melalui APBD sehingga dapat melaksanakan Pelayanan kepada Masyarakat lebih baik;
2. Melakukan validitas data penerima layanan korban akibat dari penegakan hukum atas pelanggaran Perda dan Perkada yang akuntabel;
3. Menyusun Standar Operasional Prosedur sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Memenuhi kebutuhan Sarana prasarana Satpol PP yang memadai;
5. Meningkatkan Standar kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat sesuai ketentuan;
6. Mengoptimalkan pelayanan bagi warga yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

4.6 URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SUB URUSAN KEBAKARAN)

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar pada sub urusan kebakaran ditujukan dalam rangka pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara yang menjadi korban kebakaran atau

terdampak kebakaran. Terdapat 1 (satu) jenis pelayanan dasar pada sub urusan kebakaran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, yakni pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera sesuai dengan tingkat waktu tanggap (*response time*) pada saat dan setelah kejadian kebakaran bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran dan yang terdampak kebakaran, yang meliputi kegiatan pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran paling sedikit harus memuat :

a. Layanan respon cepat (*response time*) penanggulangan kejadian kebakaran;
b. Layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran;
c. Layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi;
d. Layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran; dan
e. Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.

4.6.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Dalam rangka pemenuhan capaian SPM Sub Urusan Kebakaran, diperlukan penetapan target pada awal perencanaan tahun 2025. Penetapan target tersebut difungsikan sebagai langkah awal perencanaan serta pengukuran atas kemampuan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam mewujudkan capaian SPM Sub Urusan Kebakaran. Adapun penetapan target awal berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

Tabel 4.32
Target Pencapaian SPM Sub Urusan Kebakaran

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tahun 2025	
			Target Kinerja	Alokasi Anggaran
1	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan	100%	Rp. 3,113,104,470

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tahun 2025	
			Target Kinerja	Alokasi Anggaran
		dan evakuasi korban kebakaran		

4.6.3 Realisasi

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran menjadi salah satu bagian terpenting dalam mewujudkan *good governance* dan *good goverment* di Kabupaten Nganjuk. Menciptakan sebuah tatanan pemerintahan yang transparan, akuntabel, adil dan merata dapat terwujud secara komprehensif dengan berupaya mencapai keberhasilan atas kinerja dari setiap urusan penyelenggara pemerintahan termasuk sub urusan kebakaran. Oleh sebab itu, standar pelayanan minimal sub urusan kebakaran hadir sebagai tolak ukur perwujudan sinergitas atas layanan pemerintah kepada masyarakat. Berikut kami tampilkan realisasi pencapaian kinerja standar pelayanan minimal sub urusan kebakaran dengan teknis perhitungan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Kabupaten/Kota :

Tabel 4.33
Realisasi Pencapaian SPM Sub Urusan Kebakaran

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Capaian
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM DAMKAR		**TUNTAS UTAMA**			**99.61 %**
1 .	***Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran***				***99.61 %***
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)	**Jumlah Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00%**
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	158	158	0	100.00%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)				**19.61 %**
	B. Jumlah Mutu (Barang / Jasa / SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	**98.07 %**
	1. Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	127	123	4	96.85 %
	2. Pemenuhan Standar Operasional Prosedur	1	1	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Capaian
	penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi				
	3. Pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran	750	771	-21	100.00%
	4. Pemenuhan standar peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	83	76	7	91.57 %
	5. Pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	2	2	0	100.00%
	6. Pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	2	0	2	100.00%

Sumber data : e-SPM Kementerian Dalam Negeri

4.6.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja yang ditetapkan dalam APBD untuk penerapan dan pencapaian SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah oleh Pemerintahan Daerah. Adapun besaran anggaran yang dialokasikan dan realisasinya pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Sumber Pendanaan

Tabel 4.34
Sumber Pendanaan SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah

No	Pendanaan		Pagu Anggaran
1	APBD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025		3,043,575,799,749
2	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah		10,765,487,391
3	Alokasi Anggaran Penerapan SPM pada Satker Perangkat Daerah		3,113,104,470
	APBD		**10,765,487,391**
	a.	APBD Murni	
	b.	APBD DAU	10,765,487,391
	c.	APBD DAK Fisik	0
	d.	APBD DAK Non Fisik	0
	e.	Dana Bagi Hasil	0
	f.	Kerja Sama	0
	g.	Otonomi Khusus	0
			0
	NON APBD		**0**
	a.	Corporate Social Responsibility (CSR)	0
	APBN		**0**

No	Pendanaan		Pagu Anggaran
	a.	APBN Dekonsentrasi	0
	b.	APBN Tugas Pembantuan	0
	DANA LAINNYA		**0**

b. Rincian Anggaran

Tabel 4.35
Rincian Anggaran Penerapan SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			SATUAN	ANGGARAN	REALISASI
1.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)				3,113,104,470	3,050,286,147
	1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			2,992,602,470	2,940,440,897
		1	Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	685,224,000	672,887,951
		2	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	40,500,000	39,375,000
		3	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Laporan	27,000,000	27,000,000
		5	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	9,600,000	9,600,000
		6	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Dokumen	37,132,500	36,141,325
		7	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Unit	1,250,000	1,000,000
		8	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	2,190,545,970	2,153,186,621
		9	Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Orang	1,350,000	1,250,000
	JUMLAH KEGIATAN				2,992,602,470	2,940,440,897
	2	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran			11,525,000	11,400,000
		1	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen	6,525,000	6,525,000
		2	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen	5,000,000	4,875,000
	JUMLAH KEGIATAN				11,525,000	11,400,000
	3	Investigasi Kejadian Kebakaran			9,690,000	2,188,750

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			SATUAN	ANGGARAN	REALISASI
		1	Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Dokumen	9,690,000	2,188,750
	JUMLAH KEGIATAN				9,690,000	2,188,750
	4	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			96,558,000	93,536,500
		1	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Orang	54,390,000	53,294,500
		2	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Desa	26,168,000	24,242,000
		3	Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	Dokumen	16,000,000	16,000,000
	JUMLAH KEGIATAN				96,558,000	93,536,500
	5	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia			2,729,000	2,720,000
		1	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang penimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	Laporan	2,729,000	2,720,000
	JUMLAH KEGIATAN				2,729,000	2,720,000
	JUMLAH PROGRAM				3,113,104,470	3,050,286,147

Sumber data : Laporan Realisasi Anggaran TA 2025 (Unaudited)

4.6.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah. Berikut ini tersaji data personil di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nganjuk :

Tabel 4.36
Data ASN Menurut Jenis Jabatan

No	Perangkat Daerah	Jabatan Struktural	Jabatan Fungsional Tertentu	Jabatan Fungsional Umum
1	Dinas Damkarmat	5	24	31
Total Pegawai		60		

Tabel 4.37
Data ASN Menurut Jenjang Pendidikan Terakhir

No	Perangkat Daerah	Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan Terakhir					
		SD	SMP	SMA	D3	S1	S2
1	Dinas Damkarmat	0	1	39	1	16	3
Total Pegawai		60					

4.6.6 Permasalahan dan Solusi

Dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nganjuk masih terdapat kendala dan Pemasalahan yang berkaitan dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Trantibumlinmas sub urusan Kebakaran.

Berdasarkan pada permasalahan tersebut, maka solusi dan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Trantibumlinmas sub urusan Kebakaran adalah sebagai berikut :

1. Dukungan Anggaran pada Trantibumlinmas sub urusan Kebakaran terbatas sehingga untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Trantibumlinmas sub Urusan Kebakaran Kurang Maksimal;
2. Penunjang Response time rate wilayah manajemen Kebakaran 15 menit kurang maksimal karena belum terbagi wilayah secara spesifik secara merata;
3. Minimnya Sarana Prasarana Pencegahan, Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan;
4. Formulasi perhitungan persentase capaian dari indikator Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran seharusnya bisa menjadi negatif dikarenakan dalam penyelenggaraaanya semakin kecil jumlah korban dan pelapor pengguna layanan maka hasil capaian semakin bagus, tidak sebaliknya;
5. Pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran untuk target menyesuaikan Realisasi yang ada di lapangan;
6. Keterbatasan SDM Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan yang memiliki Sertifikasi Teknis (Kaji cepat, Pelaporan) sehingga untuk Laporan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan tidak Akurat; dan
7. Belum Tersusunnya Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) untuk sebagai pedoman terintegrasi bagi pemerintah daerah

dalam pencegahan, pemadaman, dan penyelamatan bahaya kebakaran. RISPKP mencakup analisis risiko, infrastruktur, SDM, hingga pemetaan potensi kebakaran agar sistem penanggulangan menjadi lebih sistematis, terukur, dan adaptif.

4.7 URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SUB URUSAN KEBENCANAAN)

4.7.1 Jenis Pelayanan Dasar

Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Untuk melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ada beberapa jenis pelayanan yang harus dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk, antara lain :

a. Pelayanan informasi rawan bencana

Pelayanan informasi rawan bencana adalah pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten yang rawan bencana kepada Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana (dalam satu jenis bencana). Cakupan kawasan rawan bencana adalah wilayah kabupaten/kota. Pelayanan informasi rawan bencana dibagi per jenis ancaman bencana antara lain: Gempa bumi, Tsunami, Banjir, Tanah Longsor, Letusan Gunung Api, Gelombang Laut Ekstrim, Angin Topan (termasuk Siklon Tropis/Putting Beliung), Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Epidemi/Wabah Penyakit/Zoonosis. Di kabupaten Nganjuk, informasi yang diberikan kepada masyarakat mengenai kebencanaan yang ada di kabupaten nganjuk, antara lain : banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Penerapan SPM tahun 2025 pada pelayanan informasi rawan bencana dilaksanakan melaui sub kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana). Beberapa indikator yang harus dilaksanakan pada pelayanan informasi rawan bencana yaitu :

1) Melakukan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana, dan
2) Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana.

b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

Adalah serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan Warga Negara dalam menghadapi bencana.

Layanan ini terkait dengan tersedianya sarana prasarana yang digunakan sebagai penunjang penanggulangan bencana dan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam menangani bencana. Penerapan SPM pada pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dilaksanakan melaui sub kegiatan, antara lain :

1) Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota;
2) Gladi Kesiapsiagaan terhadap bencana;
3) Pengelolaan risiko bencana kabupaten/kota;
4) Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana; dan
5) Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota.

Indikator yang harus dilaksanakan pada pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yaitu :

1) Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi.
2) Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana).

c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Adalah layanan yang diberikan kepada masyarakat yang tertimpa bencana. Penerapan SPM pada pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dilaksanakan melaui sub kegiatan, antara lain :

1) Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota.
2) Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota.
3) Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota.
4) Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.

Indikator yang harus dilaksanakan pada pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana :

1) Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana).
2) Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana.
3) Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana).

4) Melakukan respon cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas.
5) Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana.

4.7.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, bahwa dalam rangka pemenuhan capaian SPM Sub Urusan Bencana Daerah diperlukan penetapan target pada awal perencanaan Tahun 2025. Penetapan target tersebut difungsikan sebagai langkah awal perencanaan serta pengukuran atas kemampuan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam mewujudkan capaian standar pelayanan minimal bidang sub urusan kebencanaan. Berikut merupakan target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, yaitu :

Tabel 4.38
Target Pencapaian SPM Sub Urusan Kebencanaan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tahun 2025	
			Target Kinerja	Alokasi Anggaran
1	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Rp. 42,673,550
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Rp. 1,600,668,400
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Rp. 333,794,750

4.7.3 Realisasi

Realisasi kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 4.39
Capaian SPM Sub Urusan Kebencanaan Atas Standar Jumlah dan Kualitas Barang/Jasa

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Capaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN	**TUNTAS PARIPURNA**			**100.00%**
1.	***Pelayanan Informasi Rawan Bencana***				***100.00%***
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)	**Jumlah Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00%**
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	170	170	0	100.00%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)				**20.00%**
	B. Jumlah Mutu (Barang / Jasa / SDM) Yang Harus Dilayanan/Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	**100.00%**
	1. Penyusunan Kajian Risiko Bencana	0	0	0	100.00%
	a. Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkada dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	1	1	0	100.00%
	b. Tersedianya Dokumen KRB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkada dalam bentuk kajian dan album peta	0	0	0	100.00%
	2. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	0	0	0	100.00%
	1) Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana				100.00%
	a. Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)	170	170	0	100.00%
	b. Terlaksananya sosialisasi tatap muka	5	5	0	100.00%
	c. Tersedianya Narasumber/Fasilitator (sesuai dengan kebutuhan)	20	20	0	100.00%
	d. Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	5	5	0	100.00%
	2) Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia				100.00%
	a. Tersedianya Media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	5	5	0	100.00%
	b. Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	2	2	0	100.00%
	c. Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)	8	8	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Capaian
	d. Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	5	5	0	100.00%
	e. Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media sosial dan multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	5	5	0	100.00%
	3) Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik				100.00%
	a. Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	0	0	0	100.00%
	b. Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)	0	0	0	100.00%
	c. Tersedianya Tim Teknis (sesuai dengan kebutuhan)	0	0	0	100.00%
	d. Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)	0	0	0	100.00%
	e. Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)	0	0	0	100.00%
2.	***Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana***				***100.00%***
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)	**Jumlah Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00%**
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	840	840	0	100.00%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)				**20.00%**
	B. Jumlah Mutu (Barang / Jasa / SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	**100.00%**
	1. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	0	0	0	100.00%
	a. Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalkan dalam bentuk perkada	1	1	0	100.00%
	b. Tersedianya Dokumen RPB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkada	1	1	0	100.00%
	2. Pembuatan Rencana Kontijensi (RENKON)	0	0	0	100.00%
	a. Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi (sesuai dengan kebutuhan)	2	2	0	100.00%
	b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2 setiap penyusunan RENKON)	2	2	0	100.00%
	c. Tersedianya Personil penyusun Renkon (sesuai dengan kebutuhan)	7	7	0	100.00%
	d. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	50	50	0	100.00%
	3. Pelatihan, Pencegahan dan Mitigasi	0	0	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Capaian
	1) Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur				100.00%
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	40	40	0	100.00%
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	0	100.00%
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	15	15	0	100.00%
	d. Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	0	100.00%
	e. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	24	24	0	100.00%
	f. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	5	5	0	100.00%
	2) Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara				100.00%
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	200	200	0	100.00%
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	0	100.00%
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	0	100.00%
	d. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	24	24	0	100.00%
	e. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	5	5	0	100.00%
	4. Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	0	0	0	100.00%
	1) Simulasi Dalam Ruangan (Table-Top Exercise)				100.00%
	a. Tersedianya Dokumen Latihan table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	0	100.00%
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung simulasi dalam ruangan/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	0	100.00%
	c. Tersedianya Penyelenggara simulasi dalam ruang/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	5	5	0	100.00%
	2) Gladi Lapang				100.00%
	a. Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	0	100.00%
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	5	5	0	100.00%
	c. Tersedianya Penyelenggara gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	40	40	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Capaian
	5. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaaan terhadap Bencana	0	0	0	100.00%
	1) Koordinasi Teknis Pemantapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana				100.00%
	a. Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun)	365	365	0	100.00%
	b. Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	0	100.00%
	c. Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1)	1	1	0	100.00%
	d. Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	6	6	0	100.00%
	e. Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	31	31	0	100.00%
	2) Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana				100.00%
	a. Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	0	100.00%
	b. Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	0	100.00%
	c. Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	0	100.00%
	d. Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	0	100.00%
	3) Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara Broadcast				100.00%
	a. Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	0	100.00%
	b. Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	0	100.00%
	4) Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan berbasis Masyarakat				100.00%
	a. Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)	3	3	0	100.00%
	b. Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)	27	27	0	100.00%
	6. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	0	0	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Capaian
	a. Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)	5	5	0	100.00%
	b. Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	0	100.00%
	c. Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)	25	25	0	100.00%
	d. Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	522	522	0	100.00%
3.	***Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana***				***100.00%***
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)	**Jumlah Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00%**
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	9	9	0	100.00%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)				**20.00%**
	B. Jumlah Mutu (Barang / Jasa / SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	**100.00%**
	1. Respon Cepat Darurat Bencana	0	0	0	100.00%
	a. Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	82	82	0	100.00%
	b. Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	7	7	0	100.00%
	2. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	0	0	0	100.00%
	a. Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	0	100.00%
	b. Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	522	522	0	100.00%
	c. Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	7	7	0	100.00%
	d. Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	8	8	0	100.00%
	e. Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)	8	8	0	100.00%
	f. Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	7	7	0	100.00%
	g. Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	6	6	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Capaian
	h. Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	38	38	0	100.00%

4.7.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja yang ditetapkan dalam APBD untuk penerapan dan pencapaian SPM Sub Urusan Kebencanaan oleh Pemerintahan Daerah. Adapun besaran anggaran yang dialokasikan dan realisasinya pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Sumber Pendanan

Tabel 4.40
Sumber Pendanaan Penerapan SPM Sub Urusan Kebencanaan

No	Pendanaan		Pagu Anggaran
1	APBD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025		3,043,575,799,749
2	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah		6.594,904,242
3	Alokasi Anggaran Penerapan SPM pada Satker Perangkat Daerah		2.520.922.800
	APBD		2.520.922.800
	a.	APBD Murni	0
	b.	APBD DAU	2.520.922.800
	c.	APBD DAK Fisik	0
	d.	APBD DAK Non Fisik	0
	e.	Dana Bagi Hasil	0
	f.	Kerja Sama	0
	g.	Otonomi Khusus	0
	NON APBD		**0**
	a.	Corporate Social Responsibility (CSR)	0
	APBN		**0**
	a.	APBN Dekonsentrasi	0
	b.	APBN Tugas Pembantuan	0
	DANA LAINNYA		**0**

b. Rincian Anggaran

Tabel 4.41
Rincian Anggaran Penerapan SPM Sub Urusan Kebencanaan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran	Realisasi	%
1	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)**		**2,520,922,800**	**2,308,782,539**	**91.58%**
	1	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**42,673,550**	**42,373,050**	**99.30%**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran	Realisasi	%
		1	Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	0	0	0%
		2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	42,673,550	42,373,050	99.30%
	2	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**		**1,600,668,400**	**1,535,862,722**	**95.95%**
		1	Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	0	0	0%
		2	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	0	0	0%
		3	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	0	0	0%
		4	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0	0	0%
		5	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	0	0	0%
		6	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	0	0	0%
		7	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	0	0	0%
		8	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	1,199,888,000	1,142,963,933	95.26%
		9	Penyusunan rencana kontijensi	0	0	0%
		10	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	68,098,800	66,960,549	98.33%
		11	Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	0	0	0%
		12	Pelatihan keluarga tanggap bencana alam	0	0	0%
		13	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	34,876,600	34,450,500	98.78%
		14	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	0	0	0%
		15	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	81,370,000	76,240,000	93.70%
		16	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	216,435,000	215,247,740	99.45%
		17	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	0	0	0%
	3	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**		**333,794,750**	**271,285,676**	**81.27%**
		1	Respon cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas	0	0	0%
		2	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	40,324,500	0	0%
		3	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	44,717,750	43,399,741	97.05%
		4	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	0	0	0%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran	Realisasi	%
		5	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota	0	0	0%
		6	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	228,777,500	221,837,175	96.97%
		7	Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit	0	0	0%
		8	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	19,975,000	6,048,760	30.28%
	4	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**		**543,786,100**	**459,261,091**	**84.46%**
		1	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	0	0	0%
		2	Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota	37,480,700	36,867,191	98.36%
		3	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	68,380,400	55,393,900	81.01%
		4	Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	0	0	0%
		5	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	0	0	0%
		6	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	0	0	0%
		7	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	0	0	0%
		8	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	0	0	0%
		9	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	0	0	0%
		10	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	437,925,000	367,000,000	83.80%
		11	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usahadalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	0	0	0%
		12	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	0	0	0%
		13	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	0	0	0%

Sumber data : Laporan Realisasi Anggaran TA 2025 (Unaudited)

4.7.5 Dukungan Personil

Jumlah pegawai di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 sebanyak 52 orang dengan rincian :

a) ASN : 17 orang

b) THL Tenaga Penanganan Bencana : 35 orang

Tabel 4.42
Data ASN Menurut Jenis Jabatan

No	Perangkat Daerah	Jabatan Struktural	Jabatan Fungsional Tertentu	Jabatan Fungsional Umum
1	BPBD	6	4	7
Total Pegawai		17		

Tabel 4.43
Data ASN Menurut Jenjang Pendidikan Terakhir

No	Perangkat Daerah	Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan Terakhir					
		SD	SMP	SMA	DIII	S1	S2
1	BPBD	0	0	3	1	12	1
Total Pegawai		17					

4.7.5 Permasalahan dan Solusi

Dalam penerapan SPM oleh BPBD Kabupaten Nganjuk masih terdapat beberapa masalah dan kendala yaitu dukungan anggaran melalui APBD berkaitan dengan pemenuhan SPM terbatas sehingga banyak kegiatan yang menunjang untuk pencapaian SPM ditiadakan.

Berdasarkan pada permasalahan tersebut, maka solusi dan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan pemenuhan standar pelayanan minimal sub urusan bencana adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Kajian Resiko Bencana harus segera dilegalitaskan sebagai dasar untuk mengoptimalkan dan menyelaraskan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Nganjuk.
2. Perlunya perhatian khusus dari Kepala Daerah dengan dibantu Bappeda untuk merencanakan alokasi anggaran SPM sesuai aturan yang berlaku karena BPBD berkewajiban melakukan penerapan SPM sub urusan bencana yang dijamin pelaksanaannya dan sanksinya sesuai amanat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Pasal 20 yaitu Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang tidak melaksanakan SPM dijatuhi sanksi administratif.
3. Harus membangun kerjasama lintas sektoral untuk optimalisasi penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sub Urusan Bencana.
4. Indikator dan formula pelayanan SPM bisa ditetapkan sendiri pada awal tahun perencanaan sehingga penetapan target bisa menyesuaikan APBD yang ada, yang pada akhirnya capaian kinerja pada tahun tersebut dapat terukur maksimal.

5. Sub kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota realisasi anggaran tidak terlaksana dikarenakan tidak terjadi bencana kekeringan pada tahun 2025.

4.8 URUSAN SOSIAL

4.8.1 Jenis Pelayanan Dasar

Sebagaimana amanah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, bahwa pelayanan dasar yang diwajibkan untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial
   Kriteria penerima layanan rehabilitasi adalah sebagai berikut :
   1) Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus; dan
   2) Masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus.
b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial
   Kriteria penerima layanan rehabilitasi adalah sebagai berikut :
   1) Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus; dan
   2) Masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus.
c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial
   Kriteria penerima layanan rehabilitasi adalah sebagai berikut :
   1) Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus; dan
   2) Masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus.
d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial.
   Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis dilakukan terhadap kepala keluarga, istri/suami, dan anaknya. Kriteria penerima layanan rehabilitasi adalah sebagai berikut :
   1) Perseorangan atau kepala keluarga berusia 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;
   2) Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus;
   3) Tidak memiliki tempat tinggal tetap; dan

4) Masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang peduli.

e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota.

Kriteria penerima layanan rehabilitasi per satu kali kejadian bencana adalah sebagai berikut :

1) Jumlah pengungsi/penyintas sebanyak 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) orang;
2) Dampak bencana meliputi 1 (satu) daerah kabupaten/kota; dan/atau
3) Adanya surat penetapan bencana dari bupati/wali kota.

Berdasarkan pada uraian di atas, Pemerintah Kabupaten Nganjuk secara berkala melaksanakan pemenuhan standar pelayanan minimal tersebut dengan merencanakan, menganggarkan, melaksanakan serta mengevaluasi implementasi program, kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan SPM bidang sosial.

4.8.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, bahwa dalam rangka pemenuhan capaian SPM Bidang Sosial diperlukan penetapan target pada awal perencanaan Tahun 2025. Penetapan target tersebut difungsikan sebagai langkah awal perencanaan serta pengukuran atas kemampuan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam mewujudkan capaian standar pelayanan minimal bidang Sosial. Adapun penetapan target SPM sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut:

Tabel 4.44
Target Pencapaian SPM Bidang Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tahun 2025	
			Target Kinerja	Alokasi Anggaran
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	100%	Rp. 555,199,800

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tahun 2025	
			Target Kinerja	Alokasi Anggaran
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	Jumlah Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	100%	
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	100%	
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Jumlah Warga Negara Gelandangan dan Pengemis yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial di Luar Panti	100%	
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	100%	Rp. 67,032,600

Dalam penetapan target pencapaian sebagaimana yang disebutkan di atas, perlu didukung oleh beberapa instrumen dan indikator pengukuran yang spesifik dan terukur. Oleh sebab itu, diperlukan aturan teknis dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang mengiringi regulasi tersebut. Dalam rangka mewujudkan pencapaian target SPM bidang sosial yang optimal, Kementerian Sosial telah menetapkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada standar Pelayanan Mininal Bidang Sosial di daerah Provinsi dan di daerah Kabupaten/Kota, menjelaskan bahwa terdapat beberapa standarisasi yang perlu diterapkan oleh Dinas Sosial dalam memenuhi kriteria standar pelayanan minimal. Standarisasi tersebut terdiri dari standar teknis pembiayaan pemenuhan pelayanan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana.

4.8.3 Realisasi

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial menjadi salah satu bagian terpenting dalam mewujudkan *good governance* dan *good goverment* di Kabupaten Nganjuk. Menciptakan sebuah tatanan pemerintahan yang transparan, akuntabel, adil dan merata dapat terwujud secara komprehensif dengan berupaya mencapai keberhasilan atas kinerja dari setiap urusan penyelenggara pemerintahan termasuk urusan bidang sosial. Oleh

sebab itu, standar pelayanan minimal bidang sosial hadir sebagai tolok ukur perwujudan sinergitas atas layanan pemerintah kepada masyarakat di bidang sosial. Berikut kami tampilkan pengukuran pencapaian kinerja standar pelayanan minimal bidang sosial :

Tabel 4.45
Capaian SPM Bidang Sosial Atas Standar Jumlah dan Kualitas Barang/Jasa

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	**TUNTAS UTAMA**			**98.05%**
1.	***Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti***				***99.85%***
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	400	400	0	100%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)				**19.85%**
	B. Jumlah Mutu (Barang / Jasa / SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi**	**99.23%**
	1. Layanan data dan pengaduan (orang)	400	400	0	100.00%
	2. Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat (orang)	400	400	0	100.00%
	3. Penyediaan permakanan (orang)	354	354	0	100.00%
	4. Penyediaan sandang (orang)	150	147	3	98.00%
	5. Penyediaan alat bantu (orang)	150	150	0	100.00%
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan (orang)	150	147	3	98.00%
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial (orang)	400	400	0	100.00%
	8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas terlantar (orang)	400	400	0	100.00%
	9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK (orang)	400	400	0	100.00%
	10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (orang)	150	147	3	98.00%
	11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (orang)	400	400	0	100.00%
	12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (orang)	150	147	3	98.00%
	13. Layanan rujukan (orang)	150	147	3	98.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
2.	***Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti***				***100.00%***
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Jumlah Yang Belum Terlayani**	**80.00%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	5.000	5.000	0	100%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)				**20.00%**
	B. Jumlah Mutu (Barang / Jasa / SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi**	100.00%
	1. Layanan data dan pengaduan (orang)	5.000	5.000	0	100.00%
	2. Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat (orang)	5.000	5.000	0	100.00%
	3. Penyediaan permakanan (orang)	5.000	5.000	0	100.00%
	4. Penyediaan sandang (orang)	5.000	5.000	0	100.00%
	5. Penyediaan perbekalan kesehatan (orang)	5.000	5.000	0	100.00%
	6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial (orang)	5.000	5.000	0	100.00%
	7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar (orang)	5.000	5.000	0	100.00%
	8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK (orang)	5.000	5.000	0	100.00%
	9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (orang)	5.000	5.000	0	100.00%
	10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (orang)	5.000	5.000	0	100.00%
	11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (orang)	5.000	5.000	0	100.00%
	12. Layanan rujukan (orang)	5.000	5.000	0	100.00%
3.	***Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti***				***97.33 %***
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**79.93%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	2.250	2.248	2	99.91 %
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)				**17.41%**
	B. Jumlah Mutu (Barang / Jasa / SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi**	**87.03%**

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	1. Layanan data dan pengaduan (orang)	2.250	2.248	2	99.91 %
	2. Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat (orang)	2.250	2.248	2	99.91 %
	3. Penyediaan permakanan (orang)	2.250	2.248	2	99.91 %
	4. Penyediaan sandang (orang)	75	54	21	72.00%
	5. Penyediaan alat bantu (orang)	75	54	21	72.00%
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan (orang)	75	54	21	72.00%
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial (orang)	2.250	2.248	2	99.91 %
	8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas terlantar (orang)	2.250	2.248	2	99.91 %
	9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK (orang)	2.250	2.248	2	99.91 %
	10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (orang)	75	54	21	72.00%
	11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (orang)	2.250	2.248	2	99.91 %
	12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (orang)	75	54	21	72.00%
	13. Layanan rujukan (orang)	75	54	21	72.00%
4.	***Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti***				***99.36%***
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	85	85	0	100%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)				**19.36%**
	B. Jumlah Mutu (Barang / Jasa / SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi**	**100.00%**
	1. Layanan data dan pengaduan (orang)	85	85	0	100%
	2. Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat (orang)	85	85	0	100%
	3. Penyediaan permakanan (orang)	75	75	0	100.00%
	4. Penyediaan sandang (orang)	75	75	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	5. Penyediaan perbekalan kesehatan (orang)	50	50	0	100.00%
	6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial (orang)	85	85	0	100%
	7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis (orang)	85	85	0	100%
	8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan (orang)	85	85	0	100%
	9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (orang)	60	60	0	100.00%
	10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (orang)	85	85	0	100%
	11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (orang)	60	60	0	100.00%
	12. Layanan rujukan (orang)	60	60	0	100.00%
5.	***Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota***				***93.72%***
Ya Terjadi Bencana					
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Jumlah Yang Belum Terlayani**	**75.15%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	775	728	47	93.94%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)				**18.57%**
	B. Jumlah Mutu (Barang / Jasa / SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi**	**92.85%**
	1. Penyediaan permakanan (orang)	400	385	15	96.25%
	2. Penyediaan sandang (orang)	100	100	0	100.00%
	3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi (orang)	75	75	0	100.00%
	4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan (orang)	100	68	32	68.00 %
	5. Pelayanan dukungan Psikososial (orang)	100	100	0	100.00%

Sumber data : e-SPM Kementerian Dalam Negeri

Pencapaian terhadap pengukuran standar pelayanan minimal bidang sosial secara umum telah menunjukkan capaian keberhasilan yang cukup tinggi bagi Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Namun hal tersebut masih menyisakan beberapa hal yang memerlukan pemecahan permasalahan, antara lain berkaitan dengan realisasi atas standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

4.8.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja yang ditetapkan dalam APBD untuk penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial oleh Pemerintahan Daerah. Adapun besaran anggaran yang dialokasikan dan realisasinya pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Sumber Pendanaan

Tabel 4.46
Sumber Pendanaan Penerapan SPM Bidang Sosial

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KAB. NGANJUK	3,043,575,799,749
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	23,733,163,929
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	16,630,989,656
	APBD	15,834,244,200
	A. APBD MURNI	0
	B. APBD DAU	8,911,444,200
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	6,922,800,000
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	796,745,456

b. Rincian Penganggaran

Tabel 4.47
Rincian Anggaran Penerapan SPM Bidang Sosial

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran	Realisasi	Serapan
	BIDANG SOSIAL			**16,630,989,656**	**13,522,587,859**	**81.31%**
1	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**			**622,232,400**	**601,230,036**	**96.62%**
	1	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**		**555,199,800**	**540,575,286**	**97.37%**
		1	Penyediaan permakanan	0	0	0%
		2	Penyediaan sandang	0	0	0%
		3	Penyediaan alat bantu	0	0	0%
		4	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	0	0	0%
		5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	29,988,800	16,330,000	54.45%
		6	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	525,211,000	524,245,286	95.25%
		7	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	0	0	0%
		8	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	0	0	0%
		9	Pemberian layanan data dan pengaduan	0	0	0%
		10	Pemberian layanan kedaruratan	0	0	0%
		11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	0	0	0%
		12	Pemberian layanan rujukan	0	0	0%
	2	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**		**67,032,600**	**60,654,750**	**90.49%**
		1	Penyediaan makanan	67,032,600	60,654,750	90.49%
		2	Penyediaan sandang	0	0	0%
		3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	0	0	0%
		4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	0	0	0%
		5	Pelayanan dukungan Psikososial	0	0	0%
2	**PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA**					
		1	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	1,283,757,650	848,588,619	66.10%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran	Realisasi	Serapan
		2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	13,632,086,700	11,789,856,704	86.49%
		3	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	296,167,450	282,912,500	95.52%
3	**ALOKASI ANGGARAN PADA PENERAPAN SPM YANG BERSUMBER DANA LAINNYA (*SENTRA TERPADU KARTINI TEMANGGUNG DAN DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR*)**			**796.745.456**	**796.745.456**	**100%**

Sumber data : Laporan Realisasi Anggaran TA 2025 (Unaudited)

4.8.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM. Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM pada Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.48
Data ASN Menurut Jenis Jabatan

No	Perangkat Daerah	Jabatan Struktural	Jabatan Fungsional Tertentu	Jabatan Fungsional Umum	Jabatan Pelaksana
1	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5	8	4	35
Total Pegawai		**52**			

Tabel 4.49
Data ASN Menurut Jenjang Pendidikan Terakhir

No	Perangkat Daerah	Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan Terakhir					
		SD	SMP	SMA	DIII	S1	S2
1	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	1	10	1	35	5
Total Pegawai		**52**					

4.8.6 Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang Sosial di Kabupaten Nganjuk, masih mengalami beberapa kendala dan permasalahan. Adapun permasalahan dan kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Dukungan anggaran melalui APBD berkaitan dengan pemenuhan SPM terbatas;
2. Validitas data PMKS/PPKS belum akuntabel;
3. Sarana dan prasarana untuk pelayanan Rehabilitasi Sosial di luar panti masih kurang;
4. Jumlah SDM dalam Penanganan Kasus PMKS/PPKS maupun SPM masih kurang;
5. Pemberian bantuan kepada PMKS/ PPKS masih seputar bantuan untuk kebutuhan dasar ataupun rehabilitasi, hal ini belum bisa menyentuh substansi dari pengentasan permasalahan/kemiskinan hingga tuntas.

Berdasarkan pada permasalahan tersebut, maka dapat diberikan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan pemenuhan standar pelayanan minimal adalah sebagai berikut:

1. Membangun data yang berkualitas dan Melaksanakan Integrasi Aplikasi Data Pokok Kependudukan;
2. Membangun kerjasama lintas sektoral untuk optimalisasi penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial;
3. Peningkatan Sarana & Prasarana layanan Rehabilitasi Sosial;
4. Perlu dilakukan monitoring dan pendataan yang lebih rinci terhadap efektivitas program/kegiatan yang dilakukan untuk penanganan PMKS/ PPKS untuk dicari kendala dan masalahnya sebagai bahan evaluasi untuk kebijakan yang akan datang;
5. Pemberian bantuan diharapkan dapat berupa sebuah bantuan kontinuitas untuk PMKS/ PPKS yang tidak mempunyai potensi. Sedangkan yang mempunyai potensi bisa berupa pemberian keterampilan, bimbingan dan modal untuk usaha, ataupun pembukaan lapangan kerja yang bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja.

4.9 PROGRAM DAN KEGIATAN

4.9.1 Bidang Pendidikan

Dalam menunjang terlaksananya penerapan SPM Bidang Pendidikan, maka perlu didukung dengan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Pendidikan

Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
DINAS PENDIDIKAN

Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Mebel
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Mebel
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) K20240327112412
Angka Partisipasi Sekolah
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
Pembangunan Ruang Kelas Baru
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
Kekhususan PAUD
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
Pengembangan konten digital untuk pendidikan
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) K20240327110629
Angka Partisipasi Sekolah
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD / Sekolah Dasar / Sekolah Menengah Pertama / Nonformal/Kesetaraan
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
Pembangunan Ruang Kelas Baru
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
Literasi
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan

Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Pengembangan konten digital untuk pendidikan
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
Numerasi
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
Pengembangan konten digital untuk pendidikan
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
Keamanan
Pengembangan konten digital untuk pendidikan
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
Kebhinekaan
Pengembangan konten digital untuk pendidikan
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
Inklusifitas
Pengembangan konten digital untuk pendidikan
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah

Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) K20240327110647
Angka Partisipasi Sekolah
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
Pembangunan Ruang Kelas Baru
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
Literasi
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
Pengembangan konten digital untuk pendidikan
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
Numerasi
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
Pengembangan konten digital untuk pendidikan
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
Keamanan

Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Pengembangan konten digital untuk pendidikan
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
Kebhinekaan
Pengembangan konten digital untuk pendidikan
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
Inklusifitas
Pengembangan konten digital untuk pendidikan
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
Pendidikan Kesetaraan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan K20250805052437
Angka Partisipasi Sekolah
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah K20250807081842
Literasi
Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota
Numerasi
Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota

4.9.2 Bidang Kesehatan

Dalam menunjang terlaksananya penerapan SPM Bidang Kesehatan, maka perlu didukung dengan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 451
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan SPM Bidang Kesehatan

Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
DINAS KESEHATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pengadaan Mebel
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Pembangunan Puskesmas
Pengembangan Puskesmas
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetus Melitus
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga

Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
Pengambilan dan pengiriman spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria
Pengelolaan Kawasan tanpa rokok
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
RSD NGANJUK
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Peningkatan Pelayanan BLUD
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
RSD KERTOSONO
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Peningkatan Pelayanan BLUD
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Pengembangan Rumah Sakit
PUSKESMAS BAGOR
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Peningkatan Pelayanan BLUD
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Operasional Pelayanan Puskesmas
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan
Pengelolaan Layanan Imunisasi

Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
PUSKESMAS BARON
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Peningkatan Pelayanan BLUD
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Operasional Pelayanan Puskesmas
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan
Pengelolaan Layanan Imunisasi
PUSKESMAS BERBEK
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Peningkatan Pelayanan BLUD
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Operasional Pelayanan Puskesmas
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan
Pengelolaan Layanan Imunisasi
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
PUSKESMAS GONDANG
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Peningkatan Pelayanan BLUD
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Operasional Pelayanan Puskesmas
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan
Pengelolaan Layanan Imunisasi
PUSKESMAS JATIKALEN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Peningkatan Pelayanan BLUD
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Operasional Pelayanan Puskesmas
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan
Pengelolaan Layanan Imunisasi
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
PUSKESMAS KERTOSONO
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Peningkatan Pelayanan BLUD

Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Operasional Pelayanan Puskesmas
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan
Pengelolaan Layanan Imunisasi
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
PUSKESMAS LENGKONG
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Peningkatan Pelayanan BLUD
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan
Pengelolaan Layanan Imunisasi
PUSKESMAS LOCERET
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional

Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria
Operasional Pelayanan Puskesmas
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
PUSKESMAS NGANJUK
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Peningkatan Pelayanan BLUD
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Operasional Pelayanan Puskesmas
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan
Pengelolaan Layanan Imunisasi
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
PUSKESMAS NGETOS
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Peningkatan Pelayanan BLUD
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Operasional Pelayanan Puskesmas
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
Pengelolaan Layanan Imunisasi
PUSKESMAS NGLUYU
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Peningkatan Pelayanan BLUD
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Operasional Pelayanan Puskesmas
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan
Pengelolaan Layanan Imunisasi
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
PUSKESMAS NGRONGGOT
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Peningkatan Pelayanan BLUD
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Operasional Pelayanan Puskesmas
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi

Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan
Pengelolaan Layanan Imunisasi
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
PUSKESMAS PACE
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Peningkatan Pelayanan BLUD
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Operasional Pelayanan Puskesmas
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan
Pengelolaan Layanan Imunisasi
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
PUSKESMAS PATIANROWO

Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Peningkatan Pelayanan BLUD
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Operasional Pelayanan Puskesmas
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan
Pengelolaan Layanan Imunisasi
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
PUSKESMAS PRAMBON
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Peningkatan Pelayanan BLUD
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Operasional Pelayanan Puskesmas
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan
Pengelolaan Layanan Imunisasi
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
PUSKESMAS REJOSO
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Peningkatan Pelayanan BLUD
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Operasional Pelayanan Puskesmas
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan
Pengelolaan Layanan Imunisasi
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
PUSKESMAS SAWAHAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Peningkatan Pelayanan BLUD
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Operasional Pelayanan Puskesmas
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan
Pengelolaan Layanan Imunisasi
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
PUSKESMAS SUKOMORO
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Peningkatan Pelayanan BLUD
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Operasional Pelayanan Puskesmas
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan
Pengelolaan Layanan Imunisasi
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
PUSKESMAS TANJUNGANOM
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Peningkatan Pelayanan BLUD
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Operasional Pelayanan Puskesmas
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan
Pengelolaan Layanan Imunisasi
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
PUSKESMAS WILANGAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Peningkatan Pelayanan BLUD
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Operasional Pelayanan Puskesmas
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan
Pengelolaan Layanan Imunisasi
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

4.9.3 Bidang Pekerjaan Umum

Dalam menunjang terlaksananya penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum, maka perlu didukung dengan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4.52
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan SPM Bidang Pekerjaan Umum

Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Alat Besar
Pengadaan Mebel
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen LingkunganHidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
Normalisasi/Restorasi Sungai
Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
Rehabilitasi Bendung Irigasi

Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi
Operasional Unit Pengelola Irigasi
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3r/TPS
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota
Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan
Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota

Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Penataan Bangunan dan Lingkungan
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
Pelebaran Jembatan
Rehabilitasi Jembatan
Pemeliharaan Rutin Jembatan
Rekonstruksi Jalan Strategis Desa
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
Pengelolaan Leger Jalan
Survei Kondisi Jalan/Jembatan
Pembangunan Jalan
Pelebaran Jalan Menambah Lajur
Rekonstruksi Jalan
Rehabilitasi Jalan
Pemeliharaan Berkala Jalan
Pemeliharaan Rutin Jalan
Pembangunan Jembatan
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

4.9.4 Bidang Perumahan Rakyat

Dalam menunjang terlaksananya penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat, maka perlu didukung dengan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4.53
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan SPM Bidang Perumahan Rakyat

Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN

Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Mebel
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
Pembangunan Jalan
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota
Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/kota atau Rekolasi Program Kabupaten/Kota
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan

Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam daerah Kabupaten/Kota
Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota

4.9.5 Bidang Trantibumlinmas

a. Ketentraman dan Ketertiban

Dalam menunjang terlaksananya penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas (Ketentraman dan Ketertiban), maka perlu didukung dengan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 4.54
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan SPM Bidang Trantibumlinmas (Ketentraman dan Ketertiban)

Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggara, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dukumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dukumen RKA SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dukumen Perubahan RKA SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan barang cetak dan penggandaan
Penyediaan bahan bacaan perundang-undangan
Fasilitas Kunjungan Tamu
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan Aset Tetap lainnya
PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten
Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota
Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum
Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia

Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum
Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional
Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP
Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas
Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa
Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum
Penegakan Peraturan Daerah kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan PeraturanKepala Daerah
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)
Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah
Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah

Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota
Pembentukan Sekretariat PPNS
Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah
Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah
Dukungan Operasional Sekretariat PPNS
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

b. Bidang Kebencanaan

Dalam menunjang terlaksananya penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas (Kebencanaan), maka perlu didukung dengan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 4.55
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan SPM Bidang Trantibumlinmas (Kebencanaan)

Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Mebel
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota
Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan
Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana
Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
Penyusunan rencana kontijensi
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Respon cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit
Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota
Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota
Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota
Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana
Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota
Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usahadalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota
Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota

c. Bidang Kebakaran

Dalam menunjang terlaksananya penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas (Kebakaran), maka perlu didukung dengan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 4.56
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan SPM Bidang Trantibumlinmas (Kebakaran)

Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
Penyusunan Dukumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dukumen RKA SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dukumen Perubahan RKA SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dukumen Perubahan DPA SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Adminitrasi Kepegawaian perangkat daerah
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
Adminitrasi umum perangkat daerah
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan barang cetak dan penggandaan
Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan
Fasilitas Kunjungan Tamu
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah
Pengadaan Mabel
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota
Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri
Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)
Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangann Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)
Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran
Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)
Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran
Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran
Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri
Penyelenggaraan Kerja Sama Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pencagahan , Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran
Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran
Investigasi kejadian kebakaran
Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana

Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia
Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahyakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
Pembinaan Aparatur Pencarian Pertolongan terhadapkondisi membahayakan Manusia Penyelamatan dan Evakuasi

4.9.6 Bidang Sosial

Dalam menunjang terlaksananya penerapan SPM Bidang Sosial, maka perlu didukung dengan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 4.57
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan SPM Bidang Sosial

Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Mebel
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
Penyediaan permakanan
Penyediaan sandang
Penyediaan alat bantu
Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
Pemberian Layanan Kedaruratan
Pemberian pelayanan penelusuran keluarga
Pemberian layanan rujukan
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Penyediaan makanan
Penyediaan sandang
Penyediaan tempat penampungan pengungsi
Penanganan khusus bagi kelompok rentan
Pelayanan dukungan Psikososial
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
Penyediaan Permakanan
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
PROGRAM PENANGANAN BENCANA
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
Penyediaan Makanan
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota

Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota

BAB V
PENUTUP

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah melalui berbagai program dan kegiatan merupakan wujud nyata pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk, yang terdiri atas 24 (dua puluh empat) urusan wajib, 5 (lima) urusan pilihan, dan 8 (delapan) fungsi penunjang urusan pemerintahan serta pelaksanaan tugas pembantuan.

Berdasarkan hasil capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2025, secara umum mencapai kinerja yang baik. Semua ini tidak terlepas dari partisipasi aktif seluruh komponen Pemerintah Kabupaten Nganjuk mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dukungan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA), Stakeholders yang menjadi mitra kerja dan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Nganjuk.

Namun, masih terdapat beberapa kendala dan hambatan yang menyebabkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah belum optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari aspek sumber daya manusia, sarana prasarana, regulasi maupun anggaran. Setiap perangkat daerah diharapkan mampu mendokumentasikan dengan baik seluruh data yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, termasuk Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan dokumen pendukung lainnya.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2025 ini disusun untuk memenuhi pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Harapan kami, laporan ini dapat menjadi referensi dan bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan di tahun yang akan datang.